RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD TAHUN 2025

PEMERINTAH
KOTA PALOPO
SUL-SEL, INDONESIA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024



WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palopo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 11);
8. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palopo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota Palopo untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rancangan keuangan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah atas persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

(1) RKPD merupakan dokumen penjabaran RPD.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan pedoman penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun 2025.

Pasal 3

(1) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
    a. pendahuluan;
    b. gambaran umum kondisi Daerah;
    c. kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
    d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
    e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
    f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
    g. penutup.
(2) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD;
    b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD; dan
    c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD.
(3) Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

Pasal 5

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam hal berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
(2) Ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
    b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 4 Juli 2024

PJ. WALI KOTA PALOPO,

ASRUL SANI

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 4 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

FIRMANZA DP

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2024 NOMOR 49

DAFTAR ISI

Peraturan Wali Kota Palopo i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv
Daftar Grafik v

BAB. I PENDAHULUAN ..... BAB I

1.1. Latar Belakang ..... Hal 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... Hal 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... Hal 4
1.4. Maksud dan Tujuan ..... Hal 5
1.5. Sistematika Dokumen RKPD ..... Hal 5

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... BAB II

2.1. Kondisi Umum Daerah ..... Hal 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... Hal 1
2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah ..... Hal 1
2.1.1.2 Rencana Struktur Ruang ..... Hal 7
2.1.1.2.1 Kondisi Topografi ..... Hal 9
2.1.1.2.2 Keadaan Iklim ..... Hal 9
2.1.1.2.3 Kondisi Geologi ..... Hal 10
2.1.1.2.4 Kondisi Hidrologi ..... Hal 10
2.1.1.2.5 Penggunaan Lahan ..... Hal 11
2.1.1.2.6 Potensi Pengembangan Wilaya ..... Hal 11
2.1.1.2.7 Perwujudan Infrastruktur Perkotaan ..... Hal 13
2.1.1.2.8 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ..... Hal 19
2.1.1.2.9 Wilayah Rawan Bencana ..... Hal 20
2.1.1.3 Kondisi Demografi Wilayah ..... Hal 21
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... Hal 23
2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... Hal 23
2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi ..... Hal 23
2.1.2.1.2 Inflasi ..... Hal 25
2.1.2.1.3 Persentase Penduduk Miskin ..... Hal 26
2.1.2.1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ..... Hal 29
2.1.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka ..... Hal 29
2.1.2.1.6 Gini Rasio ..... Hal 31
2.1.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ..... Hal 31
2.1.2.1.8 Angka Rata – Rata Lama Sekolah ..... Hal 32
2.1.2.1.9 Angka Harapan Lama Sekolah ..... Hal 33
2.1.2.1.10 Angka Harapan Hidup (AHH) ..... Hal 33
2.1.2.1.11 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I ..... Hal 33
2.1.2.1.12 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga ..... Hal 33
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ..... Hal 34
2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib ..... Hal 34
2.1.3.1.1 Bidang Urusan Pendidikan ..... Hal 34
2.1.3.1.2 Bidang Urusan Kesehatan ..... Hal 42
2.1.3.1.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... Hal 60
2.1.3.1.4 Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman ..... Hal 68
2.1.3.1.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ..... Hal 71
2.1.3.1.6 Bidang Urusan Sosial ..... Hal 73

2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar ..... Hal 77
2.1.3.2.1 Bidang Urusan Tenaga Kerja ..... Hal 77
2.1.3.2.2 Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... Hal 81
2.1.3.2.3 Bidang Urusan Pertanahan ..... Hal 84
2.1.3.2.4 Bidang Urusan Lingkungan Hidup ..... Hal 85
2.1.3.2.5 Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... Hal 91
2.1.3.2.6 Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dna Kelurahan ..... Hal 93
2.1.3.2.7 Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..... Hal 94
2.1.3.2.8 Bidang Urusan Perhubungan ..... Hal 104
2.1.3.2.9 Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika ..... Hal 107
2.1.3.2.10 Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ..... Hal 108
2.1.3.2.11 Bidang Urusan Penanaman Modal ..... Hal 109
2.1.3.2.12 Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga ..... Hal 111
2.1.3.2.13 Bidang Urusan Statistik ..... Hal 113
2.1.3.2.14 Bidang Urusan Persandian ..... Hal 114
2.1.3.2.15 Bidang Urusan Kebudayaan ..... Hal 115
2.1.3.2.16 Bidang Urusan Perpustakaan ..... Hal 116
2.1.3.2.17 Bidang Urusan Kearsipan ..... Hal 118
2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan ..... Hal 119
2.1.3.3.1 Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan ..... Hal 119
2.1.3.3.2 Bidang Urusan Pariwisata ..... Hal 121
2.1.3.3.3 Bidang Urusan Pertanian ..... Hal 122
2.1.3.3.4 Bidang Urusan Perdagangan ..... Hal 123
2.1.3.3.5 Bidang Urusan Transmigrasi ..... Hal 124
2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan ..... Hal 124
2.1.3.4.1 Sekretariat DPRD ..... Hal 124
2.1.3.4.2 Sekretariat Daerah ..... Hal 125
2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan ..... Hal 125
2.1.3.5.1 Bidang Urusan Perencanaan ..... Hal 125
2.1.3.5.2 Bidang Urusan Keuangan ..... Hal 127
2.1.3.5.3 Bidang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ..... Hal 131
2.1.3.5.4 Bidang Urusan Penelitiandan Pengembangan ..... Hal 133
2.1.3.6 Bidang Urusan Pengawasan ..... Hal 134
2.1.3.6.1 Inspektorat ..... Hal 134
2.1.3.6.2 Indeks Reformasi Birokrasi (nilai) ..... Hal 135
2.1.3.7 Indikator Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan ..... Hal 135
2.1.3.7.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Publik ..... Hal 135
2.1.3.7.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Palopo ..... Hal 135
2.1.3.7.3 Predikat Capaian Kinerja SAKIP Pemerintah ..... Hal 136
2.1.3.7.4 Nilai Evaluasi LPPD ..... Hal 136
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ..... Hal 137
2.1.4.1 Daya Ekonomi Daerah ..... Hal 137
2.1.4.1.1 PDRB per Kapita ..... Hal 137
2.1.4.1.2 Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Per Kapita ..... Hal 137
2.1.4.1.3 Produktivitas Total Daerah ..... Hal 138
2.1.4.1.4 Ekspor Barang dan Jasa ..... Hal 138
2.1.4.1.5 Rasio Kewirausahaan ..... Hal 139
2.1.4.2 Daya Saing Infrastruktur ..... Hal 139
2.1.4.2.1 Statistik Kondisi Jalan ..... Hal 139

2.1.4.2.2 Rasio Ketersediaan Listrik ..... Hal 140
2.1.4.2.3 Statistik Konsumsi Air ..... Hal 140
2.1.4.2.4 Infrastruktur Komunikasi ..... Hal 140
2.1.4.3 Daya Saing Iklim Berinvestasi ..... Hal 140
2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas yang Tertangani ..... Hal 140
2.1.4.3.2 Rasio Ketergantungan ..... Hal 141
2.1.4.3.3 Rasio Lulusan S1/S2/S3 ..... Hal 141
2.2. Evalausi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPD ..... Hal 141
2.2.1 Kesesuaian Program danKegiatan Tahun 2023 ..... Hal 141
2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2022 ..... Hal 150
2.2.3 Evaluasi Capaian Kinerja RKPD ..... Hal 155
2.2.4 Evaluasi Capaian SPM ..... Hal 158
2.2.5 Evaluasi Capaian Kinerja SDG's/TPB ..... Hal 160
2.2.6 Evaluasi Capaian IKK Bidang Urusan Daerah ..... Hal 172
2.2.7 Evaluasi Capaian IKU ..... Hal 189
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ..... Hal 190
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan ..... Hal 190
2.3.2 Indentifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ..... Hal 192
2.3.3 Isu Strategis ..... Hal 198

BAB. III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ..... BAB III Hal 1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... Hal 1
3.1.1. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah ..... Hal 6
3.1.1.1 Prospek Perekonomian Kota Palopo ..... Hal 6
3.1.1.2 Tantangan Perekonomian ..... Hal 7
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... Hal 10
3.2.1 .Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... Hal 10
3.2.1.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kota Palopo Tahun 2025 ..... Hal 10
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... Hal 14
3.2.3 Pembiayaan Daerah ..... Hal 26
3.2.4. Pembiayaan Pembangunan Daerah Non Pemerintah ..... Hal 29

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ..... BAB IV

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... Hal 1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan ..... Hal 2
4.2.1. Prioritas Pambangunan Nasional Tahun 2025 ..... Hal 2
4.2.1.1. Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... Hal 4
4.2.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... Hal 5
4.2.2. Prioritas Pambangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025 ..... Hal 8
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2025 ..... Hal 10
4.3. Keselarasan Pembangunan Nasional, Provinsi Sulsel dan Kota Palopo ..... Hal 18
4.4. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Palopo ..... Hal 41

BAB. V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... Hal 1

5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2025 ..... Hal 1
5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... Hal 3
5.3 Rencana Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 ..... Hal 17

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... Hal 1

6.1 Indikator Makro Pembangunan ..... Hal 1
6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... Hal 3
6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) ..... Hal 4
6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... Hal 40
6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) ..... Hal 43

BAB. VII P E N U T U P ..... Hal 1

7.1 Kaidah Pelaksanaan ..... Hal 1
7.2. Kesimpulan ..... Hal 2

DAFTAR TABEL

BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Tabel 2.1	Luas Wilayah Administrasi Kota Palopo Menurut Kecamatan	Hal 1
Tabel 2.2	Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Kemiringan Lereng	Hal 1
Tabel 2.3	Kondisi Topografi Kota Palopo Menurut Kecamatan	Hal 2
Tabel 2.4	Penggunaan Lahan di Kota Palopo Tahun 2021-2023	Hal 2
Tabel 2.5	Kejadian Bencana di Kota Palopo Tahun 2019–2023	Hal 21
Tabel 2.6	Kondisi Demografi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023	Hal 22
Tabel 2.7	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha 2018-2023	Hal 24
Tabel 2.8	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2023	Hal 25
Tabel 2.9	Perbandingan Persentase Tingkat Kemiskinan	Hal 28
Tabel 2.10	Kondisi dan Perbandingan angka Kemiskinan Kota Palopo dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional	Hal 29
Tabel 2.11	Statistik Angkatan Kerja Kota Palopo 2019-2023	Hal 30
Tabel 2.12	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palopo	Hal 30
Tabel 2.13	Perkembangan Gini Rasio Beberapa Wilayah di Kota Palopo dan beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023	Hal 31
Tabel 2.14	IPM Menurut Dimensi dan Indikator Penyusunan Tahun 2020 – 2023	Hal 32
Tabel 2.15	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah 2018-2023	Hal 32
Tabel 2.16	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah 2018-2023	Hal 33
Tabel 2.17	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Palopo dengan beberapa Daerah	Hal 33
Tabel 2.18	Perkembangan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Hal 33
Tabel 2.19	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Palopo Tahun 2017–2023	Hal 34
Tabel 2.20	Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Palopo Tahun 2018-2023	Hal 34
Tabel 2.21	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 35
Tabel 2.22	Angka Partisipasi Kasar Kota Palopo Tahun 2018–2023	Hal 35
Tabel 2.23	Penduduk Usia 10 Tahun ke atas di Kota Palopo yang Ditamatkan Tahun 2017 – 2023	Hal 35
Tabel 2.24	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 36
Tabel 2.25	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 36
Tabel 2.26	Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket AKota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 36
Tabel 2.27	Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 37
Table 2.28	Angka Putus Sekolah Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 37
Tabel 2.29	Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SD/MIKota Palopo Tahun 2017 - 2023	Hal 37
Tabel 2.30	Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 38
Tabel 2.31	Angka Kelulusan Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 38
Tabel 2.32	Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 38
Tabel 2.33	Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTsKota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 39
Tabel 2.34	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/Mts Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 39
Tabel 2.35	Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 39
Tabel 2.36	Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 40
Tabel 2.37	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD/SMP yang sederajat)	Hal 40
Tabel 2.38	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan DasarKota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 41
Tabel 2.39	Persentase Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Pendidikan Dasar Kota Palopo 2017 – 2023	Hal 41
Tabel 2.40	Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 42
Tabel 2.41	Persentase Balita Gizi Buruk Kota Palopo Tahun 2017 –2023	Hal 42

Tabel 2.42 Kematian Bayi (AKB) Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 42
Tabel 2.43 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 43
Tabel 2.44 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 43
Tabel 2.45 Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 43
Tabel 2.46 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 44
Tabel 2.47 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 44
Tabel 2.48 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2017 –2023 ..... Hal 45
Tabel 2.49 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 45
Tabel 2.50 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 45
Tabel 2.51 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 46
Tabel 2.52 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani ..... Hal 46
Tabel 2.53 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki ..... Kompetensi Kebidanan Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 47
Tabel 2.54 Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 47
Tabel 2.55 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 48
Tabel 2.56 Penduduk yang Tingkat Konsumsinya Lebih Rendah dari 2.100 kkal/kapita/hari Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 48
Tabel 2.57 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 48
Tabel 2.58 Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 49
Tabel 2.59 Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 49
Tabel 2.60 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 50
Tabel 2.61 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 50
Tabel 2.62 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 51
Tabel 2.63 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 51
Tabel 2.64 Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 52
Tabel 2.65 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderta Penyakit DBD Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 52
Tabel 2.66 Penderita Diare yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 52
Tabel 2.67 Angka Kejadian Malaria Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 53
Tabel 2.68 Tingkat Kematian Akibat Malaria Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 53
Tabel 2.69 Proporsi Anak Balita dengan Demam yang Diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 54
Tabel 2.70 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 54
Tabel 2.71 Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15 – 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 55
Tabel 2.72 Cakupan Kunjungan Bayi Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 55
Tabel 2.73 Cakupan Puskesmas Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 ..... Hal 55
Tabel 2.74 Cakupan Pembantu Puskesmas Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 56
Tabel 2.75 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 56
Tabel 2.76 Cakupan Pelayanan Nifas Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 57
Tabel 2.77 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 57
Tabel 2.78 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 57
Tabel 2.79 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 12 Bulan Keluarga Miskin Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 58

Tabel 2.80	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 58
Tabel 2.81	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 59
Tabel 2.82	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 59
Tabel 2.83	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berkondisi Baik 2017-2023	Hal 60
Tabel 2.84	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 61
Tabel 2.85	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 61
Tabel 2.86	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 62
Tabel 2.87	Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 62
Tabel 2.88	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 63
Tabel 2.89	Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 63
Tabel 2.90	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 63
Tabel 2.91	Persentase Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 64
Tabel 2.92	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 64
Tabel 2.93	Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 64
Tabel 2.94	Persentase Rasio Jaringan Irigasi Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 65
Tabel 2.95	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 65
Tabel 2.96	Persentase Areal Kawasan Kumuh Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 66
Tabel 2.97	Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 66
Tabel 2.98	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 66
Tabel 2.99	Persentase Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2017 – 2023.	Hal 67
Tabel 2.100	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 67
Tabel 2.101	Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 68
Tabel 2.102	Rasio Bangunan Ber – IMB Per Satuan Bangunan Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 68
Tabel 2.103	Rasio Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 68
Tabel 2.104	Rasio Permukiman Layak Huni Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 69
Tabel 2.105	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 69
Tabel 2.106	Persentase Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 69
Tabel 2.107	Persentase Pemukiman yang Terjadi di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 70
Tabel 2.108	Persentase Lingkungan Pemukiman KumuhKota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 70
Tabel 2.109	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kota Palopo Tahun 2018– 2023	Hal 70
Tabel 2.110	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 71
Tabel 2.111	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 71
Tabel 2.112	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 71
Tabel 2.113	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 72
Tabel 2.114	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 72

Tabel 2.115 Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 73
Tabel 2.116 Persentase Penegakan PERDA Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 73
Tabel 2.117 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 73
Tabel 2.118 Persentase PMKS yang Tertangani Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 74
Tabel 2.119 Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 74
Tabel 2.120 Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 75
Tabel 2.121 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 75
Tabel 2.122 Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 76
Tabel 2.123 Presentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 76
Tabel 2.124 Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 76
Tabel 2.125 Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja per Tahun di Kota Palopo 2017-2023 ..... Hal 77
Tabel 2.126 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) di Kota Palopo Tahun 2017-2023 ..... Hal 77
Tabel 2.127 Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Palopo Tahun 2017-2023 ..... Hal 78
Tabel 2.128 Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 78
Tabel 2.129 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek di Kota Palopo Tahun 2017-2023 ..... Hal 78
Tabel 2.130 Persentase Pemeriksaaan Perusahaan di Kota Palopo Tahun 2017-2023 ..... Hal 79
Tabel 2.131 Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kota Palopo Tahun 2017-2023 ..... Hal 79
Tabel 2.132 Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat di Kota Palopo Tahun 2017-2023 ..... Hal 80
Tabel 2.133 Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan di Kota Palopo Tahun 2017-2023 ..... Hal 80
Tabel 2.134 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 81
Tabel 2.135 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 81
Tabel 2.136 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 81
Tabel 2.137 Rasio KDRT di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 82
Tabel 2.138 Persentase Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 82
Tabel 2.139 Persentase Laporan Pengaduan ke Unit Pelayanan Terpadu Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 82
Tabel 2.140 Persentase Penegakan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 83
Tabel 2.141 Persentase Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 83
Tabel 2.142 Persentase Ketersediaan Pangan Utama di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 83
Tabel 2.143 Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di Kota PalopoTahun 2017 – 2023 ..... Hal 84
Tabel 2.144 Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan PanganKota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 84
Tabel 2.145 Persentase Luas Lahan Bersertifikatdi Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 ..... Hal 85
Tabel 2.146 Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negaradi Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 ..... Hal 85

Tabel 2.147	Persentase Penyelesaian Izin Lokasidi Kota Palopo Tahun 2018– 2023	Hal 85
Tabel 2.148	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023	Hal 86
Tabel 2.149	Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota di Kota Palopo Tahun 2018– 2023	Hal 86
Tabel 2.150	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023	Hal 86
Tabel 2.151	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Kota Palopo Tahun 2018 – 2023	Hal 87
Tabel 2.152	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas UdaraKota Palopo Tahun 2018 – 2023	Hal 87
Tabel 2.153	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan LahanKota Palopo Tahun 2018- 2023	Hal 87
Tabel 2.154	Persentase Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LHdi Kota Palopo Tahun 2018-2023	Hal 88
Tabel 2.155	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023	Hal 88
Tabel 2.156	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditanganidi Kota Palopo Tahun 2018 – 2023	Hal 89
Tabel 2.157	Persentase Timbulan Sampah yang Ditanganidi Kota Palopo Tahun 2018 – 2023	Hal 89
Tabel 2.158	Persentase Sampah yang Terkurangi Melalui 3Rdi Kota Palopo Tahun 2018 – 2023	Hal 89
Tabel 2.159	Persentase Cakupan Area Pelayanandi Kota Palopo Tahun 2018 – 2023	Hal 90
Tabel 2.160	Persentase Jumlah Sampah yang Tertanganidi Kota Palopo Tahun 2018 – 2023	Hal 90
Tabel 2.161	Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023	Hal 91
Tabel 2.162	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Pendudukdi Kota Palopo Tahun 2018 – 2023	Hal 91
Tabel 2.163	Rasio Bayi Berakte Kelahirandi Kota Palopo Tahun 2018 – 2023	Hal 92
Tabel 2.164	Ketersediaan Datbase Kependudukan Skala Provinsi di Kota Palopo Tahun 2018 - 2023.	Hal 92
Tabel 2.165	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIKdi Kota Palopo Tahun 2018 – 2023	Hal 92
Tabel 2.166	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023	Hal 92
Tabel 2.167	Cakupan Penerbitan Akta Kelahirandi Kota Palopo Tahun 2018 – 2023	Hal 93
Tabel 2.168	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baikdi Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 93
Tabel 2.169	Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)di Kota Palopo Tahun 2017 –2023	Hal 93
Tabel 2.170	Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan PKKKota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 93
Tabel 2.171	Persentase LSM Aktifdi Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 94
Tabel 2.172	Persentase LPM Berprestasidi Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 94
Tabel 2.173	Persentase PKK Aktif di Kota Palopo Tahun 2017 - 2023	Hal 94
Tabel 2.174	Persentase Posyandu Aktifdi Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 94
Tabel 2.175	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 95
Tabel 2.176	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 95
Tabel 2.177	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan DaerahMelalui Kampung KBdi Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 95
Tabel 2.178	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 96
Tabel 2.179	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49di Kota PalopoTahun 2017 – 2023	Hal 96
Tabel 2.180	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 97
Tabel 2.181	Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (unmet need) di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 97
Tabel 2.182	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kota Palopo Tahun 2017 - 2023	Hal 98
Tabel 2.183	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kota Palopo Tahun 2017 - 2023	Hal 98
Tabel 2.184	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB di Kota Palopo Tahun 2017 - 2023.	Hal 98
Tabel 2.185	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KBdi Kota Palopo Tahun 2017 - 2023	Hal 99
Tabel 2.186	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KBdi Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 99

Tabel 2.187 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 100
Tabel 2.188 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswadi Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 100
Tabel 2.189 Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 100
Tabel 2.190 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiridi Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 100
Tabel 2.191 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan diKota Palopo Tahun2017 – 2023 ..... Hal 101
Tabel 2.192 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Gudang Kabupaten/Kotadi Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 101
Tabel 2.193 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 102
Tabel 2.194 Persentase Faskes dan Jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) Yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuaidengan Standarisasi Pelayanan di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 102
Tabel 2.195 Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui8 Fungsi Keluarga di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 103
Tabel 2.196 Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 Hal 103
Tabel 2.197 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDs di Kota Palopo Tahun 2018-2023 ..... Hal 104
Tabel 2.198 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umumdi Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 104
Tabel 2.199 Rasio Izin Trayekdi Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 105
Tabel 2.200 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 105
Tabel 2.201 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bisdi Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 106
Tabel 2.202 Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 106
Tabel 2.203 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 106
Tabel 2.204 Persentase Pemasangan Rambu - Rambu di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 107
Tabel 2.205 Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat KecamatanKota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 107
Tabel 2.206 Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 107
Tabel 2.207 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 108
Tabel 2.208 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi di Kota Palopo Tahun 2017 - 2023 ..... Hal 108
Tabel 2.209 Presentase Koperasi Aktif di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 108
Tabel 2.210 Persentase UKM Non BPR/LKM Aktifdi Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 109
Tabel 2.211 Presentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 109
Tabel 2.212 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 109
Tabel 2.213 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 110
Tabel 2.214 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 110
Tabel 2.215 Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 ..... Hal 111
Tabel 2.216 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 111
Tabel 2.217 Persentase Wirausaha Muda di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 111
Tabel 2.218 Persentase Pembinaan Olahraga di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 ..... Hal 112
Tabel 2.219 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 ..... Hal 112
Tabel 2.220 PersentasePembinaan Atlet Muda di Kota Palopo Tahun 2018–2023 ..... Hal 112
Tabel 2.221 Persentase Atlet Berprestasidi Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 ..... Hal 113
Tabel 2.222 Persentase Prestasi Olahragadi Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 ..... Hal 113

Tabel 2.223 Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasidi Kota Palopo Tahun 2018 - 2023 ..... Hal 114
Tabel 2.224 Ketersediaan Buku "Palopo Dalam Angka" Kota Palopo Tahun 2018–2023 ..... Hal 114
Tabel 2.225 Ketersediaan Buku PDRB Kota Palopo Tahun 2018 – 2023..... Hal 114
Tabel 2.226 Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi di Kota Palopo Tahun 2018 - 2023..... Hal 115
Tabel 2.227 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budayadi Kota Palopo Tahun 2018– 2023..... Hal 115
Tabel 2.228 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023..... Hal 116
Tabel 2.229 Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 ..... Hal 116
Tabel 2.230 Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023.. Hal 116
Tabel 2.231 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahundi Kota Palopo Tahun 2018 – 2023..... Hal 117
Tabel 2.232 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan DaerahKota Palopo Tahun 2018 – 2023..... Hal 117
Tabel 2.233 Rasio Perpustakaan Per Satuan PendudukKota Palopo Tahun 2018 – 2023 ..... Hal 117
Tabel 2.234 Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 ..... Hal 118
Tabel 2.235 Jumlah Koleksi Judul Buku PerpustakaanKota Palopo Tahun 2018 – 2023..... Hal 118
Tabel 2.236 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023..... Hal 118
Tabel 2.237 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 ..... Hal 119
Tabel 2.238 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 .....Hal 119
Tabel 2.239 Persentase Produksi Perikanan Kota Palopo Tahun 2018 – 2023..... Hal 119
Tabel 2.240 Persentase Konsumsi Ikan di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 ..... Hal 120
Tabel 2.241 Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023..... Hal 120
Tabel 2.242 Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayandi Kota Palopo Tahun 2018 – 2023..... Hal 121
Tabel 2.243 Nilai Tukar Nelayan Tahun 2019-2023 ..... Hal 121
Tabel 2.244 Persentase Kunjungan Wisata di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023..... Hal 122
Tabel 2.245 Lama Kunjungan Wisata di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023..... Hal 122
Tabel 2.246 Persentase PAD Sektor Pariwisata Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 ..... Hal 122
Tabel 2.247 Persentase Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnyaper Hektar di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 ..... Hal 123
Tabel 2.248 Nilai Ekspor Bersih Kota Palopo Tahun 2018 – 2023..... Hal 123
Tabel 2.249 Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023..... Hal 124
Tabel 2.250 Tersedianya RKT Pada Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota Palopo Tahun 2018-2023 ..... Hal 124
Tabel 2.251 Terintegrasinya Program-Pprogram Kerja DPRD dengan RPJMD dan RKPD Kota Palopo Tahun 2018 – 2023..... Hal 125
Tabel 2.252 Terintegrasinya Program-program DPRD ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kota Palopo Tahun 2018-2023..... Hal 125
Tabel 2.253 Sekretariat Daerah..... Hal 125
Tabel 2.254 Ketersediaan Dokumen RPJPD Kota Palopo..... Hal 126
Tabel 2.255 Ketersediaan Dokumen RPJMD Kota Palopo ..... Hal 126
Tabel 2.256 Ketersediaan Dokumen RKPD Kota Palopo..... Hal 126
Tabel 2.257 Ketersediaan Dokumen RTRW Kota Palopo ..... Hal 127
Tabel 2.258 Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Kota Palopo Tahun 2018-2023 . Hal 127
Tabel 2.259 Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD Kota Palopo Tahun 2018-2023.... Hal 127
Tabel 2.260 Opini BPK Terhadap Laporan KeuanganKota Palopo Tahun 2018-2023..... Hal 128
Tabel 2.261 Persentase SILPA Kota Palopo Tahun 2018-2023 ..... Hal 128
Tabel 2.262 Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana di Kota Palopo Tahun 2018-2023 . Hal 128
Tabel 2.263 Persentase Belanja Pendidikan (20%) di Kota PalopoTahun 2018-2023 ..... Hal 129
Tabel 2.264 Persentase Belanja Kesehatan (10%)di Kota Palopo Tahun 2018-2023 ..... Hal 129
Tabel 2.265 Persentase Perbandingan Antara Belanja LangsungKota Palopo Tahun 2017 – 2023..... Hal 129

Tabel 2.266	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desadi Kota PalopoTahun 2018-2023	Hal 130
Tabel 2.267	Ketepatan Waktu Penetapan APBDKota Palopo Tahun 2017 – 2021	Hal 130
Tabel 2.268	Persentase Perbandingan Antara Belanja Operasi, Modal dan Tak Terduga Tahun 2021-2023	Hal 131
Tabel 2.269	Rata- Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 - 2023	Hal 131
Tabel 2.270	Persentase ASN Kota Palopo yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan FormalTahun 2018 - 2023	Hal 131
Tabel 2.271	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2018 - 2023	Hal 132
Tabel 2.272	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2018 - 2023	Hal 132
Tabel 2.273	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2018 - 2023	Hal 132
Tabel 2.274	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi PemerintahKota Palopo Tahun 2018 - 2023	Hal 133
Tabel 2.275	Persentase Implementasi Rencana KelitbanganKota Palopo Tahun 2018 - 2023	Hal 133
Tabel 2.276	Persentase Pemanfaatan Hasil KelitbanganKota Palopo Tahun 2018 - 2023	Hal 133
Tabel 2.277	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah Kota Palopo Tahun 2018 - 2023	Hal 134
Tabel 2.278	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuandi Kota Palopo Tahun 2018 - 2023	Hal 134
Tabel 2.279	Persentase Pelanggaran Pegawaidi Kota Palopo Tahun 2018 - 2023	Hal 134
Tabel 2.280	Jumlah Temuan BPK di Kota Palopo Tahun 2018 - 2023	Hal 134
Tabel 2.281	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai) tahun 2018-2023	Hal 135
Tabel 2.282	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik tahun 2019-2023	Hal 135
Tabel 2.283	Capaian standar pelayanan minimal pemerintah kota palopo tahun 2019-2023	Hal 136
Tabel 2.284	Predikat capaian kinerja SAKIP Pemerintah tahun 2019-2023	Hal 136
Tabel 2.285	Nilai Evaluasi LPPD tahun 2019-2023	Hal 136
Tabel 2.286	PDRB Per Kapita Kota Palopo Tahun 2010-2023	Hal 137
Tabel 2.287	Persentase Pengeluaran Konsumsi RT Non Pangan Per Kapita di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 137
Tabel 2.288	Produktivitas Total Daerah Kota Palopo Tahun 2017-2023	Hal 138
Tabel 2.289	Rasio Kewirausahaan Kota Palopo 2017-2023	Hal 139
Tabel 2.290	Panjang jalan menurut jenis permukaan di Kota Palopo tahun 2018 - 2022 (Km)	Hal 139
Tabel 2.291	Kondisi Jalan di Kota Palopo tahun 2018 - 2022 (Km)	Hal 139
Tabel 2.292	Rasio Ketersediaan Listrik Kota Palopo Tahun 2018-2023	Hal 140
Tabel 2.293	Rasio Ketersediaan Air Kota Palopo Tahun 2018-2023	Hal 140
Tabel 2.294	Titik Blank Spot Kota Palopo	Hal 140
Tabel 2.295	Persentase Angka Kriminalitas di Kota Palopo Tahun 2019–2023	Hal 141
Tabel 2.296	Rasio Ketergantungan Kota Palopo Tahun 2017-2023	Hal 141
Tabel 2.297	Rasio Lulusan S1/S2/S3di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023	Hal 141
Tabel 2.298	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi DaerahTerhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan PemerintahanKota Palopo 2017- 2023	Hal 143
Tabel 2.299	Penjabaran RPJMD 2018-2023, RKPD Tahun 2023 dan APBD Tahun 2023	Hal 151
Tabel 2.300	Evaluasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Hal 156
Tabel 2.301	Capaian SPM Kota Palopo Tahun 2020-2023	Hal 158
Tabel.2.302	Capaian Indikator Kinerja SDGs/TPB Kota PalopoTahun 2020-2021	Hal 160
Tabel.2.303	Hasil Evaluasi Capaian IKK Bidang Urusan Daerah	Hal 172
Tabel 2.304	Hasil Capaian IKU Kota Palopo Tahun 2023	Hal 189
Tabel 2.305	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Terhadap Hasil Evaluasi Pembangunan Kota Palopo	Hal 190
Tabel 2.306	Keterkaitan Sasaran, Permasalahan Pembangunan, dan Prioritas RKPD Kota Palopo Tahun 2025	Hal 191
Tabel 2.307	Kompilasi Isu-Isu Strategis Nasional Provinsi dan Daerah	Hal 198

BAB. III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.1. Kondisi dan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kota Palopo 2023-2024 ..... Hal 1
Table 3.2 Perkembangan Nilai PDRB Kota Palopo (ADHB & ADHK) Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2021-2023 ..... Hal 1
Tabel 3.3. Pencapaian PDRB per Kapita Kota Palopo ..... Hal 2
Tabel 3.4. Perbandingan PDRB ADHB per Kapita Kota Palopo dan Beberapa Daerah Lain Tahun 2021-2023 ..... Hal 2
Tabel 3.5. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Palopo dan beberapa Daerah Lain ..... Hal 3
Tabel 3.6. Pencapaian Gini Rasio Kota Palopo dan beberapa daerah lain Tahun 2021-2023 ..... Hal 3
Tabel 3.7. Pencapaian Indikator Kemiskinan Kota Palopo dan beberapa daerah lain Tahun 2023 ..... Hal 4
Tabel 3.8. Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palopo Tahun 2021-2023 ..... Hal 4
Tabel 3.9. Target Sasaran Indikator Ekonomi Makro Kota Palopo ..... Hal 4
Tabel 3.10 Indikator dan Target Makro Pembangunan Nasional Tahun 2024 ..... Hal 5
Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Palopo Tahun 2022 - 2026 ..... Hal 12
Tabel 3.12 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palopo Tahun 2022 - 2026 ..... Hal 15
Tabel 3.13 Alokasi Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025 ..... Hal 16
Tabel 3.14 Rencana Alokasi Belanja Pemerintah Kota Palopo Untuk Pemenuhan Mandatory Spending ..... Hal 18
Tabel 3.15 Rencana Alokasi Belanja Pemerintah Kota Palopo Untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... Hal 20
Tabel 3.16 Rencana Alokasi Belanja Pemerintah Kota Palopo Untuk Dukungan Bagi SDGs/TPB ..... Hal 21
Tabel 3.17 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Palopo Tahun 2022 s.d tahun 2026 ..... Hal 28

BAB IV SASARAN & PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran serta Target Kinerja Pembangunan Kota Palopo Tahun 2025 ..... Hal 2
Tabel 4.2 Prioritas Nasional ..... Hal 3
Tabel 4.3 Prioritas Nasional & Highlight Intervensi di Kota Palopo Tahun 2025 ..... Hal 3
Tabel 4.4 Sasaran dan Target Nasional Tahun 2025 ..... Hal 4
Tabel 4.5 Arah Kebijakan Nasional Spesifik Pencapaian Sasaran ..... Hal 5
Tabel 4.6 Arah Keijakan dan Strategi Pembangunan Nasional 2025 ..... Hal 5
Tabel 4.7 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025 ..... Hal 9
Tabel 4.8 Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2025 ..... Hal 11
Tabel 4.9 Hubungan, Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2025 terhadap Sasaran dan Tujuan dalam RPD 2024-2026 ..... Hal 13
Tabel 4.10 Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Palopo Tahun 2025 Hal 14
Tabel 4.11 Dukungan Program dan Alokasi Pagu Terhadap Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025 ..... Hal 14
Tabel 4.12 Keterkaitan Prioritas Nasional, Sulsel dan Kota Palopo Tahun 2025 ..... Hal 19
Tabel 4.13 Keterkaitan Prioritas dan Highligt Intervensi dan Program Prioritas Kota Palopo Tahun 2025 ..... Hal 19
Tabel 4.14 Program dan Perangkat Daerah Kota Palopo yang Mendukung Prioritas Pembangunan Sulsel Tahun 2025 ..... Hal 22
Tabel 4.15 Program dan Perangkat Daerah Kota Palopo yang Mendukung delapan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... Hal 31
Tabel 4.16 Pokok-pokok Pikiran DPRD berdasarkan Urusan Pemerintahan ..... Hal 41
Tabel 4.17 Highlight Indikasi Intervensi di Sulawesi Selatan Berdasarkan Prioritas Nasional ..... Hal 42

BAB. V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Tabel 5.1 Rincian Kerangka Pendanaan Kota Palopo Tahun 2025 ..... Hal 1
Tabel 5.2 Priroitas dan Program Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2025..... Hal 4
Tabel 5.3 Perangkat Daerah dan Intervensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penanganan Inflasi Kota Palopo Tahun 2025..... Hal 9
Tabel 5.4 Perangkat Daerah dan Intervensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Kota Palopo Tahun 2025..... Hal 9
Tabel 5.5 Perangkat Daerah dan Intervensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penanganan Stunting Kota Palopo Tahun 2025..... Hal 14
Tabel 5.6 Perangkat Daerah dan Intervensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2025..... Hal 15
Tabel 5.7 Rencana Kerja Peemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2025 Berdasarkan program, Kegiatan, sub kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2025..... Hal 18

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tabel 6.1 Indikator Makro Pembangunan Kota Palopo Tahun 2025 ..... Hal 1
Tabel 6.2 Capaian Indikator Kinerja Utama 2023, Perkiraan Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kota Palopo Tahun 2025 ..... Hal 3
Tabel 6.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci Kota Palopo Tahun 2023 ..... Hal 4
Tabel 6.4 Perkiraan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Kunci (Ikk) Kota Palopo Tahun 2024 - 2025..... Hal 19
Tabel 6.5 Capaian dan Perkiraan Penerapan SPM Tahun 2023-2024, serta Penetapan Target Indikator SPM Kota Palopo Tahun 2025 (sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021)..... Hal 41
Tabel 6.6 Capaian Indikator TPB/SDGs Kota Palopo Tahun 2023 dan Sasaran Nasional Tahun 2024.. Hal 43

DAFTAR GAMBAR

BAB. I PENDAHULUAN

Gambar 1.1. Hubungan Antara Dokumen Perencanaan ..... BAB I Hal 4

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambar 2.1	Wilayah Administrasi Kota Palopo	BAB II Hal 3
Gambar 2.2	Kemiringan Lereng Kota Palopo	BAB II Hal 4
Gambar 2.3	Topografi Kota Palopo	BAB II Hal 5
Gambar 2.4	Daerah Penutupan Kota Palopo	BAB II Hal 6
Gambar 2.5	Rencana Struktur Ruang Sistem Pelayanan	BAB II Hal 8
Gambar 2.6	Palopo Dalam Angka	BAB II Hal 9
Gambar 2.7	Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi	BAB II Hal 15
Gambar 2.8	Rencana Struktur Ruang Jaringan Telekomunikasi	BAB II Hal 16
Gambar 2.9	Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi	BAB II Hal 17
Gambar 2.10	Rencana Struktur Ruang Jaringan Sumberdaya Air	BAB II Hal 18
Gambar 2.11	Indeks Resiko Kota Palopo dan Kabupaten Tetangga 2015-2023	BAB II Hal 20
Gambar 2.12	Peta Resiko Bencana Kota Palopo 2023-2027	BAB II Hal 21
Gambar 2.13	Jumlah Penduduk Kota Palopo Tahun 2010-2023	BAB II Hal 22
Gambar 2.14	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2023 (Miliyar)	BAB II Hal 25
Gambar 2.15	Inflasi dan IHK Bulanan Kota Palopo Tahun 2016-2023	BAB II Hal 26
Gambar 2.16	Penduduk Miskin Ekstrim Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2022 (%)	BAB II Hal 28
Gambar 2.17	Perbandingan GINI Rasio Nasional, Provinsi, dan Kota Palopo Tahun 2015-2023	BAB II Hal 31
Gambar 2.18	IPM Kota Palopo 2020-2023	BAB II Hal 32

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Data Lokasi dan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Palopo	BAB II Hal 19
Grafik 2.2	Data Lokasi dan Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Palopo	BAB II Hal 19
Grafik 2.3	Data Lokasi dan Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Palopo	BAB II Hal 20
Grafik 2.4	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Palopo Tahun 2023	BAB II Hal 23
Grafik 2.5	Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo, provinsi dan nasional Tahun 2011-2023 (%)	BAB II Hal 24
Grafik 2.6	Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Palopo	BAB II Hal 27
Grafik 2.7	Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	BAB II Hal 27
Grafik 2.8	Jumlah Kasus dan Prevalensi Stunting Kota Palopo Tahun 2020-2022	BAB II Hal 59
Grafik 2.9	Prevalensi Stunting Versi EPPBGM Tahun 2021-2023	BAB II Hal 60
Grafik 2.10	Jumlah Peserta dan Jenis Pelatihan olah Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014-2022	BAB II Hal 80
Grafik 2.11	Net Ekspor Barang/Jasa Kota Palopo Tahun 2010-2023	BAB II Hal 138

PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALOPO TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah, juga berpedoman Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah dan nasional. Perencanaan Pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip, respontif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palopo tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palopo Tahun 2024-2026, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi 2025. Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu a) Persiapan Penyusunan RKPD, b) Penyusunan Rancangan Awal RKPD, c) Penyusunan Rancangan RKPD, d) Pelaksanaan Musrenbang RKPD, e) Perumusan Rancangan Akhir RKPD, dan f) Penetapan.

Muatan dalam dokumen RKPD tahun 2025 merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026, yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, serta berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mengacu pada RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Tahun 2024-2026, RKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD juga selanjutnya diseleraskan dengan renja Perangkat Daerah tahun 2025. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun APBD.

Diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, menjadi starting point bagi Pemerintah Kota Palopo dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Nomenklatur yang semula hanya pada level program dan kegiatan, kini menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pengelolaan data perencanaan pembangunan yang semula menggunakan

aplikasi E Planning, harus berganti dengan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Peremerintahan Daerah) yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Palopo Tahun 2025 ini antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6775);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kota /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
38. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
42. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 11);

43. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
44. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender;
45. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2041 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 1);
46. Peraturan Walikota Palopo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana pembangunan Daerah (RPD) Kota Palopo Tahun 2024 – 2026

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan menyelaraskan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional sebagaimana yang tercantum dalam RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026, Penyusunan RKPD 2025 Kota Palopo memperhatikan isu strategis dalam RKP Nasional dan sesuai dengan perkembangan kondisi daerah sehingga terjadi keselarasan antara pembangunan pusat dan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palopo Tahun 2024-2026, yang memiliki keterkaitan dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sulawesi selatan tahun 2025, dimana konsistensi antara semua dokumen perencanaan harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD 2025. RKPD Kota Palopo Tahun 2025, Renja Perangkat Daerah dan KUA-PPAS Renja-PD adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, pogram dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja-PD lingkup Pemerintah Kota Palopo mengacu pada RKPD Kota Palopo Tahun 2025. RKPD 2025 selanjutnya, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar 1.1
Hubungan Antara Dokumen Perencanaan

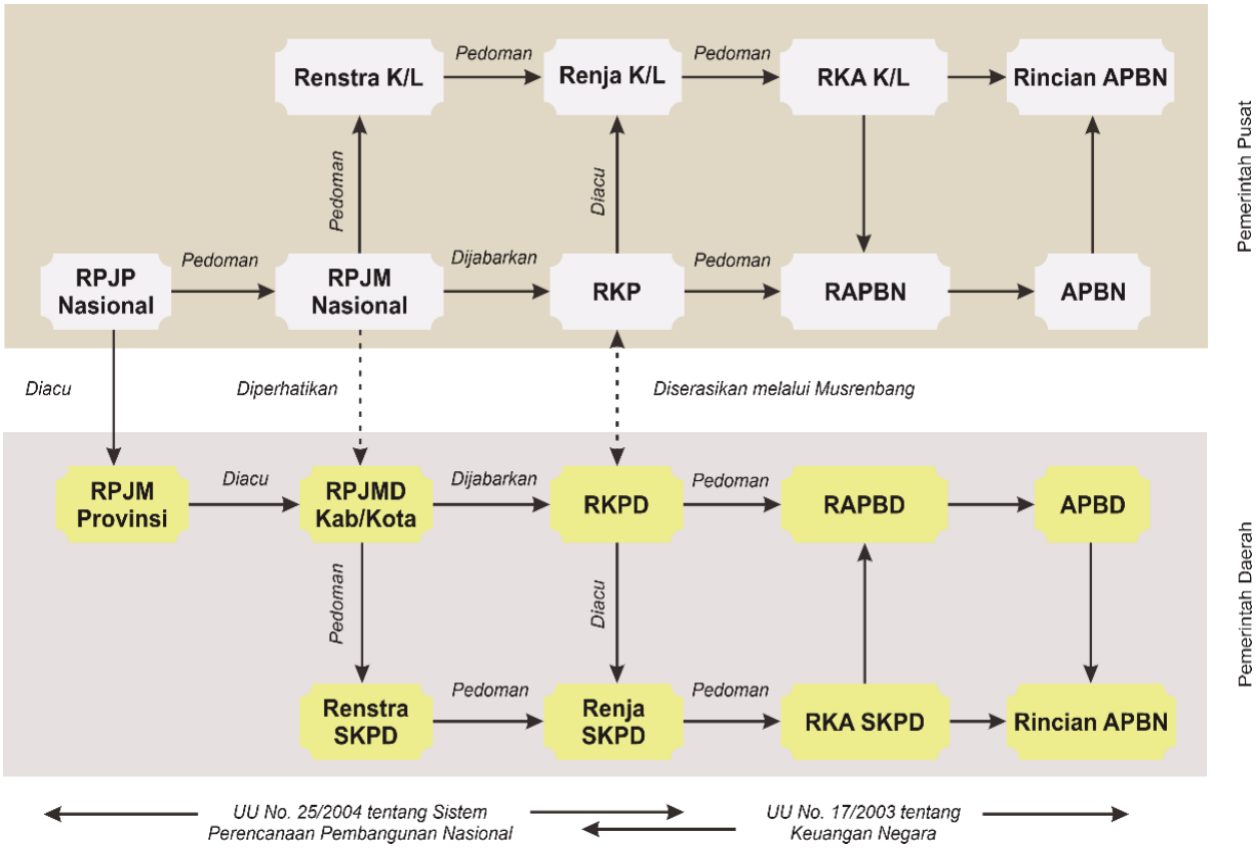

Mengacu pada bagan di atas dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

1. RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang;
2. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPD yang didalamnya memuat mengenai Tujuan dan sasaran serta arah pembangunan daerah;
3. RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah;
4. RKPD ini nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja Perangkat Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Palopo Tahun 2025 adalah sebagai :

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026;
2. Menjadi pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
3. Menjadi pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan Kota /kota; dan
4. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Kota Palopo Tahun 2025 ini adalah :

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegitan Tahun 2025;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelengaraan pemerintahan daerah;
6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kota Palopo.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kota Palopo Tahun 2025, disusun dengan sistematika berdasarkan kaidah peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta Sistematika Penulisan RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini menjelaskan gambaran kondisi umum kondisi daerah meliputi aspek Geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta Permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini menjelaskan gambaran kinerja Arah kebijakan ekonomi dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan daerah Tahun 2025.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Bab ini menjelaskan kerangka pendanaan tahun 2025, program prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 yang akan dilaksanakan.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bab ini menggambarkan target tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP
Bab ini menjelaskan substansi dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah

Kota Palopo berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Palopo mempunyai luas wilayah 247,52 km². Terletak antara 2°53'.15'' - 3°04'.08'' Lintang Selatan dan 120°03'.10''-120°14'.34'' Bujur Timur. Batas wilayah yaitu sebelah utara dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, batas sebelah selatan adalah Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, batas sebelah barat merupakan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara dan batas sebelah timur merupakan Teluk Bone. Secara geografis wilayah mencakup pesisir di bagian Timur dan pegunungan di bagian Barat, serta dataran rendah memanjang dari utara sampai selatan, dengan 6 aliran sungai. Kemiringan lereng Kota Palopo dilihat dari titik ketinggiannya di atas permukaan air laut antara 0 – 25, 26 – 100, 101 – 500, 501 – 1000, dan 1000+ dpl dengan klimatologi Kota Palopo dipengaruhi oleh curah hujan, suhu dan kelembaban udara.

Luas wilayah Kota Palopo tercatat 247,52 km persegi yang meliputi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Kecamatan terluas di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km persegi atau mencakup 21,87 persen dari luas Kota Palopo secara keseluruhan. Sedangkan, kecamatan dengan luas terkecil adalah kecamatan wara utara dengan luas 10.58 km persegi atau hanya sebesar 4.27 persen dari luas Kota Palopo.

Jarak antara Kota Palopo ke Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, adalah 390 km. jarak seluruh ibukota Palopo kecamatan ke ibu kota semua relative dekat, berkisar antara 1-5 km, yang terjauh adalah kecamatan telluwanua dengan jarak tercatat sekitar 12.00 km. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Kota Palopo memiliki kode wilayah 7373, dengan jumlah kecamatan 9 dan kelurahan 48. Kemudian luas wilayah indikatif yang tercatat berdasarkan SK PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 sebesar 273,23 Km2.

Tabel 2. 1
Luas Wilayah Administrasi Kota Palopo Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS		JUMLAH KELURAHAN
		KM²	%	
1	Wara Selatan	10.66	4.32	4
2	Sendana	37.09	14.98	4
3	Wara	11.49	4.64	6
4	Wara Timur	12.08	4.88	7
5	Mungkajang	53.8	21.74	4
6	Wara Utara	10.58	4.27	6
7	Bara	23.35	9.43	5
8	Telluwanua	34.34	13.87	7
9	Wara Barat	54.13	21.87	5

Sumber data : Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.1.1-6117 , 2022

Kondisi topografi Kota Palopo meliputi ketinggian antara 0 – 1.500 m dari permukaan air laut (dpl) dengan tingkat kemiringan lereng antara 0–2 %, 2–15 %, 15–40 %, dan > 40 %. Adapun tingkat kemiringan lereng Kota Palopo berdasarkan luas wilayahnya yang terluas adalah wilayah dengan tingkat kemiringan lereng 2 – 15 % dengan luas 76,677 Km^2 sedangkan tingkat kemiringan lereng dengan luas wilayah terkecil adalah tingkat kemiringan lereng 15 % - 40 % dengan luas wilayah 57,989 Km^2. Kondisi ketinggian, bervariasi ini menunjukkan 62,85 % dari total luas wilayah merupakan daerah ketinggian 0-500 mdl, 24,76 % terletak di ketinggian 501-1.000 mdl, dan sekitar 12,39 % terletak di atas ketinggian lebih dari 1.000 mdpl. Jenis batuan terdiri dari 3 jenis. Batuan metamorf dan batuan vulkanik serta endapan alluvial yang hampir mendominasi seluruh wilayah Kota Palopo. Batuan beku yang dijumpai secara umum terdiri dari intrusi batuan beku granit dan gebro serta beberapa intrusi kecil lainnya. Kemudian dijumpai pula batuan beku yang merupakan jejak aliran larva yang telah membeku yang bersusunan balstik hingga andesitik.

Tabel 2. 2
Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Kemiringan Lereng

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Tingkat Kemiringan Lereng (Km^2)			
			0-2 %	2–15 %	15–40 %	> 40 %
1.	Wara Selatan	10,66	7,462	1,066	2,132	-
2.	Sendana	37,09	5,564	-	22,254	9,272
3.	Wara	11,49	11,490	-	-	-
4.	Wara Timur	12,08	12,080	-	-	-
5.	Mungkajang	53,80	2,690	-	16,140	34,97

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Tingkat Kemiringan Lereng (Km^2)			
			0-2 %	2–15 %	15–40 %	> 40 %
6.	Wara Utara	10,58	6,348	2,116	2,116	-
7.	Bara	23,35	7,005	2,335	14,010	-
8.	Tellu Wanua	34,34	24,038	3,434	6,868	-
9.	Wara Barat	54.13	-	-	5,413	48,717
Jumlah		**247.52**	**76,677**	**8,951**	**68,933**	**57,989**

Sumber : Diolah dari beberapa sumber

Kondisi ketinggian, bervariasi ini menunjukkan 62,85 % dari total luas wilayah merupakan daerah ketinggian 0-500 mdl, 24,76 % terletak di ketinggian 501-1.000 mdl, dan sekitar 12,39 % terletak di atas ketinggian lebih dari 1.000 mdl. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 3
Kondisi Topografi Kota Palopo Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Tingkat Ketinggian Daerah (Mdl)				
			0 – 25	26–100	101-500	501-1000	> 1000 %
1.	Wara Selatan	10,66	7,462	1,066	-	2.132	-
2.	Sendana	37,09	5,564	-	22,254	9.272	-
3.	Wara	11,49	11,490	-	-	-	-
4.	Wara Timur	12,08	12,080	-	-	-	-
5.	Mungkajang	53,80	2,690	-	16,140	13.450	21.520
6.	Wara Utara	10,58	6,348	2,116	2,116	-	-
7.	Bara	23,35	7,005	2,335	14,010	-	-
8.	Tellu Wanua	34,34	24,038	3,434	6,868	-	-
9.	Wara Barat	54.13	-	-	5,413	35.184	13.533
Jumlah		**247.52**	**76.677**	**8,951**	**66,801**	**60.038**	**35.053**

Sumber : Diolah dari beberapa sumber

Keadaan permukaan tanah bergunung dan berbukit terutama pada sebelah Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Toraja Utara. Daerah dengan kondisi topografi relatif rendah dan berbukit pada bagian Utara. Sedangkan bagian Timur merupakan daerah pantai yang membujur dari Utara ke Selatan dengan panjang pantainya kurang lebih 25 Km. Bagian Selatan berbukit terutama bagian Barat, sedangkan bagian lainnya merupakan dataran rendah yang datar dan bergelombang.

Penggunaan lahan di Kota Palopo cukup bervariasi sesuai dengan karakteristik wilayah yang didiami oleh masyarakat. Secara umum, Kota Palopo ini memiliki 3 dimensi wilayah yaitu pegunungan dan dataran tinggi, dataran rendah serta pesisir dan laut. Perbedaan dimensi wilayah ini mempengaruhi aktifitas masyarakat yang bermukim ditempat tersebut. Luas masing – masing jenis penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 4
Penggunaan Lahan di Kota Palopo Tahun 2021-2023

Kecamatan	Lahan Pertanian (Ha)						Lahan Non Pertanian (Ha)			Jumlah		
	Sawah			Bukan Sawah								
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Wara Selatan	136	136	136	455	455	445	475	475	475	1.066	1.066	1.066
Sendana	295	295	295	2.387	2.387	2.387	1.027	1.027	1.027	3.709	3.709	3.709
Wara	83	83	83	7	7	7	1.059	1.060	1.060	1.149	1.150	1.150
Wara Timur	-	-	-	195	195	195	1.013	1.013	1.013	1.208	1.208	1.208
Mungkajang	47	47	47	1.158	1.158	1.158	4.175	4.175	4.175	5.380	5.380	5.380
Wara Utara	5	5	5	246	246	246	807	807	807	1.058	1.058	1.058
Bara	-	-	-	1.624	1.624	1.624	711	711	711	2.335	2.335	2.335
Telluwanua	1.144,25	930,25	930,25	1.894,25	1.894,75	1.894,75	395,5	609	609	2.434	3.434	3.434
Wara Barat	180	180	180	1.645	1.654	1.654	3.588	3.588	3.588	5.413	5.422	5.422
PALOPO	**1.890,25**	**1.676,25**	**1.676,25**	**9.611,25**	**9.620,75**	**9.620,75**	**13.250,5**	**13.465**	**13.465**	**24.752**	**24.762**	**24.762**

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka 2023

Gambar 2. 1
Wilayah Administrasi Kota Palopo

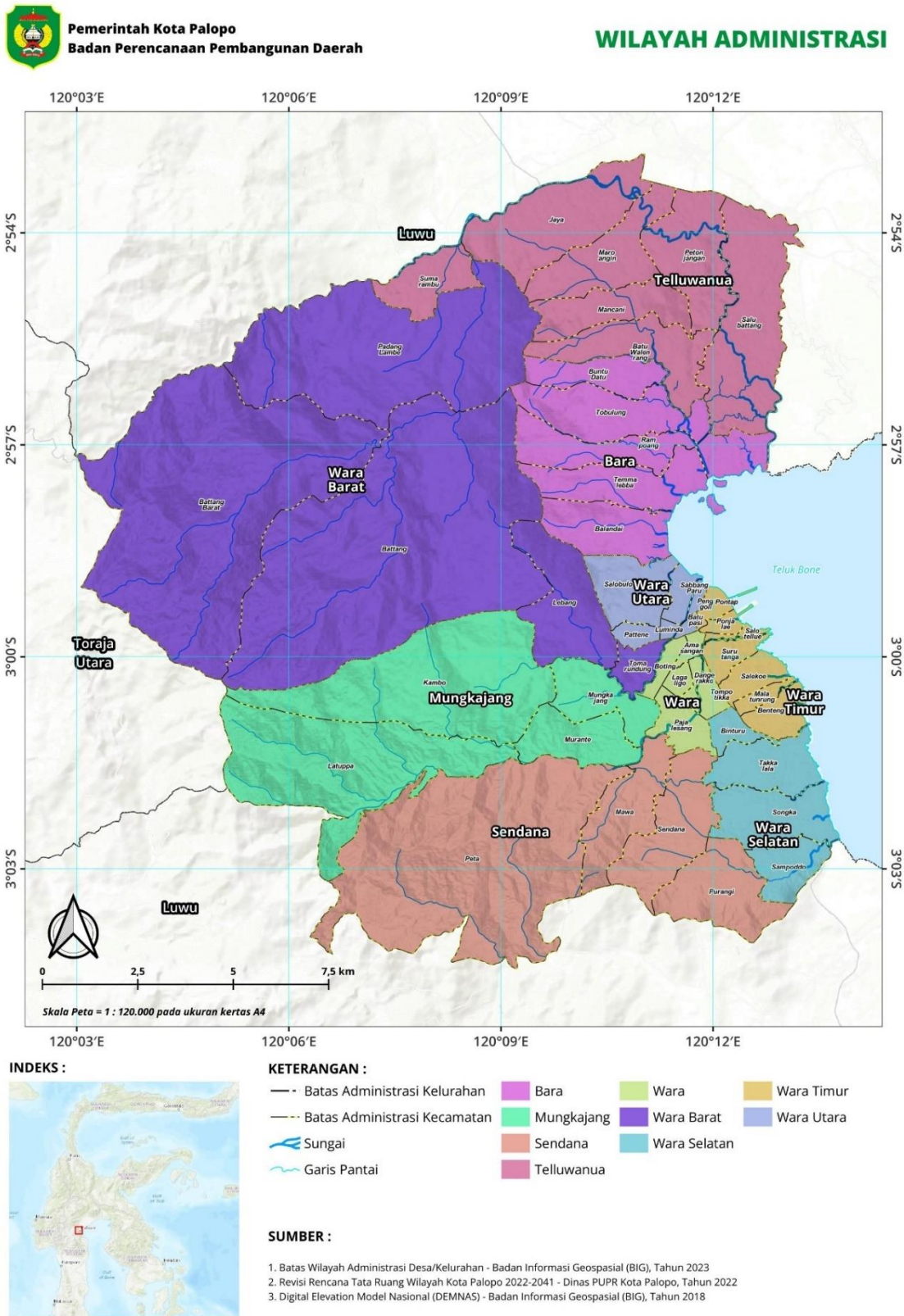

Gambar 2. 2
Kemiringan Lereng Kota Palopo

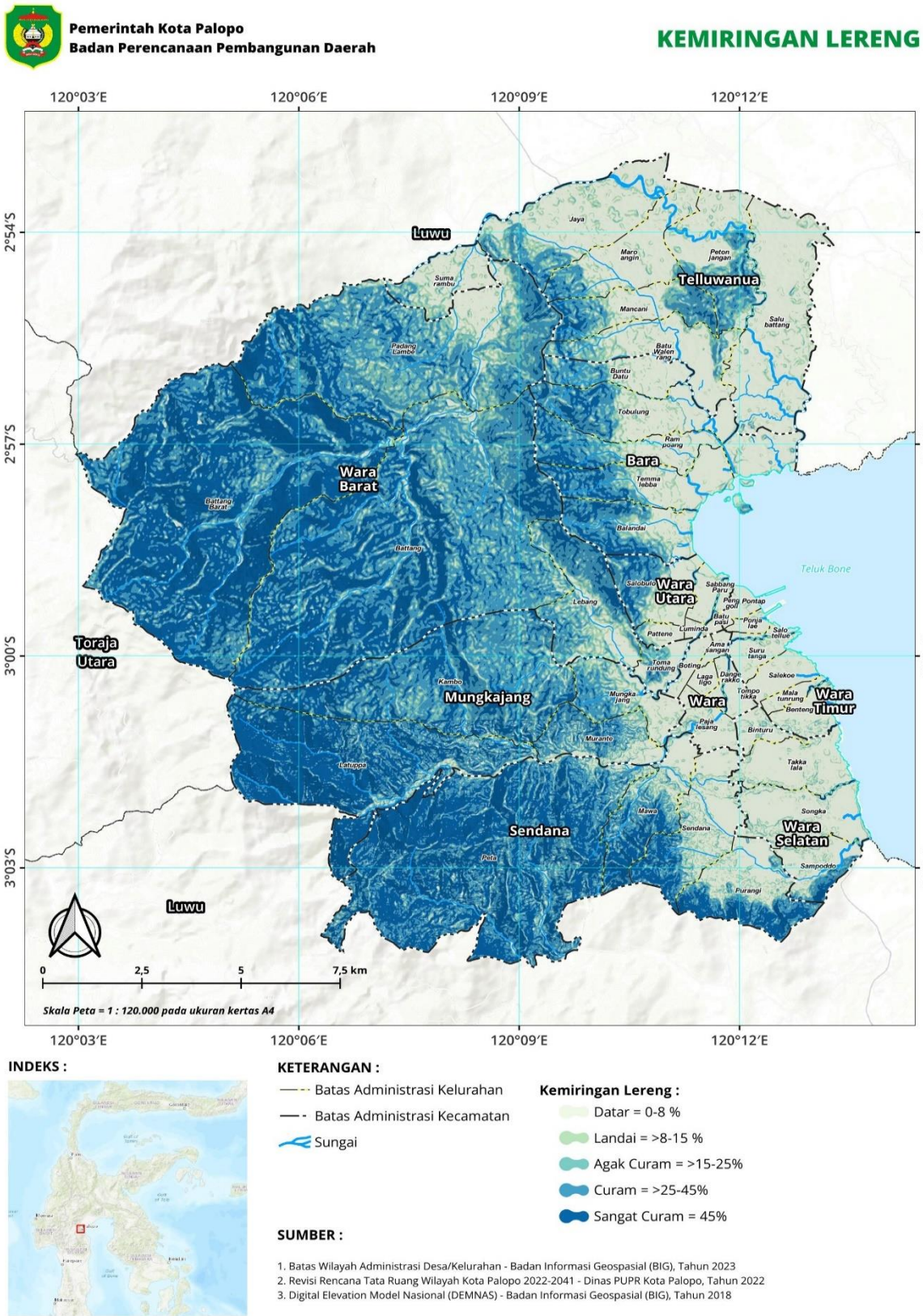

Gambar 2. 3
Topografi Kota Palopo

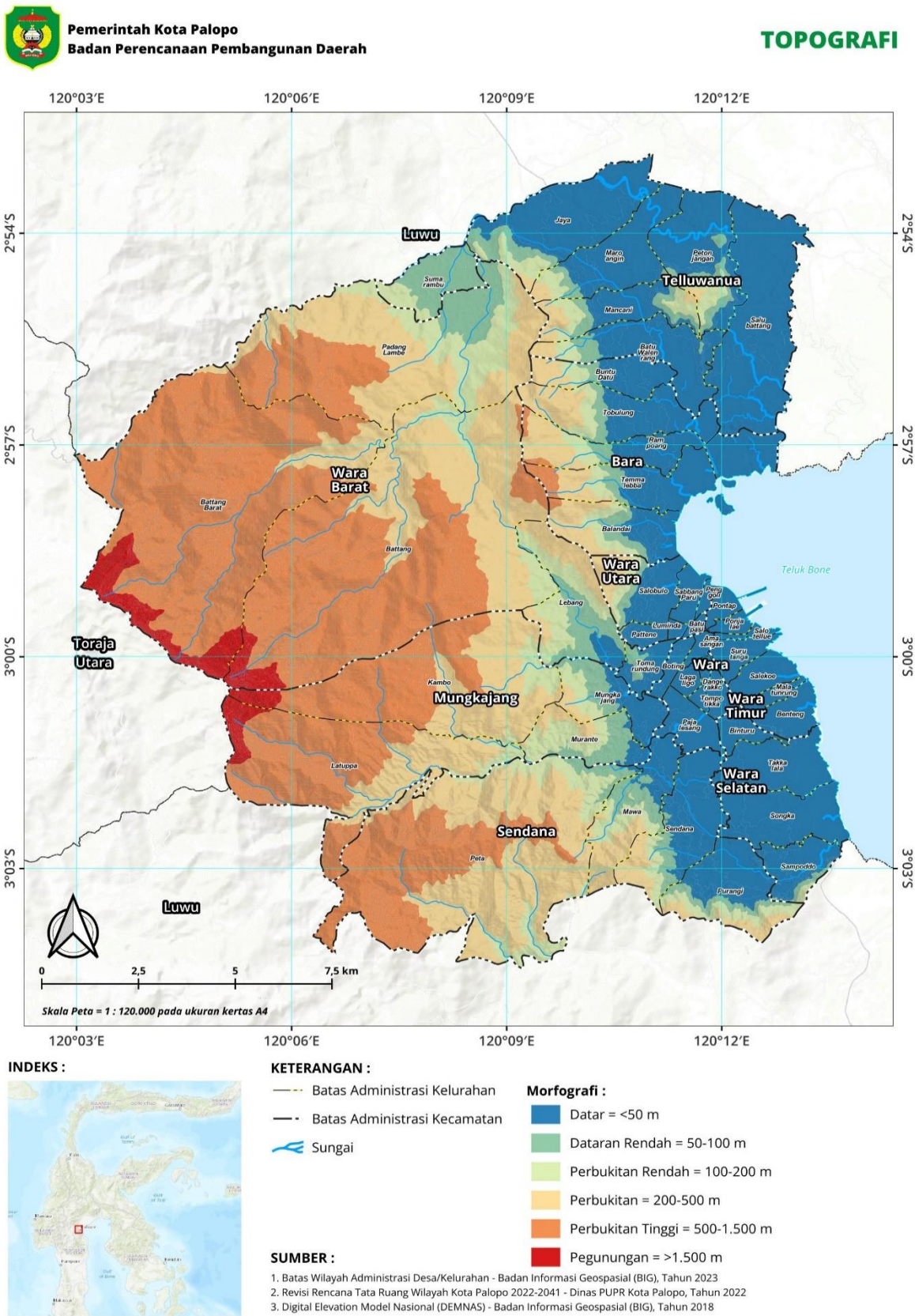

Gambar 2. 4
Daerah Penutupan Kota Palopo

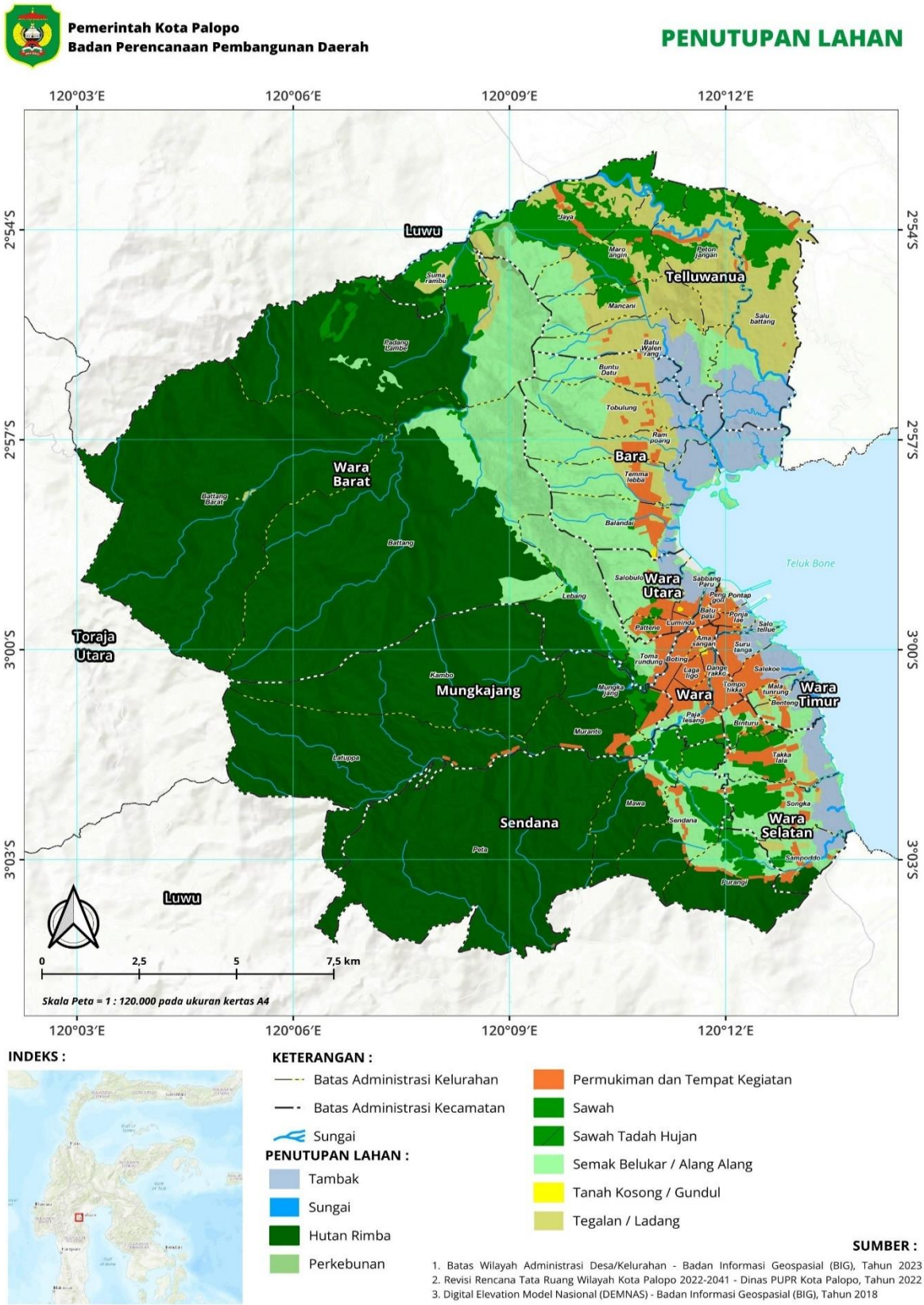

2.1.1.2 Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.Rencana struktur ruang wilayah Kota Palopo terdiri atas;

1) Sistem pusat pelayanan;
   Sistem pusat pelayanan diselenggarakan dalam upaya mendukung Kota Palopo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah/PKW dalam sistem perkotaan nasional yang meliputi:
   a. Pusat pelayanan Kota (PPK);
      PPK Kota Palopo berada di kawasan Tompotikka meliputi Kelurahan Tompotikka dan Kelurahan Salekoe dengan fungsi sebagai kawasan pemerintahan skala kota, pelayanan umum, serta perdagangan dan jasa skala regional.
   b. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK);
      SPPK Kota Palopo meliputi; a) SPPK Maroangin berada di kelurahan Maroanghin Kecamatan telluwanua, dengan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum skala sub wilayah; b) SPPK Rampoang berada di kelurahan Rampoang Kecamatan Bara dengan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum skala sub wilayah; c) SPPK Songka berada di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan dengan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum skala sub wilayah; d) SPPK Sendana berada di Kelurahan Sendana Kecamatan Sendana dengan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum skala sub wilayah; dan e) SPPK Battang berada di kelurahan Battang Kecamatan wara Barat dengan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum skala sub wilayah.
   c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
      PPL Kota Palopo meliputi Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Benteng, Kelurahan Latuppa, Kelurahan Kambo Kelurahan Lagaligo, Kelurahan Pontap, Kelurahan Pattene, Kelurahan lebang, Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Jaya, Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Sumarambu dan Kelurahan Padang Lambe.
2) Sistem jaringan prasarana
   Sistem jaringan prasarana di Kota Palopo terdiri atas a) sistem jaringan transportasi; b) sistem jaringan energi; c) sistem jaringan telekomunikasi; d) sistem jaringan sumber daya air; dan d) infrastruktur perkotaan. Rencana struktur ruang wilayah digmbarkan pada peta rencana struktur ruang Kota Palopo.

   Keadaan Hidrologi umumnya dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari Sungai Bambalu/Sungai Battang, Sungai Latuppa, Sungai Boting dan anak sungai serta mata air dengan debit yang bervariasi. Disatu sisi keberadaan sungai-sungai tersebut sangat berpotensi dikembangkan bagi kepentingan pariwisata, misalnya wisata permandian alam dan *rafting*. Potensi hidrologi untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan kelestariannya harus tetap dijaga.Potensi sumberdaya air di Kota Palopo selain dipengaruhi oleh kondisi klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang melintas pada beberapa kawasan. Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan lainnya. Wilayah Kota Palopo terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) baik yang melintas dalam pusat kota maupun dipinggiran Kota Palopoterdiri dari 6 daerah terdiri dari 1) DAS Purangi dengan luas cakupan area lebih kurang 1.037 hektar; 2) DAS Bua dengan luas cakupan area lebih kurang 1.168,04 hektar; 3) DAS Songkama'ti dengan luas cakupan area lebih kurang 136,20 hektar; 4) DAS Pacangkuda dengan luas cakupan area lebih kurang 6.412,80 hektar; 5) DAS Boting dengan luas cakupan area lebih kurang 3.087,25 hektar; 6) DAS Salubattang dengan luas cakupan area lebih kurang 13.760,59 hektar.

Gambar 2. 5
Rencana Struktur Ruang Sistem Pelayanan

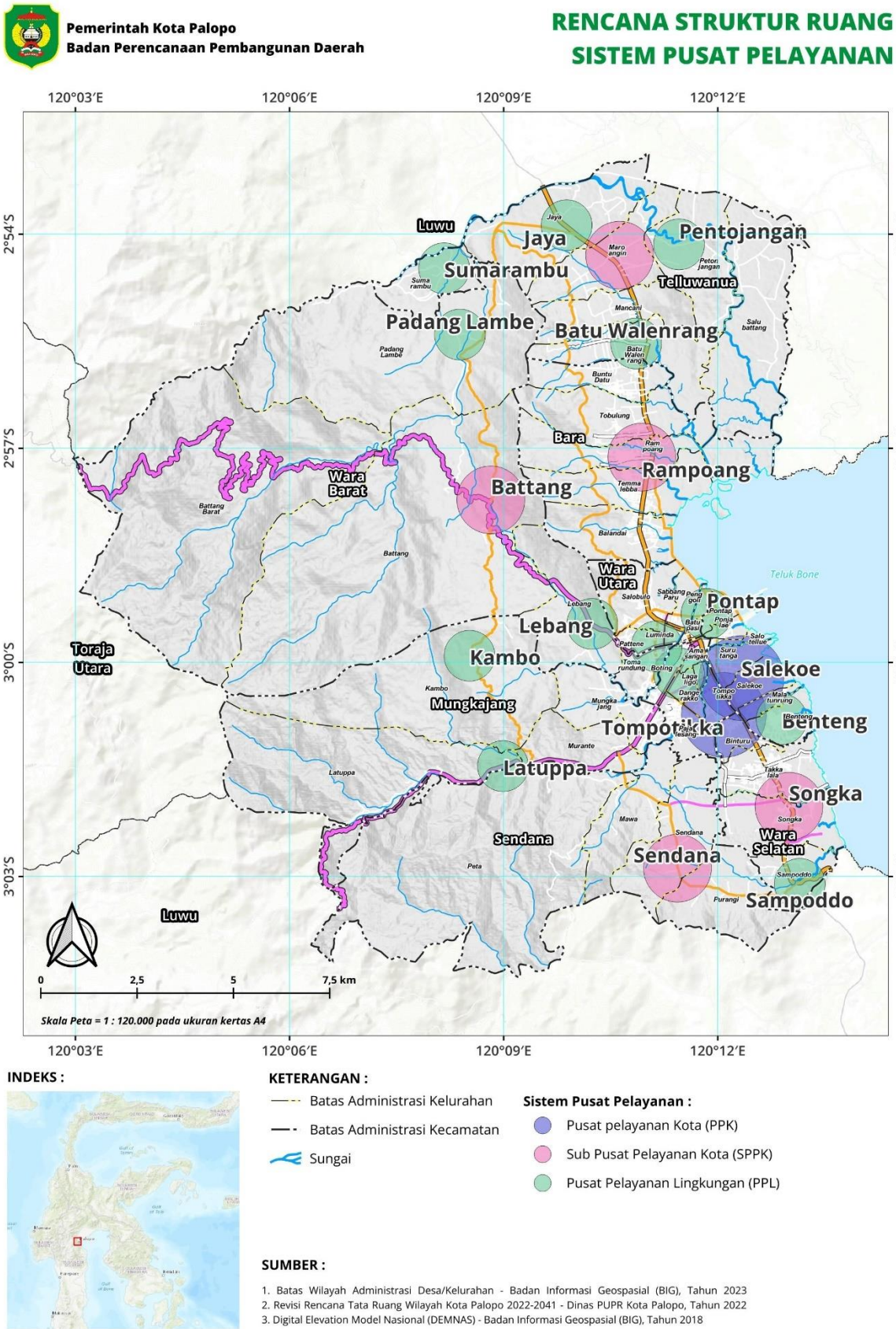

2.1.1.2.1 Kondisi Topografi

Secara garis besar keadaan topografi Kota Palopo terdiri dari 3 variasi yaitu dataran rendah sepanjang pantai, wilayah perbukitan bergelombang dan datar di bagian tengah, serta perbukitan dan pegunungan di bagian barat, selatan dan sebagian di utara, Topografi Kota Palopo relatif datar, ke arah utara sedikit berbukit dan bergelombang. Kondisi permukaan tanah kawasan perkotaan kawasan *(build-up area)* cenderung datar, linier sepanjang jalan trans Sulawesi dan sedikit menyebar pada arah jalan kolektor dan jalan lingkungan di wilayah perkotaan.

Wilayah Kota Palopo sebagian besar merupakan dataran rendah yang berada di wilayah pesisir pantai, dengan luas kurang lebih 62,85 persen dari total luas Kota Palopo dan berada pada ketinggian 0-500 meter diatas permukaan laut (mdpl), sedangkan wilayah yang terletak di ketinggian 501-1000 mdpl sebesar 24,76 persen dan 12,39 persen berada pada ketinggian lebih dari 1000 mdpl. Lebih jelasnya dilihat pada graik 2.2 berikut:

Gambar 2. 6
Palopo dalam Angka

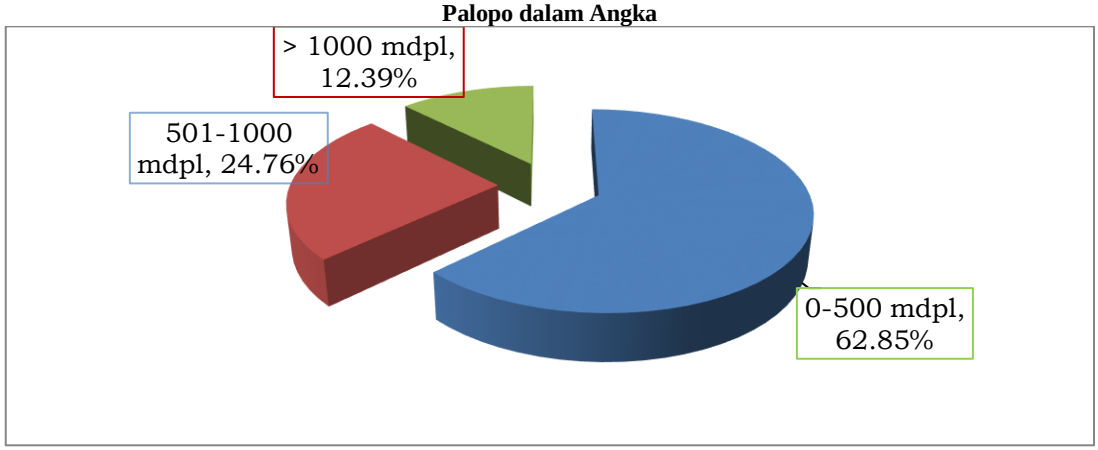

Sumber : Palopo Dalam Angka, 2024

Morfologi lahan merupakan wujud visual bentang lahan yang terdiri dari bagian puncak *(crest)*, cembung *(convex)*, cekung *(voncave)*, dan kaki lereng *(lower slope)*. Kemiringan lereng merupakan ukuran kemiringan lahan relative terhadap bidang datar yang secara umum dinyatakan dalam persen atau derajat. Dalam morfologi lahan, kelerengan merupakan variable yang sangat menentukan penggunaan lahan.

2.1.1.2.2 Keadaan Iklim

Iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam jangka panjang (>30 tahun), sedangkan cuaca menunjukkan kondisi atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Iklim mengalami perubahan secara terus menerus karena interaksi antara unsurnya seperti curah hujan, suhu udara, awan, sinar matahari, tekanan udara, kelembaban udara dan angin dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik dan factor yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti perubahan penggunaan lahan. Unsur iklim suhu udara dan curah hujan bersifat dinamis dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat.

Iklim di Kota Palopo pada umumnya sama dengan daerah lainnya di Indonesia yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada Tahun 2023 menjadi bulan dengan curah hujan tertinggi yaitu 628 mm3 dengan jumlah hari hujan sebanyak 28 hari. Kelembapan udara berkisar antara 73-85 yang masuk kategori terlalu lembab. Sebagai catatan, karena tidak terdapat perwakilan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika di Kota Palopo, maka sumber data curah hujan mengacu pada data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kelas I Maros.

Curah Hujan

Dalam siklus hidrologi, curah hujan merupakan sumber utama air untuk kehidupan yang ada di bumi. Jumlah curah hujan merupakan volume air yang terkumpul di permukaan bidang datar dalam satu periode tertentu yang dikategorikan menjadi harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Curah hujan (mm) adalah ketinggian air hujan yang jatuh pada tempat yang datar dengan asumsi tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir. Curah hujan yang dicatat dari data Badan Meteorologi dan Geofisika di Pusat pencatatan di Wilayah Tanjung Ringgit Kota Palopo, menunjukkan bahwa curah hujan untuk dataran rendah mempunyai variasi antara 500-1000 mm/th, sedangkan untuk daerah hulu (pegunungan) berkisar antara 1000-2000 mm/tahun.

Suhu Udara

Suhu udara adalah derajat panas dan dingin udara di atsmosfer dan suhu udara bervariasi menurut tempat dan dari waktu ke waktu di permukaan bumi, Salah satu faktor yang menentukan suhu udara suatu wilayah adalah ketinggian tempat terhadap permukaan air laut, Semakin rendah suatu tempat maka suhu udara akan semakin tinggi, dan sebaliknya semakin tinggi suatu tempat maka suhu udara menjadi rendah, Kota Palopo memiliki kelengkapan topografi baik pegunungan darat dan laut. dengan wilayah yang didataran tinggi akan memilihi suhu udara lebih rendah. Rata-rata suhu udara di Kota Palopo 28,50°C daerah pesisir pantai dan kota, kemudian daerah lereng pegunungan yang berbatasan dengan Toraja 25,80°C.

2.1.1.2.3 Kondisi Geologi

Struktur batuan di Kota Palopo pada umumnya terdiri dari 3 (tiga) jenis batuan beku. Batuan *metamorf* dan batuan vulkanik serta endapan allunial yang hampir mendominasi seluruh wilayah Kota Palopo. Batuan beku yang dijumpai secara umum terdiri dari intrusi batuan beku granit dan gebro serta beberapa intrusi kecil lainnya. Kemudian dijumpai pula batuan beku yang merupakan jejak aliran larva yang telah membeku yang bersusunan blastik hingga andestik. Batuan sediman yang dijumpai meliputi batu gamping, batu pasir, dan konglomerat, sedangkan batuan metamorf yang dijumpai yang dijumpai meliputi batuan meta sedimen. Batuan vulkanik yang dijumpai terdiri dari tufa dan breksi vulkanik. Sedangkan endapan alluvial terdiri dari material-material bersusunan berangkal, kerakai, kerikil, pasir hingga lempung. Kondisi geologi ini akan menunjukkan potensi lahan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan bangunan Kota Palopo.

Kota Palopo mempunyai struktur batuan yang merupakan bahan galian sebagai bahan induk pembentuk, secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Bahan tanah liat untuk pembentuk batu bata, banyak diupayakan oleh masyarakat di areal sawah di Kecamatan Wara dan Wara Selatan.
b. Batuan endapan sungai berupa sirtu (pasir dan batu), banyak terdapat di Sunagi Latuppa yang didominasi oleh batuan beku yang merupakan batuan sedimen beku, ukurannya bervariasi dari yang sangat besar sampai yang kecil dan merupakan pecahan batu sampai butiran.
c. Bahan galian atau butiran emas, terdapat di Sungai Latuppa pada bagian hulu di atas bukit yang merupakan daerah bekas penambangan emas di beberapa tempat pada zaman penjajahan colonial Belanda dan saat ini masih diusahakan oleh masyarakat.
d. Batuan sedimen, menyebar di bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara.
e. Batuan terobosan yang menyebar di bagian utara yang merupakan daerah pegunungan.

Jenis batuan lainnya yang merupakan pelapukan bahan pembentuk tanah, yang mempunyai kandungan potensial di Kota palopo adalah:

a. Batuan gamping dan marmer *(limestone* dan *marmer),* berada di Kecamatan Telluwanua.
b. Batuan granit dan granodiorit digunakan sebagai bahan bangunan lantai rumah, batu hias serta untuk pengerasan jalan aggrogat) yang terdapat di Kecamatan Wara dan Wara Selatan.
c. Batu sabak, filit, kuarsil, batu gamping, dan batu lamau, terdapat di Kecamatan Wara, Wara Utara dan Bagian Barat Kota Palopo. Jenis batuan ini dikelompokkan atas 5 (lima) kelompok, yaitu:
    1) Kelompok endapan alluvial (termasuk didalamnya endapan Qal atau terumbu local) terdiri atas endapan alluvial berupa karakal, kerikil, pasir dan batu serta terumbu koral yang tersebar di sepanjang pantai dan alur Sungai Latuppa.
    2) Batuan Tmb, terdiri dari napal dan sisipan batu gamping setempat-tempat yang mengandung batu pasir gamping, konglomerat dan breksi. Selain itu terdapat beberapa kelompok intrusi batuan beku yang terdiri dari batuan beku granit dan gabbro. Batuan granit ini dijumpai di Kecamatan Wara dan Telluwanua.
    3) Batu tol, yaitu kelompok batuan hasi pembekuan aliran larva yang bersusun balistik hingga andesitic, kemudian breksi vulkanik, batu pasir dan batu lamau, serta batuan setempat-setempat mengandung fieldsphatoid. Batuan ini terssusun di Bagian Selatan Kota Palopo dan banyak tersebar di daerah Kecamatan Wara Selatan.
    4) Batuan Tet, yaitu terdiri dari serpih, batu gamping dan batu pasir dengan sisipan konglomerat. Kelompok batuan ini terdapat di Kecamatan Wara dan kecamatan Telluwanua.
    5) Batuan TKI, yaitu terdiri dari batuan-batuan yang mengalami metamorfisme, antara lain serpihan, filit, rijang, marmer, kuarsit dan beberapa bagian di utara Kota Palopo masuk dalam wilayah Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Selatan.

2.1.1.2.4 Kondisi Hidrologi

Keadaan hidrologi Kota Palopo pada umumnya dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari Sungai Bambalu, Sungai Battang dan Sungai Latuppa dan anak sungai serta mata air dengan debit yang bervariasi. Keberadaan sungai tersebut berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata. Kondisi hidrologi Kota palopo secara umum terdiri atas air tanah pada umumnya terdapat pada kedalaman 40-100 meter.

Potensi sumber daya air di Kota Palopo selain dipengaruhi oleh kondisi klimatologi juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai. Sumber daya air dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti kegiatan pertanian dan pemenuhan bahan baku air minum. Penyediaan air minum merupakan kebutuhan pokok penduduk di suatu wilayah. Dalam hal ini, hidrologi di Kota Palopo untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan kelestariannya harus tetap dijaga. Untuk itu maka potensi sumberdaya air di Kota Palopo selain dipengaruhi oleh kondisi klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang melintas pada beberapa kawasan. Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan lainnya. Potensi sumberdaya air di wilayah Kota Palopo yang telah termanfaatkan oleh penduduk dalam kehidupan kesehariannya untuk berbagai keperluan bersumber dari air tanah dangkal (air permukaan dan air tanah dalam air tanah dangkal/permukaan dapat berupa air sungai, sumur, rawa-rawa, bendungan, mata air dan lain sebagainya, sedangkan

potensi air tanah dalam dengan pemanfaatan air melalui pengeboran. Penyediaan air minum merupakan suatu kebutuhan pokok penduduk di suatu daerah, terutama pada daerah-daerah yang potensi air tanahnya terbatas dan kualitasnya kurang memadai jika ditinjau dari aspek kesehatan. Meskipun demikian, pengadaan air minum masih terbatas dan umumnya penduduk menggunakan sumur air tanah dangkal, dalam (artesis), air permukaan dan mata air yang bersumber dari pegunungan.

2.1.1.2.5 Penggunaan lahan

Lahan adalah bentangan di permukaan bumi dan menjadi tempat utama kegiatan manusia yang terdiri akan komponen tanah, iklim, air dan kehidupan organisme, Penggunaan lahan merupakan bentuk intervensi manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Pengertian penggunaan lahan digunakan untuk mengacu pemanfaatan masa kini *(present or current land use)*.

Penggunaan lahan di Kota Palopo cukup bervariasi sesuai dengan karakteristik wilayah yang didiami oleh masyarakat. Secara umum, Kota Palopo ini memiliki 3 dimensi wilayah yaitu pegunungan dan dataran tinggi, dataran rendah serta pesisir dan laut. Perbedaan dimensi wilayah ini mempengaruhi aktifitas masyarakat yang bermukim ditempat tersebut, Penggunaan lahan di Kota Palopo terbagi atas lahan pertanian dan lahan non pertanian.

2.1.1.2.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Palopo dilihat dari sisi kebijakan penataan ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022 – 2041 antara lain :

1. Kebijakan penataan ruang wilayah kota, meliputi:
   a. Penyebaran pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan umum skala regional dan skala kota, meliputi:
      1) Mengendalikan intensitas pemanfaatan ruang secara horizontal di kawasan pusat kota;
      2) Mengarahkan investasi pembangunan baru pada sub-sub wilayah di luar kawasan pusat kota;
      3) Mengembangkan kawasan pusat ekonomi baru sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi kota;
      4) Mengoptimalkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pada komponen-komponen kota skala regional dan skala kota yang telah tersedia di sub-sub wilayah, terutama yang nada di bagian utara dan selatan kota; dan
      5) Mengembangkan jaringan transportasi baru guna meningkatkan aksesibilitas pergerakan antar sub-sub wilayah dengan daerah-daerah luar kota, maupun antar sub-sub wilayah dengan kawasan pusat kota.
   b. Pengendalian intensitas fungsi primer kawasan pusat kota, meliputi:
      1) Mengandalikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan-kegiatan skala regional;
      2) Menerapkan standar pelayanan minimum secara ketat, terutama kegiatan pada koridor jalan utama dengan memperhatikan daya tamping ruang milik jalan untuk parker;
      3) Mengoptimalkan pengembangan komponen-komponen kota skala regional yang telah ada saat ini dengan kelengkapan pendukung, seperti area parkir, ruang terbuka hijau dan lainnya.
   c. Pengembangan sarana prasarana dan utilitas umum yang integratif, komprehensif, dan menerapkan teknologi terbaru untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan
      1) Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan kota yang mengadopsi konsep kota modern guna mengoptimalkan kualitas dan jangkauan pelayanannya;
      2) Mengembangkan sarana, prasarana, dan utilitas umum yang terintegrasi dengan teknologi terbaru dan ramah lingkungan, guna mengefektifkan dan memperluas fungsi serta cakupan pelayanannya dalam pencapaian efisiensi dan efektivitas pergerakan orang, barang, dan jasa;
      3) Mengembangkan sarana, prasarana, dan utilitas umum dalam mengoptimalkan beragam fungsi dan sebaran pemanfaatan ruang kota;
      4) Meningkatkan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kota sebagai upaya merespon peningkatan kebutuhan masyarakat;
      5) Mengembangkan sarana, prasarana, dan utilitas umum minimal memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan Kota Sedang, baik jenis, kapasitas, dan teknologinya; dan
      6) Mengembangkan sarana, prasarana, dan utilitas umum yang adaptif terhadap dinamika fungsi pemanfaatan ruang, dan penggunaan teknologi terbaru di masa mendatang.
   d. Pengoptimalan pemanfaatan dan pengembangan lahan-lahan marginal di kawasan pesisir dan pantai menjadi lahan produktif perkotaan;
      1) Melakukan reklamasi kawasan pesisir Kota Palopo guna memenuhi kebutuhan pengembangan fisik kota ke arah timur, serta mencegah terjadinya degradasi kawasan pesisir;
      2) Melakukan penataan kawasan permukiman kumuh nelayan di sepanjang pesisir Kota Palopo;
      3) Melakukan pengendalian pemanfaatan ruang pada area sempadan pantai dan sungai terutama pada area sekitar muara sungai, guna mencegah terjadinya bencana alam banjir dan abrasi; dan

4) Mengembangkan kegiatan-kegiatan jasa dan perdagangan skala nasional, regional, dan kota pada lahan-lahan hasil reklamasi di pesisir Kota Palopo.

e. Pengembangan jaringan transportasi baru guna mengefisienkan mobilitas penduduk serta angkutan barang antar kota dan dalam kota;
   1) Melakukan pembangunan jalan-jalan baru guna mengurangi volume kendaraan pada jalan utama kota saat ini sehingga aksesibilitas pergerakan tetap tinggi, baik antar kota maupun dalam kota;
   2) Mengintegrasikan program nasional pengembangan jalur kereta api, jalan tol, dan jalan strategis provinsi yang menghubungkan antar kota/ kabupaten di Sulawesi; dan
   3) Mengendalikan pemanfaatan ruang milik jalan terutama jalan-jalan utama kota dari kegiatan yang mengganggu kelancaran fungsi jalan.
f. Peningkatan kualitas kawasan lindung guna mendukung upaya pembangunan kota yang berkelanjutan;
   1) Mengendalikan pemanfaatan kawasan lindung dari kegiatan yang akan merusak ekosistem alami kawasan;
   2) Melakukan penghijauan/penanaman vegetasi pepohonan pada area kawasan lindung yang telah kritis akibat penebangan pohon secara liar;
   3) Tidak mengarahkan pengembangan kegiatan budidaya perkotaan ke dalam kawasan lindung yang berpotensi merubah bentang alam;
   4) Mempertahankan luasan kawasan lindung yang ada dan menjadikannya sebagai paru-paru kota; dan
   5) Mengoptimalkan nilai ekonomis kawasan lindung melalui pemanfaatan potensi wisata alam yang ada di dalamnya.
g. Peningkatan daya saing kota melalui program-program daerah yang berkearifan lokal; dan
   1) Mengembangkan kegiatan yang bersifat inovasi yang berbeda dengan daerah lain, dengan mengaplikasikan teknologi dalam sistem kegiatannya;
   2) Mengembangkan program-program inovasi dengan memanfaatkan potensi keunggulan komparatif wilayah, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, serta dalam kerangka membangun daya saing kota; dan
   3) Melakukan revitalisasi kawasan bersejarah sebagai perwujudan pengembangan kota pusaka, dengan memanfaatkan teknologi dan memperhatikan ruang terbuka publik.
h. Pemanfaatan fungsi kawasan untuk pertanahan dan keamanan Negara.
   1) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan yang ada saat ini;
   2) Mengembangkan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan sesuai dengan kebutuhan wilayah;
   3) Mengembangkan zona penyangga pada kawasan pertahanan dan keamanan yang memiliki tingkat kerahasian tinggi dengan kawasan lainnya yang tidak bersinergis dengan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
   4) Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan kota yang berfungsi memperkuat fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
i. Pengembangan sistem transportasi
   1. Perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
      1) Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan arteri sekunder yang berlokasi di jalan Opu Tohalide, Jalan Andi Paso, Jalan Andi Bintang, ruas jalan lingkar barat luar (Jalan Poros Kambo, Jalan Battang – Jaya, dan Jalan Padang Lambe), Jalan Andi Kambo, Jalan Andi Tenriadjeng, Jalan Lingkar Timur, Jalan Beruang, Jalan Diponegoro – Somel, Jalan Sawerigading, Jalan K.H, Ahmad Rasyad, Jalan Tandi Pau, Jalan K.H, Muh, Kasim, Jalan Lingkar (Pelabuhan – Tappong), Jalan Lingkar (Ponjalae – Pelabuhan), Jalan PPI/TPI - jalan poros terminal tipe A Songka, ruas jalan lingkar barat dalam (jalan poros Guttu Pareppa – Pepabri - Pamenta - Lassik), Jalan Yos Sudarso;, Jalan Sungai Cerekang, Jalan Lamaranginang, Jalan Guttu Pareppa;, Jalan Mungkasa, Jalan Pantai Labombo, Jalan We Cudai, dan Jalan Andi Sangka.
      2) Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan sekunder,
      3) Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan lingkungan, Jalan lingkungan dimaksud berupa jalan lingkungan sekunder yang meliputi seluruh ruas jalan di Kota Palopo selain jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan tol.
      4) Pembangunan jalan tol meliputi ruas jalan Tindantana – Palopo dan Palopo – Parepare.
      5) Pembangunan terminal penumpang tipe A di Kelurahan Songka, Pengembangan terminal penumpang tipe C Dangerakko di Kelurahan Dangerakko dan pembangunan terminal penumpang tipe C Telluwanua di Kelurahan Maroangin.
      6) Pembangunan dan pemeliharaan jembatan tersebar di seluruh wilayah Kota Palopo.
   2. Perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:

1) Pembangunan jaringan jalur kereta pai berupa jaringan jalur kereta api umum meliputi jaringan jalur kereta api antar kota Pare-pare – Wajo – Palopo – Masamba – Malili untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
2) Pembangunan stasiun kereta api berupa stasiun penumpang, stasiun barang, dan stasiun operasi terdapat di Kelurahan Songka.

3. Pengembangan jaringan transportasi laut, meliputi:
   1) Pengembangan pelabuhan pengumpul yakni Pelabuhan Tanjung Ringgit di Kelurahan Pontap.
   2) Pelabuhan perikanan berupa pangkalan pendaratan ikan di Kelurahan Pontap.

j. Perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
   a) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi
      1. Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan – konsumen melalui wilayah Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan wara Timur, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara, dan Kecamatan Telluwanua yang merupakan bagian dari jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan dan gas bumi Sengkang-Palopo-Malili.
      2. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
         a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung pembangkit listrik tenaga *micro hydro* (PLTMH) Bambalu di Kelurahan Battang Barat.
         b. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung terdiri atas:
            (1) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) yang melalui Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Mungkajang, dan Kecamatan Sendana.
            (2) Jaringan distribusi tenaga listrik berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM) dan saluran udara tegangan rendah (SUTR) melalui semua kecamatan.
            (3) Gardu listrik berupa Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Palopo di Kelurahan Mungkajang; dan
            (4) Rencana jaringan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
   a. Jaringan tetap, terdiri atas:
      1) Stasiun telepon otomatis terdapat di Kelurahan Amassangan dan Kelurahan Lagaligo; dan
      2) Jaringan kabel serat optik, dan jaringan kabel lainnya tersebar di seluruh wilayah kota.
   b. Jaringan bergerak, terdiri atas:
      1) Jaringan bergerak terestrial yang tersebar di seluruh wilayah kota.
      2) Jaringan bergerak seluler yang tersebar di seluruh wilayah kota.
      3) Jaringan bergerak satelit yang tersebar di seluruh wilayah kota.
4. Pengembangan jaringan sumber daya air, meliputi:
   a. Jaringan irigasi primer berupa DI Lamasi di Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Maroangin, Kelurahan Jaya, dan Kelurahan Salubattang; dan
   b. Jaringan irigasi sekunder terdiri atas:
      1) DI Mawa terdapat di Kelurahan Mawa, Kelurahan Sendana, Kelurahan Purangi, dan Kelurahan Songka;
      2) DI Tomarundung I terdapat di Kelurahan Tomarundung;
      3) DI Tomarundung II terdapat di Kelurahan Tomarundung dan Kelurahan Lebang;
      4) DI Padang Lambe terdapat di Kelurahan Padang Lambe dan Kelurahan Sumarambu; dan
      5) DI Sumarambu terdapat di Kelurahan Sumarambu dan Kelurahan Padang Lambe.
   c. Sistem pengendalian banjir berupa jaringan pengendalian banjir di Kelurahan Salubattang, Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Songka, Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Sendana, Kelurahan Mawa, Kelurahan Tompotikka, Kelurahan Dangerakko, Kelurahan Amassangan, Kelurahan Surutanga, Kelurahan Salotellue, Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan To'bulung, Kelurahan Buntu Datu, Kelurahan Rampoang, dan Kelurahan Temmalebba.

2.1.1.2.7 Perwujudan Infrastruktur Perkotaan

a. Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)
   1) Pengembangan SPAM jaringan perpipaan, meliputi:
      a) unit air baku terdapat di Kelurahan Latuppa, Kelurahan Battang Barat, Kelurahan Padang Lambe, Kelurahan Rampoang, dan Kelurahan Sampoddo;
      b) unit produksi terdapat di Kelurahan Murante, Kelurahan To'bulung, Kelurahan Battang Barat, Kelurahan Battang, Kelurahan Mancani, Kelurahan Padang Lambe, dan Kelurahan Sampoddo; dan
      c) unit pelayanan berupa hidran kebakaran tersebar di wilayah Kota Palopo.

2) Pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, yang tersebar di wilayah Kota Palopo pada sub-sub wilayah yang belum terlayani sistem jaringan perpipaan.

b. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL), meliputi:
   1) SPAL non domestik berupa pengembangan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) di Kelurahan Maroangin.
   2) SPAL domestik terdiri atas:
      a) Sub sistem pengolahan terpusat berupa instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) di Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Songka, dan Kelurahan Balandai,
      b) Sub sistem pengolahan setempat terdapat di masing-masing unit bangunan perumahan dan bangunan gedung lainnya.

   c. Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
      Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa instalasi pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terdapat di Kelurahan Batu Walenrang.

   d. Pengembangan sistem jaringan persampahan;
      1) Tempat Penampungan Sementara (TPS) terdapat di Kelurahan Lagaligo, Kelurahan To'bulung, Kelurahan Mancani, Kelurahan Takkalala, Kelurahan Songka, Kelurahan Salobulo, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Lebang, Kelurahan Pontap, dan Kelurahan Rampoang.
      2) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ditetapkan di Kelurahan Mancani dan Kelurahan Batu Walenrang dengan menggunakan metode lahan urug saniter.

   e. Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi;
      1) Jalur evakuasi bencana banjir
      2) Jalur evakuasi bencana tanah longsor
      3) Jalur evakuasi gelombang ekstrim dan abrasi
      4) Jalur evakuasi kebakaran gedung dan permukiman
      5) Jalur evakuasi kebakaran hutan dan lahan
      6) Tempat evakuasi bencana, berlokasi di Lapangan Pancasila di Kelurahan Tompotikka, Lapangan Gaspa di Kelurahan Boting, Lapangan Kodim di Kelurahan Salobulo, Gedung *Saodenrae Convention Center* di Kelurahan Batupasi, Gedung Islamic Center di Kelurahan Takkalala, Gedung Stadion Lagaligo di Kelurahan Lagaligo, Lapangan Kelurahan Battang, Lapangan Kelurahan Latuppa, Lapangan Kelurahan Kambo, dan Lapangan Kelurahan Maroangin.

   f. Pengembangan sistem drainase, meliputi:
      1) Jaringan drainase primer;
      2) Jaringan drainase sekunder; dan
      3) Jaringan drainase tersier

   g. Perwujudan jalur sepeda:
      1) Berupa pembangunan sarana dan prasarana pelengkap fungsi jalur sepeda dan tempat parkir sepeda di beberapa ruas jalan kota.
      2) Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan ekonomi kreatif, pemasangan media/papan informasi, dan pengembangan jalur hijau.
      3) Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengancam keamanan dan keselamatan pesepeda, dan kegiatan mengganggu fungsi utama jalur sepeda.
      4) Sarana dan prasarana minimal berupa penerangan jalan umum, marka, tempat parkir sepeda, sarana keamanan dan keselamatan pesepeda, serta sarana dan prasarana pendukung jalur sepeda.

   h. Pembangunan jalur pejalan kaki, meliputi:
      Pembangunan sarana dan prasarana pelengkap fungsi jaringan pejalan kaki, sarana keamanan dan keselamatan pejalan kaki, pengembangan jalur hijau, penyediaan perabot jalan *(street furniture)*, penyediaan tata informasi *(signage)*, pengaturan jalur penyeberangan perlintasan sebidang atau tidak sebidang, dan penyediaan jalur berkebutuhan khusus (jalur disabilitas).

Gambar 2. 7
Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi

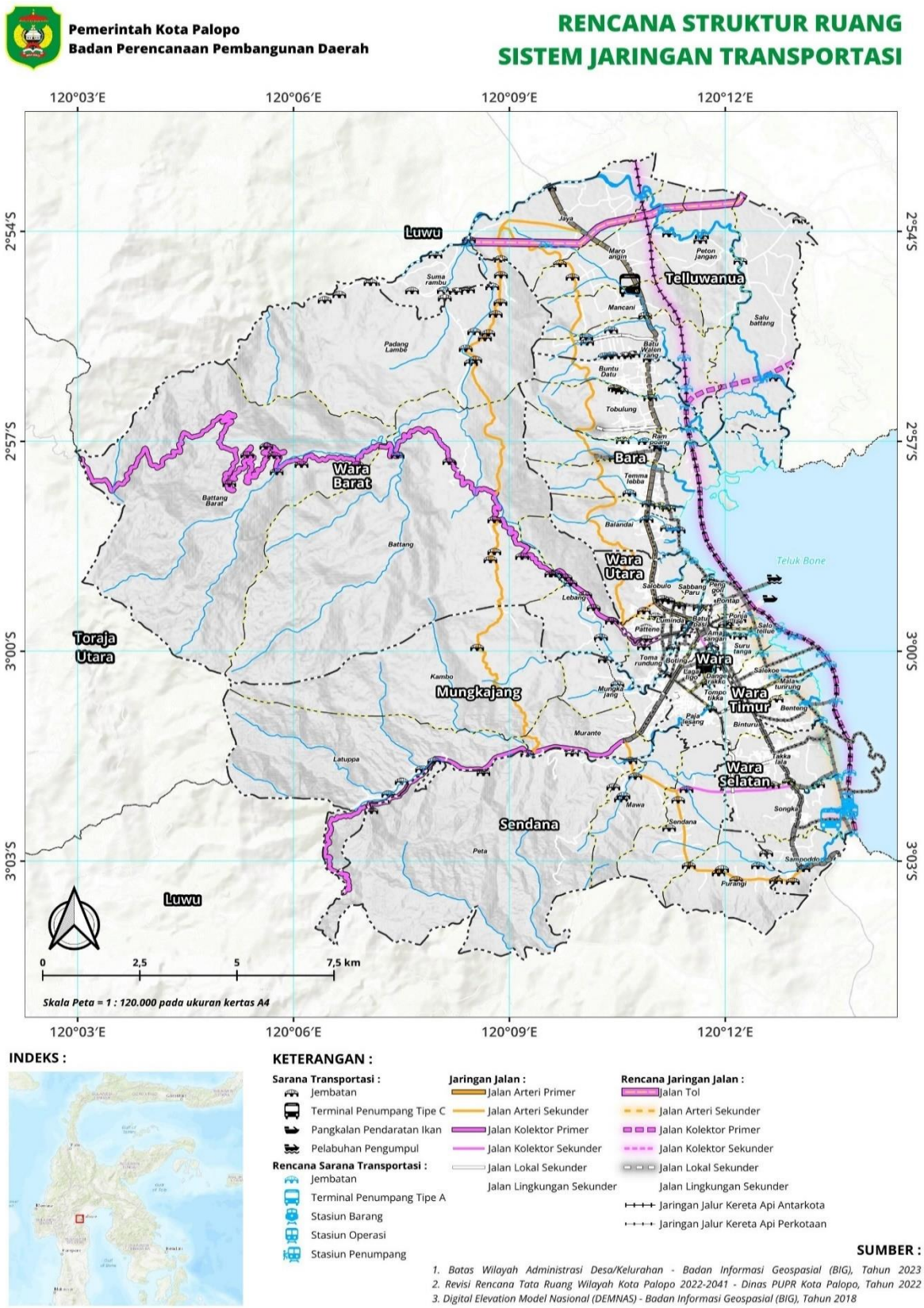

Gambar 2. 8
Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi

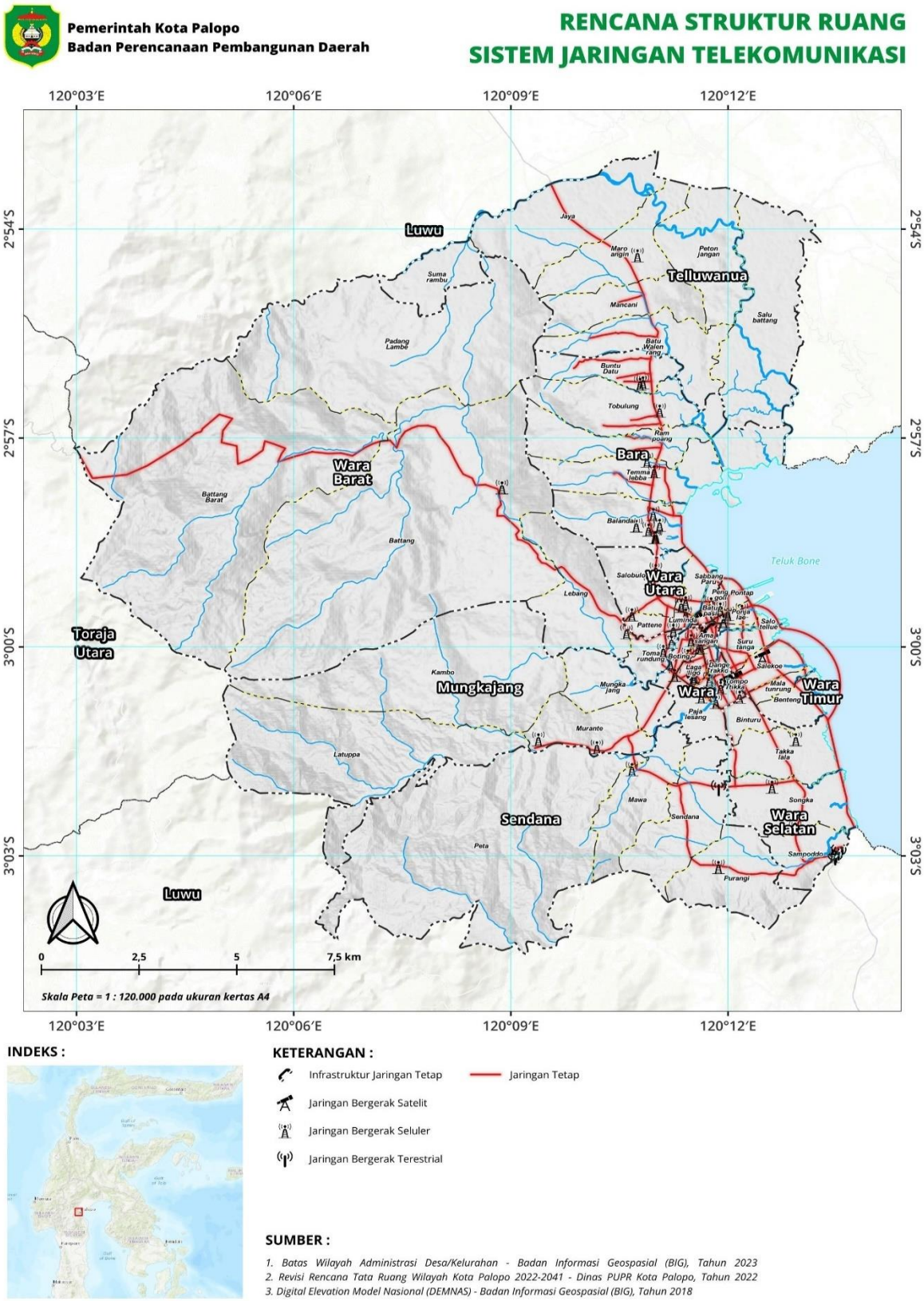

Gambar 2. 9
Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi

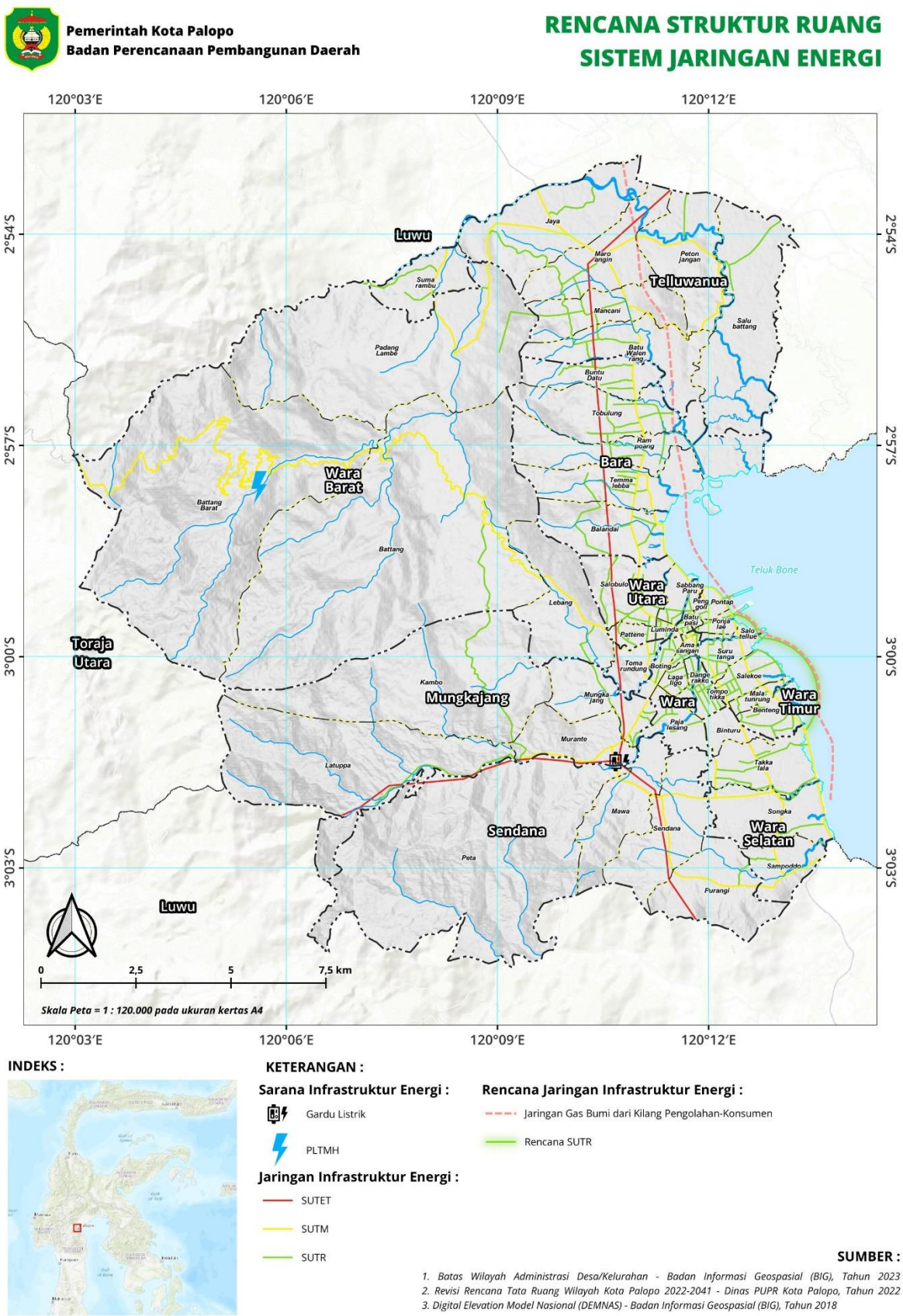

Gambar 2. 10
Rencana Struktur Ruang Jaringan Sumberdaya Air

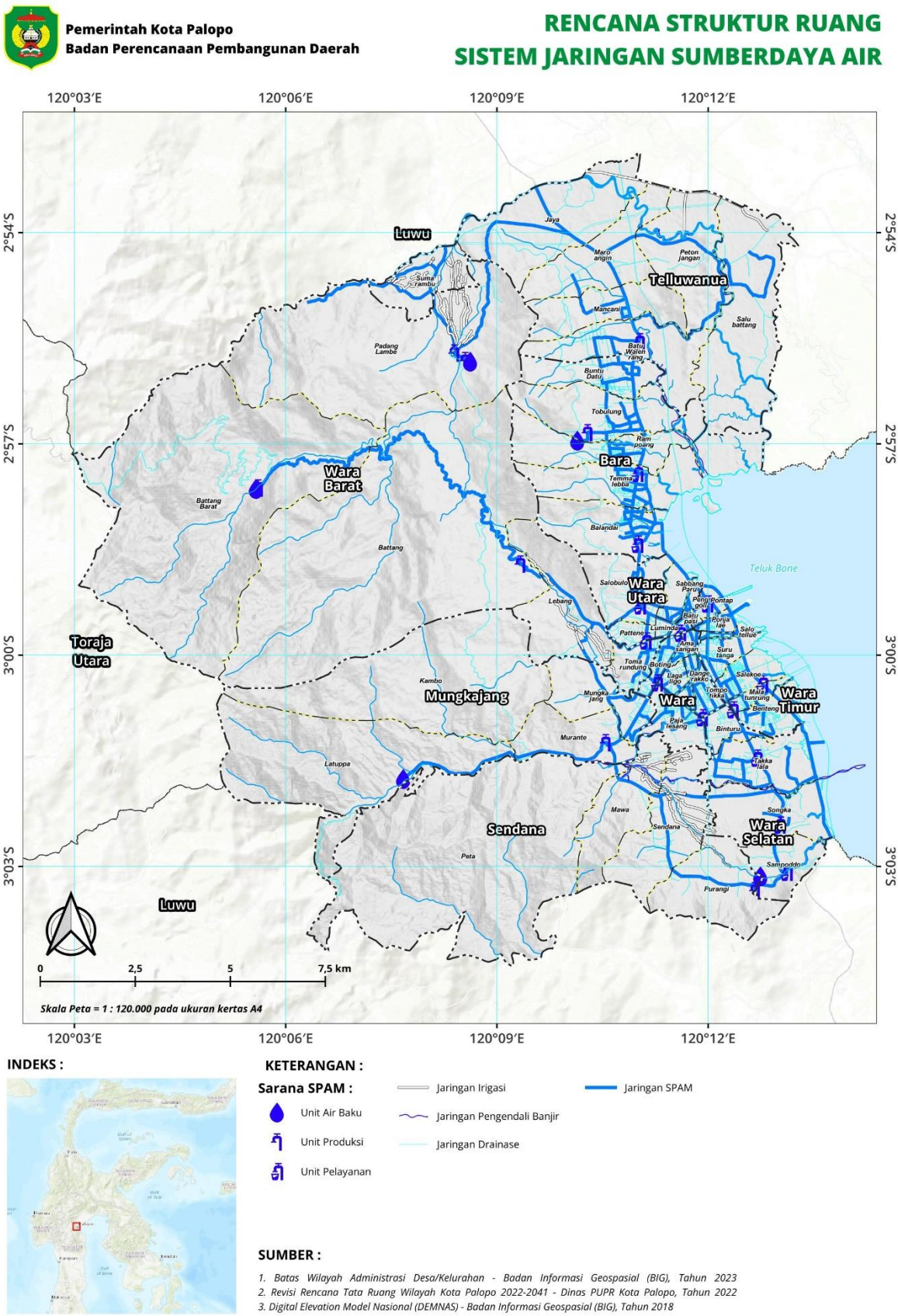

2.1.1.2.8 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat, Sekitar satu milyar penduduk dunia akan mengalami kelaparan jika produksi pangan tidak ditingkatkan sebanyak tiga kali lipat pada kurun waktu tahun 2000-2050, Permasalahan utama terjadinya ancaman krisis pangan di Indonesia adalah menurunnya kesuburan tanah dan berkurangnya luas lahan karena adanya konservasi lahan sawah ke non sawah.

Pemerintah Kota Palopo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Daerah ini mengamanatkan dilindunginya lahan pertanian untuk menjamin kedaulatan pangan secara berkelanjutan. Bentuk perlindungan lahan pertanian tersebut yaitu dengan ditetapkannya kawasan untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan di tiga kecamatan dan sepuluh kelurahan yang dikelompokkan dalam lahan basah dan lahan kering yang luasan lahannya merupakan luasan lahan pertanian padi dan palawija. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan :

1. Melindungi kawasan dan lahan; pertanian pangan secara berkelanjutan; tersedianya lahan pertanian pangnan secara berkelanjutan;
2. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
3. Melindungi kepemilikan lahan pertanian milik petani;
4. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
5. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
6. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
7. Mempertahanan keseimbangan ekologis, dan Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Palopo dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).

Grafik 2. 1
Data Lokasi dan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Palopo

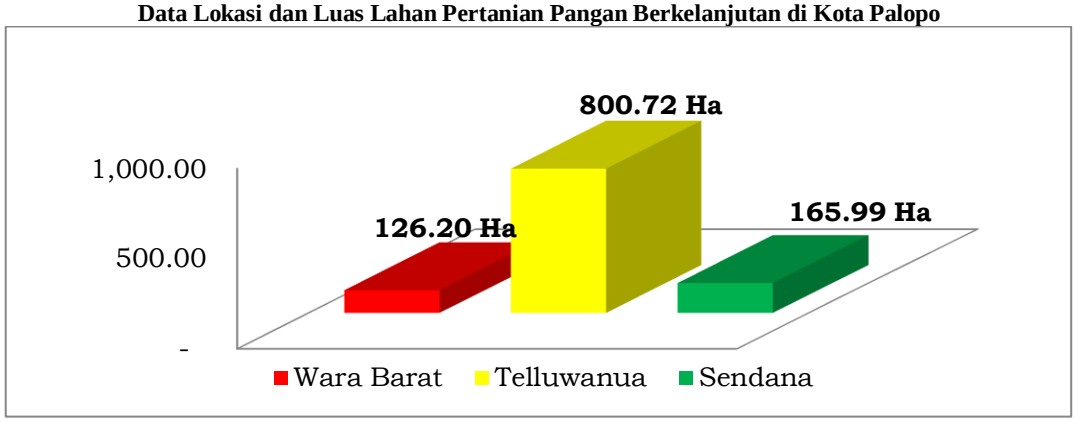

Sumber : Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Grafik 2. 2
Data Lokasi dan Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Palopo

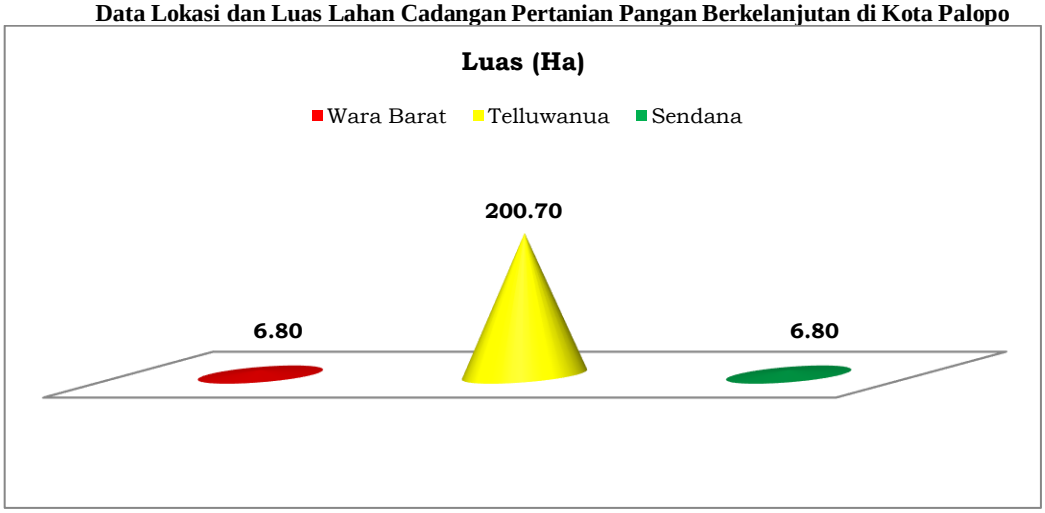

Sumber : Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Grafik 2. 3
Data Lokasi dan Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Palopo

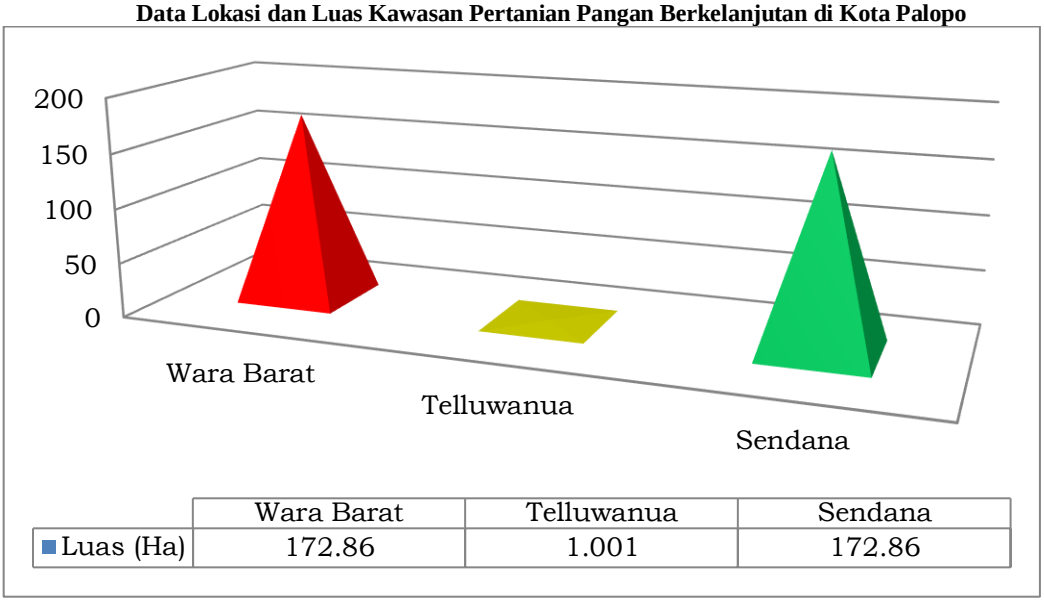

	Wara Barat	Telluwanua	Sendana
Luas (Ha)	172.86	1.001	172.86

Sumber : Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

2.1.1.2.9 Wilayah Rawan Bencana

Kota Palopo memiliki kontur topografi daerah dataran rendah yang berbatasan dengan pantai/laut, kemudian daerah perbukitan, dan lereng pegunungan yang berbatasan dengan kabupaten Toraja Utara sehingga resiko untuk terjadi bencana lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya di sekitar Luwu raya. Menurut data BPBD Kota Palopo bencana alam yang umum terjadi di daerah Palopo adalah tanah longsor dan banjir. Selain bencana alam tersebut menurut Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) ada penambahan bencana yang merupakan imbas dari cuaca ekstrem yang melanda Indonesia yaitu angin puting beliung dan angin kencang. Berdasarkan dari hasil rilis BNPB INARISK lewat data Indeks Resiko Bencana tahun 2023 Kota Palopo memiliki skor 167,40 kategori tinggi.

Dalam menghitung indeks resiko bencana diperoleh dari fungsi resiko bencana yaitu ancaman (*Hazard*), kerentanan (*Vulnerability*), dan kapasitas (*Capacity*) terkait bencana. Selama tahun 2015-2023 Kota Palopo masih berada di peringkat pertama indeks resiko bencana dari 24 kab/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan. Indeks Resiko Bencana Kota Palopo dan daerah sekitarnya disajikan pada gambar dibawah.

Gambar 2. 11
Indeks Resiko Bencana Kota Palopo dan Kabupaten Tetangga 2015-2023

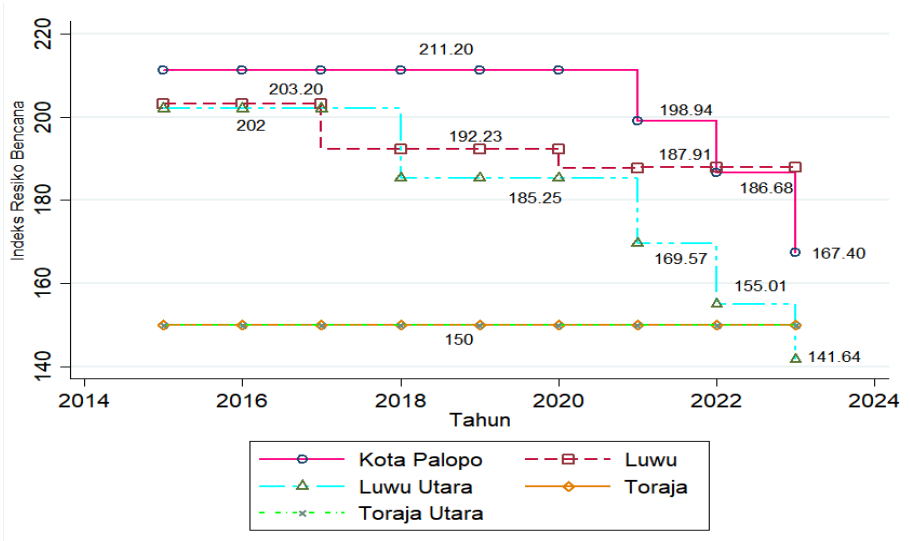

Sumber : https://inarisk.bnpb.go.id/

Mengingat Kota Palopo memiliki potensi tinggi terjadinya bencana, maka pada tahun 2023 yang merujuk kepada Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022-2041 disusunlah dokumen Kawasan resiko bencana

(KRB) oleh BPBD Kota Palopo. Pemetaan kategori resiko bencana terbagi menjadi bencana banjir, bencana longsor, bencana cuaca ekstrim, bencana gelombang ekstrim dan abrasi.

Gambar 2. 12
Peta Resiko Bencana Kota Palopo 2023-2027

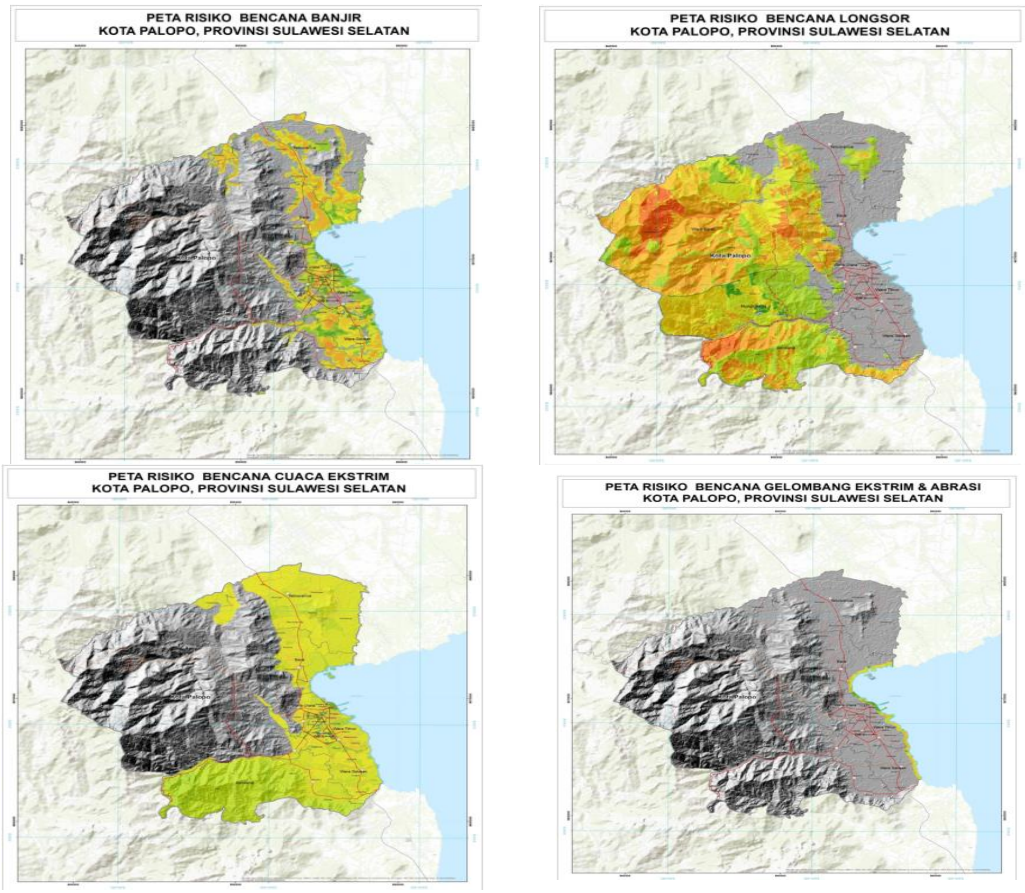

Sumber : Dokumen KRB BPBD Kota Palopo, 2023

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana, maka diperlukan deteksi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah agar sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak dan bermartabat kepada masyarakat. Hasil dari kejadian bencana tahun sebelumnya dapat menjadi acuan untuk memprediksi kejadian bencana yang akan terjadi. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah kejadian bencana di Kota Palopo.

Tabel 2. 5
Kejadian Bencana di Kota Palopo Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angin kencang/angin puting beliung / *Tornado*	-	5	42	17		
2	Gempa Bumi / *Earthquake*	-	-	-	-	-	
3	Tanah longsor / *Landslide*	3	3	7	6	7	3
4	Banjir / *Flood*	3	2	9	17	18	4
5	Banjir bandang / *Flash floods*					1	
6	Kekeringan /*Drought*	-	-	-	-	-	7
7	Kebakaran hutan dan lahan / *Forest and Land Fires*	-	7	-	-	-	7
8	Angin kencang/Angin putting beliung / *Tornado*					1	2
9	Gelombang pasang /*Tidal wave*						
10	Abrasi / *Abrasion*	-	-	-	-	-	

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka, 2024

2.1.1.3 Kondisi Demografi Wilayah

Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan. Oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik, dan sebaliknya akan menjadi potensi besar apabila mampu dikelola dengan baik. Jumlah penduduk Kota

Palopo menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun dalam kurun waktu 2018 – 2022, tetapi tahun 2023 mengalami penurunan secara signifikan menjadi 177.526 jiwa atau hampir sama dengan jumlah penduduk di tahun 2017 .

Perkembangan jumlah penduduk di Kota Palopo menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, dimana jumlah pada Tahun 2018 sebesar 180.678 jiwa meningkat menjadi 190.867 jiwa pada Tahun 2022. Bila dilihat dari sebarannya, penduduk Kota Palopo tersebar di sembilan kecamatan. Sebaran penduduk tersebut cenderung belum merata. Sebaran penduduk terbanyak berada di kecamatan Wara Timur sebesar 39.356 jiwa atau sekitar 20,62 persen penduduk Kota Palopo berada di wilayah ini. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya yaitu Kecamatan Sendana sebanyak 7.635 jiwa atau hanya sekitar 4 persen penduduk Kota Palopo. Penyebaran penduduk yang tidak merata disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor ekonomi. Wilayah yang menyediakan peluang dan lapangan pekerjaan tentu saja lebih padat penduduknya dibandingkan dengan wilayah yang kondisinya berkebalikan. Selain itu, kemudahan pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat juga dapat mempengaruhi kepadatan penduduk.

Gambar 2. 13
Jumlah Penduduk Kota Palopo Tahun 2010 – 2023

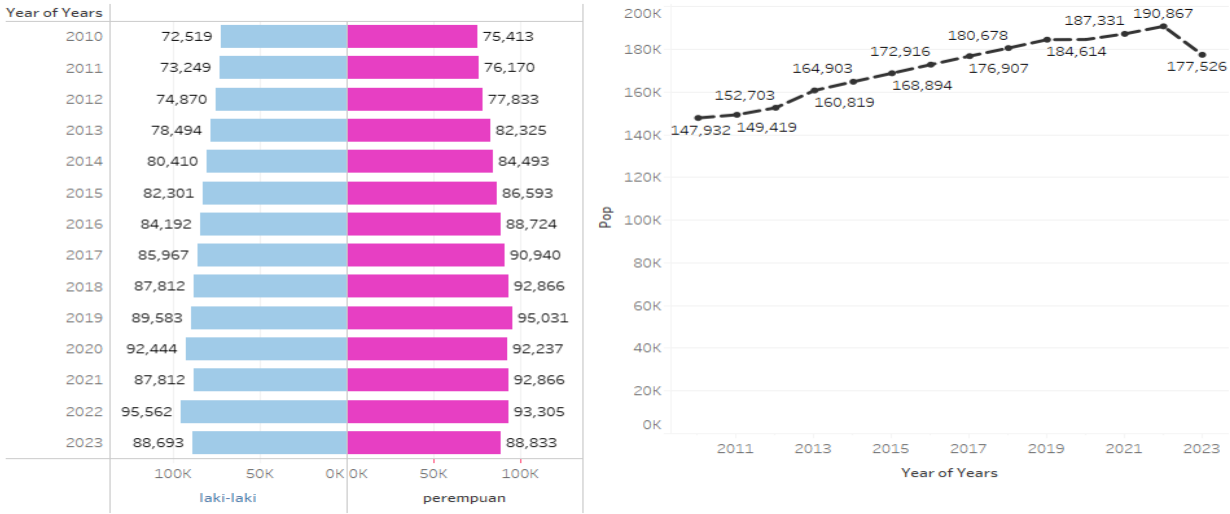

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka, 2019-2023

Kota Palopo dihuni sebanyak 177.530 jiwa penduduk pada tahun 2023 dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 717.22 jiwa per km^2. Kecamatan Wara Timur merupakan wilayah yang penduduknya paling padat. Secara rata-rata setiap 1 km^2 di Kecamatan Wara Timur dihuni oleh sebanyak 3049.67 jiwa penduduk. Kecamatan wara timur masuk dalam peruntukan tata ruang permukiman, yang berdekatan dengan kecamatan wara yang merupakan wilayah peruntukan jasa, perdagangan, dan pusat perkantoran. Kota Palopo sebagai daerah perkotaan dihadapkan pada masalah kepadatan penduduk. Rincian kepadatan penduduk per kecamatan ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 6
Kondisi Demografi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan penduduk (jiwa/km^2)
1	Wara Selatan	10,66	18880	1.29	10.64	1771.11
2	Sendana	37,09	7600	-2.3	4.28	204.88
3	Wara	11,49	29390	-5.13	16.55	2557.79
4	Wara Timur	12,08	36840	-4.76	20.75	3049.67
5	Mungkajang	53,8	9570	-0.37	5.39	177.9
6	Wara Utara	10,58	19600	-5.43	11.04	1852.46
7	Bara	23,35	28730	-4.39	16.19	1230.54
8	Telluwanua	34,34	16080	-1.59	9.06	468.29
9	Wara Barat	54,13	10830	-5.75	6.1	200.15
PALOPO		**247,52**	**177530**	**-3.67**	**100**	**717.22**

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka Tahun 2024

Jumlah penduduk Kota Palopo Tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 88693 jiwa atau 49,96% dan 88833 jiwa penduduk perempuan atau 50,04%. Rincian komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar :

Grafik 2. 4
Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Palopo Tahun 2023

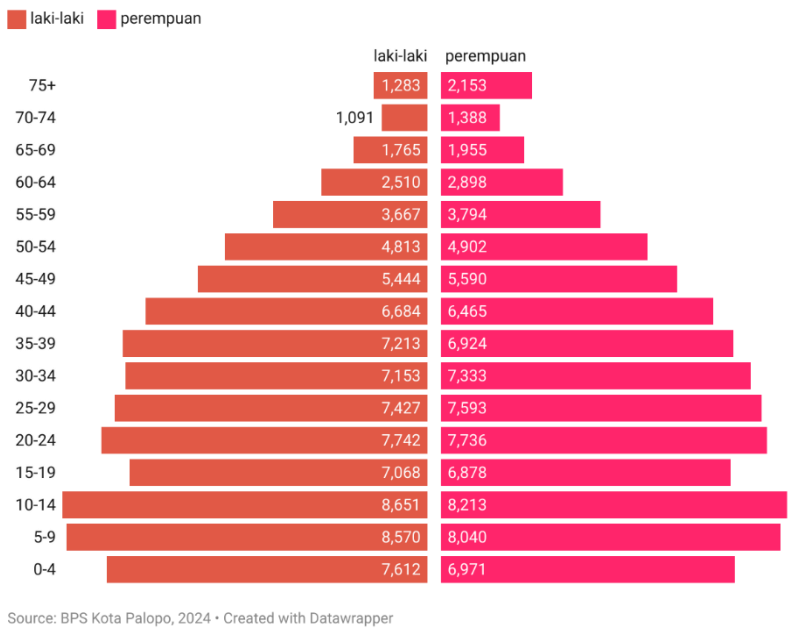

Dari piramida penduduk di atas dapat terlihat bahwa dari 190.867 jiwa penduduk tercatat sekitar 25,35 persen berada pada usia muda (0-14 tahun) dan 5,36 persen pada kelompok usia tua (65 tahun keatas), selebihnya sekitar 69,29 persen berada pada kelompok usia produktif (usia 15 – 64 tahun) atau dengan kata lain beban tanggungan (*dependency ratio*) Kota Palopo Tahun 2022 sebesar 0,44 persen yang berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif Kota Palopo akan menanggung secara ekonomi sebesar 0,44 persen penduduk usia tidak produktif.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator makro ekonomi yang menjadi tolak ukur dalam kemajuan ekonomi suatu daerah dalam satu periode adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengindikasikan *output* agregat yang dihasilkan dari nilai transaksi dan kegiatan ekonomi lapangan usaha maupun rumah tangga. Variabel yang dipakai dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah PDRB (produk domestik regional bruto) atas harga konstan tahun 2010 atas lapangan usaha dan PDRB atas harga konstan tahun 2010 menurut pengeluaran konsumsi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo dari tahun 2011 hingga 2023 mengalami tren fluktuatif di angka 7-5%, sehingga dapat dikatakan dalam 20 tahun kedepan pertumbuhan ekonomi Kota Palopo masih berada pada angka ± 7-6% terjadi peningkatan 2% dari tahun awal penyusunan dokumen ini. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi sempat turun secara signifikan yaitu sebesar 0.45 persen karena Pandemi Covid-19, tetapi geliat ekonomi kembali membaik pada Tahun 2021 yang mampu mengangkat kembali angka pertumbuhan ekonomi menjadi 5,41% dan 5,83%. Pada tahun 2023 mengalami perlambatan menjadi 4,34% karena disisi kontibutor PDRB menurut pengeluaran mengalami penurunan di sisi pengeluaran pemerintah. Kondisi ini dipicu karena pada tahun 2023 APBD mengalami defisit yang berimbas terhadap belanja jasa dan barang pemerintah.

Grafik 2. 5
Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo, provinsi dan nasional Tahun 2011-2023 (%)

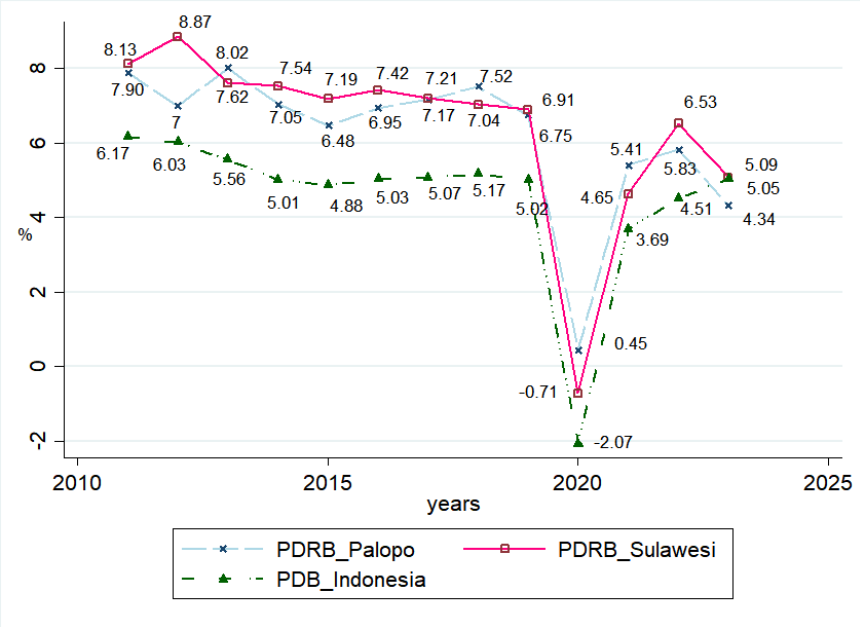

Sumber : BPS, 2024

Kontributor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Palopo adalah lapangan usaha sektor perdagangan jasa 25,89%, pertanian perkebunan 14,93%, dan kontruski 14,76% .Selama 5 tahun kebelakang nilai PDRB juga mengalami kenaikan dari Rp 5.102,99 milyar di tahun 2018 menjadi Rp 6369,71 milyar di tahun 2023.

Tabel 2. 7
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha 2018-2023

Bidang /Urusan	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	830,61	871,74	884,51	923,60	956	951.24
Pertambangan dan Penggalian	6,71	6,82	6,76	7,16	8,06	8.55
Industri Pengolahan	129,18	139,20	130,85	134,79	147,42	155.98
Pengadaan Listrik dan Gas	5,67	5,89	6,10	6,73	6,59	7.11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	14,75	15,42	15,42	15,40	16,45	17.32
Konstruksi	734,33	779,14	774,84	816,75	894,51	940.22
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.291,73	1.421,61	1.426,60	1.491,21	1.568.52	1648.94
Transportasi dan Pergudangan	286,15	312,34	268,07	304,64	345,35	367.16
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	59,80	64,55	60,02	64,27	68,42	74.18
Informasi dan Komunikasi	303,02	335,22	376,60	387,66	409,51	435.33
Jasa Keuangan dan Asuransi	383,21	382,09	391,48	423,52	446,9	488.69
Real Estate	233,02	246,38	258,25	265,22	283,1	298.69
Jasa Perusahaan	4,61	5,07	4,97	5,14	5,68	6.24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	368,09	380,14	377,91	399,87	400,15	392.60
Jasa Pendidikan	247,46	262,10	26,576	272,25	270,4	277.42
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137,06	145,79	150,56	172,78	283,83	196.16
Jasa Lainnya	67,61	73,88	73,37	77,63	93,85	103.87
Total PDRB (ADHK)	**5.102,99**	**5.447,36**	**5.472,08**	**5.768,28**	**6.104,74**	**6369,71**

Sumber : BPS Kota Palopo

Selain dari kontribusi lapangan usaha pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dan pemerintah yang diukur melalui pendekatan pengeluaran PDRB. PDRB atas Pengeluaran merupakan total pengeluaran dari konsumsi akhir rumah tangga, konsumsi akhir LNPRT, konsumsi akhir pemerintah, investasi fisik serta ekspor neto.

Gambar 2. 14
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2023 (Milyar Rp)

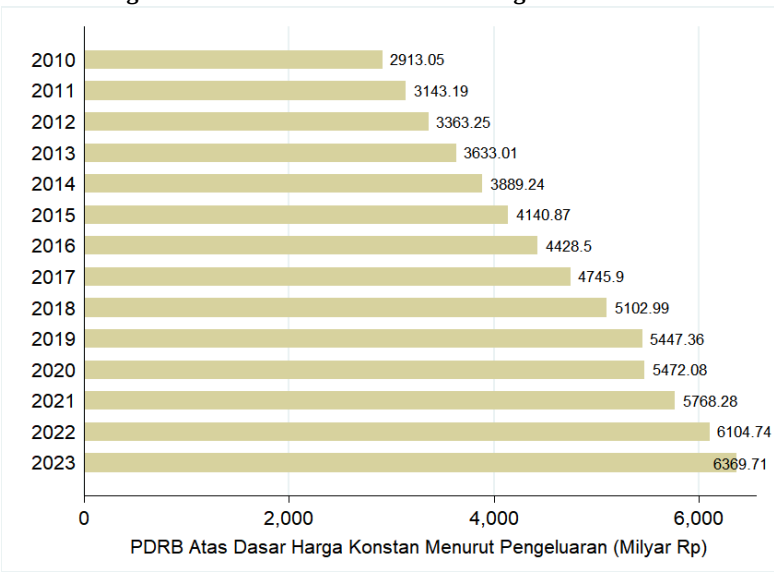

Sumber : BPS Kota Palopo

Selama tahun 2010-2023 PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut pengeluaran, mengalami tren kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2010 PDRB yang masih berada pada angka 2.913,05 milyar rupiah selama 13 tahun meningkat menjadi 6.369,71 milyar rupiah. Kontributor utama yang mendorong peningkatan PDRB menurut pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga yang diikuti dengan PMTB (pembentukan modal tetap bruto) lihat pada tabel.2.

Tabel 2. 8
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2023

Tahun	Konsumi RT	Konsumsi LNPRT	Konsumsi Pemerintah	PMTB	Perubahan Inventori	Net Ekspor Barang/Jasa
2010	1698.25	38.36	444.25	1068.94	25.33	-362.08
2011	1811.12	40.81	473.14	1212.89	14.75	-409.53
2012	1928.69	43.68	486.64	1310.62	81.98	-488.35
2013	2064.75	48.16	505.01	1423.71	-36.12	-372.50
2014	2204.66	53.54	522.58	1509.58	21.24	-422.37
2015	2347.74	54.75	560.31	1603.55	24.58	-450.06
2016	2470.38	56.31	551.16	1729.89	20.90	-400.14
2017	2617.15	58.95	572.51	1834.83	2.13	-339.67
2018	2781.53	66.17	658.51	1923.48	6.44	-333.14
2019	2958.86	80.94	685.45	2046.07	2.59	-326.55
2020	2982.13	75.24	666.49	2038.64	2.25	-292.67
2021	3075.00	74.15	704.23	2142.20	2.32	-229.62
2022	3266.35	81.45	711.66	2317.35	3.32	-275.40
2023	3478.46	89.95	722.08	2443.65	2.94	-367.38

Sumber : BPS Kota Palopo

Konsumsi rumah tangga masih menjadi faktor utama di Kota Palopo yang menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi, urutan kedua adalah PMTB, yang merupakan belanja barang modal memiliki masa pakai lebih dari satu tahun atau aktivitas dari kegiatan inverstasi dan bukan barang konsumsi.

2.1.2.1.2 Inflasi

Perhitungan inflasi di daerah dihitung berdasarkan IHK (Indeks Harga Konsumen) yang didasarkan atas survey biaya hidup, meliputi 11 kelompok yaitu makanan, minuman, dan tembakau; pakaian alas kaki; perumahan, air,listrik, dan bahan bakar rumah tangga; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kesehatan; pendidikan; transportasi; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; rekreasi, olahraga, dan budaya; penyediaan makan dan minum restoran; perawatan pribadi dan jasa lainnya. Di Sulawesi Selatan, terdapat 5 kabupaten/kota yang merupakan kabupaten/kota IHK yaitu Bulukumba, Watampone, Makassar, Pare-pare, dan Palopo. Inflasi Sulawesi Selatan merupakan inflasi gabungan 5 kabupaten/kota IHK tersebut. Pada tahun 2023, inflasi Kota Palopo tercatat sebesar 2,21 %, dan masuk kategori paling rendah dibandingkan daerah lainnya termasuk provinsi seperti yang diarsir dalam warna biru muda.

Gambar 2. 15
Inflasi dan IHK Bulanan Kota Palopo Tahun 2016-2023

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bulukumba	2.78	4.12	2.16	2.30	2.25	3.85	4.66	1.48
Bone	2.84	5.52	2.26	1.89	1.64	4.69	5.54	1.50
Makassar	2.89	5.81	2.26	2.13	2.43	3.48	4.48	3.18
Pare-pare	2.22	6.66	4.09	1.61	2.45	1.96	3.43	2.11
Palopo	2.21	5.13	2.96	1.21	1.91	4.19	3.95	2.74
SULAWESI SELATAN	2.81	5.77	2.40	2.04	2.35	3.50	4.44	2.94

Source: BPS 2024 • Created with Datawrapper

2.1.2.1.3 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan diartikan sebagai keterbatasan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan yang diukur melalui pengeluaran konsumsinya. Seseorang individu dikatakan masuk dalam status miskin apabila pengeluaran konsumsi per kapita per bulan berada dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah kebutuhan minimal yang dikeluarkan seorang individu untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan (beras, umbi-umbian, ikan dan sebagainya) dan non pangan (perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi dan sebagainya). Untuk pengeluaran makanan, nilai rupiah minimum yang dibutuhkan oleh seseorang dapat dikatakan hidup layak atau sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhan energinya sebesar 2100 kilo kalori per hari. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin apabila mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Perhitungan garis kemiskinan dilakukan oleh BPS dan telah memperhitungkan inflasi dan perubahan indeks harga konsumen. Persentase kemiskinan Kota Palopo mengalami trend penurunan selama 12 tahun terakhir, tetapi disisi lain garis kemiskinan mengalami peningkatan setiap tahunnya (Gambar.5).

Tahun 2023 garis kemiskinan Kota Palopo mengalami peningkatan menjadi Rp.442.276, dari tahun sebelumnya yang hanya Rp. 403.144,-. Tetapi disisi lain persentase penduduk miskin turun dari 7,78% menjadi 7,69% tahun 2023. Proses penurunan persentase penduduk miskin membutuhkan proses yang panjang dimulai dari tahun 2010 sebesar 11,28% menjadi 1 digit di tahun 2023 selama 12 tahun, oleh karena itu proses penurunan kemiskinan adalah proses berkelanjutan yang akan diteruskan oleh kepala daerah melalui RPJMD tahun selama 5 tahun dan RPJP selama 20 tahun kedepan.

Grafik 2. 6
Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Palopo

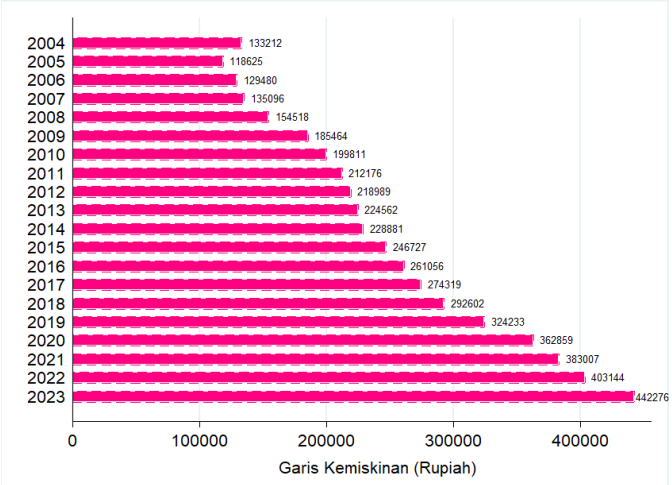



Sumber : BPS Kota Palopo

Kemiskinan merupakan bagian dari kehidupan manusia sehingga untuk menghapuskan adalah hal yang mustahil, untuk mengurangi ya, tetapi untuk menghapuskan 0% tidak. Walaupun demikian pada tahun 2023 Kota Palopo masuk dalam urutan 9 terendah, persentase penduduk miskin dari 24 kab/kota provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 2. 7
Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

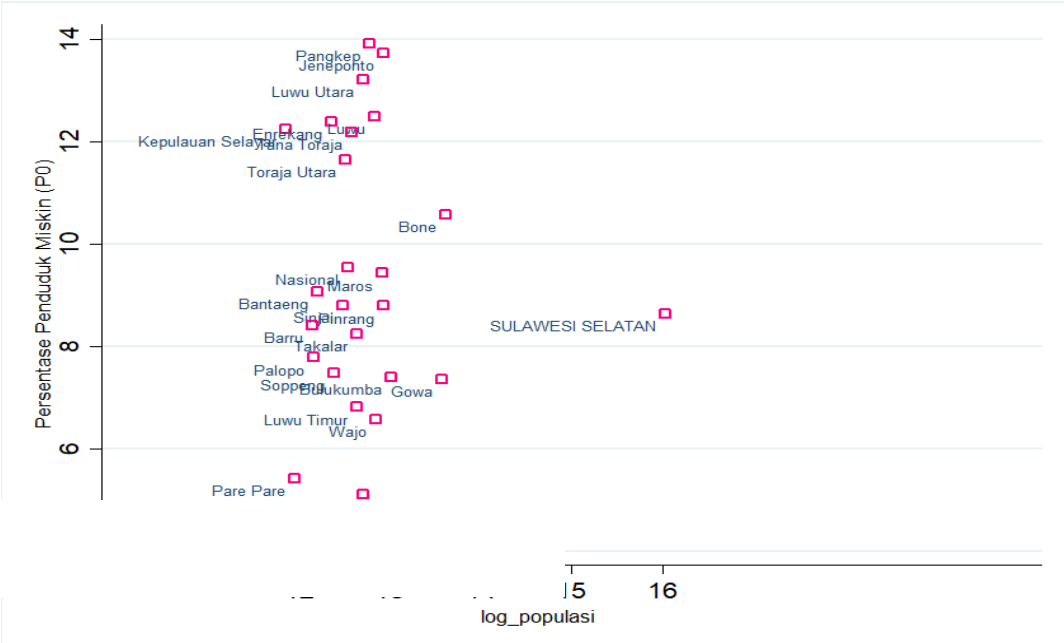

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan proses penghapusan kemiskinan ekstrim yang telah ditargetkan Presiden menjadi 0%. Pada kasus ini memang bisa dihapuskan menjadi 0% atau dengan kata lain dihilangkan, karena miskin ekstrim adalah kondisi miskin kronis yang berada dilevel terbawah. Miskin ekstrim merupakan bagian dari kondisi miskin, apabila secara keselurahan penduduk yang masuk kategori miskin ekstrim di Kota Palopo naik status menjadi kategori miskin maka Kota Palopo jumlah penduduk miskin ekstrim 0%.

Tingkat kemiskinan Kota Palopo jika dibandingkan dengan wilayah setara menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Kota Palopo masih lebih tinggi dibanding 5 wilayah lainnya, namun lebih baik disbanding Kabupaten Takalar, Barru dan Pinrang. Data selengkapnya perbandingan tingka kemiskinan Kota Palopo dengan wilayah setara selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2. 9
Perbandingan Persentase Tingkat Kemiskinan

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wajo	7.50	6.91	6.95	6.46	6,57	6,73
Luwu Timur	7.23	6.98	6.85	6.94	6,81	6,93
Bulukumba	7.48	7.26	7.10	7.43	7,37	7,22
Gowa	7.83	7.53	7.38	7.54	7,36	7,42
Soppeng	7.50	7.25	7.59	7.53	7,49	7,48
Palopo	7.94	7.82	7.85	8.14	7,78	7,69
Takalar	9.00	8.70	8.44	8.25	8,25	8,29
Barru	9.04	8.57	8.26	8.68	8,40	8,46
Pinrang	8.81	8.46	8.86	8.81	8,79	8,90

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Dalam Angka Tahun 2017-2023.

Konsep perhitungan penduduk miskin ekstrim hampir sama dengan penduduk miskin hanya batas pengeluaran konsumsi per kapitanya yang membedakan. Penduduk miskin ekstrim adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan tidak lebih dari USD $ 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau sesuai dengan perhitungan BPS tahun 2022 sebesar Rp.304.626,- per kapita per bulan. Kota Palopo jumlah penduduk miskin ekstrim mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 1,94% menjadi 2,18% tahun 2022. Pada tahun 2023 dengan Perhitungan BPS menigkat menjadi 7,69 di Kota Palopo.

Gambar 2. 16
Penduduk Miskin Ekstrim Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2022 (%)

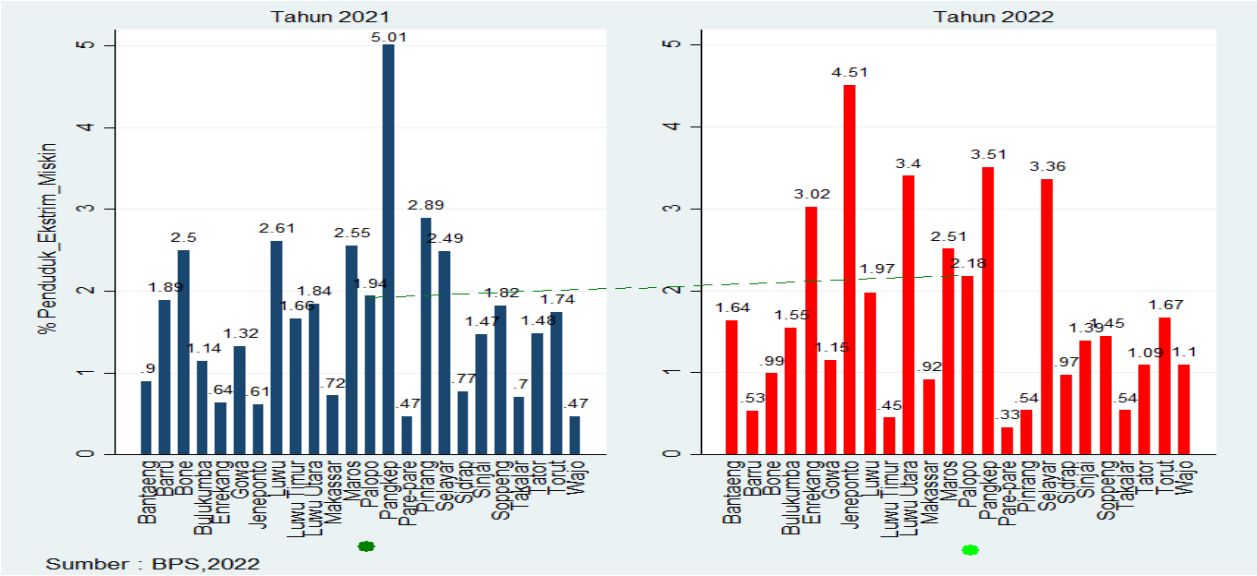

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023

Dari ketiga kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Palopo berada diurutan terbawah setelah Pare-Pare, dan Makassar. Pengentasan kemiskinan adalah pekejaan rumah yang harus diselesaikan setiap periode Wali Kota yang menjabat. Salah satu caranya adalah melalui intervensi fiscal melalui program kegiatan perangkat daerah. Kemudian perlu dicatat bahwa dalam proses penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim tidak dapat dilakukan sendiri, diperlukan upaya kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait diluar pemerintah.

Perspektif kemiskinan tidak hanya pada sudut pandang jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Tetapi diperlukan dimensi lain seperti tingkat keparahan dan tingkat kedalaman kemiskinan agar permasalahan kemiskinan secara menyeluruh dapat diketahui. Strategi penanggulangan kemiskinan tidak hanya menekankan pada pengurangan penduduk miskin, tetapi juga bagaimana memperkecil tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada tahun 2020 Indeks kedalaman kemiskinan Kota Palopo sebesar 0,95 dan terus meningkat dalam kurun waktu dua tahun terakhir kemudian menurun pada tahun 2023. Pada tahun 2023, P1 Kota Palopo sebesar 1,10 atau turun 0,33 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran

penduduk miskin Kota Palopo semakin dekat dari garis kemiskinan atau semakin membaik dalam kemiskinan daripada tahun 2022.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Sama halnya dengan kondisi P1, indeks keparahan kemiskinan Kota Palopo selama 2020 hingga 2022 cenderung mengalami peningkatan namun menurun pada tahun 2023. Pada tahun 2020, Indeks P2 sebesar 0,21 dan meningkat hingga menjadi 0,35 pada tahun 2022 kemudian turun menjadi 0,25. Artinya, pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Palopo semakin mengecil ketimpangannya dibandingkan dengan tahun 2022. Kondisi kemiskinan di Kota Palopo perlu penanganan yang lebih lanjut. Meskipun persentase penduduk miskin relatif turun pada tahun 2022, namun rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan dan semakin timpang pengeluaran antar penduduk miskin tersebut. Dengan demikian, perlu upaya penanggulangan dari pemerintah agar penduduk miskin tersebut dapat dibebaskan dari kondisi miskin yang tidak terlalu dalam dan memberikan penanganan yang berbeda-beda berdasarkan tingkat keparahannya.

Tabel 2. 10
Kondisi dan Perbandingan angka Kemiskinan Kota Palopo dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasinal

Indikator	Capaian Kinerja Kota Palopo					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penduduk Miskin (%)	7.94	7.82	7,85	8,14	7,78	7,69
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	14,270	14,370	14,710	15,210	14.780	14.850
Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	292,602	324,233	362,859	383,007	403.144	442.276
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.14	1.15	0.95	1.17	1,43	1.10
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.26	0.29	0.21	0.30	0,35	0.25
Capaian Kinerja Provinsi						
Persentase Penduduk Miskin (%)	8,87	8,69	8,72	8,78	8,63	8.70
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	779.640	767.800	776.830	784.980	777.440	788.850
Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	316.988	341.555	350,264	372.41	399.755	436.025
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,68	1,63	1,65	1,40	1,36	1.57
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,51	0,43	0,46	0,34	0,32	0.41
Capaian Kinerja Nasional						
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,66	9,41	10,19	9,71	9,54	9.36
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	25.95 Juta	24.79 Juta	27.55 juta	26.50 juta	26,16 jt	25.9 Jt
Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	408.962	440.538	458. 947	486.168	505.469	550.458
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,63	1,5	1,75	1,67	1,58	1.53
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,41	0,36	0,47	0,42	0,39	0.38

Sumber : BPS, 2024

2.1.2.1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relative dari pasokan tenaga kerja*(labour supply)* yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekenomian.

Tingkat partisipasi Angkatan kerja di Kota Palopo masih rendah serapannya dan lebih rendah disbanding dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Hal tersebut diakibatkan oleh karena pertumbuhan penduduk alami yang setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga berpengaruh terhadap jumlah Angkatan kerja. Di sisi lain jumlah lapangan pekerjaan di Kota Palopo masih sangat terbatas sekali. Sehingga Angkatan kerja yang mengalami penambahan tidak terserap. Akibatnya dapat dilihat di kota-kota besar termasuk Kota Palopo menjamur pekerjaan sektor informal yang mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo. Kondisi ketenagakerjaan Kota Palopo disajikan pada tabel statistik angkatan kerja dibawah.

2.1.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 2. 11
Statistik Angkatan Kerja Kota Palopo 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Angkatan kerja 15 tahun ke atas	Orang	75.829	80.564	85.299	87.800	91.960	94.881
- Laki – Laki	Orang	45.831	47.611	49.391	49.668	54.442	38.597
- Perempuan	Orang	29.998	32.953	35.908	38.132	37.518	56.284
Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	Orang	129.460	133.176	136.892	136.407	142.488	3.419
- Laki – Laki	Orang	61.900	63.611	65.322	65.328	70.712	1.863
- Perempuan	Orang	67.560	69.565	71.570	71.079	71.776	1.556
Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun)	Orang	121.883	124755	127.627	126.565	132.252	5.738
- Laki – Laki	Orang	58.794	60.142	61,490	61.246	66.318	3.585
- Perempuan	Orang	63.089	64.613	66.137	65.319	65.934	2.153
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	%	74,04	74,85	75,66	76,09	70	0.59
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	44,4	47,37	50,34	53,82	40,80	0.40
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	58,57	60,49	62,41	64,49	64,54	94.88
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	%	77.95	79.16	80,37	81,15	76,99	0.57
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	47.55	51.00	54,45	59,95	52,27	0.42
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	58.31	64.58	70,85	73,36	63,65	87.471

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan BPS Kota Palopo,2024

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

TPT Kota Palopo mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 2022 dari 8,20%, menjadi 7,81% di tahun 2023. Perbandingan TPT antara provinsi dan nasional Kota Palopo masih lebih tinggi, TPT provinsi Sulawesi selatan tahun 2023 sebesar 7,81%. Pengangguran di Kota Palopo lebih tinggi daripada provinsi dan nasional, dapat dijelaskan bahwa tingginya angka pengangguran di Kota Palopo disebabkan adanya pengangguran terselubung (*disguised unemployment*) yaitu pengganggguran yang terjadi karena jam kerja secara kumulatif dalam seminggu kurang dari 35 jam. Pengangguran ini biasanya terjadi di Kota yang struktur lapangan usahanya adalah jasa/ perdagangan dan sektor pertanian. Sejalan dengan data BPS Kota Palopo (2022), bahwa lapangan pekerjaan utama yang menyerap angkatan kerja adalah sektor jasa dengan 63.629 tenaga kerja.

Tingkat parisipasi Angkatan kerja menunjukkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai TPAK, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada semakin banyak pasokan tenaga kerja *(labour supply)* yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa.

Kemudian dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka pada wilayah setaranya, terdapat 7 kabupaten/kota lainnya yang menunjukkan capaian yang lebih baik. Namun demikian capaian Kota Palopo lebih baik jika dibanding daerah setaranya yang berada di Kota Makassar. Data selengkapnya terkait perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo, wilayah setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional pada tabel 2.22

Tabel 2. 12
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palopo

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bantaeng	3.69	3.65	4.27	4.07	4.07	3,71
Wajo	3.79	3	4.33	4.32	4.32	2,10
Sidrap	4.7	4.35	5.91	4.93	4.93	3,29
Luwu Timur	2.18	3.81	4.46	4.96	4.96	5,42
Pangkep	6.91	4.99	5.18	5.86	5.86	5,05
Maros	6.19	4.42	6.28	6.3	6.3	3,64
Kota Pare-pare	6.81	6.17	7.14	6.72	6.72	5,86
Barru	5.38	5.39	6.39	6.74	6.74	5,89
Kota Palopo	10.76	9.67	10.37	8.83	8.20	7,81
Kota Makassar	12.19	9.83	15.92	13.18	13.18	10,60

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sulawesi Selatan	4.94	4.62	6.31	5.72	5.72	7,81
Nasional	5.3	5.23	7.07	6.49	6.49	4.82

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Dalam Angka Tahun 2018-2024

2.1.2.1.6 Gini Rasio

Gini rasio indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Nilai gini rasio $0<x<1$, atau dalam rentang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Semakin besar nilai gini rasio menunjukkan ketimpangan yang tinggi antara penduduk miskin dan kaya, sedangkan semakin kecil atau mendekati 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Indikator gini rasio menunjukkan semakin rendah / mendekati 0 adalah semakin baik.

Gambar 2. 17
Perbandingan GINI Rasio Nasional, Provinsi, dan Kota Palopo Tahun 2015-2023

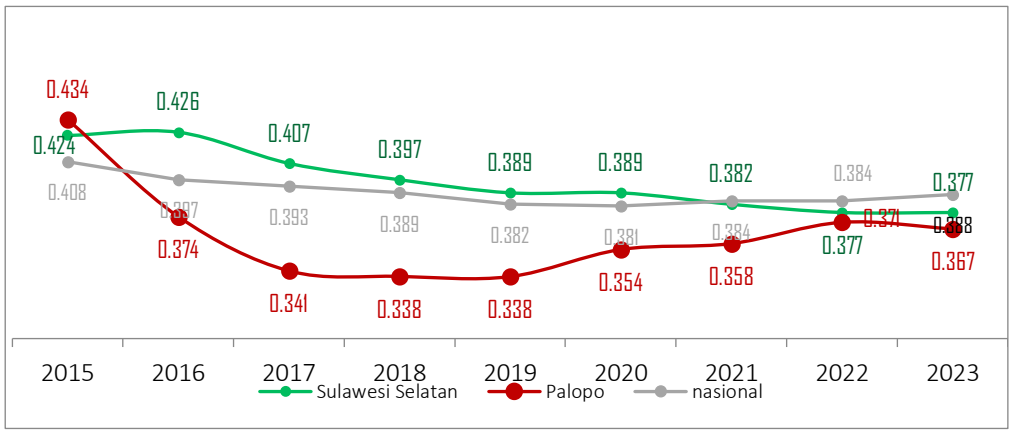

Sumber : BPS 2015-2024

Selama periode 2015-2018, gini rasio Kota Palopo cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015 gini ratio sebesar 0,434 dan menjadi sebesar 0,338 pada tahun 2019. Namun, pada saat terjadinya Covid-19 di tahun 2020, gini ratio naik menjadi 0,354 poin dan terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 0,371 poin yang masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Palopo semakin besar pasca terjadinya COVID-19. Ketimpangan pendapatan ini dibuktikan dengan indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan yang terus meningkat pasca COVID-19. Meskipun demikian, bila dibandingkan dengan nasional, gini rasio Kota Palopo cenderung lebih rendah. Pada tahun 2023, Kota Palopo mengalami penurunan gini rasio menjadi 0,367 point. Hal yang perlu diwaspadai adalah besaran gini rasio Kota Palopo pada tahun 2023 masih belum bisa kembali seperti sebelum covid-19 yang pada tahun 2019 di angka 0.338 poin. Jika hal ini terus terjadi, bukan hal yang tidak mungkin laju peningkatan kemiskinan ektrem Kota Palopo sulit untuk ditekan. Perkembangan Gini Rasio di Kota Palopo dari tahun 2018-2023, ditahun 2018 berjumllah 0,338 sedangkan di tahun 2023 berjumlah 0,367 ini berarti mengalami kenaikkan.

Tabel 2. 13
Perkembangan Gini Rasio Beberapa Wilayah di Kota Palopo dan beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Luwu	0.362	0.352	0,396	0.375	0,364	0.341
Tana Toraja	0.369	0.362	0,348	0.378	0,355	0.350
Luwu Utara	0.361	0.364	0,344	0.341	0,349	0.342
Luwu Timur	0.398	0.387	0,405	0.396	0,394	0.393
Toraja Utara	0.411	0.384	0,384	0.372	0,356	0.348
Makassar	0.383	0.390	0,400	0.400	0,395	0.387
Parepare	0.382	0.350	0,373	0.381	0,379	0.381
Palopo	**0.338**	**0.338**	**0.354**	**0.358**	**0,371**	**0,367**
Sulawesi Selatan	0.397	0.389	0.389	0.382	0,377	0,388
Nasional (Maret)	0.389	0.382	0.385	0.379	0,381	0,377

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2024

2.1.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia adalah suatu indikator yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah dalam membangun kualitas manusianya yang diukur melalui indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Indikator kesehatan dilihat dari komponen yang membentuk indikator tersebut yaitu angka harapan hidup (AHH), indikator pendidikan dari komponen harapan lama sekolah (HLS) dan RLS (rata-rata lama sekolah), dan indikator ekonomi dari

paritas daya beli. Nilai IPM Kota Palopo selama tahun 2020-2023 mengalami tren peningkatan dari angka 79,39 menjadi 80,77 pada tahun 2023.

Gambar 2. 18
IPM Kota Palopo 2020-2023

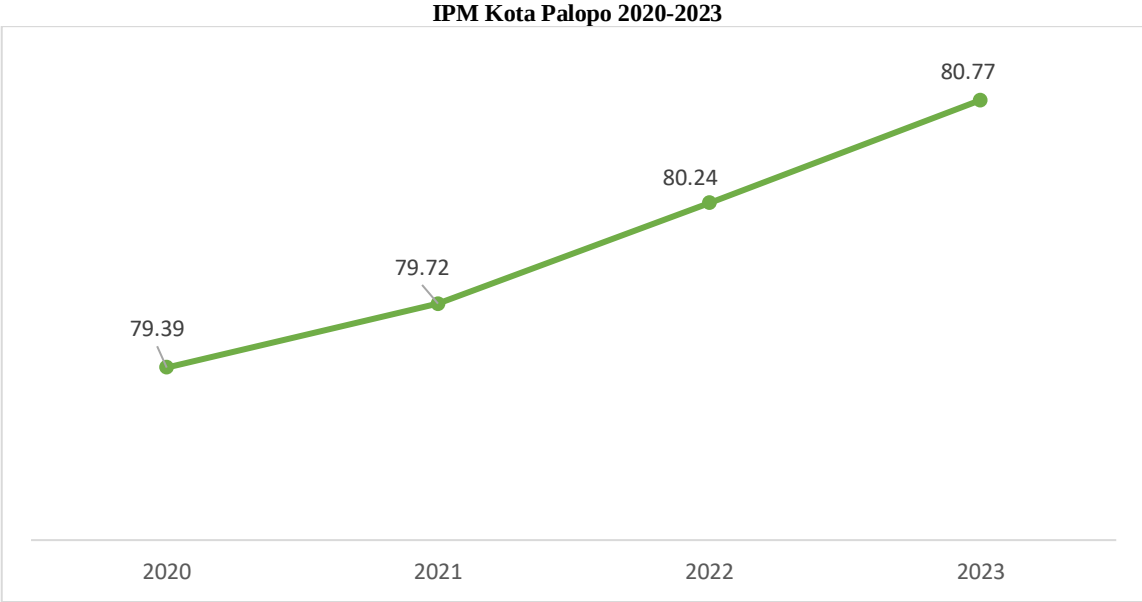

Sumber : BPS Kota Palopo

Tabel 2. 14
IPM Menurut Dimensi dan Indikator Penyusunan Tahun 2020 – 2023

Dimensi	Indikator Penyusunan IPM	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Kesehatan	Umur Harapan Hidup (tahun)	73.53	73.57	73.81	74.00
	Indeks Kesehatan	82.35	82.42	82.78	83.08
Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15.08	15.09	15.10	15.12
	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10.76	10.94	11.09	11.13
	Indeks pendidikan	77.76	78.38	78.91	79.10
Standar Hidup Layak	Pengeluaran Riil per Kapita (ribu rupiah)	12,995	13,117	13,404	13,892
	Indeks pengeluaran	78.14	78.43	79.09	80.18

Sumber : BPS Kota Palopo

Capaian dimensi dan indikator penyusunan IPM Kota Palopo dalam waktu 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada Tabel diatas. Hasil capain selama tahun 2022 indeks Kesehatan 83,08 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Indeks Pendidikan 79,10 di tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, kemudian standar hidup layak mengalami peningkatan juga menjadi 80,18. Ketiga indikator dimensi penyusun IPM mengalami peningkatan, sehingga berpengaruh terhadap nilai kumulatif yang dikonversikan menjadi IPM.

Dalam melakukan pengukuran keberhasilan pembangunan suatu wilayah tidak hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan ekonominya saja, tetapi juga mencakup kualitas manusianya. Oleh karena itu, konsep pengukuran keberhasilan pembangunan harus berorientasi kepada pelakunya (manusia atau masyarakatnya), yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas masyarakat sebagai manusia. Pembangunan manusia yang mencakup tiga dimensi pokok yaitu kesehatan (umur panjang), pendidikan (pengetahuan) dan daya beli (standar kehidupan layak) dapat dilihat dari perkembangan IPM di suatu wilayah.

2.1.2.1.8 Angka Rata – Rata Lama Sekolah

Perbandingan capaian RLS Kota Palopo dengan beberapa daerah, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2. 15
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah 2018-2023

Wilayah	Capaian Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Palopo	10.51	10.75	10.76	10,94	11,09	11,13
Pare-Pare	10.29	10.30	10.45	10,56	10,66	10.76
Makassar	11.09	11.20	11.21	11,27	11,55	11.53
Sulawesi Selatan	8.02	8.26	8.38	8,54	8,63	8.42
Nasional	8.17	8.34	8.48	8,60	8,69	8.78

Sumber : BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka 2023

Angka rata-rata lama sekolah di Kota Palopo tahun 2023 berada pada posisi 11,13 tahun. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan. Meski demikian, capaian angka rata-rata lama sekolah Kota Palopo ini jauh diatas angka RLS Nasional pada tahun 2022 yang berada pada angka 8.69 tahun dan RLS Sulawesi Selatan 2022 yang berada pada angka 8.63 tahun.

2.1.2.1.9 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka HarapanLama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Berikut adalah Harapan Lama sekolah Kota Palopo Tahun 2018-2023 :

Tabel 2. 16
Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah 2018-2023

Wilayah	Capaian Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Palopo	15.06	15.07	15.08	15,09	15,10	15,12
Pare-Pare	14.47	14.49	14.50	14,52	14,52	14,54
Makassar	15.55	15.56	15.57	15,76	15,59	15,61
Sulawesi Selatan	13.34	13.36	13.45	13,49	13,53	13,54
Nasional	12.91	12.95	12,98	13,03	13,10	13.16

Sumber : BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka 2023

Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Palopo Tahun 2023 menunjukkan capaian 15,12 yang masih dibawah jika dibandingkan dengan capaian HLS Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Fokus perbaikan untuk indeks pendidikan adalah pada capaian rata-rata lama sekolah. masih berada dibawah target HLS Kota Palopo yang berada pada angka 15.19 tahun.

2.1.2.1.10 Angka Harapan Hidup (AHH)

Pembangunan sector kesehatan memperlihatkan bahwa AHH Kota Palopo tahun 2023 sebesar 74 tahun. Capaian tersebut lebih baik dibanding AHH Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan Kota Pare-pare dan Makassar yang neunjukkan bahwa kinerja pembangunan kesehatan Kota Palopo masih perlu dioptimalkan. Dari tabel Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Palopo dapat dilihat dari tahun 2018-2023, dengan jumlah di tahun 2018 berjumlah 70,49 sedangkan di tahun 2023 sebanyak 74 ini menandakan angka harapan hidup di Kota Palopo meningkat.

Tabel 2. 17
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Palopo dengan beberapa Daerah

Wilayah	Capaian Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Palopo	70,49	70,79	70,88	70,92	71,18	74
Pare-Pare	70,88	71,18	71,27	71,31	71,57	72.18
Makassar	71,70	72	72,09	72,13	72,40	71.08
Sulawesi Selatan	70,08	70,43	70,57	70,66	70,97	71.11
Nasional			73.43	73.51	73.76	74

2.1.2.1.11 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah. Sedangkan Keluarga Sejahtera I adalah keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar *(basic needs)* secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan psikologisnya *(psychological needs)* seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca dan tulis latin.

Tabel 2. 18
Perkembangan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Bidang/Urusan	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	28.90	26.82	26.09	26.09	24,46	21,66	30.66

Sumber : Badan Pusat Statistik, P3KE 2023

2.1.2.1.12 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga

Jumlah group kesenian di Kota Palopo meningkat dari tahun 2017 sebanyak 18 group menjadi 31 group kesenian pada tahun 2023, sementara jumlah gedung kesenian jumlahnya tetap. Klub olahraga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 8 klub pada tahun 2017 menjadi 86 klub pada tahun 2023. Sedangkan gedung olahraga jumlahnya tetap sepanjang 2017-2023.

Tabel 2. 19
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Group Kesenian	18	18	30	31	32	31	31
Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah Klub Olahraga	8	8	86	86	86	86	86
Jumlah Gedung Olahraga	1	1	1	1	1	1	1

Sumber Data:Dinas Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo Tahun 2023

Dari tabel perkembangan seni, budaya dan olahraga kota Palopo dari tahun 2017-2023 dapat dilihat bahwa jumlah group keseinian pada tahun 2017-2018 sangat menurun hanya berjumlah 18 sedangkan ditahun 2021 mengalami peningkatan di tahuun 2023 mulai mengalami penurunan kembali. Jumlah gedung kesenian pada tahun 2017 -2023 berjumlah 1, jumlah klub olahraga dari tahun 2017 berjumlah 1 sedangkan di tahun 2023 bejumlah 86 ini menandakan mengalami peningkatan jumlah klub olahraga. Sedangkan jumlah gedung olahraga pada tahun 2017 berjumlah 1 samapi tahun 2023 tetap berjumlah 1 ini menandakan tidak ada penaikkan dan juga penurunan.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib

Layanan urusan wajib dasar diarahkan pada pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

2.1.3.1.1 Bidang Urusan Pendidikan

Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat mebaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidup sehari-harinya. . Angka melek huruf juga merupakan salah satu indikator pencapaian SDGs, yang akan menjamin bahwa pada tahun 2030 semua remaja dan proporsi kelompok penduduk dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. Usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis penduduk, antara lain melalui program kejar paket A, paket B, dan program keaksaraan fun gsional. Melalui program ini diharapkan penduduk yang tidak pernah sekolah mampu membaca dan menulis huruf latin, termasuk juga mampu berbahasa Indonesia. Angka melek huruf Kota Palopo dari tahun 2018 hingga tahun 2023 menunjukkan trend fluktuasi. Capaian angka melek huruf pada Tahun 2023 sebesar 98,42. Ini mengalami peningkatan perkembangan angka perkembangan melek huruf berusia >15 dari tahun 2018 sebelumnya.

Tabel 2. 20
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Palopo Tahun 2018-2023

Indikator		Capaian Tahun					
	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	%	97,71	98,40	98,14	97,94	97,57	98,42

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka, 2023

Pendidikan Anak Usia Dini

Merupakan jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak dibagi jumlah seluruh anak yang berusia 4-6 tahun yang dinyatakan dalam persentase. Tabel di bawah menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anak berusia 4-6 tahun mengakses pendidikan anak usia dini realtif masih rendah berada pada level 54.33 % dan belum mencapai angka 75%. Ini menunjukkan bahwa perlunya ada akselerasi program, kegiatan dan sub kegiatan, sehingga lebih banyak anak usia 5-6 tahun yang mengakses pendidikan anak usia dini di Kota Palopo. Sampai dengan tahun 2023, jumlah pendidikan anak usia dini di Kota Palopo, totalnya sebanyak 234 lembaga, termasuk yang berada dibawah Kementerian Agama. Jumlah ini terdiri dari PAUD 104, Raudatul Afhal (RA) sebanyak 5, TPA sebanyak 3, Satuan Paud Sejenis (SPS) sebanyak 2, Kelompok Bermain (KB) sebanyak 30, TK sebanyak 90. Beberapa aspek yang mesti menjadi perhatian dalam meningkatkan angka patrisipasi ini adalah memastikan edukasi dan sosialisasi urgensi pendidikan anak usia dini terhadap orang tua dan memastikan bahwa biaya pendidikan pada level ini bisa dijangkau oleh semua kalangan.

Tabel 2. 21
Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/ Penitipan Anak	Orang	4.698	3858	3988	3.496	3533	3564	3142
2	Jumlah anak usia 5 – 6 Tahun	Orang	6.714	6.554	6.562	6.562	6562	6560	6511
PAUD		%	63,16	63,12	63,10	53.28	53,84	54,33	50.29

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2023

Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi Kasar adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Angkanya menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Tabel 2. 22
Angka Partisipasi Kasar Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI/Paket A	112.89	105.99	104.62	105.20	100.05	98.08
2	SMP/MTs/Paket B	84.17	86.02	87.87	89.43	86.44	89.25

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo Dalam Angka, 2023;

Tabel di atas menunjukkan bahwa partisipasi kasar tingkat SD sederajat di Kota Palopo tahun 2018-2023 selalu melebihi 100%. Kondisi ini menggambarkan setiap tahunnya selalu ada penduduk yang sudah bersekolah di tingkat SD, meski umurnya belum mencukupi 7 tahun, atau melebihi umur yang seharusnya. Namun kondisi ini juga mencerminkan bahwa di Kota Palopo, untuk tingkat sekolah dasarnya, tetap mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya yakni penduduk berumur 7-12 tahun. Pada tingkat pendidikan SMP/sederajat, partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan ini fluktuatif. Jika pada tahun 2021 dari 100 orang penduduk berumur 13-15 tahun yang bersekolah rata-rata sebanyak 89 orang, pada tahun 2023 turun menjadi 98 orang per 100 penduduk umur 13-15 tahun.

Beberapa aspek yang sangat erat kaitannya dengan upaya meningkatkan partisipasi kasar adalah aspek ketersediaan sekolah, guru dan keterjangkauan biaya pendidikan. Olehnya ke depan melalui pelaksanaan pendidikan paripurna, Kota Palopo berharap mampu meningkatkan angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan dasar yakni SD dan SMP sederajat. Untuk menyikapi hal ini Pemerintah Kota Palopo melaksanakan program pendidikan gratis. Sehingga diharapkan dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan partisipasi pada anak usia sekolah.

Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Indikator ini menunjukkan besaran atau persentase komposisi penduduk usia menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki masing-masing tingkat pendidikan. Mulai dari SD, SMP dan SMA/sederajat. Ini untuk mengetahui tingkat kualitas pendidikan penduduk dengan menggunakan jenjang pendidikan tertentu sebagai batasan minimalnya atau sebagai bahan analisis pasar kerja. Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk suatu wilayah maka mencerminkan semakin tinggi taraf intelektualitas masyarakat di wilayah tersebut. Berikut adalah data penduduk usia 10 tahun keatas di Kota Palopo, sesuai tingkat pendidikan yang berhasil ditamatkan :

Tabel 2. 23
Penduduk Usia 10 Tahun ke atas di Kota Palopo yang Ditamatkan Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Angka pendidikan yang ditamatkan (%)							
1	Tidak/Belum Bersekolah (%)	7.02	6.31	6.64	7.32	7,13	7,19	7.33
2	Tamat SD/sederajat (%)	14.18	12.69	15.79	17.01	17,82	12.14	15.58
3	Tamat SMP/sederajat (%)	23.63	24.71	20.02	22.53	23.64	21.39	21.46
4	Tamat SMA (%)	36.68	37.88	36.19	33.58	33,34	36.72	34.13
5	Tamat SMK (%)	2.81	2.39	3.52	3.04	3,40	4.21	4.18
6	Tamat Perguruan Tinggi (%)	15.67	16.00	17.84	16.52	17,61	18.23	18.61
7	Diploma I/II (%)	0.37	0.38	0.39	0.41	0,42	0.25	0.32
8	Diploma III (%)	1.39	1.12	1.79	1.47	1,67	1.66	1.78

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Diploma IV/S1-S3 (%)	13.91	14.51	15.66	14.64	15,52	16.32	16.50

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo, 2023

Dari tabel diatas dari tahun 2017-2023 jumlah angka pendidikan yang ditamatkan, jumlah belum bersekolah ditahun 2017 ke tahun 2023 mengalami penigkatan jumlah anak yang belum bersekolah. Anak yang tamat SD dari tahun 2017 ke 2023 terus meningkat ditahn 2023 melonjak naik 7.33, anak tamat SMP ditahun 2017 berjumlah 23.63 sedangkan ditahun 2023 berjumlah 21.46 mengalami penrunan ditahun 2023. Angka tamat SMA ditahun 2018-2023 mengalami penurunn ditahun 2023 sedangkan tamataan SMK mengalami penaikkan ditahun 2023. Perguruan tinggi di tahun 2017 berjumlah 15.67 sedangkan ditahun 2023 berjumlah 18.61 ini menandaka tingkat tamat perguruan tinggi mengalami peningkatan. Diploma I/III ditahun 2017 samapai tahun 2023 mengalami penurunan, diploma III mengalami peningkatan ditahun 2023 sedangkan angka diploma IV/S1-S3 meningkat ditahun 2023.

Angka Partisipasi Murni

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu

Tabel 2. 24
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SD/MI	899,32	99,78	99.44	99.01	98,81	98,68	101.85
Laki-Laki	99,33	99,60	99.40	99.06	98.19	98.65	98.24
Perempuan	99,31	100,00	99.66	97.66	98.40	98.25	97.67

Sumber Data : Buku Palopo Dalam Angka, 2023 dan Dinas Pendidikan Kota Palopo;

Dari tabel angka partisipasi murni SD/MI di tahun 2017 sebanyak 899,32 ditahun 2023 sebanyak 101.85 ini menandakan mengalami peningkatan, angka laki-laki ditahun 2017 meningkat namun ditahun 2023 mengalami penurunan sedangkan perempuan mengalami penurunan juga ditahun 2023. Ini menandakan angka partisipasi murni masih menurun.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Tabel di bawah ini menunjukkan, APM pada tingkat pendidikan ini terus membaik setiap tahunnya. Jika tahun 2021, hanya 80,37 % anak usia 13-15 tahun yang tepat waktu bersekolah di tingkat SMP/MTs sederajat, pada tahun 2022 sudah mencapai angka 80,52%. Jumlah anak yang masuk tepat waktu sekolah semakin tinggi, menunjukkan daya serap sekolah pada tingkat pendidikan ini semakin membaik. Meski pun angkanya jika dibandingkan dengan APM tingkat SD sederajat, APM pada tingkat SMP/sederajat masih berada di bawah. Tabel angka partisipasi murrni di tahun 2017-2023, SMP/MTS di tahun 2023 mengalami peningkatan di tahun 2023 di tahun 2017 berjumlah 77,89 di tahun 2023 80,87. Jumlah laki-laki dan perempuan juga mengalami peningkatan di tahun 2023.

Tabel 2. 25
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket BKota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SMP/MTs	77,89	78,39	78.11	78.33	80,37	80.52	80.87
Laki-Laki	75,35	79,35	77.18	88.74	89,66	77,15	86.39
Perempuan	80,28	77,55	79.04	99.96	99,34	80	94.52

Sumber :Buku Palopo Dalam Angka, 2023 dan Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2023;

Angka Partisipasi Sekolah

Adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A

Tabel presentase partisipasi sekolah usia 7-12 ditahun 2017-2023 mengalami penurunan, jumlah angkat laki-laki menigkat di tahun 2017 namun mengalami penurunan di tahuun 2023 sedangkan perempuan mengalami penurunan di tahun 2023.

Tabel 2. 26
Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket AKota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7 - 12	99,32	99,78	99.70	99.53	99,53	98.81	99.10

Laki-Laki	99,33	99,60	99.46	75,62	75,69	75,66	66.17
Perempuan	99,31	100	99.94	73,14	73,46	73,33	62.90

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2023;

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B

Tabel presentase usia 13-15 ditahun 2017 meningkat namun di tahun 2023 mengalami penurunan , jumlah laiki-laki mengalami penurunan di 2023 dari tahun 2017 dan perempuan mengalami penurunan ditahun 2023 dari tahun 2017.

Tabel 2. 27
Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13 - 15	98,13	100	99.17	98.69	98,63	80.37	86.49
Laki-Laki	96,15	100	98.38	88.74	89,86	89,655	86.54
Perempuan	100	100	99.96	99.96	99,94	99,34	99.52

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2023;

Angka Putus Sekolah

Adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun). Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Contoh APTS 7-12 = 10,11% berarti secara rata-rata dari 100 anak usia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 10 sampai 11 anak yang putus sekolah dan lebih cenderung 10 anak yang putus sekolah.

Tabel 2. 28
Angka Putus Sekolah Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Bidang/Urusan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0.68	0,79	0,004	0,43	0,09	0,1	0.16
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	1.87	1,26	0,006	0,78	0	0,08	0.06

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo Dalam Angka 2017-2023;

Angka putus sekolah SD/MI mengalami penurunan di tahun 2023 dibandingkan ditahun 2017 dan angka putus sekolah SMP/MTs mengalami penurunan ditahun 2023 dibandigkan ditahun 2017.

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Tabel 2. 29
Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SD/MIKota Palopo Tahun 2017 - 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Capaian Kinerja APTS SD/MI Kota Palopo	Orang	153	179	74	74	35	18	22
2	Jumlah Seluruh APS SD/MI Kota Palopo (Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun yang pernah/sedang bersekolah)	Orang	22,500	22.617	22.838	14,543	14.712	17632	13505
Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI		%	0.68	0,79	0.32	0,51	0,33	0,1	0.16

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, diolah dari Palopo Dalam Angka 2017-2023,

Angka jumlah Capaian Kinerja APTS SD/MI Kota Palopo menurun ditahun 2023 dibandingkan ditahun 2017 sedangakan jumlah seluruh APS SD/MI Kota Palopo (Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun yang pernah/sedang bersekolah) juga mengalami penurunan ditahun 2023 dibandingkan tahun 2017.

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Tabel 2. 30
Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Capaian Kinerja APTS SMP/MTsKota Palopo	Orang	214	146	69	69	69	6	32
2.	Jumlah Seluruh Angka Partisipasi Sekolah (APS)SMP/MTs Kota Palopo (Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun yang pernah/sedang bersekolah)	Orang	11,465	11.595	11.722	75,880	76.009	8041	56480
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs		%	1.87	1,26	0.59	0,91	0,27	0,08	0.06

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, diolah dari Palopo Dalam Angka 2017-2022

Angka jumlah capaian kinerja APTS SMPMTs Kota Palopo mengalami penurunan di tahun 2023 dibandingkan tahun 2017, sedangkan jumlah penduduk usia 13-15 mengalami penurunan ditahun 2023 dibandingkan tahun 2017.

2.2.2.1.1.8 Angka Kelulusan

Angka kelulusan menunjukkan besar jumlah siswa yang tidak tinggal kelas atau berhasil menamatkan pendidikannya pada level yang sedang ia tempuh. Indikator ini menunjukkan keberhasilan para siswa dalam mengikuti ujian sekolahnya.

Tabel 2. 31
Angka Kelulusan Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Bidang/Urusan	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023
1	Angka Kelulusan SD	100	100	100	100	100	100	100
2	Angka Kelulusan SMP	99,30	99,38	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota PalopoTahun 2023

Angka kelulusan SD dari 2016-2023 berada di nilai 100 tidak naik dan tidak turun sedangkan angka kelulusan SMP meningkat di tahun 2023 dibaningkan tahun 2023.

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Tabel 2. 32
Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Orang	3.038	3.072	3193	3.086	3.106	2741	2894
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	Orang	3.038	3.047	3193	3.086	3.106	2741	2894
Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI		%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2022

Jumlah lulusan lulusan jenjang SD/MI menurun ditahun 2023 dibanding tahun 2023 sedangkan tingkat siswa jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya menurun juga di tahun 2023 dibandingkan tahun 2017 dengan presentase angka kelulsan.

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Demikian halnya dengan kelulusan tingkat SMP sederajat. Data pada tabel dibawah menunjukkan bahwa angka kelulusan dari tahun ke tahun 2019 sampai dengan terakhir berada pada kondisi ideal 100%. Jika pada tahun 2017-2018 persentase angka kelulusan masih pada posisi 99.30-99,38%. Jumlah lulusan SMP meningkat ditahun 2023 dibandingkan tahun 2017 sedangkan jumlah siswa jejang SMP/MTs meningkat ditahuun 2023 dibandingkan tahun 2017.

Tabel 2. 33
Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTsKota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	Orang	2.865	2.900	3178	2.713	2.935	2790	3206
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	Orang	2.885	2.918	3178	2.713	2.935	2790	3206
Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		%	99,30	99,38	100,00	100,00	100,00	100	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2023,

Angka Melanjutkan (AM)

Indikator ini menggambarkan persentase pelajar yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Angka ini diperoleh dengan membagi Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs terhadap jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya.

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah siswa SD/MI yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP/MTs mengalami penurunan setiap tahunnya. Jika pada tahun 2017 hanya pada angka 3361, pada tahun 2023 menjadi 2310. Kondisi ini mengalami penurunan.

Tabel 2. 34
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/Mts Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah siswa pada jenjang SMP/MTs Tingkat I	Siswa	3.361	3.388	3.178	2.713	2.622	2584	2310

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2023

Fasilitas Pendidikan

Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik.

Indikator ini menggambarkan kondisi umum bangunan sekolah SD atau yang setingkat yang layak dipakai proses belajar mengajar. Semakin tinggi nilai persentasenya, menunjukkan bahwa tersedia ruang kelas yang cukup untuk menunjang proses belajar mengajar. Data menunjukkan bahwa seluruh sekolah dasar (SD) di Kota Palopo kondisinya sudah baik dalam menunjang proses belajar mengajar. Tahun 2017 ke 2023 mengalami peningkatan.

Tabel 2. 35
Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Bidang/Urusan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Sekolah SD/MI berkondisi Baik	77	77	80	80	84	87	87
	Jumlah SD Negeri Berkondisi Baik	63	63	65	65	65	65	65
	Jumlah SD Swasta Berkondisi Baik	11	11	12	12	13	16	16
	Jumlah MI Negeri Berkondisi Baik	4	4	3	-	3	3	3
	Jumlah MI Swasta Berkondisi Baik	-	-	-	3	3	3	3
2	Jumlah seluruh SD/MI di Kota Palopo (Negeri dan Swasta)	80	80	80	80	87	88	88
	Jumlah SD Negeri	65	65	65	65	65	65	65
	Jumlah SD Swasta	11	11	12	12	13	16	16
	Jumlah MI Negeri	4	4	-	-	4	4	4
	Jumlah MI Swasta	-	-	3	3	3	3	3
Persentase Sekolah SD/MI Kondisi baik(%)		96.25	96,25	100	100	96,55	98,86	98,86

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2017-2023

Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik

Tabel 2. 36
Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Bidang/Urusan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah SMP/MTs Kondisi Baik	30	31	33	30	30	33	33
	Jumlah SMP Negeri Berkondisi Baik	14	15	14	14	14	14	14
	Jumlah SMP Swasta Berkondisi Baik	8	8	11	8	8	11	11
	Jumlah MTs Negeri Berkondisi Baik	8	8	8	1	1	1	1
	Jumlah MTs Swasta Berkondisi Baik	-	-		7	7	7	7
2.	Jumlah Seluruh SMP/MTs	30	31	33	30	30	33	33
	Jumlah SMP Negeri	14	15	14	14	14	14	14
	Jumlah SMP Swasta	8	8	11	8	8	11	11
	Jumlah MTs Negeri	8	8	1	1	1	1	1
	Jumlah MTs Swasta	-	-	7	7	7	7	7
Persentase Sekolah SMP/MTs Kondisi baik (%)		100	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : BPS dan Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2023

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Gambaran ketersediaan atau daya tampung sekolah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. Pendidikan dasar adalah tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Sehingga jumlah sekolah yang berada dalam tabel di bawah ini adalah jumlah SD dan Jumlah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah yang pengelolaannya dibawah Kementerian Agama dan Pihak Swasta lainnya, namun berlokasi di Kota Palopo.

Tabel 2. 37
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD/SMP yang sederajat)

No	Jenjang Pendidikan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI							
1.1	Jumlah gedung sekolah	80	80	80	80	80	80	80
	SD Negeri	65	65	65	65	65	65	65
	SD Swasta	11	11	12	12	12	12	12
	MI Negeri	4	4	-	-	-	-	-
	MI Swasta	-	-	3	3	3	3	3
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	21,952	22,500	22.617	20.292	20.625	19.927	19511
1.3.	Rasio SD/MI (per 10.000)	36	36	36	39	39	35	35
2	SMP/MTs							
2.1	Jumlah gedung sekolah	29	30	31	33	30	30	30
	SMP Negeri	13	14	14	14	14	14	14
	SMP Swasta	8	8	8	8	8	8	8
	MTs Negeri	8	8	8	1	1	1	1
	MTs Swasta	0	0	0	7	7	7	7
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	11,226	11,469	11.583	10.864	11.043	10.052	10253
2.3.	Rasio SMP/MTs (per 10.000)	26	26	26	30	30	30	30
Total Jumlah gedung sekolah (SD + SMP sederajat)		108	110	112	113	110	110	110
Total jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun + jumlah penduduk usia 13-15 tahun		33,178	33,969	34.200	31.156	31.667	29.979	29764
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Per 10.000		33	32	32	36	36	38	38

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo Dalam Angka 2017-2023,

Tabel di atas menggambarkan bahwa rasio ketersediaan sekolah untuk pendidikan dasar yakni SD dan SMP atau yang sederajat di Kota Palopo sepanjang tahun 2017-2021 cenderung meningkat. Jika pada tahun 2017 untuk 10.000 penduduk usia pendidikan dasar (7-12 tahun) tersedia sekolah sebanyak 33 unit, tahun 2021 tersedia sebanyak 36 unit. Sementara untuk SMP, tahun 2017 tersedia 26 sekolah, tahun 2021 tersedia sebanyak 30 sekolah untuk sebanyak 10.000 penduduk usia 13-15 tahun.

Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Tabel 2. 38
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Jenjang Pendidikan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI							
1.1.	Jumlah Guru	1.136	1.128	1.878	1.165	1.184	1100	734
	SD Negeri	933	924	898	939	922	896	904
	SD Swasta	142	142	170	181	195	204	220
	MI Negeri	61	61	0	0	0	-	
	MI Swasta	0	0	45	45	68	-	
1.2.	Jumlah Murid	18.719	18.969	18.505	18.046	18.273	17637	17562
	SD Negeri	15.393	15.451	14.342	14.424	13.899	14252	13599
	SD Swasta	2.659	2.742	2.959	2.936	3.086	3385	3425
	MI Negeri	667	642	0	0	0	-	
	MI Swasta	0	0	1.204	686	1.288	-	1723
Rasio Guru/Murid SD/MI (per 10.000)		607	595	601	646	648	623	648
2	SMP/MTs							
2.1.	Jumlah Guru	697	682	765	739	726	620	677
	SMP Negeri	478	479	489	526	532	484	521
	SMP Swasta	86	73	107	61	72	136	109
	MTs Negeri	133	147	74	75	46	-	
	MTs Swasta	0	0	95	77	77	-	
2.2.	Jumlah Murid	10.137	10.173	10.370	10.272	10.549	8107	8400
	SMP Negeri	7.562	7.610	7276	7496	7.658	6219	7582
	SMP Swasta	1.289	1.308	1589	1322	1.327	1888	1732
	MTs Negeri	1.286	1.311	903	898	707	-	497
	MTs Swasta	0	0	602	556	857	-	1160
Rasio Guru/Murid SMP/MTs (per 10.000)		688	670	737	719	688	765	753
3	Pendidikan Dasar (SD + SMP, Sederajat)							
3.1.	Jumlah Guru (SD dan SMP)	1.833	1.811	1.664	1.904	1.910	1720	1411
3.2.	Jumlah Murid (SD dan SMP)	28.856	29.142	28.875	28.318	28.822	25744	25962
Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar (per 10.000)		635	621	649	673	663	668	543

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo Tahun 2023; Data Dapodik,2023;

Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata – Rata Pendidikan Dasar

Adalah rata-rata jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas dibagi jumlah murid pendidikan dasar. Rasio guru per kelas diperoleh dengan membagi jumlah ruang kelas tersedia dengan jumlah guru yang tersedia. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan dasar per kelas per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2. 39
Persentase Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Pendidikan Dasar Kota Palopo 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs, Swasta dan Negeri)								
1	Jumlah Guru Pendidikan Dasar (Orang)	1,833	1.811	1.878	1.798	1.767	1.720	1411
2	Jumlah Kelas Pendidikan Dasar (Buah)	1,120	1.137	1,60	1.122	1.118	1.137	1137
3	Rasio Guru Per Kelas Pendidikan Dasar (Guru/ Kelas)	1.64	1,59	1,01	1,60	1,56	1,51	1.24
4	Jumlah Murid Pendidikan Dasar (Orang)	28,856	29.142	28.875	28.817	28.731	25.744	25962
5	Rasio Siswa Per Kelas Pendidikan Dasar (Siswa/ Kelas)	25.76	25,81	25,97	26,10	26,23	22,64	24
6	Rasio Guru Murid per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar per 10.000 (Guru/Siswa/Kelas)	0.57	0,55	0,51	0,51	0,49	0,59	1

Sumber : Diolah dari Data Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo dalam Angka 2017-2023,Dapodik 2023

Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Dari tabel presentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mengalami peningkatan ditahun 2023dibandingkan tahun 2017.Data di atas menunjukkan persentase guru yang berijazah S1-D4 di Kota Palopo meningkat tajam. Jika pada tahun 2017-2019 berada pada angka 248%, kondisi ini dikarenakan kewenangan SMA masih diambil oleh kab/kota. Tahun 2020-2022 terjadi peralihan kewenangan antara propinsi berwenang untung mengelola SMA, sedangkan SMP dan SD adalah kab/kota sehingga terjadi penurunan pada angka 97,62%. Hal Ini menunjukkan bahwa masih adanya guru yang berstatus ASN di Kota Palopo belum menyandang S1/D4.

Tabel 2. 40
Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Bidang/Urusan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah guru beijazah S1-D4	3.861	4.049	4.230	1.630	1.818	1679	2130
2	**Jumlah guru SD/Sederajat+SMP Sederajat + SMA	2,813	2.742	1.708	1.733	1.181	1720	1971
Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4		137.26	147,26	248,00	94,06	154,00	97,62	108.07

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2023

2.1.3.1.2 Bidang Urusan Kesehatan

Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama (menahun). Hal ini umumnya terjadi pada anak-anak, gizi buruk pada anak seringkali disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi seimbang, di samping itu bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan terganggunya proses pencernaan makanan ataupun terganggunya penyerapan zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh.

Tabel 2. 41
Persentase Balita Gizi Buruk Kota Palopo Tahun 2017 –2023

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jiwa	2	0	0	0	0	0
b.	Jumlah Balita	Jiwa	17355	17724	18111	18117	18377	19317
Persentase Balita Gizi Buruk		%	0.01	0	0	0	0	0
Balita Gizi Buruk per 10.000 balita		Rasio	1	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2022;

Pada angka jumlah balita gizi buruk terdapat 2 jiwa di tahun 2018 sedangkan ditahun 2023 terdapat 0, sedangkan jumlah balita dari 2018-2023 terdata 0.

2.2.2.1.2.2 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup

Adalah Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Tabel 2. 42
Kematian Bayi (AKB) Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun pada 1 tahun tertentu)	6	3	2	3	13	15	9
2	Jumlah kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu	2.959	3.029	3.282	2945	3512	2871	2950
Rasio Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup		2,03	0,99	0,61	1,02	3,70	5,22	2.35

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023, dari 1000 kelahiran hidup, ada 9 kasus kematian bayi sebelum usia tepat 1 tahun.

2.2.2.1.2.3 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (100-angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Tabel 2. 43
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Per 1000 kelahiran	100	100	100	100	100	100	100
2.	AKB per 1000	2,03	0,99	0,61	1,02	3,70	5,22	2.58
AKHB		97,97	99,01	99,39	98,98	96,30	94,78	97.09

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2023 terdapat 1-5 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun.

2.2.2.1.2.4 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya.

Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.Misalkan perhitungan dari data Susenas 2004 mendapatkan perkiraan Angka Kematian Balita sebesar 74 per 1000 balita, dengan referensi waktu Mei 2002. Artinya, pada tahun 2002 setiap 1000 baita (umur 0 sampai 4 tahum 11 bulan 29 hari) pada tahun 2002, 74 anak diantaranya tidak akan berhasil mencapai umur tepat lima tahun.

Tabel 2. 44
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kematian Balita (berumur kurang 5 tahun)	16	19	19	11	13	15	15
2.	Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	2.959	3.029	3.282	2.945	3.512	2.871	3285
Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup		5,41	6,27	5,79	3,74	3,70	5,22	4.77

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Tabel di atas menunjukkan, pada tahun 2017, dari 1000 balita yang lahir, ada 6 balita yang meninggal dan tidak mencapai umur tepat lima tahun. Dan tahun 2023 terjadi penurunan angka kematian balita dimana hanya terdapat 15 kematian balita per 1000 kelahiran. Sesuai data dalam tabel di atas, perlunya meningkatkan pola kinerja program kesehatan terutama ibu, bayi dan balita mengingat adanya trend penurunan jumlah balita yang meninggal per 1000 kelahiran hidup.

2.2.2.1.2.5 Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup) setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Oleh karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka angka ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Tabel 2. 45
Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kematian Neonatal (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu	16	11	14	8	0	0	0
2.	Jumlah Kelahiran Hidup pada Satu Tahun Tertentu	2.959	3.029	3.282	2.945	3.512	2.871	3285

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup		5	4	4	2	0	0	4

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Tabel di atas menunjukkan, pada tahun 2017 dari 1000 kelahiran hidup, terdapat 5 kasus kematian neonatal pada bayi, dan pada tahun 2023 menjadi 4 kasus kematian neonatal pada bayi per 1000 kelahiran bayi hidup.

2.2.2.1.2.6 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu Atau Maternal Mortality Ratio (MMR) adalah Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll.

Tabel 2. 46
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Ibu Hamil yang Meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	2	3	1	1	6	8	3
2.	Jumlah Kelahiran Hidup di wilayah tertentu pada kurun waktu yang sama	2.959	3.029	3.282	2.945	3.512	2.871	3285
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup		68	99	30	33,96	171	279	120

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Tabel di atas menunjukkan, dari 100.000 ibu melahirkan, terdapat 68 kasus kematian ibu atau Maternal Mortality Ratio (MMR) di Kota Palopo pada tahun 2017. Dan pada tahun 2023 menjadi 279 kasus kematian ibu per 100.000 ibu melahirkan. Angka ini menunjukkan bahwa kasus kematian ibu karena melahirkan terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 7(tujuh) tahun.

2.2.2.1.2.7 Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Dari rasio ini dapat diketahui banyaknya penduduk yang harus dilayani oleh sebuah sarana pelayanan kesehatan. Angka ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kecukupan penyediaan sarana pelayanan kesehatan. Indikator tersebut harus disertai dengan kriteria standar dan target yag diinginkan. Kriteria standar untuk kecukupan tidak sama pada setiap wilayah, tergantung dari kebutuhan masyarakat dan jenis pelayanan. Karena itu sebaiknya kriteria standar ditentukan oleh masing-masing daerah.

Perhitungan rasio ini pada berbagai wilayah akan menghasilkan distribusi sarana kesehatan yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk menyusun rancana pemerataan saran pelayanan kesehatan.

Tabel 2. 47
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Posyandu	149	149	149	149	149	149	149
2.	Jumlah Balita	16.963	17.355	17.724	18.111	18.117	18.377	19317
Rasio Posyandu Per Satuan Balita(1.000)		9	9	8	8	8	8	8

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, untuk melayani 1000 balita, tersedia sebanyak 9 posyandu. Namun pada tahun 2023, hanya tersedia posyandu untuk melayani 1000 orang balita. Ini menggambarkan adanya peningkatan beban kerja posyandu di Kota Palopo.

2.2.2.1.2.8 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Indikator ini untuk mengetahui ketersediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pustu dan poliklinik yang bisa disediakan pemerintah dalam melayani masyarakat. Semakin tinggi angka rasionya, maka semakin banyak faskes yang disiapkan pemerintah untuk melayani masyarakatnya.

Tabel 2. 48
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2017 –2023

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	Jumlah	48	42	42	42	42	42	42
b.	Jumlah Penduduk	Jiwa	176.907	180.678	184.614	184.681	187.331	190.867	195435
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (10.000)		Rasio	2,71	2,31	2,27	2,27	2,24	2,21	2.15

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, untuk melayani 10.000 orang penduduk tersedia sebanyak 3 faskes (puskesmas, poliklinik dan pustu). Namun pada tahun 2023, tersedia 42 fasilitas kesehatan. Ini menggambarkan adanya pengurangan beban kerja faskes di Kota Palopo.

2.2.2.1.2.9 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Indikator ini memberikan gambaran perkembangan beban kerja dan daya tampung rumah sakit yang ada di Kota Palopo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2. 49
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Rumah Sakit	7	8	8	8	8	8	8
2.	Jumlah Penduduk	176.907	180.678	184.614	184.681	187.331	190.867	195435
Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk (100.000)		3,96	4,43	4,33	4,33	4,27	4,19	4.09

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun untuk melayani penduduk sebanyak 100.000 orang hanya tersedia sebanyak 4 rumah sakit.

2.2.2.1.2.10 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menyusun rencana dalam penyediaan jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan, hingga pendidikan, latihan dan penyebaran tenaga kesehatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dari rasio ini dapat diketahui jumlah penduduk yang harus dilayani oleh seorang tenaga kesehatan tertentu, karena itu rasio ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kecukupan penyediaan tenaga kesehatan untuk suatu jenis pelayanan kesehatan.

Tabel 2. 50
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah dokter	Orang	89	112	117	114	95	149	136
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	176.907	180.678	184.614	184.681	187.331	190.867	195435
Rasio Dokter Persatuan Penduduk		Per 10.000	5	6	6	6	5	8	8

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota PalopoTahun 2023;

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, untuk melayani 10.000 jiwa penduduk, Pemerintah Kota Palopo bisa menyiapkan 5 orang dokter atau 1 dokter harus melayani sebanyak 2000 penduduk. Namun pada tahun 2022, meningkat

menjadi tersedia 8 orang dokter untuk melayani 10.000 jiwa penduduk Kota Palopo. Ini memberikan informasi bahwa beban kerja tenaga dokter di Kota Palopo sejak 2021 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Ini menunjukkan adanya potensi peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan di Kota Palopo.

2.2.2.1.2.11 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga medis yang siap melayani per 1000 penduduk di Kota Palopo. Ini menggambarkan kondisi beban kerja yang dialami tenaga medis. Semakin tinggi nilai rasio indikator ini maka semakin ringan beban kerja para tenaga medis tersebut.

Tabel 2. 51
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah Tenaga Medis	Orang	89	112	117	114	95	149	136
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	176.907	180.678	184.614	184.681	187.331	190.867	195435
Rasio tenaga Medis Persatuan Penduduk (10.000)		Rasio	5	6	6	6	5	8	8

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, untuk melayani 10.000 jiwa penduduk, Pemerintah Kota Palopo bisa menyiapkan 5 orang tenaga medis. Namun pada tahun 2023, tersedia 8 orang tenaga medis untuk melayani 10.000 jiwa penduduk Kota Palopo.

2.2.2.1.2.12 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil ibu bersalin, dan ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/ atau bayi, Komplikasi dalam kehamilan, dsb. Semakin tinggi angka indikator ini, menggambarkan tingkat penanganan kesehatan ibu hamil dan bayi yang semakin baik.

Tabel 2. 52
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jumlah	457	465	545	443	344	874	622
2.	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Jumlah	647	639	632	690	691	700	706
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		%	70,63	72,77	86,23	64,20	49,81	124,86	88.10

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat penanganan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Palopo dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017, dari 100 kasus komplikasi kebidanan sebanyak 70,63 persen kasus berhasil ditangani. Dan pada tahun 2023 meningkat sebanyak 88.10 persen kasus berhasil ditangani per 100 kasus komplikasi kebidanan. Ini mengindikasikan membaiknya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil terutama cakupan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.

2.2.2.1.2.13 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Adalah Perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini Mengukur kematian ibu secara akurat adalah sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab

kematian. Oleh karena itu sebagai proksi indikator yang digunakan adalah proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih.. Semakin banyak persalinan yang ditolong dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan diharapkan dapat mengurangi angka kematian ibu melahirkan.

Tabel 2. 53
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatanyang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	2.956	3.035	3.279	2.947	3.002	2.829	3084
2.	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wiayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Jumlah	3.086	3.035	3.225	3.295	3.297	3.344	3445
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		%	95,79	100	101.67	89.44	91,06	84,60	89.52

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota PalopoTahun 2023;

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Palopo yaitu 100 persen pada tahun 2017 dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 2.956 ibu bersalin (jiwa) dengan cakupan 95,79 persen. Sedangkan pada tahun 2023, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menurun menjadi 89.52 persen dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 3.084 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua persalinan di Kota Palopo sudah ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

2.2.2.1.2.14 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT.Untuk anak sekolah tingkat dasar rneliputi 1 dosis DT, I dosis campak dan 2 dosis TT. Semakin tinggi persentase inidkator ini semakin baik kinerja UCI.

Tabel 2. 54
Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah desa/kelurahan UCI	Jumlah	46	46	45	34	35	46	39
2.	Jumlah seluruh desa/kelurahan	Jumlah	48	48	48	48	48	48	48
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		%	95,83	95,83	93,75	70,83	72,92	95,83	81.25

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota PalopoTahun 2023;

Tabel di atasmenunjukkan bahwa pada tahun 2017 cakupan 95,83 persen kelurahan yang ada di Kota Palopo telah memenuhi UCI dimana sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah bayi, ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah pada tingkat dasar, dan tahun 2023 menurun yakni 81,25 persen.

2.2.2.1.2.15 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk di Kota Palopo yang mendapat perawatan sudah mencapai angka 100 persen sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Hal ini berarti bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis melalui sarana pelayanan kesehatan.

Tabel 2. 55
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	4	2	0	0	0	0	0
2.	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	4	2	0	0	0	0	0
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan		%	100	100	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 100 %. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan dan balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak nol balita atau tidak terdapat balita gizi buruk di Kota Palopo yang mendapatkan perawatan. Hal ini menandakan kondisi penanganan balita di Kota Palopo semakin membaik.

2.2.2.1.2.16 Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori di bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/Perkapita/Hari)

Indikator ini memberikan gambaran proporsi dan kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan secara cukup dan bergizi. Umumnya masyarakat miskin belum mampu memenuhi konsumsi pangan minimum baik dari aspek kuantitas maupun kualitas gizi. Indikator ini erat kaitannya dengan aspek kemiskinan. Semakin tinggi angka indikator ini, artinya semakin banyak penduduk yang kekurangan pangan karena kesulitan mengakses kebutuhan dasar akibat aspek ekonomi.

Tabel 2. 56
Penduduk yang Tingkat Konsumsinya Lebih Rendah dari 2.100 kkal/kapita/hari
Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 kkal/kapita/hari (Jumlah Penduduk Miskin)								
		Orang	15.440	15.428	14.370	12.928	14.986	13.361	14232
2	Jumlah Balita (Jumlah Penduduk Berumur di Bawah Lima Tahun)								
		Orang	16.963	17.355	17.724	18.111	18.117	18.377	19317
		Populasi	176.907	180.678	184.614	184.681	187.331	190.867	195435
Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)									
		%	8,73	8,54	7,78	8,11	8	7	7

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Data di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2017-2023, penduduk miskin yang mengalami penurunan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum menurun dari 8% menjadi 7%.

2.2.2.1.2.17 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Tabel 2. 57
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah anak yang usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun	Orang	3.166	3.237	3.892	3.272	3.070	3.355	3498
2.	Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama	Orang	2.959	3.029	3.952	3.138	3.140	3.423	3567

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak		%	107	106,87	98,48	104.27	97,77	98,01	98.03

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Data di atas menunjukkan terjadinya penurunan persentase bayi berumur di bawah satu tahun yang memperoleh imunisasi campak di Kota Palopo sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023 dari 100 balita rata-rata 100 orang yang mendapatkan imuniasi campak. Ini menunjukkan bahwa kinerja imunisasi perlu ditingkatkan. Misalnya melalui media sosialisasi yang menegaskan keamanan, kehalalan dan arti pentingnya imuniasi bagi para balita.

2.2.2.1.2.18 Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk

AFP (Acute Flaccid bahwa kasus AFP bukanlah kasus polio, melainkan Paralysis) merupakan gejala kelumpuhan pada anak yang berumur < 15 tahun yang bersifat layuh/flaccid dan terjadi secara mendadak (akut) bukan karena rudapaksa/trauma/kecelakaan. Untuk membuktikan bahwa virus polio liar sudah tidak ada lagi di Kota Palopo, maka harus ditemukan gejala gejala yang menyerupai penyakit polio.

Dalam penilaian kinerja surveilans AFP, terdapat indikator NonPolio AFP rate > 2 per 100.000 anak usia kurang dari 15tahun per tahun dan spesimen adekuat > 80 %. Non PolioAFP rate merupakan target penemuan kasus per tahun. Jadi apabila suatu wilayah memiliki jumlah penduduk <15 tahun sebanyak 500.000, maka wilayah tersebut harus dapat menemukan minimal 10 kasus AFPdalam satu tahun. Jika target penemuan belum dapatdipenuhi, dapat dikatakan bahwa kinerja surveilans AFP belum baik, karena masih dimungkinkan adanya kasus yang belum terjaring.

Tabel 2. 58
Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kasus AFP non polio yang dilaporkan	Kasus	0	1	0	0	0	0	0
2.	Jumlah penduduk < 15 tahun	Orang	48.835	50.477	51.178	51.943	48.304	48.223	49206
Non polio AFP rate per 100.000 penduduk		Rasio	0	0	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022, dari 100.000 penduduk Kota Palopo survey AFP tidak ditemukan kasus non polio AFP Rate, bahkan 2022 sama sekali tak ada. Ini menunjukkan kinerja surveilance Non Polio AFP Rate di Kota Palopo cukup baik.

2.2.2.1.2.19 Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Pneumonia adalah penyakit infeksi yang menyerang paru, sehingga menyebabkan kantung udara di dalam paru meradang dan membengkak. Kondisi kesehatan ini sering kali disebut dengan paru-paru basah, sebab paru bisa saja dipenuhi dengan air atau cairan lendir.Kondisi paru-paru basah ini dapat dialami oleh siapa pun. Namun pneumonia pada anak bisa sangat berbahaya dan menyebabkan kematian. Bahkan, badan kesehatan dunia (WHO) menyebutkan jika penyakit pneumonia adalah penyebab 16% kematian balita di dunia pada tahun 2015. Sementara, di Indonesia sendiri, dilansir dari CNN, penyakit pneumonia pada anak menyebabkan 2-3 balita yang meninggal setiap jamnya.

Tabel 2. 59
Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun	Orang	105	171	163	51	30	86	93
2.	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	1.696	1.736	1.772	1.811	1.812	1.838	1932
Cakupan balita pneumonia yang ditangani		%	6,19	9,85	9,20	2,82	1,66	4,68	4.83

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Meskipun persentasenya meningkat dari tahun ke tahun, tabel di atas menunjukkan cakupan penanganan balita yang diperkirakan menderita penyakit berbahaya seperti pneumonia di Kota Palopo masih sangat rendah. Pada tahun 2017, kinerjanya hanya berada pada angka 6,19% meskipun meningkat pada tahun 2018 yang mencapai 9,85%. Artinya pada tahun 2018, dari 100 kasus pnemunia, rata-rata hanya ditangani hanya 9-10 kasus. Pada tahun 2023 mengalami penurunan angka pada kisaran 4,83%. Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas terkait bersama stake holder terkait perlu meningkatkan kinerja untuk menangani kasus pneumonia ini.

2.2.2.1.2.20 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang sangat mudah sekali dalam penularannya. Seperti halnya penyakit flu biasa, dalam penyebaranya TBC juga melalui udara. Penyakit tuberkolosis sangat mematikan apabila tidak segera dilakukan penanganan. Di Indonesia, penanganan sejak dini sudah dilakukan dengan memberikan paket imunisasi BCG pada balita. Namun demikian, belum sepenuhnya Indonesia 100% terbebas dari penyakit ini.

Tabel 2. 60
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 bulan	Orang	243	250	415	300	293	204	362
2.	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama	Orang	176	301	349	499	389	441	472
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA		%	138,07	83,06	119	60,12	75,32	46.26	76.57

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Jumlah penderita TBC BT yang ditemukan dan diobati mengalami peningkatan ditahun 2023 sebanyak 362 artinya ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 sebanyak 243, sedaangkan jumlah perkiraan penderita TBC BTA dalam kurun waktu yang sama meningkat di tahun 2023 dibandingan di tahun 2017. Ditahun 2023 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA menurun menjadi 76,57% dari 138,07% ditahun 2017.

2.2.2.1.2.21 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Adalah indikator yang memnggambarkan tingkat penyebaran penyakit atau pengidap TBC paru per 100.000 penduduk Kota Palopo. Indikator ini untuk mengetahui perkembangan jumlah pengidap penyakit TBC di Kota Palopo.

Tabel 2. 61
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Orang	243	415	396	300	350	204	420
2.	Jumlah penduduk pada kurun waktu waktu yang sama	Orang	180.678	184.614	184.681	184.681	187.331	190.867	195435
Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		Orang	244,76	229,69	245,92	162,44	196,98	231,05	214.90

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, dari 100.000 penduduk Kota Palopo, terdapat 243 orang yang terjangkit atau menjadi pengidap penyakit TBC, jumlah ini meningkat pada tahun 2023 menjadi 420 orang per 100.000 penduduk. Olehnya program program baik yang sifatnya pencegahan maupun pengobatan, mestinya menjadi fokus penanganan pemerintah Kota Palopo melalui Dinas terkait pada tahun tahun mendatang.

2.2.2.1.2.22 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Adalah indikator yang menggambarkan kasus kematian pengidap TBC paru per 100.000 penduduk Kota Palopo. Semakin tinggi angka kasus ini semakin tinggi tingkat kematian karena penyakit TBC.

Tabel 2. 62
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pasien TB yang meninggal	Orang	0	17	0	0	17	29	19
2.	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Orang	176.907	180.678	184.614	184.681	187.331	190.867	195435
Presentase tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		Orang	0,00	9,41	0,00	0,00	9,07	15,19	10

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023

Jumlah pasien TB di tahun 2023 meingkat menjadi 19 orang dibanding tahun 2017 yang hanya 0 sedangkan jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama meningkat ditahun 2023 sebanyak 10 jiwa dibanding tahun 2017. Ditahun 2023 meningkat menjadi 10%.

Meski secara jumlah, pengidap TB di Kota Palopo meningkat setiap tahunnya, dan menyebabkan juga meningkatnya kematian yang disebabkan penyakit TB. Ini menunjukkan bahwa tindakan pengobatan yang dilaksanakan masih kurang efektif dalam mengobati para pasien. Kondisi ini juga menunjukkan pengobatan bagi para pasiennya perlu dioptimalkan, sehingga kematian yang disebabkan oleh penyakit ini di Kota Palopo nihil.

2.2.2.1.2.23 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

DOTS merupakan strategi penanggulangan Tuberkulosis di Rumah Sakit melalui pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung. DOTs adalah tempat untuk konsultasi pasien TB. Penanggulangan Tuberkulosis merupakan program nasional yang harus dilaksanakan di seluruh Unit Pelayanan Kesehatan termasuk Rumah Sakit. Khusus bagi pelayanan pasien tuberkulosis di Rumah Sakit dilakukan dengan strategi DOTS.

Hal ini memerlukan pengelolaan yang lebih spesifik, karena dibutuhkan kedisplinan dalam penerapan semua standar prosedur operasional yang ditetapkan, disamping itu perlu adanya koordinasi antar unit pelayanan dalam bentuk jejaring serta penerapan standar diagnosa dan terapi yang benar, dan dukungan yang kuat dari jajaran direksi rumah sakit berupa komitmen dalam pengelolaan penanggulangan TB. Semakin tinggi nilai indikatornya, menunjukkan bahwa kinerja program DOTS semakin baik.

Tabel 2. 63
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam
Program DOTS Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	Orang	430	415	454	299	215	204	363
2.	Jumlah pasien baru TB BTA paru yang diperkirakan ada dalam wilayah tertentu	Orang	176	301	297	499	358	441	469
Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS		%	244,32	137,87	152,86	59,92	60,06	46,26	77.41

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Tabel di atas menggambarkan bahwa kinerja penanganan pasien TB dalam program DOTs sejak 2017 sampai dengan 2023 cenderung membaik. Tahun 2017, sebanyak 244,32% pasien TB BTA dalam program DOTS mendapatkan pengobatan dan 2023 angka menurun menjadi 46,26% pasien TB BTA yang memperoleh pengobatan melalui program DOTS.

2.2.2.1.2.24 Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Fokus utama DOTS adalah penemuan dan penyembuhan pasien, prioritas diberikan kepada pasien TB tipe menular. Strategi ini akan memutuskan penularan TB dan dengan demikian menurunkan insiden TB di masyarakat. Menemukan

dan menyembuhkan pasien merupakan cara terbaik dalam upaya pencegahan penularan TB. Semakin tinggi nilai indikatornya, menunjukkan bahwa kinerja program DOTS semakin baik.

Tabel 2. 64
Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS
Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang sembuh di suatu wilayah selama 1 tahun	Orang	154	114	167	165	129	161	167
2.	Jumlah pasien baru TB BTA paru yang diobati di wilayah dan pada kurun waktu yang sama	Orang	243	415	396	300	375	285	402
Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS		%	63,37	27,47	42,17	55,00	34,40	56,49	41.56

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Tabel di atas menggambarkan bahwa kinerja program DOTS di Kota Palopo sepanjang tahun 2017-2023 mengalami fluktuatif. Kondisi ini mengindikasikan cukup banyaknya pasien TB yang tidak menjalankan prosedur pengobatan TB dalam program DOTS secara baik. Ini bisa dipengaruhi banyak faktor, terutama faktor internal pasien atau pengidap TB. Olehnya diperlukan advokasi dan sosialisasi serta edukasi yang lebih intensi dalam meningkatkan motivasi untuk sembuh serta mengikuti program pengobatan secara teratur bagi pasien atau pengidap TB.

2.2.2.1.2.25 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan pada tahun 2017 yaitu 74 kasus, yang ditangani sesuai SOP berjumlah 74 kasus. Pada tahun 2021, jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan dan yang ditangani sesuai SOP sebanyak 39 kasus. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mencapai 100 persen, hal ini dipengaruhi oleh keaktifan petugas kesehatan di masing – masing wilayah kerja.

Tabel 2. 65
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderta Penyakit DBD
Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatu wilayah kerja selama 1 tahun	Orang	74	121	105	23	287	248	157
2.	Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wilayah dalam kurun waktu yang sama	Orang	74	121	105	23	287	248	157
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Angka penderita DBD yang ditangani sesuai SOP dari tahun 2017 ke tahun 2023 menlonjak naik dan juga angka jumlah penderita DBD dan penanganan penderita penyakit DBD dari tahun 2017 ke tahun 2023 meningkat dengan presentase 100% dari tahun 2017-2023.

2.2.2.1.2.26 Penderita Diare yang Ditangani

Penyakit diare Tabel di atas menggambarkan tingkat penanganan diare di Kota Palopo sepanjang tahun 2017-2022 cenderung stagnan. Jika pada tahun 2017, dari 100.000 penduduk Kota Palopo ditangani sebanyak 6 kasus diare, pada 2022 sebanyak 7 kasus yang ditangani. Kedepan angka yang menjadi target persentase indikator ini harus ditekan.

Tabel 2. 66
Penderita Diare yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu 1 tahun								
	Orang	3.287	3.736	3.076	1.833	1.445	2.294	1007
Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)								
	Orang	4669	4776	4878	4985	4986	2294	4490
Jumlah Penduduk								

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Jiwa	172.916	176.907	180.678	184.681	187.331	190.867	195435
Penderita diare yang ditangani								
	%	0.000057	0.000058	0.000054	0.00993	0,00657	-	0.000051
	Per 100.000	6	6	6	9	7	-	5

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023, Rumus Permendagri 86 Tahun 2017,BPS Kota Palopo tahun 2023;

Ditahun 2017 penderita diare yang ditangani 3.287 dengan jumlah penduduk 4669 dengan presentase yang berhasil ditangani 0.000057%, ditahun 2023 pederita diare yang ditangani 1007dengan jumlah penduduk 19.5435 dengan presentase yang berhasil 0.000051%, mengalami penurunan.

2.2.2.1.2.27 Angka Kejadian Malaria

Tabel dibawah menunjukkan pada tahun 2017, dari 100.000 penduduk Kota Palopo terdapat sebanyak 128 kejadian malaria. Jumlah kasus mengalami penurunan sampai tahun 2022 dengan hanya menangani kasus sebanyak 33 per 100.000 penduduk. Ini menunjukkan kinerja penanggulangan angka malaria di Kota Palopo mulai menunjukkan kondisi yang lebih baik.

Tabel 2. 67
Angka Kejadian Malaria Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penduduk yang menderitra malaria pada tahun tertentu	Orang	226	182	114	51	37	63	23
2.	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Orang	176.907	180.678	184.614	184.681	187.331	190.867	195435
Penderita malaria yang ditangani per 100.000		Per 100.000	128	101	62	28	20	33	12

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Ditahun 2017 penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu berjumlah 226 orang sedangkan ditahun 2023 berjumlah 23 orang, ini mengalami penurunan pada jumlah orang yang terkena penyakit malaria dibandingkan pada tahun 2017.

Ditahun 2017 jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama ditahun 2017 berjumlah 176.907 sedangkan pada tahun 2023 berjumlah 195435 orang, ini mengalami kenaikkan.

2.2.2.1.2.28 Tingkat Kematian Akibat Malaria

Tabel di bawah menunjukkan bahwa angka kematian akibat kasus malaria di Kota Palopo sepanjang tahun 2017-2022 per 1000 penduduk nihil. Ini menggambarkan bahwa penanganan pasien kasus malaria di Kota Palopo berhasil.

Tabel 2. 68
Tingkat Kematian Akibat Malaria Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kematian tersangka malaria	Orang	0	0	0	0	0	0	0
2.	Jumlah penduduk beresiko pada kurun waktu 1 tahun	Orang	226	182	114	51	37	63	23
Tingkat kematian akibat malaria (1.000)		Per 1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Ditahun jumlah kematian tersangka malaria dari tahun 2017-2023 terdata 0 orang sedangkan jumlah penduduk beresiko pada kurun waktu 1 tahun pada 2017 berjumlah 226 sedangkan ditahun 2023 sebanyak 23 orang. Ini merupakan tingkat kematian akibat malaria 0.

2.2.2.1.2.29 Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat

Prevalensi adalah seberapa sering suatu penyakit atau kondisi terjadi pada sekelompok orang, dalam hal ini adalah HIV AIDS. Atau dengan kata lain merupakan gambaran tentang frekwensi penderita lama dan baru yang ditemukan selama jangka waktu tertentu terhadap sekelompok populasi dalam waktu tertentu.

Tabel 2. 69
Proporsi Anak Balita dengan Demam yang Diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun	Orang	34	10	30	49	37	63	23
2.	Jumlah penderita positif dalam 1 tahun	Orang	34	10	30	51	37	63	23
Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat		%	100	100	100	96	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun pada tahun 2017 terdapat 34 orang penderita yang diobati, ditahun 2023 terdapat 23 orang ini menandakan ditahun 2023 menurun dibandingkan pada tahun 2023. Sedangkan jumlah penderita positif dalam 1 tahun di 2017 terdapat 34 orang dan ditahun 2023 terdapat 23 orang ini menandakan mengalami penurunan jumlah penderita.

2.2.2.1.2.30 Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi

Tabel di atas menunjukkan bahwa periode 2017-2022 jumlah pengidap HIV AIDS di Kota Palopo cendrung naik turun setiap tahunnya. Jika 2017 hanya sebanyak 117 orang, tahun 2022 jumlahnya mencapai 111 orang. Dalam rasio per 100.000 penduduk, pada tahun 2017 terdapat rata-rata 66 persen kasus HIV AIDS, dan menurun menjadi rata-rata 58 persen kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2022. Kondisi ini memerlukan perhatian serius pemerintah sehingga jumlahnya setiap tahun seharusnya bisa ditekan.

Tabel 2. 70
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi Kota PalopoTahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	117	128	80	87	316	111	208
2.	Jumlah penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	176.907	180.678	184.614	184.681	187.331	190.867	195435
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		%	0,000661	0,000708	0,000433	0,000471	0,001686	0,000581	0.000011
Rasio per 100.000		per 100.000	66	71	43	47	169	58	11

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Jumlah penderita HIV/AID ditahun 2017 berjumlah 117 sedangkan ditahun 2023 berjumlah 208 orang ini mengalami penurunan, jumlah penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama ditahun 2017 176.907 sedangkan ditahun 2023 berjumlah 195435 orang, ini mengalami peningkatan. Prevelensi HIV/AIDS dari total populasi ditahun 2017 yaitu 66% sedangkan ditahun 2023 yaitu 11% ini mengalami penurunan jumlah penderita HIV/AID di Kota Palopo.

2.2.2.1.2.31 Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15 – 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS

Indikator ini menggambarkan cakupan edukasi, sosialisasi tentang bahaya HIV/ AIDS di kalangan 15-24 tahun. Ini juga menunjukkan pelaksanaan program kegiatan yang sifatnya sosialisasi dan edukasi publik terutama bagi usia 15-24 tahun oleh Pemerintah Kota Palopo belum secara konsisten dan berkelanjutan. Kegiatan ini kadang dilaksanakan dan kadang pula tidak dilaksanakan. Pada rentang waktu tahun 2017-2022, dari 10.000 penduduk usia 15-24 tahun tidak ditemukan data orang yang mendapatkan sosialisasi HIV AIDS. Sementara disisi lain jumlah usia 15-24 tahun yang menjadi fokus sasaran edukasi, jumlahnya terus meningkat. Ini menjadi potensi meningkatnya ancaman bagi prevalensi HIV AIDS di Kota Palopo.

Tabel 2. 71
Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15 – 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun yang mempunyai pengetahuan komperehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS di satu wilayah pada waktu tertentu	Orang	0	0	0	0	0	0	0
2.	Jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun di satu wilayah pada waktu yang sama	Orang	40.279	41.073	41.727	n/a	n/a	n/a	n/a
Proporsi jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun yang memiliki pengetahuan komperehensif tentang HIV/AIDS		%	0,00	0,00	0,00	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Jumlah penduduk usia 15-24 tahun tidak terdapat dan jumlah penduduk usia 15-24 tahun diwilayah yang sama ditahun 2017 berjumlah 40.279 ditahun 2023 tidak terdapat. Maka jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif di Kota Palopo tidak ada.

2.2.2.1.2.32 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Informasi dari Dinas Kesehatan Kota Palopo menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2017-2022, tidak ada pasien miskin yang ditolak oleh fasilitas kesehatan yang ada di Kota Palopo atau 100% warga miskin di Kota Palopo telah terlayani jaminan kesehatan. Pasien miskin yang berobat di fasilitas kesehatan di Kota Palopo telah ditanggung oleh Pemerintah Kota Palopo. Sebab sejak tahun tersebut Pemerintah Kota Palopo membayar premi asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin Kota Palopo.

2.2.2.1.2.33 Cakupan Kunjungan Bayi

Indikator ini menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada terutama bagi bayi yang baru lahir. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kesehatan bayi yang ada.

Tabel 2. 72
Cakupan Kunjungan Bayi Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jumlah kunjungan	2.982	3.029	3.274	2.794	3.512	2.871	3292
2.	Seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	2.959	3.029	3.282	2.945	3.512	2.871	3292
Cakupan kunjungan bayi		%	100,78	100,00	99,76	94,87	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Tabel di atas menggambarkan rentang waktu 2017-2023, tingkat kunjungan bayi ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan standar kesehatan, semakin membaik. Ini terkait erat dengan kesadaran masyarakat untuk memantau perkembangan kesehatan bayinya di sejumlah pusat kesehatan yang ada. Jumlah kunjungan bayi setiap tahunnya mengalami signifikan. jika 2017 sebanyak 2.982 pada tahun 2023 meningkat mencapai 3.292 kunjungan atau 100% dari jumlah bayi yang lahir.

2.2.2.1.2.34 Cakupan Puskesmas

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh kecamatan yang ada di Kota Palopo memiliki minimal satu pusat kesehatan masyarakat. Bahkan sejak 2017-2022 ada kecamatan yang memiliki lebih dari satu puskesmas. Kondisi ini tentu diharapkan bisa meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Palopo.

Tabel 2. 73
Cakupan Puskesmas Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah puskesmas	12	12	12	12	12	12
2.	Jumlah seluruh kecamatan	9	9	9	9	9	9

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan puskesmas (%)		133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Cakupan puskesmas di Kota Palopo pada tahun 2018 jumlah puskesma berjumlah 12 sedangkan di tahun 2023 berjumlah 12 ini menandakan jumlah puskesmas di Kota Palopo dari 2018-2023 sebanyak 12 tidak bertambah dan tidak berkurang. Jumlah seluruh kecamatan ditahun 2018 sebanyak 9 dan juga ditahun 2023 sebanyak 9 ini tidak bertambah dan juga tidak berkurang.

2.2.2.1.2.35 Cakupan Pembantu Puskesmas

Tabel dibawah menunjukkan pada tahun 2018 hanya 62,50% di Kota Palopo yang memiliki puskesmas pembantu.kondisi ini berlangsung sampai pada tahun 2022. Ini menunjukkan semakin banyaknya jumlah puskesmas pembantu yang diharapkan bisa memperluas akses masyarakat terhadap sarana kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Tabel 2. 74
Cakupan Pembantu Puskesmas Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pembantu puskesmas	36	30	30	30	30	30	30
2.	Jumlah seluruh kelurahan	48	48	48	48	48	48	48
Cakupan pembantu puskesmas (%)		75	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62.50

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Jumlah pembantu puskesmas ditahun 2017 lebih banyak 36 dibandingkan ditahun 2023, sedangkan jumlah seluruh kelurahan di tahun 2017-2023 berjumlah 48.

2.2.2.1.2.36 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan semakin baiknya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kesehatan dirinya dan calon bayinya pada sarana kesehatan yang ada.

Tabel 2. 75
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan ante-natal K4 di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	3.001	3.004	3.159	2.858	3.019	2732	2964
2.	Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	3.234	3.193	3.159	3.452	3.453	3.503	3529
Cakupan kunjungan ibu hamil K4		%	92,80	94,08	100	82,79	87,43	77,99	83.99

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;.

Tabel di atas menggambarkan kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan dirinya dan kesehatan bayinya cukup baik. Jika pada tahun 2017 sebesar 92,80 % terjadi penurunan pada pada tahun 2023 dengan cakupan kunjungan ibu hamil sebesar 83,99%.

2.2.2.1.2.37 Cakupan Pelayanan Nifas

Pelayanan ibu nifas merupakan pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Masa nifas merupakan masa dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandung kembali seperti semula sebelum hamil, yang berlangsung selama 6 – 8 minggu atau dalam agama islam disebut 40 hari. Tujuan dari masa nifas yaitu untuk mengetahui kesejahtraan ibu dan bayi, baik dari kesehatan, kebersihan , nutrisi, pemberian ASI, tanda bahaya masa nifas, perdarahan, cara mencegah hipotermi pada bayi.Semakin tinggi nilai indikatornya semakin baik kesadaran ibu yang sudah melahirkan terhadap status kesehatan dirinya dan bayinya usai melahirkan.

Tabel 2. 76
Cakupan Pelayanan Nifas Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	2.816	3.177	3.210	2.804	2.896	2.827	3054
2.	Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	3.087	3.158	3.225	3.295	3.295	3,344	3491
Cakupan pelayanan nifas		%	91,22	100,60	99,53	85,10	87,89	84,54	87.48

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Tabel di atas menggambarkan tingkat kesadaran ibu usai melahirkan sepanjang 2017-2023 sudah cukup baik. Meski demikian data ini juga mengungkapkan masih adanya ibu yang usai melahirkan namun tidak lagi memanfaatkan pelayanan kesehatan nifas. Olehnya masih dibutuhkan sosialisasi dan edukasi sehingga kesadaran ibu yang telah melahirkan untuk memantau perkembangan kesehatannya semakin baik di tahun mendatang

2.2.2.1.2.38 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani

Menurut World health Organization (WHO) Neonatus adalah bayi baru lahir hingga berumur 28 hari. Sementara menurut kemenkes 2015, adalah bayi yang baru lahir berusia 0-28 hari sejak dilahirkan. Umur ini sangat rentan terhadap berbagai macam gangguan kesehatan. Olehnya penanganan untuk mengatasi atau mencegah munculnya berbagai macam ancaman gangguan kesehatan sangat penting dilaksanakan.

Tabel 2. 77
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	301	288	376	305	344	210	329
2.	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	444	454	492	451	527	431	492
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)		67,79	63,44	76,42	67,63	65,28	48,72	66.76

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Data di atas menunjukkan bahwa 2017-2023 jumlah bayi yang lahir di Kota Palopo dengan kondisi neonatus mengalami kecendrungan naik-turun setiap tahunnya. Tahun 2017 hanya 301, tahun 2023 mengalami kenaiaikkan sebanyak 329. Kondisi ini tentu membutuhkan penanganan yang serius terutama pada aspek pencegahan, dimana mengedukasi ibu hamil menjadi point penting dalam upaya tersebut. Melihat persentase penanganan, kinerja indikator ini cukup baik ditandai dengan meningkatnya angka kinerja penanganan bayi dengan komplikasi neonatus.

2.2.2.1.2.39 Cakupan Pelayanan Anak Balita

Tabel 2. 78
Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	Orang	8.431	8.486	10.418	6.293	2.650	22.600	12799
2.	Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	13.487	13.799	14.093	14.400	14.405	14.612	14334
Cakupan pelayanan anak balita		%	62,51	61,50	73,92	43,70	18,40	154,67	89.29

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Data di atas menunjukkan bahwa 2017-2023 cakupan pelayanan anak balita menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Per tahun terjadi peningkatan pelayanan terhadap anak balita. Ini menggambarkan semakin baiknya kesadaran para orang tua dalam memeriksakan kesehatan anak balitanya.

2.2.2.1.2.40 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 12 Bulan Keluarga Miskin

Indikator ini hanya mengukur pada rumah tangga miskin. Kemiskinan umumnya menjadi salah satu dari sekian banyak penyebab anak usia 6-12 tahun di keluarga miskin tidak pernah mendapatkan makanan pendamping ASI, sehingga terjadi kerawanan gizi. Olehnya pemerintah melaksanakan program pemberian makanan pendamping ASI bagi rumah tangga miskin.

Tabel 2. 79
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 12 Bulan Keluarga Miskin Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP ASI	Orang	507	339	290	1.495	1.710	2.515	1890
2.	Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	Orang	507	339	290	1.921	2.155	2.515	2152
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin		%	100	100	100	78	79	100	88

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Data di atas menunjukkan bahwa 2017-2023, semua anak berumur 6-12 tahun yang lahir dari keluarga miskin di Kota Palopo menerima makanan pendamping ASI. Tahun 2023 cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin sebesar 100%. Ini membuktikan bahwa komitmen Pemkot Palopo untuk memperhatikan gizi bagi masyarakat miskin cukup baik.

2.2.2.1.2.41 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Indikator ini menunjukkan langkah dan cakupan kemampuan pemerintah daerah dalam memeriksa status kesehatan seluruh siswa sekolah dasar pada tahun tertentu. Semakin tinggi angka indikator ini semakin baik cakupan pemeriksaan siswa sekolah yang ada setingkat sekolah dasar.

Tabel 2. 80
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah murid SD kelas 1 dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	2.790	2.619	2.981	2.981	2.683	5.702	3674
2.	Jumlah murid SD kelas 1 dan setingkat di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	2.861	2.690	3.044	3.044	3.301	4.009	3218
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat		%	97,52	97,36	97,93	97,93	81,28	142,23	114.12

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Data di atas menunjukkan bahwa 2017-2023, sebagian besar siswa sekolah dasar di Kota Palopo setiap tahunnya diperiksa status kesehatannya. Cakupan pemeriksaan mencover 0% siswa sekolah dasar yang ada. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Palopo menciptakan generasi yang sehat sejak pendidikan dasar.

2.2.2.1.2.42 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Pelayanan bagi masyarakat miskin di Kota Palopo 2017-2023 telah mencakup semua pasien dari golongan tidak mampu. Besarnya persentase yang melebih angka 100% disebabkan sangat banyaknya pasien masyarakat miskin dari kabupaten di sekitar Kota Palopo yang memanfaatkan sarana dan prasarana kesehatan rujukan yang ada di Kota Palopo yakni RSUD Sawerigading Rampoang. Jumlah masyarakat miskin ini merupakan 40% masyarakat miskin yang berada pada desil

paling bawah. Sejak BPJS berlaku, Dinas kesehatan tak bisa memisahkan data pasien miskin yang mengakses sarkes strata 1

2.2.2.1.2.43 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Semua pelayanan rumah sakit yang tedapat di Kota Palopo memiliki pelayanan gawat darurat level 1, oleh karena cakupan pelayanan gawat darurat level 1 memiliki cakupan 100%.

Tabel 2. 81
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pelayanan gawat darurat level 1	7	8	8	8	8	8	8
2.	Jumlah RS	7	8	8	8	8	8	8
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)		100	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023;

Data pelayanan gawat darurat level 1 ditahun 2017 berjumlah 7 sedangkan ditahun 2023 berjumlah 8, jumlah RS ditahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017.

2.2.2.1.2.44 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

Indikator ini menggambarkan kecepatan pemerintah kota palopo merespon terjadinya sebuah Kejadian Luar Biasa (KLB) di wilayah Kota Palopo. Kecepatan merespon sebuah KLB adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam mengatasi KLB di sebuah daerah. Kejadian Luar Biasa atau KLB merupakan suatu status yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengelompokkan suatu peristiwa atau penyait tertentu. Biasa nya penyakit tersebut lebih berpengaruh pada penyakit yang biasanya terjadi.Sehingga KLB dapat didefinisikan sebagai suatu peningkatan kasus yang berbuhungan dengan penyakit, yang memiliki tingkatan yang sangat tinggi.

Tabel 2. 82
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan		Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah KLB di desa/kelurahan ditangani > 24 jam dalam periode tertentu	Kasus	0	3	0	2	0	0	0
2.	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	Kasus	0	3	0	2	0	0	0
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		%	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00	0

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa pemerintah Kota Palopo memberikan respon yang sangat baik terhadap adanya KLB di wilayah administrasi Kota Palopo. Namun yang mesti diwaspadai adalah terjadinya KLB hampir setiap tahun di Kota Palopo.

Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kurang gizi yang berlangsung lama (kronis) terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK). Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Prevalensi stunting kota Palopo yang bersumber dari survey status gizi Indonesia (SSGI) terjadi penurunan 4,7% dari 28,50% tahun 2021 menjadi 23,80% di tahun 2022. Jumlah kasus stunting dan prevalesi stunting ditampilkan pada gambar.12.

Grafik 2. 8
Jumlah Kasus dan Prevalensi Stunting Kota Palopo Tahun 2020-2022

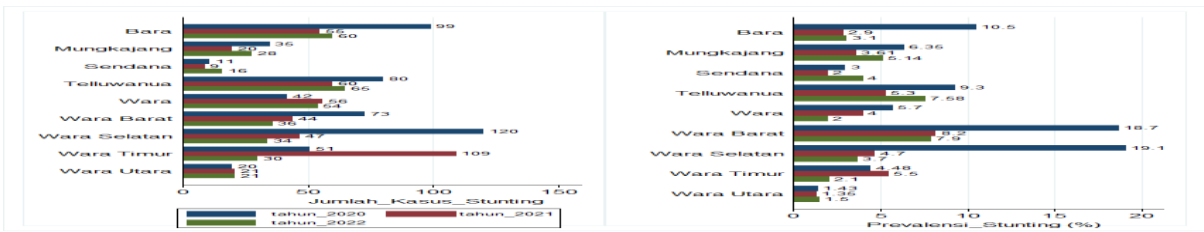

Sumber : SSGI Kota Palopo, 2022

Kemudian hasil capaian tahun 2023 kasus stunting di Kota Palopo meningkat kembali menjadi 25,5% (SKI, 2023). Menurut hasil kajian dari pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, peningkatan ini terjadi karena pihak surveyor SKI (status Kesehatan Indonesia) melakukan survey dan sampling secara acak dari total anak yang masuk dalam variabel penilaian sehingga memungkinkan anak yang belum tersentuh sama sekali oleh intervensi masuk dalam hitungan. Disisi lain data yang bersumber dari EPPGBM Kementerian Kesehatan, Kota Palopo mengalami penurunan yang signifikan. Selama tahun 2021-2023 prevalensi stunting mengalami penurunan dari 4.2% menjadi 1.4%. Hasil yang signifikan tersebut memang terjadi karena pengaruh interveni stunting secara massif dan sistematis yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, dan data sasaran keluarga stunting telah ada dalam target pensasaran oleh perangkat daerah pengampu sehingga anak stunting yang dilakukan intervensi tidak lepas dari total keseluruhan target ditetapkan.

Grafik 2. 9
Prevalensi Stunting Versi EPPBGM Tahun 2021-2023

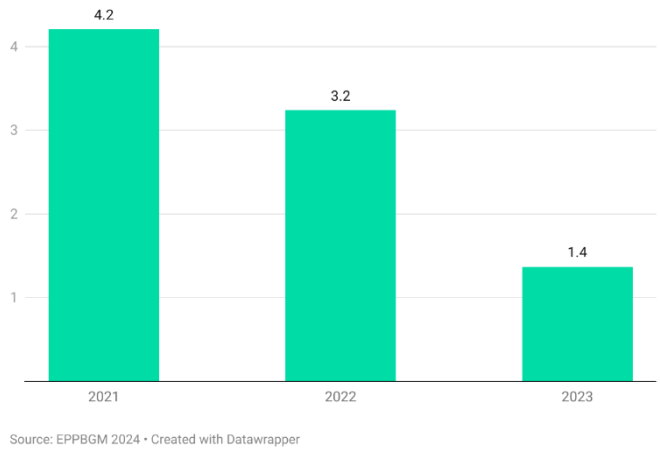

2.1.3.1.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.2.2.1.3.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Jumlah panjang jalan yang dimaksud dalam indikator ini, adalah total keseluruhan panjang jalan yang berada di wilayah Kota Palopo termasuk jaringan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Negara yang ada. Kondisi jaringan jalan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan. Salah satunya adalah Jalan Kondisi Baik (B) yang didefinisikan sebagai semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6 %), sehingga arus lalu -lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.

Tabel 2. 83
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berkondisi Baik 2017-2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Panjang Jalan Berkondisi Baik (Km)	296.68	342.09	350.03	382,95	394,68	412,37	
b.	Panjang Jalan Keseluruhan (Km)	503.16	503.16	503.16	503,16	503,16	503.16	
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)		58.96	67.99	69.57	76,11	78,44	81,96	

Sumber data : Palopo Dalam Angka, 2023

2.2.2.1.3.2 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Jumlah panjang jalan yang dimaksud dalam indikator ini, adalah total keseluruhan panjang jalan yang berada di wilayah Kota Palopo termasuk jaringan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Negara yang ada.

Jaringan yang baik sangat mempengaruhi mobilitas dan aksesibilitas pergerakan di dalam jaringan tersebut.Pendekatan yang biasanya digunakan untuk perencanaan jaringan adalah pendekatan ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan nasional dan tidak boleh melupakan hambatan phisik yang mungkin ditemui.

Di dalam sektor transportasi aksesibilitas adalah ukuran kemudahan untuk mencapai suatu tujuan, sehingga dikatakan kalau aksesibilitas tinggi adalah bila alternatif rute menuju suatu tempat banyak sehingga dapat dicapai dengan gampang dari beberapa tujuan.

Tabel 2. 84
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah panjang jalan (Jalan Negara + Jalan Propinsi + Jalan Kewenangan Pemkot)	503.16	503.16	503.16	317.34	503,16	503,16	549.635
b.	Jumlah penduduk	176.907	180.678	184.614	184.681	187.331	190.867	194,448
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk (per 10.000)		28	28	27	17	27	27	28

Sumber Data : BPS Palopo Dalam Angka 2023

Rasio panjang jalan di Kota Palopo dari tahun 2017 sampai 2023 tetap memiliki panjang 28.- tidak bertamabah dan tidak juga berkurang.

Persentase Kawasan Pemukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sementara pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan (UU No 1 Tahun 2011).

Indikator ini menggambarkan kondisi jalan untuk mengakses pemukiman masyarakat yang memperlihatkan konektifitas dan aksesibilitas sebuah kwasan pemukiman penduduk. Semakin besar nilai indikator ini semakin sulit pula aksesibilitas wilayah maupun transportasi penduduk yang bermukim di daerah tersebut. \

2.2.2.1.3.3 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)

Data panjang jalan dalam indicator ini dibatasi pada ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palopo, tidak termasuk jalan kewenangan Propinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Negara. Jalan berkondisi baik dikategorikan jika mampu dilewati kendaraan roda empat dengan kecempatan di atas 40 Km/Jam. Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Tabel 2. 85
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Panjang Jalan Berkondisi Baik yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palopo (Km)	264.14	309.54	317.48	373.81	338,21	338,21	280.942
b.	Panjang Jalan Kewenangan Pemerintah Kota Palopo (Km)	443.39	443.39	443.39	443.39	443,39	443,39	489.865
Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan Pemerintah Kota Palopo yang dalam kondisi baik (%)		59.57	69.81	71.60	84.3	76,28	76,28	57,35

Sumber Data : Palopo Dalam Angka 2023

Proporsi jalan yang baik di Kota Palopo ditahun 2017 dengan presentase 59.57 sedangkan ditahun 2023 dengan presentase 57,35 ini menandakan bahwa mengalami penurunan jalan yang berkondisi baik di tahun 2023.

2.2.2.1.3.4 Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)

Merujuk pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 tahun 2014 dikatakan bahwa trotoar adalah jalur pejalan kaki yang sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki. Fungsi utama dari trotoar ini adalah sebagai fasilitas pelayanan bagi pejalan kaki. Kemudian drainase menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 tahun 2014 adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air

dari suatu kawasan ke badan penerima air.Seperti diketahui dilapangan bahwa tidak semua jalan memiliki drainase dan trotoar, walupun sebenarnya idealnya satu paket dalam infrastruktur jalan raya. Seperti halnya Kota Palopo yang hanya memiliki persentase yang hanya 58,81%.

Tabel 2. 86
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km)	5,663	8,06	10,76	260.76	263,31	260,76	
b.	Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)	443,39	443,39	503,16	443.39	443,39	443,39	489.865
Persentase		1,28	1,79	2,14	58.81	59,39	58,81	

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2022

Data yang ditampilkan pada tabel di atas hanya data panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase yang lebarnya lebih dari 1,5 meter, sesuai indikator yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sebab masih terdapat ruas jalan lain di Kota Palopo yang memiliki trotoar dan drainase namun ukurannya lebih kecil daripada 1,5 meter.

Data pada tabel menunjukkan bahwa sampai pada tahun 2022, mencapai 58.81% jalan di Kota Palopo yang memiliki trotoar dan drainase selebar minimal 1,5 meter. Kondisi ini masih lebih baik dibandingkan dengan tahun 2017 yang berada pada angka 1,28%. Ini juga menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil ruas jalan di Kota Palopo yang memiliki saluran pembuangan air/drainase yang memadai dengan lebar minimal 1,5 meter.

2.2.2.1.3.5 Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar

Menurut definisi sempadan adalah batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu yang sejajar dengan as jalan yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan ataupun dilaksanakan kegiatan aktivitas diatasnya. Sempadan jalan merupakan bagian dari RUMIJA (ruang milik jalan) yang masuk dalah perencanaan pelebaran jalan.Untuk data tersebut perangkat daerah pengampu belum memiliki dan mendata secara akurat, hanya sebatas panjang sempadan jalan saja yang ada di Kota Palopo yaitu 886,78 Km.

Tabel 2. 87
Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (km)	-	-	-	-	-	-	
b.	Panjang seluruh sempadan jalan kabupaten (km)	886.78	886.78	886,78	886,78	886,78	886,78	
Persentase		-	-	-	-	-	-	

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2023

Panjang seluruh sempadan jalan kabupaten kabupaten yaitu 886.78.

2.2.2.1.3.6 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah Tinggal Bersanitasi adalah hunian yang memiliki fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah. Sementara menurut UU No 1 Tahun 2011, rumah tinggal adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Tabel 2. 88
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Tinggal berakses sanitasi	39.183	42.622	42.772	33.066	34.872	38.992	
2	Jumlah Rumah Tinggal	43.167	44.209	44.081	39.514	41,220	43.467	

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	90.77	96,41	97,03	83,68	84,60	89,70	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo 2022

Data di atas menunjukkan rumah tinggal di Kota Palopo telah bersanitasi pada tahun 2021 sebanyak 84.60%. Kondisi ini apabila dibandingkan tahun 2017, mengalami penurunan yang berada pada angka 90.77%. Secara keseluruhan rumah tibnggal bersanitasi di Kota Palopo mengalami peningkatan dalam waktu lima tahun terakhir.

2.2.2.1.3.7 Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Tabel 2. 89
Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (km)	8.735,01	9.041,97	9.492,93	7.929,27	7.240,02	6.965,27	46,069
b.	Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (km)	18.947,97	18.947,97	18.947,97	18.947,97	18.947,97	18.947,97	18947.97
Persentase (%)		46,10	47,72	50,10	41.85	38,21	36,76	2,43

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2023;

Data di atas menunjukkan bahwa sempadan sungai di Kota Palopo dari tahun ke tahun semakin banyak yang diakses oleh bangunan liar/tak berijin. Jika tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 50,10% sempadan sungai yang diakses bangunan liar atau sepanjang 9.492,93 Km. Pada tahun 2020 jumlahnya mengalami penurunan menjadi 41.85%, serta tahun 2021 menjadi 38,21%. Kondisi ini menunjukkan perlunya meningkatkan kinerja penataan ruang agar sempadan sungai yang dipakai oleh bangunan liar semakin menurun. Data pada tahun 2023 menunjukkan angka 2,43%.

2.2.2.1.3.8 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Tabel 2. 90
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (km)	55,47	47,24	46,90	41,30	37,02	42,02	40.53
b.	Panjang seluruh drainase di Kota Palopo (km)	516,65	524,89	529,04	529.179	535,37	530,197	530,198
Persentase		10,73	8,99	8,86	7,66	6,72	7,96	0,07

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2022

Data di atas menunjukkan kualitas dan fungsi drainase di Kota Palopo semakin menurun. Jika pada tahun 2017 terdapat 10,73% drainase Kota Palopo yang kondisinya baik dalam artian tidak tersumbat, pada tahun 2021 hanya ada 6,72% drainase Kota Palopo yang kondisinya baik atau tidak tersumbat. Ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya Pemerintah Kota Palopo dalam meningkatkan atau mengakselarasi program dan kegiatan penanganan drainase pada tahun mendatang. Data pada tahun 2023 menunjukan anngka presentase 0,07.

2.2.2.1.3.9 Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun

Tabel 2. 91
Persentase Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Luasan daerah yang tergenang (Ha)	0,214	0,078	11.85	8.5	11,52	-	9.95

b.	Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang (Ha)	1,484	0,545	49.22	46,00	41,78	-	40.21
Persentase (a/b x 100%)		14,42	14,31	24.08	18.47	27,57	-	0,24

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2023
;

Data di atas menunjukkan bahwa perkembangan luas daerah yang tidak terjadi genangan di Kota Palopo stagnan atau berjalan di tempat. Sampai tahun 2021, hanya 27,57% daerah di Kota Palopo yang tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali dalam setahun. Ini menunjukkan hanya sebagian kecil daerah rawan genangan di Kota Palopo yang tidak terjadi genangan 2 kali dalam setahun.

Kemudian luas daerah yang tergenang lebih dari dua kali dalam setahun di Kota Palopo jauh berkurang pada tahun 2021 yang berada pada angka 11.52 Ha. Meski pada tahun 2017, luas daerah yang tergenang mencapai 0.214 Ha. Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang di Kota Palopo juga berkurang dari 1,484 Ha pada tahun 2017 menurun menjadi 41,78 Ha pada tahun 2021. Pemerintah Kota Palopo menginginkan tidak ada lagu daerah yang tergenang di Kota Palopo pada tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2023 luasan daerh yang tergenang (Ha) berada pada angka 9.95 dan luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang(Ha) berada pada angka 40.21. Presentase pada tahun 2023 menunjukkan pada 0,24%.

2.2.2.1.3.10 Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor.

Pembangunan turap merupakan bagian dari tindakan preventif dalam menanggulangi bencana longsor. Seperti diketahui bahwa Kota Palopo memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga potensi terjadinya bencana longsor sangat tinggi, terlebih terdapat kecamatan yaitu Wara Barat yang berada di lereng pegunungan perbatasan dengan wilayah Toraja Utara. Selain itu juga terdapat banyak anak sungai di Kota Palopo yang perlu diturap karena berdekatan dengan lokasi permukiman penduduk. Untuk membangun turap penahan longsor tidak mudah dikarenakan biaya pengerjaan yang sangat mahal. Oleh karena itu dilakukan secara bertahap setiap tahunnya, dan total panjang turap diwilayah potensi longsor Kota Palopo mencapai 21,774,98 Km

Tabel 2. 92
Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor
Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (Km)	19.713,18	21.021,28	21.198,98	21.354,93	21.774,98	
Jumlah seluruh wilayah rawan longsor (Km)	31.579,94	31.579,94	31.579,94	31.579,94	31.579,94	31579,94
Persentase	62.42	66.57	67.13	67.62	68.95	

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

Selama tahun 2018-2022 terjadi tren peningkatan pembangunan turap baik diwilayah jalan dan sungai. Tahun 2022 sebesar lebih dari separuh (68,95%) ruas jalan dan sungai yang berpotensi longsor telah dilakukan pembangunan turap, dari total seluruh wilayah rawan longsor sepanjang 31.579,94 Km .

2.2.2.1.3.10 Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik

Irigasi merupakan hal yang berhubungan dengan penyediaan air bagi lahan pertanian maupun perkebunan. Walaupun Kota Palopo berstatus kota madya, masih terdapatnya lahan pertanian produktif (sub bab 3.2.7). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2022 tentang irigasi, bahwa irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Total luasan irigasi di Kota Palopo sebesar 907,90 Ha

Tabel 2. 93
Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	678,05	743,29	667,77	707,71	709,19	710,32	640.6
b.	Luas irigasi kabupaten (Ha)	950,45	980,54	907,90	907,90	907,90	907,90	907.9
Persentase (a/b x 100%)		71,34	75,80	73,55	77.95	78,11	78,24	0,70

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2022

Data di atasmenunjukkan bahwa luas irigasi di Kota Palopo yang berkondisi baik dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jika pada tahun 2017 pada angka 71.34% pada tahun 2021 pada angka 78.11%. Angka inilah yang mestinya menjadi

target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke depannya dalam melaksanakan program dan kegiata keirigasian. Data 2023 luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha) menunjukkan angka pada 640.6 dan luas irigasi kabupaten (Ha) menunjukkan angka 75,005, hasil presentasenya yaitu 0,70%.

2.2.2.1.3.11 Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian.

Tabel 2. 94
Persentase Rasio Jaringan Irigasi Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
a.	Panjang Saluran Irigasi (Km)	54,406	72,210	73,721	75,005	75,005	75,005	75,005	75,005
b.	Luas Lahan Budidaya Pertanian (Sawah) (Ha)	907.90	907.90	907.90	907.90	907,90	907,90	907,90	907,90
Rasio Jaringan Irigasi (Per 1000 Ha)		59.93	76.54	81.20	82.61	82,61	82,61	82,61	82,61

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo 2018, Dinas Pertanian, Peternakan Perkebunan Kota Palopo 2023

Data di atasmenunjukkan bahwa sepanjang tahun 2017-2023, panjang irigasi untuk mengairi sawah seluas 1000 Ha di Kota Palopo meningkat. Jika tahun 2017 untuk 1000 Ha sawah hanya dilayani irigasi sepanjang 54,406 Km, pada tahun 2023 untuk luasan yang sama telah mampu dilayani jaringan irigasi sepanjang 75,005 Km. Meningkatnya cakupan irigasi terhadap lahan persawahan ini diharapkan mampu meningkatkan produktifitas lahan pertanian dan pada akhirnya menjadi salah satu faktor penghambat alih fungsi lahan pertanian terutama persawahan di Kota Palopo.

Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Tabel 2. 95
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum (jiwa)	165,284	171.359	176.521	175.646	177.105	180.145	149,804
b.	Jumlah Penduduk (jiwa)	176.907	180.678	184.614	184.681	187.331	190.867	177,526
Persentase (a/b x 100%)		*93,00*	*94,84*	*95,61*	*95.11*	*94,54*	*94,38*	*0,84*

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo 2022

Data di atasmenunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022, besaran penduduk Kota Palopo yang memiliki akses terhadap air minum sebanyak 94,38 %. Kondisi ini meningkat dibandingkan tahun 2017 yang berada pada angka 93.00 %. Meski demikian ini menunjukkan bahwa masih ada kurang lebih 5,46% penduduk Kota Palopo yang belum memiliki akses air minum. Data tahun 2023 jumlah penduduk berakses air minum (jiwa) pada angka 149,804 dan jumlah penduduk (jiwa) pada angka 177,526), hasil presentasinya yaitu 0,84.

Persentase Areal Kawasan Kumuh

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.Sementara Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Tabel 2. 96
Persentase Areal Kawasan Kumuh Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Bidang/Urusan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Luas kawasan Kumuh (Ha)	32.08	20.85	3,85	427,36	24,63	-	
b	Luas wilayah Kota Palopo (Ha)	2.529.90	2.529,90	2.529,90	2.529,90	2.529,90	-	2529.9
Persentase luas areal kawasan kumuh		1.20	0.82	0,15	0.16	0,37	-	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo 2022

Data di atasmenunjukkan bahwa sepanjang tahun 2017-2021, total luas kawasan kumuh yang telah ditangani sebanyak 384,78 Ha. Dari luas awal kawasan kumuh sebanyak 32.08 Ha pada tahun 2017, menjadi 24.63 Ha pada tahun 2021. Sehingga sampai pada tahun 2021 persentase luas areal kawasan kumuh Kota Palopo terhadap luas wilayah Kota Palopo, hanya tersisa 0,37 %. Data luas kawasan kumuh (Ha) pada tahun 2023 yaitu 2529.9.

Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

Tabel 2. 97
Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Bidang/Urusan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA (ton)	3.614	1.376	1.387	645	1.421	2.024	2880.35
b	Total volume sampah (Ton)	37.427	34.171	33.699	31.371	33.738	34.188	34833.23
Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan (%)		3,5	4.02	4,11	4,49	4,21	5,92	8,26

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo 2022

Data di atas menunjukkan pada tahun 2017, volume sampah yang berhasil dikurangi sebelum sampai ke tempat Pembuangan Akhir Sampah hanya sebanyak 3.614 ton atau sekitar 3,50% dari produksi sampah yang ada. Tahun 2021, volume sampah yang berhasil dikurangi menurun menjadi 1.421 Ton atau sebanyak 4,21%. Data dari tahun 2023 Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA (ton) yaitu 2880.35 dan Total volume sampah (Ton) yaitu 34833.23 presentase menunjukkan angka 8,26%.

Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Indikator ini untuk mengetahui kapasitas tampung tempat pemakaman umum yang bisa diakses masyarakat Kota Palopo. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat. pemakaman umum per 1.000 jumlah penduduk.

Tabel 2. 98
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Total Luas Tempat Pemakaman Umum (ha)	28	28	28	28	28	28	
B	Jumlah Lokasi Tempat Pemakaman Umum	15	15	15	15	15	15	
c	Jumlah Penduduk	176.907	180.678	184.614	184.681	187.331	190.867	194,448
Rasio per 10.000 penduduk		1.58	1,55	1.52	1.52	1,49	1,47	

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo 2022

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 untuk 10.000 penduduk Kota Palopo rata-rata hanya tersedia 1.49 Ha lahan pemakaman. Rasio ini menurun jika dibandingkan tahun 2017 dimana untuk 10.000 penduduk terdapat 1.58 Ha lahan pemakaman.

Pada tahun 2017 terdapat 28 titik lokasi pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Palopo. Tahun 2017-2021 terdapat 15 lokasi pemakaman umum di Kota Palopo yang bisa diakses masyarakat umum. Kapasitas makan per Ha, diperkirakan mampu menyediakan sebanyak 4000-5000 kuburan. Data pada tahun 2023 pada jumlah penduduk menunjukkan angka pada 194,448.

Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Indikator ini untuk mengetahui kapasitas tampung rumah ibadah yang bisa diakses masyarakat Kota Palopo.

Tabel 2. 99
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah Tempat Ibadah	316	322	336	358	365	328	391
	Mesjid	191	193	202	221	227	215	237
	Mushola	47	52	52	67	70	48	62

	Gereja Protestan	70	69	74	59	61	55	84
	Gereja Katolik	5	5	5	8	8	7	5
	Vihara	2	2	2	2	2	2	2
	Kuil/Pura	1	1	1	1	1	1	1
b.	Jumlah Penduduk	176.907	180.678	184.614	184.681	186.015	190.867	177,526
Rasio per 1000 penduduk		1,79	1,78	1,78	1.82	1,96	1,72	2,20

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022

Sesuai angka dalam tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017,untuk 1000 penduduk Kota Palopo tersedia sebanyak 2 (pembulatan 1,79) tempat ibadah di Kota Palopo. Kondisi yang serupa juga terjadi pada tahun 2022, dimana hanya terdapat 2 tempat ibadah per 1000 penduduk Kota Palopo. Rasio dari jumlah tempat ibadah pada tahun 2023 yaitu 2,20.

2.2.2.1.3.2 Penataan Ruang

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Hak Guna Bangunan atau HGB adalah hak untuk mengusahakan (mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah) tanah yang dikuasai langsung oleh negara, untuk jangka waktu tertentu. Sementara Hak Pengelolaan atau HPL menurut Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya, antara lain berupa perencanaan dan peruntukan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

Indikator ini mengindikasikan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Palopo dalam memanfaatkan tanah yang berada dalam penguasaanya menjadi ruang terbuka hijau. Nilai rasio yang semakin tinggi menunjukkan bahwa intensitas pemanfaatan tanah oleh pemerintah daerah untuk ruang terbuka hijau semakin bai

Tabel 2. 100
Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Luas ruang terbuka hijau (Ha)	1.170.72	1171.52	1.174.21	1.174.21	1.174.21	1.174.21	824,24
b.	Luas wilayah ber HPL/HGB (Ha)	n/a	n/a	31.8511	31.8511	31.8511	31.8511	2602.2
Rasio Ruang Terbuka Hijau				3.67	3.68	3.68	3.68	

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2022

Data di atasmenunjukkan bahwa luas ruang terbuka hijau di Kota Palopo meningkat sejak tahun 2017. Jika pada tahun 2017 tersedianya ruang terbuka hijau sebanyak 1.170,72 Ha, pada tahun 2022 meningkat menjadi 31.8511 Ha.

Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2007, jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan terdiri dari : Taman kota, Taman wisata alam, Taman rekreasi, Taman lingkungan perumahan dan permukiman, Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, Taman hutan raya, Hutan kota, dan hutan lindung.
Sesuai Revisi Rencana Tata Ruang Kota Palopo, Ruang Terbuka Hijau Kota Palopo akan dilaksanakan sebagai berikut :
RTH Publik tersebar di wilayah Kota Palopo direncanakan seluas 5.269,55 hektar atau sebesar 20,41%.
RTH Private seluas 2.601,7 hektar atau sebesar 10,08%.

Tabel 2. 101
Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Luasan RTH publik yang tersedia (ha)	1.170.72	1.171,81	1.174,21	1.174.21	1.174.21	1.174.21	596.36
b.	Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan (Ha)	1.525,89	1.525,89	1.525,89	1.525,89	3.474	7.871,25	2.837

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Luasan RTH dari Luas Wilayah Kota (%)		76.72	76,79	76,95	76.95	33,80	14,92	0,21

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2022

Rasio luasan RTH publik yang tersedia (ha) dan luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan (ha) pada tahun 2019 dan 2020 setara yaitu 76,95 sedangkan yang rendah pada tahun 2023 yaitu 0,21.

Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan

Tabel 2. 102
Rasio Bangunan Ber – IMB Per Satuan Bangunan Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah bangunan ber IMB (Buah)	1.595	1.202	1.255	1.011	1.518	-	1701
b.	Jumlah bangunan (Buah)	19.629	21480	24488	28.305	28.616	-	30781
Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan		0.088	0.0779	0.0556	0.0535	0,0530	-	0,055
Per 100 (%)		7.79	5.56	5.35	4.52	5,30	-	

Sumber Data : SIPD Kota Palopo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2022

2.1.3.1.4 Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu : jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). Jadi Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Data pada tahun 2023 menunjukkan pada angka

Tabel 2. 103
Rasio Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah rumah layak huni	29.777	32.097	34.268	35.313	37.876	38.967	39365
b.	Jumlah penduduk	176.907	180.678	182.107	184.681	187.331	190.867	194241
Rasio Rumah Layak Huni		0,168	0,178	0,188	0.191	0,201	0,204	

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Palopo Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah rumah layak huni di Kota Palopo sepanjang tahun 2017-2021 meningkat. Jika pada tahun 2017 hanya terdapat sebanyak 29.777 unit rumah layak huni, pada tahun 2021 jumlah rumah layak huni meningkat menjadi 37.876 unit.

Rasio rumah layak huni pada tabel di atasmenunjukkan bahwa pada tahun 2017, per 1000 penduduk Kota Palopo hanya terdapat 168 unit rumah layak huni, kondisi ini terus membaik dimana pada tahun 2021 terdapat 201 unit rumah layak huni per 1000 penduduk Kota Palopo.

Rasio Pemukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman.Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik.

Tabel 2. 104
Rasio Permukiman Layak Huni Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a	Luas area permukiman Layak Huni (Ha)	4.414	5.078	5.130	5.205	5.185	5.231,2	5462.9
b	Luas area permukiman keseluruhan (Ha)	4.682	5.561	5.561	5.561	5.611	5.680,4	5904
Rasio Permukiman Layak Huni (%)		94,28	91,32	92,26	93.59	92,40	92,09	92,52
Rasio Pemukiman Layak Huni Sulsel (%)		97	97	-	-	-	-	

Sumber Data : Dinas Perumahan dan PemukimanKota Palopo Tahun 2022

Rasio permukiman layak huni dari tahun ke tahun semakin meningkat, seperti yang terlihat pada tabel, rasio permukiman layak huni tahun 2017 pada angka 94.28% menjadi 92.09%. Data pada tahun 2023 luasa area pemukiman layak huni (Ha) yaitu 5462.9 dan Luas area pemukiman keseluruhan (Ha) yaitu 5904 menunjukkan rasio 92,52%.

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan RLH dihitung dari jumlah seluruh RLH pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah total rumah pada tahun tertentu dikali 100%. Semakin seimbangnnya jumlah RLH dengan jumlah total keseluruhan di suatu wilayah menunjukkan bahwa di wilayah tersebut memiliki akses perumahan yang nyaman dan layak bagi penghuninya, sehingga akan tercipta kebersihan, keteraturan, dan kesehatan.

Tabel 2. 105
Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	29.777	33.856	34.378	35.313	37.876	38.967	
b.	Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	37.504	37.076	37.598	38.075	39.025	42.142	
PersentaseKetersediaan Rumah Layak Huni		%	79,39	91,32	91,44	92.74	97,06	92,47	

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2022

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, dari 100 rumah yang ada, sebanyak 79 rumah merupakan rumah layak huni. Kondisi ini terus membaik dimana pada tahun 2021 angkanya menjadi 97 rumah layak huni per 100 rumah. Ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah rumah layak huni di Kota Palopo sepanjang 2017-2022.

Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Tabel 2. 106
Persentase Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	Unit	3.928	4.390	4.912	5.389	5.926	6.468	6531
b.	Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	Unit	4.265	4.727	5.249	5.726	6.226	6.769	6831
Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau		%	92,10	92,87	93,58	94,11	95,18	95,55	95,60

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2022

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, dari 100 rumah tangga MBR yang ada, sebanyak 92 rumah tangga MBR telah menempati rumah layak huni. Kondisi ini terus membaik dimana pada tahun 2022 angkanya menjadi 95 rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni per 100 rumah tangga MBR. Ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni di Kota Palopo sepanjang 2017-2022. Artinya semakin banyak rumah tangga MBR yang mampu mengakses rumah layak huni. Data pada tahun 2023 Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu yaitu 6532 dan Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu yaitu 6831 menunjukkan presentase 95,60%.

Persentase Pemukiman yang Tertata

Persentase luas permukiman yang tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan.

Tabel 2. 107
Persentase Pemukiman yang Terjadi di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Luas area permukiman tertata	Ha	4.647	4.703	4702.47	5.185	5.186	5.539,15	5633
b.	Luas area permukiman keseluruhan	Ha	4682	4.738	4738	5.661	5.611	5.811	5904
Persentase Pemukiman yang Tertata		%	99,25	99,26	99.25	92.40	92,42	95,32	95,40

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2022

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, persentase luas pemukiman yang tertata di Kota Palopo menurun dari 99,25 % menjadi 92.42% pada tahun 2021. Selain persentase, luas area pemukiman yang tertata meningkat dari 4.647 Ha pada tahun 2017 menjadi 5.539,15 Ha pada tahun 2022. Data pada tahun 2023 pada luas area pemukiman yaitu 5633 dan luas area pemukiman keseluruhan yaitu 5904, angka presentasenya menunjukkan angka 95,40%.

Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Lingkungan pemukiman kumuh adalahadalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukimanyang mengalami kekumuhan.Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan atau lingkungan pemukiman yangtergolong kumuh atau tidak adalah diantaranya dengan melihat : Tingkat kepadatan kawasan, Kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut.Penilaian tingkat kekumuhan harus terdiri dari kombinasi dari beberapa indikator kumuh yang ada.

Tabel 2. 108
Persentase Lingkungan Pemukiman KumuhKota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	32.08	20,85	426,37	426,37	303,40	303,40	271.85
b.	Luas wilayah Kota Palopo	Ha	247,52	247,52	247,52	247,52	247,52	247,52	24752
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh		%	0,13	0,02	1,72	1,72	1,23	1,23	0,01

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2022, Keterangan : 1 Km2 = 100 Ha

Data di atasmenunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2021 persentase luas lingkungan pemukiman kumuh terhadap total luas wilayah Kota Palopo sebanyak 1,23%, meningkat jika dibandingkan kondisi tahun 2017 yang berada pada angka 0,13%. Data pada tahun 2023 luas lingkungan permukiman kumuh yaitu 271,85 dan luas wilayah Kota Palopo 24752 menunjukkan angka presentase 0,01%.

Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Luasan permukiman kumuh dan termasuk suatu kawasan dalam satuan persegi ataupun hektar yang tidak layak huni ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Tabel 2. 109
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kota Palopo Tahun 2018– 2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha)	20,85	3,85	4	4	31,6	0
Luas pemukiman kumuh (Ha)	68,48	85,48	85,48	121,92	303,40	271.85
Persentase luasan pemukiman kumuh tertangani	30,45	4,50	4,50	3,49	10,40	0

Sumber : Dinas Perumahan & Permukiman

Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Luasan permukiman kumuh dan termasuk suatu kawasan dalam satuan persegi ataupun hektar yang tidak layak huni ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat. Data dari tahun 2023 luasan pemukiman kumuh yang tertangani yaitu 0 dan luas permukiman kumuh (Ha) yaitu 271.85 menunjukkan angka presentasnya yaitu 0.

Tabel 2. 110
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	KK	2.864	2.800	2.804	2.808	2.298	2.356	2413
b.	Jumlah seluruh rumah tangga	KK	38.641	39.778	39.773	40.303	41.220	42.158	42403
Persentase		%	7,41	7,04	7,05	6,97	5,57	5,59	5,69

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2022.

Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU

Indikator ini menggambarkan keberadaan sarana dan prasarana utilitas umum (PSU) berupa kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin baik kualitas pemukiman masyarakat. Data tahun 2023 pada jumlah rumah tangga kumuh prkotaan menunjukkan angka 2413 dan jumlah seluruh rumah tangga menunjukkan pada angka 42403 menunjukkan presentase pada angkat 5,69%.

Tabel 2. 111
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu	Kawasan	30	32	41	46	50	69	80
b.	Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu	Kawasan	143	150	159	164	230	246	251
Persentase		%	20,98	21,33	25,79	28.05	21,74	28,04	31,87

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2022

Data di atas menunjukkan bahwa kawasan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana Utilitas Umum (PSU) di Kota Palopo semakin berkurang. Jika pada tahun 2017 terdapat 20,98% lingkungan yang didukung PSU, pada tahun 2022 jumlah meningkat menjadi 28,04%, yang artinya bahwa dari 100 lingkungan perumahan yang ada pada tahun 2022, terdapat 69 lingkungan perumahan yang memiliki PSU. Data pada tahun 2023 pada jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu 80 dan jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu yaitu 251 hingga menunjukkan presentase 31,87%.

2.1.3.1.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat: untuk memastikan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Ukuran yang digunakan untuk keamanan dan ketertiban masyarakat adalah rasio polisi pamong praja terhadap setiap 10.000 penduduk, jumlah Linmas setiap 10.000 penduduk serta tersedianya pos siskamling per desa/kelurahan atau sebutan lain.

Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Tabel 2. 112
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	100 orang Petugas Linmas di kabupaten/kota daerah pemekaran baru	Orang	96	96	96	96	96	96	96
b.	1 wilayah kerja kabupaten/kota	Kelurahan	48	48	48	48	48	48	48
Persentase		%	200	200	200	200	200	200	200

Sumber Data : Dinas Satpol PP Kota Palopo, 2023.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah petugas Linmas sebanyak 2 orang dalam 1 kelurahan. Beberapa persoalan yang dihadapi dalam peningkatan kinerja indikator ini sesuai data Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Tahun 2018, adalah anggota Linmas yang tidak terdaftar, dimana personilnya selalu berganti atau tidak permanen, belum adanya insentif

bulanan bagi linmas dan kurangnya event pembinaan bagi mereka. Beberapa hal yang menjadi solusi atas kondisi ini adalah memperbaiki tata kelola Linmas dengan menerbitkan surat keputusan kepala daerah tentang anggota Linmas sehingga lebih mengikat dan permanen, kemudian memberikan mereka insentif yang telah memiliki SK dan memberikan pelatihan dalam pelaksanaan tugas di masyarakat.

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Trantibum merupakan kewenagan dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penegakan dan penindakan terhadap subyek ataupun obyek yang melanggar peraturan daerah. Setiap laporan yang berkaitan dengan penyimpangan perda wajib ditindaklanjuti melalui kegiatan rutin. Laporan yang masuk berasal masyarakat perlu dilakukan penelaahan apakah memang bagian dari kewenangannya atau pihak berwenang dalam hal ini adalah kepolisian apabila sudah masuk Tindakan pidana dan perdata.

Tabel 2. 113
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	186	169	153	150	134	114	737
b.	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	208	184	160	158	134	120	741
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)		92,20	91,80	95,62	94,93	100	95	99.46

Sumber Data : Dinas SATPOL PP Kota Palopo Tahun 2022

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2017 – 2022, seluruh laporan pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo semuanya diselesaikan walaupun tidak 100%, kecuali pada tahun 2021. Namun sesuai data Pol PP Kota Palopo, jumlah pelanggaran K3 yang mereka selesaikan jauh lebih banyak dari yang dilaporkan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa meski pelanggaran K3 tersebut tidak dilaporkan, jika ditemukan oleh Satuan Pol PP juga diselesaikan.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Angka dalam tabel menunjukkan bahwa cakupan jangkauan pelayanan bencana kebakaran di Kota Palopo meningkat. Jika tahun 2017, hanya 9,09%, tahun 2018-2022 menjadi 9,09%. Artinya sampai dengan tahun 2021, dari 247,50Km² luas Kota Palopo, yang masuk jangkauan manajemen kebakaran hanya 10 Km². Meski meningkat, kinerja cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Palopo ini ke depan harus lebih ditingkatkan mengingat cukup banyak daerah rawan kebakaran terutama di daerah padat penduduk dan perumahan.

Tabel 2. 114
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota
Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	Km²	22,5	22,5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5
b.	Luas wilayah kabupaten/kota	Km²	247,50	252,99	252.99	252.99	247.50	247.50	247.50
Persentase		%	9,09	10,08	10,08	10,08	9,09	9,09	9.09

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran danPenyelamatan Kota Palopo Tahun 2022

Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Indikator tingkat waktu tanggap atau respons time rate adalah indikator yang menggambarkan tingkat kesigapan petugas pemadam kebakaran untuk menangani kasus kebakaran yang terjadi. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin banyaknya kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit.

Tabel 2. 115
Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	Kasus	37	36	61	105	166	47	32
b.	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	Kasus	39	38	93	106	168	47	32
Persentase		%	94,87	94,74	65,59	98,13	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo Tahun 2022

Data di atasmenunjukkan bahwa jumlah kasus kebakaran yang ditangani kurang atau dalam waktu maksimal 15 menit, menurun. Pada tahun 2017, dari 39 kasus kebakaran, hanya 37 kasus yang ditangani kurang dalam waktu 15 menit, sementara di 2022, dari 47 kasus kebakaran, yang ditangani kurang atau maksimal 15 menit sebanyak 47 kasus, atau dalam kondisi ideal selama 2 tahun terakhir.

Persentase Penegakan PERDA

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran Perda di Kota Palopo semakin membaik. Jika tahun 2017 berada pada angka 97,90%, tahun 2021 menurun menjadi 93,36%. Ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ketetapan Peraturan Daerah.

Tabel 2. 116
Persentase Penegakan PERDA Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	186	169	153	150	134	131	105
b.	Jumlah pelanggaran PERDA	190	184	160	158	145	137	130
Persentase penegakan PERDA (%)		97,90	91,80	95,62	94,93	93,36	95.62	80.76

Sumber Data : Dinas SATPOL PP Kota Palopo Tahun 2022

2.1.3.1.6 Bidang Urusan Sosial

Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang Sosial.

Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Adalah indikator yang menggambarkan kemampuan Pemerintah dalam menangani Penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Palopo dengan memberikan bantuan sosial. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin baiknya penanganan PMKS di Kota Palopo.

Tabel 2. 117
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a	Jumlah PMKS yang diberi bantuan	Jiwa	8.777	9.586	11.068	16.785	31.820	2660	
b	Jumlah PMKS yang menerima seharusnya menerima bantuan	Jiwa	18.388	18.586	20.134	24.304	35.519	20526	
Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial		%	47.73	51.58	54,97	69,06	89,58	12,96	

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2022

Pada tahun 2017 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat bantuan sebesar 47,73% dari jumlahPMKS yang ada, tetapi tahun berikutnya terus meningkat hingga tahun 2021 persentase pada angka 89.58%. Tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan tajam karena bansos yang dihitung merupakan bansos bersumber dari APBD yaitu rastra daerah. Bansos lainnya yang bersumber diluar dari APBD belum dimasukkan perhitungan di tahun 2022.

Persentase PMKS yang Tertangani

Adalah indikator yang menggambarkan cakupan atau besaran penanganan PMKS yang ada di Kota Palopo. Penanganan PMKS bisa dalam bentuk kegiatan seperti langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PMKS. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik penanganan PMKS di Kota Palopo.

Tabel 2. 118
Persentase PMKS yang Tertangani Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a	Jumlah PMKS yang tertangani	Jiwa	6.875	9.598	11.139	16.865	31.820	17.576	
b	Jumlah PMKS yang ada	Jiwa	18.588	18.662	20.221	24.337	35.519	35.870	
c	Persentase PMKS yang Tertangani	%	36.98	51,43	55,09	69,30	89,58	48,70	

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2022

Data di atas menunjukkan besaran PMKS yang tertangani di Kota Palopo sejak 2017 – 2022 meningkat. Jika 2017 sebanyak 36.98 % artinya dari 100 orang PMKS, yang berhasil ditangani sebanyak 37 orang, namun 2022 berhasil ditangani 17.576 orang PMKS yang ada. Meski demikian dalam konteks pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, capaian kinerja ini masih perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Adalah indikator yang menggambarkan besaran PMKS yang diberikan bantuan sandang pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya. Semakin tinggi indikator ini, semakin banyak PMKS yang terancam kehidupannya akibat persoalan pemenuhan kebutuhan yang sangat mendasar.

Tabel 2. 119
Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a	Jumlah PMKS yang memperolah bantuan sosial dalam 1 tahun	Jiwa	8.748	9.318	10.245	16.398	27.925	17.576	
b	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperolah bantuan social	Jiwa	15.184	15.778	16.990	21.348	35.519	35.870	
Persentase PMKS skala yang emperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		%	57,61	59,06	60,30	76,81	78,61	48,70	

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2022

Data di atas menunjukkan besaran PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam satu tahun di Kota Palopo sejak 2017 – 2022 meningkat. Jika 2017 sebanyak 57,61% artinya dari 100 orang PMKS, sebanyak 58 orang telah diberikan bantuan sosial, tahun 2022 sebanyak 17.576 orang bisa diberikan bantuan sosial. Meski demikian dalam konteks pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, capaian kinerja ini masih perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Menurut undang-undang 1945 pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Maka dari itu pemerintah daerah di daerah juga bertanggung jawab dalam mengurus anak terlantar dan fakir miskin. Terkait hal tersebut dalam dokumen perencanaan daerah telah dimasukan menjadi bagian indikator capaian program kegiatan yang diampu oleh pernagkat daerah terkait yaitu Dinas Sosial. Indikator dalam capaian tersebut adalah persentase panti social yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan social di Kota Palopo

Tabel 2. 120
Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos								
		Unit	8	8	8	11	11	11	
b	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos								
		Unit	8	8	8	11	11	11	
Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial									
		Unit	100	100	100	100	100	100	

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2022

Target SPM untuk indikator ini sebesar 100%. Sejak tahun 2017 – 2022, target indikator ini telah dicapai. Ini menunjukkan bahwa semua panti sosial yang ada di Kota Palopo telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial bagi para penghuninya.

Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Wahana kesejahteraan social berbasis masyarakat (WKBSM) merupakan system kerjasama pelayanan kesejahteraan social di tingkat akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, Lembaga maupun jaringan pendukung. Lembaga WKBSM ini merupakan Lembaga yang paling dekat dengan masyarakat karena berada pada level RW (rukun warga). Perlu dilakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam meangani maslah social didaerah dengan menggandeng lembaga ini. Pembentukan WKSBM bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan social masyarakat dengan cara meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang dibiayai dengan iuran anggotanya sendiri. Kegiatan WKSBM berlandaskan semangat kebersamaan dan gotong royong.

Total jumlah WKSBM di Kota Palopo selama tahun 2018-2022 sebanyak 48 unit Lembaga dan tetap stagnan tidak mengalami perubahan (Tabel.2.2.1.6.7). Walaupun demikian pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Sosial tetap melakukan pendataan dan kolaborasi dalam menanggulangi permasalahan social serta lintas sectoral dengan pemangku kepentingan terkait.

Tabel 2. 121
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasrana pelayanan kesos								
		Unit	48	48	48	48	48	48	
b	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasrana pelayanan kesos skala								
		Unit	48	48	48	48	48	48	
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial									
		%	100	100	100	100	100	100	

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2022

Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Permasalahan keserjahteraan dan kerawanan social tidak hanya berkutat kepada penduduk miskin, anak terlantar, yatim piatu, tetapi juga berkaitan dengan keadaan yang tidak diduga (force majeur) yang diakibatkan oleh bencana alam. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah pengampu juga wajib memberikan bantuan dan fasilitas penunjang bagi korban.

Selama tahun 2018-2021 banyak terjadi bencana. Puncaknya adalah tahun 2021 yang terjadi bencana sebanyak 1952 kejadian. Banyaknya kejadian bencana tersebut tidak hanya disebabkan oleh factor alam, tetapi juga terdapat kelalaian yang disebabkan oleh manusianya. Seperti bencana kebakaran rumah dan tanah longsor yang diakibatkan pembukaan lahan di wilayah lereng. Berdasarkan aturan perundang-undangan pemerintah daerah berhak membuat SK penetapan bencana oleh kepala daerah yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pencairan dana cadangan tidak terduga akibat bencana. Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu)

tahun belum terealisasikan semuanya karena hanya penduduk tertentu yang telah diverifikasi dan validasi apakah layak atau tidak menerima bantuan.

Tabel 2. 122
Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun								
		Jiwa	139	347	100	562	1.952	0	
b	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerimabantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun								
		Jiwa	223	139	347	100	1.952	0	
Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat									
		%	100	100	100	100	100	0	

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2022

Target SPM untuk indikator ini adalah 80% artinya dari 100 orang korban bencana 80 orang harus mendapatkan bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Di Kota Palopo capaian indikator kinerja ini telah terpenuhi dan mencapai 100%.

Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Tabel 2. 123
Presentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana TanggapDarurat Lengkap Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun								
		Jiwa	0	0	0	0	0	0	
b	Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat skala								
		Jiwa	0	0	0	0	0	0	
Presentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap									
		%	0	0	0	0	0	0	

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2022

Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Penyandang cacat fisik dan mental atau disabilitas merupakan tanggung jawab bagi pemerintah daerah dalam merawat dan memberdayakannya. Menurut undang-undang No.18 tahun 2016 tentang penyadang disabilitas bahwa pada dasarnya penyadang disabilitas harus dianggap setara dengan masyarakat lainnya, dan memiliki hak yang sama dengan individu lainnya yang normal tanpa diskriminasi apapun bentuknya. Selain mengubah sudut pandang penyandang disabilitas dapat di fasilitasi untuk berdaya, mandiri secara ekonomi. Dalam dokumen perencanaan penyandang disabilitas masuk dalam indikator program dan kegiatan yang ada pada Dinas Sosial. Selain itu juga ada masyarakat yang masuk dalam lansia yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk merawatnya. Lansia adalah seorang individu yang masuk dalam usia >60, dan merupakan keniscayaan bagian dari siklus hidup manusia. Hasil capaian indikator mengenai penyadang disabilitas dan lansia disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 124
Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut UsiaTidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun								
		Orang	138	248	672	387	953	268	
b	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun								
		Orang	1.162	1.260	1.622	2.305	4.081	4.081	
Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial									
		%	11,88	19,68	41,43	16,79	23,35	6,57	

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2022

Berdasarkan hasil capaian indikator tersebut jumlah penyandang disabilitas dan lansia di Kota Palopo tahun 2017-2021, mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2022. Selama tahun 2018-2021 pemerintah Kota Palopo hanya mampu memberikan pelayanan dan fasilitasi bantuan kurang dari 50% dari total keseluruhan penyadang disabilitas dan lansia. Hal ini tidak lepas dari terbatasnya anggaran dalam melakasanakan program tersebut, sehingga diperlukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait terutama dalam memberdayakan penyandang disabilitas yang masuk dalam kategori angkatan kerja.

2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.1.3.2.1 Bidang Urusan Tenaga Kerja

Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja per Tahun

Setiap buruh atau tenaga kerja dan pemilik usaha dalam melaksanakan aktivitas kegiatan dan ekonominya pada prinsipnnya memiliki kepentingan yang berbeda. Disisi lain pemilik usaha bagaimana cara memaksimalkan keuntungan dengan menekan biaya tenaga kerja dan menuntut produktivitas kerja yang tinggi. Kemudian sisi lainnya tenaga kerja menuntut adanya peningkatan kesejahteraan atas kontribusi tenaga dan pikirannya kepada pemilik usaha. Adanya kesenjangan diantaranya menimbulkan suatu konflik antara pengusaha dan tenaga kerja. Di Kota Palopo angka sengketa pengusaha dengan tenaga kerja per tahunnya fluktuatif.

Tabel 2. 125
Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja per Tahun di Kota Palopo 2017-2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja	14	16	18	11	12	17	8
2	Jumlah Perusahaan	1.685	1.741	1887	1897	1.906	1908	1925
3	Jumlah Perusahaan ber TDP(*)	774	719	707	715	723	506	674
Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun (x 1000)		8,3	9,19	9.5	5,7	6,29	8,9	8,7
Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja di Perusahaan ber TDP Per Tahun (x 100)		1.81	2,23	2.55	1,53	1,65	3,35	-666

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja, 2022

Angka sengketa pengusaha dan pekeja mengalami fluktuatif selama 2018-2022, pada tahun 2018-2020 mengalami kenaikan dan penurunan dari 9,50 – 5,70, kemudian dua tahun terakhir mengalami tren naik menjadi 8,90 di tahun 2022. Kondisi ini juga diikuti oleh perusahaan yang telah memiliki TDP (tanda daftar perusahaan) di tahun 2020-2022 meningkat dari 1,53 menjadi 3,35. Data perusahaan pada tahun 2023 jumlah pengusaha pekerja sebanyak 8, jumlah perusahaan sebanyak 1925 dan jumlah perusahaan ber TDP(*) yaitu -666.

Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Indikator ini menggambarkan besaran sengketa antara pengusaha dan pekerja yang berhasil diseleasikan dengan perjanjian bersama. Semakin tinggi nilai indikator ini artinya semakin banyak sengketa/perselisihan antara buruh/pekerja dan pengusaha yang diselesaikan melalui kesempatan dan musyawarah.

Tabel 2. 126
Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
di Kota Palopo Tahun 2017-2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	10	11	2	11	2	5	2
2	Kasus yang Dicatat/Dilaporkan	14	15	18	11	12	17	8
Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)		71	73	11	100	16	29,41	0,25

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2022

Sejak tahun 2020 besaran kasus yang diselesaikan mengalami penurunan dari 100% hanya menjadi 29,41% tahun 2022. Disisi lain kasus yang dilaporkan mengalami peningkatan dari 11 menjadi 17 kasus di tahun 2022. Indikator ini menunjukkan bahwa sudah terciptanya kesadaran buruh akan kejehateraan yang seharusnya didapatkan dengan kontribusinya dalam memberikan keuntungan terhadap pemilik usaha. Pada tahun 2023 jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama yaitu 2 dan kasus yang dicatat/dilaporkan yaitu 8 dengan presentase0,25%.

Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan berkaitan dengan angkatan kerja Kota Palopo yang telah ditempatkan dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang telah mendaftar melalui Dinas Tenaga Kerja.Pencari kerja di Kota Palopo yang telah ditempatkan mengalami tren yang fluktuatif selama tahun 2017-2022

Tabel 2. 127
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Palopo Tahun 2017-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Org	121	718	1.072	412	461	800	1128
b.	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	Org	2.664	2.74	2.018	2.085	1532	2288	3050
Pencari Kerja yang ditempatkan (a/b)		%	4,54	26,20	53,12	24,97	30	35	0,36

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2022

Tahun 2019 merupakan kondisi terbaik Dinas Tenaga Kerja menempatkan hampir separuh lebih pencari kerja yang ditempatkan (53,12%), selanjutnya terjadi penurunan dari angka 42,51% sampai terakhir tahun 2022 hanya 35%. Penurunan persentase ini disebabkan karena adanya peningkatan pencari kerja yang mendaftar, tetapi tidak diimbangi dengan pembukaan lapangan kerja. Menurut data BPS Kota Palopo (2023) jumlah pencari kerja yang terdaftar didominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebesar 66,90% dan 33,10% adalah perempuan. Jumlah presentase pada tahun 2023 yaitu 0,36%.

Keselamatan dan Perlindungan

Indikator ini menggambarkan besaran perusahaan yang memperhatikan dan menerapkan prinsip keselamatan dan perlindungan bagi pekerjanya. Semakin tinggi angka indikator ini semakin banyak cakupan tenaga kerja yang dilindungi keselamatan dan keamanan kerjanya.

Tabel 2. 128
Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3	Buah	420	431	478	482	515	650	658
2	Jumlah Perusahaan	Buah	1.689	1.700	1.887	1.897	1.906	1908	1925
Persentase Keselamatan dan Perlindungan (x 100)		%	25	25	25,3	25,4	27	34,07	34,18

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2022

Di Kota Palopo keselamatan dan perlindungan tenaga kerja mengalami tren peningkatan sejak tahun 2017-2022. Persentase keselamtan dan perlindungan di tahun 2022 sebesar 34,07%. Kondisi ini menggambarkan bahwa pelaku usaha telah konsisten mematuhi dan melaksanakan aturan K3 (kesehatan keselamatan kerja) di lokasi kerjanya. Data pada tahun 2023 jumlah presentasenya yaitu 34,18%.

Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Indikator ini menggambarkan cakupan pekerja yang menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak jumlah pekerja/buruh yang dijamin jaminan sosial bidang ketenagakerjaannya.

Tabel 2. 129
Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek di Kota Palopo Tahun 2017-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek	Orang	10.478	11.438	13.765	25.921	34.050	30.182	36553
2	Jumlah Buruh/Pekerja	Orang	28.377	29.337	25.105	31.210	46.390	77.465	87471
Besaran Pekerja/Buruh Peserta Jamsostek		Persen	37,00	39,00	54.82	83,05	73,40	38,96	23,92

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2022; BPJS Ketenagakerjaan Kota Palopo

Besaran pekerja yang mengikuti kepesertaan jaminan sosial mengalami tren yang fluktuatif, sempat terjadi peningkatan di tahun 2019 sebesar 54,82% kemudian naik turun sampai pada angka 35,32% tahun 2022. Disisi lain jumlah pekerja/buruh di Kota Palopo setiap tahunnya mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan. Situasi ini menjadi alarm pengingat kepada perangkat daerah pengampu untuk terus mensosialisasikan dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi anggota jaminan sosial tenaga kerja. DI Tahun 2023 besar jumlah 23,92%.

Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Indikator ini menggambarkan pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap angka perselisihan buruh dan pengusaha. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin dinamisnya kondisi ketenagakerjaan di daerah.

Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Indikator yangmenunjukkan cakupan perusahaan yang diperiksa dalam menerapkan prinsip prinsip sesuai UU ketenagakerjaan. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin tingginya komitmen pemerintah dan perusahaan memenuhi hak dan kewajibannya bagi para pekerja dan buruh.

Tabel 2. 130
Persentase Pemeriksaaan Perusahaan di Kota Palopo Tahun 2017-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021*	2022	2023
1	Jumlah perusahaan yang telah diperiksa	Buah	6	8	8	65	15	7	7
2	Jumlah perusahaan terdaftar (ber TDP) (*)	Buah	829	825	707	715	712	506	168
Persentase Pemeriksaaan Perusahaan		%	0,67	0,97	1.13	9,10	2,1	1,38	11,76

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2022

Berdasarkan hasil tabel.29 Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo memiliki kinerja yang rendah sekali dalam melaksanakan pemeriksaan perusahaan yang ber-TDP. Tahun 2022 hanya 7 (1,38%) perusahaan yang telah dilakukan pemeriksaan, terjadi penurunan yang jauh dari tahun sebelumnya 15 (2,10%) perusahaan. Data perusahaan jumlah perusahaan yang telah diperiksa yaitu 7 dan jumlah perusahaan terdaftar (ber TDP) (*) yaitu 168 dengan hasil presentase 11,76%.

Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

Indikator ini menggambarkan besaran perusahaan yang menggunakan peralatan di perusahaannya namun tetap memperhatikan prinsip prinsip keamanan kerja dan perlindungan bagi tenaga kerjanya. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik bagi keamanan kerja bagi para karyawannya.

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Indikator ini memberikan gambaran proporsi tenaga kerja di Kota Palopo yangmemiliki keterampilan kompetensi kerja setelah medapatkan pelatihan. Umumnya hambatan utama untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja (seperti memiliki lebih banyak tenaga kerja terampil) adalah rendahnya akses ke pendidikan menengah berbasis vokasi, apalagi dengan kondisi Kota Palopo dimana sebagian besar angkatan kerja merupakan lulusan SMA/SMK sederajat. Indikator ini akan berdampak pada tingkat produktifitas tenaga kerja yang ada dalam menghasilkan nilai tambah produk barang atau jasa.

Tabel 2. 131
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kota Palopo Tahun 2017-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	108	328	220	0	84	164	80
b.	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	305	328	508	0	109	344	286
Persentase		%	35,41	100	43,31	0	77,06	47,67	27,97

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2022

Presentase jumlah tenga kerja pada tabel di atas pada tahun 2020 yaitu 0, sedangkan presentase tertinggi terdapat pada tahun 2021 yaitu 77,06%.

Grafik 2. 10
Jumlah Peserta dan Jenis Pelatihan olah Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014-2022

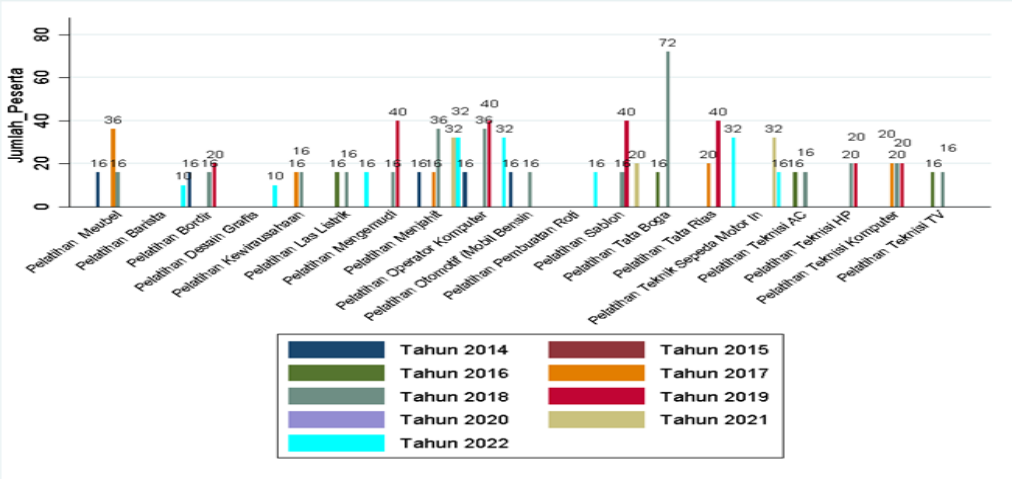

Sumber :Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Selama tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan pelatihan kepada 164 orang dan 8 jenis pelatihan (Tabel 2.134 dan Gambar.xx). Harapanya setelah dilakukan pelatihan angklatan kerja tersebut dapat langsung terserap oleh lapangan kerja ataupun dapat membuka lapangan kerja sendiri

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Indikator ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam skala komunitas dalam pelatihan ketenagakerjaan. Semakin nilai indikator ini, semakin banyak komunitas komunitas tenaga kerja yang siap kerja di sebuah daerah.

Tabel 2. 132
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Persentase Tenaga Kerja yang Masyarakat di Kota Palopo Tahun 2017-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	108	328	220	0	84	164	80
b.	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	Orang	108	328	220	0	84	164	80
Persentase		%	100	100	100	0	100	100	1

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2022

Presentase tertinggi pada tahun tenaga kerja berbasis masyarakat yang mendapatkan pelatihan pada tahun 2017,2018,2019,2021,2022 yaitu sebesar 100 sedangkan presentase terendah pada tahun 2020 yaitu 1.

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Tabel 2. 133
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan di Kota Palopo Tahun 2017-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih kewirausahaan	Orang	20	18	0	0	0	0	64
b.	Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan	Orang	343	341	220	0	84	164	157
Persentase		%	5.83	5,28	0	0	0	0	0,40

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2022

Data di atas menunjukkan persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan oleh dinas tenaga kerja semakin menurun. Jika pada tahun 2017-2018 berada pada angka 5.83-5,28%, pada tahun 2019-2022 menjadi 0% karena tidak ada pelatihan kewirausahaan. Data pada tahun 2023 Jumlah tenaga kerja yang dilatih kewirausahaan yaitu 64 dan Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan yaitu 157 maka angka presentasenya yaitu 0,40%.

2.1.3.2.2 Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Tabel 2. 134
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2022	2023
a.	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Orang	2.902	2.811	2.795	6.652	7331	
b.	Jumlah pekerja perempuan	Orang	26.563	26.532	30135	31.315	34.318	
Persentase		%	10,92	10,59	9.27	21,24	21,36	

Sumber Data : BPS Kota Palopo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2022

Data di atas menunjukkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sejak tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi Pada tahun 2016 pada angka 11.40% sementara di 2019 pada angka 9.27%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan dari angka 2795 menjadi 6652 atau peningkatan sebesar 11,97% pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2022 merupakan persentase tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR

Sejalan dengan upaya pemberdayaan perempuan dan pengarutamaan gender, permpuan berhak berpartisipasi dalam dunia politik khususnya keterwakilan dalam legislative. Sejak dikeluarkannya UU nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat keterwakilan perempuan diatur sebanyak 30% dari total keseluruhan anggota legislative. Kota palopo masih belum masuk dalam keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Jumlah keterwakilan perempuan tahun 2019-2022 masih stagnan berada di angka 28% atau masih kurang 2% lagi agar memenuhi aturan tersebut atau masih perlu menambah 1 orang perempuan agar lebih dari 30%.

Tabel 2. 135
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR
di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah kursi DPR yang diduduki perempuan	Orang	5	5	7	7	7	7	7
b.	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Orang	25	25	25	25	25	25	25
Persentase		%	20	20	28	28	28	28	28

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2022

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang bekerja di lembaga legislatif Kota Palopo periode 2019-2021. Dalam 2 periode pemilihan legislatif, jumlah perempuan yang duduk menjadi anggota DPRD Kota Palopo sebanyak 7 orang dengan persentase 28% dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Kota Palopo.

Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Partisipasi perempuan di Lembaga swasta merupakan bagian dari menyebarnya paham feminisme dan kesetaraan gender di Indonesia. Perempuan tidak lagi dinomor duakan, tetapi juga bebas berekspresi dan beraktivitas layaknya laki-laki. Persentase partisipasi perempuan sejak tahun 2018 di Kota Palopo mengalami penurunan sampai dengan tahun 2022, walaupun di tahun 2022 meningkat kembali menjadi 1,55% daripada tahun-tahun sebelumnya. Puncak partisipasi perempuan terjadi pada tahun 2018 dengan persentase tertinggi sebesar 3,33%.

Tabel 2. 136
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Pekerja perempuan di lembaga swasta	Orang	840	886	412	407	193	521	

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
b.	Jumlah pekerja perempuan	Orang	26.563	26.609	30.135	31.541	33.127	34318	
Persentase		%	3.16	3,33	1.37	1,29	0,58	1,55	

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2022

Rasio KDRT

Tabel 2. 137
Rasio KDRT di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah KDRT	Kasus	10	8	8	2	5	2	4
b.	Jumlah rumah tangga	KK	38.641	39.444	40.303	41.125	41.956	57.755	56.608
Rasio KDRT		Per 10.000	3	2	1	1	1	1	1

Sumber Data : BPS Kota Palopo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2022

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2017-2023, kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palopo menurun. Jika pada tahun 2017, dari 10.000 rumah tangga terdapat sebanyak 3 kasus KDRT, sementara di 2023 jumlahnya menurun menjadi 1 kasus.

Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Persentase tenaga kerja di bawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas. Semakin tinggi nilai indikator ini mengindikasikan masih lemahnya perlindungan anak. Anak dianggap masih memiliki nilai ekonomi dan seringkali anak dieksploitasi.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tabel 2. 138
Persentase Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	Orang	26.226	26.694	30.135	31.594	33.549	34.318	
B	Jumlah angkatan kerja perempuan	Orang	28.506	29.998	32.953	34.933	37.156	37.518	
Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		%	92.00	88.99	91.45	90,26	89,99	91,47	

Sumber Data : BPS Kota Palopo dan Data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo

Dari aspek gender, tabel diatas juga menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sepanjang 2017-2022 di Kota Palopo fluktuatif, dari 92.00% di tahun 2017 menjadi 89.99% di tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan 91,47%..

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu

Tabel 2. 139
Persentase Laporan Pengaduan ke Unit Pelayanan Terpadu
Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Laporan	36	36	11	13	5	14	28
b.	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Laporan	149	149	11	13	5	14	29
Persentase		%	24,16	24.16	100	100	100	100	96,55

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2022

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat penanganan pengaduan atau laporan kasus perempuan atau anak korban kekerasan di Kota Palopo menurun. Jika tahun 2017, laporan ditindaklanjuti sebanyak 5 aduan. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terdapat 1 pengaduan yang belum ditindaklanjuti.

Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus – Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Tabel 2. 140
Persentase Penegakan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah perkara diputuskan pengadilan dengan dasar perundang – undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perkara	87	96	2	3	2	-	
b.	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	Perkara	87	96	2	3	2	-	
Persentase		%	100	100	100	100	100	-	

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2022

Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Perempuan merupakan obyek yang rentan dalam kekerasan, baik yang bersifat domestic maupun berbagai bentuk pelecehan baik verbal dan non verbal dalam ruang public. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam memberikan fasilitisasi terhadap korban kekerasan baik pada anak maupun perempuan. Kota Palopo sejak tahun 2019-2022 terjadi penurunan kasus kekerasan yang terlapor. Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan angka kasus tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebanyak 36 dari total korban yang tercatat pada perangkat daerah pengampu.

Tabel 2. 141
Persentase Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	Orang	31	36	1	10	5	10	
b.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	Orang	145	150	11	13	11	14	
Persentase		%	21.38	24,00	9,09	76.92	45,45	71,43	

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2022

Bidang Urusan Pangan
Ketersediaan Pangan Utama

Tabel 2. 142
Persentase Ketersediaan Pangan Utama di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Rata – rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun								
		Kg	19.466,00	34.568,75	42.545,00	67.560,89	94.401,4	46.000	
b.	Jumlah penduduk								
		Orang	176,907	176,907	184,614	184,614	184.681	190.867	
c	Jumlah Konsumsi Rill								
		Kg	16.721,00	18.332,55	106,20	103,10	103	103	
	Persentase Ketersediaan Pangan Utama Per Jumlah Penduduk								
		%	11.00	19.54	23.05	36.60	51,10	24,10	
	Persentase Ketersediaan Pangan Utama Per Jumlah Konsumsi Rill								

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		%	116.42	188.56	40.061,21	65.529,48	91.651,8	446,60	

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2022

Data di atas menunjukkan bahwa angka ketersediaan bahan pangan utama di Kota Palopo meningkat sepanjang tahun 2017 – 2021. Pada tahun 2017, untuk 100 jiwa penduduk Kota Palopo, rata-rata tersedia 11,00% pangan utama, sementara di 2021 tersedia sebanyak 51,10% bahan pangan utama per 100 jiwa penduduk Kota Palopo.

Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Tabel 2. 143
Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a	Ketersediaan pangan/kapita/hari x Kandungan Kalori energi x BDD	Kkal/kapita/hari	20,13	38,65	39,81	24,42	25,01	-	
b	Koefisien	Angka	100	100	100	100	100	100	
1	Ketersediaan energi	Kkal/kapita/hari	2.012,80	3.865	3.981,00	2.442,00	2.501,00	2.501	
a	Ketersediaan pangan/kapita/hari x Kandungan Protein x BDD	Kkal/kapita/hari	691	1.019,60	1.041.50	978.40	950,50	-	
b	Koefisien	Angka	100	100	100	100	100	100	
2	Ketersediaan Protein	gram/kapita/hari	69.1	101,96	104,15	97,84	95,05	95,05	
3	Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita	(kkal/kapita/hari)	2.082	3.966	4.085	2.540	3.596	2.596	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2022, RAD Pangan dan Gizi Kota Palopo 2017-2021

Food and Agriculture Organization atau FAO mensyaratkan untuk ketersediaan energi minimal adalah sebesar 2200 kkal/kapita/hari dan protein sebesar 54 gram/kapita/hari. Sementara standar Indonesia 2000-2100 kkal/kapita/hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan energi dan protein Kota Palopo sepanjang tahun 2017-2021 sudah berada diatas standar minimal FAO.

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Tabel 2. 144
Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu								
		Sampel	9	13	32	16	14	-	
b.	Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu								
		Sampel	11	18	37	17	15	-	
Persentase			82	72	86	94	93	-	

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2022

2.1.3.2.3 Bidang Urusan Pertanahan

Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan.Indikator pertanahan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan tanah. Kota Palopo masih tinggi angka konflik terkait permasalahan tanah. Oleh karena itu indikator luas lahan yang bersertifikat menajdi bagian dari kewenangan perangkat daerah pengampu. Total luas wilayah di Kota Palopo ditahun 2022 sebesar 247,50. Selama tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah luas lahan yang disertifikatkan di Kota Palopo yaitu hanya sebesar 5,81% turun drastis dari tahun sebelumnya yang berada diangka 28,72%.

Tabel 2. 145
Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Palopo Tahun 2018-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah luas lahan bersertifikat	Km2	5,43	70,43	71,07	71,07	14,40	1,319
b.	Jumlah luas wilayah	Km2	249,18	247,52	247,5	247.50	247.50	247.5
Persentase		%	2,17	28,46	28,72	28,72	5.81	5,32

Sumber : Dinas Pertanahan Kota Palopo

Pada tabel data presentase luas lahan bersertifikat presentase tertinggi terdapat di tahun 2020 dan 2021 yaitu 28,72 %dan presentase terendah terdapat di tahun 2,17%.

Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Tanah negara merupakan hal yang paling banyak disengketakan dan mayoritas terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Berdasarkan undang-undang pokok agrarian No.5 tahun 1960 (UUPA) dan peraturan Menteri agrarian No.9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan ha katas tanah negara dan hak pengelolaanya bahwa tanah negara berhak dikuasai dan dilakukan pendaftaran alas hak apabila ditempati berturut-turut dan diolah oleh pemilik dan penguasa lahan yang dibuktikkan dari surat keterangan kepala desa/lurah setempat dan disertai bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut. Selama tahun 2018-2019 rata-rata kasus yang terjadi setiap tahunnya 4-14 kasus. Indikator capaian yang diukur adalah berapa besar kasus yang dapat diselesaikan. Tahun 2018-2021 kasus yang diselesaikan rata-rata kasus yang dapat diselesaikan kurang dari 30%, tetapi di tahun 2022 terjadi peningkatan yang disebabkan jumlah kasus yang terlapor berkurang. Hal ini menandakan bahwa masyarakat telah paham mengenai legalitas asset tanah yang mereka miliki.

Tabel 2. 146
Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kasus yang diselesaikan	Kasus	1	4	3	3	3	2
Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus	4	14	11	10	4	3
Persentase	%	25	28,57	27,27	30	75	0,66

Sumber : Dinas Pertanahan Kota Palopo

Penyelesaian Izin Lokasi

Izin lokasi berhubungan dengan syarat pendirian bangunan diatas tanah tersebut. Izin lokasi dikeluarkan sesuai dengan peruntukan lokasi tanah tersebut apakah masuk dalam Kawasan komersil, industry, pertanian maupun perumahan sesuai dengan RTRW yang telah dibuat. Dari dasar izin lokasi tersebut akan diterbitkan rekomendasi peruntukan wilayah persil, untuk dijadikan dasar penerbitan Izin mendirikan bangunan (IMB). Pada tahun 2023 presentasenya yaitu 0,66.

Tabel 2. 147
Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah ijin lokasi	Buah	0	2	1	3	4	
Permohonan ijin lokasi	Buah	1	2	1	3	4	
Persentase	%	0	100	100	100	100	

Sumber : Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penyelesaian izin lokasi di Kota Palopo sepanjang tahun 2018-2020 mengalami peningkatan selama kurun waktu 2019 sampaui dengan Tahun 2022 mencapai 100 persen dari nol persen dari Tahun 2028. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Palopo menghadirkan pelayanan prima terkait penyelesaian izin lokasi.

2.1.3.2.4 Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaanya dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan RPPLH didasarkan pada undang-undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen RPPLH merupakan naskah akademik yang berisikan rencana perlindungan lingkungan hidup yang meliputi kehutanan

dan perkebunan, kelautan perikanan, air, pertambangan energi, pariwisata, dan keanekaragaman hayati. Kota Palopo belum memiliki sama sekali dokumen RPPLH.

Tabel 2. 148
Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tersusunnya RPPLH kabupaten/Kota	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum tersedia

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo

Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota

Berdasarkan data indictor RPPLH pada sub bab sebelumnya Kota Palopo belum memiliki sama sekali dokumen RPPLH, oleh karena itu keterkaitan dengan dokumen perencanaan dan pembangunan tidak ada sama sekali.

Tabel 2. 149 T
erintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota
di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/Kota	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum tersedia

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo

Tabel dari terintegrasinya RPPLH dalam perencanaan pembangunan Kota/Kabupaten Kota Palopo dari tahun 2018-2023 belum tersedia terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten\Kota.

Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah salah satu instrument untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah yang mampu memberikan rekomendasi pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis yakni pada arah kebijakan, rencana, dan program pembangunan. Kota Palopo membuat dokumen KLHS pada tahun 2021 yang merupakan revisi dari RPJMD Kota Palopo 2018-2023.

Tabel 2. 150
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	-	-	-	KLHS revisi RPJMD kota Palopo	-	KLHS

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo

Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi belum ada ditahun 2018-2020 di tahun 2021 KLHS revisi RPMJD kota Palopo, 2022 belum ada dan di 2023 terselenggaranya KLHS

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Menurut Kepmen LH No.115 tahun 2003 indeks Kualitas air merupakan tingkat kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tetrtentu dengan membandingkan kualitas air eksisting dengan baku mutu air yang ditetapkan. Menurut metode CCME WQI yang diformulasikan oleh british Columbia ministry of environment, lands and parks,rentang skor adalah sebagai berikut (KemenLHK,2020) :

Sangat Baik : 95-100
Baik : 80-94
Cukup : 65-79
Kurang : 45-64
Buruk : 0-44

Tabel 2. 151
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hasil pengukuran indeks kualitas air	33.82	37.85	31.08	20.17	18.45	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2023

Kondisi di atas menunjukkan bahwa kualitas air secara umum di wilayah Kota Palopo masuk dalam kondisi buruk. Sepanjang 2018 – 2022, hasil pengukuran indeks kualitas air di Kota Palopo berada dalam kategori tercemar atau buruk. Data ini diperoleh dengan mengambil sampel air di beberapa sungai dan saluran air/drainase.

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara adalah pengukuran konsentrasi polutan udara dalam polusi udara ambien dan resiko kesehatan yang terkait. Indeks kualitas udara atau disebut AQI (air pollution index) diukur melalui parameter enam polutan yaitu PM2.5; PM 10; CarbonO2; SulfurO2; NitrogenO2, dan ozon permukaan tanah. Rentang skor hasil pengukuran AQI berada pada 0-500 (KemenLHK,2020). Kategori penilaian Indeks AQI adalah sebagai berikut :

Good (Baik)	: 0-50
Moderate (Sedang)	: 51-100
Unhealty for sensitive groups (Tidak sehat bagi kelompok sensitive)	: 101-150
Unhealty (Tidak Sehat)	: 151-200
Very Unhealty (sangat tidak sehat)	: 201-300
Hazardous (Berbahaya)	: 301+

Tabel 2. 152
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hasil pengukuran indeks kualitas udara	90.6	88.71	87.74	88.56	88.22	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo

Dari tabel menunjukkan di tahun 2018-2022 kulitas udara cenderung menurung di tahun 2023 belum terdata

Hasil AQI di Kota Palopo selama tahun 2018-2023 menunjukkan kategori nilai indeks sedang yaitu 51-100. Walaupun demikian diperlukan upaya melalui penghijauan dan pengurangan transportasi melalui kegiatan car free day agar mendukung kualitas udara yang masuk kategori baik.

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks kualitas tutupan lahan merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan yang digunakan sebelum tahun 2017. Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakukan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut.

Tabel 2. 153
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	19.27	19.29	19.31	55.56	61.07	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo

Penghitungan IKTL dilakukan dengan membanding luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap Provinsi /kab kota minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Dalam perhitungan IKTL ini, bahwa Kota Palopo memiliki kawasan hutan 30,35 % dan 40% dari luas wilayah administrasinya sehingga selama tahun 2021 dan 2022 nilai IKTL mengalami peningkatan.

Ketaatan Izin Lingkungan

Ketaatan terhadap izin lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Izin lingkungan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL/UPL dalam rangka sebagai syarat memperoleh izin usaha/kegiatan. Merujuk pada peraturan tersebut, segala usaha/kegiatan yang dilakukan di wilayah pemerintah Kota Palopo wajib memiliki izin lingkungan. Izin yang wajib dimiliki meliputi izin PPLH (perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup), dan PUU LH (peraturan undang-undang lingkungan hidup) yang diterbitkan oleh pemerintah setempat.

Aspek Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH masuk dalam indicator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup.

Selama tahun 2018-2022 ketaatan pelaku usaha di Kota Palopo yang memiliki perizinan terkait lingkungan hidup masih rendah, kurang dari ¼ atau baru mencapai 24,16%.

Tabel 2. 154
Persentase Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH,
di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo yang ditangani	Izin	653	645	57	135	106	
Total penanggung jawab usaha dana atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo	Pihak	1578	1759	1315	711	965	
Persentase	%	24,16	27,27	4.33	18.987	10.98	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo

Presentase ketaatan izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH di Kota Palopo tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kota Palopo yang ditangani mengalami naik turun dan total penanggung jawab usaha dana atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo dari 2018-2023 cenderung naik dan turun. Di 2023 belum ada data yang tersedia.

Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Pemberian penghargaan lingkungan hidup berkaitan dengan apresiasi pemerintah terhadap individu atau kelompok yang berprestasi dalam bidang lingkungan hidup. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam menyelesaikan berbagai isu lingkungan hidup. Selama tahun 2018-2022 Kota Palopo baru melaksanakan kegaiatan pemberian penghargaan pada tahun 2021 dan 2022 yaitu penghargaan adiwiyata. Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang mampu menjaga lingkungan sekolahnya bersih, asri dan hijau serta menerapkan system daur ulang persampahan sehingga memberikan efek positif terhadap kegiatan pembelajaran bagi guru dan siswa.

Tabel 2. 155
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Terlaksanaya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kali	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada (adiwiyata)	Ada (adiwiyata)	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo

Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup dari tahun 2018-2023 hanya ada 2 tahun yang terlaksana yaitu di tahun 2021-2023.

Pengaduan Masyarakat Terkait Permasalahan Lingkungan

Pengaduan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan di Kota Palopo menjadi indicator kinerja utama pada Dinas Lingkungan Hidup. Selama tahun 2018-2022 jumlah permasalahan terkait lingkungan hidup di Kota Palopo mengalami tren penurunan dari 13 kasus laporan menjadi hanya 6 kasus laporan, kemudian secara keseluruhan 100% dapat ditangani oleh perangkat daerah pengampu.

Tabel 2. 156
Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditangani
di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pengaduan masyarakat yang ditangani	Buah	13	10	7	8	6	
Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	Buah	13	10	7	8	6	
Persentase	%	100	100	100	100	100	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo

Terdapat pengaduan masyarakat yang ditangani di tahun 2018-2023menurun dibandingkan tahun 2018 dan ditahun 2023 masih kosong. Dan total jumlah pengaduan masyarakat yang terintegrasi dari tahun 2018-2023 terdapat 13 pengaduan ditahun 2018.

Timbunan Sampah yang Ditangani

Sampah merupakan bagian dari limbah domestic yang dihasilkan oleh rumah tangga. Semakin banyak aktivitas manusia dan kegiatan usaha disuatu wilayah berdampak kepada peningkatan jumlah limbah domestik yang dihasilkan, apabila tidak dilakukan penanganan akan menimbulkan timbunan sampah. Kota Palopo juga mengalami permasalahan tersebut,s elama tahun 2019-2022 jumlah timbunan sampah mengalami peningkatan dari 33.699 ton menjadi 34.187 ton di tahun 2022. Kinerja perangkat daerah terkait belum mberikan hasil yang terbaik, selama tahun 2018-2022 terjadi penurunan penanganan dari 88,90% hanya menjadi 73,45% di tahun 2022.

Tabel 2. 157
Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani
di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Volume timbulan sampah yang ditangani	(Ton)	30.409	30.419	29.437,25	23.735,37	25.110,62	
Jumlah total timbulan sampah	(Ton)	34.171	33.699	33.215	33.704,28	34.187,91	
Persentase	%	88.90	90,26	88,63	70.42	73.45	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo

Volume timbulan sampah yang ditangani dari 2018-2023 terdapat banyak timbulan sampah ditahun 2020 dibandingkan tahun 2018. Jumlah total timbulan sampah d itahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2020.

Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R

Salah satu upayan dalam mengurangi produksi sampah adalah dengan menerapkan konsep 3R (reduce, reuse, recycle). Reduce adalah dengan cara mengurangi, yaitu sebisa mungkin mengurangi kegiatan konsumsi secara massif akan barang atau makanan yang menimbulkan jumlah limbah domestic baik yang bersifat organic dan anorganik. Reuse atau melakukan penggunaan ulang barang barang yang memiliki durabilitas jangka panjang seperti penggunaan tas plastic sebagai tas belanja sebagai pengganti tas kresek. Recycle adalah mengoalh kembali /daur ulang sampaj menjadi barang bermanfaat, seperti contoh penggunaan bekas botol plastic sebagai aneka kerajinan yang bernilai tambah tanpa menghasilkan limbah.

Persentase jumlah sampah yang terkurangi menggunakan konsep 3R menjadi salah satu indicator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup. Selama tahun 2018-2022 terjadi perubahan yang menggembirakan di Kota Palopo yaitu persentase sampah yang terkurangi melalui 3R mengalami peningkatan dari 4% menjadi 8 %, walaupun tahun 2019 pernah mengalami peningkatan menjadi 9%.

Tabel 2. 158
Persentase Sampah yang Terkurangi Melalui 3R
di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Timbulan Sampah yang ditangani (Ton)	Ton	34.171	33.699	29.437,25	23.735,37	25.110,62	34833.23

Jumlah yang tertangani di TPS 3R setara	Ton	1.376	1.387	1.401	1.762,37	2.024	2880.35
Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	4,02	4,11	9,12	7.43	8.06	12,0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo

Jumlah timbulan sampah yang ditangani dari tahun 2018-2023 tercatat ditahun 2023 jumlahnya meningkat dibandingkan ditahun 2019, jumlah yang tertangani di TPS 3R di tahun 2018-2023 di tahun 2021 banyak yang tertangani dibandingkan di tahun 2023.

Persentase Cakupan Area Pelayanan

Penanganan sampah tidak hanya berskala individu rumah tangga tetapi berskala keseluruhan wilayah sesuai batas kabupaten/kota yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Kota Palopo memiliki luas wilayah 247,52 Km2, tahun 2018-2020 luas area pelayanan pengelolaan sampah rata-rata mengalami peningkatan 17,65 Km2. Kemudian tahun 2020-2022 mengalami stagnasi dengan luas cakupan sebesar 201,56 Km2. Selama tahun 2018-2022 persentase cakupan area pelayanan yang tertangani mengalami peningkatan dari 67% menjadi 81,43%. Data presentase pada tahun 2023 yaitu 12,0%.

Tabel 2. 159
Persentase Cakupan Area Pelayanan di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Luas area pelayanan pengelolaan sampah	km²/ha	166,27	167,89	201.56	201,56	201,56	201.56
Luas area Kota Palopo	km²/ha	247,52	247,52	247.52	247,52	247,52	247.52
Persentase	%	67	67,83	80.52	81.43	81.43	81,43

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo

Pada tahun 2023 luas area pelayanan pengelolaan sampah yaitu 201.56 dan luas area kota palopo yaitu 247.52 dengan presentase 81,43%. Presentase tertinggi pada tahun 2021,2022 dan 2023 yaitu 81,43%. Presentase terendah berada pada tahun 2018 yaitu 67.

Jumlah Sampah Tertangani

Jumlah sampah yang tertangani merupakan indicator yang menyajikan jumlah sampah yang dihasilkan Kota Palopo dalam periode waktu satu tahun. Total sampah yang dihasilkan setiap tahunnya rata-rata 34.917,25 ton/tahun. Tahun 2018-2020 jumlah sampah yang tertangani mengalami penurunan dari 30.601 ton menjadi 18.487,25 sehingga berpengaruh terhadap persentase jumlah sampah yang tertangani menjadi 47,62%. Kemudian ditahun 2021-2022 mengalami peningkatan menjadi 73,45% samaph yang telah tertangani.

Tabel 2. 160
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah sampah yang tertangani	Meter Kubik (ton)	30.601	29.325	18.487,25	23.735,37	25.110,62
Total jumlah timbulan sampah di Kota Palopo	Meter Kubik (ton)	34.171	33.699	38.823,96	33.704,28	34.187,91
Persentase	%	89,55	87,02	47.62	70.42	73.45

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo

Jumlah sampah yang tertangani di 2018-2022 mengalami peningkatan jumlah sampah yang tertangani, sedangkan total jumlah timbulan sampah di Kota Paloppo terus meningkat di mulai dari tahun 2020 sampai 2022

Fasilitasi Pengurangan Sampah di perkotaan

Fasilitasi pengurangan sampah adalah bagian dari sarana infrastruktur pendukung pengelolaan limbah domestic tingkat kabupaten/kota dalam mengurangi jumlah produksi sampah. Fasilitasi pengurangan sampah tersebut memberikan dampak terhadap volume sampah yang masuk dalam TPA (tempat pembuangan akhir). Selama tahun 2018-2022 persentase fasilitasi pengurangan sampah mengalami peningkatan dari 4,12% menjadi 5,92% di tahun 2022, dengan total sampah yang dihasilkan oleh Kota Palopo setiap tahunnya rata-rata 34.917,25 ton/tahun.

Tabel 2. 161
Fasilitasi pengurangan sampah di perkotaan di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Volume sampah diperkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan ditempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA	(ton)	1.387	1.387	1.947	1.762	2.024
Total Volume sampah	(ton)	33.699	33.699	33.215	33.738	34.187,91
Persentase	%	4.12	4.12	5.86	5.22	5.92

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo

Volume sampah diperkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan ditempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA di tahun 2018-2022 mengalami peningkatan jumlah di tahun 2022 dibandingkan tahun 2018. Total volume sampah sangat meningkat ditahun 2022.

2.1.3.2.5 Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Bidang kependudukan merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satu indicator utama pada bidang urusan ini adalah kepemilikan identitas kependudukan. Berdasarkan undang-undang kependudukan No. 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, Negara berkewajiban memberikan dokumen identitas kependudukan bagi warga negaranya. Kartu tanda penduduk (KTP) adalah produk dari dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan KTP adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Selama tahun 2018-2022 rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk per 100 sebesar 70, atau dari 100 penduduk yang berusia 17 tahun keatas 70 diantaranya telah memiliki KTP dan apabila dipersentase cakupan masih 70% penduduk usia 17+ yang ber-KTP. Hasil capaian ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya karena terjadi peningkatan secara bertahap setiap tahunnya rata-rata sekitar 1%.

Tabel 2. 162
Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP	Orang	122.053	117.965	117.983	122.684	117.176	
Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah	Orang	130.842	125.420	126.650	126.650	130.176	
Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	Orang	0,65	0,67	0,69	0.70	0.70	
Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk per 100	Orang	65	67	69	70	70	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo

Rasio penduduk Ber-KTP Per Satuan di Kota Palopo yang berusia >17 meningkat di tahun 2021 dan belum terdata di tahun 2023, penduduk yang telah menikah terus meningkat hingga tahun 2022, dan rasio penduduk Be-KTP per satuan penduduk per 100 terus mengalami peningkatan hingga tahuun 2022.

Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Akta kelahiran merupakan dokumen yang menunjukkan bukti pencatatan kelahiran yang sah dikeluarkan oleh Negara yang didalamnya memuat nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama pasangan orang tua. Kepemilikan akta kelahiran digunakan sebagai bukti asal-usul kelahiran individu tersebut, yang dapat digunakan sebagai dokumen resmi pendaftran sekolah dan lainnya sesuai kebutuhan, serta yang lebih penting adalah terkait urusan kewarisan.

Capaian indikator utama ini adalah rasio bayi berakte kelahiran. Hasil capaian di Kota Palopo telah berhasil mencapai 100% atau dengan kata lain setiap 100 kelahiran bayi semuanya telah memiliki dan terbit akta lahir. Angka capaian 100%, ditempuh dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2018-2023.

Tabel 2. 163
Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bayi Berakta Kelahiran	Orang	1.323	2.183	4.382	4.072	3.803	
Jumlah bayi	Orang	1.569	2.305	4.512	4.102	3.803	
Rasio Bayi Berakte Kelahiran	Rasio	0,84	0,94	0,97	0.99	1.00	
Rasio Bayi Berakte Kelahiran per 100	Per 100	84,32	94	97	99	100	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo

Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Database kependudukan adalah bagian dari SIAK (Sistem informasi administrasi kependudukan) yang didalamnya terintegrasi secara nasional dalam pemberian identitas melalui NIK (nomor induk kependudukan). Hasi capaian Kota Palopo terkait ketersediaan database kependudukan skala provinsi selama tahun 2018-2022 adalah tersedia.

Tabel 2. 164
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi
di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

Sumber Data :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo

Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Kartu tanda penduduk berbasis NIK adalah bagian dari perubahan undang-undang administrasi kependudukan yang mengharuskan satu individu hanya memiliki satu NIK. Pemberian NIK telah terintegrasi dengan system database nasional melalui aplikasi SIAK. Kota Palopo telah menerapkan KTP nasional berbasis NIK sejak tahun 2018.

Tabel 2. 165
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo

Penerapan KTP Nasional Berbasi NIK dari tahun 2018-2022 sudah ada, ditahun 2023 belum terdata.

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan penerbitan KTP adalah indicator kerja utama capaian pada bidang urusan kependudukan. Indikator ini diukur melalui jumlah penduduk wajib KTP dengan Jumlah KTP yang telah diterbitkan. Hasil capaian Kota Palopo selama tahun 2018-2022 adalah lebih dari 90% jumlah penduduk telah memiliki KTP.

Tabel 2. 166
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan	Lembar	122.053	117.695	117.983	122.684	117.176	
Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	130.843	125.420	126.650	126.650	130.176	
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	93,28	93,84	93,16	96.87	90.01	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo

Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan di tahun 2018-2023 terus mengalami penigkatan hingga tahun 2022 berjumlah 117.176 lembar dari 130.176 jiwa.

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Cakupan indicator ini sama dengan KTP yang membedakan adalah penerima manfaatnya yaitu bayi yang baru lahir. Data ini bersumber dari Dinas kesehatan, dan selama tahun 2018-2022 jumlah kelahiran bayi mengalami peningkatan. Walaupun demikian meningkatnya jumlah kelahiran bayi didukung oleh kepemilikan akta lahir, sehingga hasil capaian menunjukkan angka yang tinggi yaitu 100% pada tahun 2022.

Tabel 2. 167
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	Orang	3.006	1.811	4.102	4.072	3.803	
Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	Orang	3.006	1.811	4.102	4.102	3.803	
Persentase	%	100	100	100	99	100	

Sumber : Dinas Capil

Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun 2018-2023 mengalami penurunan di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021.

2.1.3.2.6 Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik

Tabel 2. 168
Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah kantor pemerintahan kelurahan yang baik	Kantor	47	48	48	48	48		
b.	Jumlah seluruh pemerintahan Kelurahan	Kelurahan	48	48	48	48	48		
Persentase		Persen	97,92	97,92	100	100	100		

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palopo Tahun 2023

Data di atasmenunjukkan bahwa sampai pada tahun 2021 tidak ada lagi kantor kelurahan di wilayah Kota Palopo yang kondisinya kurang baik.

Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Tabel 2. 169
Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
di Kota Palopo Tahun 2017 –2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah kelompok binaan LPM	Kelompok	48	48	48	48	48		
b.	Jumlah LPM	Kelompok	48	48	48	48	48		
Rata-rata		Kelompok	1	1	1	1	1		

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palopo Tahun 2023

Data di atas menunjukkan bahwa tiap kelurahan di Kota Palopo rata-rata memiliki 1 lembaga pemberdayaan masyarakat. Jumlah LPM ini tidak mengalami pertambahan selama 5 tahun.

Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Data di bawah inimenunjukkan bahwa pada tahun 2017, 1 PKK di Kota Palopo membina sebanyak 2-3 kelompok binaan. Kelompok binaan PKK ini antara lain adalah Dasawisma dan BKMT di tingkat kelurahan.

Tabel 2. 170
Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	145	145	145	145	145		
b.	Jumlah PKK	Unit	58	58	58	58	58		
Rata – rata			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palopo Tahun 2023

Dari data diatas menunjukkan dari tahun 2017-2023 bahwa di Kota Palopo memiliki 2 kelompok PKK masyarakat. Jumlah ini bertambah selama 5 (lima) tahun.

Persentase LSM Aktif

Tabel 2. 171
Persentase LSM Aktif di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah LSM aktif	Buah	1	0	1	3	1		
b.	Jumlah LSM	Buah	36	36	36	38	1		
Persentase		%	2,77	0	2,77	7,89	100		

Sumber Data : Badan Kesbangpol Kota Palopo Tahun 2022

Sesuai data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, sebagian besar LSM di Kota Palopo sampai dengan tahun 2021, tidak aktif. Jumlah LSM yang aktif tersebut berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo.

Persentase LPM Berprestasi

Tabel 2. 172
Persentase LPM Berprestasidi Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021*	2022	2023
a.	Jumlah LPM berprestasi	Buah	2	2	2	2	2		
b.	Jumlah LPM	Buah	48	48	48	48	48		
Persentase		%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17		

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palopo Tahun 2022

Sesuai data dari Bag. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Setda Kota Palopo, pada tahun 2021 hanya 4,17% atau 2 LPM di Kota Palopo yang berprestasi. Jumlah relatif masih sedikit dibanding jumlah seluruh LPM yang ada di Kota Palopo.

Persentase PKK Aktif

Tabel 2. 173
Persentase PKK Aktif di Kota Palopo Tahun 2017 - 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021*	2022	2023
a.	Jumlah PKK aktif	Unit	58	58	58	58	58		
b.	Jumlah PKK	Unit	58	58	58	58	58		
Persentase		%	100	100	100	100	100		

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palopo Tahun 2022

Sesuai data Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palopo, dari 58 PKK yang ada di Kota Palopo terdiri dari 9 PKK Kecamatan dan 48 PKK Kelurahan

Persentase Posyandu Aktif

Tabel 2. 174
Persentase Posyandu Aktifdi Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah posyandu aktif	Buah	147	147	149	149	154		
b.	Total posyandu	Buah	147	147	149	149	154		
Persentase		%	100	100	100	100	100		

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Setda dan Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2017-2021, Posyandu di Kota Palopo 100% berfungsi aktif melakukan pembinaan kesehatan masyarakat. Selain itu, data di atas juga menunjukkan bahwa terjadi penambahan 2 unit Posyandu dari 147 unit di tahun 2017 menjadi 154 di tahun 2021.

2.1.3.2.7 Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk Pertahun dalam Jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk tahun dasar. Semakin kecil laju pertumbuhan

penduduk disuatu daerah mengindikasikan bahwa pemerintah setempat telah berhasil menekan dan mengendalikan jumlah penduduk melalui kepesertaan program keluarga berencana (KB).

Selama tahun 2017-2022 laju pertumbuhan penduduk masih stagnan pada angka 2%, kecuali pada tahun 2019 yang mampu turun menjadi 1,92%. Hasil capaian pada indicator ini dapat dikatakan lebih baik karena telah mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Tabel 2. 175
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,31	2,13	2,18	2,17	1,92	2,67	1.57

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2023

Dari tabel diatas laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2018-2023 mengalami naik turuun selama 7(tujuh) tahun berturut-turut.

Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 Aspek

Adalah indikator yangmenunjukkan adanya dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk pada pemerintah daerah. Indikator ini menunjukkan adanya grand desain pada level pemerintah daerah dalam mengendalikan laju peetumbuhan penduduk dan scenario penanganannya. Laju pertumbuhan penduduk dari 2017 ke 2023 mengalami naik turun dari 2,31 ke 1,57.

Tabel 2. 176
Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (ada/tidak)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2023

Dokumen rancangan induk pengendalian penduduk di tahun 2017-2023, ditahun 2017,2018,2019,2020 dan 2022 tidak ada di 2021 dan 2023 ada.

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW , dusun, atau yang setara yang memiliki kriteria dimana terdapat keterpaduan program yang dilakukan secara sistemik dan sistematis. Peran aktif dalam pengembangan kampong KB tidak hanya dilakukan oleh Dinas KB dan Pengendalian Penduduk melainkan juga perangkat daerah lainya yang memiliki kesesuain program dan kegiatan yang berhubungan pemberdayaan masyarakat dengan lokasi prioritas adalah lokasi yang telah ditetapakan sebagai kampong KB. Selama tahun 2017-2022 persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam kampong KB mengalami peningkatan dari 32,56% menjadi 56% di tahun 2022.

Tabel 2. 177
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Perangkat Daerah yang berperan aktif di kampung KB	16	16	18	19	28	22	18
Jumlah semua perangkat daerah	49	49	49	49	49	49	49
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB	32,65	32,65	36,73	38,77	57,14	56	36,73

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2023

Perangkat daerah yang berperan aktif di Kampung KB Kota Palopo sejak tahun 2017 - 2022 mangalami perubahan. Pada Tahun 2017 perangkat daerah yang ikut terlilbat dalam sebanyak 16 perangkat daerah dan pada tahun 2022 sudah melibatkan 22 perangkat daerah, walupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Presentase nilai pda tahun 2023 yaitu 36,73.

Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Merujuk pada tagline dari pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk yaitu program 2 anak cukup, maka jumlah anak per keluarga menjadi salah satu indicator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Indikator ini menjadi indikasi keberhasilan program KB dalam suatu PUS di Kota Palopo. Semakin banyak jumlah PUS yang mengikuti program KB dan komitmen dalam reproduksi dengan mengamalkan program cukup 2 anak. Hasil Capaian di Kota Palopo telah baik dan selama tahun 2017-2022 rata-rata jumlah anak per keluarga stagnan di angka dua.

Tabel 2. 178
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah anak (Orang)	62.376	62.433	61.121	60.722	69.854	54.659	23.176
Jumlah keluarga	34.786	34.843	34.925	34.990	38.563	38.564	42.846
Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2	2	1

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2022

Rata-rata jumlah anak perkeluarga di kota Palopo, data ini digunakan untuk melihat berapa jumlah anak dalam satu keluarga dari tahun 2017-2023. Rata-rata jumlah anak perkeluarga 2 berada di tahun 2017,2018,2019,2020,2021,2022 dan paling rendah berada di tahun 2023 dengan jumlah 1.

Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49

Pemakaian kontrasepsi berkaitan dengan usaha dari PUS untuk mengatur dan mengendalikan system reproduksi yang dimungkinkan agar jumlah anak yang dilahirkan tidak lebih dari dua. Walaupun demikan PUS yang menggunakan kontrasepsi masih berpeluang untuk bereproduksi apabila tidak konsisten dan aktif dalam menggunakan kontrasepsi. Hasil capaian di Kota Palopo tidak begitu menggembirakan karena terjadi penurunan selama periode 2018-2022. Tahun 2022 hasil capaianya hanya 70,82% angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49.

Tabel 2. 179
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49
di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah peserta KB aktif	17.774	18.226	16.973	16.879	15.604	14.727	19,718
Jumlah pasangan usia subur	23.802	24.254	22.411	22.326	22.177	20.793	27,297
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	74,67	75,15	75,73	75,60	70,36	70,82	

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2022

Data diatas untuk mengetahui pmemakai kontrasepsi/CPR perempuan menikah usia 15-49 di Kota Palopo dari tahun 2017-2023. Diketahui di tahun 2017 jumlah peserta KB aktif sebanyak 17.774 sedangkan ditahun 2023 sebanyak 19,718. Jumlah pasangan usia subur pada tahun 2017 sebanyak 17.774 sedangkan ditahun 2023 sebanyak 27,297. Sedangkan angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 dari tahun 2017 sampai 2022 mengalami naik turun.

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun

Pasangan usia subur merupakan pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan). Pasangan usia subur menjadi indicator kerja utama dalam pelaksanaan pengendalian penduduk yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu. Jumlah PUS di Kota Palopo selama tahun 2017-2022 mengalami tren penurunan dari 24.254 menjadi 20.793 atau terjadi penurunan 3,461 PUS selama lima tahun terakhir. Kemudian juga diikuti dengan menurunnya jumlah pasangan usia subur dengan umur istri < 20 tahun. Hasil capaian cakupan PUS pada tahun 2022 adalah 0,16%.

Tabel 2. 180
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun
di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th	239	223	66	15	5	35	4.193
Jumlah pasangan usia subur	23.802	24.254	22.411	22.098	21.403	20.793	27,297
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	1.00	0,92	0,29	0,67	0,23	0.16	0,15
Per 1000 PUS	10	9	3	7	2	1	5

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2023

Dari data cakupan pasangan usia subur (PUS) yang isterinya di bawah 20 tahun di kota Palopo dari tahun 2017-2023. Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 tahun pada 2017 berjumlah 239 sedangkan di 2023 berjumlah 4.193 ini mengalami kenaikkan. Jumlah pasangan usia subur pada tahun 2017 berjumlah 239 sedangkan ditahun 2023 mencapai 27,297 ini mengalami peningkatan. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang dibawah 20 tahun tahun 2017 berjumlah 1.00 ditahun 2023 berjumlah 0.0,15. Hasil dari PUS tertinggi yaitu berada pada 2017 berjumlah 10.

Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Pasangan usia subur memiliki potensi tinggi untuk melahirkan dan bereproduksi. Berdasarkan kondisi tersebut banyak perempuan memilih program KB yang cocok dan sesuai dengan kebutuhannya, salah satunya adalah metode unmeet need. Unmeet need atau kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Unmeet need adalah bagian dari indicator kinerja utama pada bidang urusan kependudukan dan pengendalian penduduk. Hasil capaian indicator ini di Kota Palopo mengalami peningkatan selama tahun 2017-2022 menjadi 25,27% atau meningkat 1,35%.

Tabel 2. 181
Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (unmet need)
di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	5.350	5.802	2.768	2.694	3.278		2,461
Jumlah pasangan usia subur	23.802	24.254	22.411	22.326	22.177		27,297
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	22.48	23,92	12,35	12.07	14,78		87,98

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2022

Rata-rata Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (unmet need)di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023. Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ditahun 2017 berjumlah 5.350 sedangkan ditahun 2023 berumlah 2,461. Jumlah pasangan usia subur ditahun 2017 23.802 sedangkan tahun 2023 berjumlah 27,297. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%) di tahun 2017 berjumlah 22.48 sedangkan ditahun 2023 berjumlah 87,98 mengalami peningkatan.

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah metode kontrasepsi yang sekali pemakaiannya untuk 3 tahun hingga seumur hidup, sedangkan non MKJP hanya berkisar 1-3 bulan saja. Kemudian akseptor merupakan pasangan usia subur yang salah seorang dari padanya menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan baik melalui program maupun non program Semakin banyak akseptor KB yang mengikuti program MKJP memberikan dampak positif terhadap pengendalian penduduk di Kota Palopo. Hasil capaian dari indicator ini selama tahun 2017-2022 mengalami peningkatan dari 25,06% menjadi 33,36%.

Tabel 2. 182
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
di Kota Palopo Tahun 2017 - 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	3.877	4.648	3.721	4.028	5.166	4.935	5,417
Jumlah akseptor KB	17.774	18.545	16.973	16.879	15.604	14.793	19,718
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	21,81	25,06	21,92	23,86	33,10	33.36	27,47

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2022

Dari tabel diatas kita bisa mengetahui presentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dari tahun 2017 samapi 2023, ditahun 2017 jumlah akseptor yang menggunakan MKJP sebanyak 3.877 sedangkan ditahun 2023 sebanyak 5,417. Jumlah akseptor KB ditahun 2017 berjumlah 17.774 sedangkan ditahun 2023 berjumlah sebanyak 19,718. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) ditahun 2017 sebanyak 21,81 sedangkan di 2023 sebanyak 27,47.

Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu konsistensi dari PUS untuk menghindari kehamilan. Walaupun demikian adakalanya pasangan yang menginginkan kembali istrinya untuk bereproduksi kembali dan memiliki anak. Setelah itu banyak PUS yang tidak kembali melakukan program KB, sehingga berpeluang tinggi untuk hamil kembali. Salah satu keberhasilan dalam pengendalian penduduk adalah dengan melihat persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi. Hasil capaian di Kota Palopo menunjukkan hasil yang kurnag menggembirakan, terjadi penurunan yang signifikan dari 47,42% menjadi 0,99% pada tahun 2022.

Tabel 2. 183
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
di Kota Palopo Tahun 2017 - 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan Kontrasepsi	8.023	8.794	5.438	3.793	811	130	7.579
Jumlah akseptor KB	17.774	18.545	16.973	16.879	15.604	14.727	19,718
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	45,14	47,42	32,03	22,47	5,19	0.88	0,38

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2023

Dari tabel diatas kita dapat mengetahui jumlah Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan Kontrasepsi di tahun 2017 sebanyak 8.023 di tahun 2023 sebanyak 7.579. Jumlah akseptor KB ditahun 2017 berjumlah 17.774 ditahun 2023 berjumlah 19,718. Presentase tertinggi berada pada tahun 2018 sebanyak 47,42.

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB

Kader BKB (bina keluarga balita) adalah anggota masyarakat yang bekerja secara suka rela dalam membina dan menyuluh orang tua balita tentang bagaimana mengasuh anak secara baik dan benar. Kader tersebut bertugas memberikan penyuluhan terhadap anggotanya (masyarakat yang memiliki anak balita) untuk tetap konsisten melaksanakan program KB. Kader BKB telah berhasil mendorong anggotanya untuk melaksanakan program KB dan merupakan bagian dari indicator kinerja utama, dengan hasil capaian yang menggembirakan yaitu terjadi peningkatan Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB)ber-KB dari 78,26% menjadi 80,99% di tahun 2022.

Tabel 2. 184
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB
di Kota Palopo Tahun 2017 - 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	3.345	3.981	3.940	1.270	1.147	746	543
Jumlah anggota kelompok BKB	4.451	5.087	5.316	1.722	1.546	921	543
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB)ber-KB (%)	75,15	78,26	74,11	22,47	74,19	80.99	1

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2022

Dari data diatas dapatv diketahui bahwa jumlah anggota kelompok yang ber-KB tertinggi berada ditahun 2018 sebanyak 3.981. Jumlah anggota kelompok BKB tertiggi berada ditahun 2018 berjumlah 5.087. Jumlah presentase tertinggi berada di tahun 2022 sebanyak 80.99.

Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB

Kader BKB (bina keluarga remaja) adalah anggota masyarakat yang bekerja secara suka rela dalam membina dan menyuluh orang tua remaja tentang bagaimana mendidik remaja secara baik dan benar. Kader tersebut bertugas memberikan penyuluhan terhadap anggotanya (masyarakat yang memiliki anak usia remaja) untuk tetap konsisten melaksanakan program KB. Kader BKB telah berhasil mendorong anggotanya untuk melaksanakan program KB dan merupakan bagian dari indicator kinerja utama, dengan hasil capaian di angka 63,03% pada tahun 2022, turun dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 185
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB
di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	2.007	2.632	2.601	1.066	905	672	1875
Jumlah anggota kelompok BKR	3.427	4.052	4.306	1.818	1.260	1.066	1066
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	58,56	64,96	60,61	58,63	71,82	63.03	1,75

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2023

Dari tabel diatas kita dapat mengetahui jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB tertinggi berada ditahun 2018 berjumlah 2.632 terendah berada di tahun 2022 berjumlah 672. Jumlah anggota kelompokBKR tertinggi berada pada tahun 2018 sebanyak 4.052 terendah berada di tahun 2022 dan 2023 sebanyak 1.066. Presentaset ertinggi berada di tahun 2021 dengan jumlah %.

Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

Bina Keluarga Lansia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi keluarga yang mempunyai orang tua atau lanjut usia. Bina Keluarga Lansia adalah kelompok kegiatan (Poktan) keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lansia dan lansia itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Hasil capaian pada indicator ini di Kota Palopo menunjukkan hasil yang tidak bagus, yaitu terjadi penurunan yang sangat signifikan dari 47,20% di tahun 2017 menjadi 7,83% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB yaitu 1875 dan jumlah anggota kelompok BKR 1066 dengan cakupan 1,75.

Tabel 2. 186
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB
di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	1.458	2.001	1.855	613	709	52	106
Jumlah anggota kelompok BKL	3.089	3.632	3.411	1.276	1.165	664	792
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	47,20	55,09	54,38	48,04	60,85	7.83	13,38

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2023

Dari tabel Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 daapt diketahui bahwa Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB tertinggi berada di tahun 2018 berjumlah 2.001. Jumlah anggota kelompok BKL tertinggi ditahun 2018 dengan jumlah 3.632. Jumlah presentase tertinggi berada di tahun 2021 sebanyak 60,85%.

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat berupa pemberian KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi), konseling dan rujukan dalam permasalahan keluarga secara gratis dan berbasis institusi. Hasil capaian PPKS Kota Palopo terjadi stagnasi. Selama tahun 2017-2022 hanya ada 1 kecamatan yang memiliki PPKS. Keadaan ini dapat dijadikan evaluasi agar terjadi pemenuhan 100% atau 9 kecamatan secara keseluruhan memiliki PPKS.

Tabel 2. 187
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan
Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PPKS	1	1	1	1	1	1	9
Jumlah Kecamatan	9	9	9	9	9	9	9
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	1

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2023

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap KecamatanKota Palopo Tahun 2017 – 2023. Mengetahui jumlah PPKS ditetinggi berada di 2023 sebanyak 9 terendah di tahun 2017,2018,2019, 2020, 2021,20220 sebanyak 1. Jumlah kecamatan semu tahun berjumlah 9. Dengan hasil Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera hanya 2023 yang berjumlah 1.

Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa (PIK R/M) merupakan suatu wadah kegiatan program generasi berencana (GENRE) yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Dalam indikator kinerja utama PIK R/M masuk dalam program pengendalian penduduk yang berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan aktualisasi bagi remaja atau mahasiswa dalam mengkampanyekan program keluarga berencana dan reproduksi. Hasil capaian PIK R/M di Kota Palopo pernah mengalami jumlah tertinggi pada tahun 2019, kemudian kembali mengalami penurunan menjadi 68 stagnan sampai pada periode tahun 2022 atau hanya mencapai 7,55%.

Tabel 2. 188
Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa
di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PIK R/M (Buah)	81	93	184	68	68	68	68
Jumlah Kecamatan (Buah)	9	9	9	9	9	9	9
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (a/b)	9,00	10,33	20,44	7,55	7,55	7,55	7,55

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2023

Dengan tabel data di atas kita dapat mengetahui jumlah PIK R/M tertinggi pada tahun 184 di tahun 2019 terendah berjumlah 68 berada di tahun 2020,2021,2022,2023. Jumlah kecamatan berjumlah 9 di tahun 2017-2023 dan Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa tertinggi berjumlah 20,44 di tahun 2019 terendah 9,00 ditahun 2017.

Cakupan PKB/PLKByang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

Tabel 2. 189
Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	68	68	66	63	57	57	49
Jumlah PKB/PLKB	68	68	66	63	57	57	49
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan (%)	100	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai tertinggi jumlah PKB/PLKB didayagunakan tertinggi berada di tahun 2017 dan 2018 berjumlah 68 terendah berada di tahun 2023 berjumlah 49. Julah PKB/PLKB nilai tertinggi di tahun 2017 dan 2018 dengan jumlah 68 terendah di tahun 2023 berjumlah 49. Cakupan PKB/PKLB didayagunakan 100%.

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Tabel 2. 190
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
yang Ber-KB Mandiri di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	640	774	671	218	194	-	48

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah anggota kelompok UPPKS	3102	3.791	2.804	952	822	-	8184
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	20,63	20,42	23,93	22,89	23,60	-	00,58

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri tertinggi berada di tahun 2018 dengan jumlah 774 terendah berada di tahun 2023 dengan jumlah 48. Jumlah anggota kelompok UPPKS tertinggi berada di tahun 2023 dengan jumlah 8184 terendah berada di tahun 2021 dengan jumlah 822. Dengan cakupan presentase tertinggi 23,93 di tahun 2019.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2017, dari 100 anggota kelompok UPPKS, hanya ada 21 anggota yang sudah ber KB Mandiri, sisanya sebanyak 79 anggota belum ber KB secara mandiri.

Kemudian pada tahun 2021, ada 24 anggota kelompok UPPKS yang sudah ber KB mendiri, sisanya sebanyak 76 anggota belum ber KB secara mandiri. Artinya sejak 2017-2021, kemandirian anggota kelompok UPPKS untuk ber KB mengalami peningkatan. Sebab dari 100 anggota UPPKS, jumlah anggota yang ber KB secara mandiri justru semakin menurun, dari 21 anggota pada tahun 2017 menjadi 24 anggota pada tahun 2021.

Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini pada tahun 2021, lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja tahun 2017. Sehingga ke depan, angka persentase yang akan menjadi target untuk indikator ini harus dipertahankan atau ditingkatkan.

Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Kota Palopo merupakan wilayah yang berstatus kotamadya, oleh karena itu ketersediaan petugas pembantu Pembina KB hanya tersedia di wilayah kelurahan. Hasil capaian indicator ini menunjukkan bahwa selama tahun 2017-2022 rasio petugas pembantu pembina KB desa 100% yang dengan setiap petugas mengampu 1 wilayah kelurahan, dikali dengan total jumlah 48 kelurahan.

Tabel 2. 191
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan
di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	48	48	48	48	48	48	48
Jumlah Kelurahan	48	48	48	48	48	48	48
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah pembantu pembina KB desa dari tahun 2017-2023 dengan jumlah 48, jumlah kelurahan dari 2017-2023 dengan jumlah 48 juga. Presentase rasio PPKB berjumlah 100%.

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota

Ketersediaan alat kontrasepsi dan distribusi alat kepada PUS dan akseptor KB di gudang kabupaten/kota merupakan salah satu indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang harus dijamin ketersediaannya. Selama tahun 2017-2022 cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota (%) mengalami kondisi yang aman dengan cakupan 100,02% mengalami peningkatan dari tahun dasar.

Tabel 2. 192
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Gudang
Kabupaten/Kota di Kota Palopo Tahun 2017 –2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persediaan alat dan obat Kontrasepsi	9.688	11.830	13.849	17.634	12.926	16.720	17,593
Rata Rata Pemakaian alat dan obat Kontrasepsi per bulan tingkat Kota	1.331	1.599	1.049	1.114,43	2.744	1.393	1,466
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi Kabupaten/Kota (%)	7,28	7,39	13,20	13,82	4,71	16.716	12,00

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diliha persediaan alat dan obat kontrasepsi tertinggi pada tahun 2023 dengan jumlah17,593 terendah pada tahun 2017 dengan jumlah 9.688. Rata Rata Pemakaian alat dan obat Kontrasepsi per bulan tingkat Kota tertinggi di tahun 2021 dengan jumlah 2.744 terendah ditahun 2019 1.049, cakupan presentasenya adalah 16.761% ditahun 2022.

Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes

Ketersediaan alat kontrasepsi dan distribusi alat kepada PUS dan akseptor KB di fasilitas kesehatan merupakan salah satu indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang harus dijamin ketersediaannya. Perbedaan dengan indikator sebelumnya yang lokasinya berada di Gudang, maka pada indikator ini ada di fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan harus memiliki ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang dibutuhkan oleh akseptor KB. Selama tahun 2018-2022 persediaan alokon mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifkan yang disebabkan karena meningkatnya rata-rata pemakaian per bulannya 999,92 walaupun kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2022 menjadi 9556.

Cakupan ketersediaan dan distribusi alokon secara keseluruhan selama tahun 2018-2022 di faskes Kota Palopo mengalami oversupply, dikarenakan jumlah akseptor KB tidak sebanding dengan persediaan alokon yang telah disiapkan oleh pemerintah.

Tabel 2. 193
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes
Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persediaan alat dan obat Kontrasepsi	4.512	1.414	4.512	8.359	6.381	9.556	17,985
Rata Rata Pemakaian alat dan obat Kontrasepsi per bulan di Faskes	67,91	32,58	67,91	697	532	796	1,499
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes	66.4	43,40	66,40	11,99	11,99	9.552	11,99

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2023

Dengan jumlah persediaan alat dan obat kontrasepsi tertinggi pada tahun 2023 berjumlah 17,985 terendah di tahun 2021 dengan jumlah 532. Rata Rata Pemakaian alat dan obat Kontrasepsi per bulan di Faskes dengan jumlah tertinggi berada di tahun 2022 dengan jumlah 796. Cakupn presentase 66,40%.

Persentase Faskes Dan Jejaringnya (diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerja Sama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KBKR) adalah salah satu bagian dari tiga pilar dalam membangun suatu keluarga, yaitu kependudukan, KB dan kesehatan reproduksi, dan pembangunan keluarga. Pelayanan KBKR dapat berjalan apabila ada sinergi antara pemerintah daerah dengan faskes yang dimilikinya dan akseptor KB dan PUS ber-KB aktif, sehingga dapat menekan jumlah penduduk. Adanya fasilitasi faskes tersebut memberikan kemudahan pelayanan bagi akseptor KB dan PUS ber-KB aktif dikarenakan bersifat gratis dan murah baik melalui skema subsidi maupun kerjasama dengan pembiayaan BPJS.

Hasil capaian pada indikator ini dapat dilihat dari Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan. Selama tahun 2017-2022 hasil capaian sangat baik karena setiap tahunnya dapat tercukupi 100%.

Tabel 2. 194
Persentase Faskes dan Jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	19	20	20	23	23	24	23
Jumlah Faskes dan jejaring	19	20	20	23	23	24	23
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS tertinggi adalah 24 ditahun 2022 terendah berada di tahun 2017 bejumlah 19 , jumlah faskes dan jejaring tertinggi di tahun 2022 berjumlalh 24 terendah ditahun 2017 yaitu 19. Presentasenya 100%.

Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Pembinaan keluarga adalah gambaran atau model yang diterapkan oleh masyarakat untuk membina keluarga secara aktif menuju kearah yang lebih baik sesuai ketentuan dalam agama dan kepercayaan yang dianut. Pembinaan keluarga didasarkan pada 8 fungsi keluarga lewat fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan.

Hasil dari indikator capaian ini dilihat dari Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga, selama tahun 2019-2022 hasil capaian sangat baik karena setiap tahunnya cakupannya tercukupi 100%. Kecuali pada tahun 2017 yang jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga lebih dari jumlah kelompok kegiatan.

Tabel 2. 195
Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaankeluarga melalui 8 fungsi keluarga	427	465	732	272	272	258	258
Jumlah kelompok kegiatan	221	259	732	272	272	258	262
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	1,93	1,80	1,00	1,00	1,00	100	0,98

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2022

Dari tabel 8 fungi keluarga di Kota Palopo dari tahun 2017-2023 dapat diketahui Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaankeluarga melalui 8 fungsi keluarga tertinggi beraa ditahun 2019dengan jumlah 732 terendah di tahun 2022 berjumlah 258. Jumlah kelompok kegiatan tertinggi berada di tahun 2019 dengan jumlah 732 terendah ditahun 2022 sebanyak 258. Dengan cakupan presentase 100%.

Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak adalah bagian dari indikator kinerja utama pada urusan pengendalian penduduk. Indikator ini diukur dari jumlah keluarga yang mempunyai balita/anak yang melaksanakan pembinaan dan pengasuhan anak, dibanding dengan jumlah keluarga yang memiliki balita dan anak.

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak selama tahun 2019-2022 capaiannya adalah 100%, kecuali pada tahun 2017 yang kurang maksimal atau hanya mencapai 54,89%.

Tabel 2. 196
Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anakyang memahami dan melaksanakan pengasuhan danpembinaan tumbuh kembang	3.686	4.284	4.306	1.722	1.546	921	921
Jumlah keluarga mempunyai balita dn anak	6.715	6.570	4.306	1.722	1.546	921	16.753
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	54,89	65,21	100	100	100	100	54,97

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2022

Tabel diatas Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023, jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anakyang memahami dan melaksanakan pengasuhan danpembinaan tumbuh kembang tertinggi di tahun 2018 berjumlah 4.284 terendah di tahun 2022 dan 2023 sebanyak 921. Jumlah keluarga mempunyai balita dn anak jumlah tertinggi ditahun 2023 sebanyak 16.753 terendah ditahun 2022 sebanyak 921. Presentase 100%.

2.3.7.23 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes

Pembiayaan program kependudukan dan keluarga berencana selain bersumber dari APBD dapat juga berasal dari DAK fisik dan non-fisik yang berasal dari pemerintah pusat. Kota Palopo yang berstatus sebagai kotamadya, tidak

mengalokasikan anggaran dalam APBDes, oleh karena itu hanya diberikan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan bidang pengengendalian penduduk dan KB.

Hasil capaian indikator ini diukur dari Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD yang diberikan langsung kepada perangkat daerah pengampu. Selama tahun 2018-2022 persentasenya mengalami tren penurunan yang signifikan dari 82,94% menjadi 32,61%, tetapi disisi lain jumlah APBD mengalami kenaikan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian untuk dicarikan solusi pembiayaan lain, baik melalui skema subsidi silang dengan akseptor KB yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih maupun mencari dana DAK dari pusat.

Tabel 2. 197
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana danPembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah anggaran untuk urusan PPKB	2.784.312.000	2.441.839.000	3.210.274.000	5.727.928.250	4.035.896.000	
Jumlah APBD dan APBDes	3.356.961.000	5.909.076.000	5.189.110.000	1.001.572.261.730	12.374.263.000	
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	82,94	41,32	61,86	0.57	32.61	

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo

Jumlah anggaran dari tahun 2018-2023 semakin meningkat selama 5(lima) tahun

2.1.3.2.8 Bidang Urusan Perhubungan

Arus Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum adalah angkutan yang digunakan oleh umum dan dilaksanakan dengan dengan dipungut bayaran. Sedangkan menurut undang-undang perhubungan angkutan umum adalah model transportasi yang diperuntukkan buat bersama, kepentingan bersama, menerima pelayanan bersama, mempunyai arah dan tujuan yang sama, serta terikat dengan peraturan trayek yang sudah ditentukan dan jadwal yang sudah ditetapkan dan para pelaku perjalanan harus wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut apabila angkutan umum ini sudah mereka pilih

Angkutan umum sebagai salah satu sarana transportasi perkotaan bagi masyarakat sangat memegang peranan penting. Aktifitas masyarakat yang terus meningkat menuntut peningkatan kebutuhan akan sarana transportasi tersebut. Seiring meningkatnya permintaan akan pelayanan transportasi dalam mendukung kegiatan masyarakat Kota Palopo. Bahwa rasio jumlah arus penumpang angkutan umum dari tahun 2017 sampai dengan 2022 itu mengalami penurunuan yang signifikan, disebabkan masyarakat telah beralih menggunakan kendaraan pribadi dan transportasi online.

Tabel 2. 198
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umumdi Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah arus keluar masuk penumpang angkutan umum dengan bis (Orang)	1.344.991	1.326.741	1.323.252	539.500	945.036	2.301.320	1.982.192
Jumlah arus keluar masuk penumpang angkutan umum dengan kapal laut (Orang)	445	314	352	238	0	0	0
Jumlah total arus penumpang angkutan umum (Orang)	1.345.436	1.327.055	1.323.604	539.500	945.036	0	0

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2023

Dengan melihat tabel jumlah Arus Penumpang Angkutan Umumdi Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 kita dapat mengetahui Jumlah arus keluar masuk penumpang angkutan umum dengan bis (Orang) dengan jumlah tertinggi berada pada tahun 2022 dengan jumlah 2.301.320 terendah pada tahun 2020 dengan jumlah 539.500. Jumlah arus keluar masuk penumpang

angkutan umum dengan kapal laut (Orang) dengan jumlah tertinggi pada tahun 2017 sebanyak 445 terendah pada tahun 2021-2023 berjumlah 0. Jumlah total arus penumpang angkutan umum (orang) tertinggi pada tahun 2017 sebanyak 1.345.436 terendah ditahun 2022-2023 berjumlah 0.

Rasio Ijin Trayek

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal. Adapun rasio izin trayek untuk kota palopo dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan, dikarenakan sudah sedikitnya peminat angkutan umum akibat adanya penyedia jasa transportasi online yang tidak membutuhkan izin trayek.

Tabel 2. 199
Rasio Izin Trayek di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	Buah	3	4	4	4	0	3	2
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	176.907	202.483	202.204	184.681	184.681	190867	194448
Rasio Izin Trayek		Per 100.000	2	2	2	2	1,08	0	0

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2023

Dari tabel Rasio Izin Trayekdi Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 kita dapat mengetahui jumlah ijin trayek yang dikeluarkan sebanyak 4 ditahun 2018-2020, jumlah penduduk terbanyak 202.483 jiwa ditahun 2018 terendah berada ditahun 2022-2023 berjumlah 0 jiwa. Rasio Izn trayek 2 ditahun 2017-2020.

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Untuk Menjamin kelayakan kendaraan penumpang atau barang (angkot, bus, truk) yang ada di jalan sudah seharusnya diawasi oleh pemerintah. Pengawasan yang dilakukan tersebut berupa uji kir (uji berkala). Uji berkala yang dilakukan pemerintah, khususnya kementerian perhubungan, sudah jelas diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP LLAJ). Serta diperdalam pembahasannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub PBKB). Pada pasal 53 ayat satu UU LLAJ, uji berkala sebagaimana dimaksud, wajib dilakukan untuk mobil penumpang umum, bus, barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan. Lalu pada pasal 2, pengujian berkala tersebut meliputi kegiatan, pemeriksaan dan pengujian fisik, serta pengesahan hasil uji. Selain pada pasal 53, aturan uji berkala ini secaa lebih lanjut diperjelas pada pasal 54 dan 55 UU LLAJ.

Terkait dengan waktu pelaksanaanya, juga sudah dijelaskan pada pasal 5 ayat 3 Permenhub PBKB, di mana uji berkala perdana dilakukan paling lama satu tahun, setelah terbit surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang pertama kali. Kemudian pada ayat 3, perpanjangan uji berkala selanjutnya dilakukan 6 bulan setelah uji berkala pertama, dan dilakukan terus menerus setiap enam bulan sekali. Jumlah uji KIR Angkutan Umum di Kota Palopo pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnnya yaitu pada tahun 2017.

Tabel 2. 200
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit)	1.152	3.362	2.608	2.602	251	180	167

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2023

Data Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 memperlihatkan jumlah uji KIR angkutan umum (Unit) tertinggi berada ditahun 2018 sebanyak 3.362 terendah berada ditahun 2022 yaitu 180.

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Bahwa di Kota Palopo tidak memiliki Pelabuhan Darat (Bandar Udara), tetapi hanya memiliki Pelabuhan Laut dan Terminal Bus. Terminal Bus di Kota Palopo akan megalami penambahan 1 unit yang memiliki Type A yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan yang terletak di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, yang masih dalam proses pengerjaan yang dibiaya oleh kemernterian Perhubungan. Terminal Bus merupakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan akan sarana transportasi di kota Palopo, mengingat kota Palopo merupakan kota yang akan padat penduduk ditahun tahun mendatang. Adapun jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bus dari tahun sebelumnnya tidak mengalami perubahan di tahun 2022.

Tabel 2. 201
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pelabuhan laut	Unit	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah terminal bis	Unit	1	1	1	1	1	1	1

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2023

Data dari Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 memperlihatkan jumlah pelabuhan laut dan jumlah terminal bis dari tahun 2017-2023 hanya bernilai 1 unit.

Persentase Layanan Angkutan Darat

Indikator yangmenunjukkan seberapa besar kemampuan layanan angkutan tranportasi darat yang tersedia untuk memenuhi atau mencover kebutuhan transportasi darat atau penumpang yang ada. Semakin tinggi angka indikator ini, semakin tinggi kemampuan layanan angkutan darat di Kota Palopo.

Tabel 2. 202
Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah angkutan darat	Unit	1.332	1.452	1.415	3.479	3.396	198.900	164569
b.	Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	1.344.991	1.326.741	1.323.252	573.160	969.316	2.301.320	1982192
Persentase			0,099	0,109	0,106	0.0060	0,350	0,086	0,083
Per 10.000 Penumpang			8,5	9,9	10,9	10,6	3.504	8642	

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2023

Data Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023 jumalah tertinggi jumlah angkutan di tahun 2022 yaitu 198.900, jumlah penumpang angkutan darat trendah tahun 2020 yaitu 969.316.

Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan Umum di wilayah kota Palopo megalami penurunan dari tahun sebelumnya. Adapun persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Palopo selama tahun 2017-2022 mengalami tren penurunan dari 9,71% menjadi 0,22% pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR

Tabel 2. 203
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun n	Unit	180	41	12	0	380	451	464
b.	Jumlah angkutan umum pada tahun n	Unit	1.332	1.452	1.393	1.453	970.8892	198.900	164.569
Persentase		%	9,71	13,51	0,86	0	14,40	380	00,28

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2023

Dari tabel daapt dilihat jumlah tertinggi jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun-n pada tahun 2023, jumlah angkutan umum pada tahun n tertinggi pada tahun 2020 yaitu 970.8892.

Pemasangan Rambu – Rambu

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu lalu lintas punya banyak jenis yang punya kegunaan atau fungsi masing-masing. Namun secara umum, rambu lalu lintas berfungsi untuk mengatur jalannya lalu lintas agar tertib dan teratur.

Rambu-rambu ini juga berguna untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk untuk pemakai jalan, baik pejalan kaki atau pengendara. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2014. Secara umum, ada 4 jenis rambu lalu lintas, yaitu: Rambu Peringatan, Rambu Larangan, Rambu Perintah, dan Rambu Petunjuk. Pemasangan Rambu-Rambu di Wilayah Kota Palopo mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2022 persentase pemasangan rambu-rambu hanya sekitar 14 % dibandingkan dengan tahun 2017 sekitar 63,20%.

Tabel 2. 204
Persentase Pemasangan Rambu - Rambu di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah pemasangan rambu – rambu pada tahun n	Buah	158	179	254	293	21	14	27
b.	Jumlah rambu – rambu yang seharusnya tersedia	Buah	250	254	450	518	618	100	100
Persentase		%	63,20	70,47	56,44	56,56	33,87	14	0,27

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2023

.Tabel diatas mennjukkan data tertinggi jumlah pemasangan rambu-ramby pada tahun n pada tahun 2020 terendah pada tahun 2022. Jumlah rambu-rambu yang sharusnya tersedia tertinggi pada tahun 2019 nilai terendah pada

2.1.3.2.9 Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Komunikasi adalah "proses atau tindakan menyampaikan pesan (message) dari pengirim (sender) ke penerima (receiver), melalui suatu medium(channel) yang biasa mengalami gangguan (noise). Dalam definisi ini, komunikasi haruslah bersifat intentional (disengaja) serta membawa perubahan.

Bahwa sesuai dengan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika yang terdapat pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

Adapun persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan Kota Palopo tidak mengalami perubahan dari tahun tahun sebelumnya.

Tabel 2. 205
Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat KecamatanKota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah KIM	Kelompok	30	30	32	34	32	35	
b.	Jumlah kecamatan yang ada dalam Kota Palopo	Kecamatan	9	9	9	9	9	9	
Persentase		%	0	3,33	3,33	3,55	3,55	3.89	

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo Tahun 2023

Cakupan Layanan Telekomunikasi

Jasa telekomunikasi adalah layanan Telekomunikasi untuk memenuhi keperluan bertelekomunikasi dengan menggunakan Jaringan Telekomunikasi. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan Jasa Telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.

Cakupan layanan telekomunikasi di wilayah Kota Palopo di tahun 2021 mengalami kenaikan sekitar 90 % dari tiga tahun sebelumnya. Keterbatasan data yang dimiliki perangkat daerah pengampu membuat hasil capaian pada tahun 2022 belum tersedia.

Tabel 2. 206
Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Luas wilayah yang tercoverage	Km²	212,87	212,87	222,47	222,47	222,47	-	
b.	Luas wilayah keseluruhan	Km²	247,52	247,52	252,99	252,99	247,52	247,52	
Jumlah (a/b)			0,83	0,86	0,88	0,88	0,90	-	

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo Tahun 2023

Dari tabel cakupan layanan telekomunikasi di Kota Palopo tahun 2017-2023 terdata luas wilayah yang tercoverage cenderung meningkat dan wilayah keseluruhan terus meningkat samppai ditahun 2021.

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Internet merupakan sebuah sistem komunikasi yang mampu menghubungkan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Berbagai jenis komputer dengan spesifikasi yang berbeda-beda dapat saling berkomuikasi melalui internet. Beberapa bentuk jaringan yang berbeda-beda dapat saling bertukar informasi dan data melalui internet menggunakan seperangkat aturan yang disebut (transmission control protocol) TCP dan sambungan (Internet Protocol) IP.

Akses internet adalah jalan masuk untuk bisa terhubung atau terkoneksi dengan jaringan komputer. Adapun Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kota Palopo mengalami kenaikan di tahun 2021 dari tiga tahun sebelumnya. Keterbatasan data yang dimiliki perangkat daerah pengampu membuat hasil capaian pada tahun 2022 belum tersedia.

Tabel 2. 207
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah rumah tanggayang memiliki akses internet	KK	3.314	7.029	9.045	9.900	14.534	-	
b.	Jumlah rumah tangga	KK	38.641	39.444	39.444	39.444	41.023	57.755	
Jumlah (a/b)			0,08	0,18	0,23	0,25	0,40	0,42	

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo Tahun 2023

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki akses internet tertinggi dari tahun 2018-2-2023 tertinnggi di tahun 2021 dengan jumlah 14.534 dengan jumlah rumah tangga 41.023

Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Tabel 2. 208
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi
di Kota Palopo Tahun 2017 - 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	KK	15.456	16.383	19.700	19.700	21.500	-	
b.	Jumlah rumah tangga	KK	38.641	39.444	39.444	39.444	41.023	57.755	
Jumlah (a/b)			0,40	0,42	0,49	0,49	0,52	-	

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo Tahun 2022

Data di atas menunjukkan jumlah pengguna komputer pribadi per rumah tangga di Kota Palopo terus meningkat. Dari 100 rumah tangga yang ada pada tahun 2021 sebanyak 52 rumah tangga menggunakan komputer pribadi. Jumlah ini lebih banyak dibandingkat tahun 2017 yang hanya pada angka 40 dari 100 rumah tangga yang ada. Ini menunjukkan penggunaan komputer di masyarakat dan di Kota Palopo semakin memasyarakat.

2.1.3.2.10 Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah pelaku usaha yang mempunyai jatidiri berbeda dengan pelaku usaha lain yang bertujuan mensejahterakan anggota, menjamin keadilan pemerataan penguasaan sumberdaya ekonomi, meningkatkan produktifitas serta partisipasi anggota koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi merupakan model yang tepat untuk mengurangi kemiskinan, karena keanggotaan terbuka, usaha dilakukan secara bersama untuk memenuhi kepentingan bersama, dan pembagian keuntungan didasarkan pada transaksi anggota dengan koperasi

Pada tahun 2017, jumlah seluruh koperasi di Kota Palopo sebanyak 287 unit dan setiap tahun terus meningkat hingga mencapai 298 unit pada tahun 2022. Namun dari tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa persentase koperasi aktif terus mengalami penurunan. Permasalahan dari menurunnya persentase koperasi aktif, yakni adanya koperasi yang tidak melaksanakan RAT.

Tabel 2. 209
Presentase Koperasi Aktif di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	204	206	74	69	77	76	74
b.	Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	287	290	292	292	296	298	294
Jumlah Koperasi Aktif		%	71,08	71,03	25,34	23,63	17,81	26.01	25,17

Sumber Data : Dinas Koperasi, UMKM Kota Palopo Tahun 2022

Berdasarkan tabel jumlah koperasi yang aktif terbanyak pada tahun 2018 terendah berada ditahun 2020. Jumlah seluruh koperasi terbanyak pada tahun di tahun 2022 terendah pada tahun 2017.

Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif

LKM adalah Lembaga Keuangan Mikro, sementara BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat.Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.LKM umumnya diakses oleh masyarakat di tingkat pedesaan atau wilayah yang selama ini sulit diojangkau atau menjangkau bank komersial. LKM bisanya berbentuk koperasi atau Perseroan terbatas.

Hasil capaian di Kota Palopo selama tahun 2017-2021 mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2021 persentase UKM non BPR dan LKM aktif menyusut menjadi 68,61% dari tahun sebelumnya yang berhasil mencatatkan angka 100%.

Tabel 2. 210
Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Unit	2.037	2.158	2.209	2.001	2.087	-	
b.	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	Unit	2.307	2.160	2.211	2.001	1.953	-	
Persentase		%	100	99,91	99,91	100	68,61	-	

Sumber Data : Dinas Koperasi, UMKM Kota Palopo Tahun 2023

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah UMKM non BPR/LKM aktif dari tahun 2018-2023 tertinggi menunjuk pada tahun 2018 yaitu 2.158 unit dengan jumlah seluruh UKM non BPR/LKM 2.160

Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Selain mengampu kegiatan perkoperasian Dinas Koperasi Kota Palopo juga mengampu program dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha kecil dan mikro. Seperti diketahui bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak cabang yang dimiliki ataupun dikuasai oleh perusahaan lain baik secara langsung dan tidak langsung yang memenuhi criteria yaitu jumlah asset maksimal > Rp.50.000.000,- s/d Rp.500.000.000,- dan jumlah omzet maksimal > Rp.300.000.000,- s/d Rp.2.500.000.000,-. Kemudian definisi dari usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki criteria dengan jumlah asset maksimal Rp.50.000.000,- dan omzet maksimal Rp.300.000.000,-

Tabel 2. 211
Presentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah usaha mikro dan kecil	Unit	6.561	6.664	6.764	9.021	9.123	12047	14804
b.	Jumlah seluruh UKM	Unit	8.598	8.824	8.975	11.022	11.211	14048	14804
Persentase UMK		%	76,31	75,52	75,37	81.84	81,37	85,75	

Sumber Data : Dinas Koperasi, UMKM Kota Palopo Tahun 2023

Berdasarkan tabel jumlah usaha mikro dan kecil terbanyak pada tahun 2023 terendah pada tahun 2017, jumlah seluruh UMKM terbanyak pada tahun 2023 terendah pada tahun 2023.

2.1.3.2.11 Bidang Urusan Penanaman Modal
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Berikut adalah tabel jumlah investor berskala nasional di Kota Palopo 2017-2022.Jumlah investor merujuk pada jumlah proyek-proyek penanaman modal yang diinvestasikan baik PMDN maupun PMA selama 1 (satu) tahun.

Tabel 2. 212
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	147	129	78	74	77	33	

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Palopo Tahun 2023

Jumlah investor ditahun 2017-2023 terus meningkat di Kota Palopo selama 6 (enam) tahun berturut-turut.

Jumlah dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN adalah sebuah bentuk entitas bisnis yang paling banyak digunakan untuk berbagai macam aktivitas bisnis di Indonesia. Selain itu, PMDN dianggap memiliki dasar hukum yang paling jelas dan menjadi pilihan utama bagi para investor asing yang ingin mengembangkan bisnis tertutup terhadap kepemilikan asing. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah sebuah pembentukan modal bisnis bagi investor asing dan menggunakan sepenuhnya atau sebagian modal asing dengan investor domestik. Berikut adalah tabel Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional baik PMDN maupun PMA di Kota Palopo selama tahun 2017-2022 mengalami tren penurunan yang signifikan, hanya Rp.884.000.000,- dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya yang mencapai angka milyar rupiah.

Tabel 2. 213
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Buah)	147	129	85	74	77	51	
Jumlah nilai investasi verskala nasional (PMA/PMDN) (Juta)	382.322,26	220,859	130,740	109.484	158.847	884	

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Palopo Tahun 2023

Dari tabel diatas jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) dari tahun 2017-2018 meningkat di tahun 2017 dengan jumlah nilai 382.32,26

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja.

Tenaga kerja yang dimaksud disini didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Peraturan tersebut juga mengatur tentang tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Adanya pandemi covid-19 yang melanda wilayah Indonesia khusunya di wilayah Kota Palopo daya serap Tenaga Kerja mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun tabel rasio daya serap tenaga kerja selama tahun 2017-2022 mengalami tren penurunan yang signifikan.

Tabel 2. 214
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan	Orang	28,377	30.140	760	392	676	308	
b.	Jumlah seluruh PMDN	Juta	382.322,26	220.859	130..740	109.484	158.847	51.884	
Rasio per 100 Juta		Angka	7.42	13.65	9.04	36	4,25	1,5	

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Palopo Tahun 20223

Jumlah tenga kerja bekerja pada perusahaan tertinggi pada tahun 2018 dengan jumlah 30.140 orang dengan jumlah 382.322,26 jumlah seluruh PMDN.

2.3.11.4 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Indikator dalam pencapaian Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN sangatlah berpengaruh terhadap Perekonomian di wilayah Kota Palopo, dimana realisasi tahun 2018 mencapai 57,77% dibandingkan dengan tahun 2022 hanya mencapai 32,66% maka nilai realisasi PMDN mengalami penurunan yang disebabkan beberapa faktor antara lain lesunya ekonomi akibat pandemi covid-19.

Tabel 2. 215
Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN
di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi PMDN tahun evaluasi	Rupiah	220,859,000,000	130,740,222,514	109.484.145.881	158847957176	51.884.262.250	
Realisasi PMDN sebelum evaluasi	Rupiah	382,322.260.000	220,859.000.000	130.740.222.514	109484145881	158.847.957.176	
Persentase	%	57.77	59.19	21.25	45.09	32.66	

Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo

Tabel presentase nilai kenaikan/penurunan dari tahun 2018-2023 meningkat ditahun 2018 yaitu 220,859,000,000 dengan realisi PMDN sebelum Evaluasi 382,322.260.000.

2.1.3.2.12 Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Berkaitan dengan Kepemudaan dan Olah Raga di Kota palopo sangatlah penting untuk menunjang kegiatan para pemuda untuk beraktivitas dalam kegiatan yang bersifat positif dan mampu mengekspresikan semua potensi yang dimilikinya. Penyadaran dan pemberdayaan pemuda dilakukan melalui penumbuhan kreativitas pemuda di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan pemanfaatan teknologi digital.

Indikator yang berkaitan dengan hasil capaian kinerja pada perangkat daerah pengampu diukur dari jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kota Palopo. Berdasarkan hasil capaian selama tahun 2017-2022, persentase organisasi pemuda yang aktif mengalami peningkatan.

Tabel 2. 216
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	OKP	151	151	153	73	136	166	
b.	Jumlah seluruh organisasi pemuda	OKP	218	218	218	102	218	215	
Persentase		%	69,3	69,3	70,2	71,6	62,40	77,20	

Sumber Data : Dinas Pemuda danOlah Raga Kota Palopo Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, persentase organisasi Pemuda yang aktif di Kota Palopo dengan jumlah yang aktif berada ditahun 2019 dengan jumlah seluruh organisasi 218 OKP.

Persentase Wirausaha Muda

Wirausaha adalah orang yang membuat suatu produk, menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru hingga mengatur permodalan serta pemasarannya. Tujuan dari berwirausaha antara lain menyebarkan pengaruh wirausaha, membangun karakter wirausaha, membentuk wirausaha yang berkualitas, dan membangun kesejahteraan masyarakat.

Wirausaha muda merupakan orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengbangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan kearah yang lebih baik. Pada era modern seperti saat ini, seringkali kita menemukan beberapa acara seminar yang berkaitan dengan wirausaha. Semboyan yang digaungkan yaitu mandiri dan kreatif. Tidak hanya itu, bahkan anak muda zaman sekarang berbondong-bondong menjadi wirausaha muda sebagai salah satu jalan tempuhnya. Adapun persentase wirausaha muda di Kota Palopo selama tahun 2018-2022 mengalami tren penurunan.

Tabel 2. 217
Persentase Wirausaha Muda di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah wirausaha muda	Kelompok	134	134	136	430	835	621	
b.	Jumlah seluruh wirausaha	Kelompok	7.669	7.669	7.669	3.299	7.669	44.121	
Persentase		%	1,75	1,75	1,77	1,3	10,90	1,40	

Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo Tahun 2023

Jumlah wirausaha muda yang ada di Kota Palopo tertinggi berada pada tahun 2021 yaitu 835 dengan jumlah seluruh wirausaha 7.669.

Cakupan Pembinaan Olahraga

Pembinaan olahraga merupakan usaha yang merupakan proses untuk mencapai prestasi puncak. Pembinaan yang dilakukan tersebut akan sesuai dengan harapan apabila dilaksanakan secara efisien, sitematik, dan berkelanjutan, karena suatu proses pembinaan olahraga membutuhkan waktu yang lama. Persentase pembinaan Olahraga di Kota Palopo sejak tahaun 2017 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan dari seluruh cabang olah raga dengan persentase yang sangat baik 100%.

Tabel 2. 218
Persentase Pembinaan Olahraga di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabor	10	12	16	32	34	34	
b.	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cabor	26	26	27	33	34	34	
Persentase		%	38,46	46,15	59,26	96,96	100	100	

Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo Tahun 2023

Jumlah cabang yang dibina di kota palopo dengan jumlah yang tinggi pada tahun 2022 dengan jumlah seluruh cabang yang terdaftar 100.

Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Pelatih bersertifikasi menjadi indicator kinerja pada perangkat daerah pengampu dikarenakan berkaitan dengan pola pembinaan atlet dan pelatih. Semakin banyaknya pelatih yang telah memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang cabor, akan berdampak pada kualitas atlet yang dihasilkan. Disisi lain pemerintah setempat memiliki andil dalam melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pelatih yang dimilikinya. Adapun cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kota Palopo terdapat selama tahun 2018-2022 masih berada dibawah angka 50%.

Tabel 2. 219
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	27	27	27	23	34	31	
b.	Jumlah seluruh pelatih	Orang	83	83	83	83	62	46	
Persentase		%	32,53	32,53	32,53	27,71	53,10	48,4	

Sumber Data : Dinas Pemuda danOlah Raga Kota Palopo Tahun 2023

Jumlah pelaith sertifikat di Kota Palopodari tahuun 2017-218 tertinggi berada ditahun 2022, 34 dengan jumlah pelatih 62.

Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Sebuah prestasi tidak dicapai dengan suatu proses instan, yang hasilnya bisa dilihat, dirasakan, namun merupakan suatu proses panjang melibatkan berbagai komponen baik internal maupun eksternal. Melahirkan juara merupakan suatu proses panjang mulai dari bagaimana menemukan atlet melalui talents scouting yang tepat dalam mendapatkan bibit atlet yang berkualitas, perkembangan multilateral, tahap spesialisasi sampai nantinya memasuki prestasi puncak (Golden Age). Dibutuhkan pemahaman, pengetahuan dan kesabaran dari pelatih dalam pembinaan atlet muda potensial, agar prestasi yang dinginkan bisa terwujud, dipertahankan dalam waktu yang panjang dan terhindar dari dampak negatif kecenderungan spesialisasi atlet yang terlalu dini.

Sedangkan Pembinaan Atlet Muda yang berkesinambungan dimana latihan harus dilakukan sepanjang waktu, berkelanjutan, terus menerus tentu seusai dengan tahapan tahapan yang telah direncanakan dan di susun yang tertuang tertulis dalam perencanaan latihan dan Program Latihan. Persentase pembinaan atlet muda di Kota Palopo terdapat selama tahun 2018-2022 masih stagnan di angka 20%.

Tabel 2. 220
PersentasePembinaan Atlet Muda di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah atlet pelajar yang dibina	Orang	36	48	-	14	36	
Jumlah seluruh atlet pelajar	Orang	170	170	98	85	176	
Persentase	%	21,2	28,2	0	16.05	20.5	

Sumber : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo

Jumlah atlet pelajar yang dibina dari tahun 2018-2023 tertinggi ditahun 48 dengan jumlah seluruh 170 orang.

Jumlah Atlet Berprestasi

Atlet menurut UU Nomor 3 Tahun 2015 sistem Keolahragaan Nasional Bab I Pasal I Nomor 7 bahwa atlet adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi. Atlet adalah ahli olahraga atau orang yang profesional dalam bidang olahraga. Atlet adalah seseorang yang menggeluti dan aktif melakukan latihan untuk meraih prestasi pada cabang olahraga yang dipilihnya. Atlet berprestasi adalah atlet yang ikut serta dalam pertandingan Nasional pada level tertinggi dan ampu mencapai prestasi tinggi sebagai tim Nasional. Sesuai dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa atlet berprestasi adalah atlet yang memiliki prestasi dan dengan upaya maksimal mampu mencapai level prestasi tinggi dengan turut serta berpartisipasi dalam pertandingan Tingkat Nasional maupun Internasional. Sebelum pandemi covid-19 yakni pada tahun 2018 atlet-atlet Kota Palopo dapat menyumbangkan medali ditingkat nasional. Seiring dengan adanya pandemi covid-19 para atlet-atlet di Kota Palopo mulai menurun persentase prestasi yang dicapainya disebabkan minimnya latihan yang maksimal sehingga mengalami persaingan yang lebih ketat untuk menjadi atlet yang berprestasi.

Tabel 2. 221
Persentase Atlet Berprestasi di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	7	4	-	1	0	

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo

Jumlah atlet yang memegangi kejuaraan tertinggi di tahun 2019

Jumlah Prestasi Olahraga

Prestasi olahraga merupakan hasil optimal yang dicapai oleh seorang olahragawan (atlet) atau sekelompok orang (tim/regu) dalam bentuk kemampuan dan keterampilan dalam menyelesaikan tugas-tugas, baik dalam kompetisi beregu maupun individu.

Prestasi olahraga dapat dicapai memerlukan menejerial atau manajemen yang baik, efektivitas dalam melaksanakan kegiatan merupakan tuntutan bagi setiap organisasi untuk mencapai tujuan. Ilmu manajeman dalam organisasi keolahragaan sangatlah memiliki dampak baik jika dijalankan atau dikelola dengan benar dan teratur. Hasil capaian prestasi cabor yang dimenangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan.

Tabel 2. 222
Persentase Prestasi Olahraga di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun	7	4	-	1	71	

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo

Presentase prestasi olahraga dari tahun 2018-2023 jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun terus meningkat.

2.1.3.2.13 Bidang Urusan Statistik

Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan Sistem Data Statistik Terintegrasi (Simdasi). Hal itu digunakan sebagai penunjang dimulainya Satu Data Indonesia (SDI). SDI tersebut ke depan akan menghilangkan perbedaan data yang saat ini kerap terjadi. "Masih ada inkonsisten data baik di level nasional maupun daerah. Di Kota Palopo terkait dengan ketersediaan sistem data statistik yang terintegrasi masih dalam proses penginputan.

Tabel 2. 223
Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Belum Ada	Dalam Proses	Dalam proses penginputan	Dalam proses penginputan	Dalam proses penginputan	

Sumber : Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo

Tersedianya sistem data dan statistik yang teritegrasi ditahun 2018 belum ada proses.

Buku "Palopo Dalam Angka"

Kota Palopo Dalam Angka yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan institusi lain. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Kota Palopo. Untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatan data, disertakan juga penjelasan teknis dari setiap jenis statistik yang disajikan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumen data, publikasi Kota Palopo Dalam Angka akan terus mengalami penyempurnaan baik struktur maupun muatannya. Untuk mempermudah akses terhadap publikasi Kota Palopo Dalam Angka dan tabel-tabel berdasarkan subjek.

Tabel 2. 224
Ketersediaan Buku "Palopo Dalam Angka" Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Buku Palopo Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

Sumber : Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo Tahun 2023

Ketersediaan buku palopo dalam angka dari tahun 2018-2023 buku palopo dalam angka Ada.

Buku "PDRB"

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Angka PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Angka PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Adapun Tabel Ketersediaan Buku PDRB Kota Palopo setiap tahunnya tercukupi.

Tabel 2. 225
Ketersediaan Buku "PDRB" Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

Sumber: Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo

Ketersediaan buku PDRB di Kota Palopodari tahun 2018-2023 ada.

2.1.3.2.14 Bidang Urusan Persandian

Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Indikator ini menggambarkan tingkat pengamanan informasi pada tingkat Pemerintah Kota dan Perangkat daerah Kota Palopo. Semakin tinggi persentase indikator ini menunjukkan bahwa pengamanan informasi dari aspek jaminan terhadap keotentikan, keutuhan, ketersediaan, dan nir penyangkalan informasi pada pemerintah Kota Palopo, lebih baik. Selama tahun 2018-2022 hasil capaian pada indicator ini sangat baik karena dalam dua tahu berturut-turut mencapai 100%.

Tabel 2. 226
Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi
di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	OPD	38	39	39	49	49	
Jumlah total perangkat daerah	OPD	49	49	49	49	49	
Persentase	%	77,55	79,59	79,59	100	100	

Sumber : Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo

Presentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi di Kota Palopo tahun 2018-2023 jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah meningkat ditahun 2022 dengan total perangkat daerah 100 OPD.

2.1.3.2.15 Bidang Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Festival budaya yang dimaksudkan adalah festival yang mengangkat tradisi sebagai bagian dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Festival dalam kategori ini adalah peristiwa yang dikelola baik oleh komunitasnya, atau dengan bantuan pemerintah yang telah memasukkannya ke dalam program kerjanya. Festival merupakan sarana komunikasi yang penting untuk membangun, memberdayakan dan pengakuan suatu identitas budaya. Festival seni dan budaya juga merupakan upaya untuk mempertahankan nilai – nilai seni budaya dan nilai tradisional. Di tahun 2022 jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan 10 event, terjadi peningkatan daripada tahun sebelumnya yang hanya 8 event. Selama tahun 2021-2022 terjadi peningkatan event seni budaya dikarenakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi akibat pandemic.

Tabel 2. 227
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	18	14	5	8	10	

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Palopo

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Palopo dari tahun 2018-2023 dengan jumlah penyelenggaraan mengalami naik turun.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Pengertian Cagar Budaya dalam UURI No. 11 Tahun 2010 : “Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.”

Berdasarkan Undang-Undang bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan atau yang biasa disebut dengan bersifat tangible. Artinya bahwa warisan budaya yang masuk ke dalam kategori Cagar Budaya adalah warisan budaya yang berwujud konkrit, dapat dilihat dan diraba oleh indra, mempunyai massa dan dimensi yang nyata. Contohnya batu prasasti, candi, nisan makan, dll. Warisan budaya yang bersifat intangible seperti bahasa, tarian dan sebagainya tidak termasuk pada kategori Cagar Budaya.

Hasil capain indicator menunjukkan hasil yang menggembirakan yaitu persentase benda, situs dan kawasan cagarb yang dilestarikan adalah 100%.

Tabel 2. 228
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Buah	148	148	148	148	148	
Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah	Buah	149	149	148	148	148	
Persentase	%	99,32	99,32	100	100	100	

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Palopo

Presentase Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Palopo tahun 2018-2023 terus berada di posisi 148 ditahun 2022 dengan total benda 148.

Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi

Dari 149 buah total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah, yang merupakan aset daerah sebanyak 148 buah. 1 buah merupakan rumah pribadi yang berada dalam kawasan cagar budaya sehingga tidak dilakukan pelestarian oleh pemerintah Kota Palopo. Karya Budaya yang direvitalisasi dan invetarisasi selama tahun 2018-2022 baru mencapai 3 buah.

Tabel 2. 229
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	0	0	3	3	

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Palopo

Tabel jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Kota Palopo di tahun 2021 dan 2022 berjumlah 3.

Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu

Pengelolaan cagar budaya secara terpadu di Kota palopo Pertama, dengan melindunginya. Kedua, dengan mengembangkannya. Dan ketiga, dengan memanfaatkannya. Perlindungan adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahannya, dengan cara penyelamatan, pengamanan, pewilayahan (zonasi), pemeliharaan, serta pemugaran. Adapun jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan dari 51 menjadi 53.

Tabel 2. 230
Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu di Kota Palopo Tahun 2018 - 2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	51	52	53	53	53	

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Palopo

Tabel jumlah cagar budaya yang dikelola secara trpadu di Kota Palopo terus mengalami peningkatan

2.1.3.2.16 Bidang Urusan Perpustakaan

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Menurut Undang-undang perpustakaan menyatakan bahwa perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia.

Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Tujuan perpustakaan adalah untuk membantu masyarakat dalam segala umur dengan memberikan kesempatan dengan dorongan melelui jasa pelayanan perpustakaan agar mereka: Dapat mendidik dirinya sendiri; Dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapangan ilmu pengetahuan; Dapat memelihara kemerdekaan berfikir yang konstruktif untuk menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang lebih baik; Dapat mengembangkan kemampuan berfikir kreatif; ;Dapat meningkatkan tarap kehidupan sehari hari dan lapangan pekerjaannya; Dapat menggunakan waktu senggang dengan baik yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial.

Indikator kinerja Dinas Perpustakaan dapat dilihat dari jumlah kunjungan setiap tahunnya, baik yang meminjam buku maupun melaksanakan aktivitas belajar dan membaca di dalam perpustakaan. Selama tahun 2018-2022 persentase jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Palopo mengalami penurunan dari 9,81% menjadi 6,1%. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat literasi masyrakat di Kota Palopo masih sangat rendah < 10%.

Tabel 2. 231
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	Orang	14.456	14.958	35.571	13.947	9.492	
Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	Orang	147.300	147.300	153.110	154.808	157.251	
Persentase	%	9,81	10,15	23,23	9,01	6.1	

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Palopo

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Palopo dengan jumlah kunjungan terbanyak di tahun 2020 dengan jumlah populasi yang dilayani 153.110 orang.

Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Dinas Perpustakaan Daerah Kota Palopo memiliki beberapa koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah yang terdiri dari berbagai macam buku mulai dari Ilmu Politik, sosial dan Ilmu pengetahuan, Buku Cerpen, Buku Pendidikan, dll. Setiap tahunnya jumlah koleksi buku di perpustakaan bertambah baik melalui pengadaan APBD dan bantuan hibah buku dari PERPUSNAS RI.

Adapun jumlah koleksi buku yang tersedia di perustakaan daerah mengalami tren peningkatan setiap tahunnya dari 1991 buah menjadi 16.500 buah pad tahun 2022, kenaikan yang signifikan ini terjadi karena adanya bantuan hibah buku dari PERPUSNAS.

Tabel 2. 232
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buah	1.191	7.656	7.615	7.460	16.500	
Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buah	2.360	19.891	20.279	7.772	30.835	
Persentase	%	50,46	38,49	37,55	96,00	53.6	

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Palopo

Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Palopo di tahun 2018-2023 dengna jumlah koleksi buku yang tersedia di tahun 2022 yaitu 16.500 dengan jumlah buku yang tersedia di perpusakaan 30.835.

Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk

Indikator rasio perpustakaan per satuan penduduk menjadi salah satu indicator kinerja utama dikarenakan ketersedian fasilitas perpustakaan baik yang berada di area public maupun di dalam fasilitas sekolah guna mendukung kebutuhan literasi masyrakat maupun siswa. Hasil capaian indicator ini menunjukkan bahwa per 1000 penduduk hanya terdapat 2 fasilitas perpustakaan. Walaupun jumlah perpustakaan setiap tahunnya mengalami peningkatan sejak tahun 2020, tetapi tidak didukung dengan minat baca masyarakat yang masih rendah.

Tabel 2. 233
Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah perpustakaan	Jiwa	208	208	216	228	231	
Jumlah penduduk	Jiwa	180.678	184.614	184.681	187.331	190.867	
Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk	Per 1000	1,16	1,13	1.17	1.22	2	

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Palopo

Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2018-2023 dengan jumlah perpustakaan di tahun 2022 sebanyak 231 dengan jumlah penduduk 2

Jumlah Rata – Rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Indikator rata-rata pengunjung perpustakaan setiap tahunnya menjadi indicator capaian kinerja utama pada Dinas Perpustakaan. Semakin banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Palopo menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengkampanyekan budaya literasi, demikian juga sebaliknya apabila jumlah pengunjung perpustakaan sedikit mengindikasikan bahwa minat baca masyarakat masih rendah. Selama tahun 2018-2022 hasil menunjukkan tren menurun, hanya mencapai 791 pengunjung di tahun 2022.

Tabel 2. 234
Perpustakaan Per Tahun di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah rata- rata pengunjung perpustakaan per tahun	1.204	1.246	2.964	1.162	791	

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Palopo

Perpustakaan Per Tahun di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 dengan jumlah di tahun 2022 yaitu 791.

Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Jumlah koleksi judul buku perpustakaan merupakan salah satu indicator yang menunjukkan bahwa kelengkapan fasilitas penunjang tersedia dengan lengkap. Kelengkapan fasilitas yang salah satunya adalah buku yang dapat menarik minat baca masyarakat. Semakin banyaknya buku baru yang disediakan oleh perpustakaan membawa pengaruh terhadap minat baca baik masyarakat maupun pelajar sekolah/mahasiswa.

Hasil capaian indicator ini menunjukkan terjadi kenaikan yang sangat signfikan koleksi buku di perpustakaan umum Kota Palopo dari 1191 buku menjadi 16.500 buku, dikarenakan adanya bantuan hibah buku dari PERPUSNAS RI.

Tabel 2. 235
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	1.191	404	185	7.460	16.500	

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Palopo

Jumlah koleksi juduul buku perpustakaan di Kota Palopo tahun 2028-2022 meningkat di tahun 2022 yaitu 16.500.

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai berkaitan dengan peningkatan kapasitas aparatur yang dilakukan secara internal oleh perangkat daerah pengampu, baik melalui jenjang diklat maupun alih fungsi jabatan fungsional umum menjadi pustakawan.

Hasil capaian menunjukkan terjadinya peningkatan dari sebelumnya yang masih 1 tenaga pustakwan, menjadi 3 pustakawan di tahun 2022, yang menjadi persentase SDM pustakwan yang dimiliki perpustakaan Kota Palopo adalah 100%.

Tabel 2. 236
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	Orang	1	2	3	3	3	
Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	Orang	3	3	3	3	3	
Persentase	%	33	67	100	100	100	

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Palopo

Jumlah pustakawan tenanga teknis dan penilaiann yang bersertifikat di Kota Palopo di tahun 2018-2023 dengan jumlah pustawakan 3 dengan jumlah tenaga teknis dan penilai 100.

2.1.3.2.17 Bidang Urusan Kearsipan

Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Kearsipan merupakan bagian dari kegiatan tertib administrasi yang bertugas menyimpan dan memelihara arsip dan dokumen penting milik pemerintah baik berupa file bentuk fisik maupun yang sudah dialihmediakan menjadi bentuk digital. Perangkat daerah yang bertugas mengampu urusan kearsipan adalah Dinas Kearsipan Kota Palopo. Salah satu indicator capaian kinerja pada perangkat daerah ini adalah persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku.

Hasil capaian indicator ini menunjukkan perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku masih rendah yaitu kurang 25% dari jumlah total perangkat daerah yang ada di Kota Palopo.

Tabel 2. 237
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku	OPD	8	12	6	8	10	
Jumlah perangkat daerah	OPD	49	49	49	49	49	
Persentase	%	16.33	24,48	12,24	16.33	20.40	

Sumber : Dinas Kearsipan Kota Palopo

Presentase perangka daerah yang mengelola arsip secara baku di Kota Palopo di tahun 2018-2020 jumllaah perangkat daeraah yang menerapkan arsip secara baku tertinggi di tahun 12 dengan jumlah 49 OPD.

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Peningkatan SDM pengelola kearsipan adalah bagian dari penilaian indicator kinerja utama untuk mendukung pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan. Selama tahun 2018-2022 terjadi peningkatan jumlah kegiatan dalam menunjang SDM kearsipan dari 6 kegiatan di tahun 2018 menjadi 20 kegiatan pada tahun 2022. Adannya peningkatan jumlah kegiatan kearsipan diharapkan agar terciptanya tertib administrasi dokumen maupun konsistensi penyimpanan dan pengarsipan dokumen setiap tahunnya yang dilakukan oleh perangkat daerah lainnya.

Tabel 2. 238
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

Uraian	Satuan Kegiatan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan		6	7	6	15	20	

Sumber : Dinas Kearsipan Kota Palopo

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Palopo tahun 2018-2023 jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan membaik.

2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1 Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan

Kelautan dan perikanan masuk dalam urusan pilihan, perangkat daerah pengampu urusan ini adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Palopo. Dinas ini mengelola kegiatan yang dilakukan oleh nelayan baik perikanan tangkap, budidaya, sampai pengolahan hasil tangkap. Produksi perikanan menjadi indikator kinerja utama dikarenakan Kota Palopo memiliki batas wilayah laut yang berada berlokasi di teluk Bone. Hasil capaian di Kota Palopo menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 2021 sampai tahun 2022 yang hasil tangkapnya melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian ini tidak hanya karena kayanya sumber daya laut yang berada di wilayah teluk Bone, tetapi juga dukungan dari pemerintah dalam memfasilitasi sarana prasarana perikanan tangkap bagi nelayan Kota Palopo.

Tabel 2. 239
Persentase Produksi Perikanan Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah produksi ikan	Ton	18.387,50	133.481,18	145.144,27	176.897,40	193.005,27
Target daerah	Ton	18.397,00	143.016,07	149.788,08	156.497,19	163.533,96
Persentase	%	99,95	93,33	96,90	113,04	118

Sumber : Dinas Perikanan Kota Palopo

Presentase Produksi Perikanan di Kota Palopo di tahun 2018-2023 dengan jumlah produksi ikan yang meingkat di tahun 2022 yaitu 193.0005,27 dengan target daerah 163.533,96.

Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan merupakan bagian dari kampanye gemar makan ikan. Ikan adalah bagian dari penyediaan protein dan diversifikasi kebutuhan protein hewani. Semakin banyak asupan kebutuhan protein hewani berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak usia dini, dan imunitas tubuh. Oleh karena itu konsumsi ikan menjadi indikator kinerja utama pada Dinas Perikanan dan Kelautan. Hasil capaian indikator ini mengalami kondisi yang tidak begitu baik, karena selama tahun 2018-2022 mengalami tren penurunan konsumsi ikan dari 58,34 kg per tahun per keluarga di tahun 2018 menjadi 53,98 kg per tahun per keluarga tahun 2022.

Tabel 2. 240
Persentase Konsumsi Ikan di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah konsumsi ikan	Kg	58,34	53,81	55,50	53,17	53.98	
Target daerah	Kg	56,01	54,61	55,84	57,37	58.52	
Persentase	%	104,16	97,62	98,13	92,68	92	

Sumber : Dinas Perikanan Kota Palopo

Presentase Konsusmsi Ikan di Kota Palopo tahun 2018-2023 dengan jumlah konsumsi ikan 53.98 ditahun 2022 dengan jumlah target daerah sebanya 58.52.

Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Kelompok nelayan merupakan kumpulan dari beberapa nelayan yang tergabung dalam kelompok yang berbadan hukum dengan dibuktikan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Pembentukan kelompok nelayan bertujuan untuk kemudahan fasilitas sarana prasarana penunjang, dan pemberdayaan bagi nelayan baik oleh pemerintah maupun swasta. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Hasil capaian indikator kinerja ini dilihat dari persentase cakupan bina kelompok nelayan. Indikator ini diukur dari Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun-n dibagi jumlah kelompok nelayan di Kota Palopo. Selama tahun 2018-2022 terjadi peningkatan kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan oleh pemerintah setempat dari 11,19% menjadi 24,65% di tahun 2022.

Tabel 2. 241
Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun-n	Klpk	15	11	4	1	35	
Jumlah kelompok nelayan	Klpk	134	142	143	143	142	
Persentase	%	11,19	7,75	2,80	0.70	24.65	

Sumber : Dinas Perikanan Kota Palopo

Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Palopo Tahun 2018-2023 meningkat di tahun 2022 dengan jumlah 35 dengan jumlah kelompok nelayan 142.

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan merupakan hasil dari perkumpulan nelayan yang telah tergabung dalam kelompok yang berbadan hukum. Produksi perikanan kelompok nelayan masuk dalam indikator kinerja utama karena berkaitan dengan ketersediaan pasokan ikan dan capaian ukuran atas fasilitas sarana prasarana yang telah diberikan pemerintah Kota Palopo.

Selama tahun 2018-2022 persentase hasil produksi perikanan kelompok nelayan mengalami tren yang signifikan dari 72,54% menjadi 6% di tahun 2022. Hal ini menjadi evaluasi dalam memberikan bantuan kepada kelompok nelayan.

Tabel 2. 242
Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	Ton	13.338,29	14.677,68	15.540,39	11.854,20	9.812,04	
Jumlah produksi ikan di daerah	Ton	18.397,50	133.481,18	172.806,14	176.897,40	193.005,27	
Persentase		72,54%	10,99	8.99	6.70	6	

Sumber : Dinas Perikanan Kota Palopo

Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan di Kota Palopo Tahun 2018-2023 jumlah produksi menurun ditahun 2022 yaitu 9.812,04 dengan jumlah produksi ikan di daerah yaitu 193.005,27.

Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Indikator ini untuk mengetahui luas kawasan lindung perairan terhadap seluas seluruh wilayah perairan yang menjadi wilayah sebuah daerah. Semakin tinggi rasio luas kawasan lindung perairan sebuah daerah, semakin tingginya aspek kehatian-kehatian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan tersebut. Sejak berlakunya UU No 23 Tahun 2014, kewenangan wilayah kelautan menjadi kewenangan pemerintah provinsi sulawesi selatan.

Nilai Tukar Nelayan

Nilai ini adalah Perbandingan antara indeks harga yang diterima Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It) dengan indeks harga yang dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib) yang dinyatakan dalam persentase.Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan > 100 : berarti Nelayan dan Pembudidaya Ikan mengalami surplus. b. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan = 100 : berarti Nelayan dan Pembudidaya Ikan mengalami impas/break even. c. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan < 100 : berarti Nelayan dan Pembudidaya Ikan mengalami defisit. Tingkat kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan pada periode sebelumnya.

Kelautan dan perikanan masuk dalam urusan pilihan, perangkat daerah pengampu urusan ini adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Palopo. Dinas ini mengelola kegiatan yang dilakukan oleh nelayan baik perikanan tangkap, budidaya, sampai pengolahan hasil tangkap. Kesejahteraan nelayan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2023 nilai tukar nelayan (NTN) meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 111,49. Meningkatnya NTN mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan nelayan. Hasil kinerja urusan perikanan selama tahun 2019-2023 untuk sektor perikanan budidaya dan olahan hasil perikanan mengalami peningkatan yang signifikan, berbanding terbalik dari hasil produksi perikanan tangkap yang mengalami penurunan 124.,20 ton (Tabel.35).

Tabel 2. 243
Nilai Tukar Nelayan Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
NTN	98.91	99.64	107.43	109.27	111.49

Sumber : Indikator Makro Sosial Ekonomi Prov.Sulsel, 2023

2.1.3.3.2 Bidang Urusan Pariwisata

Kunjungan Wisata

Sektor pariwisata dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah, yang dapat dijual kepada masyarakat luar maupun dunia internasional. Kota Palopo memiliki potensi yang dapat dikembangkan sehingga berdampak pada kesejahteraan masyrakat setempat. Di Kota Palopo terdapat 12 lokasi wisata alam yang terbagi di berbagai kecamatan yaitu : Kecamatan Mungkajang terdapat Bukit Kambo; Air Terjun Latuppa, dan sungai jodoh; Kecamatan Wara Barat terdapat pemandian Bambalu, batu Papan, Salu tandung/Batu tongkon, Air terjun puncak Palopo dan gua kallo dewata; Kecamatan Wara Timur terdapat pantai Labombo; Kecamatan Bara terdapat pulau Libukang; Kecamatan Wara Utara terdapat Bukit Kambing; Wara Selatan Bukit Sampoddo.

Rata rata wisatawan yang berkunjung di Kota Palopo adalah wisatawan domestic daerah sekitar Luwu raya ataupun wisatawan luar negeri yang sebatas transit dan istirahat sebelum melanjutkan ke destinasi utamanya di Tana Toraja. Jumlah kunjungan di Kota Palopo selama tahun 2018-2022 mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2018 hanya 106.211 orang wisatawan kemudian meningkat menjadi 172.915 atau bertambah 66.704 wisatawan selama 5 tahun.

Tabel 2. 244
Persentase Kunjungan Wisata di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se – Kota Palopo	Orang	106.211	127.410	61.267	68.184	172.915	
Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan se – Kota Palopo	Orang	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000	
Persentase	%	101,15	115,83	53,27	56,82	138.33	

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Palopo

Persentase Kunjungan Wisata di Kota Palopo Tahun 2018-2023 jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-Kota Palopo mengalami penigkatan di tahun 2022 yaitu 172.915 dengan jumlah kunjungan wisata yang direncanakan yaitu 125.000.

Lama Kunjungan Wisata

Lama kunjungan wisatawan disuatu daerah dipengaruhi oleh fasilitas yang mendukung bagi wisatwan terutama sarana akomodasi beserta kelengkapannya dan aksesbilitas untuk menuju tempat lokasi wisata. Sesuai dengan kondisi riil di lapangan daya Tarik wisata Kota Palopo adalah wisata alamnya. Kemudian menurut hasil penelitian nyompa., dkk (2022) Kondisi wisata alam di Kota Palopo dapat dikategorikan tiga bagian yaitu baik, sedang, dan buruk. Kategori penilaian dikatakan buruk apabila fasilitas, akomodasi tidak tersedia dan aksesbilitas menuju lokasi sulit dijangkau; Kondisi sedang yaitu aksesbilitas menuju lokasi mudah dijangkau tetapi sarana akomodasi kurang memadai; Kategori baik yaitu aksebilitas mudah dijangkau dan fasilitas akomodasi yang lengkap.

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa rata-rata lama kunjungan per orang wisatawan di Kota Palopo selama tahun 2018-2022 adalah selama dua hari. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat aksesbilitas lokasi wisata yang kurang baik sehingga perlu dilakukan evaluasi agar rata-rata kunjungan wisata meningkat minimal 3 hari.

Tabel 2. 245
Lama Kunjungan Wisata di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rata – rata kunjungan wisata dalam satu tahun	2 Hari	2 Hari	1 Hari	1 hari	2 hari	

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Palopo

Tabel Lama Kunjungan Wisata di Kota Palopo Tahun 2018-2023, rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun yaitu 2 hari ditahun 2022.

PAD Sektor Pariwisata

Efek dari adanya kunjungan wisata di Kota Palopo adalah meningkatnya kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palopo. Selama tahun 2018-2022 kontribusi PAD dari sector pariwisata stagnan dengan angka 5%, kecuali pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu 13,94%. Hasil ini dapat dijadikan evaluasi agar terjadi peningkatan terutama penyediaan fasilitas public terutama aksesbilitas lokasi wisata.

Tabel 2. 246
Persentase PAD Sektor Pariwisata Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PAD sektor pariwisata	7.027.772.114	8.561.179.405	6.428.266.808	7.324.530.315	8.942.731.819	
Total PAD	139.278.661.859,07	167.052.191.690	46.097.862.325,28	140.122.685.326,17	178.686.155.930	
Persentase	5,05	5,12	13,94	5,23	5.00	

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Palopo

Persentase PAD Sektor Pariwisata Kota Palopo Tahun 2018-2023, PAD sektor pariwisata di tahun 2022 sebanyak 8.942.731.819 dengan total PAD 178.686.155.930.

2.1.3.3.3 Bidang Urusan Pertanian

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktivitas padi atau bahan pangan utama bersumber dari kontribusi sector pertanian. Di Kota Palopo sector pertanian masih memberikan kontribusi PDRB nomor dua setelah perdagangan dan jasa. Sektor pertanian di Kota Palopo

dapat memberikan andil terbesar kedua dalam ekonomi di Kota Palopo, dikarenakan fasilitas sarana prasarana penunjang pertanian dimaksimalkan oleh petani dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah melalui perangkat daerah pengampu baik melalui kerangka pendanaan bersumber dari APBD maupun DAK.

Walaupun demikan tidak dapat diakui bahwa setiap tahun jumlah lahan pertanian produktif mengalami penyusutan dikarenakan adanya alih fungsi lahan. Selama tahun 2018-2022 produksi tanaman padi menyusut dari 33.259 ton menjadi 20.280,89 ton di tahun 2022. Disamping it uluas panen tanaman padi semakin berkurang dari 5.200 Ha menjadi 3.324,75 Ha. Walaupun demikian produktifitas khususnya tanaman padi stabil selama 5 tahun di angka > 6% .

Tabel 2. 247
Persentase Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (Ton)						
Padi	33.259	20.355,7	17.585,85	19.383,84	20.280,89	
Jagung	4.988	7.493	5.350	4.315,2	5.119,45	
Ubi Kayu	39,20	-	-	-	-	
Ubi jalar	1,12	-	-	-	-	
Sagu	1,67	2.23	18.2	15,00	15,00	0
Luas panen tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (Ha)						
Padi	5.200	4.954	3.054	3.024	3.324,75	16410
Jagung	684	1.111	866	696	816,5	4737
Ubi Kayu	1	-	-	-	-	0
Ubi Jalar	0	-	-	-	-	0
Sagu	298,84	151.55	103.19	179,36	241,43	0
Produktifitas (Ton/Ha)						
Padi	6,40	6.42	5.76	6,41	6,1	16410
Jagung	7,09	6.75	6.19	6,20	6,27	4737
Ubi Kayu	79,52	-	-	-	-	0
Ubi jalar	2,95	-	-	-	-	0
Sagu	0,01	31.3	0.252	153,06	62	0

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kota Palopo

Dari tabel diatas Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (Ton) tertinggi padi pada tahun 2021 terendah pada tahun 2018. Jumlah Luas panen tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (Ha) terbanyak padi pada tahun 2023 terendah sagu pada tahun 2023. Produktivitas (Ton/Ha) tertinggi padi pada tahun 2023 dan terendah sagu pada tahun 2023.

2.1.3.3.4 Bidang Urusan Perdagangan

Ekspor Bersih Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu indikator kinerja utama pada Dinas Perdagangan, salah satunya adalah ekspor impor dalam suatu daerah. Nilai ekspor impor mengindikasikan bahwa aktivitas perdagangan di daerah tersebut kegiatan usaha sudah memiliki kualitas internasional yang telah memiliki pasar di luar negeri. Kemudian disisi lain kegiatan impor, berhubungan dengan kebutuhan bahan baku maupun kegiatan belanja modal alat pendukung kegiatan usaha.

Kondisi di Kota Palopo selama tahun 2018-2021 terjadi defisit perdagangan yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota memiliki tingkat konsumtif yang tinggi, dikarenkan Kota Palopo bukan kota industry tetapi kota perdagangan dan jasa sehingga factor yang mendorong terjadinya defisit perdagangan adalah sisi konsumsi masyarakat. Kemudian setelah tahun 2022, Kota Palopo melalui instansi BPS yang menghitung neraca perdagangan tidak merilis data ekspor impor di level kabupaten/kota.

Tabel 2. 248
Nilai Ekspor Bersih Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai ekspor	Juta	2,357,785.97	2.539.220,00	2.538.012,08	2.112.272	Tidak ada lagi nilai ekspor yang dihitung BPS	
Nilai impor	Juta	3,033,366.30	3.543.980,00	3.543.980,26	2.914.631		
Nilai ekspor bersih (a-b)	Juta	(945,580)	(1.004.760,00)	(1.005.968,18)	(1.088.801)		

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Palopo

Nilai Ekspor Bersih Kota Palopo Tahun 2018-2023, cenderung menurun dan terhenti di tahun 2022.

Bidang Urusan Perindustrian

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Kelompok pengrajin adalah kumpulan dari beberapa pengarjin yang telah difasilitasi dan dibina baik oleh pemerintah setempat maupun kolaborasi dengan pihak swasta sebagai upya pemberdayaan pengrajin untuk meningkatkan kemampuan seni ataupun perluasan pasar produksi.

Perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam mengkoordinir dan memberdayakan pengrajin di wilayah Kota Palopo adalah Dinas Perindustrian. Selama tahun 2018-2021 jumlah pengrajin di Kota Palopo mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi disisi lain kelompok pengrajin yang telah terfasilitasi oleh pemerintah Kota Palopo melalui perangkat daerah pengampu jumlahnya masih sedikit. Pada tahun 2021 jumlah pengrajin yang mendapatkan bantuan hanya 11. Hasil capain dari indikator ini belum dikatakan baik, dikarenakan jumlah fasilitasi oleh pemerintah Kota Palopo tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kelompok pengrajin.

Tabel 2. 249
Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	Kelompok	0	5	4	11	-	
Jumlah kelompok pengrajin	Kelompok	130	204	237	356	-	
Persentase	%	0,00	2.45	1,69	3,09	-	

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Palopo

Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kota Palopo Tahun 2018-2023, jumlah kelompok pengrajimn yang mendapatkan binaan pemda ditahun 2021 sebanyak 11 dengan jumlah kelompok pengrajin 356 kelompok.

2.1.3.3.5 Bidang Urusan Transmigrasi

Persentase Transmigran Swakarsa

Transmigrasi swakarsa adalah transmigrasi yang dilaksanakan atas kemauan dan biaya sendiri sedangkan pemerintah hanya menyediakan lahan untuk bertani atau mendirikan rumah untuk tempat tinggalnya.Indikator ini untuk mengetahui tingkat partisipasi dan kemampuan masyarakat secara mandiri untuk melaksanakan transmigrasi.

Suatu penyelenggaraan transmigrasi dapat dikatakan berhasil jika memenuhi syarat sebagai berikut: Jumlah penduduk yang ditransmigrasikan ke daerah lain, tiap tahun lebih banyak daripada pertambahan penduduk daerah yang ditinggalkan. Jika di daerah yang ditinggalkan itu tekanan penduduk sudah berangsur-angsur berkurang dan orang-orang yang ditransmigrasikan itu memperoleh tingkat hidup yang lebih baik.Jika antara pendatang baru (transmigran) dan penduduk yang didatangi dapat hidup berdampingan, dapat terjadi perpaduan kebudayaan, sehingga terhindar dan perasaan kesukuan di antara mereka.

Hasil capaian indikator ini di Kota Palopo tidak ada dikarenakan selama Dinas Transmigrasi dibentuk, tidak ada data terkait transmigrasi di Kota Palopo, di dukung pula dengan ketersediaan lahan transmigrasi di Kota Palopo tidak ada.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Sekretariat DPRD

Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota

DPRD Kota Palopo memiliki beberapa Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan merupakan salah satu indicator capaian kinerja Sekretariat Dewan. Adapun ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD Kota Palopo dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 tersedia setiap tahunnya.

Tabel 2. 250
Tersedianya RKT Pada Alat-Alat Kelengkapan DPRD
Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat – alat kelengkapan DPRD provinsi/kab/kota	Ada	Ada	Ada	ada	ada	

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palopo

Tersedianya RKT Pada Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota Palopo Tahun 2018-2023, Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat – alat kelengkapan DPRD provinsi/kab/kota semua tahun ada.

Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD dengan RPJMD dan RKPD

Tersusun dan Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) merupakan salah satu indicator capaian kinerja Sekretariat Dewan. Adapun program kerja DPRD dengan RPJMD dan RKPD Kota Palopo dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 tersedia setiap tahunnya.

Tabel 2. 251
Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD dengan RPJMD dan RKPD
Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja dprd untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahun (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	ada	ada	

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palopo

Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD dengan RPJMD dan RKPDKota Palopo Tahun 2018-2023 tersusun dan terintegrasi untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari 5(lima) tahun Ada.

Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD ke Dalam Dokumen Perencanaan

Terintegrasinya Program – Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD merupakan salah satu indicator capaian kinerja Sekretariat Dewan. Adapun program kerja DPRD yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan anggaran sekretariat Dewan dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 tersedia setiap tahunnya.

Tabel 2. 252
Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen
Anggaran Setwan DPRD Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Terintegrasinya Program – Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palopo

Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kota Palopo Tahun 2018-2023 terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan 5(lima) tahun Ada.

2.1.3.4.2 Sekretariat Daerah

Tabel 2. 253 S
ekretariat Daerah

Sekretariat Daerah	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama (%)						
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)						
Rasio belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)						

2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.5.1 Bidang Urusan Perencanaan

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan makro untuk jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD Kota Palopo diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan perencanaan pembangunan selanjutnya baik untuk jangka menengah maupun jangka pendek.

Tabel 2. 254
Ketersediaan Dokumen RPJPD Kota Palopo

Uraian	Ada/Tidak	PERDA/PERKADA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang RPJPD Kota Palopo Tahun 2005 – 2025

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2021

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah terhadap regulasi pengelolaan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah lima tahunan secara terencana dan memiliki azas legal. Dokumen RPJMD belaku selama lima tahunan. Daerah yang memiliki dokumen RPJMD yang telah perdakan, menunjukkan keseriusan daerah untuk melaksanakan pembangunan secara terencana dan sistematis dan memiliki aspek legalitas.

Tabel 2. 255
Ketersediaan Dokumen RPJMD Kota Palopo

Uraian	Ada/Tidak	PERDA/PERKADA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota Palopo Tahun 2013 – 2018
	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2013 – 2018
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2018 – 2023
	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2023

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah secara terencana dan memiliki azas legal. Dokumen RKPD belaku satu tahun. Daerah yang memiliki dokumen RKPD yang telah perwalkan, menunjukkan keseriusan daerah untuk melaksanakan pembangunan secara terencana dan sistematis dan memiliki aspek legalitas.

Tabel 2. 256
Ketersediaan Dokumen RKPD Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

Uraian	Ada/Tidak	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Perwal Nomor 35 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2018	Perwal Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2019	Perwal Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2020	Perwal Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2021	Perwal Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2022	

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo, 2023.

Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Adalah indikator yang mengindikasikan tersedianya tujuan dan sasaran serta strategis pembangunan kewilyahan sebuah daerah. Daerah yang memiliki dokumen RT RW yang telah diperdakan, dianggap telah memiliki komitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan peduli pada isu isu lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Tabel 2. 257
Ketersediaan Dokumen RTRW Kota Palopo

Uraian	Ada/Tidak	PERDA/PERKADA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Palopo Tahun 2012 – 2032 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Palopo Tahun 2022 – 2041

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo dan Dinas PUPR Kota Palopo, 2023

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah pada perencanaan strategis (lima tahunan) dan perencanaan operasional (tahunan). Angka 100 persen menunjukkan tingkat kesesuaian dan keselarasan dokumen RPJMD dan RKPD sangat baik, yang mencerminkan adanya komitmen dan konsistensi pada apa yang direncanakan dengan apa yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu.

Tabel 2. 258
Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah program RKPD tahun berkenaan	Buah	213	245	261	261	224	
b.	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	Buah	231	250	250	249	224	
Persentase		Persen	92,20	98	104.4	104,82	100	

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2023

Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Kota Palopo Tahun 2018 – 2023, jumlah yang berkenan program RKPD tahun berkenaan cenderung menurun di 2022 sebanyak 224 dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dengan jumlah 2024.

Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah menganggarkan apa yang direncanakan dan merencanakan apa yang dianggarkan. Indikator ini juga menggambarkan kualitas perencanaan dan pengelolaan belanja daerah. Semakin tinggi kesesuaian RKPD dengan APBD semakin baik perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2. 259
Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD
Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah program APBD tahun berkenaan	Buah	158	245	240	249	224	
b.	Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	Buah	213	245	261	261	224	
Persentase		%	74,17	100	91.95	95,40	100	

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2023

Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD Kota Palopo Tahun 2018 – 2023, jumlah APBD tahun berkenaan menurun ditahun 2022.

Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah untuk menselaraskan rencana pengunaan tata ruang termasuk tujuan, sasaran dan program penetaan ruang dengan rencana pembangunan strategis yang ada. Semakin besar tingkat kesesuaian perencanaan strategis dengan tujuan, sasaran dan program di RT RW semakin baik pengelolaan tata ruang di sebuah daerah.

2.1.3.5.2 Bidang Urusan Keuangan

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Adalah indikator yang mengindikasikan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah yang sesuai standar akuntansi yang ada. Clean and clear adalah predikat pengelolaan keuangan daerah tertinggi, disusul Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar dengan Pengecualian dan terendah adalah Disclaimer.

Tabel 2. 260
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Hasil opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2023

Persentase SILPA

Sedangkan SILPA (dengan huruf i besar/kapital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan. Yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Tabel 2. 261
Persentase SILPA Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total SILPA	1,151,996,965.34	34.049.876.279,26	46.816.641.540	46.831.641.540,00	45.004.717.735	
Total APBD	982,957,077,365.89	956.451.857.030,35	943.885.796.203,19	1.001.572.261.730,00	1.077.426.946.659	
Persentase	0.12	3.56	4.96	4,68	4.18	

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2023, audited

Persentase SILPA Kota Palopo Tahun 2018 – 2023,

Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah dalam melaksanakan program yang tertuang dalam APBD daerah. Semakin tinggi atau banyak program APBD yang tidak dilaksanakan, menunjukkan perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang belum baik.

Tabel 2. 262
Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana
di Kota Palopo Tahun 2018 - 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Jumlah program dalam APBD yang tidak dilaksanakan	Prog	2	1	3	0	0	
b.	Total program dalam APBD	Prog	321	381	242	199	163	
	Persentase		0,62	0,30	1,20	0,00	0	
a.	Jumlah kegiatan dalam APBD yang tidak dilaksanakan	Keg	15	12	11	9	0	
b.	Total kegiatan dalam APBD	Keg	1.437	1.615	1.512	1.484	503	
	Persentase		1,04	0,74	0,73	0,61	0	

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2023

Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah memenuhi spending moneter untuk membiayai urusan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Persentase belanja bidang pendidikan yang semakin mendekati angka 20% menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan dan memenuhi perintah UU mewujudkan anggaran yang layak dalam pembangunan sektor pendidikan.

Tabel 2. 263
Persentase Belanja Pendidikan (20%)di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah belanja bidang pendidikan (Rp)	179,786,127,789.00	192.962.137.080,00	184.538.461.945	219.299.185.701,00	216.539.339.050	
Total APBD (Rp)	982,957,077,365.89	956.451.857.030,35	943.885.796.203,19	1.001.572.261.730,00	1.077.426.946.659	
Persentase	18.29	20.17	19.55	21,90	20.10	

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2022

Hasil capaian indicator selama Tahun 2018 sampai dengan 2022 mendekati angka porsi ideal 20 persen. Tahun 2021 sampai dengan 2022 melebihi angka 20 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi program dan kegiatan untuk urusan pendidikan telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah memenuhi spending moneter untuk membiayai urusan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Persentase belanja bidang kesehatan yang semakin mendekati angka 10% menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan dan memenuhi perintah UU mewujudkan anggaran yang layak dalam pembangunan sektor kesehatan.

Tabel 2. 264
Persentase Belanja Kesehatan (10%)di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah belanja bidang kesehatan (Rp)	248.704.751.533	258,102,101,672.28	283.035.096.618,97	350.535.474.412,56	306.396.002.876,00	-	
Total APBD (Rp)	1.015.794.194.014	982,957,077,365.89	956.451.857.030,35	943.885.796.203,19	1.001.572.261.730,00	-	
Persentase	24.48	26.26	29.60	37.14	30,59	-	

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2022

Data di atasmenunjukkan bahwa belanja bidang kesehatan di Kota Palopo pada tahun 2021 telah melebihi angka 10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palopo sangat komitmen terhadap pembangunan bidang kesehatan di Kota Palopo.

Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah mewujudkan APBD yang lebih pro rakyat dan berorientasi pada pembangunan daerah dan masyarakat. Persentase belanja langsung yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa belanja lebih banyak diarahkan pada pembangunan daerah bukan pada pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah saja.

Tabel 2. 265
Persentase Perbandingan Antara Belanja Langsung Tahun 2017-2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021*	2022	2023
Jumlah belanja langsung (Rp)	651.615.212.524	565,990,971,307.28	542.280.383.025,45	527.126.849.065	510.115.212.525	-	
Total APBD (Rp)	1.015.794.194.014	982,957,077,365.89	956.451.857.030,35	943.885.796.203,19	914.214.627.711,55	1.791.745.845.662,29	
Persentase	64.15	57.60	56.70	55.85	55,79		

Jumlah belanja tidak langsung (Rp)	364.178.985.490	416,966,106,058.61	414.171.474.004,90	416.758.947.138	404.178.985.491	1.791.745.845.662,29	
Total APBD (Rp)	1.015.794.194.014	982,957,077,365.89	956.451.857.030,35	943.885.796.203,19	914.214.627.711,55		
Persentase	35.85	42.42	43.30	44.15	44,21		

dengan Belanja Tidak Langsung Kota Palopo Tahun 2017 – 2022

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2022

Data di atas menunjukkan Pemerintah Kota Palopo setiap tahunnya mampu mengalokasikan anggaran yang lebih banyak untuk belanja program dan kegiatan perangkat daerah.

Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Bagi hasil kabupaten/kota berkaitan dengan alokasi anggaran dalam APBD yang dikhususkan untuk program kegiatan di tingkat kelurahan. Kota Palopo adalah kota yang berstatus kotamadya sehingga alokasi untuk dana desa tidak ada, sehingga langsung alokasinya dikhususkan pada level kelurahan. Sesuai Pasal 230 Ayat (4) UU 23/2014 dan Pasal 30 ayat (7) PP 17/2018 tentang Kecamatan, untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK.

Hasil capaian indicator ini menunjukkan selama tahun 2018-2022 persentase bagi hasil untuk melebihi 5% atau sesuai dengan undang-undang pemerintah daerah No.23 tahun 2014 yaitu paling sedikit adalah 5%. Walaupun demikinan pada tahun 2020 dan 2021 tidak terpenuhi 5% dikarenakan adanya refocusing anggaran yang diprioritaskan penanganan pandemic COVID-19.

Tabel 2. 266
Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah belanja bagi hasil Kab/Kota/Desa	56,476,634,835.00	62,767,391,329.43	46.443.640.112,62	49.318.459.502,00	58338891368	
Total APBD	982,957,077,365.89	956,778,838,394.35	943.899.350.653,19	1.001.572.261.730,00	1.077.426.946.659	
Persentase	5.75%	6.56%	4.92	4,92	5.41	

Sumber : BPKAD Kota Palopo

Penetapan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun ketetapan waktu penetapan APBD Kota Palopo selalu pada tepat waktu.

Tabel 2. 267
Ketepatan Waktu Penetapan APBDKota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2022

.6.2.9 Persentase Perbandingan antara Belanja Operasi, Modal dan Tidak Terduga

Indikator persentase perbandingan antara belanja operasional, modal dan tak terduga, dimana Belanja Operasional terhadapa APBD di tahun 2021 terdapat 76,74% dibandingkan dengan pada tahun 2022 hanya berkisar 73,03% dari total APBD, artinya belanja operasional terhadap APBD itu menurun. Untuk Belanja modal terhadapa APBD ditahun 2022 mengalami kenaikan dari 23,06% menjadi 26,92% dari tital APBD. Dan untuk jumlah belanja tidak terduga terhadapa

APBD pada tahun 2021 sekitar 0,20% dibandingkan dengan pada tahun 2022 yang hanya berkisar 0,05%, artinya bahwa pada tahun 2022 belanja tidak terduga dari total APBD mengalami penurunan.

Tabel 2. 268
Persentase perbandingan antara belanja operasi, modal dan tak terduga tahun 2021-2023

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Belanja Operasi terhadap APBD	-	-	-	768,633,962,391.00	786,884,718,945.00	
Total APBD	-	-	-	1,001,572,261,730.00	1,077,426,946,659.00	
Persentase	-	-	-	76.74	73.03	
Jumlah Belanja Modal terhadap APBD	-	-	-	230,938,299,339.00	290,042,227,714.00	
Total APBD	-	-	-	1,001,572,261,730.00	1,077,426,946,659.00	
Persentase	-	-	-	23.06	26.92	
Jumlah Belanja Tidak Terduga terhadap APBD	-	-	-	2,000,000,000.00	500,000,000.00	
Total APBD	-	-	-	1,001,572,261,730.00	1,077,426,946,659.00	
Persentase	-	-	-	0.20	0.05	

2.1.3.5.3 Bidang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Rata – Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Adapun rata-rata lamanya pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Latihan bagi pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Kota Palopo pada dasarnya sama sesuai dengan tingkatan jabatannya.

Hasil capaian pada indicator ini di Kota Palopo selama tahun 2018-2022 tetap konsisten dengan 103 hari dan 893 jam pelajaran.

Tabel 2. 269
Rata- Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Hari/JamPelajaran	103 Hari/893 JP	103 Hari/893 JP	103 Hari/893 JP	103 Hari/893 JP	103 Hari/893 JP	

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Palopo

Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Indikator yang mengindikasikan peningkatan sumber daya manusia aparatur daerah melalui peningkatan jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat formal. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukan semakin tingginya komitmen daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama aparatur sipil negara di daerah.

Hasil capaian indicator ini pada perangkat daerah pengampu capaian masih rendah, dari total ASN di Kota Palopo selama tahun 2018-2022 yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal masih sangat sedikit yaitu kurang dari 2%. Hal ini perlu dilakukan evaluasi dikarenakan sumber pendanaan tidak hanya bersumber dari APBD, banyak Lembaga swasta dan kementerian pusat yang memberikan Pendidikan dan pelatihan secara cuma-cuma yang dikhususkan kepada pegawai pemerintahan.

Tabel 2. 270
Persentase ASN Kota Palopo yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	36	30	4	47	49	
Jumlah total ASN	Orang	4.553	4.503	4.310	4.311	4224	4242
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,79	0,67	0,09	1,09	1.16	

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Palopo

Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Indikator ini merupakan suatu keharusan bagi pemangku jabatan, dimana disetiap tingkatan jabatan memiliki jenjang pendidikan dan pelatihan seperti halnya pejabat struktural eselon IV, eselon II dan eselon II.

Hasil capaian indicator ini pada perangkat daerah pengampu capaian masih rendah, dari total ASN di Kota Palopo selama tahun 2018-2022 yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan strukutural kurang dari 50%. Hal ini perlu menjadi evaluasi dikarenakan system rotasi pegawai yang ada di Kota Palopo sangat dinamis, sehingga diperlukan calon-calon pejabat yang memiliki kapabilitas didukung dengan pernah melaksanakan diklat structural.

Tabel 2. 271
Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan StrukturalTahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat structural	Orang	297	377	379	423	411	
Jumlah total jabatan	Orang	979	993	993	993	993	751
Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	%	30,34	37,97	38,17	42,60	41.39	

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Palopo

Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Indikator yang menujukan jumlah jabatan pimpinan tinggi yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan roda pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Disisi lain harus dituntut untuk melaksanakan komitmen daerah dalam menegakan perda tentang susunan organisasi dan perangkat daerah Kota Palopo yang berlaku pada masanya.

Hasil capaian pada indicator ini pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari 38 menjadi 40. Kondisi ini perlu dilakukan evaluasi karena meningkatnya jumlah pejabat pimpinan tinggi menambah jumlah perangkat daerah yang harus dibentuk, dan imbasnya adalah inefesiensi anggaran dan tidak memberikan kontribusi sama sekali dalam proses pembangunan daerah.

Tabel 2. 272
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Orang	35	33	33	40	40	44

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Palopo

Dari tabel jumlah jabatan pimpinan tinggi instansi pemerintah terbanyak pada tahun 2023.

2.6.3.5 Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah

Hasil dari indicator ini menunjukkan bahwa jumlah jabatan administrasi pada pemerintah Kota Palopo sejak 2016-2020 bertambah sebanyak 75 jabatan dari 900 jabatan pada tahun 2016 menjadi 975 jabatan administrasi pada tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan karena adanya penyederhanaan organisasi perangkat daerah dan alih fungsi menjadi pejabat fungsional.

Tabel 2. 273
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	Orang	951	960	975	975	647	652

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Palopo

Dari tabel jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintahan tertinggi pda tahun 2020-2021 sebanyak 975.

Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Hasil indicator ini menunjukkan bahwa jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada lingkup Pemerintah Kota Palopo sejak 2016-2020 terus berkurang, tetapi sejak tahun 2021 mengalami kenaikan kembali. Kondisi ini yang pertama diakibatkan oleh perpindahan kewenangan tenaga fungsional guru terutama pada tingkat pendidikan menengah pasca terbitnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pendidikan Menengah dikelola oleh

Pemerintah provinsi, sehingga tenaga guru pada pendidikan menengah juga beralih ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua adanya penyederhanaan perangkat daerah sehingga membuat beberapa staf beralih fungsional.

Tabel 2. 274
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	Orang	2.210	2.213	2.122	2.201	2428	2296

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Palopo

Dengan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlaj pemangku jabatan fungsional tertentu padaninstnasi pemerintah terbanyak pada tahun 2023 sedangkan terendah pada tahun 2021.

2.1.3.5.4 Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Penelitian pengembangan atau research and development (R&D) adalah model penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan kinerja organisasi yang diawali dengan riset kebutuhan kemudian dilakukan pengembangan untuk menghasilkan sebuah bentuk dan model pelayanan yang lebih efisien untuk diterapkan dilapangan.

Adapun persentase implementasi rencana kelitbangan pada tahun 2018 terdapat 11 program dibandingkan pada tahun 2022 hanya terdapat 2 program atau dapat dikatakan implementasi riset dalam kegiatan pemerintahan di Kota Palopo masih sangat rendah.

Tabel 2. 275
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kelitbangan dalam RKPD	Prog	11	6	11	2	2	
Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	Prog	11	6	11	2	2	
Persentase	%	100	100	100	100	100	

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo

Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Penelitian tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan.

Penelitian dan pengembangan bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun persentase pemanfaatan hasil kelitbangan pemerintah kota palopo mencapai 100% selama dua tahun berturut-turut.

Tabel 2. 276
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti		4	3	2	7	7	
Jumlah kelitbangan dalam Renja perangkat daerah		11	5	4	7	7	
Persentase	%	36,36	50	50	100	100	

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo

Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah

Indikator yang mengindikasikan komitmen daerah dalam menerapkan inovasi secara terus menerus dalam rangka peningkatan kinerja. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin besarnya komitmen perangkat daerah dalam memperbaiki kualitas kinerja dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun persentase kebijakan inovasi yang diterapkan pemerintah kota palopo mencapai 100% selama tiga tahun berturut-turut.

Tabel 2. 277
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah
Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	Buah	14	18	18	15	18	
Jumlah inovasi yang diusulkan	Buah	23	49	18	15	18	
Persentase	%	60,87	36.3	100	100	100	

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo

2.1.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pengawasan

2.1.3.6.1 Inspektorat Daerah

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan

Hasil capaian indicator ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dalam menindaklanjuti temuan di lingkup Pemerintah Kota Palopo justru semakin membaik. Jika pada tahun 2018, persentase temuan yang ditindaklanjuti pada angka 46,54% pada tahun 2022, temuan yang ditindaklanjuti meningkat menjadi 93,84 %. Capaian ini mengindikasikan bahwa semakin tahun ketaatan pemerintah dalam melaksankan program dan kegiatan yang semakin ketat sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan menurunnya penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Tabel 2. 278
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan
di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		20182	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	Kasus	202	158	621	407	442	
Jumlah rekomendasi total temuan	Kasus	434	211	636	437	471	
Persentase	%	46,54	75	97,64	93,14	93.84	

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Palopo

Persentase Pelanggaran Pegawai

Hasil dari capaian indicator ini menunjukkan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh ASN mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa ASN telah patuh melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan koridor peraturan yang telah ditetapkan. Selama tahun 2018-2021 jumlah ASN yang dikenai sanksi kurang dari 40 orang. Keterbatasan data yang dimiliki oleh perangkat daerah pengampu maka hasil capaian indicator ini hanya sampai tahun 2021.

Tabel 2. 279
Persentase Pelanggaran Pegawai di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah ASN yang dikenai sanksi	Orang	0	41	37	38	-	
Jumlah total ASN	Orang	4.544	4.503	4.310	4.308	-	
Persentase	%	0,00	0,91	0.86	0.88	-	

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Palopo

Jumlah Temuan BPK

Hasil capaian indicator ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sebanyak 16 jumlah temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, namun tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 6 temuan. Kondisi ini mencerminkan bahwa salah satu fungsi Inspektorat Kota Palopo yakni melaksanakan supervisi, berjalan semakin baik sehingga perangkat daerah lebih baik dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Tabel 2. 280
Jumlah Temuan BPK di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Temuan BPK	16	12	27	14	6	

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Palopo

2.1.3.6.2 Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilakukan sebagai upaya strategis untuk membangun aparatur negara yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan serta pembangunan nasional.

Reformasi Birokrasi sangat penting mengingat saat ini tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sangat tinggi. Masyarakat telah menjadi pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Palopo dari tahun 2019 mencapai nilai 52,70 dan ditahun 2022 mengalami kenaikan dengan nilai 55,09 dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2. 281
Indeks Reformasi Birokrasi (nilai) tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)	50.09	52.70	50.33	52.13	55.09	58.92

Sumber : Setda Kota Palopo

Indeks Reformasi Birokrasi (nilai) tahun 2019-2023 dengan indeks reformasi birokrasi (nilai) meningkat ditahun 2022 dengan jumlah 58.92.

2.1.3.7 Indikator Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan

2.1.3.7.1 Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan public

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu tuntutan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, Pemerintah Kota Palopo secara rutin melakukan survey untuk melihat aspek kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang telah diberikan. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertera pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannyaMelalui hasil survey ini, diharapkan dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan kepada Pemerintah Kota Palpo di masa yang akan datang.
Terkait dengan Indek Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik Kota Palopo dari tahun sebelumnya mengalami Kenaikan sekitar 55,09% diabndingkan dengan tahun sebelumnya. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik tahun 2019-2023 IKM meningkat 83.10.

Tabel 2. 282
Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik tahun 2019-2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik	79.9	80.30	83.01	83.10	83.10

Sumber : setda Kota Palopo

2.1.3.7.2 Capaian standar pelayanan minimal pemerintah kota palopo

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima.

SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan peraturan menteri dalam negeri (pemendagri) republik indonesia nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian, maka pemerintah daerah melalui prangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif. Untuk itu, dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM, khususnya pada Perangkat Daerah terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun

berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional. Adapun capaian standar pelayanan minimal di Kota Palopo pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021.

Tabel 2. 283
Capaian standar pelayanan minimal pemerintah kota palopo tahun 2019-2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Capaian SPM	92.23	88	81.77	83.83	82.45

Sumber : setda Kota Palopo

Capaian standar pelayanan minimal pemerintah kota palopo tahun 2019-2023, capaian standar pelayanan minimal pemerintah Kota Palopo ditahun 2023 dengan nilai 82.45

2.1.3.7.3 Predikat capaian kinerja SAKIP Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah bertujuan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui pertanggungjawaban kinerja yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang sesuai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras. Petunjuk Teknis implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang menjelaskan secara detail mengenai perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah.

Adapun predikat capaian kinerja SAKIP pemerintah kota palopo dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan dari 52,43 menjadi 62,40.

Tabel 2. 284
Predikat capaian kinerja SAKIP Pemerintah tahun 2019-2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Predikat capaian kinerja SAKIP pemerintah	52.43	60.03	61.01	62.40	

Sumber : Setda Kota Palopo 2023

Predikat capaian kinerja SAKIP Pemerintah tahun 2019-2023, mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan jumlah 62.40.

2.1.3.7.4 Nilai Evaluasi LPPD

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILLPD) kepada Masyarakat, Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LPPD merupakan informasi utama untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Adapun nilai evaluasi LPPD Pemerintah Kota Palopo dari tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan dari nilai 52,43 menjadi 62,40.

Tabel 2. 285
Nilai Evaluasi LPPD tahun 2019-2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Predikat capaian kinerja LPPD pemerintah	52.43	60.03	61.01	62.40	

Sumber : setda Kota Palopo 2023

Nilai Evaluasi LPPD tahun 2019-2023 dengan predikat capaian kinerja LPPD pemerintah meningkat ditahun 2022 dibandingkan tahun 2019.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.1.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah.

2.1.4.1.1 PDRB per Kapita

Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dibagi jumlah penduduk digunakan untuk membandingkan pertumbuhan PDRB per kapita setiap tahunnya. PDRB per kapita Kota Palopo mengalami tren kenaikan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, kemudian tahun 2020 tidak mengalami kontraksi walaupun terjadi pandemi COVID-19. Pendapatan per kapita masyarakat Kota Palopo pada tahun 2022 sebesar Rp.31.984.249 per tahunnya, sedangkan per bulan sebesar Rp.2.665.354.

Tabel 2. 286
PDRB Per Kapita Kota Palopo Tahun 2010-2023

Tahun	Rupiah	Jiwa	Rupiah	
	PDRB ADHK (Milyar)	Pop	PDRB per Kapita	PDRB per Kapita/Bln
2010	2913.05	147932	19691819	1640985
2011	3143.19	149419	21036084	1753007
2012	3363.25	152703	22024802	1835400
2013	3633	160819	22590647	1882554
2014	3889.24	164903	23585011	1965418
2015	4140.87	168894	24517578	2043132
2016	4428.50	172916	25610684	2134224
2017	4745.90	176907	26827089	2235591
2018	5102.99	180678	28243545	2353629
2019	5447.36	184614	29506738	2458895
2020	5472.08	184681	29629887	2469157
2021	5768.28	187331	30791888	2565991
2022	6104.74	190867	31984249	2665354
2023	6369.71	177526	35880434	29900369

Sumber : BPS Kota Palopo, diolah

2.1.4.1.2 Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhanya (pangan dan non pangan) dalam periode waktu tertentu. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Semakin besar belanja dan konsumsi non pangan, semakin besar tingkat kesejahteraan masyarakat. Data di atas menunjukkan bahwa konsumsi non pangan per kapita masyarakat Kota Palopo sepanjang tahun 2017-2023 selalu berada di atas angka konsumsi pangannya. Artinya sebagian besar pendapatan masyarakat di Kota Palopo sepanjang kurun waktu tersebut di atas dipakai lebih banyak untuk belanja non pangan. Ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Palopo sudah relatif cukup baik.

Tabel 2. 287
Persentase Pengeluaran Konsumsi RT Non Pangan Per Kapita
di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Makanan	Rp	529.701	623,068	536662	560.105	628.171	612.708	720.680
Pengeluaran Non Makanan	Rp	570.813	662,290	651984	679.533	691.524	677.998	824.674
Total Pengeluaran Konsumsi	Rp	1,101	1,285,358	1,188,646	1.012.580	1.309.695	1.290.706	1.545.354
Rasio	%	51.87	51.53	54.85	67,11	52,80	52,53	53.36

Sumber : BPS Palopo, 2024

2.1.4.1.3 Produktivitas Total Daerah

Produktifitas total daerah diperoleh dengan membagi nilai tambah sektor lapangan usaha dengan jumlah angkatan kerja yang ada dalam kurun waktu tertentu. Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (17 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. Hasil menunjukkan bahwa pada tahun 2017, seorang tenaga kerja yang bekerja hanya menghasilkan nilai tambah produk sebesar 86.69 juta/tahun dan pada tahun 2023 mengalami meningkat menjadi 110.66 juta/tahun/tenaga kerja.

Tabel 2. 288
Produktivitas Total Daerah Kota Palopo Tahun 2017-2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Nilai Tambah Sektor (= Jumlah PDRB (Hb/Juta)	6.550.688,67	7.285.142,35	7.942.480	6.550.688,68	7.285.142,36	9.767.890	10.499.830
Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	75.563	75.829	80.854	82.706	85.352	91.960	94.881
Produktifitas Total Daerah (Juta/Thn)	86.69	96.67	98.23	79,20	85,35	106.22	110.66

Sumber Data : Diolah dari Buku PDRB Kota Palopo 2021, diolah

2.1.4.1.4 Ekspor barang dan Jasa

Kegiatan ekspor dan impor merupakan kegiatan ekonomi yang memberikan dampak secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan daya saing suatu daerah. Wilayah yang memiliki angka ekspor yang tinggi berpengaruh terhadap aktivitas produksi barang/jasa baik dari sektor industri besar sampai kecil. Imbas adanya kegiatan skala produksi berorientasi ekspor membuka peluang investasi masuk. Investasi tersebut memberikan manfaat kepada daerah untuk menciptakan lapangan kerja. Pada umumnya data yang digunakan untuk melihat data ekspor yang ada di daerah bersumber dari dinas perdagangan, asosiasi pengusaha (eksportir/Importir) ataupun kantor bea cukai setempat.

Kota Palopo adalah kota perdagangan jasa yang memiliki lokasi jauh dari Ibu Kota Provinsi Makassar dan bukan bagian dari Kota/Kab aglomerasi industri Makassar Maros Gowa, sehingga tidak ada industri besar/kecil yang memiliki aktivitas produksi ekspor secara langsung ke luar negeri. Berbeda dengan daerah lain di wilayah Luwu Raya lain, yaitu Luwu Timur, Toraja, dan Toraja Utara yang memiliki industry pertambangan nikel internasional dan Toraja Toraja Utara dengan sektor jasa pariwisata budaya yang sudah menjadi tujuan prioritas wisatawan asing untuk berlibur di wilayah Sulawesi Selatan. Terbukti bahwa Kota Palopo bukan Kota yang memiliki aktivitas industry orientasi ekspor terlihat dari data Net Ekspor yang bersumber dari BPS Kota Palopo minus atau dapat dikatakan ekspor 0%. Sebagai bahan rekomendasi dalam penyusunan dokumen perencanaan daya saing ekonomi daerah untuk kegiatan ekspor Kota Palopo atau aktivitas perdagangan luar negeri, perlu dilakukan perintisan melalui perangkat daerah pengampu dengan menggandeng Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor. Sebelum hal tersebut dilakukan diperlukan standarisasi dan sertifikasi produksi usaha kecil.

Grafik 2. 11
Net Ekspor Barang/Jasa Kota Palopo Tahun 2010-2023

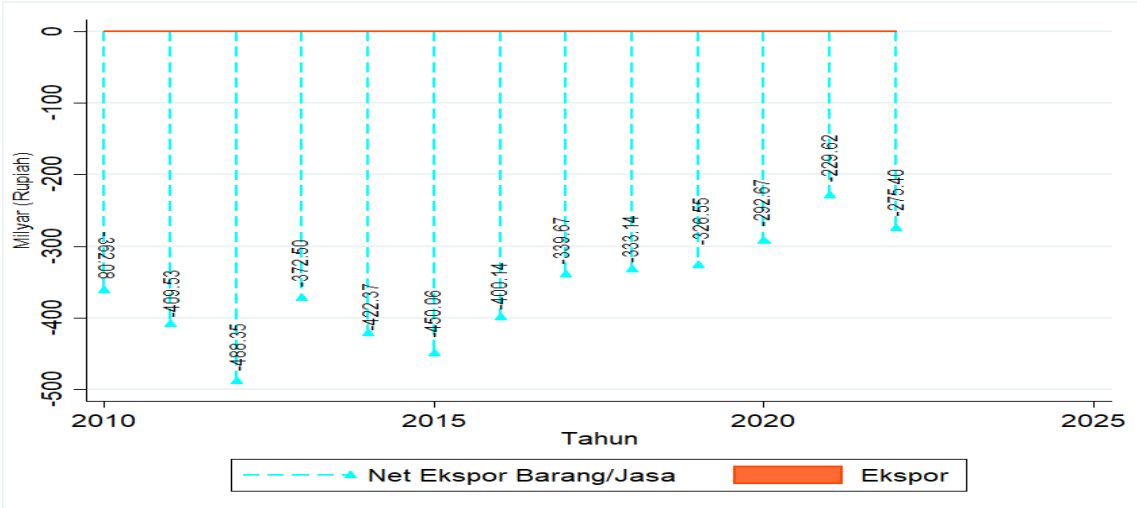

Sumber : BPS, diolah

2.1.4.1.5 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan mengindikasikan bahwa suatu daerah dapat menciptakan lapangan kerja sendiri melalui kemampuan individunya berwirausaha, sehingga berpengaruh dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dan mengurangi angka pengangguran. Berdasarkan data Kota Palopo menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang berwirausahaa pada tahun 2017 yang nilainya sebesar 33,66% yang berarti dari total angkatan kerja adalah penduduk yang berwirausahaa. Pada tahun 2018 Rasio Kewirausahaan menurun menjadi 31,70% yang berarti dari total angkatan kerja adalah penduduk yang berwirausahaa. Ditahun 2019 terus menurun menjadi 27,74% yang berarti total angkatan kerja yang berwiraussahaa. Pada tahun 2020 Rasio kewirausahaan kembali meningkat menjadi 27.88%, yang berarti dari total angkatan kerja adalah penduduk yang berwirausaha. Tahun 2021 Rasio kewirausahaan meningkat lagi menjadi 28.60%, yang berarti dari total angkatan kerja adalah penduduk yang berwirausaha. Tahun 2022 Rasio kewirausahaan mencapai 30.35%, yang berarti total angkatan kerja adalah penduduk yang berwirausaha. Dan pada tahun 2023 Rasio kewirausahaan menurun lagi menjadi 29.31%, yang berarti total angkatan kerja adalah penduduk yang berwirausahaa. Dengan demikian, data ini menunjukkan bahwa rasio kewirausahaan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan beberapa tahun menunjukkan peningkatan dan beberapa tahun menunjukkan penurunan.

Tabel 2. 289
Rasio Kewirausahaan Kota Palopo 2017-2023

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Berwirausaha	25,432	24,038	22,346	23,706	24,299	27,907	27,812
Total Angkatan Kerja	75,563	75,829	80,564	85,026	84,969	91,960	94,881
Rasio Kewirausahaan	33.66	31.70	27.74	27.88	28.60	30.35	29.31

Sumber: BPS Kota Palopo 2024

2.1.4.2 Daya Saing Infrastruktur

2.1.4.2.1 Statistik Kondisi Jalan

Infrastruktur fisik dapat diidentifikasi berdasarkan kondisi jalan yang ada pada suatu wilayah. Panjang jalan permukaan yang merupakan kewenangan Kota Palopo yaitu sebesar 443,39 Km. Meskipun tidak terdapat perubahan panjang jalan, namun terjadi perubahan pada kondisi jalan. Kondisi jalan yang berupa tanah, kerikil dan bebatuan mulai berkurang dan tergantikan dengan jalan aspal dan beton. Perbaikan kondisi jalan ini semakin mempermudah akses yang ada di Kota Palopo. Data panjang jalan menurut jenis permukaan di Kota Palopo ditampilkan dalam Tabel Berikut :

Tabel 2. 290
Panjang jalan menurut jenis permukaan di Kota Palopo tahun 2018 - 2022 (Km)

Jenis Permukaan Jalan	2018	2019	2020	2021	2022
Aspal	220,720	267,596	269,784	272,164	285,008
Beton	77,566	75,858	68,206	72,102	69,102
Kerikil	138,042	93,659	98,859	93,171	84,692
Tanah dan Lainnya	7,062	6,277	6,541	5,139	4,588
Jumlah	**443,39**	**443,39**	**443,39**	**443,39**	**443,39**

Sumber data : Dinas PUPR

Indikator perbaikan aksesibilitas fisik yang berupa jalan selain dilihat dari jenis permukaannya juga dapat dilihat dari kategori kondisi jalan. Jalanan secara umum terbagi menjadi 4 yaitu jalan dengan kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Data kondisi jalan di Kota Palopo ditampilkan pada Tabel …. Berdasarkan data dari BPS yang tercantum dalam Tabel ..... diketahui terjadi peningkatan kondisi jalan baik, sedang dan rusak, sedangkan jalan yang kondisinya rusak berat telah banyak berkurang yaitu sekitar 18,17% ditahun 2022. Walaupun terjadi perbaikan kondisi jalan, namun kondisi rusak yang bertambah menunjukkan bahwa prioritas perbaikan jalan diutamakan untuk jalan dalam kondisi rusak berat, sehingga kondisi jalan yang awalnya sedang dapat berubah menjadi rusak karena hujan, muatan kendaraan yang ditanggung jalan, serta umur jalan yang sudah tua. Secara umum, apabila disimpulkan kondisi jalan di Kota Palopo tahun 2022 tergolong baik dengan permukaan berupa aspal.

Tabel 2. 291
Kondisi Jalan di Kota Palopo tahun 2018 - 2022 (Km)

Kondisi Jalan	2018	2019	2020	2021	2022
Baik	264,15	309,54	308,923	310,833	315,75
Sedang	49,64	7,80	19,517	38,477	22,46
Rusak Ringan	95,27	49,09	49,580	55,689	47,81
Rusak Berat	34,33	76,96	65,370	38,391	57,38
Total	**443,39**	**443,39**	**443,39**	**443,39**	**443,39**

Sumber data : Dinas PUPR

2.1.4.2.2 Rasio Ketersediaan Listrik

Listrik merupakan sumber energi primer yang digunakan oleh masyarakat, tanpa adanya energi listrik gan. Pemerintah hanya memberikan keterbukaan pasar / pasar persaingan sempurna di sektor hulu kepada vendor yang berminat menjual listriknya kepada PLN. Kota Palopo adalah salah satu wilayah yang berkembang pesat di Luwu raya untuk kebutuhan listriknya, dibandingkan dengan Luwu Timur yang kebutuhan listriknya bisa dicukupi oleh PT.Vale dan juga menjualnya kepada PLN. Kondisi eksisting di Kota Palopo pasokan ketersediaan masih besar , sehingga dapat dikatakan pasokan ketersediaan masih aman. Hal ini dapat menjadi nilai jual kepada calon investor yang membutuhkan pasokan tenaga listrik.

Tabel 2. 292
Rasio Ketersediaan Listrik Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Daya Terpasang (KW)	98727366	110043914	118902214	126439814	133026164	141930914
Produksi (Kwh)	176116220	184121010	188944859	196859205	202462719	211656875
Rasio (%)	56.06	59.77	62.93	64.23	65.70	67.06

Sumber : BPS Kota Palopo, diolah

2.1.4.2.3 Statistik Konsumsi Air

Air minum merupakan kebutuhan primer bagi mahluk hidup, tanpa air manusia tidak dapat berkembang biak dan bertahan hidup. Oleh Karena itu kebutuhan air menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan di daerah Kota Palopo. Dengan jumlah penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan berpengaruh terhadap permintaan kebutuhan air bersih, maka dari itu diperlukan proyeksi untuk memenuhi kebutuhan air selama periode waktu tertentu. Perkembangan kebutuhan air di Kota Palopo terbagi menjadi beberapa konsumen yaitu sosial, rumah tangga, instansi pemerintah, niaga, serta industri. Selama tahun 2018 sampai tahun 2022, komsumsi kebutuhan air masih didominasi kebutuhan rumah tangga dengan persentase rata-rata 77,76% kemudian diikuti oleh sektor niaga dengan persentase rata-rata 15,05% dan sisanya adalah kebutuhan sosial, instansi pemerintah, serta industri.

Tabel 2. 293

Konsumen Air Kota Palopo	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sosial	485.856	501.139	326.017	410.626	481.431	450263
Persentase	5,30	5,20	3,38	4,27	4,80	4.37
Rumah Tangga	6.652.226	7.257.460	7.808.389	7.742.291	7.949.494	8195943
Persentase	72,61	75,25	81,08	80,58	79,28	79.62
Instansi Pemerintah	309.431	341.092	184.470	167.466	193.820	188663
Persentase	3,37	3,53	1,91	1,74	1,93	1.83
Niaga	1.703.015	1.533.406	1.302.472	1.280.601	1.392.810	1441483
Persentase	18,59	15,90	13,52	13,33	13,89	14
Industri	10.488	11.248	8.164	6.707	9.116	16845
Persentase	0,11	0,12	0,08	0,07	0,09	0.16

2.1.4.2.4 Infrastruktur Komunikasi

Komunikasi merupakan bentuk media perantara dalam menyampaikan gambar atau tulisan dan suara pada individu atau kelompok lainnya. Komunikasi tidak dapat terjadi apabila tidak ada pengirim dan penerima, oleh karena itu diperlukan suatu sarana prasarana yang menjembatani aktivitas pengiriman dan penerimaan pesan. Perkembangan globalisasi memberikan dampak besar terhadap perkembangan komunikasi yang telah memasuki revolusi industri 4.0, Kota Palopo telah memiliki sarana prasarana pendukung tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Kominfo, terdapat tiga (3) daerah yang belum terakses oleh jaringan komunikasi/Internet. Saat ini Kota Palopo telah terakses jaringan komunikasi/intenet sebesar 93,75%, sedangkan yang belum terakses jaringan komunikasi/internet hanya 6,25%. Kedepannya Kota Palopo akan memperluas aksesbilitas jaringan yang belum ada pada tiga daerah tersebut untuk memenuhi cakupan 100%.

Tabel 2. 294
Titik Blank Spot Kota Palopo

Nama Daerah	Kelurahan	Kecamatan
Siguntu	Latuppa	Mungkajang
Minjana	Peta	Sendana
Padang Lambe	Padang Lambe	Wara Barat

Sumber Data : dinas Komunikasi dan informatika

2.1.4.3 Daya Saing Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas yang Tertangani

Angka kriminalitas / tingkat kejahatan merupakan salah satu indicator yang dipakai oleh pelaku usaha untuk berinvestasi di suatu daerah. Semakin tingginya angka kriminalitas dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha yang dibangun di suatu daerah, oleh karena itu indicator tersebut dapat berguna dalam perencanaan pembangunan terutama

menciptakan iklim investasi. Kota Palopo merupakan wilayah dengan status kotamadya di wilayah Luwu raya dan ketiga setelah Pare-pare dan Makassar, peluang angka kejahatan lebih besar daripada wilayah sekitarnya.

Tabel 2. 295
Persentase Angka Kriminalitas Kota Palopo Tahun 20219-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kejahatan Terlapor	317	200	212	435	1371
Jumlah Keluarga	40303	41125	41956	57755	44382
Persentase Kriminalitas	0.79	0.49	0.51	0.75	3.09
Proporsi Penduduk yang aman berjalan sendiri	99.21	99.51	99.49	99.25	96.91

Sumber : BPS Kota Palopo, diolah

Berdasarkan hasil tabel diatas persentase angka kriminalitas di Kota Palopo tergolong rendah yaitu kurang dari 1% jumlah keluarga yang ada. Walaupun demikian selama tahun 2019-2022 persentasenya mengalami fluktuatif, dan meningkat lagi di tahun 2022 dengan jumlah terlapor terbanyak. Jumlah kejahatan mengalami peningkatan signifikan di tahun 2023 menjadi 1371 kasus. Peningkatan terbesar ini salah satunya bersumber dari efek penggunaan sosial media yang masih sekali penggunaanya oleh masyarakat kerap digunakan sebagai alat pamer, sehingga dapat memunculkan kecemburuan sosial. Semakin canggihnya teknologi dan ketatnya persaingan hidup yang memungkinkan tindakan criminal terjadi setiap saat dan dimanapun tempatnya. Hal ini harus menjadi evaluasi oleh kepala daerah untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum menjaga kondusifitas dan keamanan wilayah agar arus investasi mengalir masuk.

2.1.4.3.2 Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah pendduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Data di atas menunjukkan bahwa untuk 100 orang penduduk usia produktif di Kota palopo pada tahun 2017 mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang usia non produktif. Beban ini sama dengan tahun 2023 dimana untuk 100 orang penduduk usia produktif memiliki tanggungan sebanyak 44 orang usia non produktif.

Tabel 2. 296
Rasio Ketergantungan Kota Palopo Tahun 2017-2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio ketergantungan	48.46	48.11	47.98	45.31	43,40	44,32	48.14

Sumber : Diolah dari Palopo Dalam Angka 2023

2.1.4.3.3 Rasio Lulusan S1/S2/S3

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Data menunjukkan bahwa tahun 2017 dari 100 orang penduduk Kota Palopo terdapat 9-10 orang yang merupakan lulusan perguruan tinggi baik yang berpredikat sarjana, master/magister ataupun doktor. Kondisi tahun 2023 meningkat menjadi 16 orang berpendidikan strata 1 ke atas dari 100 penduduk Kota Palopo.

Tabel 2. 297
Rasio Lulusan S1/S2/S3di Kota Palopo Tahun 2017 – 2023

Uraian	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah lulusan S1/S2/S3	Orang	16.490	12.452	11.403	10.354	7.811	21.636	29.292
Jumlah penduduk	Orang	176.374	180.678	184.614	184.681	187.331	190.867	177.526
Rasio Lulusan S1/S2/S3	Per 100	9.35	6.89	6.18	5.61	4,17	11,33	16.50

Sumber : Palopo Dalam Angka 2017-2023

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPD

2.2.1 Kesesuaian Program dan Kegiatan Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Tahun 2023 dalam menunjang perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palopo melalui pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 digambarkan evaluasi pelaksanaan

kesesuaian penjabaran program RPJMD periode 2018-2023 kedalam RKPD Tahun 2023 dan APBD Kota Palopo Tahun 2023 sesuai tabel dibawah. Berdasarkan hasil kesesuaian penjabaran RPJMD ke dalam RKPD, dan APBD yaitu :

1. Jumlah program pada RPJMD 2018-2023 sebanyak 214 program ;
2. Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD tahun 2023 :
    a. RKPD pokok sebanyak 213 program, 661 kegiatan dan 1635 sub kegiatan;
    b. RKPD Perubahan sebanyak 213 program, 660 kegiatan, 1644 sub kegiatan
3. Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD tahun 2023 :
    a. APBD Pokok sebanyak 194 program, 602 kegiatan dan 1385 sub kegiatan.
    b. APBD perubahan sebanyak 197 program, 603 kegiatan dan 1381 sub kegiatan.

Dari hasil evaluasi diatas maka diuraikan sebagai berikut :

- ❖ RKPD 2023

  Terdapat 1 program pada perubahan RPJMD 2018-2023 pada Dinas tenaga Kerja yang tidak di jabarkan dalam RKPD 2023
- ❖ APBD 2023

1. Terdapat 19 program pada RKPD yang tidak dilaksanakan dalam APBD pokok 2023.
2. Terdapat 59 kegiatan pada RKPD yang tidak di laksanakan dalam APBD pokok 2023.
3. Terdapat 255 sub kegiatan pada RKPD yang tidak dilaksanakan pada APBD pokok 2023.
4. Terdapat 16 program pada perubahan RKPD yang tidak dilaksanakan dalam perubahan APBD 2023.
5. Terdapat 57 kegiatan pada perubahan RKPD yang tidak dilaksakan dalam perubahan APBD 2023.
6. Terdapat 263 sub kegiatan pada perubahan RKPD yang tidak dilaksanakandalam perubahan APBD 2023.

Tabel 2. 298

NO	INSTANSI	JUMLAH						SESUAI				TIDAK SESUAI			
		URAIAN	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023	RKPD TAHUN 2023		APBD TAHUN 2023		RKPD Tahun 2023 Terhadap RPJMD 2018-2023		APBD Tahun 2023 Terhadap RKPD Tahun 2023		RKPD Tahun 2023 Terhadap RPJMD 2013-2018		APBD Tahun 2023 Terhadap RKPD Tahun 2023	
				Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
		Kegiatan	0	11	11	10	10	0	0	10	10	0	0	1	1
		Sub Kegiatan	0	30	30	26	26	0	0	26	26	0	0	4	4
8	Satuan Polisi Pamong praja	Program	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
		Kegiatan	0	9	9	9	9	0	0	9	9	0	0	0	0
		Sub Kegiatan	0	22	22	20	20	0	0	20	20	0	0	2	2
9	Badan Penanggulangan Bencana	Program	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
		Kegiatan	0	11	11	11	11	0	0	11	11	0	0	0	0
		Sub Kegiatan	0	30	30	27	27	0	0	27	27	0	0	3	3
10	Dinas Sosial	Program	7	7	7	5	6	7	7	5	6	0	0	2	1
		Kegiatan	0	16	16	16	15	0	0	16	15	0	0	0	1
		Sub Kegiatan	0	29	31	28	28	0	0	28	28	0	0	1	3
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar															
11	Dinas Tenaga Kerja	Program	5	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0
		Kegiatan	0	13	13	12	12	0	0	12	12	0	0	1	1
		Sub Kegiatan	0	25	25	23	23	0	0	23	23	0	0	2	2
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Program	7	7	7	5	5	7	7	5	5	0	0	2	2
		Kegiatan	0	22	22	13	13	0	0	13	13	0	0	9	9
		Sub Kegiatan	0	51	51	26	26	0	0	26	26	0	0	25	25
13	Dinas Ketahanan	Program	5	5	5	4	4	5	5	4	4	0	0	1	1

NO	INSTANSI	JUMLAH						SESUAI				TIDAK SESUAI			
		URAIAN	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023	RKPD TAHUN 2023		APBD TAHUN 2023		RKPD Tahun 2023 Terhadap RPJMD 2018-2023		APBD Tahun 2023 Terhadap RKPD Tahun 2023		RKPD Tahun 2023 Terhadap RPJMD 2013-2018		APBD Tahun 2023 Terhadap RKPD Tahun 2023	
				Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pangan	Kegiatan	0	14	14	12	12	0	0	12	12	0	0	2	2
		Sub Kegiatan	0	36	36	28	28	0	0	28	28	0	0	8	8
14	Dinas Pertanahan	Program	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0
		Kegiatan	0	15	15	15	15	0	0	15	15	0	0	0	0
		Sub Kegiatan	0	29	29	28	28	0	0	28	28	0	0	1	1
15	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	Program	11	11	11	10	10	11	11	10	10	0	0	1	1
		Kegiatan	0	18	18	17	16	0	0	17	16	0	0	1	2
		Sub Kegiatan	0	31	31	30	30	0	0	30	30	0	0	1	1
16	Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil	Program	4	4	4	3	4	4	4	3	4	0	0	1	0
		Kegiatan	0	16	16	13	13	0	0	13	13	0	0	3	3
		Sub Kegiatan	0	35	35	25	25	0	0	25	25	0	0	10	10
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Program	4	4	4	3	4	4	4	3	4	0	0	1	0
		Kegiatan	0	16	16	16	16	0	0	16	16	0	0	0	0
		Sub Kegiatan	0	40	40	37	37	0	0	37	37	0	0	3	3
18	Dinas Perhubungan	Program	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
		Kegiatan	0	12	12	11	11	0	0	11	11	0	0	1	1
		Sub Kegiatan	0	29	29	24	24	0	0	24	24	0	0	5	5
19	Dinas Komunikasi & Informatika	Program	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
		Kegiatan	0	11	11	11	11	0	0	11	11	0	0	0	0
		Sub Kegiatan	0	41	41	29	29	0	0	29	29	0	0	12	12

NO	INSTANSI	URAIAN	JUMLAH					SESUAI				TIDAK SESUAI			
			PERUBAHAN RPJMD 2018-2023	RKPD TAHUN 2023		APBD TAHUN 2023		RKPD Tahun 2023 Terhadap RPJMD 2018-2023		APBD Tahun 2023 Terhadap RKPD Tahun 2023		RKPD Tahun 2023 Terhadap RPJMD 2013-2018		APBD Tahun 2023 Terhadap RKPD Tahun 2023	
				Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah	Program	8	8	8	7	7	8	8	7	7	0	0	1	1
		Kegiatan	0	15	15	13	14	0	0	13	14	0	0	2	1
		Sub Kegiatan	0	34	34	23	24	0	0	23	24	0	0	11	10
21	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan satu pintu	Program	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
		Kegiatan	0	10	10	10	10	0	0	10	10	0	0	0	0
		Sub Kegiatan	0	24	24	24	23	0	0	24	23	0	0	0	1
22	Dinas Pemuda & Olahraga	Program	4	4	4	3	3	4	4	3	3	0	0	1	1
		Kegiatan	0	10	16	14	14	0	0	14	14	0	0	-4	2
		Sub Kegiatan	0	43	43	32	32	0	0	32	32	0	0	11	11
23	Dinas Persandian & Statistik	Program	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
		Kegiatan	0	16	11	10	10	0	0	10	10	0	0	6	1
		Sub Kegiatan	0	24	24	22	22	0	0	22	22	0	0	2	2
24	Dinas Kebudayaan	Program	5	5	5	4	4	5	5	4	4	0	0	1	1
		Kegiatan	0	16	16	11	11	0	0	11	11	0	0	5	5
		Sub Kegiatan	0	31	31	22	22	0	0	22	22	0	0	9	9
25	Dinas Perpustakaan	Program	3	3	3	2	2	3	3	2	2	0	0	1	1
		Kegiatan	0	11	11	10	10	0	0	10	10	0	0	1	1
		Sub Kegiatan	0	29	29	26	26	0	0	26	26	0	0	3	3
26	Dinas Kearsipan	Program	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
		Kegiatan	0	13	13	13	13	0	0	13	13	0	0	0	0
		Sub	0	27	27	25	25	0	0	25	25	0	0	2	2

NO	INSTANSI	URAIAN	JUMLAH					SESUAI				TIDAK SESUAI			
			PERUBAHAN RPJMD 2018-2023	RKPD TAHUN 2023		APBD TAHUN 2023		RKPD Tahun 2023 Terhadap RPJMD 2018-2023		APBD Tahun 2023 Terhadap RKPD Tahun 2023		RKPD Tahun 2023 Terhadap RPJMD 2013-2018		APBD Tahun 2023 Terhadap RKPD Tahun 2023	
				Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kegiatan													
Urusan Pilihan															
27	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Program	5	5	5	4	4	5	5	4	4	0	0	1	1
		Kegiatan	0	14	14	12	12	0	0	12	12	0	0	2	2
		Sub Kegiatan	0	30	29	25	25	0	0	25	25	0	0	5	4
28	Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan	Program	7	7	7	6	6	7	7	6	6	0	0	1	1
		Kegiatan	0	24	24	21	21	0	0	21	21	0	0	3	3
		Sub Kegiatan	0	60	60	43	43	0	0	43	43	0	0	17	17
29	Dinas Perdagangan	Program	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
		Kegiatan	0	14	14	14	14	0	0	14	14	0	0	0	0
		Sub Kegiatan	0	32	32	29	28	0	0	29	28	0	0	3	4
30	Dinas Perindustrian	Program	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
		Kegiatan	0	11	11	9	9	0	0	9	9	0	0	2	2
		Sub Kegiatan	0	29	29	21	21	0	0	21	21	0	0	8	8
31	Dinas Transmigrasi	Program	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
		Kegiatan	0	8	8	7	7	0	0	7	7	0	0	1	1
		Sub Kegiatan	0	19	19	14	14	0	0	14	14	0	0	5	5
32	Dinas Perikanan	Program	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
		Kegiatan	0	15	15	15	15	0	0	15	15	0	0	0	0
		Sub Kegiatan	0	32	32	31	31	0	0	31	31	0	0	1	1
Urusan Penunjang															

NO	INSTANSI	URAIAN	JUMLAH					SESUAI				TIDAK SESUAI			
			PERUBAHAN RPJMD 2018-2023	RKPD TAHUN 2023		APBD TAHUN 2023		RKPD Tahun 2023 Terhadap RPJMD 2018-2023		APBD Tahun 2023 Terhadap RKPD Tahun 2023		RKPD Tahun 2023 Terhadap RPJMD 2013-2018		APBD Tahun 2023 Terhadap RKPD Tahun 2023	
				Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	Bappeda	Program	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
		Kegiatan	0	13	13	13	13	0	0	13	13	0	0	0	0
		Sub Kegiatan	0	41	40	34	34	0	0	34	34	0	0	7	6
34	BPKAD	Program	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
		Kegiatan	0	14	14	14	14	0	0	14	14	0	0	0	0
		Sub Kegiatan	0	55	55	53	53	0	0	53	53	0	0	2	2
35	BAPENDA	Program	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
		Kegiatan	0	9	9	9	9	0	0	9	9	0	0	0	0
		Sub Kegiatan	0	36	36	33	33	0	0	33	33	0	0	3	3
36	BKPSDM	Program	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
		Kegiatan	0	13	12	13	13	0	0	13	13	0	0	0	-1
		Sub Kegiatan	0	29	29	29	29	0	0	29	29	0	0	0	0
37	Dinas Penelitian & Pengembangan	Program	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
		Kegiatan	0	11	11	11	11	0	0	11	11	0	0	0	0
		Sub Kegiatan	0	22	22	21	21	0	0	21	21	0	0	1	1
38	Inspektorat	Program	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
		Kegiatan	0	10	10	10	10	0	0	10	10	0	0	0	0
		Sub Kegiatan	0	25	25	25	25	0	0	25	25	0	0	0	0
Unsur Pendukung															
39	Sekretariat DPRD	Program	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
		Kegiatan	0	15	15	15	15	0	0	15	15	0	0	0	0

NO	INSTANSI	JUMLAH						SESUAI				TIDAK SESUAI			
		URAIAN	PERUBAHAN RPJMD 2018-2023	RKPD TAHUN 2023		APBD TAHUN 2023		RKPD Tahun 2023 Terhadap RPJMD 2018-2023		APBD Tahun 2023 Terhadap RKPD Tahun 2023		RKPD Tahun 2023 Terhadap RPJMD 2013-2018		APBD Tahun 2023 Terhadap RKPD Tahun 2023	
				Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Sub Kegiatan	0	49	49	49	49	0	0	49	49	0	0	0	0
40	Sekretariat Daerah	Program	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
		Kegiatan	0	20	20	19	20	0	0	19	20	0	0	1	0
		Sub Kegiatan	0	65	66	63	62	0	0	63	62	0	0	2	4
Unsur Kewilayahan															
41	Kecamatan Wara Selatan	Program	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
		Kegiatan	0	12	12	11	11	0	0	11	11	0	0	1	1
		Sub Kegiatan	0	26	26	23	23	0	0	23	23	0	0	3	3
42	Kecamatan Wara Timur	Program	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
		Kegiatan	0	12	12	9	9	0	0	9	9	0	0	3	3
		Sub Kegiatan	0	33	33	20	20	0	0	20	20	0	0	13	13
43	Kecamatan Wara Utara	Program	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
		Kegiatan	0	11	11	9	9	0	0	9	9	0	0	2	2
		Sub Kegiatan	0	22	22	17	17	0	0	17	17	0	0	5	5
44	Kecamatan Wara barat	Program	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
		Kegiatan	0	14	13	13	13	0	0	13	13	0	0	1	0
		Sub Kegiatan	0	30	27	26	26	0	0	26	26	0	0	4	1
45	Kecamatan Bara	Program	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
		Kegiatan	0	11	11	11	11	0	0	11	11	0	0	0	0
		Sub Kegiatan	0	23	23	21	21	0	0	21	21	0	0	2	2

NO	INSTANSI	URAIAN	JUMLAH					SESUAI				TIDAK SESUAI			
			PERUBAHAN RPJMD 2018-2023	RKPD TAHUN 2023		APBD TAHUN 2023		RKPD Tahun 2023 Terhadap RPJMD 2018-2023		APBD Tahun 2023 Terhadap RKPD Tahun 2023		RKPD Tahun 2023 Terhadap RPJMD 2013-2018		APBD Tahun 2023 Terhadap RKPD Tahun 2023	
				Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	Kecamatan Wara	Program	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
		Kegiatan	0	11	11	11	11	0	0	11	11	0	0	0	0
		Sub Kegiatan	0	22	22	21	21	0	0	21	21	0	0	1	1
47	Kecamatan Mungkajang	Program	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
		Kegiatan	0	12	12	11	12	0	0	11	12	0	0	1	0
		Sub Kegiatan	0	25	25	24	24	0	0	24	24	0	0	1	1
48	Kecamatan Sendana	Program	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
		Kegiatan	0	14	14	12	12	0	0	12	12	0	0	2	2
		Sub Kegiatan	0	28	28	23	23	0	0	23	23	0	0	5	5
49	Kecamatan Telluwanua	Program	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
		Kegiatan	0	10	10	10	10	0	0	10	10	0	0	0	0
		Sub Kegiatan	0	21	21	19	19	0	0	19	19	0	0	2	2
Jumlah		**Program**	**214**	**213**	**213**	**194**	**197**	**213**	**213**	**194**	**197**	**1**	**0**	**19**	**16**
		Kegiatan	**0**	**661**	**660**	**602**	**603**	**0**	**0**	**602**	**603**	**0**	**0**	**59**	**57**
		Sub Kegiatan	**0**	**1635**	**1644**	**1385**	**1381**	**0**	**0**	**1380**	**1381**	**0**	**0**	**255**	**263**

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan APBD tahun 2023

Berdasarkan Evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2023 digambarkan perkembangan pelaksanaan anggaran lingkup Kota Palopo yang dibandingkan dengan anggaran yang telah direncanakan pada perubahan RPJMD Kota Palopo tahun 2018-2023 dan pada RKPD pokok tahun 2023 dan perubahan RKPD tahun 2023 yang dilaksanakan oleh 49 perangkat daerah dengan dengan rincian sebagai berikut :

1. Total program pada perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 sebanyak 213 program
2. Total pada RKPD pokok tahun 2023 sebanyak 213 program, 661 kegiatan dan 1635 sub kegiatan, sementara pada Perubahan RKPD tahun 2023 sebanyak 213 program, 660 kegiatan dan 1644 sub kegiatan.
3. Total pada APBD pokok tahun 2023 sebanyak 194 program, 602 kegiatan dan 1385 sub kegiatan sedangkan pada APBD perubahan tahun 2023 sebanyak 197 program, 603 kegiatan dan 1381 sub kegiatan. Dengan masing-masing urusan disajikan pada tabel dibawah.

Berdasarkan hasil evaluasi pada tabel dibawah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Total Pagu pada Perubahan RPJMD Kota Palopo tahun 2018-2023 sebesar Rp. 1,042,945,315,768
2. Total Pagu pada RKPD Pokok tahun 2023 sebesar Rp. 1,064.443.442.829 sementara pada Perubahan RKPD tahun 2023 sebesar Rp. 1.046.080.407.215.
3. Total pagu pada APBD pokok tahun 2023 sebesar Rp. 1,046,585,270,215 sementara pada perubahan APBD tahun 2023 sebesar Rp. 1,065,945,351,311
4. Total anggaran pada RKPD jika di bansingkan dengan RPJMD pada tahun 2023 dengan persentase sebesar 105.79% pada RKPD pokok dan 97.11% pada RKPD perubahan.
5. Total Anggaran pada APBD pokok pada tahun 2023 jika di bandingkan dengan jika dibandingkan dengan perubahan RPJMD 2018-2023 kesesuaian hanya mencapai 92.74% pada APBD pokok sementara jika dibandingkan dengan APBD perubahan mencapai 93.73%.

Tabel 2. 299
Penjabaran RPJMD 2018-2023, RKPD Tahun 2023 dan APBD Tahun 2023

NO Urut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2023									Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran tahun 2023					
		Perubahan RPJMD	RKPD tahun 2023		% RPJMD		APBD tahun 2023		% RPJMD		RKPD & RPJMD		APBD & RKPD		APBD & RPJMD	
		2018-2023	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 4 - 3	13 = 5-3	14 = 8 - 4	15 = 9-5	16 = 8-3	17 = 9-3
1	Dinas Pendidikan	216,463,930,275	221,166,475,529	195,712,839,403	102.17	90.41	195,712,839,403	195,712,839,403	90.41	90.41	4,702,545,254	-20,751,090,872	-25,453,636,126	0	-20,751,090,872	-20,751,090,872
2	Dinas Kesehatan	149,336,640,931	158,514,883,588	154,160,713,130	106.15	103.23	154,160,713,130	154,160,713,130	103.23	103.23	9,178,242,657	4,824,072,199	-4,354,170,458	0	4,824,072,199	4,824,072,199
3	RSUD	150,211,000,000	121,752,525,000	103,767,191,000	81.05	69.08	103,767,191,000	103,767,191,000	69.08	69.08	-28,458,475,000	-46,443,809,000	-17,985,334,000	0	-46,443,809,000	-46,443,809,000
4	Dinas PUPR	136,619,666,540	161,059,955,180	229,683,005,000	117.89	168.12	229,683,005,000	229,683,005,000	168.12	168.12	24,440,288,640	93,063,338,460	68,623,049,820	0	93,063,338,460	93,063,338,460
5	Dinas Perumahan & Permukiman	7,443,047,543	8,118,496,562	4,905,596,000	109.07	65.91	4,905,596,000	4,905,596,000	65.91	65.91	675,449,019	-2,537,451,543	-3,212,900,562	0	-2,537,451,543	-2,537,451,543
6	Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat	6,106,859,973	6,259,529,094	7,559,941,490	102.50	123.79	5,559,941,490	4,610,472,490	91.04	75.50	152,669,121	1,453,081,517	-699,587,604	-2,949,469,000	-546,918,483	-1,496,387,483
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5,212,550,500	5,318,478,842	5,473,530,000	102.03	105.01	5,473,530,000	5,473,530,000	105.01	105.01	105,928,342	260,979,500	155,051,158	0	260,979,500	260,979,500
8	Satuan Polisi Pamong praja	7,051,641,250	7,227,932,281	7,198,348,000	102.50	102.08	6,398,348,000	6,398,348,000	90.74	90.74	176,291,031	146,706,750	-829,584,281	-800,000,000	-653,293,250	-653,293,250
9	Badan Penanggulangan Bencana	3,535,859,475	3,624,255,962	3,701,865,000	102.50	104.69	3,701,865,000	3,701,865,000	104.69	104.69	88,396,487	166,005,525	77,609,038	0	166,005,525	166,005,525
10	Dinas Sosial	8,894,783,355	9,281,252,566	4,423,762,000	104.34	49.73	4,423,762,000	4,423,762,000	49.73	49.73	386,469,211	-4,471,021,355	-4,857,490,566	0	-4,471,021,355	-4,471,021,355
11	Dinas Tenaga Kerja	3,072,073,830	3,428,525,017	2,979,592,000	111.60	96.99	2,979,592,000	2,979,592,000	96.99	96.99	356,451,187	-92,481,830	-448,933,017	0	-92,481,830	-92,481,830
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	2,899,953,719	2,972,452,561	2,645,539,000	102.50	91.23	2,615,539,000	2,615,539,000	90.19	90.19	72,498,842	-254,414,719	-356,913,561	-30,000,000	-284,414,719	-284,414,719

NO Urut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2023									Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran tahun 2023					
		Perubahan RPJMD	RKPD tahun 2023		% RPJMD		APBD tahun 2023		% RPJMD		RKPD & RPJMD		APBD & RKPD		APBD & RPJMD	
		2018-2023	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 4 - 3	13 = 5-3	14 = 8 - 4	15 = 9-5	16 = 8-3	17 = 9-3
	anak															
13	Dinas Ketahanan Pangan	3,884,139,892	4,061,680,056	2,190,185,000	104.57	56.39	2,190,185,000	2,190,185,000	56.39	56.39	177,540,164	-1,693,954,892	-1,871,495,056	0	-1,693,954,892	-1,693,954,892
14	Dinas Pertanahan	11,638,003,975	12,627,079,075	9,870,681,000	108.50	84.81	9,870,681,000	9,870,681,000	84.81	84.81	989,075,100	-1,767,322,975	-2,756,398,075	0	-1,767,322,975	-1,767,322,975
15	Dinas Lingkungan Hidup	34,865,423,428	29,261,804,013	25,142,434,010	83.93	72.11	25,092,434,010	44,184,640,000	71.97	126.73	-5,603,619,415	-9,722,989,418	-4,169,370,003	19,042,205,990	-9,772,989,418	9,319,216,572
16	Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil	4,378,220,205	4,481,750,711	3,450,440,920	102.36	78.81	3,450,442,000	3,450,442,000	78.81	78.81	103,530,506	-927,779,285	-1,031,308,711	1,080	-927,778,205	-927,778,205
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	10,588,326,353	10,964,658,266	12,374,263,000	103.55	116.87	12,374,263,000	12,374,263,000	116.87	116.87	376,331,913	1,785,936,647	1,409,604,734	0	1,785,936,647	1,785,936,647
18	Dinas Perhubungan	7,270,886,700	7,452,658,868	6,661,167,000	102.50	91.61	6,661,167,000	6,661,167,000	91.61	91.61	181,772,168	-609,719,700	-791,491,868	0	-609,719,700	-609,719,700
19	Dinas Komunikasi & Informatika	6,263,593,702	6,420,183,545	5,178,120,000	102.50	82.67	5,178,120,000	5,178,120,000	82.67	82.67	156,589,843	-1,085,473,702	-1,242,063,545	0	-1,085,473,702	-1,085,473,702
20	Dinas Koperasi	3,677,193,975	3,904,763,293	3,382,318,000	106.19	91.98	3,382,318,000	3,382,318,000	91.98	91.98	227,569,318	-294,875,975	-522,445,293	0	-294,875,975	-294,875,975
21	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan satu pintu	6,724,223,450	6,892,329,037	6,076,745,000	102.50	90.37	6,076,745,000	6,076,745,000	90.37	90.37	168,105,587	-647,478,450	-815,584,037	0	-647,478,450	-647,478,450
22	Dinas Pemuda & Olahraga	6,259,750,000	6,443,243,750	4,867,505,000	102.93	77.76	4,867,505,000	4,867,505,000	77.76	77.76	183,493,750	-1,392,245,000	-1,575,738,750	0	-1,392,245,000	-1,392,245,000
23	Dinas Persandian & Statistik	2,527,398,875	2,540,574,097	2,102,300,394	100.52	83.18	2,102,300,394	2,126,169,000	83.18	84.12	13,175,222	-425,098,481	-438,273,703	23,868,606	-425,098,481	-401,229,875
24	Dinas Kebudayaan	2,706,244,188	2,773,900,292	2,740,421,000	102.50	101.26	2,740,421,000	2,740,421,000	101.26	101.26	67,656,104	34,176,812	-33,479,292	0	34,176,812	34,176,812
25	Dinas Perpustakaan	2,940,802,375	3,021,771,000	2,522,105,000	102.75	85.76	2,522,105,000	2,522,105,000	85.76	85.76	80,968,625	-418,697,375	-499,666,000	0	-418,697,375	-418,697,375

NO Urut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2023									Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran tahun 2023					
		Perubahan RPJMD	RKPD tahun 2023		% RPJMD		APBD tahun 2023		% RPJMD		RKPD & RPJMD		APBD & RKPD		APBD & RPJMD	
		2018-2023	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 4 - 3	13 = 5-3	14 = 8 - 4	15 = 9-5	16 = 8-3	17 = 9-3
26	Dinas Kearsipan	1,940,975,150	1,989,499,529	1,849,034,000	102.50	95.26	1,849,034,000	1,849,034,000	95.26	95.26	48,524,379	-91,941,150	-140,465,529	0	-91,941,150	-91,941,150
27	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif	4,489,210,075	10,085,412,202	4,643,030,000	224.66	103.43	4,643,030,000	4,643,030,000	103.43	103.43	5,596,202,127	153,819,925	-5,442,382,202	0	153,819,925	153,819,925
28	Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan	21,327,685,245	21,860,877,376	19,553,913,000	102.50	91.68	19,553,913,000	19,553,913,000	91.68	91.68	533,192,131	-1,773,772,245	-2,306,964,376	0	-1,773,772,245	-1,773,772,245
29	Dinas Perdagangan	5,741,710,613	5,885,253,378	5,553,252,000	102.50	96.72	5,553,252,000	5,553,252,000	96.72	96.72	143,542,765	-188,458,613	-332,001,378	0	-188,458,613	-188,458,613
30	Dinas Perindustrian	2,516,739,100	2,579,657,578	2,587,304,000	102.50	102.80	2,467,304,000	2,467,304,000	98.04	98.04	62,918,478	70,564,900	-112,353,578	-120,000,000	-49,435,100	-49,435,100
31	Dinas Transmigrasi	2,173,393,600	2,227,728,440	2,173,323,000	102.50	100.00	2,173,323,000	2,173,323,000	100.00	100.00	54,334,840	-70,600	-54,405,440	0	-70,600	-70,600
32	Dinas Perikanan	4,875,501,848	4,997,389,395	5,709,051,000	102.50	117.10	5,709,051,000	5,709,051,000	117.10	117.10	121,887,547	833,549,152	711,661,605	0	833,549,152	833,549,152
33	Bappeda	6,022,920,484	10,627,525,475	6,435,445,080	176.45	106.85	6,140,444,000	6,140,444,000	101.95	101.95	4,604,604,991	412,524,596	-4,487,081,475	-295,001,080	117,523,516	117,523,516
34	BPKAD	22,124,000,000	22,994,000,000	25,000,000,000	103.93	113.00	28,746,245,000	28,746,245,000	129.93	129.93	870,000,000	2,876,000,000	5,752,245,000	3,746,245,000	6,622,245,000	6,622,245,000
35	BAPENDA	11,065,447,155	11,360,943,334	10,568,977,000	102.67	95.51	10,568,977,000	10,568,977,000	95.51	95.51	295,496,179	-496,470,155	-791,966,334	0	-496,470,155	-496,470,155
36	BKPSDM	14,861,542,825	7,104,184,070	7,879,932,500	47.80	53.02	8,434,795,500	9,628,271,000	56.76	64.79	-7,757,358,755	-6,981,610,325	1,330,611,430	1,748,338,500	-6,426,747,325	-5,233,271,825
37	Dinas Penelitian & Pengembangan	2,683,145,569	2,750,224,208	3,244,236,000	102.50	120.91	3,244,236,000	3,244,236,000	120.91	120.91	67,078,639	561,090,431	494,011,792	0	561,090,431	561,090,431
38	Inspektorat	10,308,759,288	10,897,364,610	8,045,729,000	105.71	78.05	8,045,729,000	8,045,729,000	78.05	78.05	588,605,322	-2,263,030,288	-2,851,635,610	0	-2,263,030,288	-2,263,030,288
39	Sekretariat DPRD	26,996,305,050	27,635,315,661	27,124,304,000	102.37	100.47	27,124,304,000	27,124,304,000	100.47	100.47	639,010,611	127,998,950	-511,011,661	0	127,998,950	127,998,950
40	Sekretariat Daerah	51,092,652,631	56,369,968,946	45,586,964,000	110.33	89.22	57,754,119,000	57,754,119,000	113.04	113.04	5,277,316,315	-5,505,688,631	1,384,150,054	12,167,155,000	6,661,466,369	6,661,466,369

NO Urut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2023									Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran tahun 2023					
		Perubahan RPJMD	RKPD tahun 2023		% RPJMD		APBD tahun 2023		% RPJMD		RKPD & RPJMD		APBD & RKPD		APBD & RPJMD	
		2018-2023	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 4 - 3	13 = 5-3	14 = 8 - 4	15 = 9-5	16 = 8-3	17 = 9-3
41	Kecamatan Wara Selatan	5,224,937,500	5,355,560,938	5,626,337,000	102.50	107.68	4,504,337,000	4,504,337,000	86.21	86.21	130,623,438	401,399,500	-851,223,938	-1,122,000,000	-720,600,500	-720,600,500
42	Kecamatan Wara Timur	7,652,866,788	7,844,188,457	9,508,522,288	102.50	124.25	7,148,722,288	7,148,722,288	93.41	93.41	191,321,669	1,855,655,500	-695,466,169	-2,359,800,000	-504,144,500	-504,144,500
43	Kecamatan Wara Utara	5,769,930,000	5,914,178,250	6,689,461,000	102.50	115.94	5,295,061,000	5,295,061,000	91.77	91.77	144,248,250	919,531,000	-619,117,250	-1,394,400,000	-474,869,000	-474,869,000
44	Kecamatan Wara barat	5,744,901,550	5,888,524,089	5,533,185,000	102.50	96.31	4,640,385,000	4,640,385,000	80.77	80.77	143,622,539	-211,716,550	-1,248,139,089	-892,800,000	-1,104,516,550	-1,104,516,550
45	Kecamatan Bara	6,688,137,300	6,855,340,733	7,834,267,000	102.50	117.14	5,890,867,000	5,890,867,000	88.08	88.08	167,203,433	1,146,129,700	-964,473,733	-1,943,400,000	-797,270,300	-797,270,300
46	Kecamatan Wara	7,006,108,188	7,181,260,892	8,295,996,000	102.50	118.41	6,185,796,000	6,185,796,000	88.29	88.29	175,152,704	1,289,887,812	-995,464,892	-2,110,200,000	-820,312,188	-820,312,188
47	Kecamatan Mungkajang	5,061,216,300	5,187,746,708	5,125,120,000	102.50	101.26	4,320,520,000	4,320,520,000	85.37	85.37	126,530,408	63,903,700	-867,226,708	-804,600,000	-740,696,300	-740,696,300
48	Kecamatan Sendana	4,854,605,000	4,975,970,125	5,130,834,000	102.50	105.69	4,397,634,000	4,397,634,000	90.59	90.59	121,365,125	276,229,000	-578,336,125	-733,200,000	-456,971,000	-456,971,000
49	Kecamatan Tellulwanua	6,150,410,000	6,304,170,250	7,611,583,000	102.50	123.76	6,303,583,000	6,303,583,000	102.49	102.49	153,760,250	1,461,173,000	-587,250	-1,308,000,000	153,173,000	153,173,000
Jumlah		**1,042,945,315,768**	**1,064,443,442,829**	**1,046,080,407,215**	**105.79**	**97.11**	**1,046,585,270,215**	**1,065,945,351,311**	**92.74**	**93.73**	**21,498,127,061**	**3,135,091,447**	**-17,858,172,614**	**19,864,944,096**	**3,639,954,447**	**23,000,035,543**

2.2.3 Evaluasi Capaian Kinerja RKPD

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik dalam pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah :

1. kesesuaian antara RKPD tahun 2023 dengan RPJMD kota palopo tahun 2018-2023; dan
2. Konsistensi antara RKPD tahun 2023 dengan APBD tahun 2023
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Rata-rata capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV TA. 2023 dari 49 Perangkat daerah (PD) sebesar 84.95% dan rata-rata realisasi anggaran sebesar 89.72%, apabila menggunakan kategori interval s/d triwulan IV maka kinerja kategori ini Tinggi dan realisasi anggaran pada kategori Tinggi sebagaimana tabel dibawah.

Sesuai hasil evaluasi rata-rata capaian hasil pelaksanaan terhadap RKPD tahun 2023 dari 49 Perangkat Daerah adalah 84.95% dengan predikat Tinggi (T) dan capaian anggaran adalah 98% dengan predikat Tinggi (T). Bila dibandingkan dengan capaian kinerja Evaluasi hasil RKPD tahun 2022 dengan capaian kinerja 98% dengan predikat Sangat Tinggi (T) dan capaian anggaran 90.77% dengan predikat Sangat Tinggi (T) hal ini dapat diartikan bahwa peningkatan kinerja masing-masing perangkat daerah mengalami penurunan.

Tabel 2. 300
Evaluasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023

No	PERANGKAT DAERAH	RATA- RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD TAHUN 2023 (%)		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD TAHUN 2023 (%)	
		KINERJA	REALISASI ANGGARAN	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	69.68	90.25	S	T
2	Dinas Kesehatan	46.85	89.86	SR	T
3	Badan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah	86.00	97.11	T	ST
4	Dinas Pekerjaan Umum (PU)	34.34	51.30	SR	R
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	61.48	93.89	R	ST
6	Dinas Pemadam Kebakaran	89.07	95.52	T	ST
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	100.00	96.18	ST	ST
8	Satuan Polisi Pamong Praja	99.33	85.42	ST	T
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100.00	74.62	ST	S
10	Dinas Sosial	54.95	96.49	R	ST
11	Dinas Perhubungan	46.45	98.91	SR	ST
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)	340.76	80.80	ST	T
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	74.00	88.03	S	T
14	Dinas Pemberdaaan Perempuan & Perlindungan Anak	123.06	93.08	ST	T
15	Dinas Pengendalian Penduduk & KB	39.05	95.96	SR	ST
16	Dinas Ketenaga Kerjaan	40.00	96.10	SR	ST
17	Dinas Koperasi dan UMKM	50.73	94.65	R	ST
18	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	39.96	97.68	SR	ST
19	Dinas Kebudayaan	38.15	95.97	SR	ST
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	25.41	38.22	SR	SR
21	Dinas Kearsipan	98.00	93.55	ST	ST
22	Dinas Perpustakaan	100.00	93.07	ST	ST
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	83.89	85.76	T	T
24	Dinas ketahanan Pangan	26.29	90.53	SR	T
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	95.00	87.52	ST	T

No	PERANGKAT DAERAH	RATA- RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD TAHUN 2023 (%)		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD TAHUN 2023 (%)	
		KINERJA	REALISASI ANGGARAN	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	98.00	95.03	ST	ST
27	Badan Pendapatan Daerah	90.30	95.38	T	ST
28	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	89.40	94.59	T	ST
29	Badan Penelitian dan Pengembangan	95.20	93.54	ST	ST
30	Sekretariat Daerah (SETDA)	95.20	96.37	ST	ST
31	Sekretariat DPRD	95.00	96.38	ST	ST
32	Inspektorat	98.00	87.43	ST	T
33	Dinas Persandian dan Statistik	89.95	96.76	T	ST
34	Dinas Pertanian, dan Peternakan, Perkebunan	90.00	94.03	T	ST
35	Dinas Pariwisata	95.80	95.47	ST	ST
36	Dinas Perikanan	96.00	95.19	ST	ST
37	Dinas Perdagangan	92.00	93.50	ST	ST
38	Dinas Perindustrian	98.00	87.63	ST	T
39	Dinas Pertanahan	48.00	87.86	SR	T
40	Dinas Transmigrasi	100.00	89.04	ST	T
41	Kecamatan Mungkajang	98.00	89.82	ST	T
42	Kecamatan Wara Barat	86.00	89.61	T	T
43	Kecamatan Bara	95.00	92.67	ST	ST
44	Kecamatan Sendana	98.00	91.16	ST	ST
45	Kecamatan Wara Selatan	86.00	90.29	T	T
46	Kecamatan Telluwanua	85.00	89.75	T	T
47	Kecmatan Wara Timur	90.00	88.31	T	T
48	kecamatan Wara	95.50	89.45	ST	T
49	Kecamatan Wara Utara	96.00	76.80	ST	T
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh Program SKPD		**84.95**	**89.72**	**T**	**T**

2.2.4 Evaluasi Capaian SPM

Tabel 2. 301
Capaian SPM Kota Palopo Tahun 2020-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
	Aspek Pelayanan Dasar					
I	**SPM Bidang Pendidikan**		***100***	***100***	***100***	***77,94***
	Pendidikan Dasar					
1	Persentase penduduk Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100	100	100	90,77
	Pendidikan Kesetaraan					
2	Persentase penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan Kesataraan	%	100	100	100	91,37
	Pendidikan Anak Usia Dini					
3	Persentase penduduk Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	100	100	51,61
II	**SPM Bidang Kesehatan**		***84.06***	***63,52***		***88,32***
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
1	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	96.27	97,07	77,99	90,63
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
2	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	99.79	99,67	84,60	95,50
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
3	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	96.86	96,73	100	95,88
	Pelayanan kesehatan balita					
4	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	68.33	55,25	0	89,62
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar					
5	Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	97.93	81,28	100	97,26
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif					
6	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	50.66	27,86	0	68,00
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut					
7	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	74.82	87,23	0	97,96
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi					
8	Persentase penduduk penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	41.88	10,99	85.71	47,38
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus					
9	Persentase penduduk penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	87.03	57,34	0	99,17
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat					
10	Persentase penduduk dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan		100	66,59	0	87,32
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis					
11	Persentase penduduk terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	39,61	56,49	93,87
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)					
12	Persentase penduduk dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	95.17	42,38	58,16	99,49
III	**SPM Bidang Pekerjaan Umum**		***89,51***	***84,55***	***86.03***	***89,35***
	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari					
1	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	81.70	84,50	88.23	*88,60*
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik					

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	97.31	84,59	83.84	90,03
IV	**SPM Bidang Perumahan**		***100***	***100***	***100***	***100***
	Penyediaan dan rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana					
1	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah					
2	Persentase penduduk yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100
V	**SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**		***79.80***	***99,21***	94.71	***94,81***
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum					
1	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	90.37	97,93	73.55	94,81
	Pelayanan informasi rawan bencana					
2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	88.88	100	100	100
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
3	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	84.17	100	100	100
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
4	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	70.00	100	100	100
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					
5	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	65.59	98,13	100	97
VI	**SPM Bidang Sosial**		***100***	***100***	***100***	***100***
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti					
1	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100
	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti					
2	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti					
3	Persentase penduduk lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti					
4	Persentase penduduk /gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota					
5	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	%	100	100	100	100

Sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/

2.2.5 Evaluasi Capaian Kinerja SDG's/TPB

Tabel 2. 302
Capaian Indikator Kinerja SDGs/TPB Kota Palopo Tahun 2020-2023

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
Tujuan I Tanpa Kemiskinan					
Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7.85	8.14		
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	80.41	90,39%		
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.				
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	1.12			
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	3.164			
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	100	100%		
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	82.59	89,69%		
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	75.60			
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	95.11			

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	21.08			
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	1			
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	100			
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	100			
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	100			
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	100			
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	n/a			
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	n/a			

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	n/a			
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	n/a			
Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	61.15			
Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Pend. 20 Kes. 25 Perl. Sos. 5	Pend. 21.90% Kes.30.59%		
Tujuan II Tanpa Kelaparan					
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	8.2	n/a		
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	1.79	6,12%		
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Sedang 14 Berat 30	Sedang 10,4 Berat 2,08		
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	7.98	n/a		
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	20	2,35%		
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	20	2,27%		

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.					
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1	1,58%		
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	0	4,89%		
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	60	44,59%		
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	91.6	90%		
Tujuan III Kehidupan Sehat dan Sejahtera					
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Ibu (AKI).	65	142,37		
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	100	100%		
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	100	100%		
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	1	3,70		
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	4	0		
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	1	0,37		
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga	Persentase kelurahan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	100	72,92%		

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.					
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0.04	0,06%		
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	230	321,09		
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Kejadian Malaria per 1000 orang.	1,700	0,20		
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Jumlah kelurahan yang mencapai eliminasi malaria.	1			
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Persentase kelurahan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	1			
Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Prevalensi tekanan darah tinggi.	11	3,28%		
Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	25	2,32%		
Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	2	n/a		
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	72			
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	76.54			
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	23			
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	12			

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.					
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Total Fertility Rate (TFR).	3			
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Unmet need pelayanan kesehatan.	11			
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	100	90,39		
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	100	90,39		
Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100	100%		
Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	100	5,67%		
Tujuan IV Pendidikan Berkualitas					
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	100			
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	100			
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	85			

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.					
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	100			
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	100			
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	10.36			
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	100			
Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	SD/MI (100) SMP/MTs (100)			
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	100			
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	100 dan 100			
Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	SD (55) SMP (60) SMA (65) SMK (55)			
Tujuan V Kesetaraan Gender					
Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Jumlah kebijakan yang responsif gender endukung pemberdayaan erempuan.	3			
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0			
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	0			

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.					
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0			
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	60			
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	9			
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	20			
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	30			
Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	20			
Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	71			
Tujuan VI Air Bwrsih dan Sanitasi Layak					
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	90			
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	505 m3/detik			
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	100			
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	91			

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.					
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	9	48 Kelurahan		
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	9	48 Kelurahan		
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Jumlah Kelurahan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	183 Skala Lingkungan			
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	60			
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	0			
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Memenuhi Standar	20,17		
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Ada			
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Ada			
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Ada			
Tujuan VIII Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi					
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	7.14			

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.					
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	PDB per kapita.	37.1			
Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	72.66			
Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	25.6			
Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	20			
Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	9.81			
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	1.22			
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Jumlah wisatawan mancanegara.	1,100			
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	113,900			
Tujuan IX Industri, Inovasi, Infrastruktur					
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	3.00			
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	5			
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	2,400			

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.					
Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	25			
Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	Proporsi individu yang menggunakan internet	0.1			
Tujuan X Berkurangnya Kesenjangan					
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Koefisien Gini.	0.339			
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8.1			
Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	39			
Tujuan XI Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan					
Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	93	97,06%		
Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	15			
Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	44			
Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Ada			
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0			
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	25			

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	750 *juta			
Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	100	77,67%		
Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	Jumlah kelurahan yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.	Ada			
Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	0			
Tujuan XII Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab					
Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	430	n/a		
Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	2	1421 Ton		
Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	1	n/a		
Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	1			
Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	1			
Tujuan XIII Penanganan Perubahan Iklim					
Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	0			
Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0			

2.2.6 Evaluasi Capaian IKK Bidang Urusan Daerah

Tabel 2. 303
Hasil Evaluasi Capaian IKK Bidang Urusan Daerah

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2023	Target 2023	Keterangan Pencapaian Target
Layanan Urusan Wajib Dasar				
1	Pendidikan			
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	51.67	100	Tidak Tercapai
2	Angka Partisipasi Kasar			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	94.13	100	Tidak Tencapai
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	99.01	100	Tidak Tercapai
3	Angka pendidikan yang ditamatkan (%)			
	Tidak/Belum Bersekolah (%)	10.62	5.5	Melampui Target
	Tamat SD/sederajat (%)	15.22	7	Melampui Target
	Tamat SMP/sederajat (%)	35.23	20	Melampui Target
	Tamat SMA (%)	36.72	41	Tidak Tercapai
	Tamat SMK (%)	4.21	7	Tidak Tercapai
	Tamat Perguruan Tinggi (%)	18.23	19	Tidak Tercapai
	Diploma I/II (%)	0.25	0.9	Tidak Tercapai
	Diploma III (%)	1.66	3.9	Tidak Tercapai
	Diploma IV/S1-S3 (%)	16.50	14.4	Melampui Target
4	Angka Partisipasi Murni			
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	98.81	100	Tidak Tercapai
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	80.37	100	Tidak Tercapai
5	Angka partisipasi sekolah (%)			
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (Per 1000)	993	1000	Tidak Tercapai
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (Per 1000)	986.3	1000	Tidak Tercapai
6	Angka Putus Sekolah:			
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0.09	0	Tidak Tercapai
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0	0	Sesuai Target
7	Angka Kelulusan:			
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100	Sesuai Target
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	100	Sesuai Target
8	Angka Melanjutkan (AM):	0		
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	100	100	Sesuai Target
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	100	100	Sesuai Target
9	Fasilitas Pendidikan:			
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100	100	Sesuai Target
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	100	100	Sesuai Target
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (per 10,000)			
	SD/MI (per 10,000)	42.58	39	Melampui Target
	SMP/ MTS (per 10,000)	25.80	30	Tidak Tercapai
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000)			
	SD/MI (per 10,000)	645.45	688	Tidak Tercapai
	SMP/ MTS (per 10,000)	829.47	794	Melampui Target
12	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar (per 10.000)	8.08	0.62	Melampui Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2023	Target 2023	Keterangan Pencapaian Target
13	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	81.33	100	Tidak Tercapai
14	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki (%)	100	100	Sesuai
15	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	100	100	Sesuai
16	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	92.67	100	Tidak Tercapai
17	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	50.54	100	Tidak Tercapai
18	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	100	Sesuai
19	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100	100	Sesuai
20	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan mengengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100	Sesuai
2.	Kesehatan			
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	12.55	0.3	Melampaui Target
2	Angka kelangsungan hidup bayi (per 100)	87.45	99	Tidak Tercapai
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	12.55	4	Melampaui Target
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	12.55	2	Melampaui Target
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	114.11	10	Melampaui Target
6	Rasio posyandu per satuan balita (Per 1000 balita)	8.22	11	Tidak Tercapai
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 10.000)	6.3	4	Melampaui Target
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000)	3.67	4	Tidak Tercapai
9	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1.000)	1.18	6	Tidak Tercapai
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 10.000)	11.84	6	Melampaui Target
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	6.72	86.98	Tidak Tercapai
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	76.46	100	Tidak Tercapai
13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	95.83	100	Tidak Tercapai
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	Sesuai
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	106.96	98.52	Melampaui Target
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk (Rasio)	-	0	
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	4.01	12	Tidak Tercapai
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	93.43	100	Tidak Tercapai
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (Rasio per 100.000 penduduk)	279.25	195	Melampaui Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2023	Target 2023	Keterangan Pencapaian Target
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0	0	Sesuai
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	57.22	94	Tidak Tercapai
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	15.41	42	Tidak Tercapai
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	Sesuai
25	Penderita diare yang ditangani (per 100.000)	60.10	10	Melampaui Target
26	Angka kejadian Malaria (per 1000)	68	55	Tidak Tercapai
27	Tingkat kematian akibat malaria (per 1000)	0	0	Sesuai
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat (%)	100	100	Sesuai
30	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (%)	0.08	32	Tidak Tercapai
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)	0,50	3	Tidak Tercapai
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	Sesuai
34	Cakupan kunjungan bayi (%)	123.09	100	Melampaui Target
35	Cakupan puskesmas (%)	133.33	133,33	Sesuai
36	Cakupan pembantu puskesmas (%)	62.50	75	Tidak Tercapai
37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	80.05	100	Tidak Tercapai
38	Cakupan pelayanan nifas (%)	76	100	Tidak Tercapai
39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	60.14	78	Tidak Tercapai
40	Cakupan pelayanan anak balita (%)	98.67	76	Melampaui Target
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	100	100	Sesuai
42	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	100	100	Sesuai
43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100	100	Sesuai
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	Sesuai
45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	0	100	Tidak Tercapai
46	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (%)	0.48	0.55	Tidak Tercapai
47	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (%)	100	0.79	Melampaui Target
48	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	89	100	Tidak Tercapai
49	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94	100	Tidak Tercapai
50	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	95	100	Tidak Tercapai
51	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	89	100	Tidak Tercapai
52	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	102	100	Melampaui Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2023	Target 2023	Keterangan Pencapaian Target
53	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	62	100	Tidak Tercapai
54	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatakan sesuai standar	97	100	Tidak Tercapai
55	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35	100	Tidak Tercapai
56	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	109	100	Melampaui Target
57	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	86	100	Tidak Tercapai
58	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	98	100	Tidak Tercapai
59	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	102	100	Melampaui Batas
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Pekerjaan Umum:			
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	63.56	72	Tidak Tercapai
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (per 10,000)	26.39	30	Tidak Tercapai
3	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4		n/a	
4	Persentase Jalan Kewenangan Kota yang Berkondisi Baik (> 40 KM/Jam) (%)	64.79	74	Tidak Tercapai
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	58.81	1.38	Melampaui Target
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar		n/a	
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	89.70	99	Tidak Tercapai
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	36.76	47	Tidak Tercapai
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	22.80	11	Melampaui Target
10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (%)	24.74	12	Melampaui Target
11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	77.20	8	Melampaui Target
12	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik (%)	78.43	75	Melampaui Target
13	Rasio Jaringan Irigasi (per 1000 Ha)	82.61	23	Melampaui Target
14	Persentase penduduk berakses air minum (%)	96.20	100	Tidak Tercapai
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	98	100	Tidak Tercapai
16	Persentase areal kawasan kumuh (%)	0.16	1.53	Tidak Tercapai
17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan		5	
18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 10.000)	59.48	1.9	Melampaui Target
19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (per 1000)	0	2	Tidak Tercapai

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2023	Target 2023	Keterangan Pencapaian Target
20	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	78.08	8	Melampaui Target
21	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	0	8	Tidak Tercapai
22	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	70.56	23	Melampaui Target
23	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	98	100	Tidak Tercapai
24	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	95	100	Tidak Tercapai
3	Penataan Ruang:			
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	31.67	77.2	Tidak Tercapai
2	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik (Ha)	596.36	1177.99	Tidak Tercapai
3	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	16.58	80.1	Tidak Tercapai
4	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	28.41	80.1	Tidak Tercapai
5	Ruang publik yang berubah peruntukannya		80.1	
6	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	78.08	80.1	Tidak Tercapai
7	Ketaatan terhadap RTRW	97.42	56	Melampaui Target
8	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	5.53	80.1	Tidak Tercapai
9	Tingkat kemantapan Jalan kabupaten/kota	57.35	72	Tidak Tercapai
10	Rasio tenaga/operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		70	
11	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	Sesuai
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
1	Rasio rumah layak huni	0.81	0.22	Tidak Tercapai
2	Rasio permukiman layak huni (%)	92.53	96.67	Tidak Tercapai
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	92.83	98	Tidak Tercapai
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	95.61	98.7	Tidak Tercapai
5	Persentase pemukiman yang tertata (%)	95.41	93.75	Melampaui Target
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	1.10	0	Melampaui Target
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	11.27	0	Malampaui Target
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	5.69	0	Melampaui Target
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	31.87	45	Tidak Tercapai
10	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	Sesuai

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2023	Target 2023	Keterangan Pencapaian Target
11	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100	Sesuai
12	Persentase permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	20	30	Tidak Tercapai
13	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)(%)	0	1.2	Tidak Tercapai
14	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	80	45	Melampaui Batas
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
1	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (Linmas)	100	100	Sesuai
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	99.46	100	Tidak Tercapai
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100	15.15	Melampaui Target
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	100	Sesuai
5	Persentase Penegakan PERDA	100	100	Sesuai
6	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	99.46	100	Tidak Tercapai
7	Persentase Perda dan perkada yang ditegakkann	80.77	100	Tidak Tercapai
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100	100	Sesuai
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	100	Sesuai
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	Sesuai
11	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	Sesuai
12	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100	100	Sesuai
6.	Sosial			
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)		57	
2	Persentase PMKS yang tertangani (%)		58	
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)		63	
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)		4	
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)		100	
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)		100	
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)		100	

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2023	Target 2023	Keterangan Pencapaian Target
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)		100	
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)		44	
10	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)		44	
11	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		100	
Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
1	Tenaga Kerja			
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Per 1000)	4.16	6	Tidak Tercapai
	Angka sengketa pengusaha-pekerja di Perusahaan ber TDP per tahun (Per 1000)	11.86	1	Melampaui Target
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	25	14	Melampaui Target
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	36.98	56	Tidak Tercapai
4	Keselamatan dan perlindungan (%)	34.18	28	Melampaui Target
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	41.79	57	Tidak Tercapai
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	0	0	Sesuai Target
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	4.17	1.9	Melampaui Target
8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	0	2.5	Tidak Tercapai
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	27.97	49	Tidak Tercapai
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	100	15	Melampaui Target
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	40.76	7	Melampaui Target
12	Rasio lulusan S1/S2/S3	16.50	10.85	Melampaui Target
13	Persentase kegiatan yang dilaksanan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	75	Melampaui Target
14	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	2,15	5	Tidak Tercapai
15	Tingkat produktivitas tenaga kerja (Ribu/Tenaga Kerja/Thn)	110.66	115.75	Tidak Tercapai
16	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	41.79	28	Melampaui Target
17	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalan dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	36.98	56	Tidak Tercapai
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	8.20	12	Tidak Tercapai
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	28	28	Sesuai

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2023	Target 2023	Keterangan Pencapaian Target
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	2.20	5	Tidak Tercapai
4	Rasio KDRT (per 10.000)	0.71	1	Tidak Tercapai
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)	-	-	
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	53.29	48.39	Melampaui Target
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	96.55	27	Melampaui Target
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)		60	
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.(%)		50	
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100	100	Sesuai
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	96.55	60	Melampaui Target
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)		12	
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)		30	
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	79.87	0	Melampaui Target
	APM Perempuan pada Tingkat SD		100	
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SD		100	
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	64.9	0	Melampaui Target
	APM Perempuan pada Tingkat SMP		80	
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMP		82	
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	67.9	0	Melampaui Target
	APM Perempuan pada Tingkat SMA		65	
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMA		78	
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi		44.85	
	APM Perempuan yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi		n/a	
	APM Laki-Laki yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi		n/a	
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun		n/a	
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian		46	
20	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		40.00	
21	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	96.55	100	Tidak Tercapai
22	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		3	
3	Pangan			
1	Ketersediaan pangan utama (%)		12	

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2023	Target 2023	Keterangan Pencapaian Target
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)		2499	
	Ketersediaan energi perkapita (Kkal/kapita/hari)		2400	
	Ketersediaan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)		99	
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)		91	
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)		98.1	
4	Pertanahan			
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	5.33	31	Tidak Tercapai
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	66.67	31	Melampaui Target
3	Penyelesaian izin lokasi (%)	100	100	Sesuai
4	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)		100	
5	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		100	
6	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal		3	
7	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diresdistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		10	
8	Tersedianya tanah untuk masyarakat		2	
9	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (Kasus)	2	3	Tidak Tercapai
5	Lingkungan Hidup			
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Belum tersedia	ada	Tidak Tercapai
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Belum tersedia	ada	Tidak Tercapai
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	1	0	Melampaui Targe
4	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	53.33	31.46	Melampaui Target
5	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	89.53	88.81	Melampaui Target
6	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	60.3	19.55	Melampaui Target
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (%)	10.98	30	Tidak Tercapai
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota		0	
	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina (Orang)		1	
	Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum (Orang)		1	
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA		0	
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional		0	
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional		0	

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2023	Target 2023	Keterangan Pencapaian Target
12	Penetapan hak MHA		0	
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan (%)		0	
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana (%)		0	
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat		0	
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (Kali)	Ada	Ada	Sesuai
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.(%)	100	100	Sesuai
18	Timbulan sampah yang ditangani (%)	69.01	93	Tidak Tercapai
19	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (%)	11.98	4.4	Melampaui Target
20	Persentase cakupan area pelayanan (%)	81.43	87.9	Tidak Tercapai
21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	69.01	90	Tidak Tercapai
22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	100	80.3	Melampaui Target
23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan (%)	100	100	Sesuai
24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	100	100	Sesuai
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kab/kota	69.52	43.90	Melampaui Target
26	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	100	80.3	Melampaui Target
27	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadapat izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100	0	Melampaui Target
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk		0.9	
2	Rasio bayi berakte kelahiran		0.98	
3	Rasio pasangan berakte nikah	77.16	0.95	Melampaui Target
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	ada	Sesuai
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	sudah	Sesuai
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)		100	
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)		100	
8	Perekaman KTP elektronik		0	
9	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memilikan KIA		0	
10	Kepemilikan akta kelahiran		0.98	
11	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	0	6	Tidak Tercapai
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	100	100	Sesuai
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1	Sesuai
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)		2.5	

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2023	Target 2023	Keterangan Pencapaian Target
4	Persentase LSM aktif (%)		3	
5	Persentase LPM Berprestasi (%)		4.2	
6	Persentase PKK aktif	100	100	Sesuai
7	Persentase Posyandu aktif (%)	94.16	100	Tidak Tercapai
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat		n/a	
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat		n/a	
10	Persentase pengentasan desa tertinggal		0	
11	Persentase peningkatan status desa mandiri		n/a	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1.57	2.26	Tidak Tercapai
2	Total Fertility Rate (TFR) (Angka)		2	
3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (ada/tidak)	Ada	Tidak Ada	
4	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	0	4	Tidak Tercapai
5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	36.73	39	Tidak Tercapai
6	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	2.404	4	Tidak Tercapai
7	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0	0	Sesuai
8	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	2	2	Sesuai
9	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0	1	Tidak Tercapai
10	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1	2	Tidak Tercapai
11	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%)	27.47	84.04	Tidak Tercapai
12	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)		8	
13	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (1000 PUS)	15.36	3	Melampaui Target
14	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	09.01	9	Tidak Tercapai
15	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	27.47	25	Melampaui Target
16	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	38.43	20.86	Melampaui Target
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	100	93.35	Melampaui Target
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	75.89	77.26	Tidak Tercapai
19	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	13.38	53.63	Tidak Tercapai
20	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%)	9	0.11	Melampaui Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2023	Target 2023	Keterangan Pencapaian Target
21	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	9	14	Tidak Tercapai
22	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	100	100	Sesuai
23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	0.58	36.83	Melampaui Target
24	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	Sesuai
25	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota (%)	99	12	Melampaui Target
26	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes (%)	97.81	69	Melampaui Target
27	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	100	100	Sesuai
28	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (%)		n/a	
29	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) (%)		n/a	
30	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	100	3.96	Melampaui Taget
31	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	5.50	100	Tidak Tercapai
32	Rata-rata usia kawin pertama wanita (Tahun)	24	25	Tidak Tercapai
33	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD (%)	90	0.29	Melampaui Target
	TFR (Angka Kelahiran Total)		2	
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mPCR)		84.04	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	09.01	9	Tidak Tercapai
9	Perhubungan			
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	1.982.192	1,642,882	Melampaui Target
2	Rasio ijin trayek (Per 100.000 Penduduk)	1.03	2	Tidak Tercapai
3	Jumlah uji kir angkutan umum (Unit)	167	1.500	Tidak Tercapai
4	Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bis	2	2	Sesuai
5	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	830.24	0	Melampaui Target
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	0.10	1	Tidak Tercapai
7	Persentase Pemasangan Rambu-rambu (%)	27	49	Tidak Tercapai
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (per 1000)	29.94	19	Melampaui Target
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang/Tahun)	1.982.192	1,642,256	Melampaui Target

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2023	Target 2023	Keterangan Pencapaian Target
10	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (M3/Tahun)		620,825	
11	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	1.982.192	2,241,351	Tidak Tercapai
12	Rasio konektivitas kabupaten/kota			
13	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,25		
10	Komunikasi dan Informatika			
1	Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)		4	
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi		0.98	
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)		80.9	
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		0.12	
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi		0.9	
6	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		95	
7	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		90	
8	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		90	
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah			
1	Persentase koperasi aktif (%)	25.17	73	Tidak Tercapai
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	100	100	Sesuai
3	Persentase BPR/LKM aktif (%)	100	100	Sesuai
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	100	78	Melampaui Target
5	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	25.17	72	Tidak Tercapai
6	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha		8	
12	Penanaman Modal			
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	55	72	Tidak Tercapai
2	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	5	0	Melampaui Target
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	149.633	190.000	Tidak Tercapai
4	Rasio daya serap tenaga kerja (per 100 Juta Nilai PMDN)	0.12	16	Tidak Tercapai
5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	349.23	30	Melampaui Target
6	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	20	5	Melampaui Target
13	Kepemudaan dan Olah Raga			
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)		55.4	
2	Persentase wirausaha muda (%)		1.39	
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)		71.43	
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)		37.35	
5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)		70.6	
6	Jumlah atlet berprestasi (Orang)		10	
7	Jumlah prestasi olahraga (Cabang)		4	
8	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		1.39	

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2023	Target 2023	Keterangan Pencapaian Target
9	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		10	
10	Peningkatan prestasi olahrgaa		5	
14	Statistik			
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Sesuai
2	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada	Ada	Sesuai
3	Buku ”PDRB”	Ada	Ada	Sesuai
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	Sesuai
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	Sesuai
15	Persandian			
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah (%)	100	82	Melampaui Target
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100	95	Melampaui Target
16	Kebudayaan			
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya		17	
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)		100	
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Buah)		1	
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		52	
	Terlestarikannya Cagar Budaya			
17	Perpustakaan			
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	7.59	13	Tidak Tercapai
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	53.51	41	Melampaui Target
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (per 1000)	1.16	1.45	Tidak Tercapai
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	1074	1400	Tidak Tercapai
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	16.500	500	Melampaui Target
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	100	69	Melampaui Target
7	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	7.59	52.5	Tidak Tercapai
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	27.01	9	Melampaui Target
18	Kearsipan			
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku		27	
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan		10	
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Rahun 2009 tentang Kearsipan		100	
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		90	

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2023	Target 2023	Keterangan Pencapaian Target
Layanan Urusan Pilihan				
1.	Pariwisata			
1	Kunjungan wisata (%)		100	
2	Lama kunjungan Wisata (Rata-rata Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun)		2.5	
3	PAD sektor pariwisata (%)		7	
4	Persentase pertumbuhan jumah wisatawan mancanegara per kebangsaan		n/a	
5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota		2	
6	Tingkat hunian akomodasi (%)		33	
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		1.26	
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		7	
2.	Pertanian			
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	15.4	15.3	Melampaui Target
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	2.1	6	Tidak Tercapai
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	2.04	4	Tidak Tercapai
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	1.81	35	Tidak Tercapai
5	Produksi Bahan Pangan Utama (Ton/Tahun)	21147		
	Padi	16.410	41,720	Tidak Tercapai
	Jagung	4.737	6,768	Tidak Tercapai
	Ubi Kayu	0	185	Tidak Tercapai
	Ubi Jalar	0	6	Tidak Tercapai
	Sagu	0	20	Tidak Tercapai
6	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)			
	Padi		6,81	
	Jagung		7,58	
	Ubi Kayu		31	
	Ubi jalar		16	
	Sagu		0.45	
7	Cakupan bina kelompok petani		55	
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun		6,81	
	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		20	
3	Perdagangan			
1	Ekspor Bersih Perdagangan (Nilai/Juta)	0	-850,195	Melampaui Target
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)		15	
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		75.55	
4	Persentase kinerja realisasi pupuk		57	
5	Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		62	
4	Perindustrian			
1	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)		2.7	
2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah		5	

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2023	Target 2023	Keterangan Pencapaian Target
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator		95	
4	Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Tidak ada	n/a	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		96.9	
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (UKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota		11.35	
7	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		Tersedia	
6	Transmigrasi			
1	Persentase transmigran swakarsa	0	0	Sesuai
7	Perikanan			
1	Produksi perikanan (%)	100	100	Sesuai
	Target Produksi Perikanan Daerah (Ton/Tahun)	193154.56	170,914	Melampaui Target
2	Konsumsi ikan (%)	91.79	100	Tidak Tercapai
	Target Konsumsi Perikanan Daerah (Kg/Kapita/Tahun)	54.79	59.69	Tidak Tercapai
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	2.77	4.83	Tidak Tercapai
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	5.72	6.87	Tidak Tercapai
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman		n/a	
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial		n/a	
7	Nilai tukar nelayan	111.49	110	Melampaui Target
	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	193154.56	171,027	Melampaui Target
Penunjang Urusan				
1.	Perencanaan Pembangunan			
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Sesuai
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Sesuai
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Sesuai
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Sesuai
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	98	98	Sesuai
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	Sesuai
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW		n/a	
2.	Keuangan			
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	
2	Persentase SILPA		0	
3	Persentase SiLPA terhadap APBD		1.2	
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)			

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2023	Target 2023	Keterangan Pencapaian Target
	Persentase program yang tidak terlaksana (%)		0	
	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana (%)		0	
5	Persentase belanja pendidikan (20%)		20	
6	Persentase belanja kesehatan (10%)		10	
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)			
	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD (%)			
	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD (%)			
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (%)	0	2.43	Tidak Tercapai
9	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	Perbandingan antara belanja operasi, modal dan tidak terduga			
	Belanja Operasi Terhadap APBD (%)		75	
	Belanja Modal Terhadap APBD (%)		24	
	Belanja Tidak Terduga Terhadap APBD (%)		1	
10	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kerja kesehatan		20	
	Rasio PAD (%)	20.57	20.41	Melampaui Target
	Devialisasi realisasi belanja terhadapa belanja total dalam APBD (%)	100	100	Sesuai
	Devialisasi realisasi belanja terhadapa anggaran PAD dalam APBD (%)			
	Manajemen Aset			
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (%)		0	
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100	100	Sesuai
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)		1	
	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	100	Sesuai
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan			
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Hari/Jam Pelajaran)	103.893	103.894	Tidak Tercapai
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)		1.4	
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		50	
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	44	33	Melampaui Target
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	652	949	Tidak Tercapai
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (Orang)	2296	2330	Tidak Tercapai
7	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	53.98	68	Tidak Tercapai
8	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	46.02	38	Melampaui Target
9	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		5	

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian 2023	Target 2023	Keterangan Pencapaian Target
4.	Penelitian dan pengembangan			
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.(%)	100	100	Sesuai
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.(%)	100	100	Sesuai
	Penerapan SIDa:			
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.(%)		59	
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah(%)	100	100	Sesuai
5.	Pengawasan			
1	Persentase tindak lanjut temuan		83	
2	Persentase pelanggaran pegawai		0.3	
3	Jumlah temuan BPK		12	
4	Maturitas Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)		3 (Nilai 3.4)	
5	Peningkatan Kapabilitass Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level		3	
6.	Sekretariat Dewan			
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Sesuai
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Sesuai
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Sesuai
7	Sekretariat Daerah			
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama (%)		0	
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)		40	
3	Rasio belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)		93	

2.2.7 Evaluasi Capaian IKU

Tabel.2.304
Hasil Capaian IKU Kota Palopo Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja	Target	Keterangan
1	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	58,92	75	Tidak Tercapai
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	poin	84,16	86	Tidak Tercapai
3	Indeks SAKIP	poin	64,35	80	Tidak Tercapai
4	PDRB per Kapita (ADHB)	juta/kapita/thn	59,14	44	Melampaui Target
5	Persentase Penduduk Miskin	persen	7,69	5.99	Tidak Tercapai
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	7,81	8.07	Melampaui Target
7	Angka Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,34	5.69	Tidak Tercapai
8	Gini Rasio	angka	0,367	0.332	Tidak Tercapai

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja	Target	Keterangan
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	80,77	79.25	Melamapui Target
10	Indeks Pembangunan Gender	poin	97,61		
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	69,52	43.90	Melampaui Target
12	Indeks Resiko Bencana (IRB)	poin dan predikat	167,40		
13	Luas Wilayah yang Tergenang/ Terdampak Banjir	Ha	9,95	8	Tidak tercapai
14	Persentase Luas Kawasan Kumuh dari Total Luas Wilayah Kota	persen	1,09	1.53	Melampaui Target

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan

Permasalahan pembangunan dianalisa dari hasil capaian pembangunan, dan dinamika social yang berkembang di masyarakat yang memerlukan perhatian untuk segera ditangani. Berikut adalah Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Kota Palopo Tahun 2023 Terhadap Hasil Evaluasi Pembangunan Kota Palopo s.d tahun 2022

Tabel 2.305
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Terhadap Hasil Evaluasi Pembangunan Kota Palopo

Permasalahan Pembangunan	Hasil Evaluasi Pembangunan
1. Daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Angka Pertumbuhan IPM Lamban dan Kurang Berdaya Saing Angka Pertumbuhan IPM Kota Palopo 2021 (0.10) masih berada dibawah angka pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan 2021 (0.38) dan juga tertinggal dari angka pertumbuhan IPM Kota Pare-Pare 2021 (0.31) poin. Angka pertumbuhan IPM Kota Palopo bahkan juga kalah dengan Luwu Timur (0.58), Luwu Utara (0.16) dan Luwu (0.17). Jika angka pertumbuhan ini terus berlangsung demikian, aka nada titik dimana pada tahun tertentu, IPM Kota Palopo akan berada dibwah IPM beberapa kabupaten di Luwu Raya, dan akan semakin tertinggal dengan kota lainnya di Sulsel.
2. Taraf Hidup dan Tingkat Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Angka PDRB per Kapita Relatif Rendah Angka PDRB per Kapita (ADHB) masyarakat Kota Palopo tahun 2021 (42.01 Juta/Kapita/Thn) lebih rendah atau menurun dibandingkan 2020 (43.02 Juta/Tahun). Kondisi tahun 2021 juga menunjukan, PDRB per Kapita Kota Palopo masih belum sekompetitif indicator yang sama pada level nasional, karena capaian Kota Palopo ini masih berada dibawah rata-rata PDRB per kapita nasional 2021 (56.9 Juta/Kapita/Tahun), berada dibawah Kota Pare-Pare (49.9 Juta Kapita/Tahun), bahkan juga tertinggal dengan PDRB per Kapita Kabupaten Luwu 2021 (43.85 Juta/Kapita/Tahun).
	Gini Rasio Cenderung Meningkat Angka gini rasio Kota Palopo pada tahun 2021 (0.354) meningkat dibandingkan tahun 2020 (0.338). Ini mengindikasikan semakin melebarnya kesenjangan pendapatan pada masyarakat Kota Palopo. Nilai indeks gini Kota Palopo tahun 2021 juga belum memenuhi atau belum lebih baik dari target Kota Palopo 2021 yakni 0.337 poin.
	Persentase Penduduk Miskin Tak Penuhi Target Daerah Persentase penduduk miskin Kota Palopo tahun 2021 (7.85%) berada dibawah atau tak memenuhi target Kota Palopo tahun 2021 (7.64%). Bahkan jika dibandingkan tahun 2020 (7.82%), persentase penduduk miskin 2021 justru lebih besar. Persentase penduduk Kota Palopo 2021, belum lebih baik dari Kota Pare-Pare, Kota Makssar bahkan di Luwu Raya, setelah Luwu Utara, Kota Palopo menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin terbanyak.
	Jumlah Penduduk Miskin Meningkat Penurunan propsorsi penduduk miskin di Kota Palopo kurun waktu 2017-2021 berjalan lamban. Data menunjukan tahun 2017 ke 2018, jumlah penduduk miskin malah meningkat dari 15.020 Jiwa menjadi 15,440 jiwa di tahun 2018. Dan 2018-2019, menurun 1,170 jiwa (dari 15440 jiwa menjadi 14,270 Jiwa). Namun 2019-2020, jumlah meningkat lagi dari 14,270 jiwa (2019) menjadi 14,370 Jiwa (2020) kemudian di tahun 2021 jumlahnya meningkat menjadi 14.710 Jiwa.
3. Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Infrastruktur Daerah	Indeks Daya Saing Infrastruktur Persentase Jalan Mantap 2021 masih pada angka 67.87%, dengan panjang jalan berkondisi baik 342.09 Km dari total panjang jalan 503.16 Km. Persentase masyarakat yang mengakses air minum layak sebesar 95.11 %, belum sesuai target SPM. Persentase sanitasi layak sebesar 83.68%, dengan Indeks daya saing infrastruktur tahun 2021 sebesar 85.88
4. Pengelolaan Tata Ruang dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Banjir Masih Jadi Ancaman Pada tahun 2021, peristiwa atau bencana banjir masih berdampak pada 2 (dua) kelurahan di Kecamatan Telluwanua, yaitu Kelurahan Pentojangan (16.2 Ha) dan Kelurahan Salubattang (38.75 Ha). Total areal yang terdampak banjir adalah 54.95 ha. Capaian ini jauh dari target 2021 yang menargetkan 15 ha areal terdampak banjir. Banjir ini merusak kawasan budidaya pertanian dan kawasan pemukiman dan perumahan masyarakat. Ancaman bencana lain adalah longsor pada kawasan pemukiman masyarakat, ancaman banjir serta abrasi serta semakin tingginya kerentanan ancaman kebakaran akibat semakin padatnya rumah penduduk. Keteraturan

Permasalahan Pembangunan	Hasil Evaluasi Pembangunan
	bangunan serta penegakan aturan sebelum memulai pembangunan menjadi hal yang perlu mendapatkan penekanan dan perhatian.
	Ruang terbuka Hijau Belum Capai Target Target Nilai Indikator Ruang Terbuka Hijau Publik Tahun 2021 adalah sebesar 76,95 dan terealisasi sebesar 76,93%. Selisih luasan RTH yang dibangun dan dipelihara belum sesuai karena adanya kendala proses pembebasan lahan pada kegiatan pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau yang belum dapat direalisasikan, belum semua RTH berfungsi optimal karena status kepemilikan dan kewenangan pengelolaan lahan RTH yang belum sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Kota, Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam merawat dan memelihara RTH yang disediakan oleh pemerintah.
5. Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik (Dasar dan Non Dasar) yang Inovatif	Akuntabilitas Kinerja dan Nilai RB Belum Sesuai Target Daerah Pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah serta layanan public yang berstandar dan berbasis inovasi masih sangat perlu dikembangkan oleh Pemerintah Kota Palopo termasuk pelaksanaan pemerintahan yang berbasis elektronik. Pada tahun 2021, nilai SAKIP Pemerintah Kota Palopo berada pada predikat B lebih baik dari tahun 2020 yang berada pada predikat CC.
6. Penanganan Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka Meningkat dan Tak Penuhi Target Daerah Tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo pada tahun 2021, berada pada angka 10.37% (Maret 2021) dan belum memenuhi target daerah 2021 yakni 9,51%. Kondisinya pun meningkat, dibandingkan setahun lalu, 2020 yang berada pada angka 10.32%. Kinerjanya belum lebih baik dari beberapa kabupaten yakni Kabupaten Luwu (4.94%), Luwu Utara (3.01%) dan Luwu Timur (4.46%), Kota Pare-Pare (7.14%), bahkan belum lebih baik dari pada -rata Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional 2021 (7.07%) Rata-Rata Sulsel (6.31%).
	Pertumbuhan PDRB Terendah Dalam Sejarah Kota Palopo Pada tahun 2021, laju pertumbuhan PDRB Kota Palopo hanya berada pada angka 0.45%. Kondisi ini belum mencapai target pemerintah tahun 2021 (4.16%). Angka pertumbuhan LPE 2021, juga tertinggal jauh dengan LPE 2020 yang berada pada angka 6.75% bahkan menjadi yang terendah sejak Kota Palopo terbentuk. Meski demikian, bila dibandingkan dengan wilayah lain, angka LPE 2021 Kota Palopo masih lebih baik dari angka LPE Kota Makassar yang berada pada angka minus yakni (-1.27%), Kota Pare-Pare, minus (-0.08%) dan rata-rata angka LPE Sulawesi Selatan minus (-0.70%) bahkan LPE Nasional minus (-0.21%). LPE Kota Palopo masih tumbuh positif, sementara daerah lain, melambat dan berada pada angka negative dibandingkan setahun sebelumnya, 2020

Berikut adalah rumusan permasalahan pembangunan daerah Kota Palopo Tahun 2024 yang berhubungan dengan Sasaran Pembangunan Daerah :

Tabel 2.306
Keterkaitan Sasaran, Permasalahan Pembangunan, dan Prioritas RKPD
Kota Palopo Tahun 2025

Sasaran Pembangunan	Permasalahan dalam RPD 2024-2026	Permasalahan Pembangunan 2024	Prioritas RKPD 2025
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	tatakelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan belum berdaya saing dan lambatnya perkembangan kualitas sumberdaya manusia	Rendahnya kompetensi SDM, distribusi informasi yang kurang, tata kelola kerja yang belum berjalan dengan baik, merit sistem, penataan kelembagaan dan , revolusi mental	peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan tata kelola pemerintahan (Prioritas 2)
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)			
Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	risiko bencana yang masih tinggi dan ancaman dekradasi kualitas lingkungan	pemerataan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan ketahanan bencana.	Pemantapan Infrastruktur wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan penanganan Bencana (Prioritas 3)
Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)			
Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	perkembangan sosial ekonomi, msyakarat	Rendahnya SDM kewirausahaan, Pemasaran,	peningkatan Ekonomi, produktifitas dan nilai

	lamban, dan perkembangan ekonomi daerah belum berkualitas	akses modal, sarana dan prasarana produksi, Rendahnya Pendapatan masyarakat, PAD	tambah daerah (Prioritas 1)
Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)			
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)			
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)			

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

No	BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN
Layanan Urusan Wajib Dasar		
1.	**Pendidikan**	
		Pemerataan atas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Belum Maksimal, antara dalam kota dan beberapa wilayah yang berada kecamatan terluar.
		Pertumbuhan jumlah anak usia sekolah pada tingkat pendidikan dasar belum berbanding lurus dengan penyediaan sarana dan prasarana gedung sekolah.
		Pendidikan non formal dan pendidikan luar biasa belum berkembang dengan baik dan berstandarisasi.
		Masih adanya beberapa sarana sekolah yang aktifitas belajar mengajarnya terganggung akibat ancaman banjir, longsor dan keamanan lingkungan sekolah.
		Pembinaan terhadap kelompok belajar masyarakat belum optimal dalam mendorong pendidikan kesetaraan
2.	**Kesehatan**	
		Pemantapan system kesehatan daerah terutama system, pelayanan dan sarana prasarana kesehatan dalam penanganan penyakit menular
		Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan belum mencakupi seluruh unsur pelayanan yang dipersyaratkan.
		Tuntutan pada layanan kesehatan yang cepat, mudah, dan tanpa antrian dengan kejelasan waktu pelayanan, semakin mengemuka.
		Partisipasi masyarakat miskin terhadap Jaminan Kesehatan Nasional masih belum memadai, akibat keterbatasan ekonomi.
		Ketersediaan jumlah angkutan medis (ambulance) dan jangkauan pelayanan masih terbatas.
		Jumlah dan ketersediaan ruang rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan (Rumah Sakit) belum memadai.
		Rasio jumlah balita dan posyandu dari waktu ke waktu terus menunjukan trend yang tidak berimbang. Demikian halnya dengan rasio ideal pelayanan dokter umum, dokter spesialis terhadap jumlah pasien di Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan (RS).
		Penyebaran dan distribusi keberadaan puskesmas terakreditasi, ketersediaan ruang rawat inap, ketersediaan obat dan peralatan esensial, termasuk perbaikan sarana dan prasarana faskes tingkat pertama lebih banyak terpusat di sekitar kota. Demikian halnya dengan pelayanan kesehatan dan keselamatan anak dan balita termasuk ibu hamil dan melahirkan serta bagi lansia.
		Koordinasi dengan perangkat daerah lain belum optimal terkait pembukaan dan peningkatan kualitas jalan dari beberapa pemukiman masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan.
		Upaya mengembangkan obat asli dengan memanfaatkan potensi lokal belum memadai.
		Upaya penanggulangan penyakit menular dan penciptaan lingkungan yang sehat, perbaikan gizi, dan promosi kesehatan lainnya belum optimal.
		Standar dan pelayanan RSUD Sawerigading menjadi RS Rujukan di Luwu Raya masih perlu diakselerasi.

No	BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN
		Penyediaan dan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana di RSUD diperhadapkan pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
		Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai belum memadai.
		Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir belum optimal.
		Pembangunan prasarana pengaman pantai belum memadai.
		Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan di kawasan pesisir dan daerah luar kota belum memadai dan belum merata.
		Koordinasi dengan sejumlah stake holder terkait yang membutuhkan penanganan akses jalan dan jembatan, belum terjalin dengan baik seperti akses jalan jembatan ke fasilitas kesehatan, pendidikan, sentra produksi/budidaya.
		Koordinasi perencanaan dan pemanfaatan serta pengelolaan tata ruang dan perencanaan infrastruktur jaringan belum memadai.
		Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau belum maksimal.
		Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan serta perlindungan ruang terbuka hijau masih minim.
		Eksistensi lahan budidaya secara khusus lahan pertanian di Kota Palopo terus tertekan oleh pengembangan sektor lain seperti perumahan dari waktu ke waktu.
		Jaringan irigasi kabupaten sebagian mengalami kerusakan sehingga kurang efektif dalam layanan air.
4.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	
		Pengembangan perumahan dan lingkungan sehat perumahan belum optimal dalam menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan perumahan, termasuk masih adanya rumah layak huni.
		Pemberdayaan komunitas perumahan belum memadai dalam penataan pemukiman termasuk penataan lingkungan pemukiman kumuh.
		Pengelolaan areal pemakaman belum optimal
		Belum tercukupinya dukungan prasarana dan sarana umum (PSU) dalam menghadirkan lingkungan perumahan/pemukiman yang sehat dan aman.
5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**	
		Upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal kurang bersinergi antar stakeholder
		Fasilitas, sarana-prasarana serta kapasitas SDM Satpol PP dalam penegakan Perda secara menyeluruh belum memadai.
		Upaya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban, termasuk pelibatannya dalam pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) dan menjaga keamanan, belum memadai.
		Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dalam masyarakat termasuk pada lingkungan perumahan belum memadai.
		Kecukupan sarana dan prasarana serta peralatan penanganan kebakaran belum memadai dalam memenuhi tingkat waktu tanggap (response time rate) yang baik pada wilayah manajemen kebakaran (WMK).
		Kapasitas dalam penyediaan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum berkembang seiring dengan tuntutan/kebutuhan.
		Kapasitas dan kerjasama stakeholder daerah dalam pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat, serta deteksi dini dan pencegahan konflik sosial, masih rendah.
6.	**Sosial**	
		Data mutakhir untuk keseluruhan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS dalam berbagai kelompok/golongan belum tersedia dengan cukup sebagai dasar dalam penanganan PMKS.

No	BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN
		Ketersediaan sumberdaya manusia, finansial dan sarana-prasarana dalam penanganan, pemberian bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS masih terbatas.
		Kemampuan panti sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) dalam penyediaan sarana pelayanan sosial dan prasarana kesejahteraan sosial masih terbatas.
		Kemampuan SDM dan sarana-prasarana dalam rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, anak terlantar di luar panti, lanjut usia telantar di luar panti, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, masih terbatas.
		Kemampuan SDM dan sarana-prasarana dalam evakuasi, bantuan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana masih terbatas.
		Data mutakhir untuk keseluruhan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS dalam berbagai kelompok/golongan belum tersedia dengan cukup sebagai dasar dalam penanganan PMKS.
Layanan Urusan Wajib Non Dasar		
1	**Tenaga Kerja**	
		Data yang lengkap tentang pekerja dan pencari kerja untuk kepentingan penyaluran pencari kerja, keselamatan dan perlindungan pekerja, serta kepesertaan dalam program Jamsostek belum tersedia secara termutakhirkan.
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya peningkatan kesempatan kerja (bursa kerja) belum memadai dalam kondisi peluang kesempatan kerja dan lapangan berusaha tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja.
		Cakupan besaran pencari kerja dan tenaga kerja dalam pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat, dan pelatihan kewirausahaan belum memadai.
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	
		Kompetensi dan peluang perempuan untuk bersaing pada pekerjaan di lembaga pemerintah, DPRD dan lembaga swasta belum memadai.
		Kapasitas unit pelayanan terpadu dalam penanganan pengaduan, rehabilitasi sosial, layanan kesehatan dan layanan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan masih terbatas.
		Kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum efektif dalam pengintegrasian pada kebijakan dan penganggaran.
3	**Pangan**	
		Koordinasi dan penanganan daerah rawan dengan stake holder lain yang terkait belum efektif
		Pemantauan dan analisis akses pangan, harga pangan, cadangan pangan dan pengembangan model distribusi, pemasaran hasil, dan sistem informasi pangan yang efisien belum memadai
		Diversifikasi pemanfaatan pangan masyarakat belum optimal dalam mendukung pemenuhan pangan berimbang sesuai pola pangan harapan.
		Sinergi dan koordinasi dengan stake holder terkait dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan belum optimal
4	**Pertanahan**	
		Pengembangan sistem informasi dan pendaftaran tanah belum memadai dalam mendukung sertifikasi tanah.
		Penataan penguasaaan, pemilikan dan penggunan dan pemanfaatan tanah belum optimal dalam mencegah dan menyelesaikan kasus tanah negara maupun tanah masyarakat.
		Sertifikasi asset pemerintah belum mencapai 100%
5	**Lingkungan Hidup**	
		Beberapa spot lokasi di Kota Palopo masih sering dilanda banjir dan di beberapa titik lainnya digenangi air saat musim penghujan tiba serta kebakaran hutan dalam skala kecil pada musim kemarau.
		Luas lahan kritis dan tingkat kerusakan hutan terus bertambah seriring dengan semakin menurunnya daya tampung lingkungan, kapasitas dan kualitas air baku, akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

No	BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN
		Pengintegrasian RPPLH dan KLHS kedalam dokumen perencanaan daerah belum terukur dan dilengkapi data mutakhir.
		Pemantauan, pengukuran dan pengendalian kualitas tutupan lahan, air dan udara belum terkordinasikan secara rutin dan efektif.
		Identifikasi, verifikasi, penetapan dan pendampingan masyarakat hukum adat serta kearifan dan pengetahuan lokal terkait pengelolaan lingkungan hidup belum terprioritaskan.
		Luas area penanganan sampah serta pengurangan sampah melalui mekanisme reduce, reuse dan recicle (3R) masih terbatas.
		Dampak pemanasan global semakin meningkatdalam kondisi penanganan efek gas rumah kaca belum optimal.
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Ketidaktersediaan bahan dan fasilitas menghambat pelayanan Penerbitan E-KTP secara tepat waktu dan memuaskan.
		Peralatan perekaman E-KTP banyak yang rusak
		Belum tersosialisasikan secara maksimal penerbitan KIA bagi anak dibawah 17 tahun
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	
		Kebutuhan sarana/prasarana dan fasilitas perkantoran desa yang baik belum terpenuhi secara merata termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi.
		Kinerja LPM dalam pemberdayaan masyarakat belum efektif dan merata.
		Kinerja PKK dalam pembinaan masyarakat belum efektif dan merata.
		Kapasitas SDM dan perlengkapan pada posyandu berkembang secara tidak berimbang dengan kebutuhan pelayanan masyarakat khususnya ibu hamil dan bayi.
		Keswadayaan masyarakat dalam mendorong dan memeliharan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat belum optimal
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
		Ketersediaan dan Pemanfaatan Rencana Induk Pengendalian Penduduk dan kebijakan kependudukan lainnya dalam pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk belum efektif.
		Pelayanan kontrasepsi belum menjangkau secara menyeluruh pada pasangan usia subur dalam menekan kelahiran anak.
		Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri serta kesadaran kesehatan reproduksi belum memadai.
		Bina keluarga balita, keluarga remaja dan keluarga lansia belum didukung oleh tenaga pendampingyang memadai.
		Model operasional BKB-Posyandu-PADU belum terkoordinasi.
9	**Perhubungan**	
		Fasilitas uji KIR masih menggunakan asset milik pemerintah provinsi
		Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ kurang optimal
		Pengendalian dan pengamanan lalu lintas belum memadai
		Pengawasan kelaikan jalan kendaraan angkutan umum belum memadai
		Pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan belum tergali dengan baik.
		Uji KIR sesuai standar belum mencakupi semua angkutan umum.
		Pemenuhan rambu-rambu lalu lintas belum mencakupi sesuai kebutuhan
10	**Komunikasi dan Informatika**	
		Kelompok informasi masyarakat tingkat kecamatan belum berkembang secara fungsional.
		Layanan telekomunikasi belum menjangkau semua wilayah.
		Data tentang kepemilikan masyarakat atas hand-phone/telepon, akses internet dan komputer pribadi belum terpenuhi secara lengkap.
		SDM bidang teknologi komunikasi dan informasi pada OPD belum terpenuhi
11	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**	
		Iklim usaha kecil dan menengah belum kondusif dan memadai.

No	BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN
		Kemampuan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM belum memadai
		Sistem pendukung usaha bagi UMKM belum optimal belum berkembang.
12	**Penanaman Modal**	
		Iklim investasi dan realisasi investasi belum didukung oleh kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pengembangan sistem informasi, penyederhanaan prosedur, kajian isentif investasi secara memadai.
		Penyiapan potensi sumberdaya dan sarana-prasarana daerah pendukung investasi masih terbatas.
		Pengembangan data dan informasi statistik daerah terkait investasi belum tersinergikan antar OPD.
		Iklim investasi dan realisasi investasi belum didukung oleh kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pengembangan sistem informasi, penyederhanaan prosedur, kajian isentif investasi secara memadai.
13	**Kepemudaan dan Olah Raga**	
		Sarana/prasarana serta kordinasi antar elemen pemuda dalam mendorong keaktifan organisasi dan peran serta pemuda belum memadai.
		Jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda belum memadai.
		Sarana/prasarana serta fasilitas olah raga serta pelatih cabang olah raga dalam mendorong atlet/cabang olah raga berprestasi masih terbatas.
		Kebijakan dan manajemen serta pemasyarakatan olahraga belum memadai
		Sarana/prasarana serta kordinasi antar elemen pemuda dalam mendorong keaktifan organisasi dan peran serta pemuda belum memadai.
		Jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda belum memadai.
14	**Statistik**	
		Belum tersedianya data lengkap berdasarkan indikator kinerja kunci masing-masing perangkat daerah.
		Terlambatnya ketersediaan data umum kondisi daerah yang termuat dalam “Kabupaten dalam Angka”, dan “PDRB” sehingga kurang mutakhir dijadikan dasar dalam perencanaan tahunan.
		Upaya pengembangan data/informasi/statistik daerah belum terkoodinasi dan masih sektoral, dimana data statitik daerah masih bervariasi pada tingkat PD, bahkan terkadang multi interpretasi.
		Pemanfaatan informasi dan teknologi digital berbasis web dalam pengelolaan data statitik daerah belum signifikan.
15	**Persandian**	
		Kelembagaan dan arah pengembangan dan pengelolaan SDM persandian daerah belum terstruktur secara massive dan terkoordinasi dengan baik.
		Penggunaan sandi belum termanifestasikan dalam komunikasi perangkat daerah.
16	**Kebudayaan**	
		Penyelenggaraan festival seni dan budayabelum berlangsung secara berkala
		Benda, situs dan kawasan cagar budaya belum terkelola secara sistematis dalam kerangka pelestarian.
		Ketersedian data karya budaya untuk kepentingan inventarisasi dan revitalisasi belum akurat dan komprensif.
		Penyelenggaraan festival seni dan budayabelum berlangsung secara berkala
17	**Perpustakaan**	
		Minat baca masyarakat Kota Palopo masih sangat rendah
		Keterbatasan dalam memperluas ruang baca dan penyimpanan buku dikarenakan status bangunan perpustakaan masuk dalam Kawasan cagar budaya
		Terbatasnya tenaga fungsional kepustakawan
18	**Kearsipan**	
		Cakupan dan kualitas penerapan pengelolaan arsip secara baku pada perangkat daerah belum menyeluruh
Layanan Urusan Pilihan		
1.	**Pariwisata**	

No	BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN
		Destinasi wisata yang ada belum tertata mengikuti perkembangan kontemporer kepariwisataan dan masih ada potensi destinasi wisata yang belum dikembangkan.
		Pemasaran dan jaringan kemitraan kepariwisataan belum efektif mendukung peningkatan jumlah pengunjung wisata.
		Pengembangan komunikasi dan informasi dalam promosi kepariwisataan masih minim.
		Penerimaan dan kontribusi sektor kepariwisataan terhadap PAD dan PDRB belum optimal.
2.	**Pertanian**	
		Penerapanteknologi dan ketersediaan sarana prasarana pendukung pertanian, peternakan dan perkebunan masih terbatas.
		Pengolahan produksi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan belum optimal
		Jaringan dan kemitraan usaha baik produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perkebunan belum memadai
		Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan sektor pertanian secara luas masih minim
		Kelompok tani masih belum mandiri dan naik kelas
3	**Perdagangan**	
		Simpul distribusi dan sentra ekonomi masyarakat lainnya masih jauh dari kondisi nyaman
		Kelembagaan dan kemitraan perdagangan belum optimal
		Pengawasan mutu dan peredaran barang yang beredar belum memadai dan terkoordinasi baik dengan PD lainnya.
		Perlindungan atas konsumen belum optimal
		Pembinaan terhadap personal dan kelembagaan pedagang kaki lima dan asongan belum optimal.
4	**Perindustrian**	
		Data potensi dan karaketeristik usaha kelompok pengrajin belum tersedia dengan cukup.
		Kluster industri kecil dan menengah dalam suatu kawasan industri belum berkembang dengan optimal.
		Pemanfaatan teknologi informasi dan sinergi antar pihak dalam pengembangan industri belum memadai.
		Data potensi dan karaketeristik usaha kelompok pengrajin belum tersedia dengan cukup.
5	**Perikanan**	
		Kapasitas peralatan dan teknologi penangkapan ikan belum berkembang mengikuti tuntutan baru dalam modernisasi perikanan.
		Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan masih minim.
		Kelompok nelayan belum berkembang optimal sebagai wahana peningkatan produksi dan edukasi bagi penangkapan yang ramah lingkungan
Penunjang Urusan		
1.	**Perencanaan Pembangunan**	
		Kualitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah masih sangat terbatas
		Ketersediaan data sesuai indikator kinerja kunci berbagai urusan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah masih terbatas.
		Perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam penyelenggaraan urusan oleh perangkat daerah belum akurat dan tepat waktu.
		Pembahasan prioritas Renja/RKPD dalam proses musrenbang RKPD belum substantif berbasis fakta.
		Penjabaran konsistensi RPJMD ke dalam RKPD dan RKPD kedalam APBD belum akurat.
		Pengendalian pemanfaatan ruang dalam membangun konsistensi RTRW belum akurat dan menyeluruh.
2.	**Keuangan**	
		SDM berkualitas pada OPD dalam analisis dan pelaporan keuangan masih terbatas.
		Porsi SILPA dalam penyelenggaraan keuangan daerah masih signifikan.

No	BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN
		Program/kegiatan yang tidak berjalan karena keterbatasan realisasi anggaran masih ada.
		Pendapatan Asli Daerah masih sangat minim dan masih sangat tergantung pada Dana Alokasi Umum.
3.	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**	
		Kebutuhan dana untuk pendidikan dan pelatihan formal, structural dan fungsional bagi ASN tidak mencukupi sesuai tingkat kebutuhan ASN.
		Penyelenggaraan tugas jabatan fungsional pada beberapa PD belum optimal dalam peningkatan capaian kinerja.
		Banyaknya PNS yang telah memasuki usia pensiun
4.	**Penelitian dan pengembangan**	
		SDM dan sarana/prasarana kelitbangan daerah belum memadai dalam mendukung kegiatan kelitbangan
		Iklim pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan urusan pada perangkat daerah belum berjalan dengan baik.
5.	**Pengawasan**	
		Temuan pelanggaran administrative dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pada perangkat daerah masih ada.
		Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK belum maksimal.
6.	**Sekretariat Dewan**	
		Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat Kelengkapan DPRD belum akurat.
		Rendahnya produk hukum daerah hasil legislasi pihak eksekutif dan legislatif
		Rendahnya pemahaman anggota DPRD terhdap tugas pekerjaannya
7	**Sekretariat Daerah**	
		Perumusan kebijakan dan kordinasi administrasi belum sepenuhnya efektif mendukung penyelenggaraan urusan.
		Penyelenggaraan kegiatan antara secretariat daerah dengan perangkat daerah sering tumpang tindih.

2.3.3 Isu Strategis

Tabel 2. 307
Kompilasi Isu-Isu Strategis Nasional Provinsi dan Daerah

No	Isu Strategis
	NASIONAL
1	Inflasi
	Inflasi stabil dan rendah adalah syarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang kemudian menguntungkan masyarakat. Kondisi inflasi Indonesia, yang berada pada 2,57% per tahun (yoy) di Januari 2024, adalah salah satu yang terendah di duniA dan dikalahkan oleh Jepang, Arab Saudi, Italia dan China. Dilihat dari data BPS, di bulan Januari 2024 di Sulawesi Selatan inflasi berkisar 2,38% per tahun (yoy) yang artinya dibawah rata-rata nasional.
2	Kemiskinan Ekstrim
	Kemiskinan ekstrem artinya kondisi seseorang hidup dengan kurang dari US$ 1,9 per hari atau setara kurang lebih Rp. 45.000 per hari. Dalam pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana Arahan Presiden RI, Kemenko PMK memprakarsai Inpres Percepatan Penghapusan Miskin Ekstrem. Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang "Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem" ditetapkan pada 8 Juni 2022 yang selaras dengan SDGs yang menarget penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Terdapat tiga strategi dalam upaya isu diatas yaitu a. Mengurangi beban produksi melalui program bantuan dan perlindungan sosial b. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin c. Mengurangi kantong kantong kemiskinan melalui program peningktan sarana dan prasarana
3	Standar Pelayanan Minimal
	Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan penting sekurang-kurangnya akan menjadi hak seluruh warga negara. Untuk itu perlu menjamin bahwa akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah daerah sesuai dengan indikator pemerintah misalnya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, ketentraman, dan perlindungan masyarakat serta sosial.
4	Bonus Demografi
	Bonus demografi merupakan keadaan dimana terdapat peningkatan sebuah penduduk di negara pada usia produktif yaitu antara 16 – 65 tahun disertai penurunan angka kelahiran dan kematian. Berdasarkan data BPS 2023 jumlah penduduk indonesia diproyeksi 278,8 juta jiwa dengan 69% penduduk indonesia di jenjang usia produktif (15-64), 23,89% berusia 0-14 dan 6,98% penduduk berusia 65 keatas, sehingga rasio ketergantungan pendududk indonesia sebesar 44,65%. Maka pemerintah sebagai fasilitator perlu melakukan langkah-langkah untuk menyediakan segala sarana dan prasarana dengan efisien.
	PROVINSI

1	Optimalisasi Peran Sulawesi Selatan sebagai Gerbang Indonesia Timur
	Dalam rangka memperkuat perannya sebagai porors utama pertumbuhan maritim indonesia, Sulawesi selatan aakan mendorong pengembangan transportasi laut dan meningkatkan pelayanannya serta melayani seluruh wilayah domestik sekaligus mendorong pertumbuhan perdagangan juga meningkatkan daya saing untuk menghubungkan wilayah. Berdasarkan sektor usaha, pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbangjkan 72,73% sedangkan sekktor transportasi hanya 13,02%
2.	Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
	Mengembangkan SDM yang berkualiats dapat dicapai melalui investasi bidang pendidikan dan kesehatan. Uuntuk mengatasi bonus demografi diperlukan peningkatan tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat sulawesi selatan. Pembangunan SDM yang berkualitas diperkuat dengan gerakan masyarakat untk hidup sehat, tersedianya pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit menular dan deteksi dini penyakit tidak menular.
3	Ketahanan Pangan untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Petani
	Ketahanan pangan Sulawesi Selatan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketahan pangan di dindonesia, khususnya di wilayah Timur Indonesia. Kebutuhan masyarakat SulSel lebih tinggi sekitar 1 juta ton sehingga terjadi surplus sekitar 2 juta ton. Adapaun beberapa hal yang menjadi tantangan dalam ketahanan pangan yaitu terjadinya krisis panagn dunia, laju pertumbuhan penduduk yang cepat dari laju pertumbuhan pangan, adanya iklim dan bencana alam dan konversi lahan pertanian ke non pertanian.
4	Transformasi Digital
	Dalam perekonomian. Perkembangan teknologi dapat mendorong berkembangangnya pertanian presisi untuk pemetaan lahan, aplikasi mobile untuk akses informasi cuaca dan harga komoditi dan pengembangan e-commerce untuk produk pertanian.adapun manfaat dari tansformasi digital yaitu efesiensi operasional yang mempersingkat proses dari bisnis melalui penggunaan teknologi cerdas,inovasi produk dan layanan sesuai kebutuhan masyarakat, dan dukungan keberlanjutan yang mengurangi komsumsi kertas dan limbah.
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif
	Dalam memperkuat digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik perlu dimaksimalkan. Untuk menciptakan tata kelola yang baik, adaptif dan bebas dari nepotisme, maka diperlukan kolaborasi pentahelix yaitu akademis, bisnis, masyarakat, pemerintah, dan media. Meskipun mengahadapi tantangan reformasi birokrasi harus dilakukan dengan tidak hanya fokus pada administrasi saja, melainkan juga pada hasil pembanguan daerah yang berpengaruh kepada masyarakat sesuai dengan isu penggunaan produk dalam negeri, penanggulangan kemiskinan dan inflasi.
	DAERAH
1.	Peningkatan dan Pengeloaan PAD
	Pembangunan di Kota Palopo selama ini hanya mengandalakan sumber pembiayaan dari dana alokasi umum, sehingga perlu mencari potensi sumber-sumber pendapatan baru dalam mendukung proses pembangunan kota yang semakin kompleks.
2.	Peningkatan kualitas SDM
	Mendorong kemampuan SDM yang berkualitas berdaya saing melalui peningkatan STEM (sains, teknologi, Teknik, matematik) dan medorong penguatan ketahanan kualitas keluarga untuk menciptakan masyarakat berintelektualitas tinggi, religious, berbudaya, serta berbudi luhur.
3	Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan
	Melaksanakan konsep pembangunan yang berorientasi terhadap keberlajutan lingkungan dan mendorong konsep keterlibatan masyarakat secara mandiri serta swadaya dalam proses pembangunan, tanpa bergantung kepada pihak pemerintah.
4	Mitigasi dan Ketahanan Bencana
	Pelaksanaan mitigasi bencana dengan melibatkan unsur masyarakat, swasta, akademisi, media dan mememlihara sarana infrastruktur yang telah ada demi terciptanya daerah tahan terhadap bencana.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Sebagai upaya mewujudkan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta perluasan pemenuhan pelayanan dasar, maka pembangunan wilayah Palopo dan Sekitarnya diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) agar dapat berfungsi sebagai kawasan lumbung pangan nasional, dan pusat industri pengolahan hasil perkebunan, pusat pengembangan komoditas pertambangan nikel. Selain itu, wilayah Palopo dan Sekitarnya juga merupakan bagian dari kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Toraja dan Sekitarnya yang diarahkan sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang didukung oleh industri dan jasa wisata.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kota Palopo, ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun lalu, terutama pada sejumlah indikator makro pembangunan. Berikut adalah kondisi ekonomi makro Kota Palopo Tahun 2023 dan perkiraan tahun berjalan 2024 :

Kondisi Ekonomi Tahun Lalu (Tahun 2023) dan Tahun Berjalan (2024)

Beberapa indikator makro terkait kondisi ekonomi Kota Palopo Tahun 2023 dan perkiraaan tahun berjalan (2024) disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Kondisi dan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro

Kota Palopo 2023-2024

No	Indikator	Capaian Tahun Lalu (2023)	Proyeksi Tahun Berjalan (2024)
1	Pertumbuhan PDRB (%/Tahun)	4.34	5.98
2	Laju inflasi (%/Tahun)	2.21	2
3	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	54.47	58
4	Paritas Daya Beli (Ribu/Tahun)	13.892	13.615
5	Indeks Gini (Angka)	0.367	0.337
6	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.69	7.58
7	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7.81	8.07

Sumber: BPS/RPD 2024-2026

Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palopo Menurut Lapangan Usaha 2023, nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 10.499,83 milyar. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar Rp 731,94 milyar dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp 9.767,89. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB juga mengalami kenaikan dari Rp 6.104,74 milyar di tahun 2022 menjadi Rp 6.369,71 milyar di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2023, Kota Palopo mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,34 persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha dan inflasi. Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kota Palopo didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha diantaranya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Palopo pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yang besarannya mencapai 23,70 persen.

Table 3.2.
Perkembangan Nilai PDRB Kota Palopo (ADHB & ADHK)
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2021-2023

No	Bidang /Urusan	PDRB ADHB Tahun			PDRB ADHK Tahun		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 493 213,07	1 672 456,30	1 716 094,45	923 599,09	955 998,81	951 236,15
2	Pertambangan & Penggalian	13 432,28	15 573,50	16 904,02	7 160,85	8 055,10	8 554,14
3	Industri Pengolahan	216 579,61	247 159,30	269 804,32	134 792,97	147 419,51	155 984,27
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6 463,86	6 744,70	8 015,12	6 365,54	6 589,81	7 113,84
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	13 851,63	14 972,26	15 576,07	15 403,67	16 454,74	17 322,05

No	Bidang /Urusan	PDRB ADHB Tahun			PDRB ADHK Tahun		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
6	Konstruksi	1 454 374,54	1 689 454,81	1 834 098,14	816 750,73	894 511,10	940 220,61
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 095 140,87	2 295 742,18	2 488 587,45	1 491 212,75	1 568 525,12	1 648 940,25
8	Transportasi dan Pergudangan	485 288,62	648 308,55	793 688,72	304 643,84	345 347,52	367 156,11
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	94 271,15	108 038,42	119 191,00	64 274,87	68 418,06	74 183,59
10	Informasi dan Komunikasi	388 180,14	413 585,01	443 131,67	387 662,41	409 507,98	435 331,41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	671 080,30	772 183,34	861 238,71	423 515,27	446 901,90	488 691,48
12	Real Estat	414 500,34	463 544,31	472 123,60	265 222,20	283 098,66	298 685,94
13	Jasa Perusahaan	7 818,82	9 005,75	10 258,10	5 141,06	5 681,02	6 241,77
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	666 242,85	671 009,25	667 404,63	399 874,22	400 155,90	392 596,89
15	Jasa Pendidikan	359 179,16	362 233,06	374 328,01	272 248,08	270 397,12	277 422,81
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	223 658,45	241 467,13	257 244,12	172 781,51	183 826,52	196 156,95
17	Jasa Lainnya	111 036,20	136 416,97	152 137,35	77 626,19	93 848,73	103 867,73
	PDRB	8 714 311,89	9 767 894,84	10 499 825,47	5 768 275,24	6 104 737,61	6 369 705,99

Sumber: Kota Palopo Dalam Angka 2024

Laju Inflasi

Pada Juni 2023 di Kota Palopo terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 4,13 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,15. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya akumulasi indeks harga beberapa kelompok pengeluaran. Secara yoy, pada bulan Juni 2023 semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi: Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,34 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,71 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,30 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,66 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,43 persen; kelompok transportasi sebesar 13,24 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,43 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,32 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,21 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,92 persen.

Tingkat inflasi month to month (mtm) Juni 2023 tercatat deflasi sebesar 0,23 persen dan tingkat inflasi tahun kalender/inflasi year to date (ytd) sebesar 1,81 persen.

Laju inflasi tertinggi pada tahun 2023 dialami oleh Kota Makassar sebesar 2,89. Sedangkan dengan Kota Palopo mengalami laju inflasi terendah, yaitu sebesar 2,21 dengan IHK 117,35.

PDRB per Kapita

Tabel 3.3.
Pencapaian PDRB per Kapita Kota Palopo
Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja	Realisasi		
	2021	2022	2023
Nilai PDRB			
ADHB (Milyar)	8 714 311,89	9 767 894,84	10 499 825,47
ADHK (Milyar)	5 768 275,24	6 104 737,61	6 369 705,99
Jumlah Penduduk (Jiwa)	187.330	190.870	192.760
PDRB per Kapita (ADHB) (Juta/Kapita/Thn)	46.52	51.18	54.47

Sumber: Kota Palopo Dalam Angka 2024

Berikut adalah perbandingan PDRB per kapita beberapa kabupaten/kota di Sulsel dalam tiga tahun terakhir 2021-2023:

Tabel 3.4
Perbandingan PDRB ADHB per Kapita Kota Palopo dan
Beberapa Daerah Lain Tahun 2021-2023

Wilayah	Capaian PDRB per Kapita (Juta/Kapita/Tahun)		
	2021	2022	2023
Kota Palopo	43.66	46.52	54.47
Kota Pare-Pare	51.03	55.78	58.78
Kota Makassar	132.68	144.60	155.95
Kabupaten Luwu	48.30	53.38	57.36
Kabupaten Luwu Utara	44.20	48.65	53.54

Wilayah	Capaian PDRB per Kapita (Juta/Kapita/Tahun)		
	2021	2022	2023
Kabupaten Luwu Timur	78.71	93.36	99.49
Sulawesi Selatan	59.50	65.35	69.70
Nasional (PDB)	62.26	71.03	75.00

Sumber: Badan Pusat Statistik

Paritas Daya Beli/Pengeluaran Per Kapita

Paritas daya beli atau pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kota Palopo meningkat dalam tiga tahun terakhir. Jika 2021 pada angka 13,117 juta/kapita/tahun, tahun 2022 menjadi 13,404 juta/kapita/tahun dan tahun 2023 menjadi 13,892. Kondisi ini menempatkan daya beli masyarakat Kota Palopo berada diatas daya beli rata-rata masyarakat daerah wilayah tetangga yaitu Luwu, Toraja Utara, Luwu Utara, Luwu Timur dan Tana Toraja serta diatas daya beli rata-rata Sulsel yakni 11,841 juta.kapita/tahun.

Berikut adalah perkembangan daya beli masyarakat Kota Palopo dan daerah lain kurun waktu tiga tahun terakhir

Tabel 3.5.
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Palopo dan beberapa Daerah Lain
Tahun 2021-2023

Prov/Kab/Kota	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Paritas Daya Beli (PPP)		
	2021	2022	2023
SULAWESI SELATAN	**11,184**	**11,430**	**11,841**
Luwu	10,116	10,308	10,691
Tana Toraja	7,434	7,584	8,017
Luwu Utara	11,736	12,105	12,513
Luwu Timur	12,886	13,058	13,451
Toraja Utara	8,134	8,494	8,871
Kota Makasar	17,097	17,406	17,889
Kota Pare Pare	13,786	14,027	14,495
Kota Palopo	13,117	13,404	13,892

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Gini Rasio

Angka gini rasio Kota Palopo pada tahun 2023 pada angka 0.367 menurun dibandingkan tahun 2022 yang berada pada posisi 0.371, Angka gini rasio Kota Palopo tahun 2023 meningkat sebesar 0.004 poin, kondisi ini lebih baik dibandingkan Kota Pare-pare yang justru meningkat 0.002 poin dan juga lebih baik dari Sulawesi Selatan yang tidak mengalami perubahan di tahun 2023.

Tabel 3.6.
Pencapaian Gini Rasio Kota Palopo dan beberapa daerah lain
Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Kota Makassar	0.400	0,395	0,387
2	Kota Pare-Pare	0.381	0,379	0,381
3	Kota Palopo	0.358	0.371	0,367
4	Sulawesi Selatan	0.382	0,377	0,377
5	Nasional (September)	0.381	0.381	0,388

Sumber: Badan Pusat Statistik

Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin Kota Palopo tahun 2023 sebesar 7,69 persen. Capaian ini masih berada dibawah target daerah 2023 yakni 5.99 %, namun kondisinya lebih baik dibandingkan capaian tahun 2022 (7.78 %). Persentase penduduk miskin Kota Palopo 2023, masih lebih baik dibandingkan persentase penduduk miskin kabupaten yang berbatasan langsung, misalnya Luwu Utara (12,66 %), Kabupaten Luwu (12,71 %), Kabupaten Toraja Utara (12,12 %) dan dibawah rata-rata Sulawesi Selatan yang justru meningkat yakni 8.70. Garis kemiskinan Kota Palopo pada tahun 2023 Rp 442.276,- per kapita per bulan, meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 403.144,- per kapita per bulan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Palopo menurun 0,33 poin dari 1,43 pada tahun 2022

menjadi 1,10 pada tahun 2023. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan turut pula menurun 0,10 poin dari 0,35 pada tahun 2022 menjadi 0,25 pada tahun 2023.
Berikut adalah capaian indikator kemiskinan dan perbandingkan capaian Kota Palopo dengan beberapa daerah kabupaten/kota lain di Sulsel, tahun 2023:

Tabel 3.7.
Pencapaian Indikator Kemiskinan Kota Palopo
dan beberapa daerah lain Tahun 2023

Indikator	Tahun 2023						
	Kota Palopo	Kota Makassar	Kab Toraja Utara	Kab Luwu	Kab Luwu Utara	Kab Luwu Timur	Sulsel
Jml Penduduk Miskin (Dalam ribuan)	14,85	80,32	29,14	47,67	40,79	21,57	788,85
Persentase Penduduk Miskin	7,69	5,07	12,12	12,71	12,66	6,93	8,70
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,10	0,62	2,47	2,19	2,20	1,46	1,57
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,25	0,15	0,70	0,55	0,63	0,41	0,41
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	442 276	570 286	395 731	414 118	414 548	438 178	436 025

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo 2023 pada angka 7.81 %, terus menurun dari dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 pada angka 8.83 dan pada tahun 2022 pada angka 8.2 %. Kondisi ini melampaui target daerah pada tahun 2023 yakni 8.07 %.

Tabel 3.8.
Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palopo
Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja	Realisasi		
	2021	2022	2023
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8.83	8.20	7.81

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sasaran dan Arah Kebijakan Perekonomian
Sasaran Ekonomi Kota Palopo Tahun 2025
Sasaran atas pembangunan ekonomi Kota Palopo secara makro adalah memulihkan sekaligus memantapkan kembali pertumbuhan ekonomi Kota Palopo pada tahun 2025, secara lebih berkualitas atau inklusif. Ini bermakna pertumbuhan ekonomi Kota Palopo diarahkan bukan hanya pada pencapaian angka yang lebih baik dari tahun sebelumnya atau terhadap daerah lain, namun jauh lebih penting daripada itu adalah pertumbuhan ekonomi Kota Palopo lebih mantap menjadi trigger atau pengungkit menurunnya angka pengagguran terbuka dan kemiskinan, menguatkan pendapatan per kapita atau daya beli masyarakat, sampai pada sejumlah indicator makro daerah lainnya.

Pembangunan ekonomi di Kota Palopo, dari waktu ke waktu juga semakin inklusif, ini menandakan bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan terus mampu menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat dari waktu ke waktu dengan kondisi yang terus membaik, secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

Pemulihan ekonomi akan diupayakan pemerintah Kota Palopo melalui pengembangan Infrastruktur, pengembangan investasi, kesempatan berusaha& UMKM, pengembangan sektor produktif & usaha ekonomi bernilai tambah, dan pengembangan pendapatan asli daerah yang diharapkan memberi effect bagi kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah gambaran capaian, proyeksi dan target indikator makro pembangunan Kota Palopo Tahun 2023.

Tabel 3.9.
Target Sasaran Indikator Ekonomi Makro
Kota Palopo

No	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	Pertumbuhan PDRB (%/Tahun)	4.34	5,98	6,05
2	Laju inflasi (%/Tahun)	2.21	2	2

No	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
3	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	54.47	58	62
4	Paritas Daya Beli (Ribu/Tahun)	13.892	13.615	13.816
5	Indeks Gini (Angka)	0,367	0,337	0,334
6	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,69	7,58	7,38
7	Indeks Pengeluaran	80,18	79,34	79,84
8	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,81	8.07	8
9	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	20,57	24.82	18,90

Sumber: BPS/RPD Kota Palopo 2024-2026

Arah Kebijakan Ekonomi Kota Palopo Tahun 2025

Sejalan dengan prioritas pertama pembangunan nasional tahun 2025 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan. Bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Kebijakannya diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier dalam rangka transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Arah kebijakan Ekonomi ini adalah peningkatan sektor produktif dan potensial daerah, investasi berbasis ekosistem, dan dukungan infrastruktur, teknologi, serta ketertiban daerah layanan yang bermakna bahwa pengembangan perekonomian Kota Palopo dilakukan dengan dengan mengembangkan fungsi dan peran kawasan ekonomi daerah yang menjadi pilar ekonomi Kota Palopo, baik pada tataran optimalisasi sejumlah pusat perdagangan atau bisnis yang sudah ada, maupun sentra dan aktifitas ekonomi masyarakat termasuk sejumlah pasar Kota Palopo lain yang potensial namun belum berkembang secara optimal, dengan kolaborasi multisektor sehingga menciptakan daya tarik pada seluruh aktifitas ekonomi yang ada dengan pemanfaatan teknologi informasi atau digitalisasi ekonomi secara bertahap pada para pelaku usaha.

Pengembangan kawasan produktif dan komoditas potensial lainnya di Kota Palopo diarahkan pada Pemantapan Pemulihan Ekonomi berbasis UMKM dan sektor Produktif, Kreatif dan Potensial, Termasuk Pariwisata dan Seni Budaya, Pengembangan Ekonomi Circular, Digitalisasi Pengelolaan sumber-sumber PAD dan Investasi Daerah untuk membuka Lapangan Pekerjaan. Penyediaan dukungan infrastruktur pendukung, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas usaha dan sumber daya pelaku usaha serta jejaring kemitraan adalah beberapa poin utama dalam strategi pengembangan kawasan produktif dan komoditas potensial tersebut.

Bagian lain dari strategi ini adalah menyediakan ruang-ruang kolaborasi yang lebih partisipatif dan lebih luas bersama seluruh komponen dan pemangku kepentingan yang ada untuk memastikan ketertiban dan kenyamanan daerah. Sehingga kondusifitas Kota Palopo dapat terus tumbuh dan berkembang sebagai salah satu syarat utama membangun daya tarik Kota Palopo sebagai destinasi investasi, dengan dukungan sarana dan prasarana serta promosi investasi yang memadai.

Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2025

Transformasi ekonomi adalah salah satu arah kebijakan nasional yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah melalui pengembangan koridor ekonomi berdasarkan potensi wilayahnya; penerapan ekonomi hijau; pengembaangan ekonomi biru dan bioekonimi sebagai sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan; pemenuhan kebutuhan energi sesuai dengan tahapan transisi dan implementasi transformasi digital; pengembangan IKN sebagai kota berkelanjutan, pusat pertumbuhan ekonomi serta jendela budaya nasional Indonesia; penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah dan mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global; pengembangankota metropolitan, kota besar dan kawasan perkotaan lainnya sebagai sebagai pusat peertumbuhan yang memenuhi standar pelayanan perkotaan berdasarkan prinsip layak huni dan berbudaya; hujau dan berketahanan; serta maju dan mensejahterakan.

Berikut adalah data sasaran pertumbuhan ekonomi dan indikator makro pembangunan secara nasional lainnya untuk tahun 2025

Tabel 3.10.
Indikator dan Target Makro Pembangunan Nasional Tahun 2025

Indikator	Target
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,3 - 5,6 %
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,5 - 5,0 %
Rasio Gini	0,379 - 0,382
Indeks Modal Manusia (IMM)	0,56
Tingkat Kemiskinan	7,8 - 8,0 %
Penurunan Intensitas Emisi GRK	38,6 %

Sumber: Permendagri No.12 Tahun 2024

Arah kebijakan Ekonomi makro secara nasional ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM. Kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif dengan reformasi di bidang belanja melalui kebijakan antara lain pertama, efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja. Kedua, optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (service delivery). Ketiga, redesain sistem penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (spending better) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil (result based) dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (automatic stabilizer). Arah kebijakan ekonomi makro secara nasional menderivasi arah kebijakan perekonomian daerah. Interaksi arah kebijakan ini merupakan faktor penting guna menjamin efektifitas pendanaan dalam pencapaian sasaran perekonomian daerah dan sasaran pembangunan nasional melalui pendekatan secara holistik ini akan lebih terfokus pada penyelesaian permasalahan-permasalahan perekonomian regional dan nasional, sehingga dampak yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan yang diprirotaskan di tahun 2025, telah ditetapkan beberapa target pembangunan, diantaranya penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting, insidensi tuberkolosis, eliminasi malaria, kusta, serta peningkatan nilai rata-rata PISA (Programme for International Student Assessment).
Di sisi fiskal, kebijakan tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi, dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal jangka menengah. Hal ini tercermin dari rasio utang yang berada pada kisaran 30 persen Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) dan defisit anggaran yang terjaga lebih rendah dari 3,0 persen PDB. Melalui kinerja perekonomian yang kuat dan stabil, kesejahteraan masyarakat meningkat. Ekspansi perekonomian domestik mampu menciptakan tambahan lebih dari 11 juta lapangan kerja pada tahun 2015-2019, melebihi target 10 juta lapangan kerja. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,28 persen pada tahun 2019 dari 6,18 persen pada tahun 2015. PDB per kapita terus meningkat dari USD3.531 pada tahun 2014 menjadi USD3.927 pada tahun 2018, setara dengan GNI per kapita (Atlas Method) USD3.840 mendekati ambang batas negara berpendapatan menengah-tinggi.

3.1.1. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.1.1 Prospek Perekonomian Kota Palopo

Pemerintah Kota Palopo tetap optimis bahwa perekenomian tahun 2025 lebih baik dibandingkan capaian tahun 2024 dimana pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada angka 6,05 %, bahkan juga tetap akan kompetitif dibandingkan beberapa kota di Sulsel.

Tiga lapangan usaha yang diharapkan tetap memberikan kontribusi utama bagi LPE Kota Palopo 2025 adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, dan sector Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Upaya-upaya yang bersifat pemulihan atas perekonomian daerah dan recovery atas aspek kesejahteraan masyarakat melalui 3 lapangan usaha tersebut, tetap akan menjadi focus penanganan pemerintah Kota Palopo.

Prospek ekonomi Kota Palopo di Tahun 2025 digambarkan sebagai berikut :

a) Pemerintah Kota Palopo optimis, target angka pertumbuhan ekonomi tahun 2025 (6,05%) optimis bisa diwujudkan dengan implementasi aktifitas berusaha masyarakat secara konvensional dan optimalisasi serta edukasi kesempatan berusaha masyarakat dan investasi daerah. Memulihkan sejumlah sektor informal pada sektor perniagaan di Kota Palopo dan mengupayakan massivenya pemanfaatan teknologi informasi berbasis daring bagi para pelaku usaha diharapkan mampu memperluas skala dan volume usaha, lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha baru.
b) Penguatan lapangan Usaha Pertanian dan Perikanan di Kota Palopo tahun 2025, akan diarahkan pada pengembangan usaha pada spot potensial dan produktif, terutama pada komoditas pangan, peternakan dan perkebunan dengan meningkatkan cakupan ketersediaan infrastruktur berusaha dan peralatan serta sarana prasarana lain, serta optimalisasi pembinaan dan pengembangan kapasitas usaha. Termasuk upaya diversifikasi dan hilirisasi produk berbasis pengolahan yang menghasilkan nilai tambah, namun menjaga sinergitas dan keterkaitannya dengan sector lain, sehingga pengembangan pertanian, perikanan dan peternakan juga bisa menjadi triger (pengungkit) bagi pengembangan sector lain misalnya kepariwisataan, yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat.
c) Pada sektor informal, perkembangan investasi yang masuk ke Kota Palopo pada tahun 2025, juga berupaya dipulihkan oleh Pemerintah Kota Palopo melalui serangkaian kegiatan promosi investasi dan memastikan pelayanan investasi di Kota ini akan jauh lebih kompetitif, lebih mudah, lebih cepat dan lebih akuntabel dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan melalukan sejumlah inovasi layanan. Termasuk mengoptimalisasi sejumlah iven tahunan yang akan dilaksanakan tahun 2025, dengan skala yang lebih kompetitif dalam upaya meningkatkan angka kunjungan ke Kota Palopo. Sektor informal ini di Kota Palopo mencakup beberapa lapangan usaha berbasis UMKM dan sektor Produktif, Kreatif dan Potensial, Termasuk Pariwisata dan Seni Budaya, Pengembangan Ekonomi Circular, Digitalisasi Pengelolaan sumber-sumber PAD dan Investasi Daerah untuk membuka lapangan pekerjaan, dan jasa-jasa advertising lainnya.

d) Angka kemiskinan diproyeksi 7,38% pada tahun 2025, dimana Pemerintah Kota Palopo akan melaksanakan sejumlah program perlindungan dan pemberdayaan sosial, mulai dari bantuan sosial, bantuan pembinaan dan pemberdayaan usaha, pemberdayaan keluarga yang difokuskan pada pemanfaatan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), untuk memastikan ketepatan sasaran program. Selain menurunkan angka kemiskinan, serangkaian upaya ini diharapkan mampu meningkatkan beberapa indicator ekonomi atau kesejahteraan masyarakat lainnya pada tahun 2025, seperti meningkatnya pendapatan per kapita, menguatnya paritas daya beli masyarakat. Upaya ini akan disinergikan dengan program-program berbasisi masyarakat kecil termasuk pengembangan ekonomi circular (pemanfaatan barang bekas menjadi produk baru yang bernilai ekonomis).
e) Pada sisi pengelolaan pendapatan, Pemerintah Kota Palopo juga akan melakukan serangkaian upaya agar pendapatan dapat dioptimalkan, sejalan dengan trend peningkatan belanja pemerintah Kota Palopo. Misalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan PAD, baik dari sisi kemudahan pembayaran, maupun optimalisasi sumber sumber PAD lain yang potensial. Kemudian optimalisasi peningkatan Dana Alokasi Khusus yang kontribusinya bagi Pendapatan Kota Palopo cukup siginifikan, dengan meningkatkan koordinasi dan sinergitas pemerintah pusat dan daerah, dengan memastikan bahwa pemanfaatan dan penatausahaan DAK Kota Palopo terus lebih baik. Persentase PAD terhadap Pendapatan Kota Palopo Tahun 2025 ditargetkan pada angka 18,90%.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Palopo akan berupaya :

a) Memastikan aktifitas produksi barang dan jasa pada semua lapangan usaha terutama pada tiga kontributor ekonomi terbesar Kota Palopo, berlangsung dengan lancar termasuk menumbuhkembangkan iklim yang kondusif bagi pengembangan wisata dan ekonomi kreatif daerah dengan terus mengembangkan spot potensial dan spot kawasan produktif yang sudah ada.
b) Mengoptimalisasi sejumlah iven-iven lokal tahunan di Kota Palopo pada Tahun 2025, dengan meningkatkan daya tarik sehingga mampu lebih banyak mendatangkan angka kunjungan masyarakat dengan mengelaborasi program-program lintas Perangkat Daerah.
c) Memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur termasuk infrastruktur strategis daerah, selain menambah daya saing infratsruktur Kota, juga mampu menjadi lapangan kerja baru dan kesempatan kerja baru dan menyerap lebih banyak banyak tenaga kerja lokal.
d) Menjaga dan memastikan bahwa pengeluaran dan belanja Pemerintah tetap berjalan dan dilaksanakan secara tepat dan cermat dalam fungsinya sebagai salah satu stimulator ekonomi daerah
e) Memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dengan menjaga kestabilan dan distribusi barang, dan ketersediaannya serta menjaga inflasi daerah, .
f) Memastikan dan menjaga agar intervensi pemerintah dalam hal Pemberdayaan dan penanganan masyarakat miskin melalui program program pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin atau rentan, tetap berjalan dengan efektif.
g) Menjaga dan memastikan bahwa upaya-upaya recovery atau pemulihan ekonomi daerah dan status kesejahteraan masyarakat tetap dilaksanakan secara proporsional dan tepat sasaran.

3.1.1.2 Tantangan Perekonomian

A. Tantangan Perekonomian Global

Ke depan, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,5 dan 3,7 persen per tahun sepanjang tahun 2020- 2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia, antara lain batubara dan minyak kelapa sawit, diperkirakan juga relatif rendah. Selain itu, risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah.

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk segera menjadi negara berpendapatan tinggi. Stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah karena transformasi struktural belum berjalan dengan baik. Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi (Growth Diagnostics) 4 menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (the most binding constraint) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas SDM menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengahpanjang. Apabila tidak segera diatasi, kualitas SDM yang rendah akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan sulit beralih ke manufaktur berteknologi tinggi. Kendala lain yang masih harus diatasi adalah rendahnya penerimaan perpajakan dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang masih harus ditingkatkan, terutama terkait konektivitas.

B. Tantangan Perekonomian Nasional

Pertama, adalah suku bunga yang tinggi. Menurutnya, hingga tahun depan bank sentral negara utama bakal masih menaikkan suku bunga untuk menahan laju inflasi. Salah satunya The Fed yang bakal berimbas pada penguatan dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintahnya. Kondisi ini akan memberikan dampak pada keluarnya dana asing atau outflow dari Indonesia. Sebab, investor akan memilih untuk menaruh dananya di negara yang memiliki bunga tinggi.

Kedua, inflasi karena kenaikan harga energi yang bakal berdampak pada daya beli masyarakat. Pasalnya, harga minyak masih dibayangi ketidakpastian di tengah kondisi perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai, pertemuan OPEC, dan rencana negara G7 menetapkan harga minyak. Daya beli ini adalah risiko yang harus tetap dijaga pemerintah agar perekonomian tetap tangguh. Apalagi, konsumsi masyarakat menjadi motor penggerak utama perekonomian Indonesia. Artinya, konsumsi harus tetap bisa tumbuh di atas 5 persen agar perekonomian terealisasi tinggi seperti sekarang.

Ketiga, pelemahan ekonomi global ke kinerja ekspor. Jika perekonomian negara mitra dagang melemah, maka ekspor Indonesia akan turun dan tak bisa lagi setinggi saat ini. Di sinilah kebijakan pemerintah harus betul-betul tepat.

Revolusi Industri memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (distance learning), pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui financial technology (fin-tech), dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut.

C. Tantangan Perekonomian Sulawesi Selatan

integrasi ekonomi hijau menjadi bagian penting dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di sulsel , karena tidak bisa dipungkiri sektor lingkungan harus menjadi pertimbangan dalam rencana pembangunan di sulsel.

dalam menerapkan pertumbuhan ekonomi hijau ada tiga tantangan yang paling utama, yaitu perubahan iklim dimana ini semua menjadi tantangan global dan diluar control, dan tentunya dibutuhkan adaptasi selain mengurangi percepatan dari emisi dan makin kesini semua nyata. Selain itu, masalah sinkronisasi program antar kementerian dan pemerintah daerah, “ini sering kali terjadi misalnya antara Kementerian KLHK dan Kementerian Pertanian, sering kali jalan sendiri. Dan yang terakhir, adalah kapasitas baik itu masalah anggaran pendanaan maupun teknis, inilah tiga tantangan yang dihadapi dalam pertumbuhan “ekonomi hijau”.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mengalami trend penurunan pada tahun 2013-2020. Setelah mengalami kontraksi hingga -0,71% akibat pandemi covid-19. Proses pemulihan ekonomi masih berjalan lambat bahkan berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 dan di tahun 2023 mencapai 4,51% atau masih dibawah nasional yang mencapai 5,05%. Meski demikian ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan I 2023 tumbuh 5,29% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (5,11%; yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh permintaan domestik yang menguat seiring aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin baik pasca penghapusan kebijakan PPKM dan kenaikan permintaan dalam menyambut momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan yang dimulai pada Maret 2023.

Dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi secara tahunan pada triwulan I 2023 dikontribusikan oleh peningkatan konsumsi domestik, baik dari swasta maupun pemerintah. Kondisi ini sejalan dengan periode awal HBKN Ramadan yang mulai berjalan pada triwulan I 2023. Lebih lanjut, investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga meningkat, baik untuk investasi bangunan maupun non bangunan. Hal tersebut terkonfirmasi dari realisasi belanja modal pemerintah dan impor barang modal yang juga tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dari sisi penawaran, peningkatan ekonomi Sulsel triwulan I 2023 terutama didorong oleh kinerja LU Pertambangan dan Penggalian seiring peningkatan produksi hasil tambang. Selain itu, LU Konstruksi dan LU Perdagangan Besar dan Eceran juga terpantau tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan kineja investasi yang lebih tinggi dan penguatan permintaan domestik. Di sisi lain, kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta LU Industri Pengolahan mengalami perlambatan.

Kemandirian fiskal Sulawesi Selatan triwulan I 2023 meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2022. Hal ini tercermin pada rasio jumlah PAD seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 24 Kabupaten/Kota) terhadap total pendapatan yang meningkat, dari 24,16% menjadi 26,19%. Selain melalui pengembangan potensi daerah, peningkatan kemandirian fiskal daerah juga didorong oleh pengelolaan pendapatan daerah yang lebih baik. Beberapa faktor yang mendorong perbaikan tersebut adalah implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), peningkatan *awareness* pajak melalui pelaporan SPT, serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang bersinergi dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Inflasi Sulawesi Selatan

Pengendalian inflasi pada awal tahun 2023 menghadapi tantangan cuaca ekstrim yang menghambat produksi bahan pangan, di tengah peningkatan permintaan masyarakat dari dalam maupun luar Sulawesi Selatan pada awal Ramadhan. Kondisi ini memicu inflasi gabungan 5 Kota IHK di Sulawesi Selatan mencapai 5,86% (yoy) pada triwulan I 2023 atau lebih tinggi dibandingkan 5,77% (yoy) pada triwulan IV 2022. Menyikapi hal tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan berbagai strategi pengendalian inflasi melalui implementasi berbagai program yang mengacu pada kerangka strategi 4K (kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif). Upaya tersebut berhasil menurunkan laju inflasi hingga mencapai 4,60% (yoy) pada Mei 2023.

Inflasi tahunan pada triwulan I 2023 terutama disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, khususnya pada komoditas beras, telur ayam ras, dan rokok kretek filter, diikuti oleh Kelompok Transportasi khususnya komoditas bensin dan angkutan udara. Kenaikan harga komoditas-komoditas tersebut dipengaruhi oleh peningkatan permintaan pada momen awal puasa yang belum dapat diimbangi oleh peningkatan pasokan, kebijakan kenaikan cukai rokok, serta kebijakan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sejak September 2022. Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras, cabai merah, dan cabai rawit seiring kondisi pasokan yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan

Menggambarkan trend fluktuasi sejak tahun 2013 hingga 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan dan Nasional menunjukka trend yang sama, namu capaian TPT Sulawesi Selatan masih lebih baik dibandingkat capaian Nasional serta mulai mengalami trend penurunan sejak tahun 2020 hingga 2022. Adanya ketimpangan antara kebutuhan lapangan kerja terhadap ketersediaan angkatan kerja serta disisi lain masih terdapat penduduk bekerja yang berpenghasilan rendah menjadi penyebab peningkatan TPT sehingga perlu mendorong peningkatan lapangan kerja melalui sektor padat karya agar masyarakat memperoleh pendapatan yang lebih baik.

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2023 sebanyak 4.555.438 orang, turun 36.889 orang dibanding Februari 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 1,48 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 4.315.849 orang, turun sebanyak 12.268 orang dari Februari 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Akomodasi Makan dan Minum (1,46 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu Jasa Pendidikan (1,08 persen poin).

Sebanyak 1.668.175 orang (38,65 persen) bekerja pada kegiatan formal, turun 0,53 persen poin dibanding Februari 2022. Persentase setengah pengangguran naik 0,29 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 2,49 persen poin dibandingkan Februari 2022.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 5,26 persen, turun sebesar 0,49 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022.

Kemiskinan Sulawesi Selatan

Tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan tahun 2013 hingga 2022 mengalami trend fluktuatif dimana tingkat kemiskinan terendah pada kurun waktu 10 tahun terakhir yang mencapai 8,53% pada tahun 2021, namun masih lebih baik juka dibandingkan capaian nasional. Tingkat kemiskinan pada september 2022 sebesar 8,66%, mengalami peningkatan sebesar 0.03% point terhadap maret 2022 dan meningkat 0,13% point terhadap september 2021 dan pada maret tahun 2023 mencapai 8,70%

Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 782,32 ribu orang, bertambah sebanyak 4,9 ribu orang terhadap Maret 2021 dan bertambah sebanyak 16,86 ribu orang terhadap September 2021. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 5,07 persen, turun menjadi 4,98 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 11,63 persen, naik menjadi 11,81 persen pada September 2022. Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan turun sebanyak 700 orang (dari 208,53 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 207,81 ribu orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan mengalami kenaikan sebanyak 5,6 ribu orang (dari 568,91 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 574,51 ribu orang pada September 2022).

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp422.952,-/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp316.597,- (74,85 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp106.355,- (25,15 persen). Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,62 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.954.038,-/rumah tangga miskin/bulan.

Gini Rasio Sulawesi Selatan

Gini Rasio Sulawesi Selatan mengalami trend fluktuatif pada tahun 2013 hingga 2019, namun terus mengalami penurunan hingga tahun 2022. Pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Selatan yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,365. Angka ini menurun 0,012 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,377 dan juga menurun 0,012 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021 yang juga sebesar 0,377. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,378, turun dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388 dan juga turun dibanding Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,387. Gini

Ratio di daerah perdesaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,324, turun dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,336 dan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,334. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,26 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2022 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,69 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 19,80 persen, yang berarti juga tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

D. Tantangan Perekonomian Kota Palopo

Berangkat dari sejumlah dinamika dan kondisi serta capaian kinerja pada aspek ekonomi, beberapa tantangan berkaitan dengan kondisi perekenomian Kota Palopo di Tahun 2024 yang masih berlanjut pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meskipun laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Palopo yang mencapai target pada angka 5,69% Pemerintah Kota Palopo akan memastikan untuk tetap meningkatkan LPE pada tahun 2025 yang antara lain dengan memulihkan aktifitas berusaha masyarakat pada semua lapangan usaha sama seperti sebelum pandemic, memastikan aktifitas aktifitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi misalnya produksi, distribusi dan konsumsi logistic daerah, mampu berjalan dengan baik, ditengah ancaman krisis energy. Terutama pada upaya menjaga kestabilan harga bahan bahan pokok dan bahan baku penting lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat dan akses terhadap barang-barang kebutuhan pokok..
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Pada tahun 2023 sebesar 7,81% lebih baik dari 8,07 % yang ditargetkan, meskipun demikian Pemerintah Kota Palopo akan Kembali melanjkutkan kemudahan berinvestasi di Kota Palopo yang mampu menyediakan lapangan kerja dan menjadi kesempatan berusaha masyarakat.
3. Meskipun Paritas daya beli atau pengeluaran per kapita masyarakat Kota Palopo meningkat dalam tiga tahun terakhir, Pemerintah Kota Palopo tetap akan meningkatkan kualitas belanja pemerintah Kota Palopo sebagai salah satu stimulator perekonomian daerah, sekaligus untuk menekan angka penduduk miskin dengan upaya peningkatan kualitas dan cakupan infrastruktur yang lebih produktif, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, serta pembinaan usaha masyarakat dengan menjaga ketepatan sasaran penerima termasuk mengemas pelaksanaan iven-iven produktif local daerah yang mampu mendatangkan angka kunjungan ke Kota Palopo sekaligus diharapkan dapat menekan laju inflasi.
4. Untuk menekan Gini Rasio Pemerintah Kota Palopo akan memastikan bahwa upaya pembangunan sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan dan life skill), peningkatan produktifitas sector ekonomi, pengembangan ekonomi hijau, transformasi digital (teknologi informasi), integrasi pengembangan infrastruktur pada spot potensial dan produktif daerah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber-sumber pendapatan daerah Kota Palopo pada tahun 2025 tetap berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah; pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan yang Sah.

Secara umum, arah kebijakan pendapatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan mutu palayanan publik kepada wajib pajak/retribusi dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak dan akses informasi, memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah dan mengembangkan pelaporan pajak secara online untuk wajib pajak.
2. Optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah yang berpotensi untuk meningkatkan PAD.
3. Memperkuat permodalan bagi perusahaan milik daerah/BUMD yang berpotensi dalam peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba.
4. Memperkuat koordinasi dan pemantapan dengan Pemerintah Pusat, terkait pengalokasian DAU dan DAK bagi Pemerintah Kota Palopo, terutama terkait dengan pendanaan Standar Pelayanan Minimal atau Layanan Dasar Masyarakat.

3.2.1.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kota Palopo Tahun 2025

Capaian realisasi pendapatan Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2023 sebesar 943,087,588,524.71 atau 83.29% dari target yang ditetapkan, kondisi ini dibawah kinerja tahun 2022 dimana angka realisasi pendapatan terhadap target pada posisi 95.44%. Untuk Pendapatan Asli Daerah atau PAD, tahun 2023, realisasinya pada angka 194.013.652.599,96 atau 56.56%. Berbeda dengan capaian pendapatan transfer yang tahun 2023, capaian realisasinya 736.792.265.269,75 atau 98.73%, angka tersebut diatas dari angka capaian 2022 (98.35%). Sementara Lain-lain Pendapatan yang sah yang realiasinya tahun 2023 hanya 12.281.670.655 (28.63%) angka tersebut tidak jauh berbeda dengan tahun 2022 yaitu sebesar (28.73%) dari target yang ditentukan dalam APBD. Arah kebijakan pendapatan daerah sebagaimana diurai diatas, akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Palopo meningkatkan kinerja pendapatan daerah di tahun 2025.

Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Daerah Kota Palopo Tentang Optimalisasi Pemungutan Opsen Pajak dan Pajak Daerah, dimana Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang sepenuhnya menjadi PAD Kota Palopo, namun tahun 2025 Pajak MBLB Pemerintah Daerah Kota Palopo akan dibagi ke Pemerintah Provinsi berupa Opsen Pajak MBLB sebesar 25% dari pokok Pajak MBLB. Sebaliknya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selama ini dibagi hasilkan kepada Pemerintah Daerah Kota Palopo, namun pada tahun 2025 kedua jenis Objek Pajak tersebut akan menjadi penerimaan PAD bagi Pemerintah Daerah Kota Palopo berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebesar 66% dari pokok PKB dan BBNKB.

Berikut adalah tabel capaian sekaligus menjadi perbandingan kinerja realisasi pendapatan Pemerintah Kota Palopo sejak 2022-2023, tahun berjalan dan proyeksi Pendapatan Daerah Kota Palopo 2025 s.d 2026

Tabel 3.11.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Palopo
Tahun 2022 s.d Tahun 2026

Uraian	Jumlah				
	Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target Pada Tahun (n+1)
	2022	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN	**985,650,636,231.29**	**943,087,588,524.71**	**962,577,743,667.00**	**1,077,254,652,730.23**	**1,093,064,727,505.39**
Pendapatan Asli Daerah	**178,686,155,930.29**	**194,013,652,599.96**	**238,905,271,486.00**	**214,656,753,772.57**	**208,273,427,234.82**
Pajak Daerah	41,417,676,185.00	46,687,824,782.00	49,417,000,000.00	48,921,515,499.22	53,168,027,838.93
Retribusi Daerah	18,051,395,863.00	10,560,295,890.00	12,931,644,000.00	26,592,479,859.75	32,281,344,288.91
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,036,243,575.00	7,347,070,226.00	7,600,000,000.00	7,057,841,454.23	7,068,665,241.80
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	112,180,840,307.29	129,418,461,701.96	168,956,627,486.00	132,084,916,959.37	115,755,389,865.18
Pendapatan Transfer	**797,112,583,627.00**	**736,792,265,269.75**	**723,672,472,181.00**	**842,950,135,623.90**	**856,724,071,957.24**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**726,104,905,251.00**	**658,230,414,371.00**	**656,261,164,000.00**	**764,267,991,300.20**	**773,855,292,964.12**
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak	14,550,624,158.00	13,754,459,389.00	13,687,568,000.00	14,639,665,417.83	14,684,390,169.87
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	12,704,669,704.00	3,819,004,000.00	00.00	10,397,192,898.04	15,844,844,008.16
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	485,869,974,472.00	504,787,401,000.00	521,857,620,000.00	498,254,864,830.96	492,551,854,318.47
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus	212,979,636,917.00	135,869,549,982.00	120,715,976,000.00	240,976,268,153.37	250,774,204,467.62
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	**9,008,187,000.00**	**5,930,155,000.00**	**00.00**	**9,693,214,983.26**	**10,055,023,058.77**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	00.00	00.00	**00.00**	**00.00**	00.00
Dana Insentif Daerah (DID)	9,008,187,000.00	5,930,155,000.00	00.00	9,693,214,983.26	10,055,023,058.77
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**61,999,491,376.00**	**72,631,695,898.75**	**67,411,308,181.00**	**68,988,929,340.44**	**72,813,755,934.35**
Pendapatan Bagi Hasil	56,338,647,376.00	68,267,853,898.75	57,991,212,181.00	63,443,249,960.81	67,324,777,268.90
Bantuan Keuangan	5,660,844,000.00	4,363,842,000.00	9,420,096,000.00	5,545,679,379.63	5,488,978,665.45

Uraian	Jumlah				
	Realisasi Tahun (n-3) 2022	Realisasi Tahun (n-2) 2023	Tahun Berjalan (n-1) 2024	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana (n) 2025	Proyeksi/Target Pada Tahun (n+1) 2026
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan	**9,851,896,674.00**	**12,281,670,655.00**	**00.00**	**19,647,763,333.76**	**28,067,228,313.33**
Hibah	388,586,620.00	00.00	00.00	174,903,023.72	117,341,613.34
Bantuan Keuangan	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
Pendapatan Lainnya	9,463,310,054.00	12,281,670,655.00	00.00	19,472,860,310.04	27,949,886,699.99

Sumber: RPD Kota Palopo 2024-2026

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dapat dilaksanakan Bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau pemerintah daerah dengan pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan /isu yang dihadapi maka ditetapkan arah kebijakan belanja daerah 2025 sebagaiberikut :

1. Belanja Pemerintah Kota Palopo tahun 2025 diarahkan pada pemenuhan mandatory spending yang mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengawasan, sesuai dengan kaidah alokasi yang berlaku.
2. Secara sektoral, belanja tersebut juga diarahkan pada pemenuhan standar pelayanan minimal masyarakat (SPM) dalam 6 urusan, dan mendukung pencapaian Sustainabel Development Goals atau SDGs/TPB.
3. Belanja Pemerintah Kota Palopo akan diarahkan menggunakan pola money follow the program, sehingga alokasi anggaran akan diarahkan untuk mendukung janji politik kepala daerah, tujuan dan sasaran pembangunan, dan prioritas pembangunan Kota Palopo, yang dalam pengalokasiannya juga akan beririsan dengan dukungan Pemerintah Kota Palopo bagi prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025.
4. Belanja Pemerintah Kota Palopo tahun 2025 juga akan diarahkan untuk upaya penyelesaian utang belanja Pemerintah Kota Palopo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pada jenis belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan. Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel dan transparan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, Belanja tidak terduga diperuntukkan untuk penanganan bencana alam, bencana non alam dan bantuan social yang tidak direncanakan.
6. Belanja operasi setiap perangkat daerah diarahkan untuk mendukung operasional perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Palopo 2024-2026. Ini bermakna bahwa belanja akan diarahkan untuk sepenuhnya mendukung prioritas pembangunan Kota Palopo dan mentrigger pembangunan nasional dan Sulsel.

Alokasi Belanja pada tahun 2025 diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Belanja pegawai yang pengalokasian dananya untuk gaji pegawai dengan asumsi bahwa sudah tidak ada lagi kenaikan gaji pegawai dan diganti dengan Gaji Tunjangan Hari Raya. Akres Gaji sebesar 2,5 % untuk mengantisipasi kenaikan gaji pegawai yang disebabkan Kenaikan Gaji Berkala, kenaikan tunjangan maupun yang disebabkan karena adanya promosi jabatan, pemberian insentif pegawai termasuk gaji ke 13 yang diberikan setiap tahunnya, Iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan PNS, Upah pungut/insentif, Sertifikasi Guru, tambahan penghasilan guru non sertifikasi serta tambahan penghasilan lainnya bagi PNSD, Penyediaan Gaji untuk PPPK, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Belanja hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/ atau kelompok masyarakat, sepanjang berpartisipasi dan mendukung penyelenggaraan pembangunan atau pelayanan dasar di Kota Palopo;
3. Belanja subsidi untuk bantuan biaya produksi/jasa kepada perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat ;
4. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat atau membantu masyarakat yang mengalami krisis sosial;
5. Bantuan keuangan dianggarkan untuk pemberian bantuan kepada partai politik sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri dalam negeri tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
6. Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan non alam dan/atau bantuan sosial yang tidak direncanakan serta kebutuhan mendesak lainnya.

Berikut adalah table capaian sekaligus menjadi perbandingan kinerja realisasi belanja Pemerintah Kota Palopo sejak 2022-2023, belanja Tahun Berjalan dan proyeksi belanja Tahun 2025 s.d 2026.

Tabel 3.12.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palopo
Tahun 2022 s.d tahun 2026

Uraian	Jumlah				
	Realisasi Tahun (n-3) 2022	Realisasi Tahun (n-2) 2023	Tahun Berjalan (n-1) 2024	Proyeksi/Target pada tahun Rencana (n) 2025	Proyeksi pada tahun (n+1) 2026
BELANJA	**1,012,741,227,891.38**	**927,786,559,564.18**	**977,636,368,667.00**	**1,089,323,277,730.23**	**1,106,920,588,145.25**
Belanja Operasi	**747,821,914,361.38**	**745,228,569,827.38**	**847,009,719,236.00**	**653,529,390,754.10**	**664,123,735,645.36**
Belanja Pegawai	441,768,132,501.20	428,698,208,691.01	496,773,081,417.00	370,548,939,412.98	375,431,262,257.72
Belanja Barang dan Jasa	291,160,385,834.97	303,586,612,693.37	317,918,492,829.00	268,945,209,634.92	280,226,914,870.42
Belanja Bunga	1,342,956,043.21	1,097,664,953.00	1,150,000,000.00	1,025,089,220.61	877,947,768.27
Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Hibah	13,384,939,982.00	11,735,083,490.00	31,012,144,990.00	12,867,025,653.79	7,457,132,035.42
Belanja Bantuan Sosial	165,500,000.00	111,000,000.00	156,000,000.00	143,126,831.80	130,478,713.53
Belanja Modal	**264,912,813,030.00**	**182,557,989,736.80**	**123,626,649,431.00**	**435,789,466,466.23**	**442,793,279,012.56**
Belanja Tak Terduga	**6,500,500.00**	**0.00**	**7,000,000,000.00**	**4,420,509.90**	**3,573,487.34**
Belanja Transfer	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Sumber: RPD Kota Palopo 2024-2026

Alokasi Belanja Perangkat Daerah

Alokasi pagu belanja perangkat daerah Tahun 2025, dijabarkan dari Peraturan Wali Kota Nomor 100.3.2/13/B.Hukum tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palopo 2024-2026 dan bersifat indikatif, dengan prinsip *money follow the program*. Money follow program kami maknai sebagai upaya atau tindakan pengalokasian anggaran sesuai prioritas program pembangunan daerah, bukan berdasarkan tugas pokok atau fungsi sebuah perangkat daerah. Jadi besar kecilnya anggaran per perangkat daerah yang dialokasikan, mengikuti prioritas pembanguinan yang akan diintervensi, besarnya kontribusi terhadap tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palopo, tidak dialokasikan dengan pertimbangan atau berdasarkan tugas dan fungsi.

Berikut adalah table Alokasi Pagu Belanja per perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun 2025:

Tabel 3.13.
Alokasi Belanja Perangkat daerah
Tahun 2025

Kode	Urusan	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**	**706,374,347,484.21**	
01.01.00	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	193,951,423,848.37	Dinas Pendidikan
01.02.00	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	150,793,111,771.75	Dinas Kesehatan
		103,274,191,221.08	RSUD Sawerigading
01.03.00	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	231,792,947,552.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.04.00	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	5,559,645,636.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
01.05.01	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	7,340,762,868.01	Satuan Polisi Pamong Praja
01.05.01		3,668,548,215.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01.05.01		5,510,668,230.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
01.06.00	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	4,483,048,142.00	Dinas Sosial
2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**120,334,105,666.50**	
02.07.00	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	2,952,775,672.99	Dinas Tenaga Kerja
02.08.00	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,790,199,149.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
02.09.00	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2,368,673,335.00	Dinas Ketahanan Pangan
02.10.00	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	10,016,844,871.00	Dinas Pertanahan
02.11.00	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	43,938,908,215.01	Dinas Lingkungan Hidup
02.12.00	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,434,388,022.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.14.00	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17,794,694,633.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02.15.00	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	7,949,286,521.50	Dinas Perhubungan
02.16.00	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	5,131,516,920.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
02.17.00	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	3,550,077,138.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
02.18.00	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6,022,054,295.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02.19.00	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5,021,897,455.00	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
02.20.00	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	2,083,379,690.45	Dinas Persandian dan Statistik
02.21.00	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	23,653,788.55	Dinas Persandian dan Statistik
02.22.00	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	2,814,857,211.00	Dinas Kebudayaan
02.23.00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2,598,506,055.00	Dinas Perpustakaan
02.24.00	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	1,842,392,694.00	Dinas Kearsipan
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**	**45,036,274,142.91**	
03.25.00	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	5,657,669,540.91	Dinas Perikanan
03.26.00	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	9,700,342,730.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
03.27.00	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	19,576,127,783.00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
03.30.00	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	5,503,272,732.00	Dinas Perdagangan
03.31.00	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	2,445,098,264.00	Dinas Perindustrian
03.32.00	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	2,153,763,093.00	Dinas Transmigrasi
4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**	**84,614,517,193.00**	
04.01.00	Sekretariat Daerah	57,734,331,929.00	Sekretariat Daerah
04.02.00	Sekretariat DPRD	26,880,185,264.00	Sekretariat DPRD
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**	**60,615,690,648.00**	
05.01.00	Perencanaan	12,385,180,004.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
05.02.03	Keuangan	25,000,000,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
05.02.01		10,473,856,207.00	Badan Pendapatan Daerah
05.03.00	Kepegawaian	9,541,616,561.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
05.05.00	Penelitian dan Pengembangan	3,215,037,876.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**	**7,973,317,439.00**	
06.01.00	Inspektorat Daerah	7,973,317,439.00	Inspektorat
7	**Unsur Kewilayahan**	**48,248,723,140.00**	
07.01.00	Kecamatan Wara	6,130,123,836.00	Kecamatan Wara
	Kecamatan Wara Utara	5,247,405,451.00	Kecamatan Wara Utara
	Kecamatan Wara Timur	7,084,383,787.00	Kecamatan Wara Timur
	Kecamatan Wara Barat	4,598,621,535.00	Kecamatan Wara Barat
	Kecamatan Wara Selatan	4,463,797,967.00	Kecamatan Wara Selatan
	Kecamatan Bara	5,837,849,197.00	Kecamatan Bara
	Kecamatan Mungkajang	4,281,635,320.00	Kecamatan Mungkajang
	Kecamatan Sendana	4,358,055,294.00	Kecamatan Sendana
	Kecamatan Telluwanua	6,246,850,753.00	Kecamatan Telluwanua
8	**Unsur Pemerintahan Umum**	**16,126,302,016.61**	

Kode	Urusan	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
08.01.00	Kesatuan Bangsa dan Politik	16,126,302,016.61	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Total		**1,089,323,277,730.23**	

Sumber: RPD Kota Palopo 2024-2026

Alokasi Belanja Untuk Mandatory Spending

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran daerah yang sudah diatur oleh Undang-Undang yang bertujuan mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Ini merupakan besaran dana wajib yang disediakan pemerintah dalam formula APBD, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan perintah Undang-Undang.

Berikut adalah proporsi mandatory spending sesuai kebijakan kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
2. Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN).
4. Bagi pemerintah kabupaten/kota, yang nilai APBD-nya sampai dengan 1 Trilyun, maka lokasi anggaran untuk Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dialokasikan 1% dari total APBD. (berlaku sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020)

Berikut adalah rencana alokasi Belanja Pemerintah Kota Palopo sebagai upaya pemenuhan mandatory spending pada Tahun 2025:

Tabel 3.14.
Rencana Alokasi Belanja Pemerintah Kota Palopo
Untuk Pemenuhan Mandatory Spending

Mandatory Spanding	Alokasi (%)	Urusan/ Program	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Pendidikan	**20.40**		**200,414,494,056.15**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	154,005,069,329.12	Dinas Pendidikan
		Program Pengelolaan Pendidikan	39,907,639,865.50	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum	19,565,808.50	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11,716,345.25	Dinas Pendidikan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	7,432,500.00	Dinas Pendidikan
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	401,355,000.00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,436,091,065.00	Dinas Perpustakaan
		Program Pembinaan Perpustakaan	63,314,990.00	Dinas Perpustakaan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	99,100,000.00	Dinas Perpustakaan
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	28,603,728.50	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	169,194,232.71	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1,535,197,740.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	198,200,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga

		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	220,500,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Penyuluhan Pertanian	128,779,231.07	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,182,734,220.50	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kesehatan	**19.63**		**213,884,768,823.08**	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	96,857,518,900.00	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	335,847,174.75	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	452,755,197.00	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	445,950,000.00	Dinas Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28,868,637,311.46	RSUD Sawerigading
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	74,405,553,909.62	RSUD Sawerigading
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	12,518,506,330.25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Infrastruktur	**25.62**		**268,186,823,195.20**	
		Program Pengelolaan Pendidikan	39,907,639,865.50	Dinas Pendidikan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	22,010,605,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	594,600,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	297,300,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	198,200,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1,164,425,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Permukiman	792,800,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan Gedung	108,516,929,684.20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	198,200,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	84,667,303,139.80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Perumahan	293,436,536.95	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	1,145,969,723.75	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	395,059,177.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	571,854,568.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	7,432,500,000.00	Dinas Pertanahan
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	**0.75**		**7,973,317,439.00**	

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,216,327,953.00	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,617,451,731.00	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	139,537,755.00	Inspektorat

Sumber: Bappeda Kota Palopo

Alokasi Untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kerangka regulasi yang dipedomani Pemerintah Kota Palopo dalam RKPD Tahun 2025 terkait Standar pelayanan minimal (SPM) adalah Permendagri 59/2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan.

Berikut adalah alokasi dukungan belanja Pemerintah kota Palopo bagi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM):

Tabel 3.15.
Rencana Alokasi Belanja Pemerintah Kota Palopo
Untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Program Pengelolaan Pendidikan	39.867.369.795,00	Dinas Pendidikan
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	96.698.180.020,00	Dinas Kesehatan
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	74.392.871.121,80	RSUD Sawerigading
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	594.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	198.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.398.650.571,35	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Program Penanggulangan Bencana	905.717.340,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.927.941.570,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9	Program Rehabilitasi Sosial	144.091.530,00	Dinas Sosial
10	Program Penanganan Bencana	195.689.340,00	Dinas Sosial
	JUMLAH	**218.322.511.288,15**	

Sumber: BPKAD Kota Palopo

Alokasi Untuk SDGS/TPB

Untuk dalam mendukung pencapaian SDGs Pemerintah Kota Palopo akan mengalokasikan Anggaran sebesar **Rp. 588.102.628.781,68** atau **53.99% persen** dari rencana total Belanja Daerah Pemerintah Kota Palopo. Karena beririsan dengan sejumlah prioritas pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Kota Palopo. Satu program bisa memberikan efek pada lebih dari satu tujuan pembangunan dalam SDGs.

Berikut adalah alokasi dukungan belanja Pemerintah kota Palopo bagi pencapaian SDGs :

Tabel 3.16.
Rencana Alokasi Belanja Pemerintah Kota Palopo
Untuk Dukungan Bagi SDGs/TPB

Tujuan TPB/SDGs	Program Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
TUJUAN 1 (Tanpa Kemiskinan)		**16,427,859,777.75**	
	Program Pemberdayaan Sosial	114,062,613.50	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	144,237,077.00	Dinas Sosial
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	758,959,332.00	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	195,887,006.00	Dinas Sosial
	Program Pengendalian Penduduk	139,885,596.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	12,518,506,330.25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1,274,388,342.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	99,100,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak
	Program Pencatatan Sipil	32,405,700.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	94,417,525.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Penanggulangan Bencana	906,632,206.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	149,378,050.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TUJUAN 2 (Tanpa Kelaparan)		**634,321,727.77**	
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	38,469,034.40	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	35,923,750.00	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	21,069,651.00	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	538,859,292.37	Dinas Perdagangan
TUJUAN 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)		**184,563,376,314.62**	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	96,857,518,900.00	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	74,405,553,909.62	RSUD Sawerigading
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	445,950,000.00	Dinas Kesehatan
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	12,518,506,330.25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	335,847,174.75	Dinas Kesehatan
TUJUAN 4 (Pendidikan Berkualitas)		**40,002,237,009.25**	

	Program Pengelolaan Pendidikan	39,907,639,865.50	Dinas Pendidikan
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11,716,345.25	Dinas Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum	19,565,808.50	Dinas Pendidikan
	Program Pembinaan Perpustakaan	63,314,990.00	Dinas Perpustakaan
TUJUAN 5 (Kesetaraan Gender)		**436,299,642.00**	
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	405,925,492.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	5,747,800.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak
	2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	24,626,350.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak
	Program Pengelolaan Pendidikan	sudah dianggarkan di tujuan 4	Dinas Pendidikan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	sudah dianggarkan di tujuan 3	Dinas Kesehatan/RSUD
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	sudah dianggarkan di tujuan 1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	sudah dianggarkan di tujuan 3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	sudah dianggarkan di tujuan 1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TUJUAN 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak)		**24,166,030,500.00**	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	594,600,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	198,200,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1,164,425,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	198,200,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	22,010,605,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TUJUAN 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)		**17,867,624,011.14**	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	401,355,000.00	Dinas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	114,918,366.78	Dinas Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial	21,660,633.84	Dinas Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	136,639,080.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Promosi Penanaman Modal	50,645,055.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	279,337,134.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1,535,197,740.00	Dinas Pemuda dan Olahraga

	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	210,469,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	11,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	8,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengembangan UMKM	319,597,890.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	13,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Penatagunaan Tanah	9,261,300.00	Dinas Pertanahan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	721,928,734.00	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	129,327,977.50	Dinas Perikanan
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	203,202,394.58	Dinas Perikanan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4,669,069,009.66	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	700,885,828.21	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	68,379,000.00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	233,939,176.25	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Program Penyuluhan Pertanian	128,779,231.07	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	198,200,000.00	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	658,298,567.45	Dinas Perdagangan
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	45,133,905.80	Dinas Perdagangan
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	29,710,180.00	Dinas Perdagangan
	Program Pelayanan Penanaman Modal	418,657,860.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	423,949,800.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	571,854,568.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Program Pemasaran Pariwisata	5,456,126,579.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	99,100,000.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
TUJUAN 9 (Industri, Innovasi dan Infrastruktur)		**212,270,203,183.00**	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	40,439,737.00	Dinas Perindustrian
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	9,138,506.50	Dinas Perindustrian
	Program Penataan Bangunan Gedung	108,516,929,684.20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

	Program Penyelenggaraan Jalan	84,667,303,139.80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1,953,548,297.00	Dinas Perhubungan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	16,881,108,340.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Pelayaran	130,284,378.50	Dinas Perhubungan
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	71,451,100.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TUJUAN 10 (Berkurangnya Kesenjangan)		**1,541,028,900.75**	
	Program Kawasan Permukiman	1,145,969,723.75	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	395,059,177.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan Pendidikan	sudah dianggarkan di tujuan 4 dan 5	Dinas Pendidikan
	Program Hubungan Industrial	sudah dianggarkan di tujuan 8	Dinas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	sudah dianggarkan di tujuan 8	Dinas Tenaga Kerja
TUJUAN 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan)		**3,128,770,850.95**	
	Program Kawasan Permukiman	sudah dianggarkan di tujuan 10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	sudah dianggarkan di tujuan 10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Pengembangan Perumahan	293,436,536.95	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	14,270,400.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Pengembangan Permukiman	792,800,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	10,658,610.00	Dinas Pertanahan
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	87,803,591.00	Dinas Transmigrasi
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1,929,801,713.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
TUJUAN 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab)		**15,423,621,803.15**	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	176,257,575.30	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan	14,488,107,190.85	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	297,300,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	452,755,197.00	Dinas Kesehatan
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	9,201,840.00	Dinas Pertanahan
TUJUAN 13 (Penanganan Perubahan Iklim)		**1,438,171,177.40**	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	945,950,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	28,603,728.50	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	409,434,523.90	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	25,766,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	28,416,925.00	Dinas Lingkungan Hidup
TUJUAN 15 (Ekosistem Darat)		**4,196,772,719.70**	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	223,606,762.50	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3,958,251,407.20	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	14,914,550.00	Dinas Lingkungan Hidup
TUJUAN 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh)		**55,465,355,844.81**	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,996,602,385.00	Kecamatan
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	44,443,377.00	Dinas Sosial
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	945,750,940.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Perlindungan Perempuan	69,592,975.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak
	Program Perlindungan Khusus Anak	99,100,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3,401,073,450.72	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	7,432,500.00	Dinas Pendidikan
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	12,980,000,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,100,000,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4,212,330,056.50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3,335,496,987.50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
	Program Perekonomian dan Pembangunan	1,055,074,264.47	Sekretariat Daerah
	Program Kepegawaian Daerah	3,905,055,072.25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,182,734,220.50	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,617,451,731.00	Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	139,537,755.00	Inspektorat

	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	2,570,388,647.86	Sekretariat DPRD
	Program Pendaftaran Penduduk	64,585,699.75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1,458,584,174.15	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	975,812,925.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	74,977,078.00	Dinas Persandian dan Statistik
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	55,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	9,910,000.00	Dinas Perindustrian
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	653,861,800.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	11,442,976,082.59	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	67,583,722.50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TUJUAN 17 (Kemitraan Mencapai Tujuan)		**10,540,955,319.39**	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3,545,684,233.20	Badan Pendapatan Daerah
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	198,200,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4,892,179,853.96	Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	99,595,134.97	Kecamatan
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	728,334,459.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	91,979,570.00	Dinas Pertanahan
	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	16,892,000.00	Dinas Pertanahan
	Program Pengembangan Kebudayaan	262,000,289.25	Dinas Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	99,100,000.00	Dinas Kebudayaan
	Program Pembinaan Sejarah	183,335,000.00	Dinas Kebudayaan
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	104,054,779.01	Dinas Kebudayaan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	sudah dianggarkan di tujuan 8	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	220,500,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	99,100,000.00	Dinas Perpustakaan
	TOTAL DUKUNGAN	**588,102,628,781.68**	

Sumber: Bappeda Kota Palopo

3.2.3. Pembiayaan Daerah

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 2025, jika dalam perhitungan RAPBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih

perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Sedangkan Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Jika APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran berjalan;
2. Jika APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; atau
3. Jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka dilakukan dengan dana pinjaman.

Selama ini sebagian besar penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
Memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah, Trend Pembiayaan dan kebutuhan pembangunan daerah, maka kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2025 adalah:

1. Menciptakan pembiayaan daerah yang aman dan tidak menggangu stabilitas maupun kesinambungan anggaran daerah dengan memanfaatkan SILPA dan rencana pinjaman daerah;
2. Menjadikan penyertaan modal pemerintah daerah dalam BUMD sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD yang bersangkutan;
3. Menjadikan penyertaan modal (investasi) daerah sebagai upaya untuk meningkatkan PAD.

Adapun komposisi realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021-2022, tahun berjalan dan proyeksi tahun 2024-2025 diuraikan berikut ini:

Tabel 3.17.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Palopo
Tahun 2022 s.d tahun 2026

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
	Realisasi Tahun (n-3) 2022	Realisasi Tahun (n-2) 2023	Tahun Berjalan (n-1) 2024	Proyeksi/Target pada tahun Rencana (n) 2025	Proyeksi pada tahun (n+1) 2026
Penerimaan Pembiayaan					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45,004,717,734.91	14,907,764,409.58	18,000,000,000.00	25,010,000,000.00	26,797,235,639.86
Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**45,004,717,734.91**	**14,907,764,409.58**	**18,000,000,000.00**	**25,010,000,000.00**	**26,797,235,639.86**
Pengeluaran Pembiayaan					
Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pembayaran Pokok Utang	2,941,373,129.24	1,470,686,565.00	2,941,375,000.00	12,941,375,000.00	12,941,375,000.00
Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**2,941,373,129.24**	**1,470,686,565.00**	**2,941,375,000.00**	**12,941,375,000.00**	**12,941,375,000.00**
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	**42,063,344,605.67**	**13,437,077,844.58**	**15,058,625,000.00**	**12,068,625,000.00**	**13,855,860,639.86**

Sumber: Bappeda Kota Palopo

3.2.4.Pembiayaan Pembangunan Daerah Non Pemerintah

Sesuai semangat Otonomi Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka tantangan Pemerintah Kota Palopo adalah bagaimana meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, yang akan selalu diperhadapkan pada keterbatasan anggaran pembangunan. Olehnya ada tiga alternative pembiayaan pembangunan yang bisa ditempuh yakni Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Obligasi dan Corporate Sosial Responsibility (CSR).

1. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) (*Public Private Partnership)*

Keterbatasan APBD dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberpa alternatif pendanaan, salah satunya dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai *Public Private Partnership (PPP).*

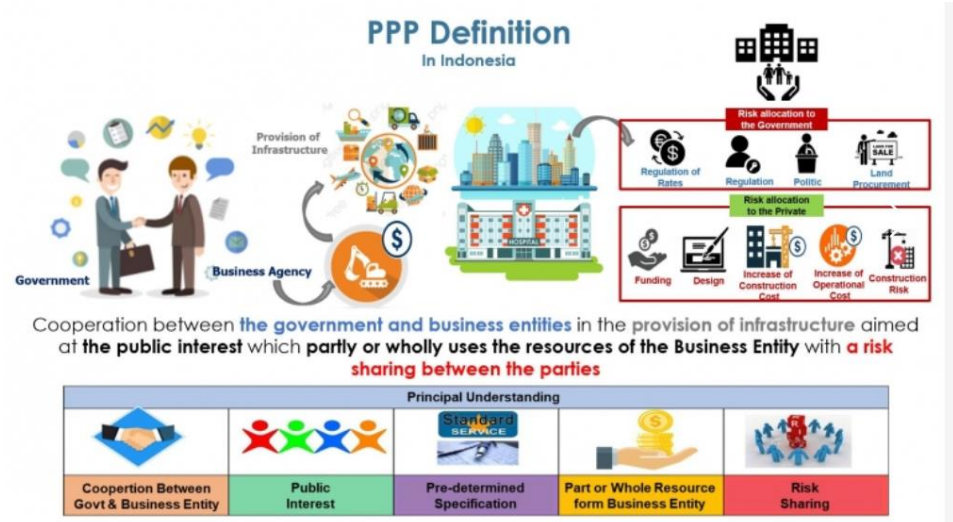

PPP merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik (Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian resiko.

KPBU sebagaimana amanat Perpres No.38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Dalam Penyediaan Infrastruktur antara lain :

1. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial;
2. Termasuk ke dalam 19 jenis infrastruktur yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
3. Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisa biaya manfaat dan sosial dan analisa nilai manfaat uang (Value for Money) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

2. Obligasi

Merupakan pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat dan diterbitkan melalui pasar modal domestik dengan menggunakan mata uang rupiah.Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui pasar modal. Obligasi daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat dan provinsi dengan memanfaatkan dana dari masyarakat.



Obligasi Daerah merupakan pinjaman jangka panjang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.Dikeluarkan dalam mata uang rupiah.Hasil penjualan digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karakteristik Kegiatan yang Dapat Didanai dengan Obligasi Daerah antara lain: Kegiatan investasi sarana

dan prasarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik dan menghasilkan penerimaan bagi APBD, sesuai dengan dokumen perencanaan daerah, merupakan kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada, dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari obligasi daerah.

Kegiatan yang didanai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah. Menurut DJPK beberapa pekerjaan yang dapat dilaksanakan adalah Pelayanan air minum, Penanganan limbah dan persampahan, Transportasi, Rumah sakit, Pasar tradisional, Tempat perbelanjaan, Pusat hiburan, Wilayah wisata dan pelestarian alam, Terminal dan sub-terminal, Perumahan dan rumah susun, Pelabuahan lokal dan regional.

3. Coorporate Social Responsibility (CSR)

Adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. CSR juga merupakan
kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.



Beberapa potensi bidang pelayanan yang bisa diintervensi dengan pola CSR adalah perbaikan layanan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pembangunan dan penyediaan infrastruktur, pembinaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan bidang lain sepanjang bersinergi dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palopo.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah Kota Palopo pada tahun 2025 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palopo Tahun 2024-2026, sekaligus menjadi tahun terakhir untuk mencapai kondisi yang diinginkan dalam visi RPJPD 2005-2025 Kota Palopo. Perencanaan pembangunan daerah Kota Palopo tahun 2025 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), yang diimplementasikan dengan: 1) menerapkan prioritas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan, termasuk pencapaian target indikator makro yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya, penguatan ekonomi Kota Palopo, penyelesaian isu-isu komprehensif seperti kemiskinan dan stunting, serta penanganan isu strategis dan kewilayahan; 2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai prioritas pembangunan dengan pendekatan penganggaran berbasis program, serta pelaksanaan program prioritas pada tahun 2025; 3) mendorong kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, seperti APBD kota, APBD Provinsi, APBN, CSR, KPBU, obligasi daerah, dana masyarakat/umat, dan hibah, untuk mendukung belanja setiap perangkat daerah; serta 4) melibatkan secara aktif para pemangku kepentingan di luar pemerintahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan penerapan konsep spasial dalam prioritas pembangunan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan pembangunan Kota Palopo tahun 2025 dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo diarahkan untuk mempercepat terwujudnya visi pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palopo periode 2024-2026. RKPD 2025 memiliki peran strategis dalam memastikan pencapaian sasaran-sasaran prioritas yang telah ditetapkan, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta penguatan sektor ekonomi. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel juga menjadi fokus utama dalam mencapai tujuan tersebut.

Sasaran pembangunan Kota Palopo tahun 2025 difokuskan pada beberapa area penting yang menjadi kelanjutan dari prioritas dalam RPD 2024-2026. Sasaran tersebut mencakup peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan stunting, serta penanganan isu strategis seperti ketahanan energi, air, dan pangan.

RKPD 2025 disusun berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPD. RPD menjadi landasan perencanaan yang menuntun prioritas pembangunan tahunan di Kota Palopo, sehingga memastikan adanya kesinambungan antara visi jangka menengah dan jangka panjang daerah. Dengan demikian, RKPD 2025 berperan sebagai instrumen operasional untuk merealisasikan target-target pembangunan yang telah digariskan dalam RPD.

Berikut adalah tabel capaian dan tatget kinerja pembangunan Kota Palopo :

Table 4.1
Tujuan dan Sasaran serta Target Kinerja Pembangunan
Kota Palopo Tahun 2025

Tujuan (T) dan Sasaran RPD (S)		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2023	Target RPD 2025	Target RKPD 2025	Target RPD 2026
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas (T1)	1	Indeks Reformasi Birokrasi – I.S1.1	Poin	44,39	71-80	71-80	81-90
Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan (S1)	2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Poin	84,16	87.98	87.98	88
	3	Indeks SAKIP – I.S1.2	Poin	64,35	71-80	71-80	81-90
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat & Perekonomian Daerah yang Berkualitas (T2)	4	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta/Kapita/Thn	54,47	62	62	65
	5	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,69	7,38	7,38	7.06
Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha (S2)	6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) – I.S2.1	Persen	7,81	8	7,08	7.75
Meningkatnya Kondisi Ekonomi Daerah yang Berkualitas (S3)	7	Angka Pertumbuhan Ekonomi - I.S3.2	Persen	4,34	6,05	6,05	6.62
	8	Gini Rasio - I.S3.3	Koefisien	0,367	0,334	0,334	0.319
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (S4)	9	Indeks Pembangunan Manusia – I.S4.1	Poin	80,77	79,82	79,82	79.98
	10	Indeks Pembangunan Gender – I.S4.2	Poin	97,61	97,37	97,67	97.39
Terwujudnya Lingkungan Layak Huni dan Berkelanjutan (T3)	11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,52	60	70	72
Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Kualitas Lingkungan Perkotaaan (S5)	12	Indeks Resiko Bencana – I.S5-1	Po Predikat	167,40	190	165	185
	13	Luas Wilayah yang Tergenang/Terdampak Banjir	Ha	12	7	7	5
	14	Persentase Luas Kawasan Kumuh dari Total Luas Wilayah Kota – I.S5-3	Persen	1,1	0,9	0,9	0.5

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Prioritas pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan langkah strategis yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas dan jangka panjang. Penetapan prioritas ini berfungsi sebagai panduan dalam menentukan alokasi sumber daya dan upaya untuk mengatasi isu-isu krusial yang dianggap paling mendesak atau memiliki dampak terbesar terhadap kemajuan daerah. Dalam konteks perencanaan, prioritas pembangunan mencakup berbagai aspek seperti pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, serta perlindungan lingkungan. Pendekatan yang tematik, holistik, integratif, dan spasial sering digunakan untuk memastikan bahwa prioritas-prioritas tersebut selaras dengan kondisi dan potensi wilayah, serta menjawab tantangan global dan lokal, seperti perubahan iklim dan ketimpangan sosial.

Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam RPD 2024-2026 dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sebagai mana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Rencana pembangunan nasional tahun 2025 merupakan titik awal dari pelaksanaan RPJPN 2025-2045. Dalam penyusunan RPJPN pemerintah pusat telah memperhatikan kondisi dari faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal dipengaruhi oleh megatrend global dan perubahan iklim, kemudian dari faktor internal dipengaruhi oleh hasil capaian pembangunan periode RPJP 2005-2025 dan modal dasar yaitu dilihat dari variabel demografi, kekayaan alam dan maritim, serta modal sosial budaya masyarakat. Pemerintah menargetkan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 dengan visi "**Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**".

Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka RKP 2025 merupakan penjabaran dari prioritas pembangunan tahun awal dalam RPJP 2025-2024 dan RPJMN 2025-2030 yang akan disusun menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2025 untuk menjaga keserasian rencana pembangunan. Tema RKP nasional tahun 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** Berikut adalah prioritas pembangunan nasional tahun 2025 :

Tabel. 4.2
Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Keterangan
Prioritas 1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM
Prioritas 2	Memantapkan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
Prioritas 3	Melanjutkan Pembangunan infrstruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri, di sentra produksi melalui koperasi
Prioritas 4	Memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi olahraga, Kesetaraan gender, Penguatan peran Perempuan, Pemuda, dan Disabilitas
Prioritas 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri
Prioritas 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
Prioritas 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
Prioritas 8	Memperkuat penyelarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat adil dan makmur

Sumber : RPJPN 2025-2045; RKP 2025 (Permen PPN/BAPPENAS No.2 Tahun 2024)

Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 20202024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Untuk itu, "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" ditetapkan sebagai tema RKP Tahun 2025.

Berikut adalah sejumlah intervensi di Kota Palopo untuk mendukung prioritas nasional pada tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel. 4.3
Prioritas Nasional & Highlight Intervensi di Kota Palopo
Tahun 2025

Prioritas Nasional	Highlight Intervensi di Kota Palopo
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM	Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul berekspresi
	Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik

Prioritas Nasional	Highlight Intervensi di Kota Palopo
Memantapkan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Kerjasama dengan Pemrpov atas penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial
	Fasilitasi business match marking startup digital
	Fasilitasi digital tecnopreneur
	Pemanfaatn teknologi digital di sektor pertanian
Melanjutkan Pembangunan infrstruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri, di sentra produksi melalui koperasi	Pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan di Pontap Kota Palopo
	Peningkatan cakupan layanan infrastruktur konektivitas regional dan penguatan konektivitas digital
	Pengembangan jejaring desa wisata di Provinsi Sulawesi Selatan
	Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
Memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi olahraga, Kesetaraan gender, Penguatan peran Perempuan, Pemuda, dan Disabilitas	Kerjasama pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
	Pengendalian penyakit menular lainnya malaria
	Pembangunan, rehabilitasi, dan renovasisarana prasarana olahraga
	Pembangunan kualitas keluarga
	Penurunan ketimpangan gender melalui peningkatan pendidikan perempuan, pencegahan perkawinana anak dan peningkata partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenaga kerjaan
	Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul thfal/bustanul athfal)
	Fasilitasi liteerasi digital
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri	Hilirisasi kakao
	Hiliraisiasi rumput laut
	Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	-
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
Memperkuat penyelarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat adil dan makmur	Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan

4.2.1.1. Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan.

Merujuk Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dan bagian tahapan pembangunan jangka menengah pertama yang difokuskan pada penguatan fondasi transformasi, dengan tema akselarasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan maka sasaran diarahkan kepada pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia, NTP, NTN, TPT, gini rasio, kemiskinan, dan emisi gas rumah kaca.

Tabel.4.4
Sasaran dan Target Nasional Tahun 2025

Sasaran	Target
Pertumbuhan Ekonomi	5,6%
Indeks Modal Manusia	0,56%
Nilai Tukar Petani (NTP)	115
Nilai tukar nelayan (NTN)	105
Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	5
Gini rasio	0,382
Tingkat Kemiskinan	5%
Emisi gas rumah kaca	38,6%

Sumber: RKP 2025 (Permen PPN/BAPPENAS No.2 Tahun 2024)

Berdasarkan tabel diatas sasaran pembangunan nasional di tahun 2025 target yang ditetapkan memiliki rentang batas atas dan bawah. Oleh karena itu untuk mempermudah perhitungan serta penetapan target di daerah maka target yang diambil adalah rentang batas atas yang tercantum dalam RKP 2025 seperti hasil tabel diatas. Kemudian prioritas dan arah kebijakan nasional secara luas disajikan pada tabel 4.8. Mengacu pada tabel 4.8 arah kebijakan strategi nasional maka pemetaan arah kebijakan nasional untuk mencapai sasaran diatas adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.5
Arah Kebijakan Nasional Spesifik Pencapaian Sasaran

Arah Kebijakan Nasional	Sasaran
Penguatan Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Biru	Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan Industri Kreatif	
Hilirisasi Industri	
Peningkatan Kualitas SDM	Indeks Modal Manusia
Mmeperkuat sains, Teknologi dan Pendidikan	
Penguatan Ekonomi Hijau	Nilai Tukar Petani (NTP)
Swasembada Pangan	
Pendalaman Sektor Keuangan	
Penguatan Ekonomi Biru	Nilai tukar nelayan (NTN)
Pendalaman Sektor Keuangan	
Mendorong Kewiraushaan	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)
Membangun dari desa	Gini rasio Tingkat Kemiskinan
Pemerataan Ekonomi	
Pembangunan Infrasturuktur	
Penyelarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan	Emisi gas rumah kaca

4.2.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2025

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2025 bertumpu pada upaya memperkuat fondasi ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, inklusif, serta berbasis inovasi. Kebijakan pembangunan nasional akan difokuskan pada penguatan daya saing global melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan transformasi digital, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung produktivitas ekonomi. Di sisi lain, strategi pembangunan menekankan pada upaya pengurangan ketimpangan antarwilayah, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Melalui pendekatan yang integratif, pembangunan tahun 2025 akan mendorong sinergi antara sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, energi, dan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan memperhatikan tantangan global seperti perubahan iklim dan revolusi industri 4.0. Berikut adalah tabel arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional 2025.

Tabel 4.6
Arah Keijakan dan Strategi Pembangunan Nasional 2025

Prioritas	Arah Kebijakan Nasional	Strategi Pembangunan Nasional 2025
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM	Memperkokoh ideologi pancasila	Penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara
		Pembelajaran multikulturalisme
		Menjadikan Pancasila sebagai kohevisitas social bagi kalangan pemuda milenial dan Gen Z
		Internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi
	Penguatan demokrasi	Menjamin kebebasan pers
		Kebebasan mimber akademik
		Menjamin kemerdekaan pendapat dimuka umum
		Peningkatan kinerja Lembaga legislatif
		Penguatan informasi publik
		Media massa yang bertanggungjawab, obyektif, jujur dan edukatif
		Peningkatan kualitas konten isi siaran pers yang bebas dari kekerasan dan pornografi serta streotip gender
	Penegakan Hak Asasi Manusia	Melindungi HAM seluruh warga negara
		Memperkuat perlindungan Perempuan dan anak

Prioritas	Arah Kebijakan Nasional	Strategi Pembangunan Nasional 2025
		Memastikan kebijakan bersifat humanis, inklusif dan kesetaraan gender
		Memenuhi kebutuhan hak dasar fakir miskin, lansia, anak terlantar dan disabilitas
Memantapkan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Penguatan Pertahanan Negara	Meningkatan jumlah anggaran pertahanan negara
		Menggunakan produk industry strategi nasional
		Pembentukan industry pertahanan negara
		Kolaborasi penelitian alat pertahanan dan keamanan negara
	Swasembada Pangan	Reformasi agrarian untuk memperbaiki kesejahteraan petani
		Mmeperkuat industry pupuk
		Peningkatan sarana dan prasarana pertanian
		Mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri
		Memperkuat rantai pasok pangan dalam negeri
	Swasembada energi	Mempercepat transisi energi
		Mengembalikan tatakelolah migas dan pertambangan
		Memberikan skema insentif bagi penemuan Cadangan sumber energi baru
	Swasembada air	Penyediaan tampungan dan pasokan air berkelanjutan
		Peningtakan kinerja layanan irigrasi
		Penyempuranaan tatakelolah infrastruktur sumberdaya air
		Revitalisasi daerah aliran sungai
	Ekonomi Syariah	Penguatan industry halal
		Kerjasama ekonomi syariah internasional
		Penguatan ekosistem ekonomi usaha mikro kecil menengah halal
		Penguatan keuangan syariah
	Ekonomi Digital	Digitalisasi UMKM
		Digitalisasi keuangan bagi pembiayaan UMKM dan Ultramikro
		Menciptakan iklim investasi ekonomi digital
		Meningkatkan literasi digital
	Ekonomi Hijau	Memberikan insentif bagi sirkular ekonomi
		Menenrapakan sirkular ekonomi industri
		Menegmbangkan produk ramah lingkugan
		Meningkatkan fasilitas 3R
		Melindungan keanekaragaman hayati flora dan fauna
		Perbaikan tatakelolah persampahan
	Ekonomi Biru	Menguatkan tatakelolah system ekonomi biru dan diplomasi maritim
		Mengeloah lahan ekosistem dan Kawasan konservasi perairan
		Mengembangkan industry perikanan yang modern
		Menguatkan transportasi logistic jalur laut
		Meningkatan destinasi parawista bahari
Melanjutkan Pembangunan infrstruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri, di sentra produksi melalui koperasi	Pembanguan Infrastruktur	Membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak bisa ditangani pemda
		Sinergi Pembangunan jaringan transportasi dalam konsep pengeloaaan terpadu
		Membangun pelabuahan simpul di kawasan Indonesia Timur
		Membuka akses internet di desa
	Kewirausahaan	Menciptakan lapangan kerja
		Memberikan insentif bagi Gerakan ekonomi kerakyatan
		Melindungi dan revitalisasi pasar tradisional
		Mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif dan inklusif
		Pendampingan bagi UMKM melalui inkubasi usaha
		Mengoptimalkan terwujudnya data koperasi dan UMKM
	Industri Kreatif	Penguatan ekosistem ekonomi kreatif
		Integrasi data ekonomi kreatif
		Perluasan dan peningkatan pasar
		Penguatan regulasi kebijakan dan kelembagaan ekonomi kreatif
	Penguatan Koperasi	Memperkuat kelembagaan dan tatakelolah koperasi
		Memperkuat Lembaga pengelola dana bergulir koperasi
		Mensosialisasikan bentuk hukum koperasi bagi milenial dan generasi Gen Z
	Pendalaman Sektor Keuangan	Penguatan peran perbankan
		Penguatan peran sektor keuangan non-Bank

Prioritas	Arah Kebijakan Nasional	Strategi Pembangunan Nasional 2025
		Peningkatan inklusif dan literasi keuangan
Memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi olahraga, Kesetaraan gender, Penguatan peran Perempuan, Pemuda, dan Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Percepatan wajib belajar 13 Tahun
		Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan setiap jenjang
		Revitalisasi Pendidikan non formal
		Pengembangan PAUD HI
		Penguatan tatakelola Pendidikan
		Meningkatkan keahlian tenaga kerja melalui pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja
		Melaksanakan resklling dan upskilling
		Mengembangkan manajemen talenta
		Mengembangkan budaya literasi dan gemar membaca
	Mmeperkuat sains, Teknologi dan Pendidikan	Memperluas Pendidikan PAUD dini
		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
		Penguatan system Pendidikan nasional
		Meningkatakan Pendidikan kejuruan
		Memberikan akses generasi muda dengan akses perguruan tinggi bidang sains, teknologi, Teknik, seni dan matematika
	Sistem Kesehatan Nasional	Memperkuat jamianan Kesehatan nasional
		Mmemperkuat dukungan Kesehatan khusus bagi anak
		Memperkuat Gerakan Masyarakat hidup sehat untuk mencegah penyakit menular dan tidak menular
		Meningkatkan kesejahteraan tenga kesehatan
		Meningkatkan industry obat nasional dan tradisional
		Penguatan kapasitas pelayanan Kesehatan yang bersifat promotive dan preventif
	Peran Perempuan, pemuda dan disabilitas	Penyediaan fasilitas pendukung bagi keluarga dan disabilitas
		Penguatan hak sipil, hukum, ekonomi bagi keluarga yang rentan
		Penmenuhan haka nak secara universal
		Penguatan kapasitas dan kemandirian pemuda pemudi
		Penyelenggaraan pengarustamaan gender
		Memperluas akses Pendidikan, pekerjaan dan partisipasi politik bagi disabilitas
	Prestasi Olahraga	Pembudayaan olahraga melalui kompetisi atau festival olahraga
		Pengembangan sekolah olahraga secara berjenjang
		Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional bagi atlet dan atlet disabilitas
		Mengembangkan jaminan kesejahteraan bagi mantan atlet
		Memperkuat pemusatan pelatihan nasional dengan dukungan tenaga yang bersertifikasi internasional
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri	Hilirisasi industri	Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru
		Penguatan industry padat karya berkelanjutan
		Pengembangan integrasi domestic dan global
		Optimalisasi insentif fiskal/non-fiskal
		Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
		Penguatan ekosistem rantai pasok yang melibatkan sektor UMKM
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Membangun desa dari desa	Penguatan Lembaga ekonomi desa
		Pemenuhan keteserdiaan infrastruktur desa
		Peningkatan kapsitas aparatur pemerintah desa
		Pengoptimalisasi penggunaan dana desa
		Pengembangan Kawasan transmigrasi desa
	Pemerataan ekonomi	Pembangan sepuluh wilayah metropolitan
		Pembangunan IKN
		Peningkatan terhadap akses hunian layak dan terjangkau
		Penumbuhan usaha UMKM dengan fasilitas akses pembiayaaan
		Penyediaan layanan perintis bagi daerah 3T
	Pemberantasan Kemiskinan	Pemanfaatan dan pengguanaan data reksosek
		Penyaluran Bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar
		reformasi perlindungan hari tua
		Akses yang setara terhadap ekonomi bagi kelompok rentan
		Pendekatan inklusi social bagi penyandang disabilitas dan lansia

Prioritas	Arah Kebijakan Nasional	Strategi Pembangunan Nasional 2025
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi	Mengatur system pendanaan dan pembiayaan politik
		Membangun system single identity number
		Menjamin penyelenggaraan PILKADA yang berintegritas dan berkualitas
		Penerapan kode etik demokrasi internal, system kaderisasi dan rekruitmen parpol
		Mendirikan pusat legislalasi nasional
		Meningkatkan kompetensi hakim dan apparat peradilan
		Memperkuat program edukasi anti korupsi
		Mewujudkan penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih
		Memperkuat budaya kerja ASN
		Mempermudah akses belajar ASN
		Memperkuat system manajemen kerja melalui reward dan punishement
		Pembanguan talent pool dan platform digital ASN yang berintegrasi
	Pemberantasan narkoba, judi dan penyelundupan	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat tentang Narkotika
		Meningkatkan program proteksi dini penyalahguaaan narkotikan bagi anak sekolah dan mahasiswa
		Pencegahan penyelundupan Narkotika
		Peningkatan kemampuan intelejen pemeberantasan dan peredaran gelap Narkotika
		Menutup akses situs judi online
		Mengkampanyekan bahaya judi
		Mmemperkuat deteksi dan pencegahan penyelundupan manusia dan barang ilegal
Memperkuat penyelarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat adil dan makmur	Masyarakat Adil, Makmur, Harmonis dan Toleransi Beragama	Mengedepankan semangat bhineka Tunggal ika
		Mengaktifkan Kembali kegiatan kolektif Masyarakat yang bersifat gotong royong
		Menghidupkan Kembali nilai kearifan local dalam Pendidikan dan pengajaran formal/informal
		Memperkuat moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan
		Revitalisasi layanan KUA
		Meningkatan peran tokoh agama dan Lembaga social agama
	Pelestarian Budaya	Meningkatkan anggaran penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah
		Membangun dan merevitalisasi sentra kebudayaan dan Gedung kesenian rakyat
		Invetarisasi dan dokumentasi seni budaya diseluruh Indonesia
		Memperluas diplomasi budaya dalam forum internasional
	Penanganan bencana	meningkatkan anggaran mitigasi dan penanganan bencana
		Memperkuat system deteksi bencana
		Mencegah penguasaan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab
		Mengembangkan riset dan inovasi teknologi penanggulangan bencana

Sumber: RKP 2025(Permen PPN/BAPPENAS No.2 Tahun 2024}

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 20252029 dan RKP Tahun 2025. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2025 yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing" dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata

5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan strategi pembangunan daerah yang konsisten dan berkesesuaian dengan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Perumusan strategi pembangunan daerah diharapkan menjadi arahan dan pedoman (*guideline)* dalam menetapkan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah uang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran RKPD Tahun 2025, telah dirumuskan 12 (Dua Belas) strategi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan,evaluasi dan pencapaian kinerja pemerintahan serta meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang mampu memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas;
2. Meningkatkan akses data, informasi dan inovasi serta kualitas pelayanaan publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi;
3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah yang berkeadilan;
4. Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja termasuk penyandang disabilitas di berbagai bidang pembangunan serta Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
5. Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
6. Meningkatkan iklim investasi dan usaha;
7. Meningkatkan pendapatan, kualitas sumber daya manusia serta pemerataan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dalam upaya mengurangi pengeluaran masyarakat miskin dan kantong-kantong kemiskinan;
8. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat termasuk pendidikan inklusi;
9. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat
10. Meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial;
11. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembanguan Sulawesi selatan tahun 2025, arah kebijakan dan strategi yang diambil oleh pemerintah provinsi adalah sebagai berikut

Tabel 4.7
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Peningkatan kompetensi dan kinerja ASN, Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan, pengawasan penyelengaraan pemerintahan	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan,evaluasi dan pencapaian kinerja pemerintahan serta meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang mampu memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas
Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur yang berkualitas dan merata	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Peningkatan keterjangkauan terhadap layanan infrastruktur yang memenuhi standar GESI (Gender Eqauality and Social Inclusion)	Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah yang berkeadilan
	Menurunnya angka kemiskinan	Peningkatan SDM Masyarakat miskin	Meningkatkan pendapatan, kualitas sumber daya manusia serta pemerataan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dalam upaya mengurangi pengeluaran masyarakat miskin dan kantong kantong'
		Mendorong Kerjasama dengan dunia usaha dan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin	Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarkat
		Pemberdayaan Masyarakat, akses usaha dan peningkatan kualitas layanan dasar	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak
Meningkatkan produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah masyarakat secara merata	Optimalnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas produksi dan produktifitas sektor ekstraktif dan prasarana pariwisata ekonomi kreatif	Meningkatkan akses data, informasi dan inovasi serta kualitas pelayanaan publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			efisien berbasis teknologi informasi
		Mendorong peningkatan investasi ke daerah yang belum berkembang dan meberi kemudahan investasi	
	Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas Penyerapan Tenaga Kerja	Peningkatan kualitas Angkatan kerja termasuk penyandang disabilitas	Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif
Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	Meningkatnya Kualitas dan penyerapan tenaga kerja		Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja termasuk penyandang disabilitas di berbagai bidang pembangiunan serta meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja
			Meningkatkan iklim investasi dan usaha
	Meningkatnya kualitas SDM yang kompetitif dan inklusif		Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat termasuk pendidikan inklusi
	Meningkatnya kualitas dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Peningkatan kualitas kelembagaan PUG dalam perencanaan penganggaran	Meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial
		Penyediaan layanan pemberdayaan Perempuan	
		Peningkatan partisipasi Perempuan dalam aktivitas ekonomi, social, politik termasuk kelompok rentan	
		Pemenuhan layanan perlindungan anak	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	Pemantapan pengelolaaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim
		Peningktan kualitas air, udara dan laut melalui pencegahan pencemaran	
		Penyediaan sarana prasarana mitigasi dan ancaman bencana	
		Pemantapan kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan implementasi pembangunan rendah karbon	

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Palopo Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah Kota Palopo 2025 adalah gambaran hal-hal atau aspek tentang sesuatu kondisi yang akan didahulukan, yang proses pemilihan dan perumusannya dilakukan dengan mempertimbangkan RPJP 2025-2045, RKP Nasional, provinsi, RPJPD Kota Palopo 2025-2045 dan isu strategis beserta permasalahan yang ada di daerah.

Berdasarkan pertimbangan dari dokumen perencanaan nasional, provinsi dan tingkat konsitensi kesusuaiannya beserta permasalahan yang ada, maka tema pembangunan daerah Kota Palopo tahun 2025 yaitu "**Peningkatan Ekonomi Daerah Berdaya Saing dan Berkelanjutan**" dengan prioritas pembangunan sebagai berikut,

Tabel. 4.8
Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2025

Prioritas Kota Palopo	Keterangan
Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan nilai tambah daerah (Prioritas 1)	Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah, membuka lapangan kerja, produktivitas tenaga kerja, proses hilirisasi, pengendalian inflasi, investasi dan mendukung tahapan RPD 2024-2026.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan tata kelola pemerintahan (Prioritas 2)	Meningkatkan kualitas SDM secara holistik untuk mendukung terciptanya tata kelola layanan birokrasi efektif dan efisien, inovatif, ketentraman ketertiban, aksesbilitas bagi difabel dan masyarakat berintelektual tinggi
Pemantapan Infrastruktur wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan penanganan Bencana (Prioritas 3)	Mendorong pemenuhan daya dukung infarstruktur yang berwawasan lingkungan dan tangguh bencana.

Sumber : Dokumen Perencanaan Daerah dan Kompilasi Permasalahan

Pelaksanaan prioritas I dalam perencanaan pembangunan tahun 2025 meliputi beberapa penyelesaian permasalahan dan peningkatan keterampilan masyarakat dengan isu-isu yang muncul sebagai berikut :

Kemiskinan merupakan isu serius yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kota Palopo. Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah Kota Palopo akan berupaya mengimplementasikan program-program pembangunan ekonomi yang inklusif, seperti pembangunan infrastruktur, wirausaha dan peningkatan akses ke pasar, dan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan investasi dalam sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan.

Pengangguran adalah isu lain yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kota Palopo. Untuk mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah Kota Palopo akan berupaya menciptakan lapangan kerja baru, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi dalam sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan, maupun melalui program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah Kota Palopo akan berusaha meningkatkan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan kerja masyarakat.

Peningkatan skil dan kompetensi masyarakat adalah kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Palopo. Pemerintah Kota Palopo akan meningkatkan akses masyarakat ke pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, pemerintah juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas, sehingga masyarakat dapat mengembangkan ide-ide baru dan inovatif.

Pemantapan Ekonomi menjadi titik sentral dalam rencana ini, dengan penekanan pada pemulihan dan penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM di Kota Palopo akan mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kapasitas mereka, akses terhadap pasar, dan inovasi produk. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta ekosistem yang lebih kokoh bagi para pelaku usaha lokal. Tak hanya itu, sektor Produktif, Kreatif, dan Potensial juga menjadi fokus perhatian. Pariwisata dan seni budaya menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah serta mempromosikan kekayaan budaya dan alam yang dimiliki oleh Kota Palopo, yang diharapkan dapat menjadi daya tarik dan mendatangkan angka kunjungan melalui serangkaian iven daerah pada tahun 2025.

Kemudian melalui pengembangan infrastruktur pariwisata dan promosi yang efektif, diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan serta memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi lokal. Selain itu, pemerintah Kota Palopo juga berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi circular. Konsep ini bertujuan untuk meminimalkan limbah dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi circular, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang ramah lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem lokal.

Optimalisasi digitalisasi pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi strategi penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Kota Palopo. Termasuk penataan kelembagaan dan regulasinya. Pemanfaatkan teknologi informasi, pengelolaan sumber-sumber PAD diharapkan dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan daerah.

Terakhir, investasi daerah diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. Melalui berbagai program pelatihan dan pembinaan, diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Kota Palopo. Pemerintah Kota Palopo berupaya untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Melalui kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh stakeholders di Kota Palopo.

Pelaksanaan prioritas II dalam perencanaan pembangunan tahun 2025 untuk mendukung peningkatan SDM dan tata kelola pemerintahan meliputi isu-isu sebagai berikut,

Pemantapan layanan merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas hidup warga Kota Palopo. Ini mencakup Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM): SPM adalah standar yang menetapkan kualitas layanan publik

yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dengan memantapkan SPM, Kota Palopo dapat memastikan bahwa layanan publik yang diberikan kepada warganya sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga meningkatkan kepuasan dan kualitas hidup warga. Selain SPM, Kota Palopo juga akan memantapkan layanan publik dan pemerintahan lainnya. Ini mencakup layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan infrastruktur publik lainnya. Dengan memantapkan layanan ini, Kota Palopo dapat meningkatkan kualitas hidup warganya dan memperkuat daya saing daerahnya.

Tata kelola pemerintahan adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Ini mencakup: Perbaikan dan Penataan Kapasitas dan Kemadirian Fiskal Daerah meliputi pendapatan, pendapatan asli dan penatakelolaan belanja daerah, Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Terutama penanganan dan penyelsaian utang belanja daerah, sebagai salah satu kebijakan belanja di tahun 2025

Kota Palopo akan bekerja untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Ini mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memfasilitasi akses informasi publik dan memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Peningkatan Partisipasi Warga: Kota Palopo akan mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Ini mencakup pembentukan forum-forum konsultasi dan dialog antara pemerintah dan warga untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi warga tercermin dalam kebijakan pemerintahan.

Reformasi birokrasi adalah langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Ini mencakup Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Yang akan mencakup penggunaan teknologi dan inovasi dalam proses kerja birokrasi, serta penataan kelembagaan birokrasi.

Peningkatan Daya Saing Kinerja Pemerintahan: Melalui reformasi birokrasi, Kota Palopo dapat meningkatkan daya saing kinerja pemerintahan, baik dalam hal inovasi maupun dalam pelayanan publik. Ini akan memungkinkan Kota Palopo untuk bersaing dengan daerah lain dalam hal kualitas hidup dan daya saing ekonomi. Dengan fokus pada pemantapan layanan, tata kelola pemerintahan, dan reformasi birokrasi, Kota Palopo dapat mencapai visi dan misi pembangunan daerahnya untuk tahun 2025. Ini akan memastikan bahwa Kota Palopo dapat terus berkembang dan memberikan layanan yang berkualitas kepada warganya, serta meningkatkan daya saing daerah dalam hal ekonomi dan sosial.

Pendidikan dan kesehatan adalah dua aspek penting yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Kota Palopo berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakatnya. Pemerintah dan pemangku kepentingan akan berupaya bekerja sama untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, termasuk fasilitas pendidikan, tenaga pengajar, dan program kesehatan. Selain itu, pembangunan pendidikan kesehatan yang baik juga akan diarahkan membantu mengurangi prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Stunting adalah isu kesehatan yang serius yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Kota Palopo. Untuk mengatasi stunting, pemerintah harus meningkatkan akses masyarakat ke layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk program imunisasi dan nutrisi. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan pendidikan kesehatan bagi ibu dan anak, sehingga mereka dapat memahami pentingnya nutrisi dan imunisasi dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pelaksanaan prioritas III dalam perencanaan pembangunan tahun 2025 untuk mendukung infrastruktur, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan terhadap bencana meliputi isu-isu sebagai berikut :

Pemantapan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah bertujuan untuk memastikan bahwa semua bagian dari Kota Palopo dapat terhubung dengan baik. Ini termasuk pengembangan jaringan jalan yang efisien, peningkatan transportasi dan komunikasi publik, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya.

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rekreasi menjadi fokus dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan fasilitas sekolah, rumah sakit, taman, dan fasilitas umum lainnya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara merata di seluruh Kota Palopo.

Penataan estetika kota termasuk dalam prioritas pembangunan ini untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan menarik bagi masyarakat serta pengunjung. Ini mencakup penataan ruang terbuka hijau, pelestarian lingkungan, serta pengaturan tata ruang yang estetis dan fungsional termasuk pengelolaan sampah dan kebersihan wilayah Kota Palopo.

Pengembangan ruang publik yang aktif dan inklusif menjadi aspek penting dalam upaya memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Pembangunan taman, ruang terbuka, fasilitas olahraga, dan tempat pertemuan publik lainnya diharapkan dapat mendorong interaksi sosial, kegiatan komunitas, serta meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Aspek-aspek penting dalam prioritas ini meliputi keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, keberlanjutan juga menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan infrastruktur, dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan jangka panjang dari pembangunan tersebut. Dengan mengutamakan pemantapan infrastruktur kota dan pemerataan pembangunan wilayah, Kota Palopo berupaya untuk menjadi kota yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warganya.

Menghadapi perubahan iklim menjadi tantangan serius yang membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat. Langkah-langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harus diterapkan secara

terintegrasi dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk dalam perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Pengelolaan sumber daya air yang efisien dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat, pertanian, dan usaha lain di Kota Palopo. Pembangunan infrastruktur seperti penanganan banjir, drainase dan semacamnya juga berupaya diprioritaskan untuk meningkatkan tata kelola air serta akses air bersih masyarakat Kota Palopo.

Mitigasi bencana (Banjir, Longsor, dan Kebakaran) Kota Palopo, seperti daerah lainnya, rentan terhadap bencana alam seperti banjir, longsor, dan kebakaran, terutama pada kawasan padat pemukiman. Oleh karena itu, mitigasi bencana menjadi aspek krusial dalam rencana pembangunan, termasuk dalam pembangunan infrastruktur tahan bencana, perencanaan tata ruang yang memperhatikan zona-zona risiko, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Pemantapan pengelolaan lingkungan hidup juga mencakup optimalisasi fungsi tata ruang, termasuk penataan kawasan konservasi, penghijauan kota, serta penanganan sampah, limbah dan polusi. Selain itu, keterlibatan dan keswadayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan juga menjadi kunci keberhasilan dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam melaksanakan prioritas pembangunan tahun 2025 dibutuhkan kerangka pendanaan, berdasarkan usulan pagu indikatif setiap perangkat daerah. Total pagu indikatif untuk tahun 2025 sebesar **Rp.933.296.155.378** berikut adalah tabel yang menggambarkan jumlah program, perangkat daerah dan pagu alokasi untuk melaksanakan prioritas pembangunan Kota Palopo tahun 2025.

Tabel 4.9
Hubungan, Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Kota Palopo
Tahun 2025 terhadap Sasaran dan Tujuan dalam RPD 2024-2026

Prioritas Pembangunan	Tujuan (T) dan Sasaran RPD (S)		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Kinerja 2025
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan tata kelola pemerintahan (Prioritas 2)	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas (T1)	1	Indeks Reformasi Birokrasi – I.S1.1	Poin	80
	Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan (S1)	2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Poin	87.98
		3	Indeks SAKIP – I.S1.2	Poin	80
Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan nilai tambah daerah (Prioritas 1)	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat & Perekonomian Daerah yang Berkualitas (T2)	4	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta/Kapita/Thn	62
		5	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,38
	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha (S2)	6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) – I.S2.1	Persen	8
	Meningkatnya Kondisi Ekonomi Daerah yang Berkualitas (S3)	7	Angka Pertumbuhan Ekonomi - I.S3.2	Persen	6,05
		8	Gini Rasio - I.S3.3	Koefisien	0,334
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan tata kelola pemerintahan (Prioritas 2)	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (S4)	9	Indeks Pembangunan Manusia – I.S4.1	Poin	78,96
		10	Indeks Pembangunan Gender – I.S4.2	Poin	97,37
Pemantapan Infrastruktur wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan penanganan Bencana (Prioritas 3)	Terwujudnya Lingkungan Layak Huni dan Berkelanjutan (T3)	11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	60
	Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Kualitas Lingkungan Perkotaaan (S5)	12	Indeks Resiko Bencana – I.S5-1	Po Predikat	190
		13	Luas Wilayah yang Tergenang/Terdampak Banjir	Ha	7
		14	Persentase Luas Kawasan Kumuh dari Total Luas Wilayah Kota – I.S5-3	Persen	0.9

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pada tahun 2025, ada 3 tujuan dan 5 sasaran pembangunan daerah Kota Palopo tahun 2025 dengan 14 Indikator Kinerja Utama. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut strategi dan arah kebijakan pemerintah Kota Palopo adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan Kota Palopo Tahun 2025

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Tahun 2025
Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan (S1)	Mengembangkan Kinerja Birokrasi, Kebijakan dan Standar Tata Kelola Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien (Stra 1)	Peningkatan Kapabilitas ASN, Kapasitas Kelembagaan/Organisasi, Sarana Prasarana, Standar Tata Kelola Layanan serta Jenis dan Jumlah Inovasi Layanan (AK.24.2)
Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha (S2)	Mengembangkan Kapabilitas Tenaga Kerja, Kegiatan Ekonomi Produktif, Kemudahan Berusaha, Kesetaraan, Keberdayaan, seiring dengan Pengendalian Demografi Daerah (Stra 2)	Peningkatan Pembinaan Angkatan Kerja, Cakupan Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perluasan Akses Terhadap Layanan dan Infrastruktur Dasar Layanan (AK.24.4)
Meningkatnya Kondisi Ekonomi Daerah yang Berkualitas (S3)	Mengembangkan Pusat-Pusat Ekonomi Daerah, Sektor Produktif Potensial serta Investasi dalam Iklim Kondusif (Stra 3)	Peningkatan Sektor Produktif dan Potensial Daerah, Investasi Berbasis Ekosistem, dan Dukungan Infrastruktur, Teknologi, serta Ketertiban Daerah Layanan (AK.24.3)
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (S4)	Mengembangkan Kinerja Standar Pelayanan, Kapasitas dan Ekosistem Pendidikan, Kesehatan, Prestasi dan Literasi Masyarakat (Stra 4)	Peningkatan Akses, Cakupan, Mutu Serta Daya Saing Struktur (SDM), Infrastruktur, Dan Suprastruktur, Tata Kelola Serta Kinerja Layanan (AK.24.1)
Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Kualitas Lingkungan Perkotaaan (S5)	Mengembangkan Upaya Mitigasi, Adaptasi, responsif perubahan Iklim, secara Kolaboratif Partisipatif Dalam Pengelolaan Pemanfaatan Ruang (Stra 5)	Peningkatan Dukungan Infrastruktur, Upaya Mitigasi, Layanan Keselamatan dan Perlindungan, serta Partisipasi Kolaborasi Dalam Pengelolaan Pemanfaatan Ruang dan Iklim Layanan (AK.24.5)

Dukungan program perangkat daerah terhadap sasaran pembangunan Kota Palopo tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11
Dukungan Program dan Alokasi Pagu Terhadap Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025

Sasaran & Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Prioritas Perangkat Daerah	Fungsi Perangkat Daerah	Pagu Alokasi
Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan (S1)			**182.798.815.824**
Indeks Reformasi Birokrasi	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**	**Indeks SAKIP**	
	Program Kepegawaian Daerah	Fungsi Kepegawaian	1,193,475,500
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Fungsi Penelitian	734,949,000
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Fungsi Perencanaan	718,799,250
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi Perencanaan	843,084,750
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Fungsi Keuangan	13,835,105,500
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Fungsi Setwan	2,593,732,238
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fungsi Setda	26,055,870,020

Sasaran & Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Prioritas Perangkat Daerah	Fungsi Perangkat Daerah	Pagu Alokasi
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Fungsi Keuangan	2,607,644,000
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Fungsi Setda	1,064,656,170
	Program Pendaftaran Penduduk	Fungsi Kependudukan & Capil	65,172,250
	Program Pencatatan Sipil	Fungsi Kependudukan & Capil	32,700.000
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fungsi Kependudukan & Capil	95,275,000
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Fungsi Kominfo	1,471,830,650
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Fungsi Kecamatan	4,936,609,338
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Fungsi Kecamatam	100,281,670
	Program Penataan Bangunan Gedung	Fungsi PU	118,715,985,532
	Program Penatagunaan Tanah	Fungsi Pertanahan	4,300,000
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Fungsi Pertanahan	7,500,000.000
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Fungsi Statistik	75,658,000
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Fungsi Persandian	23,868,606
	Program Pengelolaan Arsip	Fungsi Arsip	36,039,850
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Fungsi Arsip	29,710,000
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Fungsi Sosial	44.847.000
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Fungsi Perindustrian	10,000,000
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Fungsi Perindustrian	9.221.500
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha (S2)			**22.591.138.115**
PDRB per Kapita (ADHB)	**Persentase Penduduk Miskin**	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Fungsi Koperasi	209,169,000
	Program Pengembangan UMKM	Fungsi Koperasi	209,942,000
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Fungsi Koperasi	7,925,000
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Fungsi Koperasi	7,925,000
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Fungsi Tenaga Kerja	405,000,000
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Fungsi Perikanan	728,485,100
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Fungsi Perikanan	130,502,500
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Fungsi Perikanan	205,047,825
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Fungsi Pertanian	4,711,472,260
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Fungsi Pertanian	69,000,000
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Fungsi Pertanian	4,711,472,260
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Fungsi Pertanian	236,063,750

Sasaran & Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Prioritas Perangkat Daerah	Fungsi Perangkat Daerah	Pagu Alokasi
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Fungsi Transmigrasi	88,601,000
	Program Pengembangan Permukiman	Fungsi Perumahan	296,101,450
	Program Pemberdayaan Sosial	Fungsi Sosial	115,098,500
	Program Rehabilitasi Sosial	Fungsi Sosial	145,547,000
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Fungsi Sosial	765,852,000
	Program Kawasan Permukiman	Fungsi Perumahan	451,836,250
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Fungsi Pengendalian Penduduk & KB	7,050,157,750
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Fungsi Ketahanan Pangan	36,250,000
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Fungsi Ketahanan Pangan	38,818,400
	Program Pengendalian Penduduk	Fungsi Pengendalian Penduduk & KB	141,156,000
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Fungsi Pengendalian Penduduk & KB	1,285,962,000
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Fungsi Perdagangan	543,753,070
Meningkatnya Kondisi Ekonomi Daerah yang Berkualitas (S3)			**146.420.459.128**
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	**Angka Pertumbuhan Ekonomi**	**Gini Rasio**	
	Program Promosi Penanaman Modal	Fungsi Penanaman Modal	137.880.000
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Fungsi Penanaman Modal	51,105.000
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Fungsi Penanaman Modal	422.460.000
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Fungsi Penanaman Modal	427.800.000
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Fungsi Ke-PU-an	22,210,500,000
	Program Penyelenggaraan Jalan	Fungsi Ke-PU-an	77,953,181,000
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Fungsi Pendapatan	3,577,885,200
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Fungsi Keuangan	13,835,105,500
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Fungsi Perhubungan	17,744,355,840
	Program Pengelolaan Pelayaran	Fungsi Perhubungan	81,013.500
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Fungsi Pertanian	4,711,472,260
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Fungsi Setda	
	Program Aplikasi Informatika	Fungsi Kominfo	984,675,000
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Fungsi Perdagangan	664,277,061
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Fungsi Perdagangan	45,543,800
	Program Pengembangan Perumahan	Fungsi Perumahan	296,101,450
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Fungsi Pariwisata	577,048,000

Sasaran & Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Prioritas Perangkat Daerah	Fungsi Perangkat Daerah	Pagu Alokasi
	Program Pemasaran Pariwisata	Fungsi Pariwisata	460,269,000
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Fungsi Kebudayaan	104,999,777
	Program Pengembangan Kebudayaan	Fungsi Kebudayaan	289,606,750
	Program pengembangan Kesenian Tradisional	Fungsi Kebudayaan	
	Program Pembinaan Sejarah	Fungsi Kebudayaan	185,000,000
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Fungsi Kesatuan Bangsa	659,800,000
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Fungsi Kesatuan Bangsa	921,267,490
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Fungsi Kesatuan Bangsa	68,197,500
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Fungsi Kesatuan Bangsa	954,340,000
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Fungsi Kesatuan Bangsa	63,550,000
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Fungsi Pertanahan	32,270,000
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (S4)			
Indeks Pembangunan Manusia		**Indeks Pembangunan Gender**	**125.808.373.995**
	Program Pengelolaan Pendidikan	Fungsi Pendidikan	40,270,070,500
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Fungsi Kesehatan	82,310,472,060
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Fungsi Kesehatan	338,897,250
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Fungsi Kesehatan	456,867,000
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Fungsi Pemuda	1,549,140,000
	Program Pembinaan Perpustakaan	Fungsi Perpustakaan	63,890,000
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Fungsi Pemuda	170,730,810
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Fungsi Pemuda	
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Fungsi PP & PA	24,850,000
	Program Perlindungan Perempuan	Fungsi PP & PA	70,225,000
	Program Perlindungan Khusus Anak	Fungsi PP & PA	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Disnaker	115,962,025
	Program Hubungan Industrial	Disnaker	21,857,350
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dis PU PR	
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Fungsi PP & PA	409,612,000
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Fungsi PP & PA	5,800,000
Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Kualitas Lingkungan Perkotaaan (S5)			
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**Indeks Resiko Bencana**	**Luas Wilayah yang Terdampak Banjir**	
Persentase Luas Kawasan Kumuh dari Total Luas Wilayah Kota			
			32.941.379.534

Sasaran & Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Prioritas Perangkat Daerah	Fungsi Perangkat Daerah	Pagu Alokasi
	Program Penanggulangan Bencana	Fungsi Penanggulangan Bencana	914,866,000
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Fungsi Penyelamatan dan Perlindungan Masyarakat	1,860,143,000
	Program Penanganan Bencana	Fungsi Penanggulangan Bencana	197,666,000
	Program Pengelolaan Persampahan	Fungsi Lingkungan Hidup	14,619,684,
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Fungsi Pekerjaan Umum	300,000,000
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Fungsi Pekerjaan Umum	22,210,500,000
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Fungsi Pekerjaan Umum	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Fungsi Pekerjaan Umum	200,000,000
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Fungsi Pekerjaan Umum	1,175,000,000
	Program Pengembangan Permukiman	Fungsi Perumahan	296,101,450
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Fungsi Pekerjaan Umum	450,000,000
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Fungsi Perumahan	398,647,000
	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Fungsi Perumahan	14,400,000
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Fungsi Lingkungan Hidup	225,637,500
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Fungsi Lingkungan Hidup	413,152,900
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Fungsi Lingkungan Hidup	3,994,199,200
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Fungsi Lingkungan Hidup	177,858,300
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Fungsi Lingkungan Hidup	15,050,000
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Fungsi Lingkungan Hidup	28,863,500
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Fungsi Lingkungan Hidup	26,000,000
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Fungsi Lingkungan Hidup	28,675,000

4.3. Keselarasan Pembangunan Nasional, Provinsi Sulsel dan Kota Palopo

a. Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota Palopo

Keselarasan prioritas antara tingkat nasional, provinsi, dan Kota Palopo merupakan fondasi penting untuk memastikan sinergi dalam mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Di tingkat nasional, prioritas diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, ketahanan ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, di tingkat provinsi, fokus terletak pada penguatan ketahanan ekonomi daerah, pelestarian lingkungan, dan peningkatan pelayanan publik.

Kota Palopo berperan dalam mengintegrasikan prioritas ini dengan memperhatikan kebutuhan lokal seperti peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal, serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keselarasan ini akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan serta memaksimalkan manfaat bagi seluruh masyarakat yang disampaikaikan sebagai berikut :

Tabel 4.12
Keterkaitan Prioritas Nasional, Sulsel dan Kota Palopo Tahun 2025

PRIORITAS		
NASIONAL	**PROVINSI**	**KOTA PALOPO**
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan (PN.7)	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel dan inovatif (PP.1)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan tata kelola pemerintahan (PK.2)
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM (PN.1)		
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan (PN.6)	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata (PP.2)	Pemantapan Infrastruktur wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan penanganan Bencana (PK.3)
Melanjutkan Pembangunan infrstruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan ndustry kreatif serta ndustry, di sentra produksi melalui koperasi mengembangkan agromaritim (PN.3)	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah (PP.3)	Peningkatan Ekonomi, produktifitas dan nilai tambah daerah (PK.1)
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri (PN.5)		
Memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi olahraga, Kesetaraan gender, Penguatan peran Perempuan, Pemuda, dan Disabilitas Kesetaraan gender, Penguatan peran Perempuan, Pemuda, dan Disabilitas Memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi olahraga, (PN.4)	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata (PP.4)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan tata kelola pemerintahan (PK.2)
Memantapkan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru (PN.2)	Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan (PP.5)	Pemantapan Infrastruktur wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana (PK.3)
Memperkuat penyelarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat adil dan makmur (PN.8)		

b. Keselarasan Higlight Indikasi Intervensi dengan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Kota Palopo

Keselarasan antara highlight indikasi intervensi dan program/kegiatan prioritas pembangunan Kota Palopo menjadi krusial untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Highlight indikasi intervensi memberikan arah yang lebih spesifik mengenai kebutuhan strategis di Kota Palopo, seperti peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta penguatan daya saing ekonomi lokal. Dengan menyelaraskan program dan kegiatan prioritas terhadap indikasi intervensi ini, Pemkot Palopo dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal, memperkuat dampak pembangunan, dan merespons langsung kebutuhan serta tantangan masyarakat. Keselarasan ini juga mendukung pencapaian target pembangunan yang komprehensif, berdaya guna, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Palopo. Berikut adalah hubungan prioritas dan highligt intervensi dan program prioritas Kota Palopo Tahun 2025 :

Tabel 4.13
Keterkaitan Prioritas dan Highligt
Intervensi dan Program Prioritas Kota Palopo Tahun 2025 :

Prioritas Nasional	Highlight Intervensi Kota Palopo	Prioritas Pembangunan Palopo	Program Prioritas Perangkat Daerah
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM	Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul berekspresi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan tata kelola pemerintahan (PK.2)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Prioritas Nasional	Highlight Intervensi Kota Palopo	Prioritas Pembangunan Palopo	Program Prioritas Perangkat Daerah
Memantapkan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Kerjasama dengan Pemrpov atas penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial	Pemantapan Infrastruktur wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana (PK.3)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
	Fasilitasi business match marking startup digital		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Program Pengembangan UMKM
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
	Fasilitasi digital tecnopreneur		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
	Pemanfaatn teknologi digital di sektor pertanian		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
			Program penyuluhan pertanian
Melanjutkan Pembangunan infrstruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri, di sentra produksi melalui koperasi	Pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan di Pontap Kota Palopo	Peningkatan Ekonomi, produktifitas dan nilai tambah daerah (PK.1)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Peningkatan cakupan layanan infrastruktur konektivitas regional dan penguatan konektivitas digital		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Pengembangan jejaring desa wisata di Provinsi Sulawesi Selatan		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi		Program Pelayanan Penanaman Modal
Memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi olahraga, Kesetaraan gender, Penguatan peran Perempuan, Pemuda, dan Disabilitas	Kerjasama pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan tata kelola pemerintahan (PK.2)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Pengendalian penyakit menular lainnya malaria		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana olahraga		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	Pembangunan kualitas keluarga		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
			Program Pemberdayaan Sosial

Prioritas Nasional	Highlight Intervensi Kota Palopo	Prioritas Pembangunan Palopo	Program Prioritas Perangkat Daerah
	Penurunan ketimpangan gender melalui peningkatan pendidikan perempuan, pencegahan perkawinana anak dan peningkata partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenaga kerjaan		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul thfal/bustanul athfal)		Program Pengelolaan Pendidikan
	Fasilitasi liteerasi digital		
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri	Hilirisasi kakao	Peningkatan Ekonomi, produktifitas dan nilai tambah daerah (PK.1)	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
	Hiliraisiasi rumput laut		Program penyuluhan pertanian
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik		
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	-	Pemantapan Infrastruktur wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan penanganan Bencana (PK.3)	Program Pengelolaan Persampahan
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
			Program Penanggulangan Bencana
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan tata kelola pemerintahan (PK.2)	Program Kepegawaian Daerah
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Program Pendaftaran Penduduk
			Program Pencatatan Sipil
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional		Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Prioritas Nasional	Highlight Intervensi Kota Palopo	Prioritas Pembangunan Palopo	Program Prioritas Perangkat Daerah
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Memperkuat penyelarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat adil dan makmur	Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan	Pemantapan Infrastruktur wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana (PK.3)	Program Penanggulangan Bencana
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
			Program Penanggulangan Bencana
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

c. Dukungan keselarasan Program Prioritas Kota Palopo terhadap Prioritas Provinsi

Pemerintah Kota Palopo juga akan mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan Sulsel 2025 dengan mengalokasikan sebanyak **131** program senilai **Rp. 933.296.155.378,-**. Prioritas provinsi kesatu (PP.1) **Rp.174.597.260.079 (19%)**, Prioritas provinsi kedua (PP.2) **Rp.95.289.347.059 (10.21%)**, Prioritas provinsi ketiga (PP.3) **Rp.5.020.840.300 (0.54%)**, Prioritas keempat (PP.4) **Rp.593.336.110.280 (63.57%)** dan kelima (PP.5) **Rp. 65.052.597.660 (6.97%)**. Secara lengkap berikut tabel program dan urusan perangkat daerah Kota Palopo yang mendukung lima prioritas pembangunan Sulsel Tahun 2025, yang selengkapnya disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.14
Program dan Perangkat Daerah Kota Palopo
yang Mendukung Prioritas Pembangunan Sulsel Tahun 2025

	Prioritas Sulsel	Program	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	%
1	**Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif**			***174.597.260.079***	***19%***
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	DINAS DAMKAR KOTA PALOPO	*1.430.100.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS DAMKAR KOTA PALOPO	*3.771.453.000*	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS DUKCAPIL KOTA PALOPO	*64.575.000*	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS DUKCAPIL KOTA PALOPO	*32.395.000*	

	Prioritas Sulsel	Program	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	%
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS DUKCAPIL KOTA PALOPO	*90.000.000*	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DINAS DUKCAPIL KOTA PALOPO	*9.980.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS DUKCAPIL KOTA PALOPO	*3.539.129.000*	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMINFO KOTA PALOPO	*1.552.761.995*	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMINFO KOTA PALOPO	*1.912.656.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KOMINFO KOTA PALOPO	*2.378.514.005*	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO	*59.584.700*	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO	*23.525.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO	*2.547.197.300*	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO	*32.938.200*	
			DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO	*25.968.300*	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO	*7.809.900*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO	*2.325.959.600*	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO	*9.762.769.199*	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO	*1.363.733.190*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO	*29.925.644.611*	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO	*2.083.198.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO	*1.066.189.000*	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA KOTA PALOPO	*600.000.000*	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA KOTA PALOPO	*530.000.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAPPEDA KOTA PALOPO	*4.332.855.000*	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD KOTA PALOPO	*19.014.730.000*	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD KOTA PALOPO	*3.538.650.000*	

	Prioritas Sulsel	Program	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKAD KOTA PALOPO	*8.648.243.000*	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA KOTA PALOPO	*3.017.966.200*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAPENDA KOTA PALOPO	*8.391.296.800*	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BALITBANG KOTA PALOPO	*150.000.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BALITBANGDA KOTA PALOPO	*2.457.192.000*	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN WARA	*606.100.000*	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN WARA	*609.050.000*	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN WARA	*1.222.800.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN WARA	*5.856.875.000*	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN WARA UTARA	*609.600.000*	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN WARA UTARA	*622.900.000*	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN WARA UTARA	*835.200.000*	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN WARA TIMUR	*730.000.000*	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN WARA TIMUR	*701.622.288*	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN WARA TIMUR	*1.377.600.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN WARA TIMUR	*7.050.420.000*	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN WARA BARAT	*21.200.000*	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN WARA BARAT	*522.000.000*	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN WARA BARAT	*556.100.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN WARA BARAT	*3.851.938.000*	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN WARA SELATAN	*400.000.000*	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN WARA SELATAN	*403.710.000*	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN WARA SELATAN	*643.200.000*	

	Prioritas Sulsel	Program	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN WARA SELATAN	*4.367.494.000*	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN BARA	*1.750.000*	
			KECAMATAN BARA	*500.000.000*	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN BARA	*505.520.000*	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN BARA	*1.112.625.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN BARA	*5.611.241.000*	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN MUNGKAJANG	*403.600.000*	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN MUNGKAJANG	*407.100.000*	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN MUNGKAJANG	*487.200.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN MUNGKAJANG	*187.482.000*	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN SENDANA	*404.800.000*	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN SENDANA	*404.787.500*	
			KECAMATAN SENDANA	*404.787.500*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN SENDANA	*4.009.217.500*	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN TELLUWANUA	*700.000.000*	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN TELLUWANUA	*712.500.000*	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN TELLUWANUA	*795.600.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN TELLUWANUA	*8.190.000*	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATPOL PP KOTA PALOPO	*2.053.600.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SATPOL PP KOTA PALOPO	*4.853.534.000*	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BAKESBANGPOL KOTA PALOPO	*610.767.000*	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BAKESBANGPOL KOTA PALOPO	*919.215.990*	

	Prioritas Sulsel	Program	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BAKESBANGPOL KOTA PALOPO	*64.665.000*	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	BAKESBANGPOL KOTA PALOPO	*34.335.000*	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BAKESBANGPOL KOTA PALOPO	*955.800.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAKESBANGPOL KOTA PALOPO	*2.774.119.301*	
2	**Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata**			***95.289.347.059***	***10,21%***
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PUPR KOTA PALOPO	*786.000.000*	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PUPR KOTA PALOPO	*300.000.000*	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DINAS PUPR KOTA PALOPO	*300.000.000*	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PUPR KOTA PALOPO	*5.188.984.000*	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PUPR KOTA PALOPO	*400.000.000*	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	DINAS PUPR KOTA PALOPO	*200.000.000*	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DINAS PUPR KOTA PALOPO	*400.000.000*	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DINAS PUPR KOTA PALOPO	*200.000.000*	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PUPR KOTA PALOPO	*37.999.202.800*	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DINAS PUPR KOTA PALOPO	*62.000.000*	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PUPR KOTA PALOPO	*2.480.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PUPR KOTA PALOPO	*8.997.199.000*	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERKIM KOTA PALOPO	*91.959.500*	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERKIM KOTA PALOPO	*14.302.340.649*	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERKIM KOTA PALOPO	*42.909.400*	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERKIM KOTA PALOPO	*4.749.800*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERKIM KOTA PALOPO	*3.280.979.410*	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO	*233.000*	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO	*507.014.500*	

	Prioritas Sulsel	Program	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	%
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO	*31.967.000*	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO	*31.068.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO	*2.406.848.500*	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO	*27.808.000*	
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO	*3.000.000.000*	
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO	*640.000*	
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO	*570.000*	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO	*510.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO	*2.532.998.000*	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DINAS KOPERASI, UKM KOTA PALOPO	*4.450.000*	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	DINAS KOPERASI, UKM KOTA PALOPO	*4.700.000*	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINAS KOPERASI, UKM KOTA PALOPO	*225.000*	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DINAS KOPERASI, UKM KOTA PALOPO	*4.450.000*	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS KOPERASI, UKM KOTA PALOPO	*69.245.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KOPERASI, UKM KOTA PALOPO	*2.553.887.000*	
			DINAS KOPERASI, UKM KOTA PALOPO	*2.529.247.000*	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN EKRAF KOTA PALOPO	*93.820.000*	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN EKRAF KOTA PALOPO	*97.310.000*	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS PARIWISATA DAN EKRAF KOTA PALOPO	*70.000.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PARIWISATA DAN EKRAF KOTA PALOPO	*3.337.508.000*	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO	*620.615.000*	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO	*229.264.000*	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO	*45.105.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO	*4.531.059.500*	
3	**Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah**			***5.020.840.300***	**0,54%**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO	*89.912.300*	

	Prioritas Sulsel	Program	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	%
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO	*1.220.000*	
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO	*68.127.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO	*2.675.991.000*	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO	*21.781.000*	
			DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO	*21.781.000*	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO	*51.105.000*	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO	*5.050.000*	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO	*6.520.000*	
			DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO	*6.520.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO	*2.064.433.000*	
			DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO	*8.400.000*	
4	**Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata**			***593.336.110.280***	**63,57%**
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO	*37.798.582.300*	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO	*16.205.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO	*213.733.808.500*	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO	*99.385.635.400*	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO	*31.431.600*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO	*83.511.246.800*	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD SAWERIGADING KOTA PALOPO	*87.827.520.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD SAWERIGADING KOTA PALOPO	*32.456.149.000*	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO	*564.288.500*	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO	*840.000*	
			DINAS SOSIAL KOTA PALOPO	*139.500.000*	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO	*37.520.000*	

	Prioritas Sulsel	Program	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO	*162.348.530*	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS PPPA KOTA PALOPO	*185.925.492*	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS PPPA KOTA PALOPO	*1.796.305.525*	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINAS PPPA KOTA PALOPO	*49.550.000*	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DINAS PPPA KOTA PALOPO	*3.747.800*	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINAS PPPA KOTA PALOPO	*22.126.350*	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS PPPA KOTA PALOPO	*277.530.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PPPA KOTA PALOPO	*2.779.092.383*	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS DALDUK & KB KOTA PALOPO	*114.235.000*	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS DALDUK & KB KOTA PALOPO	*5.395.191.000*	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS DALDUK & KB KOTA PALOPO	*164.020.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS DALDUK & KB KOTA PALOPO	*3.723.522.000*	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS PORA KOTA PALOPO	*199.999.900*	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS PORA KOTA PALOPO	*911.840.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PORA KOTA PALOPO	*3.383.999.200*	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO	*10.754.376.000*	
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO	*2.000.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO	*2.657.597.000*	
			DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO	*80.611.000*	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM KOTA PALOPO	*520.395.000*	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM KOTA PALOPO	*36.364.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKPSDM KOTA PALOPO	*4.612.607.000*	
5	**Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan**			***65.052.597.660***	**6,97%**
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH KOTA PALOPO	*26.700.000*	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH KOTA PALOPO	*122.415.600*	

	Prioritas Sulsel	Program	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	%
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLH KOTA PALOPO	*4.181.957.300*	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3	DLH KOTA PALOPO	*25.050.000*	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DLH KOTA PALOPO	*35.350.100*	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLH KOTA PALOPO	*86.049.500*	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLH KOTA PALOPO	*28.328.000*	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH KOTA PALOPO	*10.400.200*	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH KOTA PALOPO	*14.843.644.620*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DLH KOTA PALOPO	*7.942.143.340*	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO	*26.000.000*	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO	*30.000.000*	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO	*15.600.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO	*2.373.875.000*	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD KOTA PALOPO	*716.200.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPBD KOTA PALOPO	*2.671.434.000*	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS KETAPANG KOTA PALOPO	*35.705.700*	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DINAS KETAPANG KOTA PALOPO	*16.500.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KETAPANG KOTA PALOPO	*2.316.409.300*	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO	*663.498.000*	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO	*85.800.000*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO	*7.586.889.000*	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO	*24.168.000*	

	Prioritas Sulsel	Program	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	%
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO	*45.035.000*	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO	*43.892.900*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO	*4.753.584.100*	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO	*1.099.390.000*	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO	*30.100.000*	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO	*89.400.000*	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO	*124.941.700*	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO	*14.927.930.300*	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO	*46.075.000*	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO	*28.131.000*	
	TOTAL			**933.296.155.378**	**100,00%**

Terhadap Prioritas Nasional

Pemerintah Kota Palopo juga akan mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional 2025 sebagai awal dari tahapan pelaksanaan RKP 2025 sebanyak **198** program senilai **Rp. 933.296.155.378,-** Prioritas nasional satu **(PN.1) Rp.12.266.036.291,- (1.31%)**, Prioritas dua (**PN.2**) **Rp.35.305.084.000 (3.78%)**, Prioritas tiga (**PN.3**) **Rp.95.289.347.059 (10.21%)**, Prioritas empat (**PN.4**) **Rp. 593.336.110.280 (63.57%)**, Prioritas lima (**PN.5**) **Rp.2.185.590.000 (0.23%)**, Prioritas Enam (**PN.6**) **Rp.162.331.223.788 (17.39%)**, Prioritas tujuh (**PN.7**) **Rp.29.747.513.660 (3.19%)**. Secara lengkap berikut tabel urusan perangkat Daerah Kota Palopo yang mendukung delapan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025

Tabel 4.15
Program dan Perangkat Daerah Kota Palopo
yang Mendukung delapan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Prioritas Nasional	Program	OPD Pelaksana	Jumlah	
			(Rp)	%
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)			**12.266.036.291**	**1,31%**
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATPOL PP KOTA PALOPO	2.053.600.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SATPOL PP KOTA PALOPO	4.853.534.000	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BAKESBANGPOL KOTA PALOPO	610.767.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BAKESBANGPOL KOTA PALOPO	919.215.990	

Prioritas Nasional	Program	OPD Pelaksana	Jumlah	
			(Rp)	%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BAKESBANGPOL KOTA PALOPO	64.665.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	BAKESBANGPOL KOTA PALOPO	34.335.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BAKESBANGPOL KOTA PALOPO	955.800.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAKESBANGPOL KOTA PALOPO	2.774.119.301	
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			**35.305.084.000**	**3,78%**
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD KOTA PALOPO	716.200.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPBD KOTA PALOPO	2.671.434.000	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS KETAPANG KOTA PALOPO	35.705.700	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DINAS KETAPANG KOTA PALOPO	16.500.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KETAPANG KOTA PALOPO	2.316.409.300	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO	663.498.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO	85.800.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO	7.586.889.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO	24.168.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO	45.035.000	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO	43.892.900	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO	4.753.584.100	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO	1.099.390.000	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO	30.100.000	

Prioritas Nasional	Program	OPD Pelaksana	Jumlah	
			(Rp)	%
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO	89.400.000	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO	124.941.700	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO	14.927.930.300	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO	46.075.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO	28.131.000	
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi			**95.289.347.059**	**10,21%**
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PUPR KOTA PALOPO	786.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PUPR KOTA PALOPO	300.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DINAS PUPR KOTA PALOPO	300.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PUPR KOTA PALOPO	5.188.984.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PUPR KOTA PALOPO	400.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	DINAS PUPR KOTA PALOPO	200.000.000	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DINAS PUPR KOTA PALOPO	400.000.000	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DINAS PUPR KOTA PALOPO	200.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PUPR KOTA PALOPO	37.999.202.800	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DINAS PUPR KOTA PALOPO	62.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PUPR KOTA PALOPO	2.480.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PUPR KOTA PALOPO	8.997.199.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERKIM KOTA PALOPO	91.959.500	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERKIM KOTA PALOPO	14.302.340.649	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERKIM KOTA PALOPO	42.909.400	

Prioritas Nasional	Program	OPD Pelaksana	Jumlah	
			(Rp)	%
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERKIM KOTA PALOPO	4.749.800	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERKIM KOTA PALOPO	3.280.979.410	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO	233.000	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO	507.014.500	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO	31.967.000	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO	31.068.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO	2.406.848.500	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO	27.808.000	
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO	3.000.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO	640.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO	570.000	
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO	510.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO	2.532.998.000	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DINAS KOPERASI, UKM KOTA PALOPO	4.450.000	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	DINAS KOPERASI, UKM KOTA PALOPO	4.700.000	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINAS KOPERASI, UKM KOTA PALOPO	225.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DINAS KOPERASI, UKM KOTA PALOPO	4.450.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS KOPERASI, UKM KOTA PALOPO	69.245.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KOPERASI, UKM KOTA PALOPO	2.553.887.000	
		DINAS KOPERASI, UKM KOTA PALOPO	2.529.247.000	

Prioritas Nasional	Program	OPD Pelaksana	Jumlah	
			(Rp)	%
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN EKRAF KOTA PALOPO	93.820.000	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN EKRAF KOTA PALOPO	97.310.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS PARIWISATA DAN EKRAF KOTA PALOPO	70.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PARIWISATA DAN EKRAF KOTA PALOPO	3.337.508.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO	620.615.000	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO	229.264.000	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO	45.105.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO	4.531.059.500	
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas			**593.336.110.280**	**63,57%**
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO	37.798.582.300	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO	16.205.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO	213.733.808.500	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO	99.385.635.400	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO	31.431.600	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO	83.511.246.800	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD SAWERIGADING KOTA PALOPO	87.827.520.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD SAWERIGADING KOTA PALOPO	32.456.149.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO	564.288.500	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO	840.000	
		DINAS SOSIAL KOTA PALOPO	139.500.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO	37.520.000	

Prioritas Nasional	Program	OPD Pelaksana	Jumlah	
			(Rp)	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO	162.348.530	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS PPPA KOTA PALOPO	185.925.492	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS PPPA KOTA PALOPO	1.796.305.525	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINAS PPPA KOTA PALOPO	49.550.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DINAS PPPA KOTA PALOPO	3.747.800	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINAS PPPA KOTA PALOPO	22.126.350	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS PPPA KOTA PALOPO	277.530.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PPPA KOTA PALOPO	2.779.092.383	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS DALDUK & KB KOTA PALOPO	114.235.000	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS DALDUK & KB KOTA PALOPO	5.395.191.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS DALDUK & KB KOTA PALOPO	164.020.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS DALDUK & KB KOTA PALOPO	3.723.522.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS PORA KOTA PALOPO	199.999.900	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS PORA KOTA PALOPO	911.840.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PORA KOTA PALOPO	3.383.999.200	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO	10.754.376.000	
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO	2.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO	2.657.597.000	
		DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO	80.611.000	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM KOTA PALOPO	520.395.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM KOTA PALOPO	36.364.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKPSDM KOTA PALOPO	4.612.607.000	
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri			**2.185.590.000**	**0,23%**

Prioritas Nasional	Program	OPD Pelaksana	Jumlah	
			(Rp)	%
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO	21.781.000	
		DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO	21.781.000	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO	51.105.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO	5.050.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO	6.520.000	
		DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO	6.520.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO	2.064.433.000	
		DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO	8.400.000	
Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			**2.835.250.300**	**0,30%**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO	89.912.300	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO	1.220.000	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO	68.127.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO	2.675.991.000	
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan			**162.331.223.788**	**17,39%**
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	DINAS DAMKAR KOTA PALOPO	1.430.100.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS DAMKAR KOTA PALOPO	3.771.453.000	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS DUKCAPIL KOTA PALOPO	64.575.000	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS DUKCAPIL KOTA PALOPO	32.395.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS DUKCAPIL KOTA PALOPO	90.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DINAS DUKCAPIL KOTA PALOPO	9.980.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS DUKCAPIL KOTA PALOPO	3.539.129.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMINFO KOTA PALOPO	1.552.761.995	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMINFO KOTA PALOPO	1.912.656.000	

Prioritas Nasional	Program	OPD Pelaksana	Jumlah	
			(Rp)	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KOMINFO KOTA PALOPO	2.378.514.005	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO	59.584.700	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO	23.525.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO	2.547.197.300	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO	32.938.200	
		DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO	25.968.300	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO	7.809.900	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO	2.325.959.600	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO	9.762.769.199	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO	1.363.733.190	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO	29.925.644.611	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO	2.083.198.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO	1.066.189.000	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA KOTA PALOPO	600.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA KOTA PALOPO	530.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAPPEDA KOTA PALOPO	4.332.855.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD KOTA PALOPO	19.014.730.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD KOTA PALOPO	3.538.650.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKAD KOTA PALOPO	8.648.243.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA KOTA PALOPO	3.017.966.200	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAPENDA KOTA PALOPO	8.391.296.800	

Prioritas Nasional	Program	OPD Pelaksana	Jumlah	
			(Rp)	%
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BALITBANG KOTA PALOPO	150.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BALITBANGDA KOTA PALOPO	2.457.192.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN WARA	606.100.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN WARA	609.050.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN WARA	1.222.800.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN WARA	5.856.875.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN WARA UTARA	609.600.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN WARA UTARA	622.900.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN WARA UTARA	835.200.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN WARA TIMUR	730.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN WARA TIMUR	701.622.288	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN WARA TIMUR	1.377.600.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN WARA TIMUR	7.050.420.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN WARA BARAT	21.200.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN WARA BARAT	522.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN WARA BARAT	556.100.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN WARA BARAT	3.851.938.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN WARA SELATAN	400.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN WARA SELATAN	403.710.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN WARA SELATAN	643.200.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN WARA SELATAN	4.367.494.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN BARA	1.750.000	

Prioritas Nasional	Program	OPD Pelaksana	Jumlah	
			(Rp)	%
		KECAMATAN BARA	500.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN BARA	505.520.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN BARA	1.112.625.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN BARA	5.611.241.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN MUNGKAJANG	403.600.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN MUNGKAJANG	407.100.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN MUNGKAJANG	487.200.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN MUNGKAJANG	187.482.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN SENDANA	404.800.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN SENDANA	404.787.500	
		KECAMATAN SENDANA	404.787.500	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN SENDANA	4.009.217.500	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN TELLUWANUA	700.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN TELLUWANUA	712.500.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN TELLUWANUA	795.600.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN TELLUWANUA	8.190.000	
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur			**29.747.513.660**	**3,19%**
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH KOTA PALOPO	26.700.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH KOTA PALOPO	122.415.600	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLH KOTA PALOPO	4.181.957.300	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3	DLH KOTA PALOPO	25.050.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN	DLH KOTA PALOPO	35.350.100	

Prioritas Nasional	Program	OPD Pelaksana	Jumlah	
			(Rp)	%
	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLH KOTA PALOPO	86.049.500	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLH KOTA PALOPO	28.328.000	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH KOTA PALOPO	10.400.200	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH KOTA PALOPO	14.843.644.620	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DLH KOTA PALOPO	7.942.143.340	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO	26.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO	30.000.000	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO	15.600.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO	2.373.875.000	
TOTAL			**933.296.155.378**	**100,00%**

4.4. Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Palopo.

Pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses yang dilakukan oleh anggota DPRD. Penelaahan terhadap Pokir DPRD merupakan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai salah satu muatan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD Kota Palopo memberikan saran dan pendapat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan. Saran dan pendapat yang menjadi pokir DPRD untuk perencanaan pembangunan tahun 2025 selanjutnya menjadi salah satu input dalam menentukan prioritas pembangunan Kota Palopo Tahun 2025. Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Palopo berdasarkan urusan pemerintahan dan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan Daerah Kota Palopo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.16
Pokok-pokok Pikiran DPRD berdasarkan Urusan Pemerintahan

No	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Urusan	Prioritas Pembangunan
1	Pemenuhan sarana dan prasarana destinasi wisata	Pariwisata	Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah
2	Penyediaan sarana dan prasarana bagi nelayan dalam rangka peningkatan produktivitas perikanan	Perikanan	Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah
3	Penyediaan sarana bagi usaha ekonomi kreatif	Perindustrian	Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah
4	Penyediaan sarana dan prasarana bagi petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian	Pertanian	Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah

No	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Urusan	Prioritas Pembangunan
5	Penyediaan alat kerja usaha ekonomi masyarakat	Tenaga Kerja	Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah
6	Pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan	Pendidikan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan
7	Penyediaan sarana rumah ibadah	Sekretariat Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan
8	Peningkatan kualitas jalan, drainase dan penanganan sarana kantor pemerintahan	Pekerjaan Umum	Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana
9	Pemenuhan kebutuhan sarana persampahan	Lingkungan Hidup	Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana

Tabel. 4.17
Highlight Indikasi Intervensi di Sulawesi Selatan Berdasarkan Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) **Prioritas Nasional 2 :** Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.	• Penguatan Kebebasan Masyarakat Sipil untuk Berkumpul, berekspresi, Berserikat dan Berpendapat • Penguatan Kesejahtaran Masyarakat atas informasi Publik • Penyeediaan Sarana Pendukung untuk Ternak (terutama container untuk inseminasi buatan) di Kabupatan Maros • Bantuan Benih Ikan, Terutama di Kabupaten Takalar • Pengembangan Kawasan Tebu di Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa dan Kebupaten Bone • Pengembangan Kawan Hutan yang dikelolah oleh Masyarakat dal skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan.

BAB. V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2025

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran daerah serta target pembangunan. Ada beberapa jenis sumber pembiayaan yang berpotensi untuk digunakan sebagai sumber pendanaan pembangunan di daerah, antara lain APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, pinjaman Bank, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/*public private partnership* (PPP), Dana umat, *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan dan obligasi daerah. Akan tetapi tidak semua sumber pendanaan tersebut dimiliki oleh Pemerintah Kota Palopo.

Kerangka Pendanaan Kota Palopo Tahun 2025 pada aspek pendapatan ditargetkan berada pada angka 1.077.254.652.70, belanja sebesar 1.089.323.277.730 dan pembiayaan netto sebesar 12.068.625.000, yang selengkapnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1
Rincian Kerangka Pendanaan Kota Palopo Tahun 2025

Uraian	Target Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
PENDAPATAN	1,077,254,652,730.23	1,093,064,727,505.39
Pendapatan Asli Daerah	214,656,753,772.57	208,273,427,234.82
Pajak Daerah	48,921,515,499.22	53,168,027,838.93
Retribusi Daerah	26,592,479,859.75	32,281,344,288.91
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,057,841,454.23	7,068,665,241.80
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	132,084,916,959.37	115,755,389,865.18
Pendapatan Transfer	842,950,135,623.90	856,724,071,957.24
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	764,267,991,300.20	773,855,292,964.12
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak	14,639,665,417.83	14,684,390,169.87
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	10,397,192,898.04	15,844,844,008.16
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	498,254,864,830.96	492,551,854,318.47
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus	240,976,268,153.37	250,774,204,467.62
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	9,693,214,983.26	10,055,023,058.77
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	00.00	00.00
Dana Insentif Daerah (DID)	9,693,214,983.26	10,055,023,058.77
Pendapatan Transfer Antar Daerah	68,988,929,340.44	72,813,755,934.35
Pendapatan Bagi Hasil	63,443,249,960.81	67,324,777,268.90
Bantuan Keuangan	5,545,679,379.63	5,488,978,665.45
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	19,647,763,333.76	28,067,228,313.33
Hibah	174,903,023.72	117,341,613.34
Bantuan Keuangan	00.00	00.00
Pendapatan Lainnya	19,472,860,310.04	27,949,886,699.99
BELANJA	1.089.323.277.730,23	1.106.920.588.145,25
Belanja Operasi	653.529.390.754,10	664.123.735.645,36
Belanja Pegawai	370.548.939.412,98	375.431.262.257,72
Belanja Barang dan Jasa	268.945.209.634,92	280.226.914.870,42
Belanja Bunga	1.025.089.220,61	877.947.768,27

Uraian	Target Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
Belanja Subsidi	0	0
Belanja Hibah	12.867.025.653,79	7.457.132.035,42
Belanja Bantuan Sosial	143.126.831,80	130.478.713,53
Belanja Modal	435.789.466.466,23	442.793.279.012,56
Belanja Tak Terduga	4.420.509,90	3.573.487,34
Belanja Transfer	0	0
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.010.000.000,00	26.797.235.639,86
Pencairan Dana Cadangan	0	0
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0
Penerimaan pinjaman Daerah	0	0
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0
Penerimaan Piutang Daerah	0	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	25.010.000.000,00	26.797.235.639,86
Pengeluaran Pembiayaan		
Pembentukan Dana Cadangan	0	0
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0	0
Pembayaran Pokok Utang	12.941.375.000,00	12.941.375.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
Jumlah Pengeluaraan Pembiayaan	12.941.375.000,00	12.941.375.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	12.068.625.000,00	13.855.860.639,86

Sumber Data : RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026

Dalam penyusunan pendapatan Kota Palopo tahun 2025, beberapa asumsi kunci yang digunakan mencakup pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak dan retribusi, serta dukungan dana transfer dari pemerintah pusat seperti DAU dan DAK. Pemerintah Kota Palopo juga akan berupaya melaksanakan efisiensi dalam pengelolaan anggaran melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik, serta upaya peningkatan investasi swasta untuk memperkuat perekonomian lokal.

Belanja daerah tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow program*, memperhatikan prioritas pembangunan, target atas tujuan dan sasaran pembangunan, serta diarahkan untuk menangani permasalahan pembangunan dan isu strategis 2025 di Kota Palopo, dan diupayakan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja tersebut antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kota Palopo Tahun 2025.

Struktur rencana belanja tahun 2025 dan proyeksi Tahun 2026 dalam RKPD Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Wali Kota Palopo Kota Palopo Nomor 100.3.2/13/B.Hukum Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2024-2026 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Penyusunan RKPD Kota Palopo 2025 ini, juga memastikan adanya kesesuaian dan konsitensi kerangka pendanaan antara RKPD Tahun 2025 dengan RPD Tahun 2024-2026 dengan rincian sebagi berikut :

Konsep rencana Belanja Daerah 2025 Kota Palopo adalah sebagai berikut :

1. Dari aspek alokasi, belanja Pemerintah Kota Palopo tahun 2025 akan tetap diarahkan pada pemenuhan *mandatory spending* yang mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengawasan (APIP), sesuai dengan kaidah alokasi yang berlaku.
2. Sektoral, belanja tersebut juga diarahkan pada pemenuhan standar pelayanan minimal masyarakat (SPM) dalam 6 urusan, dan sejumlah indikator dan target pencapaian *Sustainable Development Goals* atau SDGs/TPB

3. Pengalokasian belanja Pemerintah Kota Palopo diarahkan menggunakan konsep *money follow the program*, yang artinya alokasi anggaran akan diarahkan pada tujuan dan sasaran pembangunan, dan prioritas pembangunan Kota Palopo. Dalam pengalokasiannya juga akan beririsan dengan dukungan Pemerintah Kota Palopo bagi prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025.
4. Pengalokasian belanja untuk penyelesaian utang Pemerintah Kota Palopo sesuai ketentuan yang berlaku

5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD 2024-2026.

Program prioritas pembangunan daerah Kota Palopo 2025, disusun dengan pendekatan kinerja dengan melakukan *cascading* tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai. Dalam konteks tersebut, program perangkat daerah dilakukan *mapping* sesuai dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan sebelumnya dan secara langsung terkait atau mengkontribusi tujuan dan sasaran pembangunan.

Berikut adalah tabel yang menguraikan program prioritas pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang secara langsung berkontribusi pada tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palopo pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.2
Tabel Priroitas dan Program Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2025

Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas Pembangunan	No	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Indikator	Target 2025		Proyeksi Anggaran 2026	OPD Penanggung Jawab
					Kinerja	Keuangan		
Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah (Prioritas 1)	Meningkatnya Kondisi Ekonomi Daerah yang Berkualitas	1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	8	207,286,479.00	210,500,000.00	Dinas Koperasi UKM
		2	Program Pengembangan UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil (%/Tahun)	27	205,079,522.00	312,875,000.00	Dinas Koperasi UKM
		3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Angka Persentase Koperasi yang Aktif	86	7,853,675.00	8,000,000.00	Dinas Koperasi UKM
		4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Usaha Ekraf Binaan yang Aktif Berusaha	90	99,100,000.00	101,700,000.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		5	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat Kesesuaian Realisasi Pendapatan Daerah dengan Target Pendapatan Daerah	100	3,545,684,233.20	3,638,709,248.40	Badan Pendapatan Daerah
		6	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kesesuaian Pagu pada Dokumen Penganggaran Terhadap Dokumen Perencanaan	100	12,980,000,000.00	12,980,000,000.00	BPKAD
		7	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Jumlah Retribusi dari Pasar	57.14	658,298,567.45	675,569,771.04	Dinas Perdagangan
		8	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Pada Destinasi Wisata Unggulan Daerah	0.25	571,854,568.00	586,857,816.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		9	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Usaha Ekraf Binaan yang Aktif Berusaha	85	99,100,000.00	286,665,858.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		10	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Total Persentase Rata-rata Gangguan Trantibum dan Perda/Perkada yang dapat diselesaikan	100	3,401,073,450.72	2.023.753.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja

Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas Pembangunan	No	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Indikator	Target 2025		Proyeksi Anggaran 2026	OPD Penanggung Jawab
					Kinerja	Keuangan		
		11	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Wilayah Rawan Konflik yang Dibina	100	945,750,940.02	970,563,780.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		12	Program Pelayanan Penanaman Modal	Angka Pertumbuhan Jumlah Investor di Daerah	100	418,657,860.00	429,641,820.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	13	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	79	401,355,000.00	411,885,000.00	Dinas Tenaga Kerja
		14	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Rumah Tangga/ Keluarga Miskin yang Mendapatkan Pemberdayaan	92	114,062,613.50	117,055,174.50	Dinas Sosial
		15	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	5	4,669,069,009.66	4,791,567,288.42	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
		16	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-28.5	68,379,000.00	70,173,000.00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
		17	Program penyuluhan pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Mampu Meningkatkan Produksi/Produktifitasnya	69	128,779,231.07	132,157,899.09	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
		18	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	19095,25	721,928,734.10	740,869,346.70	Dinas Perikanan
		19	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	185407,5	129,327,977.50	132,721,042.50	Dinas Perikanan
		20	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah Kelompok Tani yang Memanfaatkan Infrastruktur Ketahanan Pangan (Kelompok)	5	198,200,000.00	203,400,000.00	Dinas Ketahanan Pangnan
		21	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	90	40,439,737.00	41,500,719.00	Dinas Perindustrian
		22	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Unit Industri yang Berizin	16	9,910,000.00	10,170,000.00	Dinas Perindustrian
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	23	Program Kepegawaian Daerah	Persentase PNS yang ditempatkan sesuai Syarat	60	3.905.055.072.25	4,007,508,585.75	Badan Kepegawaian dan

Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas Pembangunan	No	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Indikator	Target 2025		Proyeksi Anggaran 2026	OPD Penanggung Jawab
					Kinerja	Keuangan		
dan Tata Kelola Pemerintahan (Prioritas 2)				Jabatan dan Syarat Kompetensinya				Pengembangan SDM
		24	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	45	1.182.734.220.5	1,213,764,583.50	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		25	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Pemenuhan Universal Helath Coverage (%)	100	171,263,072,809.62	97,018,361,637.00	RSUD Sawerigading
		26	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	100	39,907,639,865.50	40,954,661,698.50	Dinas Pendidikan
		27	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Pemenuhan Universal Helath Coverage (%)	100	97,298,063,469.62	97,018,361,637.00	Dinas Kesehatan
		28	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	100	445,950,000.00	457,650,000.00	Dinas Kesehatan
		29	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera I yang Meningkat Menjadi Keluarga Sejahtera (%)	1	1,274,388,342.00	1,307,823,354.00	Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
		30	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Event Olahraga yang Dilaksanan untuk Mendukung Kepariwisataan (Kali/Tahun)	77	1,535,197,740.00	1,575,475,380.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		31	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	81	169,194,233.00	173,633,233.77	Dinas Pemuda dan Olahraga
		32	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	25	405,925,492.00	416,575,404.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan	33	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rata-Rata Nilai PMPRB Organisasi Perangkat Daerah	54	139.537.755	143,198,685.00	Inspektorat Daerah

Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas Pembangunan	No	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Indikator	Target 2025		Proyeksi Anggaran 2026	OPD Penanggung Jawab
					Kinerja	Keuangan		
		34	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Tahunan Terhadap Target Kinerja Tahunan dalam RKPD	100	4,212,330,056.75	5,231,018,837.25	Bappeda
		35	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Terhadap Dokumen Perencanaan Daerah (%)	100	3,335,496,987.25	3,357,417,190.75	Bappeda
		36	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kesesuaian Pagu pada Dokumen Penganggaran Terhadap Dokumen Perencanaan (%)	100	12,980,000,000.00	12,980,000,000.00	BPKAD
		37	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Prolegda yang Ditetapkan Menjadi Regulasi Daerah	100	2,570,388,647.86	2,637,825,686.05	Sekretariat DPRD
		38	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	26,321,367,189.82	26,998,819,810.34	Sekretariat Daerah
		39	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Barang yang Memenuhi SAP	100	3,100,000,000.00	3,100,000,000.00	BPKAD
		40	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	96	64,585,699.75	66,280,178.25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil
		41	Program Pencatatan Sipil	Persentase Wajib KTP yang Terlayani (%)	76	32,405,700.00	33,255,900.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil
		42	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase KIM masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	0.5	1,458,584,174.15	1,496,851,771.05	Dinas Komunikasi dan Informatika
		43	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif	100	99.379.134.97	100.766.170,00	Kecamatan
		44	Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang Memiliki Standar Operasional	26	35,715,491.35	36,652,527.45	Dinas Kearsipan

Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas Pembangunan	No	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Indikator	Target 2025		Proyeksi Anggaran 2026	OPD Penanggung Jawab
					Kinerja	Keuangan		
				Prosedur (SOP) Pengelolaan Arsip (%)				
		45	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, dan Teknologi yang Diwujudkan (Inovasi)	100	728,334,459.00	747,443,133.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		46	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Angka Tingkat Ketersediaan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah sesuai Permendagri 86 (%)	100	74,977,078.00	76,944,186.00	Dinas Persandian dan Statistik
		47	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi (Privat)	100	10,232,480.00	9,312,080.00	Dinas Pertanahan
		48	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Layanan Angkutan Darat	90	18,834,656,637.44	16,881,108,340.00	Dinas Perhubungan
		49	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Event Pameran Sejarah yang Dilaksanakan	2	183,335,000.00	188,145,000.00	Dinas Kebudayaan
Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana (Prioritas 3)	Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Kualitas Lingkungan Perkotaaan	50	Program Penanggulangan Bencana	Total Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	906,632,206.00	930,418,722.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		51	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan Pengaduan dan Evakuasi yang Dilaksanakan dengan Memenuhi Respon Time 15 Menit	100	1,929,801,713.00	1,978,165,431.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		52	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan Pengaduan dan Evakuasi yang Dilaksanakan dengan Memenuhi Respon Time 15 Menit	100	1,929,801,713.00	1,978,165,431.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		53	Program Penanggulangan Bencana	Total Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan serta layanan	100	906,632,206.00	930,418,722.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas Pembangunan	No	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Indikator	Target 2025		Proyeksi Anggaran 2026	OPD Penanggung Jawab
					Kinerja	Keuangan		
				penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
		54	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan area pelayanan (%)	90	14,488,107,190.85	14,868,218,983.95	Dinas Lingkungan Hidup
		55	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase sarana Prasarana persampahan yang berfungsi dengan baik	50	297,300,000.00	305,100,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		56	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Luas Wilayah Rawan Banjir dan Kawasan Produktif yang Sarana Prasarana Sumber Daya Airnya Ditangani	80	22,010,605,500.00	22,588,078,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		57	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luasan pemukiman kumuh tertangani	1	698,200,000.00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		58	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung Dengan PSU	43	395,059,177.00	405,423,999.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		59	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status Kualitas Air dan Udara	15	409,434,523.90	420,176,499.30	Dinas Lingkungan Hidup
		60	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang dikelola/ditangani (Ha)	1176	3,958,251,407.20	4,062,100,586.40	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber Data RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026

Dukungan Keselarasan Program Prioritas Kota Palopo terhadap Program Prioritas Tematik Provinsi.

Tematik Penanganan Inflasi

Untuk penanganan inflasi 2025, Pemerintah Kota Palopo mengalokasikan sebanyak 6 program, 6 kegiatan dan 7 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 6 perangkat daerah. Berikut adalah tabel intevensi penanganan inflasi Kota Palopo Tahun 2025 :

Tabel 5.3
Perangkat Daerah dan Intervensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Penanganan Inflasi Kota Palopo Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Dinas Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2	Dinas Pertanian'	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
3	Ketahanan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
4	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
5	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
6	Setda	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Tematik Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Untuk penanganan kemiskinan ekstrem 2025, Pemerintah Kota Palopo mengalokasikan sebanyak 28 program, 48 kegiatan dan 68 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 13 perangkat daerah. Berikut adalah tabel intevensi penanganan kemiskinan ekstrem Kota Palopo Tahun 2025 :

Tabel 5.4
Perangkat Daerah dan Intervensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Penanganan Kemiskinan Ekstrem Kota Palopo Tahun 2025

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD
			Pengeloaan Pendidikan menengah	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik
				Pengelolaan Dana BOS SMP

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pendidikan PAUD	Pengelola Dana BOP PAUD
			Pengelolaan pendidikan non formal dan kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah non formal/kesetaraan
2	DINAS KESEHATAN	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	Pengeloaan Jaminan Kesehatan
3	DINAS SOSIAL	Pemberdayaan Sosial	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia, gelandangan pengemis diluar panti	Penyediaan alat bantu
				Pemberian bimbigan fisik, mental,spiritual dan sosial
			Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS, dan NAPZA diluar panti sosial	Pemberian bimbigan fisik, mental,spiritual dan sosial
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan anak-anak terlantar	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar
			Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota
				Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga
4	DINAS PERDAGANGAN	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat daerah kab/kota	Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat agen dan pasar rakyat
				Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat agen dan pasar rakyat
			Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya tingkat kab/kota	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan poko dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan
				Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam satu kab/kota
		Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
5	DINAS TENAGA KERJA	Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
		Penempatan tenaga kerja	Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	Pelayanan antar kerja
			Pengelolaan informasi pasar kerja	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online
6	DINAS KETAHANAN PANGAN	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal
				Koordinasi sinkronisasi dan pelaksnaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			kab/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan
			Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi (AKG)	Pemberdayaan masyarkat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
7	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kab/kota	Pengawasan mutu benih/bibit ternak,bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil
			Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam kab/kota	Pengendalian penyediaan benih/bibit trnak dan hijauan pakan ternak
			Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 kab/kota	Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kab/kota lain
				Pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kab/kota lain
			pengembangan prasarana pertanian	Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan
			pembangunan prasarana pertanian	Pembangunan rehab dan pemeliharaan jalan usaha tani
		Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kab/kota	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis
			Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Pengawasan peredaran hewan dan produk ternak
		Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kab/kota	pengendalian organisme penggangu tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
				Penanganan dampak perubahan iklim tanaman pangan hortikultura dan perkebunan
				Pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan hortikultura dan perkebunan
				Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan
		Penyuluhan pertanian	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa
				Pengembangan kapasitas kelembagaan petani kecamatan dan desa

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kab/kota
8	DINAS PERIKANAN	Pengeloaan perikanan tangkap	Pengelolaan penangkapan ikan diwilayah sungai danau, waduk rawa, genangan yang dapat diusahakan dalam satu daerah kab/kota	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap
				penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap
			Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kab/kota	Pengembangan kapasitas nelayan kecil
				Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil
		Pengelolaan perikanan budidaya	Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil
				Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidayaan ikan kecil
		Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Penerbitan TDU pengolahan hasil perikanan bagi usaha mikro dan kecil	Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 kab/kota
			Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
			Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah kab/kota	Pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skala mikro kecil dalam satu daerah kab/kota
9	DINAS KOPERASI & UMKM	Pendidikan dan latihan perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi
		Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kab/kota	Pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah akses pasar,akses pembiayaan,penguatan kelembagaan,penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenagan kab/kota
		Pemberdayaan UMKM	Pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro
		Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil menengah	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi
10	SETDA (Kewilayahan (Pemberdayaan Kecamatan & Kelurahan)	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dan kelurahan

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Pemberdayaan masyarakat di kelurahan
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB	Pengendalian penduduk	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kab/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Advokasi sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI SMP /Mts, jalur non formal dan informal
			Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kab/kota	Penyediaan data dan informasi keluarga
		Pembinaan Keluarga Berencana	Pendayagunaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB	Penggerakan kader institusi masyrakat pedesaan
			Pengendalian dan distribusi kebutuhan alkon serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kab/kota	Peningkatan kepesertaan penggunaan metode MKJP
				Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB
				Pembinaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
			pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB
		Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pembentukan kelompok BKB,BKR,PIK-R,BKL,dan UPPKS
			Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarkatan tingkat daerah kab/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan ormas dalam pengelolaan kelompok BKB,BKR,PIK-R,BKL,dan UPPKS
12	DINAS PUPR	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan jasa peneydotan lumpur tinja
		Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil	Pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi
13	DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN	Kawasan dan permukiman	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas <10 Ha	Perbaikan rumah tidak layak huni

Tematik Penanganan Stunting

Untuk penanganan stunting 2025, Pemerintah Kota Palopo mengalokasikan sebanyak 13 program, 15 kegiatan dan 22 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 11 perangkat daerah. Berikut adalah tabel intevensi penanganan stunting Kota Palopo Tahun 2025 :

Tabel 5.5
Perangkat Daerah dan Intervensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Penanganan Stunting Kota Palopo Tahun 2025

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	DINAS KESEHATAN	1	1	6
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengeloaan sistem informasi kesehatan
2	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	2	3	4
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahtraan keluarga (Bina Keluarga Balita(BKB),Bina Keluarga Remaja(BKL),Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
		Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
3	DINAS SOSIAL	1	1	2
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
4	DINAS PERIKANAN	1	2	2
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
5	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	1	1	1
		Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				kecamatan dan desa/kelurahan
6	DINAS KETAHANAN PANGAN	2	2	2
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota
7	DINAS PUPR	1	1	1
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja
8	BAPPEDA	1	1	1
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
9	KECAMATAN	1	1	1
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
10	DINAS KOMINFO	1	1	1
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media, dan kemitraan komunitas
11	DINAS PENDIDIKAN	1	1	1
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan PAUD

Tematik Ketahanan Pangan

Untuk penguatan ketahanan pangan 2025, Pemerintah Kota Palopo mengalokasikan sebanyak 10 program, 16 kegiatan dan 22 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 5 perangkat daerah. Berikut adalah tabel intevensi penanganan ketahanan pangan Kota Palopo Tahun 2025 :

Tabel 5.6
Perangkat Daerah dan Intervensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Penguatan Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2025

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
1	Dinas Ketahanan Pangan			
		Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten kota	penyediaan infrastruktur cadangan pangan pemerintah kabupaten kota
		Peningkatan diversifikasi dan	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan	Penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
		ketahanan pangan masyarakat	daerah kabupaten kota dalam rangka stabilisasi pasokan terhadap harga pangan	
			Pengolahan dan keseimbangan cadangan pangan kab/kota	Pengadaan cadangan pangan pemerintah
			Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi berbasis sumber daya lokal
		Program penanganan kerawanan pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2	Dinas Pertanian, perkebunan dan peternakan			
		Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan bakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah kabupaten kota lain	Pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten lain
		Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pengembangan prasarana pertanian	Pengelolaan lahan pertanian lahan pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pangan pertanian berkelanjutan/LCP2B di kabupaten kota
				Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian
				Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani
				Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan DAM farid
				Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air
				Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani
				Pembangunan rehabilitasi pemeliharaan dan operasionalisasi rumah potong hewan
		Penyuluhan pertanian	Pelaksanaan penyusluhan pertanian	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa
3	Dinas perikanan			
		Pengelolaan perikanan tangkap	Pengolaan penangkapan ikan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu daerah kab/kota	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap
			Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota	Pengembangan kapasitas nelayan kecil
		Pengelolaan perikanan budidaya	Pemberdayaan pembudiyaan ikan kecil	Pengembangan kapasitas pembudidayaan ikan kecil
4	Dinas perdagangan	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/ Kota
5	Dinas PUPR			
		Program pengelolaan sumberdaya air	Pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam satu daerah kabupaten kota	Pembangunan jaringan irigasi permukaan

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
			Pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam satu daerah kabupaten kota	Peningkatan jaringan irigasi permukaan
			Pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam satu daerah kabupaten kota	rehabilitasi jaringan irigasi permukaan

5.3 Rencana Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2025 mempertimbangkan beberapa aspek yakni Hasil Musrenbang RKPD Kota Palopo Tahun 2025 (partisipatif) yang melahirkan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta tetap menjaga perencanaan program sesuai RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026 (teknokratis), dan pokok-pokok pikiran DPRD (pendekatan politis).

Perumusan rencana program dan kegiatan daerah tahun 2025 merupakan hasil dari serangkaian pembahasan mengenai substansi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dimulai sejak penyusunan rancangan awal RKPD hingga pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 untuk RKPD Kota Palopo tahun 2025. Musrenbang menjadi wadah untuk membahas rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat.

Jumlah Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo Pada Tahun 2025 terdiri dari 214 program, 591 kegiatan dan 1.644 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.7
Rencana Kerja Peemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2025
Berdasarkan program, Kegiatan, sub kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Palopo			
						DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO				193.951.423.848,37					197.909.743.763,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				193.951.423.848,37					197.909.743.763,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				193.951.423.848,37					197.909.743.763,00	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	154.005.069.328,37				100 persen	157.085.170.713,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	6Dokumen	6 Dokumen	4.057.500,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6Dokumen	4.138.650,00	
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	2.016.750,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6 Dokumen	2.057.085,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.040.750,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	2.081.565,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	12Laporan	12 Laporan	153.282.345.678,37		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Laporan	156.347.992.591,00	
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1365 Orang/bulan	1365 Orang/bulan	153.094.302.078,37	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1365 Orang/bulan	156.156.188.119,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19 Dokumen	19 Dokumen	152.869.250,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	19 Dokumen	155.926.635,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	15 Laporan	35.174.350,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	15 Laporan	35.877.837,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	1Laporan	1 Laporan	16.317.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Laporan	16.643.340,00	
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	16.317.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	16.643.340,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	174Orang	174 Orang	32.127.650,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	174Orang	32.770.203,00	
	1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	174 Dokumen	174 Dokumen	32.127.650,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	174 Dokumen	32.770.203,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	2Jenis	2 Jenis	205.280.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2Jenis	209.385.600,00	

	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	5.280.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokumen	5.385.600,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	35 Laporan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	35 Laporan	204.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	3Unit	3 Unit	42.959.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Unit	43.818.180,00	
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	8.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	8.160.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	24.959.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Unit	25.458.180,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	10.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	359.390.885,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	366.578.702,00	
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	79.159.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	80.743.098,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	70.063.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	71.465.076,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	210.167.185,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	214.370.528,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	138Unit	138 Unit	62.591.615,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	138Unit	63.843.447,00	
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	53 Unit	53 Unit	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	53 Unit	15.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	11.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	11.424.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 Unit	81 Unit	21.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	81 Unit	21.420.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO

	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	15.391.615,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Unit	15.699.447,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	100 persen	100 persen	39.907.639.866,00				100 persen	40.764.312.673,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Pendidikan Dasar yang Ditangani (Sekolah)	81sekolah	81 sekolah	19.673.968.366,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	81sekolah	19.165.982.923,00	
	1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)											
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		1 Unit	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Ruang	153.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Ruang	153.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah											
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Ruang	153.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	4 Unit	512.555.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Unit	408.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah											
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	153.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Ruang	102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Ruang	102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah											
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Ruang	102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah											
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah											
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	85.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Paket	87.125.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah											

							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Paket	81.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	345 Peserta Didik	345 Peserta Didik	19.398.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	345 Peserta Didik	19.883.463,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar									
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		1365 Orang	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar									
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	450 Orang	450 Orang	23.715.571,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	450 Orang	24.308.460,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	43.549.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	81 Satuan Pendidikan	30.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	15.763.950.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	81 Satuan Pendidikan	15.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	81 Orang	81 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	81 Orang	51.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar									
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Ruang	153.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar									
							Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Ruang	102.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		10 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		2 Konten Digital	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		10 Orang	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		15.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		4 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									

							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		5 Komunitas	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi										
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		2 Kegiatan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik										
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik		100 Buku	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		30.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik										
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		250 Paket	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		40.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru										
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang	155.800.095,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Ruang	158.916.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	102.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan										
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		20 Orang	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		30.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik										
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	800.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	81 Satuan Pendidikan	816.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah										
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Ruang	102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar										
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		300 Peserta Didik	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		30.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik										
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Paket	153.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Pendidikan Menengah Pertama yang Ditangani (Sekolah)	25sekolah	25 sekolah	16.660.985.750,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	25sekolah	17.297.270.308,00	
	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)										
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		1 Unit	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										

							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang	800.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Ruang	765.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	400.380.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Ruang	410.390.320,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah										
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	206.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Ruang	211.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium										
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang	1.602.009.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Ruang	1.642.059.225,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula										
							Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun		1 Ruang	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah										
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	6 Unit	600.526.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6 Unit	615.539.970,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah										
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	150.472.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Ruang	153.482.052,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Ruang	76.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah										
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	58.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Ruang	59.160.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium										
							Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Ruang	205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah										
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	71.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	130.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	132.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah										

							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Paket	102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	118.440.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	121.401.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama										
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		3565 Peserta Didik	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		221.864.484,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa										
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	350 Peserta Didik	350 Peserta Didik	23.235.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	350 Peserta Didik	23.816.490,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1365 Orang	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	450 Orang	450 Orang	23.290.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	450 Orang	23.872.968,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah										
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	47.638.750,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	25 Satuan Pendidikan	48.829.719,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama										
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	9.978.550.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	25 Satuan Pendidikan	10.228.013.750,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama										
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	25 Orang	25 Orang	49.941.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	25 Orang	50.940.330,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		25 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan										
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		5 Konten Digital	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan										
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		25 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		2 Dokumen	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan										

							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		25 Komunitas	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi										
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		2 Kegiatan	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		7.140.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik										
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	25 Satuan Pendidikan	512.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru										
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	2 Ruang	300.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Ruang	307.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan										
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		10 Orang	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		15.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik										
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik		500 Buku	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik										
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		5 Paket	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	3 Ruang	218.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Ruang	222.360.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik										
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	137.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Paket	140.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga Pendidikan PAUD yang Ditangani (Sekolah)	122sekolah	122 sekolah	2.595.808.500,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	122sekolah	2.974.475.583,00	
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD										
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	237.332.950,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Unit	243.266.274,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD										
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		35 Peserta Didik	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD										
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		10 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD										

							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	110 Orang	110 Orang	13.849.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	110 Orang	14.253.238,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD										
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	122 Satuan Pendidikan	122 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	122 Satuan Pendidikan	15.317.500,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD										
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	122 Satuan Pendidikan	122 Satuan Pendidikan	1.744.600.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	122 Satuan Pendidikan	1.779.492.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD										
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	110 Orang	110 Orang	8.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	110 Orang	8.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan										
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		2 Konten Digital	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan										
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		112 Orang	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		114.240.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		4 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan										
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		1 Dokumen	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		20.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan										
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		5 Komunitas	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		25.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru										
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		1 Ruang	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		153.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan										
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		112 Orang	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		114.240.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)										
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	182.026.050,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	185.666.571,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik										
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		1 Paket	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD										

							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1 Unit	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		61.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD										
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Paket	51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	1 Ruang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah										
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1 Ruang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang ditangani (Lembaga)	15sekolah	15 sekolah	976.877.250,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	15sekolah	1.326.583.859,00	
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan										
							Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		50 Peserta Didik	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		47 Orang	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan										
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	15.852.750,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	15 Satuan Pendidikan	16.249.069,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan										
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	670.224.500,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	15 Satuan Pendidikan	683.628.990,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		777 Orang	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.04	0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan										
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		2 Konten Digital	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.04	0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan										
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		7 Orang	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		7.140.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		4 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.04	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan										

							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		2 Komunitas	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi										
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		2 Kegiatan	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik										
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		1 Paket	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.04	0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik										
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik		777 Buku	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		15.850.800,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.04	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru										
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		1 Ruang	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan										
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		21 Orang	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		21.420.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.04	0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)										
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		1 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik										
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	15.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	500 Peserta Didik	16.195.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan										
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia		1 Paket	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	02	2.04	0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah										
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1 Ruang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Lokal	100 persen	100 persen	19.565.809,00				100 persen	20.159.140,00	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-		10.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	-	10.100.000,00	
	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar										
							Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	0 Orang	40 Orang	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	0 Orang	5.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar										
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	0 Dokumen	40 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	0 Dokumen	5.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO

	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-		9.565.809,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	-	10.059.140,00	
	1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal										
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	0 Dokumen	20 Dokumen	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	0 Dokumen	4.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal										
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	0 Dokumen	20 Dokumen	5.565.809,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	0 Dokumen	5.979.140,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang Memenuhi Rasio Ideal Guru dan Siswa	100 persen	100 persen	11.716.345,00				100 persen	32.423.737,00	
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Lembaga Pendidikan PAUD, Dasar dan NonFormal yang memenuhi rasio guru ideal	1laporan	1 laporan	11.716.345,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1laporan	32.423.737,00	
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11 Dokumen	11 Dokumen	11.716.345,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	11 Dokumen	12.023.737,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		11 Laporan	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		20.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
5	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan Dasar yang berisin	100 persen	100 persen	7.432.500,00				100 persen	7.677.500,00	
	1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Lembaga Pendidikan yang Berizin (Lembaga)	25sekolah	25 sekolah	7.432.500,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	25sekolah	7.677.500,00	
	1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat										
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25 Dokumen	25 Dokumen	4.932.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	25 Dokumen	5.127.500,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
	1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat										
							Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25 Dokumen	25 Dokumen	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	25 Dokumen	2.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
						DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO				150.793.111.771,75					151.053.126.218,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				150.793.111.771,75					151.053.126.218,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				150.793.111.771,75					151.053.126.218,00	
6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	52.701.040.499,75				100 persen	52.767.822.339,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	6Dokumen	6 Dokumen	17.675.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	6Dokumen	17.851.750,00	
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	10.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	5 Dokumen	10.201.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.575.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Laporan	7.650.750,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO

	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	3Laporan	3 Laporan	50.230.280.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3Laporan	50.232.582.800,00	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	696 Orang/bulan	696 Orang/bulan	50.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	696 Orang/bulan	50.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17 Dokumen	17 Dokumen	222.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	17 Dokumen	224.422.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	8.080.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Laporan	8.160.800,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	12Laporan	12 Laporan	69.600.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12Laporan	69.600.000,00	
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	69.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4 Laporan	69.600.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	5Orang	5 Orang	60.600.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	5Orang	61.206.000,00	
	1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	60.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	5 Orang	61.206.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	2Jenis	2 Jenis	395.900.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2Jenis	441.028.437,00	
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Paket	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	5.280.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4 Dokumen	5.280.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan	340.620.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	120 Laporan	385.748.437,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	74Unit	74 Unit	100.500.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	74Unit	101.005.000,00	
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	10 Unit	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	74 Unit	74 Unit	50.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	74 Unit	51.005.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	1.690.235.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3Jenis	1.707.137.350,00	
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40 Laporan	40 Laporan	74.235.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	40 Laporan	74.977.350,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	808.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	36 Laporan	816.080.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	808.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	816.080.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	60Unit	60 Unit	136.250.499,75		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	60Unit	137.411.002,00	
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	10.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Unit	10.201.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	32 Unit	60.400.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	32 Unit	60.702.502,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	70 Unit	20.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	70 Unit	20.603.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	45.449.999,75	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	45.904.500,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Universal Helath Coverage	100 persen	100 persen	96.857.518.900,00				100 persen	97.018.361.637,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan (RS dan Puskesmas/Jaringannya) yang Berfungsi Baik dan Terakreditasi	12buah	12 buah	26.195.979.358,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12buah	26.380.512.195,00	
	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya										
							Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	505.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	506.050.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas										
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	12 Unit	12 Unit	707.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Unit	714.070.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	16 Unit	16 Unit	1.186.750.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	16 Unit	1.188.617.500,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO

	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas											
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	12 Unit	12 Unit	17.170.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Unit	17.311.700.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	16 Unit	16 Unit	454.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	16 Unit	459.045.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit		16 Unit	101.252.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		102.265.025,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	1.458.440.228,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Unit	1.473.024.631,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit											
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	858.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	863.658.043,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	3.653.536.630,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Paket	3.660.071.996,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan											
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12 Paket	12 Paket	101.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Paket	102.010.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Layanan Kesehatan yang Dilaksanakan	12Jenis	12 Jenis	70.268.634.698,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Jenis	70.422.815.550,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3503 Orang	3.503 Orang	193.178.111,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3503 Orang	114.609.892,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3344 Orang	3.344 Orang	276.541.129,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3344 Orang	231.401.045,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir											
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3185 Orang	3.185 Orang	98.531.313,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3185 Orang	99.516.626,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14612 Orang	14.612 Orang	195.022.840,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	14612 Orang	100.173.068,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9647 Orang	9647 Orang	147.672.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	9647 Orang	48.148.720,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO

	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif											
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	123968 Orang	123968 Orang	63.435.575,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	123968 Orang	64.069.931,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut											
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		10355 Orang	62.118.788,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		62.739.975,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi											
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40890 Orang	40890 Orang	157.676.050,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	40890 Orang	58.252.811,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus											
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3060 Orang	3060 Orang	158.839.444,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3060 Orang	59.427.838,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	425 Orang	425 Orang	130.724.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	425 Orang	132.031.543,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4050 Orang	4050 Orang	74.995.656,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4050 Orang	75.745.613,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5200 Orang	5200 Orang	80.301.313,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5200 Orang	81.104.326,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	160.994.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Dokumen	162.603.940,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	149.253.374,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokumen	150.745.908,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	182.246.294,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Dokumen	184.068.757,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.687.890.275,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Dokumen	2.714.769.178,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	48 Dokumen	48 Dokumen	991.640.094,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	48 Dokumen	1.001.556.495,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	83500 Dokumen	83500 Dokumen	28.831.321.125,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	83500 Dokumen	29.119.634.336,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat											

							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	101.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Dokumen	72.019.060,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit										
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen	20.100.036.250,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Dokumen	20.311.036.613,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	13.451.386.166,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Dokumen	13.585.900.028,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1.241.921.250,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Dokumen	1.254.340.463,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota										
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	12 Unit	12 Unit	731.603.351,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Unit	738.919.384,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah sistem informasi kesehatan yang berfungsi dengan baik	1Jenis	1 Jenis	291.904.844,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1Jenis	113.023.892,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	291.904.844,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Dokumen	113.023.892,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	8Unit	-	101.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	8Unit	102.010.000,00	
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya										
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	90 Unit	90 Unit	50.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	90 Unit	51.005.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan										
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	8 Unit	8 Unit	50.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	8 Unit	51.005.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
8	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	335.847.175,00				-	344.658.503,00	
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	3Dokumen	-	36.857.175,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3Dokumen	45.668.503,00	
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan										
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	16 Dokumen	16 Dokumen	14.698.175,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	16 Dokumen	18.418.503,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar										
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1516 Orang	1516 Orang	14.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1516 Orang	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan										
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1516 Dokumen	1516 Dokumen	8.159.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1516 Dokumen	12.250.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO

	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan mutu dan kompetensi	34persen	10 persen	298.990.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12persen	298.990.000,00	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1516 Orang	1516 Orang	298.990.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1516 Orang	298.990.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
9	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	-	452.755.197,00				-	464.633.739,00	
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	121Unit Usaha	-	379.746.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	121Unit Usaha	387.340.920,00	
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	121 Dokumen	121 Dokumen	379.746.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	121 Dokumen	387.340.920,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Usaha TTM dan TTU yang diberikan sertifikat terkait aspek kesehatan (Usaha/Tahun)	486Usaha	486 Usaha	20.986.500,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	486Usaha	21.406.230,00	
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dokumen	12 Dokumen	20.986.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokumen	21.406.230,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	792Usaha	-	20.742.697,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	264Usaha	23.980.789,00	
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	12 Dokumen	20.742.697,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Dokumen	23.980.789,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	243kali	-	15.300.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	243kali	15.606.000,00	
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	12 Dokumen	12 Dokumen	15.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Dokumen	15.606.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Usaha yang Produknya diperiksa	121Usaha	121 Usaha	15.980.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	121Usaha	16.299.800,00	
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan										
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	121 Unit	121 Unit	15.980.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	121 Unit	16.299.800,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
10	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	100 persen	100 persen	445.950.000,00				100 persen	457.650.000,00	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat	12Puskesmas	12 Puskesmas	103.933.920,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12Puskesmas	106.012.598,00	
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat										

							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	103.933.920,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4 Dokumen	106.012.598,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Promotif Preventif	12Puskesmas	12 Puskesmas	234.345.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12Puskesmas	239.031.900,00	
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat										
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	4 Dokumen	186.405.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4 Dokumen	190.133.100,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	33261 Keluarga	33.261 Keluarga	47.940.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	33261 Keluarga	48.898.800,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya UKBM	12Puskesmas	12 Puskesmas	107.671.080,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12Puskesmas	112.605.502,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)										
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	107.671.080,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Dokumen	112.605.502,00	DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO
						RSUD SAWERIGADING KOTA PALOPO				103.274.191.221,08					109.653.802.282,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				103.274.191.221,08					109.653.802.282,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				103.274.191.221,08					109.653.802.282,00	
11	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	28.868.637.311,08				100 persen	30.941.927.746,00	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	12Laporan	12 Laporan	28.868.637.311,08		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Laporan	30.941.927.746,00	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		376 Orang/bulan	28.868.637.311,08	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		30.941.927.746,00	RSUD SAWERIGADING KOTA PALOPO
12	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai survei kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit	82 Nilai	82 Nilai	74.405.553.910,00				82 Nilai	78.711.874.536,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana alat kesehatan dan pendukung lainnya	3Unit	3 Unit	4.405.553.910,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Unit	8.711.874.536,00	
	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya										
							Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	100 Unit	23 Unit	4.405.553.910,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	100 Unit	8.711.874.536,00	RSUD SAWERIGADING KOTA PALOPO
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan yang di fasilitasi	22Layanan	22 Layanan	70.000.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	22Layanan	70.000.000.000,00	
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit										
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 Dokumen	12 Dokumen	70.000.000.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	100 Dokumen	70.000.000.000,00	RSUD SAWERIGADING KOTA PALOPO
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO				231.792.947.552,00					238.975.053.139,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				231.792.947.552,00					238.975.053.139,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				231.792.947.552,00					238.975.053.139,00	
13	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	12.335.183.128,00				100 persen	12.658.810.536,00	

	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	5Dokumen	5 Dokumen	45.000.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	5Dokumen	45.000.000,00	
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	4 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Laporan	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	5Laporan	5 Laporan	6.277.000.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	5Laporan	6.277.000.000,00	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	255 Orang/bulan	85 Orang/bulan	6.100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	85 Orang/bulan	6.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.02	0003	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	4 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	1 Laporan	77.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Laporan	77.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	1Laporan	1 Laporan	20.000.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1Laporan	20.000.000,00	
	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Laporan	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	85Orang	85 Orang	170.200.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	85Orang	170.200.000,00	
	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	255 Paket	85 Paket	85.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	85 Paket	85.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	4 Dokumen	1.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	2 Orang	3.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2 Orang	3.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54 Orang	18 Orang	81.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	18 Orang	81.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO

	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	5Jenis	5 Jenis	444.000.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	5Jenis	444.000.000,00	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	120 Paket	40 Paket	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	40 Paket	4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	8 Paket	8.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	8 Paket	8.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144 Dokumen	48 Dokumen	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	48 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	100 Laporan	420.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	100 Laporan	420.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	33Jenis	33 Jenis	4.216.983.128,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	33Jenis	4.540.610.536,00	
	1	03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	3 Unit	105.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	3 Unit	105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Unit	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar										
							Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Unit	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	20 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	20 Unit	10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	5 Unit	67.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	5 Unit	67.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	2 Unit	1.784.483.128,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2 Unit	2.108.110.536,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Unit	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	627.000.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	3Jenis	627.000.000,00	

	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan	500 Laporan	63.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	500 Laporan	63.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	5 Laporan	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	5 Laporan	60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	504.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Laporan	504.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	134Unit	134 Unit	535.000.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	134Unit	535.000.000,00	
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Unit	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	80 Unit	240.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	80 Unit	240.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	10 Unit	5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	120.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	40 Unit	120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	70.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	3 Unit	70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
14	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas Wilayah Rawan Banjir dan Kawasan Produktif yang Sarana Prasarana Sumber Daya Airnya Ditangani	80 Ha	80 Ha	22.010.605.500,00				80 Ha	22.588.078.500,00	
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Lokasi Banjir/Genangan yang ditangani	25Ha	25 Ha	16.050.000.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	25Ha	16.050.000.000,00	
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai											
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	9 KM	3 KM	5.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	3 KM	5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	02	2.01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai											
							Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	4,5 KM	1.5 KM	9.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1,5 KM	9.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	9 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	3 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	02	2.01	0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai											

							Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	1,5 KM	0.5 KM	2.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	0,5 KM	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	6500Meter	7 KM	5.960.605.500,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	6500Meter	6.538.078.500,00	
	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan										
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1,5 KM	0.5 KM	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	0,5 KM	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan										
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	3 KM	1 KM	1.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 KM	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan										
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	15 KM	5 KM	4.300.105.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	5 KM	4.877.578.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan										
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,5 KM	0.5 KM	160.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	0,5 KM	160.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
15	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Telah Memiliki Akses Terhadap Air Minum	100 persen	100 persen	594.600.000,00				100 persen	610.200.000,00	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk berakses air minum	100persen	100 persen	594.600.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	100persen	610.200.000,00	
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan										
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	200 Liter/Detik	100 Liter/Detik	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	100 Liter/Detik	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan										
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	300 Liter/Detik	100 Liter/Detik	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	100 Liter/Detik	1.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan										
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	322 SR	100 SR	493.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	100 SR	509.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
16	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana Prasarana persampahan yang berfungsi dengan baik	50 persen	50 persen	297.300.000,00				50 persen	305.100.000,00	
	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Persampahan yang terbangun	1Unit	1 Unit	297.300.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1Unit	305.100.000,00	
	1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS										
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	300 Ton/hari	100 Ton/hari	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	100 Ton/hari	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	04	2.01	0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS										
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	300 Ton/hari	100 Ton/hari	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	100 Ton/hari	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	04	2.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS										

							Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	147.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Unit	155.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
17	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	100 persen	100 persen	198.200.000,00				100 persen	203.400.000,00	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tinggal bersanitasi	300SR	100 SR	198.200.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	100SR	203.400.000,00	
	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman										
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	21 M³/Hari	7 M³/Hari	67.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	7 M³/Hari	69.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja										
							Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	225 Rumah Tangga	75 Rumah Tangga	56.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	75 Rumah Tangga	56.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat										
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	30 Rumah Tangga	10 Rumah Tangga	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	10 Rumah Tangga	78.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
18	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat	49 persen	49 persen	1.164.425.000,00				49 persen	1.194.975.000,00	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase yang di bangun	2400Meter	2400 Meter	1.164.425.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2400Meter	1.194.975.000,00	
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan										
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	4200 Sistem Drainase Perkotaan	1400 Sistem Drainase Perkotaan	284.425.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1400 Sistem Drainase Perkotaan	314.975.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan										
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	7200 Sistem Drainase Perkotaan	2400 Sistem Drainase Perkotaan	480.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2400 Sistem Drainase Perkotaan	480.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan										
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	3 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan										
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	600 Sistem Drainase Perkotaan	200 Sistem Drainase Perkotaan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	200 Sistem Drainase Perkotaan	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
19	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Luas Permukiman yang Infrastrukturnya dikembangkan	0.03 Ha	0.03 Ha	792.800.000,00				0.03 Ha	813.600.000,00	
	1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Luas Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis yang terselenggara	300M2	300 M2	792.800.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	300M2	813.600.000,00	
	1	03	07	2.01	0009	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota										
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	3 Ton/hari	1 Ton/hari	192.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Ton/hari	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	07	2.01	0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota										
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	3 Ton/hari	1 Ton/hari	600.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Ton/hari	613.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
20	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung berizi yang Terbangun	80 persen	80 persen	108.516.929.684,00				80 persen	110.743.256.800,00	

	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung berizin yang dibangun	500Unit	500 Unit	108.516.929.684,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	500Unit	110.743.256.800,00	
	1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	30 Bangunan Gedung	10 Bangunan Gedung	8.215.985.532,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	13 Bangunan Gedung	17.353.548.194,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	29 Dokumen	11 Dokumen	99.800.944.152,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	9 Dokumen	92.639.708.606,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung										
							Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	60 Orang	20 Orang	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	20 Orang	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG										
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1500 Dokumen	500 Dokumen	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	500 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
21	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Luas ruang terbuka Hijau yang tertata	1.50 persen	1.50 persen	198.200.000,00				1.50 persen	203.400.000,00	
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Luas Ruang Terbuka Hijau RTH yang terselenggara	83Ha	83 Ha	198.200.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	83Ha	203.400.000,00	
	1	03	09	2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan										
							Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	3 Dokumen	1 Dokumen	48.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Dokumen	53.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya										
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	3 Kawasan	1 Kawasan	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Kawasan	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
22	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proprosi Panjang Jalan yang Berkondisi Baik	68 persen	68 persen	84.667.303.140,00				68 persen	88.623.256.603,00	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang ditangani	468 Km	468 Km	84.667.303.140,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	468 Km	88.623.256.603,00	
	1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan										
							Jumlah Jembatan yang Diganti	15 Jembatan	5 Jembatan	1.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	5 Jembatan	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan										
							Panjang Jalan yang Dibangun	15 KM	5 KM	15.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	5 KM	15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan										
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	30 KM	10 KM	42.648.173.140,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	10 KM	45.104.126.603,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan										
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	18 KM	6 KM	13.500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	6 KM	15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO

	1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar										
							Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	9 KM	3 KM	7.500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	3 KM	7.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan										
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	12 Jembatan	4 Jembatan	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	4 Jembatan	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan										
							Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	15 Jembatan	5 Jembatan	350.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	5 Jembatan	350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan										
							Jumlah Jembatan yang Dibangun	45 Jembatan	15 Jembatan	4.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	15 Jembatan	4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan										
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	3 KM	1 KM	319.130.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 KM	319.130.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan										
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0,6 KM	0.2 KM	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	0,2 KM	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
23	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	70 persen	70 persen	71.451.100,00				70 persen	73.325.700,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	1pelatihan	1 pelatihan	52.100.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1pelatihan	52.100.000,00	
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis										
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	60 Orang	20 Orang	27.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	20 Orang	27.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis										
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	60 Orang	20 Orang	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	20 Orang	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pelatihan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	1pelatihan	1 pelatihan	19.351.100,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1pelatihan	21.225.700,00	
	1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota										
							Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	3 Badan Usaha	1 Badan Usaha	19.351.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Badan Usaha	21.225.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
24	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pembangunan sesuai RTRW dan RDTR	100 Persen	100 Persen	945.950.000,00				100 Persen	957.650.000,00	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Rinci tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1Dokumen	1 Dokumen	934.950.000,00		-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1Dokumen	943.650.000,00	
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang										
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	57.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Dokumen	54.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota										
							Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1 Dokumen	870.950.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Dokumen	882.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO

	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang											
							Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	45 Orang	15 Laporan	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	15 Orang	7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan koordinasi Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan	3Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1Dokumen	3.000.000,00	
	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang											
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	3 Dokumen	1 Sistem Informasi	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan	6Dokumen	2 Dokumen	8.000.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2Dokumen	11.000.000,00	
	1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK											
							Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	3 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Dokumen	9.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
	1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	3 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Laporan	1.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO
						DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO				5.559.645.636,00					5.665.443.390,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.559.645.636,00					5.665.443.390,00	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				5.559.645.636,00					5.665.443.390,00	
25	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	3.710.909.798,00				100 persen	3.808.269.692,00	
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	7Dokumen	7 Dokumen	16.590.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7Dokumen	16.590.000,00	
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	14.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		14.100.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	2.490.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan		2.490.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	3Laporan	3 Laporan	2.851.094.306,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Laporan	2.948.454.200,00	
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		32 Orang/bulan	2.781.894.306,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		2.879.254.200,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	01	2.02	0003	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		20 Dokumen	64.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		64.200.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		16 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO

	1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	3Laporan	3 Laporan	7.950.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	3Laporan	7.950.000,00	
	1	04	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		3 Laporan	7.950.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		7.950.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	32Orang	32 Orang	51.055.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	32Orang	51.055.000,00	
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		32 Paket	14.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		14.400.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0 Orang	36.655.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		36.655.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	4Jenis	4 Jenis	334.365.344,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	4Jenis	370.946.844,00	
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		10 Paket	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		3.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10 Paket	3.031.344,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		3.031.344,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	2.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		2.400.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		80 Laporan	325.934.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		362.515.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	6Unit	6 Unit	137.501.500,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	6Unit	100.920.000,00	
	1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 Unit	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		47.020.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 Unit	96.501.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		14.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		7 Unit	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		39.900.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO

	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	266.803.648,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	3Jenis	266.803.648,00	
	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5 Laporan	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 Laporan	136.803.648,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		136.803.648,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		3 Laporan	90.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		90.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang pemeliharaanya di biayai	47Unit	47 Unit	45.550.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	47Unit	45.550.000,00	
	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	26.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		26.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		13 Unit	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		1.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		35 Unit	7.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		7.100.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	10.450.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		10.450.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
26	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi serta fasilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat terdampak program pemerintah	100 persen	100 persen	293.436.537,00				100 persen	291.135.175,00	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Penyediaan Rehab Rumah Korban Bencana/Relokasi Program	3Dokumen	3 Dokumen	24.000.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	3Dokumen	24.000.000,00	
	1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan										
							Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		1 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani										
							Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		1 Dokumen	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		4.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi		1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO

	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyediaan Rehab Rumah Korban Bencana	2Laporan	1 Laporan	20.000.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2Laporan	20.000.000,00	
	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana										
							Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		40 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator										
							Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih		20 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana/Relokasi Program yang dibangun/direhab	5Unit	10 Unit	163.601.450,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	5Unit	153.601.450,00	
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana										
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		3 Unit Rumah	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana										
							Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun		2 Unit Rumah	102.601.450,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		102.601.450,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota										
							Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota		5 Unit Rumah	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus/ Rumah susun yang dikelola	4Unit	4 Unit	85.835.087,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	4Unit	93.533.725,00	
	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun										
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		4 Laporan	3.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		3.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus										
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		4 Dokumen	82.335.087,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		90.033.725,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
27	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani	70 persen	70 persen	1.145.969.724,00				70 persen	1.145.969.724,00	
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Hasil survei dan dokumen kebijakan PKP	2Laporan/Dokumen	2 Laporan/Dokumen	102.400.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2Laporan/Dokumen	102.400.000,00	
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP										
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi		1 Dokumen	48.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		48.300.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh										
							Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		1 Dokumen	54.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		54.100.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	425,32Ha	297,72 Ha	1.043.569.724,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	425,32Ha	1.043.569.724,00	
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni										

							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		14 Unit Rumah	635.369.724,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		635.369.724,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh										
							Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		3 Dokumen	54.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		54.100.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh										
							Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar		5 Ha	354.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		354.100.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
28	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung Dengan PSU	43 persen	43 persen	395.059.177,00				43 persen	405.423.999,00	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Perumahan yang sudah terfasilitasi PSU	45Unit	40 Unit	395.059.177,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	45Unit	405.423.999,00	
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		5 Dokumen	140.568.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		140.568.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian										
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		40 Lokasi	226.641.177,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		237.005.999,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan										
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		25 Laporan	27.850.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		27.850.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
29	1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil yang Tersertifikasi dan Teregistrasi	10 persen	10 persen	14.270.400,00				10 persen	14.644.800,00	
	1	04	06	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah Pengembang yang teregistrasi dan tersertifikasi	10Orang	10 Orang	14.270.400,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	10Orang	14.644.800,00	
	1	04	06	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil										
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		10 Laporan	14.270.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		14.644.800,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
						DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO				5.510.668.230,00					5.591.552.431,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.510.668.230,00					5.591.552.431,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				5.510.668.230,00					5.591.552.431,00	
30	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	3.580.866.517,00				100 persen	3.613.387.000,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	5Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5Dokumen	10.000.000,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	7.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		7.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		2.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO

	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	15Laporan	15 Laporan	2.550.518.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	15Laporan	2.550.298.000,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		32 Orang/bulan	2.512.718.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		2.512.718.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	01	2.02	0003	Penatausahaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	34.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		34.800.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		1.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		1.280.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	1Laporan	1 Laporan	9.600.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Laporan	9.600.000,00	
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	9.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		9.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	31Orang	31 Orang	122.500.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	31Orang	122.500.000,00	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	95.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		95.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		2 Dokumen	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		2.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		2 Orang	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	4Jenis	4 Jenis	165.700.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Jenis	186.100.000,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	7.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		7.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	3.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		3.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36 Laporan	129.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	2Unit	2 Unit	100.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2Unit	105.000.000,00	

	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		60.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		45.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	495.048.517,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	515.000.000,00	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		35.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	130.048.517,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		130.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	325.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		350.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	27Unit	27 Unit	127.500.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	27Unit	114.889.000,00	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	27.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		27.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		13 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		12.389.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
31	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Layanan Pengaduan dan Evakuasi yang Dilaksanakan dengan Memenuhi Respon Time 15 Menit	100 persen	100 persen	1.929.801.713,00				100 persen	1.978.165.431,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Luas wilayah manajemen kebakaran (WMK) yang dilayani sesuai Responce Time	7.5 Km	7.5 Km	1.675.800.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7.5 Km	1.725.800.000,00	
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		4 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		12 Laporan	1.500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		1.550.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran		12 Dokumen	40.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		40.800.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota											

							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota		4 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		30.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran										
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		2 Orang	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		35.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		10 Unit	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		40.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran										
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran		6 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran	10Unit	10 Unit	25.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	10Unit	25.000.000,00	
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran										
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran		10 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran										
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		10 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi kejadian kebakaran	12Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Dokumen	15.000.000,00	
	1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran										
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian		12 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Masyarakat yang memperoleh sosialisasi dan edukasi	400Orang	400 Orang	62.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	400Orang	62.000.000,00	
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat										
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		400 Orang	17.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		17.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran										
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya		10 Desa/Kelurahan	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		35.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana										
							Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar		10 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah kejadian kondisi berbahaya yang tertangani	12Kejadian	12 Kejadian	152.001.713,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Kejadian	150.365.431,00	
	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia										
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia		12 Laporan	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
	1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi										
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal		12 Laporan	52.001.713,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		50.365.431,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO

	1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi											
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis		5 Unit	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		75.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO				3.668.548.215,00						3.593.548.815,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.668.548.215,00						3.593.548.815,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				3.668.548.215,00						3.593.548.815,00	
32	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	2.766.916.009,00					100 persen	2.766.916.009,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Total Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	9Dokumen	9 Dokumen	4.559.509,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	9Dokumen	4.559.509,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		21 Dokumen	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Laporan	1.559.509,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		1.559.509,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tota Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	4Laporan	4 Laporan	2.276.865.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	4Laporan	2.276.865.000,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.241.865.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	20 Orang/bulan	2.241.865.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	32.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	4 Dokumen	32.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2 Laporan	1.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	1.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	6 Laporan	1.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Total Jumlah laporan pengelolaan Aset	1Laporan	1 Laporan	7.231.500,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1Laporan	7.231.500,00	
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.231.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Laporan	7.231.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Total Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	22Orang	22 Orang	12.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	22Orang	12.000.000,00	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	20 Paket	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	20 Paket	3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	9.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2 Orang	9.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Total Jumlah Sub. Kegiatan Administrasi Umum yang di Tatakelolakan dan Total Jumlah barang milik daerah yang diadakan undefined	5Jenis	5 Jenis undefined undefined	119.460.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	5Jenis	119.460.000,00	

	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	7 Paket	7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	10 Paket	1.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	8 Paket	2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3.960.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	3 Dokumen	3.960.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	105.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	10 Laporan	105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Total Jumlah Aset yang Diadakan	1Unit / Tahun	3 Unit / Tahun	15.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1Unit / Tahun	15.000.000,00	
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	4 Unit	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	4 Unit	6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	9.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2 Unit	9.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Total Jumlah Jasa Penunjang Urusan Daerah yang Dibiayai	3Jenis	3 Jenis	248.800.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	3Jenis	248.800.000,00	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1750 Laporan	1750 Laporan	16.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1750 Laporan	16.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Laporan	3 Laporan	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	3 Laporan	60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	16 Laporan	172.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	16 Laporan	172.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Total Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pemeliharaannya Dibiayai	24Unit / Tahun	24 Unit / Tahun	83.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	24Unit / Tahun	83.000.000,00	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Unit	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	28.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	17 Unit	28.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	9 Unit	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	17 Unit	3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	27.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Unit	27.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
33	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Total Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana undefined	100persen	100 persen undefined undefined	901.632.206,00				100persen	826.632.806,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Total jumlah penduduk yang memperoleh informasi rawan bencana, layanan pencegahan sdan kesiapsiagaan serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100Persen	100 Persen	8.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	100Persen	8.000.000,00	
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)										
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		35 Orang	8.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		8.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Jenis Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Bencana yang dilaksanakan Jumlah Jenis Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Bencana yang dilaksanakan	100Persen 7Jenis	100 Persen 7 Jenis	77.766.206,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	100Persen 7Jenis	77.766.206,00	
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota										
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit	1 Unit	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Unit	4.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota										
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota		100 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana										
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana		1 Kawasan	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota										
							Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana		15 Orang	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		1 Dokumen	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana										
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		1 Dokumen	3.766.206,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		3.766.206,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota										
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya		2 laporan	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota										
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		1 Dokumen	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		4.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota										
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		1 Kawasan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bnecana yang dilaksanakan Jumlah Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bnecana yang dilaksanakan	100Persen 3Jenis	100 Persen 3 Jenis	779.866.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	100Persen 3Jenis	739.866.600,00	

	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	3.266.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Dokumen	3.266.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota										
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	36 Orang	500 Orang	710.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	36 Orang	710.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	03	2.03	0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota										
							Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal		1 Dokumen	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota										
							Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis		54 Orang	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota										
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Orang	10 Orang	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	10 Orang	1.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana										
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota		5 Laporan	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah Jumlah Jenis Penataan Sistem Dasar Penangulangan Bencana yang dilaksanakan Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100Persen 2Jenis	1 Dokumen 100 Persen 1 Laporan	36.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	100Persen 2Jenis	1.000.000,00	
	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana										
							Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Laporan	500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota										
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Kegiatan	500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota										
							Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		2 Dokumen	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO				7.340.762.868,01					6.462.250.669,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.340.762.868,01					6.462.250.669,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				7.340.762.868,01					6.462.250.669,00	
34	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	4.135.139.418,01				100 persen	3.975.468.655,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	9Dokumen	9 Dokumen	850.000,00		Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	9Dokumen	850.000,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen Dokumen	500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 Laporan Laporan	350.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO

	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	111Laporan	111 Laporan	3.213.819.417,00		Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	111Laporan	3.249.598.655,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40 Orang Orang/bulan	3.152.149.417,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		3.187.928.655,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
	1	05	01	2.02	0003	Pemeriksaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		84 Dokumen Dokumen	60.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		60.720.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Laporan Laporan	420.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		13 Laporan Laporan	650.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		650.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	12Laporan	12 Laporan	7.920.000,00		Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Laporan	7.920.000,00	
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan Laporan	7.920.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		7.920.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	101Orang	101 Orang	247.450.001,01		Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	101Orang	102.000.000,00	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		101 Paket Paket	247.450.001,01	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		102.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	4jenis	4 jenis	293.600.000,00		Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4jenis	243.600.000,00	
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket Paket	11.412.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket Paket	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		60 Dokumen Dokumen	6.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		6.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 Laporan Laporan	269.588.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	83Jenis	83 Jenis	158.500.000,00		Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	83Jenis	158.500.000,00	
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		22 Unit Unit	26.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		26.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		61 Unit Unit	132.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		132.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO

	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	4Jenis	4 Jenis	178.750.000,00		Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Jenis	178.750.000,00	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan Laporan	24.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		24.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan Laporan	12.650.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		12.650.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		132 Laporan Laporan	77.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		77.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		50 Laporan Laporan	64.900.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		64.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	32Unit	32 Unit	34.250.000,00		Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	32Unit	34.250.000,00	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		2 Unit Unit	24.250.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		24.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		20 Unit Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
35	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Total Persentase Rata - rata Gangguan Trantibum dan Perda/Perkada yang dapat diselesaikan	100 persen	100 persen	3.205.623.450,00				100 persen	2.486.782.014,00	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan pencegahan dan penindakan gangguan trantibum serta pemberdayaan perlindungan masyarakat	1717Laporan	4867 Laporan	2.987.823.450,00		Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1717Laporan	2.268.982.014,00	
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		12 Dokumen Dokumen	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum											
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		3150 Dokumen Dokumen	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		322.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia											
							Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		600 Orang Orang	64.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		68.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan											
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		731 Laporan laporan	1.802.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		1.436.588.949,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa											
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		216 Laporan Laporan	926.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		189.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah											
							Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		2 Laporan Laporan	14.523.450,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		12.793.065,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO

	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia		202 Unit Unit	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		180.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	100Laporan	-	217.800.000,00		Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	100Laporan	217.800.000,00	
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		5 Laporan Laporan	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		36 Laporan Laporan	96.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		96.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		36 Laporan Laporan	76.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		76.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO
						DINAS SOSIAL KOTA PALOPO				4.483.048.142,00					5.234.291.549,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.269.058.142,00					5.017.091.549,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4.269.058.142,00					5.017.091.549,00	
36	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	2.943.144.560,00				100 persen	3.158.315.900,00	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	4Dokumen	4 Dokumen	11.605.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Dokumen	12.200.000,00	
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	5.605.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Dokumen	6.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	6.200.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	3Laporan	3 Laporan	2.559.880.560,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Laporan	2.781.779.900,00	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.528.380.660,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30 Orang/bulan	2.744.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	01	2.02	0003	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	900 Dokumen	900 Dokumen	30.099.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	900 Dokumen	36.099.900,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	2 Laporan	1.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Laporan	1.680.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	45Orang	45 Orang	35.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	45Orang	8.700.000,00	
	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Paket	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30 Paket	3.600.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	2 Orang	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Orang	5.100.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	3Jenis	3 Jenis	2.800.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	2.900.000,00	
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	1.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	20 Paket	1.650.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	1.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Dokumen	1.250.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	3Jenis	4 Jenis	30.600.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	31.140.000,00	
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4 Unit	30.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Unit	31.140.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3Jasa	-	189.759.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jasa	197.700.000,00	
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800 Laporan	100 Laporan	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	800 Laporan	32.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Laporan	6 Laporan	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	9 Laporan	61.200.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan	99.759.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	10 Laporan	104.500.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	61Unit	50 Unit	113.500.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	61Unit	123.896.000,00	
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	40.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	48.600.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	21 Unit	54.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	21 Unit	55.896.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	39 Unit	3.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	39 Unit	3.400.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Unit	16.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
37	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Rumah Tangga/ Keluarga Miskin yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial	undefined undefined	undefined undefined	115.098.500,00				undefined undefined	194.000.000,00	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	6potensi	-	115.098.500,00		Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2potensi	194.000.000,00	
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	9 Orang	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	9 Orang	74.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Keluarga	12 Keluarga	97.019.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Keluarga	99.500.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)										
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Sertifikat	1 Sertifikat	18.079.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Sertifikat	20.500.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
38	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	-	-	4.000.000,00				-	5.200.000,00	
	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah kasus korban tindak kekerasan migran yang diseleksaikan	12Orang	4 Orang	4.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6Orang	5.200.000,00	
	1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal										
							Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	2 Orang	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	15 Orang	5.200.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
39	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	-	143.547.039,00				-	300.975.649,00	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	306Orang	-	143.547.039,00		-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	102Orang	223.975.649,00	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		50 Orang	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		25.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang										
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		50 Orang	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		20.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	5 Orang	20.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Orang	20.410.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		25 Orang	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		30.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial										
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	50 Orang	67.326.039,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	100 Orang	68.565.649,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat										

							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		25 Orang	55.721.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		60.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	300Orang	-	0,00		Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	100Orang	77.000.000,00	
	1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang										
							Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		50 Orang	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		50.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial										
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	5 Orang	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	100 Orang	20.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		15 Dokumen	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		7.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
40	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 persen	100 persen	765.852.000,00				100 persen	908.200.000,00	
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak - Anak Terlantar luar panti yang di pantau	50Orang	50 Orang	11.000.000,00		Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	50Orang	14.200.000,00	
	1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar										
							Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	11.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	50 Orang	14.200.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	20.526Orang	20.526 Orang	754.852.000,00		Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	20.526Orang	894.000.000,00	
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										
							0		0 0	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		60.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	14407 Keluarga	500 Keluarga	106.452.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	14407 Keluarga	112.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga										
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Keluarga	1750 Keluarga	648.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1750 Keluarga	662.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat										
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		50 Orang	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		60.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
41	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100 persen	100 persen	252.569.043,00				100 persen	388.400.000,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang diberikan pelayanan	100Jiwa	100 Jiwa	105.769.043,00		Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	100Jiwa	152.400.000,00	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		50 Orang	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		40.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi										
							Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Unit	54.903.043,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		60.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO

	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial											
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	50 Orang	50.866.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	100 Orang	52.400.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	5Lokasi	-	146.800.000,00		Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5Lokasi	236.000.000,00	
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana											
							Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Kampung	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		86.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana											
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	35 Orang	146.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	35 Orang	150.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
42	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Luas Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	2.50 Ha	2.50 Ha	44.847.000,00				2.50 Ha	62.000.000,00	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	12Unit	-	44.847.000,00		Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Unit	62.000.000,00	
	1	06	07	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		1 Dokumen	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	1 Makam	44.847.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Makam	51.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	1	06	07	2.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		12 Laporan	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		6.000.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
	X					NON URUSAN				213.990.000,00					217.200.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				213.990.000,00					217.200.000,00	
43	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	213.990.000,00				100 persen	217.200.000,00	
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	3Jenis	3 Jenis	213.990.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	217.200.000,00	
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40 SPPD Laporan	213.990.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		217.200.000,00	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO
						DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO				2.952.775.672,99					3.030.245.063,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.952.775.672,99					3.030.245.063,00	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				2.952.775.672,99					3.030.245.063,00	
44	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	2.396.841.671,99				100 persen	2.460.197.760,00	
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	7Dokumen	7 Dokumen	1.200.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	7Dokumen	1.700.000,00	
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	5 Dokumen	700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	5 Dokumen	1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2 Laporan	500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Laporan	700.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	18Laporan	18 Laporan	2.102.192.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	18Laporan	2.108.037.000,00	
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.019.592.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	23 Orang/bulan	2.025.137.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	01	2.02	0003	Penatausahaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	81.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Dokumen	81.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	1 Laporan	300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Laporan	300.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan	18 Laporan	1.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	18 Laporan	1.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	5Laporan	5 Laporan	7.467.110,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	5Laporan	7.467.110,00	
	2	07	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan	5 Laporan	7.467.110,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	5 Laporan	7.467.110,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang Dikelola	23Jenis	19 Orang	22.000.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	23Jenis	33.500.000,00	
	2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	69 Paket	19 Paket	11.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	23 Paket	13.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	1 Orang	11.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Orang	20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	2Jenis	2 Jenis	64.640.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2Jenis	97.640.000,00	
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	12 Dokumen	2.640.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Dokumen	2.640.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	20 Laporan	62.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	30 Laporan	95.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	3Jenis	1 Unit	10.000.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3Jenis	20.000.000,00	

	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	1 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4 Unit	20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dibiayai	3Jenis	3 Jasa	145.179.561,99		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3Jenis	145.853.650,00	
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	12 Laporan	16.957.135,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	18.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	51.392.266,99	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	51.023.490,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	76.830.160,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	76.830.160,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	51Unit	50 Unit	44.163.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	51Unit	46.000.000,00	
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	1 Unit	18.750.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	18.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69 Unit	23 Unit	17.750.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	23 Unit	17.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	24 Unit	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	25 Unit	4.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	2 Unit	3.663.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Unit	5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
45	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Ditetapkan	100 persen	100 persen	18.000.000,00				100 persen	18.000.000,00	
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Disusun	1Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1Dokumen	18.000.000,00	
	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro											
							Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	3 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Dokumen	18.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
46	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	79 persen	79 persen	401.355.000,00				79 persen	411.885.000,00	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jenis Pelatihan Berdasarkan Kompetensi	8Jenis	8 Jenis	398.355.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	8Jenis	408.885.000,00	
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi											

							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	384 Orang	128 Orang	325.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	128 Orang	327.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota										
							Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	50 Unit	16 Unit	73.355.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	16 Unit	81.885.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	16Lembaga	15 Lembaga	3.000.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	16Lembaga	3.000.000,00	
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta										
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	45 Lembaga	15 Lembaga	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	16 Lembaga	3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
47	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	55 persen	55 persen	114.918.367,00				55 persen	117.933.379,00	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberikan Pelayanan	2700Orang	2600 Orang	62.918.367,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2700Orang	62.962.025,00	
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja										
							Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	3797 Orang	1265 Orang	47.918.367,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1344 Orang	47.962.025,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja										
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	60 Orang	20 Orang	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	20 Orang	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang Berizin	1Lembaga	0 Lembaga	0,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1Lembaga	1.000.000,00	
	2	07	04	2.02	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi										
							Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	1 Lembaga	0 Lembaga	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Lembaga	300.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	04	2.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS										
							Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	1 Lembaga	0 Lembaga	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Lembaga	700.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang menerima informasi pasar kerja	600Orang	500 Orang	52.000.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	600Orang	53.971.354,00	
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online										
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	370 Orang	120 Orang	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	150 Orang	13.971.354,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja										
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	300 Orang	100 Orang	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	120 Orang	40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
48	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	31 persen	31 persen	21.660.634,00				31 persen	22.228.924,00	
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang Disahkan	15Peraturan	12 Peraturan	11.860.634,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	15Peraturan	12.271.574,00	
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan										

							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	37 Perusahaan	12 Perusahaan	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	15 Perusahaan	1.371.574,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan										
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	525 Laporan	175 Laporan	10.860.634,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	200 Laporan	10.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Dilaporkan	20Kasus	19 Kasus	9.800.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	20Kasus	9.957.350,00	
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	57 Perkara	19 Perkara	6.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	20 Perkara	6.957.350,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja										
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	120 Orang	40 Orang	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	40 Orang	3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO
						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO				2.790.199.149,00				2.526.855.507,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.790.199.149,00				2.526.855.507,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2.790.199.149,00				2.526.855.507,00	
49	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.111.106.532,00			-	2.122.137.532,00	
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	5Dokumen	-	3.600.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5Dokumen	3.600.000,00	
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	1.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Dokumen	1.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Laporan	1.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	12Laporan	12 Laporan	1.777.923.532,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Laporan	1.777.923.000,00	
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	40 Orang/bulan	1.716.523.532,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	20 Orang/bulan	1.716.523.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59600000 Dokumen	14 Dokumen	59.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	59600000 Dokumen	59.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	900.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	900.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO

	2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	1Laporan	1 Laporan	12.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Laporan	12.000.000,00	
	2	08	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	20Orang	20 Orang	20.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	20Orang	42.500.000,00	
	2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	40 Paket	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	40 Paket	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	4 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Orang	32.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	6Jenis	6 Jenis	62.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6Jenis	79.085.000,00	
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	25 Paket	1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	35 Paket	1.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	10 Paket	1.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6 Laporan	2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	32 Laporan	56.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	35 Laporan	73.085.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	3Unit	3 Unit	57.700.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Unit	53.200.000,00	
	2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	7 Unit	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Unit	14.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	22.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Unit	39.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO

	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	142.183.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	146.229.532,00	
	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	35.953.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	38.499.532,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1 Laporan	38.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Laporan	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	67.730.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	67.730.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	5Unit	5 Unit	35.700.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5Unit	7.600.000,00	
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	30.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel										
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Unit	500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	17 Unit	2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
50	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	25 persen	25 persen	185.925.492,00				25 persen	186.000.000,00	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PUG pada Lembaga Pemerintah	49Perangkat Daerah	49 Perangkat Daerah	85.925.492,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	49Perangkat Daerah	86.000.000,00	
	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG										
							Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota										
							Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG		49 Orang	45.925.492,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		46.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perempuan Pemberdayaan Perempuan	4Layanan	4 Layanan	100.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Layanan	100.000.000,00	

	2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
51	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang Menyediakan Layanan Perlindungan Perempuan yang Terstandarisasi	2 persen	2 persen	137.092.975,00				2 persen	40.367.975,00	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-		64.225.000,00		-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	-	0,00	
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	64.225.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	57.867.975,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	-	25.367.975,00	
	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		5 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		4 Layanan	37.867.975,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.367.975,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	15.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	-	15.000.000,00	
	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		4 Orang	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
52	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin yang Mendapatkan Pembinaan Kualitas Keluarga	100 persen	100 persen	49.550.000,00				100 persen	50.000.000,00	
	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	1Lembaga	1 Lembaga	49.550.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Lembaga	50.000.000,00	
	2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	49.550.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Lembaga	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
53	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Sistem Data Gender dan Anak yang Berfungsi Baik	1 Sistem	1 Sistem	3.747.800,00				1 Sistem	3.800.000,00	
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Gender dan Anak di Tingkat OPD	49Laporan	49 Laporan	3.747.800,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	49Laporan	3.800.000,00	
	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	49 Dokumen	49 Dokumen	3.747.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	49 Dokumen	3.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
54	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Angka Tngkat Pemenuhan Layak Anak	750 Poin	750 Poin	22.126.350,00				750 Poin	22.350.000,00	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dan Dunia Usaha di Kota Palopo	25Lembaga	25 Lembaga	19.626.350,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	25Lembaga	19.850.000,00	
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota											

							Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	50 Organisasi	10 Organisasi	11.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	50 Organisasi	11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	8.626.350,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	8.850.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	2.500.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	-	2.500.000,00	
	2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
55	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Diselesaikan	100 persen	100 persen	280.650.000,00				100 persen	102.200.000,00	
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	53.120.000,00		-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5Perangkat Daerah	25.000.000,00	
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA										
							Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		5 Orang	28.120.000,00	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	07	2.01	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota										
							Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	5 Dokuman	5 Dokumen	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Dokuman	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Berkoordinasi dalam Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	5Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	177.530.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5Perangkat Daerah	25.000.000,00	
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	11 Orang	11 Orang	24.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	11 Orang	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK										
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		11 Layanan	153.430.000,00	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	3Lembaga	3 Lembaga	50.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Lembaga	52.200.000,00	
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/										
							Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	1 Orang	1 Orang	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Orang	35.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
	2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota										
							Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	16.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
						DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO				2.368.673.335,00					2.427.138.145,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.368.673.335,00					2.427.138.145,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				2.368.673.335,00					2.427.138.145,00	
56	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	2.075.010.900,00				100 persen	2.128.201.145,00	

	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	9Dokumen	8 Dokumen	1.950.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	9Dokumen	1.950.000,00	
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	6 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	7 Dokumen	1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2 Laporan	950.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Laporan	950.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	12Laporan	12 Laporan	1.689.455.300,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12Laporan	1.717.845.545,00	
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1.645.155.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	22 Orang/bulan	1.673.545.545,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	01	2.02	0003	Penyusunan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	1 Dokumen	43.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Dokumen	43.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan	18 Laporan	1.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	18 Laporan	1.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	12Laporan	12 Laporan	6.500.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12Laporan	6.500.000,00	
	2	09	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	8 Laporan	6.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	8 Laporan	6.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	39Orang	39 Orang	55.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	39Orang	55.000.000,00	
	2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	35 Paket	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	35 Paket	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	1 Orang	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Orang	5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang	3 Orang	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3 Orang	30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	3Jenis	3 Jenis	127.140.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3Jenis	127.140.000,00	
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Paket	2.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Paket	2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	2 Dokumen	2.640.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Dokumen	2.640.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135 Laporan	45 Laporan	120.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	45 Laporan	120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	3Jenis	3 Jenis	38.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3Jenis	38.000.000,00	
	2	09	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	17.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	17.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	2 Unit	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Unit	6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	2 Unit	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Unit	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	36Jenis	36 Jenis	116.476.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	36Jenis	141.276.000,00	
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	36.476.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	36.476.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	64.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	4Unit	4 Unit	40.489.600,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4Unit	40.489.600,00	
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	26.250.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	26.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	16 Unit	3.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel										
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	4 Unit	1.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4 Unit	1.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	30 Unit	4.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	30 Unit	4.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	5.039.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	5.039.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
57	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah kelompok tani yang memanfaatkan infrastruktur ketahanan pangan	2 Kelompok Tani	2 Kelompok Tani	198.200.000,00				2 Kelompok Tani	203.400.000,00	

	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Tani yang Memanfaatkan Infrastruktur Ketahanan Pangan	2Kelompok	2 Kelompok	198.200.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2Kelompok	203.400.000,00	
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya											
							Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	3 Unit	1 Unit	91.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	96.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik											
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	3 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	02	2.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	3 unit	1 unit	91.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 unit	92.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
58	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Lokasi Rawan Pangan yang Melaksanakan Diversifikasi Pangan	24 persen	24 persen	38.469.034,00				24 persen	37.048.313,00	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kebutuhan pangan pokok atau pangan lainnya	18,47Ton	17,9 Ton	23.330.634,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	18,47Ton	21.909.913,00	
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal											
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Laporan	8.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya											
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Laporan	1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga											
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	300 Keluarga	100 Keluarga	4.030.634,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	100 Keluarga	4.859.913,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota											
							Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	3 Laporan	1 Laporan	3.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Laporan	3.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan											
							Informasi Harga dan Pasokan Pangan	3 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)											
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	3 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Dokumen	250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pengelola cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah Daerah	48Kelompok	48 Kelompok	4.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	48Kelompok	4.000.000,00	
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	9 Ton	3 Ton	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3 Ton	4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka kecukupan gizi masyarakat Kota Palopo	86,2 Skor	85,5 Skor	11.138.400,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	86,2 Skor	11.138.400,00	
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun											
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Dokumen	8.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal											
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	1 Laporan	2.738.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Laporan	2.738.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO

59	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Lokasi Rawan Pangan yang Melaksanakan Diversifikasi Pangan	6 Kelurahan	6 Kelurahan	35.923.750,00				6 Kelurahan	36.866.250,00	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terdeteksinya daerah rawan pangan dan rentan pangan	48Kelurahan	48 Kelurahan	5.923.750,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	48Kelurahan	6.250.000,00	
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan										
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	3 Dokumen	1 Dokumen	5.923.750,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Dokumen	6.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pengelola cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah Daerah	2Kelompok	2 Kelompok	30.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2Kelompok	30.616.250,00	
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Dokumen	10.616.250,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi										
							Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi		1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota										
							Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
60	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanaan Pangan	92 persen	92 persen	21.069.651,00				92 persen	21.622.437,00	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan	5Dokumen	5 Dokumen	21.069.651,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	5Dokumen	21.622.437,00	
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan										
							Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	3 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	3 Dokumen	1 Dokumen	17.069.651,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Dokumen	17.622.437,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan										
							Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	3 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Laporan	1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan										
							Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	3 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO
						DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO				10.016.844.871,00					10.217.181.766,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.016.844.871,00					10.217.181.766,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				10.016.844.871,00					10.217.181.766,00	
61	2	10	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	2.446.351.551,00				100 persen	2.495.278.581,00	
	2	10	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	4Dokumen	4 Dokumen	4.971.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	4Dokumen	5.070.420,00	
	2	10	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	2.271.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	4 Dokumen	2.316.420,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
	2	10	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2 Laporan	2.754.000,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
	2	10	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	12Laporan	12 Laporan	2.063.553.071,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12Laporan	2.104.824.132,00	
	2	10	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.010.681.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	23 Orang/bulan	2.050.894.620,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
	2	10	01	2.02	0003	Penatausahaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	50.481.150,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Dokumen	51.490.773,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
	2	10	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	12 Laporan	2.390.921,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	15 Laporan	2.438.739,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
	2	10	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	5Laporan	5 Laporan	7.770.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	5Laporan	7.925.400,00	
	2	10	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	7.770.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Laporan	7.925.400,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
	2	10	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	23Orang	23 Orang	47.000.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	23Orang	47.940.000,00	
	2	10	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	33 Paket	33 Paket	22.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	33 Paket	22.440.000,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
	2	10	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2 Orang	25.500.000,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
	2	10	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	1Jenis	1 Jenis	105.925.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1Jenis	108.043.500,00	
	2	10	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	645.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	6 Paket	657.900,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
	2	10	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	5.280.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	3 Dokumen	5.385.600,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
	2	10	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	63 Laporan	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	63 Laporan	102.000.000,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
	2	10	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	2Jenis	2 Jenis	25.232.480,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2Jenis	25.737.129,00	

	2	10	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	15 Unit	15.300.000,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
	2	10	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	10.232.480,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2 Unit	10.437.129,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
	2	10	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	12Jenis	12 Jenis	167.800.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12Jenis	171.156.000,00	
	2	10	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Laporan	25.500.000,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
	2	10	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Laporan	7.956.000,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
	2	10	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	135.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Laporan	137.700.000,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
	2	10	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	19Unit	19 Unit	24.100.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	19Unit	24.582.000,00	
	2	10	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	17.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Unit	18.054.000,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
	2	10	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	2.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	11 Unit	2.142.000,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
	2	10	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	4.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	7 Unit	4.386.000,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
62	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	81 persen	81 persen	91.979.570,00				81 persen	93.819.161,00	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang diselesaikan	18Laporan	18 Laporan	91.979.570,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	18Laporan	93.819.161,00	
	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		3 Berita Acara	70.537.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		71.948.046,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
	2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		8 Dokumen	21.442.270,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		21.871.115,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
63	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Subjek Ganti Kerugian Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah	60 persen	60 persen	7.449.392.000,00				60 persen	7.598.379.840,00	

	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah kota	8Dokumen	7 Dokumen	7.449.392.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	8Dokumen	7.598.379.840,00	
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	7 Dokumen	7.449.392.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	8 Dokumen	7.598.379.840,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
64	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Penetapan Objek Redistribusi Tanah	persen	persen	0,00				persen	0,00	
	2	10	06	2.02		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	-	0,00	
	2	10	06	2.02	0001	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		0,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
65	2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pengelolaan Objek Tanah Kosong	51 persen	51 persen	10.658.610,00				51 persen	10.871.782,00	
	2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah laporan tanah kosong dalam 1(satu) kab/kota yang diinventarisasi	2Laporan	2 Laporan	10.658.610,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2Laporan	10.871.782,00	
	2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong										
							Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	2 Laporan	2 Laporan	10.658.610,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2 Laporan	10.871.782,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
66	2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Penyelesaian Ijin lokasi tanah Negara	100 persen	100 persen	9.201.840,00				100 persen	9.385.876,00	
	2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah pemanfaatan tanah negara	6Dokumen	6 Dokumen	9.201.840,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	6Dokumen	9.385.876,00	
	2	10	09	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah										
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah		6 Dokumen	9.201.840,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		9.385.876,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
67	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Luas pemanafaatan dan penggunaan tanah	12 Ha	12 Ha	9.261.300,00				12 Ha	9.446.526,00	
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Data pemanfaatan dan penggunaan tanah dalam satu kabupaten/Kota	8Dokumen	8 Dokumen	9.261.300,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	8Dokumen	9.446.526,00	
	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah										
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	8 Laporan	8 Laporan	9.261.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	8 Laporan	9.446.526,00	DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO				43.938.908.215,01					44.648.800.038,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				43.938.908.215,01					44.648.800.038,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				27.057.799.875,01					27.767.691.698,00	
68	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	7.704.441.216,01				100 persen	7.906.575.895,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	7Dokumen	7 Dokumen	112.000.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	7Dokumen	112.000.000,00	
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 Dokumen	7 Dokumen	105.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	7 Dokumen	105.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Laporan	7.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	12Laporan	12 Laporan	6.497.941.216,01		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12Laporan	6.700.075.895,00	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	6.302.941.216,01	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	88 Orang/bulan	6.505.075.895,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Dokumen	95.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Laporan	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Laporan	5.000.000,00	
	2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Laporan	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	88Orang	88 Orang	100.000.000,00		-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	88Orang	100.000.000,00	
	2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	264 Paket	88 Paket	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	88 Paket	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	10 Orang	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	10 Orang	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	10 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	10 Orang	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	5Jenis	5 Jenis	277.000.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	5Jenis	277.000.000,00	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45 Paket	15 Paket	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	15 Paket	2.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	51 Paket	17 Paket	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	17 Paket	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4 Dokumen	3.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	4 Dokumen	3.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2 Laporan	6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Laporan	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	5Jenis	5 Jenis	120.000.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	5Jenis	120.000.000,00	
	2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Unit	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	72 Unit	24 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	24 Unit	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	52 Unit	14 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	14 Unit	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Unit	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Unit	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	405.000.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	3Jenis	405.000.000,00	
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Laporan	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Laporan	36 Laporan	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	36 Laporan	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Laporan	180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	48unit	48 unit	187.500.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	48unit	187.500.000,00	
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	1 Unit	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Unit	35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	12 Unit	80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Unit	80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar											
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 Unit	1 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Unit	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	36 Unit	12 Unit	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Unit	2.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	20 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	20 Unit	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	2 Unit	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2 Unit	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
69	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Kajian Lingkungan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	223.606.763,00				1 Dokumen	229.473.338,00	
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Yang Disusun dan di Telaah	2Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2Dokumen	100.000.000,00	
	2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota										
							jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokuman	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Dokuman	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	2Dokumen	-	73.606.763,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2Dokumen	129.473.338,00	
	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD										
							Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	02	2.02	0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup										
							Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	3 Dokumen	1 Dokumen	23.606.763,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Dokumen	29.473.338,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
70	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Status Kualitas Air dan Udara	15 Nilai	15 Nilai	409.434.524,00				15 Nilai	420.176.499,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Uji Kualitas Lingkungan Hidup	5Dokumen	5 Dokumen	394.434.524,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	5Dokumen	405.176.499,00	
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut										
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	6 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2 Dokumen	160.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota										
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	6 Dokumen	2 Dokumen	184.434.524,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2 Dokumen	195.176.499,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Terkait Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4Laporan	4 Laporan	15.000.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	4Laporan	15.000.000,00	
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat										
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	12 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	4 Laporan	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
71	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang dikelola/ditangani	1176 Ha	1176 Ha	3.958.251.407,00				1176 Ha	4.062.100.586,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Yang Baik	48,5Ha	48,3 Ha	3.958.251.407,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	48,5Ha	4.062.100.586,00	
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati										
							Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO

	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)											
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	48.5 Ha	48,3 Ha	3.933.251.407,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	48.5 Ha	4.012.100.586,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
72	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Sumber Limbah B3 di Kota Palopo yang diawasi	72 persen	72 persen	176.257.575,00				72 persen	180.881.891,00	
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Limbah B3 di Kabupaten/Kota	30Laporan	80 Laporan	16.257.575,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	30Laporan	20.881.891,00	
	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3											
							Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	90 Laporan	80 Laporan	16.257.575,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	30 Laporan	20.881.891,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	1Dokumen	1 Dokumen	160.000.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1Dokumen	160.000.000,00	
	2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	3 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Dokumen	160.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
73	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Izin tentang Lingkungan yang Diproses Tepat Waktu	100 persen	100 persen	14.914.550,00				100 persen	15.305.850,00	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	12,55 persen	12,08 persen	14.914.550,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12,55 persen	15.305.850,00	
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH											
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	3 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup											
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		65 Badan Usaha	4.914.550,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		5.305.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
74	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Aktif	100 persen	100 persen	28.603.729,00				100 persen	29.354.180,00	
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1Dokumen	1 Dokumen	28.603.729,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1Dokumen	29.354.180,00	
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup											
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	1 Dokumen	28.603.729,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Dokumen	29.354.180,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
75	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah binaan yang berpredikat adiwiyata	100 persen	100 persen	25.766.000,00				100 persen	26.442.000,00	
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang Diberikan Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14Sekolah	14 Sekolah	25.766.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	14Sekolah	26.442.000,00	
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup											
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	42 Entitas	14 Entitas	25.766.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	14 Entitas	26.442.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
76	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	100 persen	100 persen	28.416.920,00				100 persen	29.162.475,00	

	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	1Dokumen	1 Dokumen	28.416.920,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1Dokumen	29.162.475,00	
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota											
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	3 Pengaduan	8 Pengaduan	28.416.920,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Pengaduan	29.162.475,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
77	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan area pelayanan	90 persen	90 persen	14.488.107.191,00				90 persen	14.868.218.984,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Timbulan Sampah yang Dikelola	75,20persen	75,00 persen	14.488.107.191,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	75,20persen	14.868.218.984,00	
	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	1 Unit	1.718.422.841,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Unit	1.850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota											
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	3 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Dokumen	14.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	11	2.01	0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah											
							Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	120 Unit	40 Unit	4.600.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	40 Unit	4.600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah											
							Jumlah sampah yang terdaur ulang	6 Ton	550 Ton	370.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2 Ton	370.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional											
							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	69600 Ton	23200 Ton	7.675.684.350,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	23300 Ton	7.924.218.984,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	11	11	2.01	0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan											
							jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	3 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				16.881.108.340,00					16.881.108.340,00	
78	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase cakupan area pelayanan penerangan jalan umum	90 persen	90 persen	16.881.108.340,00				90 persen	16.881.108.340,00	
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten /Kota Yang Terbangun dan Terpelihara	1.100unit	1.100 unit	16.881.108.340,00		-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1.100unit	16.881.108.340,00	
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	3000 Unit	100 Unit	8.973.562.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1000 Unit	8.973.562.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		1000 Unit	7.907.546.340,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		7.907.546.340,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO				3.434.388.022,00					3.420.063.675,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.434.388.022,00					3.420.063.675,00	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3.434.388.022,00					3.420.063.675,00	
79	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	3.227.979.097,00				100 persen	3.220.654.750,00	

	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	8Dokumen	8 Dokumen	4.600.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	8Dokumen	4.600.000,00		
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	8 Laporan	4.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Laporan	4.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	29Laporan	29 Laporan	2.395.833.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	29Laporan	2.395.833.000,00		
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.340.442.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	27 Orang/bulan	2.340.442.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
	2	12	01	2.02	0003	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	51.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokumen	51.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
	2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.391.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	1.391.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	16 Laporan	2.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	16 Laporan	2.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
	2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	12Laporan	12 Laporan	8.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Laporan	8.000.000,00		
	2	12	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	33Orang	27 Orang	10.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	33Orang	10.000.000,00		
	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		27 Paket	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	100Jenis	100 Jenis	256.949.347,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	100Jenis	252.125.000,00		
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.125.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Paket	1.125.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Paket	1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	90 Laporan	254.824.347,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	90 Laporan	250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	5unit	2 unit	50.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5unit	100.000.000,00		
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Unit	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO

	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	456.802.150,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	365.519.192,00	
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	291.282.958,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	90.016.272,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	90.016.272,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	75.502.920,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	75.502.920,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	50unit	49 unit	45.794.600,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	50unit	84.577.558,00	
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	21.414.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	21.414.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	11 Unit	2.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Unit	40.982.958,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	36 Unit	12.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	36 Unit	12.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	9.880.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	9.880.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
80	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Perekaman Wajib KTP dan Penerbitan Kartu Identitas Anak	96 persen	96 persen	64.585.700,00				96 persen	64.585.700,00	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jenis Layanan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	2Jenis	2 Jenis	50.485.700,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2Jenis	50.485.700,00	
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk											
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	12 Dokumen	44.385.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokumen	44.385.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk											
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	6.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	6.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jenis Layanan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	12Jenis	12 Jenis	14.100.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Jenis	14.100.000,00	
	2	12	02	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk											
							Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	14.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Dokumen	14.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
81	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akta kelahiran Usia 0-18 Tahun	100 persen	100 persen	32.405.700,00				100 persen	25.405.700,00	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	1Layanan	1 Layanan	25.405.700,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Layanan	25.405.700,00	
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting											
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen	12 Dokumen	6.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokumen	6.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil											

							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4 Layanan	4 Layanan	19.305.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Layanan	19.305.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Layanan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	1Jenis	1 Jenis	7.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Jenis	0,00	
	2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil										
							Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	0 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	0 Laporan	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
82	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penerapan IKD	10 %	10 %	94.417.525,00				10 %	94.417.525,00	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Penginputan Data pada Sistem	1Laporan	1 Laporan	35.892.525,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Laporan	35.892.525,00	
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan										
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	1 Dokumen	35.892.525,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	35.892.525,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
	2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	1Aplikasi	1 Aplikasi	58.525.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Aplikasi	58.525.000,00	
	2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
							Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	58.525.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokumen	58.525.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
83	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota	1 Buku	1 Buku	15.000.000,00				1 Buku	15.000.000,00	
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1Buku	1 Buku	15.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Buku	15.000.000,00	
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain										
							Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO
						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO				17.794.694.633,00					18.168.925.471,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17.769.694.633,00					18.143.925.471,00	
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				17.769.694.633,00					18.143.925.471,00	
84	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	3.836.914.365,00				100 persen	3.940.736.033,00	
	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	8Dokumen	8 Dokumen	11.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	8Dokumen	13.500.000,00	
	2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen	8.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	38Laporan	38 Laporan	3.001.634.365,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	38Laporan	3.102.956.033,00	
	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		600 Orang/bulan	2.906.634.365,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		3.007.956.033,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	90.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		14 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	112Laporan	112 Laporan	12.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	112Laporan	12.000.000,00	
	2	14	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		112 Laporan	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	40Orang	40 Orang	80.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	40Orang	80.000.000,00	
	2	14	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		40 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4 Orang	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		5 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		4 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	6Jenis	6 Jenis	147.280.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6Jenis	147.280.000,00	
	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO

	2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	8.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		8.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	5.280.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.280.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20 Laporan	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		5 Dokumen	14.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		14.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	30unit	30 unit	400.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30unit	400.000.000,00	
	2	14	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		7 Unit	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 Unit	70.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		4 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO

	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	32Jenis	32 Jenis	150.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	32Jenis	150.000.000,00	
	2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	90.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	115unit	115 unit	35.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	115unit	35.000.000,00	
	2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
85	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 persen	2 persen	139.885.596,00				2 persen	143.555.652,00	
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen pengendalian penduduk yang tersusun	2Dokumen	2 Dokumen	45.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2Dokumen	45.000.000,00	
	2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		1 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal											
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal		4 Satuan Pendidikan	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO

	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data mikro keluarga	11Laporan	11 Laporan	94.885.596,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	11Laporan	98.555.652,00	
	2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan											
							Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan		48 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga											
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		48 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	02	2.02	0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga											
							Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan		48 Dokumen	4.885.596,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		8.555.652,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga											
							Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya		48 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga											
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		48 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB											
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		48 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain											
							Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk		1 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	02	2.02	0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota											
							Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk		1 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana											
							Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana		48 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	02	2.02	0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)											
							Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)											
							Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO

86	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS yang Ber KB	80 persen	80 persen	12.518.506.330,00				80 persen	12.751.810.432,00	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Layanan Advokasi dan KIE yang dilaksanakan	6Layanan	6 Layanan	1.400.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6Layanan	1.400.000.000,00	
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK										
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		9 Laporan	100.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana										
							Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		4 Unit	200.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana										
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		9 Laporan	400.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)										
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		9 Laporan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang										
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		4 Dokumen	300.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal										
							Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan		10 Dokumen	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga lini lapangan KB	550Orang	530 Orang	4.578.506.330,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	550Orang	4.811.810.432,00	
	2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB										
							Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia		10 Unit	3.928.506.330,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		4.111.810.432,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)										
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		500 Orang	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		550.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB										
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		10 Organisasi	50.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)										

							Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		48 Laporan	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alokon KB yang tersedia dan di distribusikan kepada faskes dan pemasangan KB MKJP	300Buah	300 Buah	4.740.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	300Buah	4.740.000.000,00	
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya										
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		252 Laporan	300.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		1100 Orang	700.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		700.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP										
							Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP		2 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB										
							Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		10 Unit	3.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		3.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB		150 Orang	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya										
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		24 Laporan	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak										
							Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		9 Laporan	90.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	03	2.03	0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan										
							Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan		24 Kab/Kota	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan										
							Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan		50 Orang	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah layanan kegiatan pembinaan KB yang dilaksanakan	3Layanan	3 Layanan	1.800.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Layanan	1.800.000.000,00	

	2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB											
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		4 Organisasi	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB											
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB		48 Laporan	1.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		1.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas											
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		48 Kampung	600.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		600.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
87	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera I yang Meningkat Menjadi Keluarga Sejahtera	1 persen	1 persen	1.274.388.342,00				1 persen	1.307.823.354,00		
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Pembinaan Ketahanan Keluarga Kelompok BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS	13Dokumen	13 Dokumen	1.054.388.342,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	13Dokumen	1.087.823.354,00	
	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)											
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		48 Laporan	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	04	2.01	0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas											
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		200 Keluarga	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))											
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		48 Laporan	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia		20 Unit	64.388.342,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		97.823.354,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											
							Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		429 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	04	2.01	0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)		500 Orang	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											
							Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)		48 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	04	2.01	0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga											

							Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)		48 Dokumen	80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)										
							Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		429 Orang	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	04	2.01	0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)										
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)		48 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)										
							Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		48 Kelompok	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	04	2.01	0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)										
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)		48 Dokumen	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)										
							Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk		10 Kelompok	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi masyarakat binaan yang aktif	5Organisasi Masyarakat	4 Organisasi Masyarakat	220.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5Organisasi Masyarakat	220.000.000,00	
	2	14	04	2.02	0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		48 Organisasi	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
							Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		48 Laporan	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		4 Organisasi	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
	X					NON URUSAN				25.000.000,00					25.000.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				25.000.000,00					25.000.000,00	
88	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	25.000.000,00				100 persen	25.000.000,00	

	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	115unit	115 unit	25.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	115unit	25.000.000,00	
	X	XX	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO
						DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO				7.949.186.521,50					8.761.385.680,78	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.949.186.521,50					8.761.385.680,78	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				7.949.186.521,50					8.761.385.680,78	
89	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	5.865.453.846,00				100 persen	6.014.093.402,00	
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	26Dokumen	8 Dokumen	3.500.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	9Dokumen	3.000.000,00	
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	6 Dokumen	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	7 Dokumen	1.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2 Laporan	1.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	36Laporan	12 Laporan	4.783.092.246,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12Laporan	4.787.931.802,00	
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	207 Orang/bulan	69 Orang/bulan	4.734.892.246,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	69 Orang/bulan	4.739.731.802,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	01	2.02	0003	Pemeriksaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2562 Dokumen	854 Dokumen	46.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	854 Dokumen	46.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	18 Laporan	2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelola aset	12laporan	12 laporan	9.600.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12laporan	9.600.000,00	
	2	15	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	9.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Laporan	9.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi aparatur sipil negara perangkat daerah yang dikelola	74Orang	74 Orang	92.500.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	74Orang	80.000.000,00	
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	145 Paket	145 Paket	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	145 Paket	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Orang	5 Orang	37.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2 Orang	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										

							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	3 Orang	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	3 Orang	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah lsub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	4Jenis	4 Jenis	269.761.600,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	4Jenis	259.761.600,00	
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5 Paket	15.061.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	5 Paket	15.061.600,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	8 Paket	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	5 Paket	40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4 Dokumen	4.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	4 Dokumen	4.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	50 Laporan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	50 Laporan	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	51unit	17 unit	80.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	17unit	167.000.000,00	
	2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	2 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2 Unit	72.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	10 Unit	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	10 Unit	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	3 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	3 Unit	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Unit	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	355.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	3Jenis	345.800.000,00	
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5700 Laporan	1900 Laporan	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1900 Laporan	45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	140.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	8 Laporan	100.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	170.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	6 Laporan	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	56unit	56 unit	272.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	56unit	361.000.000,00	
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	26.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Unit	26.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO

	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	17 Unit	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	35 Unit	45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	3 Unit	61.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	3 Unit	90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
90	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Angkutan Darat	3.94 persen	3.94 persen	1.953.448.297,00				3.94 persen	2.614.901.549,28	
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Lalu Lintas Angkutan Jalan yang ditetapkan	1Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1Dokumen	300.000.000,00	
	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan Kabupaten	3Kegiatan	1 Kegiatan	75.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1Kegiatan	325.000.000,00	
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	100 Unit	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	11 Unit	5 Unit	37.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pemantapan Infrastruktur Kota dan Pemantapan Pemerataan Pembangunan Wilayah	1 Unit	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan										
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1000 Unit	1000 Unit	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1000 Unit	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan										
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	60 Unit	20 Unit	37.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	20 Unit	75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan pemeliharaan terminal	1Kegiatan	1 Kegiatan	60.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1Kegiatan	60.000.000,00	
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)										
							Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Unit	60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Fasilitas Parkir	1Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1Dokumen	100.000.000,00	
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum	585unit	195 unit	220.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	200unit	235.000.000,00	
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	9000 Unit	3000 Unit	130.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	3000 Unit	130.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										

							Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	1 Orang	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2 Orang	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9000 Unit	11 Unit	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	11 Unit	75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan yang dilaksanakan Rekayasa Lalulintas	301Km	301 Km	1.018.548.297,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	301Km	1.144.901.549,28	
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	748.548.297,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Laporan	819.901.549,28	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										
							Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Laporan	125.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas										
							Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	100 Dokumen	100 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	100 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										
							Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	36 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	12Bulan	12 Bulan	299.900.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12Bulan	300.000.000,00	
	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal										
							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		12 Laporan	299.900.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin trayek Lintas Daerah LLAJ	6unit	2 unit	150.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	2unit	150.000.000,00	
	2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Laporan	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
91	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Usaha Pelayaran Kewenangan Daerah yang Berizin	25 persen	25 persen	130.284.378,50				25 persen	132.390.729,50	
	2	15	03	2.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dengan instansi terkait	24kali	24 kali	50.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	24kali	50.000.000,00	
	2	15	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	4 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	03	2.08		Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah pemeliharaan perbaikan kapal	6unit	6 unit	20.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	6unit	20.000.000,00	
	2	15	03	2.08	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal										
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	12 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	4 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
	2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pembangunan tambat labuh	3unit	1 unit	60.284.378,50		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1unit	62.390.729,50	
	2	15	03	2.12	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal										
							Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Laporan	12 Laporan	60.284.378,50	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Laporan	62.390.729,50	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
						UPTD PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)				100.000,00					200.000.000,00	

	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				100.000,00						200.000.000,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				100.000,00						200.000.000,00	
92	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Angkutan Darat	3.94 persen	3.94 persen	100.000,00				3.94 persen	200.000.000,00	
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan Kabupaten	3Kegiatan	1 Kegiatan	100.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pemantapan Infrastruktur Kota dan Pemantapan Pemerataan Pembangunan Wilayah	1Kegiatan	200.000.000,00	
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	50.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pemantapan Infrastruktur Kota dan Pemantapan Pemerataan Pembangunan Wilayah	100 Unit	100.000.000,00	UPTD PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan											
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1000 Unit	1000 Unit	50.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pemantapan Infrastruktur Kota dan Pemantapan Pemerataan Pembangunan Wilayah	1000 Unit	100.000.000,00	UPTD PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO				5.131.516.920,00					5.178.120.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.131.516.920,00					5.178.120.000,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				5.131.516.920,00					5.178.120.000,00	
93	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	2.747.119.820,00				100 persen	2.771.614.350,00	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	6Dokumen	5 Dokumen	5.114.349,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6Dokumen	5.500.000,00	
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	4 Dokumen	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Dokumen	3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1 Laporan	2.614.349,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	2.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	12Laporan	12 Laporan	1.894.005.471,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Laporan	1.898.614.350,00	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/bulan	27 Orang/bulan	1.827.505.471,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30 Orang/bulan	1.830.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	01	2.02	0003	Penyiapan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600 Dokumen	500 Dokumen	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	600 Dokumen	60.614.350,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39 Laporan	13 Laporan	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	13 Laporan	3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	1Laporan	1 Laporan	8.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Laporan	8.000.000,00	
	2	16	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO

	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	25Orang	25 Orang	130.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	25Orang	170.000.000,00	
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	220 Paket	0 Paket	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	120 Paket	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	20 Orang	130.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	15 Orang	120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	3Jenis	3 Jenis	359.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	330.000.000,00	
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	100 Laporan	350.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	110 Laporan	320.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	8unit	6 unit	100.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	8unit	105.000.000,00	
	2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit	3 Unit	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Unit	25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	6 Unit	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Unit	80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	200.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	203.500.000,00	
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan	400 Laporan	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	450 Laporan	30.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	186 Laporan	62 Laporan	85.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	62 Laporan	86.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	9 Laporan	85.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	9 Laporan	87.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	3unit	3 unit	51.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3unit	51.000.000,00	
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	1 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO

	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	8 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6 Unit	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	5 Unit	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Unit	6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
94	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase KIM masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	85 persen	85 persen	1.408.584.175,00				85 persen	1.421.830.650,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi yang disebarluaskan	500Informasi	450 Informasi	1.408.584.175,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	500Informasi	1.421.830.650,00	
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat											
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo		48 Komunitas	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		17.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik											
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		400 Permohonan	180.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		180.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik											
							Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		2 Rekomendasi	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik											
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		45 Media	998.584.175,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		1.009.830.650,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten											
							Jumlah Konten Informasi Publik		4 Konten	170.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		170.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik											
							Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan		6 Orang	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
95	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	85 persen	85 persen	975.812.925,00				85 persen	984.675.000,00	
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dikelola dan dikembangkan	2Aplikasi	2 Aplikasi	975.812.925,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2Aplikasi	984.675.000,00	
	2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda											
							Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		1 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		14.675.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	03	2.02	0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah											
							Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional		2 Dokumen	226.137.925,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		230.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	03	2.02	0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi											
							Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah		1 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE											

							Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		1 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah											
							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		5 Aplikasi	414.675.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		405.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah											
							Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		5 Aplikasi	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	03	2.02	0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah											
							Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah		1 Dokumen	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	03	2.02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas											
							Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas		49 unit	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota											
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		49 Perangkat Daerah	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	03	2.02	0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo											
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo		1 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	03	2.02	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas											
							Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas		1 Program	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	03	2.02	0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE											
							Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE		1 Dokumen	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
	2	16	03	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE											
							Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		49 Perangkat Daerah	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO
						DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO				3.550.077.138,00					3.633.076.208,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.550.077.138,00					3.633.076.208,00		
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				3.550.077.138,00					3.633.076.208,00		
96	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	2.872.662.138,00				100 persen	2.729.618.000,00		
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	9Dokumen	9 Dokumen	9.000.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	9Dokumen	6.875.000,00	
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 Dokumen	7 Dokumen	6.250.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	7 Dokumen	4.075.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2.750.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Laporan	2.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO

	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	12Laporan	12 Laporan 12 Laporan	2.170.162.138,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12Laporan	2.143.875.000,00	
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.082.162.138,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	25 Orang/bulan	2.064.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	13 Dokumen	83.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	13 Dokumen	71.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Laporan	4.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	17 Laporan	2.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	17 Laporan	4.075.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset Jumlah Laporan Pengelolaan aset	1Laporan	1 Laporan 1 Laporan	7.700.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1Laporan	6.750.000,00	
	2	17	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Laporan	6.750.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola Administrasi Aparatur Sipiul Negara Perangkat Daerah yang Dikelolah	39Orang	39 Orang 39 orang	48.850.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	39Orang	42.500.000,00	
	2	17	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	85 Dokumen	25 Dokumen	2.850.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	30 Dokumen	2.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	3 Orang	46.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4 Orang	40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan Jumlah Sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	6Jenis	6 Jenis 6 jenis	274.500.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	6Jenis	208.868.000,00	
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	145 Paket	45 Paket	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	50 Paket	2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Paket	7.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	341 Laporan	114 Laporan	249.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	114 Laporan	199.368.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO

	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan (Jenis)	22Jenis	21 Jenis 23 jenis	110.250.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	22Jenis	72.750.000,00	
	2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1 Unit	44.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	22.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45 Unit	15 Unit	15.250.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	15 Unit	15.250.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	5 Unit	51.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	6 Unit	35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	39Jenis	39 Jenis	189.200.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	39Jenis	195.000.000,00	
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2597 Laporan	835 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1012 Laporan	51.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Laporan	60 Laporan	66.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	60 Laporan	70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Laporan	60 Laporan	73.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	36 Laporan	73.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	50Unit	50 Unit	63.000.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	50Unit	53.000.000,00	
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	28.000.000,00	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	8 Unit	28.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	45 Unit	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	45 Unit	5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Unit	20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
97	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Usaha Simpan Pinjam yang Berizin	77 persen	77 persen	10.000.000,00				77 persen	20.000.000,00	
	2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan yang difasilitasi	8Layanan	3 Layanan	5.000.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	3Layanan	10.000.000,00	
	2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit Usaha	2 Unit Usaha	5.000.000,00	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	10 Unit Usaha	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO

	2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan yang difasilitasi	3Layanan	1 Layanan	5.000.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	1Layanan	10.000.000,00	
	2	17	02	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit Usaha	2 Unit Usaha	5.000.000,00	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	2 Unit Usaha	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
98	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitasnya	86 persen	86 persen	9.500.000,00				86 persen	18.000.000,00	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan dan pendampingan yang dilakukan	231Laporan	77 Laporan	9.500.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	77Laporan	18.000.000,00	
	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi											
							Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	180 Unit Usaha	60 Unit Usaha	0,00	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	60 Unit Usaha	13.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	75 Unit Usaha	25 Unit Usaha	9.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	25 Unit Usaha	5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
99	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	65 persen	65 persen	17.600.000,00				65 persen	11.500.000,00	
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai Kesehatannya	77Koperasi	77 Koperasi	17.600.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	77Koperasi	11.500.000,00	
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	180 Unit Usaha	90 Unit Usaha	14.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	90 Unit Usaha	8.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan											
							Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha	10 Unit Usaha	3.000.000,00	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	10 Unit Usaha	3.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
100	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Usaha kepariwisataan dan ekraf yang tergabung dalam koperasi	82 persen	82 persen	38.050.000,00				82 persen	220.500.000,00	
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta/ Koperasi yg mengikuti Pendidikan dan latihan Perkoperasian	365Orang	120 Orang	38.050.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	125Orang	220.500.000,00	
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi											
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	360 Orang	120 Orang	38.050.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	120 Orang	220.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
101	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Angka persentase koperasi yang aktif	86 persen	86 persen	6.365.000,00				86 persen	8.000.000,00	
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yg diberdayakan dan dilindungi melalui pembinaan dan pendampingan	180Koperasi	60 Koperasi	6.365.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	60Koperasi	8.000.000,00	
	2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota											
							Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	180 Unit Usaha	60 Unit Usaha	6.365.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	60 Unit Usaha	8.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
102	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	8 persen	8 persen	275.300.000,00				8 persen	324.000.000,00	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Koperasi yg diberdayakan dan dilindungi melalui pembinaan dan pendampingan Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan melalui pendataan ,kemitraan,perizinan dan kelembagaan	180Koperasi	60 Koperasi 255 Unit Usaha	275.300.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	60Koperasi	324.000.000,00	

	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro											
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	120 Unit Usaha	50 Unit Usaha	6.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	50 Unit Usaha	12.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro											
							Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	450 Unit Usaha	150 Unit Usaha	16.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	150 Unit Usaha	13.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro											
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	180 Unit Usaha	60 Unit Usaha	51.900.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	60 Unit Usaha	120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro											
							Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	30 Orang	10 Orang	36.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	10 Orang	20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	07	2.01	0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro											
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		20 Unit Usaha	55.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		7.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro											
							Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	9 Unit Usaha	250 Unit Usaha	14.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3 Unit Usaha	16.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan											
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	90 Orang	150 Orang	94.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	30 Orang	135.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
103	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-	-	320.600.000,00				-	301.458.208,00	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	120persen	-	320.600.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	120persen	301.458.208,00	
	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi											
							Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	360 Unit Usaha	120 Unit Usaha	320.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	120 Unit Usaha	301.458.208,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO
						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO				6.022.054.295,00					6.051.398.871,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.022.054.295,00					6.051.398.871,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				6.022.054.295,00					6.051.398.871,00	
104	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	4.987.162.500,00				100 persen	5.011.516.076,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	6Dokumen	6 Dokumen	3.790.250,00		-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	6Dokumen	5.000.000,00	
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	2.290.250,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	6 Dokumen	3.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	4 Laporan	2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	36Laporan	36 Laporan	3.361.966.000,00		-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	36Laporan	3.361.966.000,00	

	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.288.285.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30 Orang/bulan	3.288.285.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
	2	18	01	2.02	0003	Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	73.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	6 Dokumen	73.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
	2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	681.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Laporan	681.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
	2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	1Laporan	1 Laporan	9.713.340,00		-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1Laporan	9.713.340,00	
	2	18	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	9.713.340,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Laporan	9.713.340,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Memiliki Sertifikat Bintek	3Orang	3 Orang	20.000.000,00		-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	3Orang	20.000.000,00	
	2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	3 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	3 Orang	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	3Jenis	3 Jenis	219.900.000,00		-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	3Jenis	219.900.000,00	
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Dokumen	4.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	40 Laporan	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
	2	18	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	15.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	5 Dokumen	15.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	11Jenis	10 Jenis	73.495.254,00		-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	11Jenis	90.000.000,00	
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	12 Unit	23.495.254,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	15 Unit	40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	10 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	15 Unit	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		1.238.747.656,00		-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	-	1.245.386.736,00	
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan	1200 Laporan	163.360.920,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1200 Laporan	170.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	272.936.736,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Laporan	272.936.736,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	9 Laporan	802.450.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	9 Laporan	802.450.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	34Unit	33 Unit	59.550.000,00		-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	34Unit	59.550.000,00	
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	21.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Unit	21.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	16.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	6 Unit	16.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	17 Unit	11.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	18 Unit	11.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.450.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Unit	10.450.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
105	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Per 100 Juta Nilai PMDN)	15 persen	15 persen	136.639.080,00				15 persen	136.630.080,00	
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang- undangan yang tersusun	1Dokumen	1 Dokumen	136.639.080,00		-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1Dokumen	136.630.080,00	
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal											
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1 Dokumen	90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
	2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko											
							Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	4 Dokumen	4 Dokumen	46.639.080,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Dokumen	46.630.080,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
106	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Investasi yang Masuk per Tahun	11 persen/tahun	11 persen/tahun	50.645.055,00				11 persen/tahun	50.645.055,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Promosi yang diselenggarakan Penanaman Modal	3Pameran	3 Pameran	50.645.055,00		-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	3Pameran	50.645.055,00	
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	50.645.055,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	3 Dokumen	50.645.055,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
107	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Angka Pertumbuhan Jumlah Investor di Daerah	100 persen	100 persen	418.657.860,00				100 persen	418.657.860,00	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Layanan Perizinan yang dikelola Penanaman modal	23Layanan	23 Layanan	418.657.860,00		-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	23Layanan	418.657.860,00	

	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik											
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha	9 Pelaku Usaha	224.347.860,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	10 Pelaku Usaha	224.347.860,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko											
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	39.110.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1000 Pelaku Usaha	39.110.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko											
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	24 Kegiatan Usaha	24 Kegiatan Usaha	155.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	24 Kegiatan Usaha	155.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
108	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Investor dan Penanam Modal di Daerah yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	100 persen	100 persen	423.949.800,00				100 persen	423.949.800,00	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan PM	104Kegiatan Usaha	104 Kegiatan Usaha	423.949.800,00		-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	104Kegiatan Usaha	423.949.800,00	
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya											
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	40 Kegiatan Usaha.	40 Kegiatan Usaha.	72.324.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	40 Kegiatan Usaha.	72.324.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha											
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20 Pelaku Usaha	18 Pelaku Usaha	282.625.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	20 Pelaku Usaha	282.625.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal											
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	69.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	50 Kegiatan Usaha	69.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
109	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan nilai rencana penanaman modal	100 persen	100 persen	5.000.000,00				100 persen	10.000.000,00	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data penanaman modal dan informasi pelayanan perizinan berbasis elektronik	12Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00		-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12Dokumen	10.000.000,00	
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik											
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	12 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
						DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO				5.021.897.455,00					5.468.701.675,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.021.897.455,00					5.468.701.675,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				5.021.897.455,00					5.468.701.675,00	
110	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	2.922.897.455,00				100 persen	2.919.996.675,00	
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	7Dokumen	7 Dokumen	3.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7Dokumen	3.000.000,00	
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	1.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO

	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	2Laporan	2 Laporan	2.077.675.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2Laporan	2.015.951.875,00	
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	1.994.675.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30 Orang/bulan	1.923.951.875,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	750 Dokumen	750 Dokumen	80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	750 Dokumen	88.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	2.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	2.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	1Laporan	1 Laporan	20.400.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Laporan	20.400.000,00	
	2	19	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5 Laporan	20.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Laporan	20.400.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	30Orang	30 Orang	75.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30Orang	80.000.000,00	
	2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	100 Paket	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	100 Paket	80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	3Jenis	3 Jenis	188.600.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	207.400.000,00	
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	6.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Paket	7.200.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	65 Laporan	182.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	60 Laporan	200.200.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	18Jenis	18 Jenis	200.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	18Jenis	208.000.000,00	
	2	19	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	3 Unit	135.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	135.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit	11 Unit	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	11 Unit	33.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	8 Unit	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6 Unit	40.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	280.222.455,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	297.244.800,00	
	2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan	1200 Laporan	120.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1200 Laporan	130.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Laporan	35.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	130.222.455,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Laporan	132.244.800,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	33unit	33 unit	78.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	33unit	88.000.000,00	
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	26.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	26.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	6 Unit	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Unit	2.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	30 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	27 Unit	25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	35.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
111	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	81 persen	81 persen	227.000.000,00				81 persen	360.000.000,00	
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga yang dikembangkan	180Orang	125 Orang	127.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	180Orang	175.000.000,00	
	2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota										
							Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota		1 Dokumen	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		12.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota										

							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		30 Orang	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		55.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota										
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		1 Kegiatan	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota										
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda		25 Orang	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		38.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota										
							Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia		1 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	1Organisasi	1 Organisasi	100.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Organisasi	185.000.000,00	
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota										
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya		1 Organisasi	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		185.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
112	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	-	1.752.000.000,00				-	2.038.705.000,00	
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah cabang olahraga yang dikembangkanCabang Olahraga (Cabor)	-	175.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah cabang olahraga yang dikembangkan Cabang Olahraga (Cabor)	250.000.000,00	
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota										
							Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia		12 Unit	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar		1 Dokumen	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	1Event	-	230.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Event	300.000.000,00	
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota										
							Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		2 Kegiatan	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		170.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga										
							Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota		30 Orang	80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		130.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang dibina	10Cabang Olahraga (Cabor)	8 Cabang Olahraga (Cabor)	207.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	10Cabang Olahraga (Cabor)	267.000.000,00	
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah										

							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		15 Orang	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		35.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga										
							Jumlah penerima Penghargaan olahraga		40 Orang	70.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota										
							Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		40 Orang	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	03	2.03	0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota										
							Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota		1 Dokumen	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		12.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina	2Organisasi	2 Organisasi	900.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2Organisasi	900.000.000,00	
	2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota										
							Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional		1 Dokumen	900.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		900.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yag difasilitasi	4Cabang Olahraga (Cabor)	4 Cabang Olahraga (Cabor)	240.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Cabang Olahraga (Cabor)	321.705.000,00	
	2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat										
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat		3 Dokumen	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		45.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan										
							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		2 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional										
							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		1 Lembaga	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		176.705.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
113	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kwartir Pramuka yang Aktif	100 persen	100 persen	120.000.000,00				100 persen	150.000.000,00	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kwartir pramuka yang dibina	1Organisasi	1 Organisasi	120.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Organisasi	150.000.000,00	
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah										
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Organisasi	60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah										
							Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	25 Orang	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30 Orang	30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah										
							Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
	2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan										

							Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	1 Organisasi	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Organisasi	30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO
						DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO				2.107.033.479,00					2.159.709.311,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				101.405.867,00					103.941.010,00	
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				77.752.078,00					79.695.878,00	
114	2	20	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	2.775.000,00				100 persen	2.844.375,00	
	2	20	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	8Dokumen	8 Dokumen	2.775.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	8Dokumen	2.844.375,00	
	2	20	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	2.775.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Dokumen	2.844.375,00	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO
	2	20	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	0 Dokumen	0,00	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO
115	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Angka Tingkat Ketersediaan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah sesuai Permendagri 86	100 persen	100 persen	74.977.078,00				100 persen	76.851.503,00	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah partisipasi perangkat daerah dalam pengumpulan data statistik sektoral	49Perangkat Daerah	49 Perangkat Daerah	74.977.078,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	49Perangkat Daerah	76.851.503,00	
	2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional										
							Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	60 Persentase	60 Persentase	29.212.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	60 Persentase	29.942.812,00	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO
	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral										
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	60 Persentase	60 Persentase	29.462.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	60 Persentase	30.199.062,00	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO
	2	20	02	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar										
							Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	49 Dokumen	49 Dokumen	16.302.078,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	49 Dokumen	16.709.629,00	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				23.653.789,00					24.245.132,00	
116	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang pengelolaan Informasi sesuai SOP	100 persen	100 persen	23.653.789,00				100 persen	24.245.132,00	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi	48Perangkat Daerah	48 Perangkat Daerah	10.277.599,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	48Perangkat Daerah	10.534.538,00	
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik										
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	48 Laporan	48 Laporan	5.144.259,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	48 Laporan	5.272.865,00	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	48 Perangkat Daerah	48 Perangkat Daerah	5.133.340,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	48 Perangkat Daerah	5.261.673,00	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah surat yang menggunakan sandi pada Perangkat Daerah	49Surat	49 Surat	13.376.190,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	49Surat	13.710.594,00	
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	49 Perangkat Daerah	49 Perangkat Daerah	13.376.190,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	49 Perangkat Daerah	13.710.594,00	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO
	X					NON URUSAN				2.005.627.612,00					2.055.768.301,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				2.005.627.612,00					2.055.768.301,00	
117	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	2.005.627.612,00				100 persen	2.055.768.301,00	

	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	7Laporan	7 Laporan	1.795.969.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7Laporan	1.840.868.225,00	
	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1.766.169.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	22 Orang/bulan	1.810.323.225,00	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO
	X	XX	01	2.02	0003	Penatausahaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	28.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Dokumen	29.520.000,00	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO
	X	XX	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Laporan	1.025.000,00	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO
	X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	1Laporan	1 Laporan	6.814.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Laporan	6.984.350,00	
	X	XX	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	32 Laporan	32 Laporan	6.814.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	32 Laporan	6.984.350,00	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	25Jenis	25 Jenis	80.654.842,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	25Jenis	82.671.213,00	
	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1.510.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Paket	1.547.750,00	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO
	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	2.640.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Dokumen	2.706.000,00	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	76.504.842,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	60 Laporan	78.417.463,00	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	5Jenis	5 Jenis	10.656.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5Jenis	10.922.400,00	
	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	10.656.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Unit	10.922.400,00	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	90.833.770,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	93.104.613,00	
	X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900 Laporan	900 Laporan	17.292.515,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	900 Laporan	17.724.827,00	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO
	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	31.804.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Laporan	32.599.100,00	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO
	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	41.737.255,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Laporan	42.780.686,00	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	16unit	16 unit	20.700.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	16unit	21.217.500,00	
	X	XX	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	15.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	15.785.000,00	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO
	X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	900.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6 Unit	922.500,00	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO
	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	4.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Unit	4.510.000,00	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO
						DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO				2.960.362.000,00					2.975.572.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.960.362.000,00					2.975.572.000,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.960.362.000,00					2.975.572.000,00	
118	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	2.221.662.000,00				100 persen	2.226.992.000,00	
	2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	7Dokumen	7 Dokumen	3.000.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7Dokumen	3.500.000,00	
	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6 Dokumen	2.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Laporan	1.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	14Laporan	14 Laporan	1.667.520.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	14Laporan	1.669.220.000,00	
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.630.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	20 Orang/bulan	1.631.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.02	0003	Penatausahaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2100 Dokumen	700 Dokumen	33.020.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	750 Dokumen	33.020.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	5 Laporan	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Laporan	2.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan	18 Laporan	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	18 Laporan	3.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	1Laporan	1 Laporan	6.520.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Laporan	6.520.000,00	
	2	22	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		5 Dokumen	500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	12 Laporan	6.020.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	6.020.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	25Orang	25 Orang	38.000.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	25Orang	30.000.000,00	
	2	22	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 Paket	32 Paket	16.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	32 Paket	8.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		1.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	96 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	32 Dokumen	1.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	2 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Orang	20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	5Jenis	5 Jenis	254.122.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5Jenis	265.752.000,00	
	2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45 Paket	15 Paket	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	15 Paket	3.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	10 Paket	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7 Paket	5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	450 Paket	10 Paket	1.652.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	200 Paket	1.652.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Dokumen	3.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18 Laporan	6 Laporan	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6 Laporan	2.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262 Laporan	90 Laporan	238.870.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	87 Laporan	250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	13Jenis	6 Jenis	40.000.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2Jenis	30.000.000,00	
	2	22	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit	10 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Unit	10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	3 Unit	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Unit	10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	155.000.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	162.500.000,00	
	2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4025 Laporan	1360 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1365 Laporan	15.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Laporan	18 Laporan	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Laporan	61.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7 Laporan	86.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	4Unit	4 Unit	57.500.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Unit	59.500.000,00	
	2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	26.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Unit	26.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel										
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	5 Unit	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Unit	1.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	13 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	16 Unit	11.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	21.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
119	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kelompok budaya binaan yang berpartisipasi dalam event kepariwisataan daerah	100 persen	100 persen	262.100.000,00				100 persen	269.530.000,00	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Dilaksanakan	6kegiatan/lokus	7 kegiatan/lokus	62.000.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6kegiatan/lokus	60.000.000,00	
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan										
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	37 Objek	4 Objek	62.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	15 Objek	60.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan / Dilaksanakan/Diikuti (Kali/Tahun)	4Jenis	4 Jenis	75.000.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Jenis	78.000.000,00	
	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan										
							Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	37 Sertifikat	12 Sertifikat	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	15 Sertifikat	78.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Budaya dan Adat Istiadat yang dibina dilindungi dan dilestarikan	4Jenis	3 Jenis	125.100.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Jenis	131.530.000,00	
	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat										
							Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	13 Objek	2 Objek	44.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Objek	48.530.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	25 Unit	3 Unit	81.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6 Unit	83.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
120	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Kesenian Masyarakat yang Aktif Berpartisipasi dalam Event Kepariwisataan Daerah	100 persen	100 persen	99.100.000,00				100 persen	101.700.000,00	
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang dibina dan dilestarikan	3Jenis	3 Jenis	99.100.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	101.700.000,00	
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional										

							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	75 Orang	10 Orang	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30 Orang	61.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional										
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24 Lembaga	10 Lembaga	39.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6 Lembaga	40.700.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
121	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Event Pameran Sejarah yang dilaksanakan	2 kali/tahun	2 kali/tahun	183.400.000,00				2 kali/tahun	188.150.000,00	
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sejarah yang dilaksanakan dan dilestarikan (Kal/Tahun)	50kali	50 kali	183.400.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	50kali	188.150.000,00	
	2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah										
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	150 Dokumen	5 Dokumen	183.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	50 Dokumen	188.150.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
122	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Luas Lokasi Cagar Budaya yang Dikelola	100 persen	100 persen	144.100.000,00				100 persen	139.200.000,00	
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Warisan Budaya yang ditetapkan	6Jenis	5 Jenis	100.000.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6Jenis	100.000.000,00	
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya										
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	15 Objek	10 Objek	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6 Objek	100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Pengelolaannya Berbasis Kemitraan	55Cagar Budaya	55 Cagar Budaya	44.100.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	55Cagar Budaya	39.200.000,00	
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya										
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	55 Objek	1 Objek	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	55 Objek	25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
	2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya										
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	15 Objek	15 Objek	14.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6 Objek	14.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
123	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah museum yang dikelola secara baik	1Museum	1 Museum	50.000.000,00				1Museum	50.000.000,00	
	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah museum yang dikelola secara baik	800Orang	700 Orang	50.000.000,00		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	800Orang	50.000.000,00	
	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	37 Unit	5 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	15 Unit	50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
						DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO				2.598.506.055,00					2.653.629.990,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.598.506.055,00					2.653.629.990,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				2.598.506.055,00					2.653.629.990,00	
124	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	2.436.091.065,00				100 persen	2.458.215.000,00	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	7Dokumen	7 Dokumen	2.600.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7Dokumen	2.600.000,00	
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	1.900.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7 Dokumen	1.900.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Laporan	700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO

	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	4Laporan	4 Laporan	1.918.072.494,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Laporan	1.918.072.494,00	
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	1.893.972.494,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30 Orang/bulan	1.893.972.494,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	01	2.02	0003	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	22.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokumen	22.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	1.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Laporan	1.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	5Laporan	5 Laporan	8.100.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5Laporan	8.100.000,00	
	2	23	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5 Laporan	8.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Laporan	8.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	30Orang	30 Orang	89.571.429,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30Orang	89.571.429,00	
	2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	34 Paket	34 Paket	17.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	34 Paket	17.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Dokumen	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	18.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Orang	18.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	53.571.429,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Orang	53.571.429,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	4Jenis	4 Jenis	114.400.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Jenis	114.400.000,00	
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Paket	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Paket	4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	5.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Dokumen	5.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	30 Laporan	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	35 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	10unit	9 unit	77.876.065,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	10unit	100.000.000,00	
	2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	4 Unit	38.938.032,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Unit	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	38.938.033,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Unit	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	165.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	165.000.000,00	
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	60 Laporan	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	60 Laporan	60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	85.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	58unit	58 unit	60.471.077,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	58unit	60.471.077,00	
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	18.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Unit	18.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	23.471.077,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Unit	23.471.077,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	49 Unit	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	49 Unit	7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Unit	12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
125	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan di Palopo yang Aktif	5 persen	5 persen	63.314.990,00				5 persen	83.314.990,00	

	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibina pengelolaanya diwilayah Kota Palopo	26 Pepustakaan	26 Pepustakaan	29.124.990,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	26 Pepustakaan	49.124.990,00	
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan										
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	20 Perpustakaan	7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota										
							Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		0 Perpustakaan	2.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		2.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		15 Orang	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan										
							Jumlah Data dan informasi Perpustakaan		5 Dokumen	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan										
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		100 Eksemplar	14.424.990,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		14.424.990,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik										
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK		0 Perpustakaan	600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Perpustakaan keliling yang dilaksanakan	1Layanan	1 Layanan	34.190.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Layanan	34.190.000,00	
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial										
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan		16 Perpustakaan	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		1.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		0 Perpustakaan	690.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		690.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		50 Orang	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat										
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat		100 Lokus	26.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		26.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
126	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah event pameran naskah kuno yang dilaksanakan	1 kali/tahun	1 kali/tahun	99.100.000,00				1 kali/tahun	112.100.000,00	
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan	26Naskah	23 Naskah	99.100.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	26Naskah	99.100.000,00	
	2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno										
							Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno		25 Orang	49.550.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		49.550.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO

	2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan											
							Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan		25 Eksemplar	49.550.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		49.550.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
	2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00		-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	-	13.000.000,00	
	2	23	03	2.02	0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara											
							Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota		5 Eksemplar	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		13.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO
						DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO				1.842.392.694,00					2.262.737.288,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.842.392.694,00					2.262.737.288,00	
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				1.842.392.694,00					2.262.737.288,00	
127	2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	1.767.234.593,00				100 persen	2.186.345.051,00	
	2	24	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6Dokumen	6 Dokumen	4.350.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6Dokumen	4.350.000,00	
	2	24	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	6 Dokumen	2.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Dokumen	2.100.000,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1 Laporan	2.250.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	2.250.000,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Kuangan yang diterbitkan	11Dokumen	11 Dokumen	1.443.344.150,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	11Dokumen	1.846.405.051,00	
	2	24	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1.411.044.150,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30 Orang/bulan	1.814.105.051,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21 Dokumen	7 Dokumen	23.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7 Dokumen	23.300.000,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 Laporan	9.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		9.000.000,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12Laporan	12 Laporan	6.500.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Laporan	6.500.000,00	
	2	24	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	12 Laporan	6.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	6.500.000,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	10Orang	10 Orang	15.500.442,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	10Orang	23.832.842,00	
	2	24	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1 Paket	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Paket	5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang	6 Orang	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6 Orang	5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO

	2	24	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	4 Orang	5.500.442,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Orang	13.832.842,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	2Jenis	2 Jenis	123.640.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2Jenis	123.640.000,00	
	2	24	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Paket	1.000.000,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	2 Dokumen	2.640.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Dokumen	2.640.000,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	120.000.000,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	5unit	5 unit	41.000.001,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5unit	41.000.000,00	
	2	24	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	21.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	21.000.000,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	2 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Unit	5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	2 Unit	15.000.001,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Unit	15.000.000,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	102.500.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	106.217.158,00	
	2	24	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	12 Laporan	21.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	21.000.000,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	6.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	6.500.000,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	78.717.158,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	13unit	13 unit	30.400.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	13unit	34.400.000,00	
	2	24	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	1 Unit	20.900.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	20.900.000,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	3 Unit	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Unit	1.000.000,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	8 Unit	4.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	8 Unit	4.500.000,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	8.000.000,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
128	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Arsip	26 Persen	26 Persen	35.715.491,00				26 Persen	36.652.527,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis	100persen	100 Persen	22.400.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	100persen	22.500.000,00	
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis										
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	12 Berkas	4 Berkas	9.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Berkas	9.000.000,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis										
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	2100 Berkas	700 Berkas	4.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	700 Berkas	4.500.000,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Laporan	10 Laporan	9.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	10 Laporan	9.000.000,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang di Akuisisi dan diolah	47Arsip	47 Arsip	8.950.035,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	47Arsip	9.000.000,00	
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis										
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		50 Arsip	8.950.035,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		9.000.000,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan E-Arsip (SRIKANDI)	30persen	25 persen	4.365.456,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30persen	5.152.527,00	
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN										
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	75 Pengguna	30 Pengguna	4.365.456,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30 Pengguna	5.152.527,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
129	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban	10 persen	10 persen	39.442.610,00				10 persen	39.739.710,00	
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang siap di Musnahkan	30persen	27 persen	30.029.710,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30persen	30.029.710,00	
	2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun										
							Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan		30 Berkas	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun										
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		54 Arsip	20.029.710,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		20.029.710,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
	2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Arsip Statis yang di Alih Media	30persen	27 persen	9.412.900,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30persen	9.710.000,00	
	2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip										
							Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	66 Arsip	22 Arsip	9.412.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	24 Arsip	9.710.000,00	DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
						DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO				5.557.791.906,91					5.705.843.621,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				5.551.591.906,91					5.699.643.621,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				5.551.591.906,91					5.699.643.621,00	

130	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	4.597.010.435,00				100 persen	4.717.780.840,00	
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	8Dokumen	8 Dokumen	3.125.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	8Dokumen	3.125.000,00	
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 Dokumen	7 Dokumen	1.775.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	7 Dokumen	1.775.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1.350.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Laporan	1.350.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	757Laporan	737 Laporan	4.063.492.955,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	757Laporan	4.083.492.955,00	
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.990.380.955,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	42 Orang/bulan	4.010.380.955,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	3	25	01	2.02	0003	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	70.567.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Dokumen	70.567.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	3	25	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 Laporan	12 Laporan	2.545.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	2.545.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang difasilitasi	42Orang	42 Orang	38.600.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	42Orang	20.500.000,00	
	3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	42 Paket	42 Paket	23.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	0 Paket	0,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	3	25	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	3 Orang	15.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4 Orang	20.500.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	2Jenis	2 Jenis	209.153.800,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2Jenis	259.661.000,00	
	3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	5.380.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	0 Dokumen	5.480.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230 Laporan	75 Laporan	203.773.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	80 Laporan	254.181.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	12unit	8 unit	29.584.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12unit	88.984.000,00	
	3	25	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	35.000.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	3 Unit	7.308.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	6 Unit	12.708.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	5 Unit	22.276.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	8 Unit	41.276.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	176.804.680,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3Jenis	185.767.885,00	
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	29.252.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	33.207.500,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	60.599.180,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	65.607.385,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	86.953.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	86.953.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	56unit	53 unit	76.250.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	56unit	76.250.000,00	
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	27.250.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	27.250.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	34.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	26 Unit	34.000.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	15.000.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
131	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	19.095, 25 ton/tahun	19.095, 25 ton/tahun	672.178.098,91				19.095, 25 ton/tahun	690.735.100,00	
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan	40unit	40 unit	625.742.998,91		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	40unit	640.300.000,00	
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap											
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	120 Unit	40 Unit	625.742.998,91	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	40 Unit	640.300.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang diberdayakan	30Kelompok	30 Kelompok	46.435.100,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	30Kelompok	50.435.100,00	
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil											
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	300 Orang	100 Orang	30.860.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	100 Orang	32.860.100,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil											
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	90 Kelompok	30 Kelompok	15.575.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	30 Kelompok	17.575.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
132	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	185.407,49 ton/tahun	185.407,49 ton/tahun	79.200.978,00				185.407,49 ton/tahun	82.594.043,00	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya yang diberdayakan	30Kelompok	30 Kelompok	27.052.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	30Kelompok	27.052.000,00	
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil											
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	60 Kelompok	20 Kelompok	13.852.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	20 Kelompok	13.852.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil											

							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	90 Kelompok	30 Kelompok	13.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	30 Kelompok	13.200.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah prasarana dan sarana pembudidaya ikan	3unit	3 unit	52.148.978,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3unit	55.542.043,00	
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	4 Dokumen	19.975.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4 Dokumen	19.975.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Unit	32.173.978,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		35.567.043,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
133	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	141,89 ton/tahun	141,89 ton/tahun	203.202.395,00				141,89 ton/tahun	208.533.638,00	
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah laporan penerbitan daftar usaha pengolahan	12Dokumen	12 Dokumen	10.750.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12Dokumen	10.750.000,00	
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko										
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko		12 Dokumen	10.750.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		10.750.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha yang dikembangkan mutu dan keamanan produknya	4unit	4 unit	31.856.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4unit	21.856.000,00	
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko										
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		15 Unit Usaha	31.856.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		21.856.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan yang tersedia dan tersalurkan	23725.800Ton	23236.140 Ton	160.596.395,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	23725.800Ton	175.927.638,00	
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	23725,80 Ton	23236.14 Ton	14.550.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	23725,80 Ton	15.550.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	12 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	146.046.395,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4 Pelaku Usaha	160.377.638,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
	X					NON URUSAN				6.200.000,00					6.200.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				6.200.000,00					6.200.000,00	
134	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	6.200.000,00				100 persen	6.200.000,00	
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	56unit	53 unit	6.200.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	56unit	6.200.000,00	
	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 Unit	31 Unit	6.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	28 Unit	6.200.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO
						UPTD TEMPAT PENJUALAN IKAN (TPI)				49.750.634,00					50.134.247,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				49.750.634,00					50.134.247,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				49.750.634,00					50.134.247,00	
135	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	19.095, 25 ton/tahun	19.095, 25 ton/tahun	49.750.634,00				19.095, 25 ton/tahun	50.134.247,00	
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang dikelola	1TPI	1 TPI	49.750.634,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1TPI	50.134.247,00	
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)										
							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3 Layanan	3 Layanan	49.750.634,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3 Layanan	50.134.247,00	UPTD TEMPAT PENJUALAN IKAN (TPI)
						UPTD BALAI BENIH IKAN (BBI)				50.127.000,00					50.127.000,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				50.127.000,00					50.127.000,00	

	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				50.127.000,00						50.127.000,00	
136	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	185.407,49 ton/tahun	185.407,49 ton/tahun	50.127.000,00					185.407,49 ton/tahun	50.127.000,00	
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah prasarana dan sarana pembudidaya ikan	3unit	3 unit	50.127.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3unit	50.127.000,00	
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	2 Unit	50.127.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Unit	50.127.000,00	UPTD BALAI BENIH IKAN (BBI)□
						DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO				9.700.342.730,00						9.938.661.510,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				9.700.342.730,00						9.938.661.510,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				9.700.342.730,00						9.938.661.510,00	
137	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	3.293.924.449,00					100 persen	3.368.344.263,00	
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	6Dokumen	6 Dokumen	1.200.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	6Dokumen	1.200.000,00	
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		600.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		600.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	14Laporan	14 Laporan	2.611.660.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	14Laporan	2.616.460.000,00	
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33 Orang/bulan	2.569.660.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		2.569.660.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	01	2.02	0003	Penatausahaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		14 Dokumen	41.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		46.200.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		3 Laporan	600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		600.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	1Laporan	1 Laporan	6.953.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1Laporan	6.953.000,00	
	3	26	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		144 Laporan	6.953.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		6.953.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	8Orang	28 Orang	63.367.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	8Orang	63.367.000,00	
	3	26	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		41 Paket	20.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		20.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											

							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		6 Orang	42.867.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		42.867.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	2Jenis	2 Jenis	204.240.449,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2Jenis	258.370.000,00	
	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5 Paket	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		1.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		1.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3 Dokumen	3.960.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		3.960.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		2.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30 Laporan	196.280.449,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		250.410.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	6Jenis	5 Jenis	39.000.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	6Jenis	33.500.000,00	
	3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 Unit	26.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		20.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit	8.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		8.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	306.157.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3Jenis	310.822.000,00	
	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100 Laporan	14.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		14.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		5 Laporan	91.457.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		93.457.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		29 Laporan	200.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		202.865.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	22unit	22 unit	61.347.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	22unit	77.672.263,00	
	3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		6 Unit	27.247.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		29.247.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 Unit	9.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		9.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		18 Unit	5.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		7.100.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		32.325.263,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
138	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang memenuhi Kriteria 3A	10 persen	10 persen	571.854.568,00				10 persen	636.857.816,00	
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Prioritas yang Dikelola	1Jenis	1 Jenis	571.854.568,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1Jenis	636.857.816,00	
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		3 Unit	191.854.568,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		235.048.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		8 Laporan	65.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		70.904.908,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	02	2.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										
							Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		1 Lokasi	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		260.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		2 Laporan	65.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		70.904.908,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
139	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan	15 persen	15 persen	5.456.126.579,00				15 persen	5.538.093.573,00	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Angka Kenaikan Kunjungan Wisatawan Pertahun	15Orang	5000 Orang	5.456.126.579,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	15Orang	5.538.093.573,00	
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri										
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		4 Dokumen	180.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		190.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri										

							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		6 Dokumen	600.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		710.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata										
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		2 Dokumen	120.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota										
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		6 Kegiatan	2.556.126.579,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		2.568.093.573,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri										
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		3 Promosi	2.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		2.050.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
140	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Usaha Ekraf Penerima Manfaat Program	10 persen	10 persen	99.100.000,00				10 persen	101.700.000,00	
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Ekosistem Ekonomi Kreatif	100persen	100 persen	99.100.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	100persen	101.700.000,00	
	3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual										
							Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif		12 Produk	99.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		101.700.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
141	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Tingkat Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah	10 persen	10 persen	279.337.134,00				10 persen	293.665.858,00	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo	12Komunitas	12 Komunitas	179.337.134,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12Komunitas	193.665.858,00	
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif										
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		1 Laporan	70.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		75.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif										
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		90 Orang	47.463.134,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		54.791.858,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata										
							Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata		120 Orang	51.874.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		53.874.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif										
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		4 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kompetensi Pelaku Ekonomi Kreatif	100Orang	100 Orang	100.000.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	100Orang	100.000.000,00	
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		80 Orang	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO
						DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO				19.576.127.783,00					20.089.729.521,00	

	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				19.576.127.783,00					20.089.729.521,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				19.576.127.783,00					20.089.729.521,00	
142	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	13.775.075.538,00				100 persen	14.136.480.143,00	
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	7Dokumen	7 Dokumen	17.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	7Dokumen	17.000.000,00	
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	5.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	28Laporan	28 Laporan	12.280.800.361,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	28Laporan	12.341.780.143,00	
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/bulan	119 Orang/bulan	12.198.200.361,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	119 Orang/bulan	12.246.930.143,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.02	0003	Penatausahaan Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	9 Dokumen	87.250.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Laporan	3.500.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	4.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	18 Laporan	4.100.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	5Laporan	5 Laporan	16.700.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	5Laporan	16.700.000,00	
	3	27	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Dokumen	2.500.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO

	3	27	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Laporan	1.700.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5 Laporan	12.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	5 Laporan	12.500.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	126Orang	126 Orang	80.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	126Orang	100.000.000,00	
	3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	119 Paket	119 Paket	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	119 Paket	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	5 Orang	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	5Jenis	5 Jenis	555.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	5Jenis	629.000.000,00	
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	6 Paket	15.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	13.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	10 Paket	13.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	35 Paket	55.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4 Dokumen	36.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300 Laporan	470.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	300 Laporan	510.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	32unit	7 unit	60.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	32unit	200.000.000,00	
	3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Unit	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	2 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	10 Unit	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	4 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	20 Unit	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	653.575.177,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3Jenis	720.000.000,00	
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	2000 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2000 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3 Laporan	300.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	383.575.177,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	400.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	147unit	147 unit	112.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	147unit	112.000.000,00	
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	27.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	27.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	115 Unit	115 Unit	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	115 Unit	45.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	20 Unit	20.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	11 Unit	20.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
143	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	5 persen	5 persen	4.669.069.010,00				5 persen	4.791.567.288,00	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan dan Pendampingan yang dilakukan	6Laporan	6 Laporan	157.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	6Laporan	157.000.000,00	
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi										
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian										
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6 Laporan	12 Laporan	57.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	6 Laporan	57.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumah bibit Unggul Hewan/Tanaman yang Beredar di Masyarakat	12Dokumen	12 Dokumen	429.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12Dokumen	404.000.000,00	
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman										
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman										
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	12 Dokumen	379.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Dokumen	344.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan yang Dilaksanakan	12Laporan	12 Laporan	50.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12Laporan	50.000.000,00	
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil										
							Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pengawasan/Pemeriksaan obat hewan di tingkat pengecer	12Laporan	12 Laporan	6.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12Laporan	6.000.000,00	

	3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan											
							Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	6.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit Ayam Hasil Penetasan UPTD	12Laporan	12 Laporan	1.250.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12Laporan	1.360.000.000,00	
	3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan											
							Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	60.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak											
							Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	12 Laporan	12 Laporan	1.200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	1.300.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah jenis benih/bibit ternak dan pakan ternak yang diadakan	4Jenis	4 Jenis	2.777.069.010,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4Jenis	2.814.567.288,00	
	3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain											
							Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2 Ton	2 Ton	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Ton	500.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain											
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	200 Ekor	200 Ekor	2.277.069.010,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	200 Ekor	2.314.567.288,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
144	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Lahan Sawah berindeks Pertanaman (IP) diatas 2	9 persen	9 persen	700.885.828,00				9 persen	719.274.357,00	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan pertanian yang dikelola	5Ha	5 Ha	53.885.828,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	5Ha	72.274.357,00	
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya											
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	2 Laporan	10.885.828,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Laporan	29.274.357,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota											
							Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	3 Dokumen	3 Dokumen	43.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3 Dokumen	43.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana pertanian yang dibangun	8unit	8 unit	635.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	8unit	635.000.000,00	
	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian											
							Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	75.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani											
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	150.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit											
							Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	75.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	03	2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air											
							Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	35.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya											
							Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	75.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO

	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya											
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	75.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani											
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	75.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan											
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	75.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah pengembangan bibit ternak yang diawasi	2Laporan	2 Laporan	12.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2Laporan	12.000.000,00	
	3	27	03	2.03	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak											
							Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Laporan	12.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
145	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-28 persen	-28 persen	68.379.000,00				-28 persen	70.173.000,00	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	9Laporan	9 Laporan	10.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	9Laporan	10.794.000,00	
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	10.794.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner	5Laporan	5 Laporan	40.000.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	5Laporan	41.000.000,00	
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner											
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	5 Laporan	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	41.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laporan Penertiban Ternak	12Laporan	12 Laporan	18.379.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12Laporan	18.379.000,00	
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan											
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	18.379.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	18.379.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
146	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-	-	233.939.177,00				-	240.076.834,00	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Lahan Pertanian Yang dikendalikan	70Ha	70 Ha	233.939.177,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	70Ha	240.076.834,00	
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan											
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	40 Ha	40 Ha	186.189.363,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	40 Ha	192.327.020,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan											
							Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	25 Ha	25 Ha	13.893.814,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	25 Ha	13.893.814,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan											
							Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5 Ha	5 Ha	10.856.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	5 Ha	10.856.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan											
							Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	4 Laporan	4 Laporan	23.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4 Laporan	23.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
147	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang Mampu Meningkatkan Produksi/Produktifitasnya	76 persen	76 persen	128.779.230,00				76 persen	132.157.899,00	

	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani dan SDM Pertanian	53persen	53 persen	128.779.230,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	53persen	132.157.899,00	
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa										
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Unit	9 Unit	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	9 Unit	40.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa										
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	466 Unit	466 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	466 Unit	20.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	9 Unit	9 Unit	38.779.230,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	9 Unit	42.157.899,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota										
							Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	9 Unit	9 Unit	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	9 Unit	30.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO
						DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO				5.503.272.732,00					5.647.657.284,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				5.503.272.732,00					5.647.657.284,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				5.503.272.732,00					5.647.657.284,00	
148	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	4.231.270.787,00				100 persen	4.342.282.936,00	
	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	8Dokumen 8Dokumen	8 Dokumen	10.210.145,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	8Dokumen 8Dokumen	10.210.145,00	
	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 Dokumen	7 Dokumen	8.255.759,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	7 Dokumen	8.255.759,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1.954.386,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Laporan	1.954.386,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	4Laporan 4Laporan	4 Laporan	3.796.946.812,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4Laporan 4Laporan	3.801.946.811,00	
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	49 Orang/bulan	3.705.000.001,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	50 Orang/bulan	3.710.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	87.816.811,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Dokumen	87.816.811,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	1 Laporan	2.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Laporan	2.100.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	1 Laporan	2.030.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Laporan	2.030.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	2Laporan 2Laporan	2 Laporan	9.740.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2Laporan 2Laporan	9.740.000,00	
	3	30	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										

							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	2 Laporan	9.740.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Laporan	9.740.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	52Orang 52Orang	52 Orang	39.900.000,00		-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	52Orang 52Orang	44.900.000,00	
	3	30	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	20 Paket	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	20 Paket	10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36 Dokumen	12 Dokumen	12.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Dokumen	12.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1 Orang	7.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Orang	7.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	2 Orang	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Orang	15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	5Jenis 5Jenis	5 Jenis	123.840.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	5Jenis 5Jenis	188.840.000,00	
	3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45 Paket	15 Paket	1.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	15 Paket	1.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	24 Dokumen	2.640.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	24 Dokumen	2.640.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115 Laporan	101 Laporan	120.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	115 Laporan	185.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	23Jenis 23Jenis	17 Jenis	20.500.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	23Jenis 23Jenis	40.500.000,00	
	3	30	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	7.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3 Unit	7.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Unit	10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya											
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	6 Unit	2 Unit	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Unit	3.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO

	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai Jumlah Jasa Penunjang Urusan daerah yang dibiayai	4Jenis 4Jenis	4 Jenis 4 Jenis	177.198.142,00		-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4Jenis 4Jenis	188.210.292,00	
	3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	11.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	11.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	106.548.142,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	117.560.292,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	8.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	50.450.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	50.450.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai Jumlah Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	124Unit 124unit	116 unit 116 Unit 116 Unit	52.935.688,00		-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	124Unit 124unit	57.935.688,00	
	3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit	12 Unit	31.185.688,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Unit	31.185.688,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	1.250.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	1.250.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor										
							Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	4 Unit	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	1.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel										
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	1 Unit	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4 Unit	1.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	3.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	10 Unit	3.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	3 Unit	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4 Unit	20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
149	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan	57.14 undefined	57.14 undefined	658.298.567,00				57.14 undefined	675.569.771,00	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana perdagangan yang dikelola	5unit	5 unit	25.000.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	5unit	42.271.204,00	
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan										
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	5 Unit	42.271.204,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pasar Yang Berfungsi Baik	3unit	3 unit	633.298.567,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3unit	633.298.567,00	
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan										

							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	36 Dokumen	12 Dokumen	633.298.567,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Dokumen	633.298.567,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
150	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Distributor Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya yang Diawasi	100 undefined	100 undefined	538.859.292,00				100 undefined	552.996.872,00	
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting	6Kegiatan	2 Kegiatan	245.315.539,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2Kegiatan	250.315.539,00	
	3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat										
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	36 Laporan	12 Laporan	205.315.539,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	205.315.539,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat										
							Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	36 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	45.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	42Kali	14 Kali	285.001.753,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	14Kali	294.139.333,00	
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota										
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	36 Laporan	12 Laporan	35.001.753,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	40.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota										
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	27 Laporan	9 Laporan	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	9 Laporan	254.139.333,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan	2Kegiatan	2 Kegiatan	8.542.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2Kegiatan	8.542.000,00	
	3	30	04	2.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi										
							Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	6 Laporan	2 Laporan	4.270.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Laporan	4.270.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi										
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	6 Laporan	2 Laporan	4.272.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Laporan	4.272.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
151	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur ,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	63.87 %	63.87 %	45.133.906,00				63.87 %	46.318.045,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah kegiatan pelaksanaan metrologi legal,berupa tera,tera ulang dan pengawasan	2Kegiatan	720 Unit	45.133.906,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2Kegiatan	46.318.045,00	
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang										
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	725 Unit	720 Unit	45.133.906,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	725 Unit	46.318.045,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
152	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Usaha Produk lokal yang Masuk Pasar Persentase Pelaku Usaha UMKM yang produknya memenuhi syarat masuk pasar retrail	57,69 persen	42,30 persen undefined undefined	29.710.180,00				57,69persen	30.489.660,00	
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1Kegiatan	1 Kegiatan	29.710.180,00		Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1Kegiatan	30.489.660,00	
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota										
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	3 UMKM	1 UMKM	29.710.180,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 UMKM	30.489.660,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO
						DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO				2.445.098.264,00					2.467.474.000,00	

	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2.445.098.264,00						2.467.474.000,00	
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2.445.098.264,00						2.467.474.000,00	
153	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	2.385.610.021,00					100 persen	2.407.275.500,00	
	3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	8Dokumen	8 Dokumen	2.700.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	8Dokumen	2.700.000,00	
	3	31	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	6 Dokumen	1.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	1.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3 Laporan	1.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	45Laporan	45 Laporan	1.975.200.000,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	45Laporan	1.975.200.000,00	
	3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.920.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	19 Orang/bulan	1.920.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	54.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	8 Dokumen	54.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31 Laporan	18 Laporan	1.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	31 Laporan	1.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1Laporan	1 Laporan	8.500.000,00		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1Laporan	8.500.000,00	
	3	31	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	8.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3 Laporan	8.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	20Orang	-	49.174.188,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	20Orang	40.500.000,00	
	3	31	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	20 Paket	22.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	20 Paket	22.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Orang	2.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1 Orang	17.174.188,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Orang	16.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3Jenis	-	142.460.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3Jenis	162.460.000,00	
	3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	10 Paket	2.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	10 Paket	6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	3.960.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4 Dokumen	3.960.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	130.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	50 Laporan	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	25Jenis	20 Jenis	51.160.333,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	25Jenis	55.500.000,00	
	3	31	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	18.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	18.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0 Unit	23.160.333,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	10 Unit	12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3 Unit	25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	118.415.500,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3Jenis	118.415.500,00	
	3	31	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70 Laporan	70 Laporan	15.415.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	70 Laporan	15.415.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	56.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	8 Laporan	56.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	47.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	6 Laporan	47.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	31Unit	29 Unit	38.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	31Unit	44.000.000,00	
	3	31	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	3 Unit	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	6 Unit	3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel										
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4 Unit	2.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit	3.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	17 Unit	3.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	4.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	10.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
154	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	90 %	90 %	40.439.737,00				90 %	40.807.000,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5Dokumen	5 Dokumen	40.439.737,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	5Dokumen	40.807.000,00	
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	2 Dokumen	10.439.737,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Dokumen	10.807.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
155	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Unit Industri yang Berizin	undefined undefined	undefined undefined	9.909.999,00				undefined undefined	10.170.000,00	
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	6Jenis	undefined undefined	9.909.999,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	6Jenis	10.170.000,00	
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota										
							-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	5 Dokumen	4.909.999,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Dokumen	5.170.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)										
							Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
156	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri Kecil Menengah dan Perusahaan di Kawasan Industri Kota Palopo yang Datanya Masuk dalam SII Nasional Jumlah Penginputan Data pada Sistem	35persen	30 persen undefined undefined	9.138.507,00				35persen	9.221.500,00	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penginputan Data pada Sistem	3Laporan	3 Laporan	9.138.507,00		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3Laporan	9.221.500,00	
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)										

							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Dokumen	700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
	3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas											
							Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	2 Dokumen	2 Dokumen	8.438.507,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Dokumen	8.521.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
						DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO				2.153.763.093,00					3.013.700.000,00		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2.153.763.093,00					3.013.700.000,00		
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				2.153.763.093,00					3.013.700.000,00		
157	3	32	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	2.065.959.502,00				100 persen	2.913.700.000,00		
	3	32	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	8Dokumen	8 Dokumen	3.200.000,00		Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	8Dokumen	3.200.000,00	
	3	32	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	1.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	7 Dokumen	1.600.000,00	DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO
	3	32	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	1.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		1.600.000,00	DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO
	3	32	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	22Laporan	22 Laporan	1.750.259.502,00		Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	22Laporan	2.550.000.000,00	
	3	32	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	240 Orang/bulan	1.702.759.502,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	24 Orang/bulan	2.500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO
	3	32	01	2.02	0003	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	4 Dokumen	47.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Dokumen	50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO
	3	32	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	26Orang	25 Orang	12.000.000,00		-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	26Orang	13.000.000,00	
	3	32	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	23 Paket	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	25 Paket	13.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO
	3	32	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	1Jenis	1 Jenis	153.000.000,00		Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1Jenis	178.000.000,00	
	3	32	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		15.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO
	3	32	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO
	3	32	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	50 Laporan	140.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	30 Laporan	160.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO
	3	32	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4Jenis	-	35.000.000,00		Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4Jenis	45.000.000,00	
	3	32	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	30.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO

	3	32	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3 Unit	15.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO
	3	32	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	450Jenis	450 Jenis	84.000.000,00		Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	450Jenis	93.500.000,00	
	3	32	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	15.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO
	3	32	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	22.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3 Laporan	25.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO
	3	32	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Laporan	3.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO
	3	32	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	47.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO
	3	32	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	1Unit	1 Unit	28.500.000,00		Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1Unit	31.000.000,00	
	3	32	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 Unit	24.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		26.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO
	3	32	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	13 Unit	4.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	22 Unit	5.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO
158	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Luas Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya	600 Ha	600 Ha	87.803.591,00				600 Ha	100.000.000,00	
	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Lahan pertanian yang dikelola	600Ha	600 Ha	87.803.591,00		Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	600Ha	100.000.000,00	
	3	32	03	2.01	0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran											
							Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	1 Dokumen	67.803.591,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Dokumen	70.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO
	3	32	03	2.01	0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi											
							Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	300 Kepala Keluarga	300 Kepala Keluarga	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	300 Kepala Keluarga	30.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO
						SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO				57.588.611.140,00					60.968.385.487,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				57.588.611.140,00					60.968.385.487,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				57.588.611.140,00					60.968.385.487,00	
159	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	40.665.536.966,00				100 persen	42.938.001.147,00	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	7Dokumen	7 Dokumen	183.546.100,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7Dokumen	165.074.275,00	
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	98.765.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6 Dokumen	98.943.100,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	84.781.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	66.131.175,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO

	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	7Dokumen	7 Dokumen	18.414.655.821,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7Dokumen	18.952.617.885,00	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2100 Orang/bulan	2100 Orang/bulan	17.519.630.731,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2100 Orang/bulan	17.912.360.335,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.02	0003	Penatausahaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4652 Dokumen	4652 Dokumen	730.585.090,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4652 Dokumen	824.574.095,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	164.440.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	18 Laporan	215.683.455,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	4Laporan	4 Laporan	213.300.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Laporan	213.300.000,00	
	4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	213.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	213.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	40Orang	40 Orang	187.616.651,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	40Orang	192.961.000,00	
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	40 Paket	22.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	40 Paket	22.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	165.116.651,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	20 Orang	170.461.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	8Jenis	8 Jenis	2.986.073.200,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	8Jenis	3.473.063.932,00	
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	102.995.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Paket	102.995.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6 Paket	60.161.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	77.184.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Paket	77.852.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	225.894.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokumen	225.894.200,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material										
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Paket	20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	570.975.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300 Laporan	2.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	300 Laporan	2.415.186.232,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	5Unit	5 Unit	2.110.179.044,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5Unit	2.339.523.050,00	
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	9 Unit	250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	756.787.180,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	25 Unit	760.428.850,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	253.391.864,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Unit	429.094.200,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	4Jenis	4 Jenis	7.137.693.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Jenis	7.058.880.755,00	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	331.248.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	331.248,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.879.220.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	1.909.918.757,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	420.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	440.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.507.225.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	4.708.630.750,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	545Unit	545 Unit	3.197.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	545Unit	4.091.384.000,00	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	25 Unit	468.050.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	25 Unit	468.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	40 Unit	463.950.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	40 Unit	463.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		395 Unit	265.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		274.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	2.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7 Unit	2.884.484.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah laporan penatausahaan operasional KDH dan WKDH	36Laporan	36 Laporan	3.638.828.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	36Laporan	3.839.277.000,00	
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	188.828.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	28 Orang/Bulan	189.277.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30 Paket	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	300.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Orang	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	3.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	24 Orang/Bulan	3.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah kerumahtanggaan yang difasilitasi	3Jenis	3 Jenis	1.229.625.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	1.230.635.000,00	
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah										
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	740.540.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Paket	740.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah										
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	391.185.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Paket	391.185.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah										
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	97.900.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Paket	98.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan penataan secara kelembagaan	49Perangkat Daerah	49 Perangkat Daerah	427.089.350,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	49Perangkat Daerah	437.685.450,00	
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan										
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	150 Dokumen	150 Dokumen	170.279.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	150 Dokumen	178.676.950,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana										
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6 Laporan	6 Laporan	106.950.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6 Laporan	107.293.750,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi										
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	49 Dokumen	49 Dokumen	65.450.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	49 Dokumen	66.580.750,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah										
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	49 Dokumen	49 Dokumen	84.410.250,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	49 Dokumen	85.134.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan protokoleran	1Laporan	1 Laporan	939.930.800,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Laporan	943.598.800,00	
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan										
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	770 Laporan	770 Laporan	484.812.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	770 Laporan	488.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan										
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	720 Laporan	720 Laporan	235.598.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	720 Laporan	235.598.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan										
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	770 Laporan	770 Laporan	219.520.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	770 Laporan	220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
160	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tingkat Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	100 persen	15.215.856.974,00				100 persen	16.326.857.015,00	

	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah administrasi tata Pemerintahan	20Laporan	20 Laporan	1.661.250.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	20Laporan	2.209.058.110,00	
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan										
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	265.750.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	309.058.110,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.021.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah										
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	373.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Dokumen	400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	21Kegiatan	21 Kegiatan	11.691.125.796,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	21Kegiatan	11.809.317.727,00	
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual										
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	4 Dokumen	3.128.739.314,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4 Dokumen	3.128.739.314,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial										
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	3 Dokumen	2.146.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3 Dokumen	2.668.439.310,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat										
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	12 Dokumen	12 Dokumen	6.415.886.482,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokumen	6.012.139.103,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah layanan produk hukum daerah yang ditetapkan	857Perda/Perkada	857 Perda/Perkada	1.198.762.939,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	857Perda/Perkada	1.643.762.939,00	
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah										
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	450 Dokumen	450 Dokumen	445.934.850,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	450 Dokumen	547.808.063,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum										
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	3 Kasus	667.828.089,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Kasus	945.344.313,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum										
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	450 Dokumen	450 Dokumen	85.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	450 Dokumen	150.610.563,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kerjasama antar daerah	34Dokumen	34 Dokumen	664.718.239,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	34Dokumen	664.718.239,00	
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri										
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25 Dokumen	25 Dokumen	459.339.113,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	25 Dokumen	459.339.113,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri										
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	68.002.313,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	68.002.313,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama										
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	8 Laporan	8 Laporan	137.376.813,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	8 Laporan	137.376.813,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO

161	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Capaian Kinerja ProgramPembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah	100 persen	100 persen	1.707.217.200,00				100 persen	1.703.527.325,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rekomendasi terkait pengelolaan perekonomian daerah	12Laporan	12 Laporan	469.083.100,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12Laporan	446.761.055,00	
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	4 Dokumen	140.458.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4 Dokumen	150.227.701,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian										
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	10 Laporan	10 Laporan	172.630.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Pemantapan Infrastruktur Kota dan Pemantapan Pemerataan Pembangunan Wilayah	10 Laporan	176.469.954,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil										
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	4 Dokumen	155.994.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Pemantapan Infrastruktur Kota dan Pemantapan Pemerataan Pembangunan Wilayah	4 Dokumen	120.063.400,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah yang di rekomendasikan	25Laporan	25 Laporan	321.810.700,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	25Laporan	329.132.750,00	
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan										
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	107.038.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokumen	107.038.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan										
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	44.626.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Laporan	44.626.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan										
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	170.146.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	177.468.750,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pemenuhan 17 standar LPSE	83Dokumen	83 Dokumen	724.174.220,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	83Dokumen	735.013.920,00	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	63 Dokumen	63 Dokumen	154.334.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	63 Dokumen	155.415.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik										
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	8 Dokumen	8 Dokumen	268.839.920,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	8 Dokumen	269.598.920,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60 Orang	54 Orang	301.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	60 Orang	310.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah pemantauan SDA yang dilaksanakan	3Dokumen	3 Dokumen	192.149.180,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Pemantapan Infrastruktur Kota dan Pemantapan Pemerataan Pembangunan Wilayah	3Dokumen	192.619.600,00	
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	18 Dokumen	18 Dokumen	76.065.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Pemantapan Infrastruktur Kota dan Pemantapan Pemerataan Pembangunan Wilayah	18 Dokumen	76.065.200,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	14 Dokumen	14 Dokumen	57.720.230,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pemantapan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	14 Dokumen	58.190.250,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	14 Dokumen	14 Dokumen	58.363.750,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Pemantapan Infrastruktur Kota dan Pemantapan Pemerataan Pembangunan Wilayah	14 Dokumen	58.364.150,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO

						SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO				26.880.185.264,00						26.880.185.264,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				25.391.665.164,00						25.391.665.164,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD				25.391.665.164,00						25.391.665.164,00	
162	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	22.821.276.516,00					100 persen	22.821.276.516,00	
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	7Dokumen	7 Dokumen	9.945.500,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7Dokumen	9.945.500,00	
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	9.945.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		9.945.500,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	3Laporan	-	2.931.558.500,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Laporan	2.931.558.500,00	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		45 Orang/bulan	2.759.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		2.759.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	01	2.02	0003	Penatausahaan Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	161.560.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		161.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2 Laporan	10.498.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.498.500,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	1Laporan	1 Laporan	12.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Laporan	12.000.000,00	
	4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		12.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	5Jenis	5 Jenis	726.073.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5Jenis	726.073.000,00	
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		20 Paket	8.259.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		8.259.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket	10.000.000,00	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		61 Laporan	667.814.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		667.814.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	30Jenis	-	450.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30Jenis	450.000.000,00	
	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		30 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3Jenis	-	1.730.267.881,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	1.730.267.881,00	
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	242.619.385,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		242.619.385,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		6 Laporan	321.758.496,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		321.758.496,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1.165.890.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		1.165.890.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	33Unit	-	214.425.200,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	33Unit	214.425.200,00	
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		4 Unit	106.545.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		106.545.200,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		29 Unit	107.880.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		107.880.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	3Layanan	-	11.222.296.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Layanan	11.222.296.000,00	
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD											
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		25 Orang/Bulan	10.947.296.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.947.296.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		50 Paket	225.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		225.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		25 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	3Kegiatan	-	5.524.710.435,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Kegiatan	5.524.710.435,00	
	4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		25 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD											
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		1116 Laporan	4.201.657.035,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		4.201.657.035,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO

	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD											
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		16 Paket	1.303.053.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		1.303.053.400,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
163	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Prolegda yang Ditetapkan Menjadi Regulasi Daerah	100 persen	100 persen	2.570.388.648,00				100 persen	2.570.388.648,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Rancangan Perda yang difasilitasi	25Perda/Perkada	25 Perda/Perkada	1.124.971.441,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	25Perda/Perkada	1.124.971.441,00	
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		5 Dokumen	9.995.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		9.995.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		5 Dokumen	784.486.441,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		784.486.441,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan											
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		5 Dokumen	10.490.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.490.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		5 Dokumen	160.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		160.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD											
							Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		5 Dokumen	160.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		160.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	11Dokumen	-	75.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	11Dokumen	75.000.000,00	
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		2 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		2 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		2 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		2 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		2 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD											
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	4Dokumen	-	811.257.969,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Dokumen	811.257.969,00	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD											
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		25 Dokumen	460.149.969,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		460.149.969,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli											
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		3 Orang	72.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		72.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO

	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD											
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		2 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD											
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		20 Dokumen	269.108.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		269.108.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	3Aspirasi	-	430.902.738,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Aspirasi	430.902.738,00	
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		4 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD											
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses											
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		3 Dokumen	400.902.738,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		400.902.738,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	4Laporan	-	128.256.500,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Laporan	128.256.500,00	
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		3 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD											
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		25 Dokumen	12.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		12.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		4 Dokumen	100.756.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		100.756.500,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	X					NON URUSAN				1.488.520.100,00					1.488.520.100,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				1.488.520.100,00					1.488.520.100,00	
164	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	1.488.520.100,00				100 persen	1.488.520.100,00	
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	7Dokumen	7 Dokumen	14.994.200,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7Dokumen	14.994.200,00	
	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	14.994.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		14.994.200,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	3Laporan	-	4.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Laporan	4.000.000,00	
	X	XX	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		4.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	37Orang	37 Orang	260.520.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	37Orang	260.520.000,00	

	X	XX	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		37 Paket	17.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		17.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	X	XX	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		20 Orang	70.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	X	XX	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		25 Orang	173.020.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		173.020.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	5Jenis	5 Jenis	253.695.900,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5Jenis	253.695.900,00	
	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	32.145.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		32.145.900,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		24 Dokumen	221.550.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		221.550.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	33Unit	-	955.310.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	33Unit	955.310.000,00	
	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		30 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1500 Unit	935.310.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		935.310.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO				12.385.180.004,00					13.604.513.798,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				12.385.180.004,00					13.604.513.798,00	
	5	01				PERENCANAAN				12.385.180.004,00					13.604.513.798,00	
165	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	4.837.352.960,00				100 persen	4.817.645.520,00	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	5Dokumen	7 Dokumen	40.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5Dokumen	41.250.000,00	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Dokumen	26.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	14Laporan	14 Laporan	3.463.710.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	14Laporan	3.463.110.000,00	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3.340.210.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	34 Orang/bulan	3.339.610.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	01	2.02	0003	Pemeriksaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	115.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	115.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO

	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	8.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	14 Laporan	8.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	32Orang	32 Orang	278.900.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	32Orang	264.000.000,00	
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	28.900.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Paket	29.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	35 Orang	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	35 Orang	235.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	5Jenis	5 Jenis	454.500.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5Jenis	485.485.520,00	
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Paket	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Paket	6.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	12 Dokumen	77.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	60 Dokumen	77.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material											
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Paket	16.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	45 Laporan	350.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	50 Laporan	380.485.520,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	10Unit	8 Unit	126.000.000,00		-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	10Unit	100.000.000,00	
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		6 Unit	36.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	8 Unit	90.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6 Unit	70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	4Jenis	4 Jenis	440.442.960,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Jenis	430.000.000,00	
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	50.442.960,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO

	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	185.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	24 Laporan	185.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	185.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	185.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	17Unit	17 Unit	33.800.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	17Unit	33.800.000,00	
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	27.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	27.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	6.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	16 Unit	6.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
166	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata Capaian Kinerja Tahunan Terhadap Target Kinerja Tahunan dalam RKPD	100 persen	100 persen	4.212.330.056,50				100 persen	5.231.018.837,00	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan	3Dokumen	3 Dokumen	2.072.330.056,50		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Dokumen	2.481.018.837,00	
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik												
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	390.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Berita Acara	450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah												
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	390.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Berita Acara	450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota												
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	300.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Berita Acara	350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	992.330.056,50	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Dokumen	1.231.018.837,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pemerintah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikelola	2Laporan	2 Laporan	940.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2Laporan	1.100.000.000,00	
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah												
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	690.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Buku	300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi	10Laporan	10 Laporan	1.200.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	10Laporan	1.650.000.000,00	

	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	8 Laporan	600.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	8 Laporan	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	600.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Laporan	850.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
167	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	100 persen	100 persen	3.335.496.987,50				100 persen	3.555.849.441,00	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dokumen Perencanaannya Dikoordinasikan	49Perangkat Daerah	49 Perangkat Daerah	1.514.842.244,50		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	49Perangkat Daerah	1.701.842.596,00	
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	336.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan											
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	24 Laporan	1 Laporan	140.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	24 Laporan	105.884.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan											
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	2 Laporan	290.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	321.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		1 Laporan	55.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		57.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Dokumen	246.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7 Laporan	119.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	54.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	270.958.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	6 Laporan	600.842.244,50	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	246.000.596,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Dokumen Perencanaannya Dikoordinasikan	5Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	690.106.500,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5Perangkat Daerah	705.133.000,00	
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Dokumen	52.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian											
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7 Laporan	47.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian											

							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	38.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian										
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		1 Laporan	22.906.250,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA										
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan	73.672.250,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Laporan	77.355.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA										
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	3 Laporan	233.078.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Laporan	233.078.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA										
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	3 Laporan	230.450.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	230.450.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dokumen Perencanaannya Dikoordinasikan	9Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	1.130.548.243,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	9Perangkat Daerah	1.148.873.845,00	
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur										
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	73.672.250,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Laporan	77.355.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur										
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	195.500.493,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	200.500.493,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur										
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	212.160.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	217.160.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan										
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	4 Laporan	73.672.250,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	77.355.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan										
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	352.443.250,00	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	352.443.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan										
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	223.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	224.060.102,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO
						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO				25.000.000.000,00					25.000.000.000,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				25.000.000.000,00					25.000.000.000,00	
	5	02				KEUANGAN				25.000.000.000,00					25.000.000.000,00	
168	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	8.920.000.000,00				100 persen	8.920.000.000,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	4Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Dokumen	20.000.000,00	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Dokumen	15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai SAP	12Laporan	12 Laporan	5.230.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Laporan	5.230.000.000,00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600 Orang/bulan	600 Orang/bulan	4.500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	600 Orang/bulan	4.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.02	0003	Penatausahaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	700.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokumen	700.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	45 Laporan	15 Laporan	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	15 Laporan	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	1Laporan	1 Laporan	45.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Laporan	45.000.000,00	
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	45.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi ASN Perangkat Daerah yang dikelola	50Orang	50 Orang	65.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	50Orang	65.000.000,00	
	5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen	50 Dokumen	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	50 Dokumen	40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	2 Orang	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Orang	25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang ditatakelolakan	132Dokumen	132 Dokumen	520.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	132Dokumen	520.000.000,00	
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360 Laporan	120 Laporan	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	120 Laporan	500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	15Unit	15 Unit	225.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	15Unit	225.000.000,00	
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	14 Unit	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	14 Unit	200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	36Laporan	36 Laporan	2.245.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	36Laporan	2.245.000.000,00	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	45.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	600.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	1.600.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	1.600.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pemeliharaannya dibiayai	69Unit	69 Unit	570.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	69Unit	570.000.000,00	
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit	85.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	25 Unit	85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel										
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	36 Unit	12 Unit	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Unit	60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	30 Unit	85.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30 Unit	85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
169	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dokumen Penganggaran terhadap Dokumen Perencanaan	100 Dokumen	100 Dokumen	12.980.000.000,00				100 Dokumen	12.980.000.000,00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah	204 Dokumen	204 Dokumen	1.550.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	204 Dokumen	1.550.000.000,00	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS										
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	6 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS										

							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD										
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	147 Dokumen	49 Dokumen	70.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	49 Dokumen	70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD										
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	147 Dokumen	49 Dokumen	70.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	49 Dokumen	70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD										
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	147 Dokumen	49 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	49 Dokumen	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD										
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	147 Dokumen	49 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	49 Dokumen	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD										
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Dokumen	175.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD										
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Dokumen	175.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	100 Orang	900.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	100 Orang	900.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Kuangan yang diterbitkan	4.200Dokumen	4.200 Dokumen	1.950.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4.200Dokumen	1.950.000.000,00	
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12000 Dokumen	4000 Dokumen	1.200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4000 Dokumen	1.200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	600 Dokumen	200 Dokumen	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	200 Dokumen	500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	100 Orang	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	100 Orang	250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo	1Laporan	1 Laporan	2.120.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Laporan	2.120.000.000,00	
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1764 Laporan	588 Laporan	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	588 Laporan	500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban										
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1764 Dokumen	588 Dokumen	800.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	588 Dokumen	800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah										

							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota											
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 Dokumen	2 Dokumen	220.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Dokumen	220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	100 Orang	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	100 Orang	250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Bunga Utang dan Kegiatan Darurat yang dibiayai	3Laporan	3 Laporan	7.300.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Laporan	7.300.000.000,00	
	5	02	02	2.04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	3 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.800.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	1.800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak										
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	5.400.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	5.400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	1Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Dokumen	60.000.000,00	
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah										
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
170	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Barang yang Memenuhi SAP	100 persen	100 persen	3.100.000.000,00				100 persen	3.100.000.000,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Barang yang Memenuhi SAP	100Dokumen	100 Dokumen	3.100.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	100Dokumen	3.100.000.000,00	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga										
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	6 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah										
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	4 Laporan	1.100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Laporan	1.100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	3 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO

	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	6 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Laporan	200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah										
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	3 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah										
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	3 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	100 Orang	175.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	100 Orang	175.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO
						BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO				10.473.856.207,00					11.027.188.593,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				10.473.856.207,00					11.027.188.593,00	
	5	02				KEUANGAN				10.473.856.207,00					11.027.188.593,00	
171	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	6.928.171.974,00				100 persen	7.124.381.993,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	6Dokumen 6dokumen	6 dokumen	2.887.350,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	6Dokumen 6dokumen	2.887.350,00	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.383.750,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4 Dokumen	1.383.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.503.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Laporan	1.503.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	4Laporan 4Laporan	4 Laporan	5.684.030.734,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4Laporan 4Laporan	5.819.164.534,00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	456 Orang/bulan	456 Orang/bulan	4.430.442.134,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	456 Orang/bulan	4.440.442.134,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.251.338.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Dokumen	1.376.472.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.227.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Laporan	1.227.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.022.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Laporan	1.022.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan aset	1Laporan 1Laporan	1 Laporan	44.532.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1Laporan 1Laporan	44.532.000,00	

	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12 Laporan	44.532.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Laporan	44.532.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	38Orang 38Orang	38 Orang	44.800.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	38Orang 38Orang	44.800.000,00	
	5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	29.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Dokumen	29.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	3 Orang	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3 Orang	15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	4Jenis 4Jenis	4 Jenis	466.208.700,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	4Jenis 4Jenis	466.208.700,00	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.208.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Paket	10.208.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Paket	250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Dokumen	6.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	300 Laporan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	100 Laporan	200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	19Unit 19Unit	16 Unit	79.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	19Unit 19Unit	84.900.000,00	
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	8 Unit	20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	8 Unit	59.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	11 Unit	64.900.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis 3Jenis	3 Jenis	486.723.190,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	3Jenis 3Jenis	533.899.409,00	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	14.961.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	14.961.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	236.762.190,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	260.438.409,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	235.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	258.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	64Unit 64Unit	64 Unit	119.990.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	64Unit 64Unit	127.990.000,00	

	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	40 Unit	37.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	40 Unit	37.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	16.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	17.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel										
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	4 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	2 Unit	10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	34.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	20 Unit	37.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	22.990.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Unit	25.990.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
172	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Realisasi Pendapatan Daerah dengan Target Pendapatan Daerah	100 persen	100 persen	3.545.684.233,00				100 persen	3.902.806.600,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Pandapatan Asli Daerah yang terealisasi	221Milyar/Rupiah	196 Milyar/Rupiah	3.545.684.233,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	221Milyar/Rupiah	3.902.806.600,00	
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah										
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	234.659.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	13 Dokumen	258.124.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah										
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	14.451.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Dokumen	18.451.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah										
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	23.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	1 Laporan	25.850.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	477.816.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	525.597.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah										
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	371.131.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Dokumen	408.244.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah										
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	12 Layanan	295.752.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Layanan	325.327.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah										
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	199.882.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Dokumen	219.870.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah										
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	24 Dokumen	24 Dokumen	758.641.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	24 Dokumen	834.505.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah										
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	239.640.433,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Dokumen	263.604.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah										
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	618.783.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Dokumen	680.661.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	281.428.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah	12 Laporan	309.570.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah										

							Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		4 Laporan	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Peningkatan Ekonomi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Daerah		33.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO				9.541.616.561,00				9.791.951.608,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				9.541.616.561,00				9.791.951.608,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN				8.358.882.340,50				8.578.187.024,00	
173	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	4.453.827.268,25				100 persen	4.570.678.438,00	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	3Dokumen	3 Dokumen	6.000.000,25		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Dokumen	6.000.000,00	
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,25	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Dokumen	4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	2.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	3Laporan	3 Laporan	3.462.171.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Laporan	3.508.573.688,00	
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang/bulan	39 Orang/bulan	3.396.571.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	39 Orang/bulan	3.442.973.688,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	03	01	2.02	0003	Penatausahaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	63.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokumen	63.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	2.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	1Laporan	1 Laporan	7.914.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Laporan	7.914.000,00	
	5	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.070 Laporan	690 Laporan	7.914.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	690 Laporan	7.914.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	39Orang	39 Orang	60.556.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	39Orang	60.556.000,00	
	5	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang	7 Orang	60.556.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7 Orang	60.556.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	3Jenis	3 Jenis	350.621.018,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	391.069.500,00	

	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	10 Paket	3.265.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	10 Paket	3.265.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Dokumen	3 Dokumen	10.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Dokumen	10.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	422 Laporan	140 Laporan	336.855.518,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	144 Laporan	377.304.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	22Unit	22 Unit	70.898.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	22Unit	70.898.000,00	
	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	10 Unit	11.250.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	10 Unit	11.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	12 Unit	59.648.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Unit	59.648.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	9Jenis	9 Jenis	465.167.250,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	9Jenis	495.167.250,00	
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.137 Laporan	4.379 Laporan	137.167.250,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4379 Laporan	157.167.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	5 Laporan	124.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Laporan	134.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	3 Laporan	204.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Laporan	204.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	45Unit	45 Unit	30.500.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	45Unit	30.500.000,00	
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	63 Unit	21 Unit	17.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	21 Unit	17.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	24 Unit	13.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	24 Unit	13.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
174	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS yang ditempatkan sesuai Syarat Jabatan dan Syarat Kompetensinya	60 persen	60 persen	3.905.055.072,25				60 persen	4.007.508.586,00	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Kebutuhan pengadaan dan Pemberhentian ASN	1Laporan	1 Laporan	663.560.300,25		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Laporan	730.549.136,00	
	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	11.955 Laporan	3.985 Laporan	460.481.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3.985 Laporan	507.470.136,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi											
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	267 Dokumen	89 Dokumen	54.288.000,25	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	89 Dokumen	64.288.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN											
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 Lembaga	1 Lembaga	78.974.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Lembaga	78.974.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	13.509 Dokumen	4503 Dokumen	69.817.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4.503 Dokumen	79.817.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi	1Laporan	1 Laporan	1.218.181.772,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Laporan	1.253.646.450,00	
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1.194 Dokumen	398 Dokumen	54.213.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	398 Dokumen	54.213.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN											
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2.625 Dokumen	875 Dokumen	107.582.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	875 Dokumen	107.582.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	1 Dokumen	1.056.386.772,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	1.091.851.450,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	2Laporan	2 Laporan	1.846.950.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2Laporan	1.846.950.000,00	
	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN											
							Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	63 Orang	21 Orang	96.950.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	21 Orang	96.950.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN											
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	279 Orang	93 Orang	1.750.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	93 Orang	1.750.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO

	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2Laporan	2 Laporan	176.363.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2Laporan	176.363.000,00	
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai										
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	138 Orang	46 Orang	32.870.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	46 Orang	32.870.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN										
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	30 Laporan	10 Laporan	143.493.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	10 Laporan	143.493.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.182.734.220,50					1.213.764.584,00	
175	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	45 persen	45 persen	1.182.734.220,50				45 persen	1.213.764.584,00	
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan dan diikuti	2Laporan	2 Laporan	1.182.734.220,50		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2Laporan	1.213.764.584,00	
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan										
							0	435 Laporan	145 0	1.182.734.220,50	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	145 Laporan	1.213.764.584,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO
						BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO				3.215.037.876,00					3.299.388.012,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				3.215.037.876,00					3.299.388.012,00	
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				3.215.037.876,00					3.299.388.012,00	
176	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	2.486.703.417,00				100 persen	2.551.944.879,00	
	5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	2Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2Dokumen	1.500.000,00	
	5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 Dokumen	7 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7 Dokumen	1.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1 Laporan	500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	12Laporan	12 Laporan	1.932.916.417,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Laporan	1.955.500.000,00	
	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1.877.416.417,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	22 Orang/bulan	1.900.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1200 Dokumen	400 Dokumen	54.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	400 Dokumen	54.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	42 Laporan	14 Laporan	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	14 Laporan	1.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	12Laporan	12 Laporan	7.100.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Laporan	7.100.000,00	

	5	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	12 Laporan	7.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	7.100.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	39Orang	39 Orang	33.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	39Orang	33.000.000,00	
	5	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		36 Paket	18.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		18.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		3 Orang	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		15.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	2Jenis	2 Jenis	186.187.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2Jenis	227.694.879,00	
	5	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	12 Dokumen	3.960.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokumen	3.960.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60 Laporan	182.227.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		223.734.879,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	6Unit	6 Unit	56.000.000,00		-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6Unit	56.000.000,00	
	5	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		30.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Unit	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		6.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		20.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	224.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	224.000.000,00	
	5	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2400 Laporan	800 Laporan	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	800 Laporan	35.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	97.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	97.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	92.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		92.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO

	5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	47Unit	43 Unit	46.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	47Unit	47.150.000,00	
	5	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	26.250.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		26.250.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	5 Unit	750.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6 Unit	900.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108 Unit	36 Unit	13.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	39 Unit	14.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	6.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
177	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, dan Teknologi yang diwujudkan	100 persen	100 persen	728.334.459,00				100 persen	747.443.133,00	
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah hasil kelitbangan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti	3dokumen 1Dokumen	1 Dokumen	168.385.459,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1dokumen 1Dokumen	175.000.000,00	
	5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	3 Laporan	1 Laporan	168.385.459,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	175.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Hasil kelitbangan Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	1Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Dokumen	85.000.000,00	
	5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial										
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	85.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah hasil kelitbangan ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	3Dokumen	3 Dokumen	280.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Dokumen	280.000.000,00	
	5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	85.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup										
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		1 Dokumen	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		45.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	05	02	2.03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan										
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	3 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	150.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi yang difasilitasi	15Inovasi	12 Inovasi	194.949.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	15Inovasi	207.443.133,00	
	5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi										

							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	3 Laporan	1 Laporan	44.949.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	44.949.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan										
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	162.494.133,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO
						INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO				7.973.317.439,00					8.915.321.306,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				7.973.317.439,00					8.915.321.306,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH				7.973.317.439,00					8.915.321.306,00	
178	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	6.130.302.439,00				-	7.057.306.306,00	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	8Dokumen	-	240.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	8Dokumen	240.000,00	
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 Dokumen	8 Dokumen	120.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7 Dokumen	120.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO
	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	120.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		120.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	24Laporan	-	5.008.543.133,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	24Laporan	5.880.547.000,00	
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/bulan	50 Orang/bulan	4.974.141.133,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	50 Orang/bulan	5.846.145.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO
	6	01	01	2.02	0003	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	34.272.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokumen	34.272.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO
	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 Laporan	12 Laporan	130.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	130.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	30Orang	-	250.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30Orang	270.000.000,00	
	6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	30 Orang	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30 Orang	270.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3Jenis	-	358.600.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	383.600.000,00	
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	300 Paket	100 Paket	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	100 Paket	5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	3.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Dokumen	3.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan	150 Laporan	350.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	150 Laporan	375.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO

	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	30Jenis	-	100.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30Jenis	100.000.000,00	
	6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	90 Unit	30 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30 Unit	100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3Jenis	-	322.919.306,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	330.919.306,00	
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1470 Laporan	490 Laporan	72.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	490 Laporan	75.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	115.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Laporan	120.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	135.919.306,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6 Laporan	135.919.306,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	42unit	-	90.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	42unit	92.000.000,00	
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	28.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	38 Unit	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	38 Unit	25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	34.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		34.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO
179	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-	-	1.667.210.000,00				-	1.677.210.000,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	161Laporan	-	1.218.600.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	161Laporan	1.228.600.000,00	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	120 Laporan	40 Laporan	133.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	40 Laporan	133.700.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	141 Laporan	47 Laporan	586.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	47 Laporan	586.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja											
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	90 Laporan	30 Laporan	113.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30 Laporan	113.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan											
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	12 Laporan	4 Laporan	180.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Laporan	185.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP											
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	78 Dokumen	26 Dokumen	205.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	26 Dokumen	210.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO

	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	24Laporan	-	448.610.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	24Laporan	448.610.000,00	
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah											
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	36 Laporan	12 Laporan	113.110.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	113.110.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	60 Laporan	20 Laporan	335.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	20 Laporan	335.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO
180	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-	-	175.805.000,00				-	180.805.000,00	
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	-	30Laporan	-	175.805.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30Laporan	180.805.000,00	
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah											
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	10 perangkat daerah	40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi											
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20 Kegiatan	27 Kegiatan	140.805.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	20 Kegiatan	140.805.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO
						KECAMATAN WARA				6.130.339.836,00					6.186.036.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				6.130.339.836,00					6.186.036.000,00	
	7	01				KECAMATAN				6.130.339.836,00					6.186.036.000,00	
181	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	5.266.237.386,00				100 persen	5.314.086.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10Dokumen	10 Dokumen	11.100.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	10Dokumen	11.100.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	5.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7 Dokumen	5.500.000,00	KECAMATAN WARA
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	5.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Laporan	5.600.000,00	KECAMATAN WARA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	17Laporan	17 Laporan	4.994.735.386,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	17Laporan	5.042.584.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	4.965.390.386,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	70 Orang/bulan	5.012.999.000,00	KECAMATAN WARA
	7	01	01	2.02	0003	Pemeriksaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	24.245.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Dokumen	24.245.000,00	KECAMATAN WARA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	17 Laporan	5.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	17 Laporan	5.340.000,00	KECAMATAN WARA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	12Laporan	12 Laporan	6.715.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Laporan	6.715.000,00	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6.715.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	6.715.000,00	KECAMATAN WARA

	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	2Orang	2 Orang	8.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2Orang	8.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1 Paket	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Paket	3.000.000,00	KECAMATAN WARA
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	2 Orang	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Orang	5.000.000,00	KECAMATAN WARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	2Jenis	2 Jenis	37.768.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2Jenis	37.768.000,00	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	2.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	24 Dokumen	2.400.000,00	KECAMATAN WARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	10 Laporan	35.368.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	10 Laporan	35.368.000,00	KECAMATAN WARA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	6Jenis	6 Jenis	20.250.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6Jenis	20.250.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	3 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN WARA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	3 Unit	10.250.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Unit	10.250.000,00	KECAMATAN WARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	155.369.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	155.369.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	6.936.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	6.936.000,00	KECAMATAN WARA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	25.880.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	36 Laporan	25.880.000,00	KECAMATAN WARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	122.553.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	122.553.000,00	KECAMATAN WARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	11Unit	11 unit	32.300.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	11Unit	32.300.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	19.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Unit	19.800.000,00	KECAMATAN WARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7 Unit	3.000.000,00	KECAMATAN WARA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	9.500.000,00	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	9.500.000,00	KECAMATAN WARA

182	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 persen	100 persen	606.888.400,00				100 persen	612.400.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah jenis layanan urusan yang diselenggarakan Jumlah Jenis Layanan Urusan yang diselenggarakan	6Jenis 6Jenis	6 Jenis 6 Jenis	594.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6Jenis 6Jenis	600.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	594.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	600.000.000,00	KECAMATAN WARA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis layanan yang di prores tepat waktu	24Jenis 24Jenis	24 Jenis	12.888.400,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	24Jenis 24Jenis	12.400.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha											
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	6.900.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokumen	6.900.000,00	KECAMATAN WARA
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	5.988.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	5.500.000,00	KECAMATAN WARA
183	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif	100 persen	100 persen	13.428.050,00				100 persen	13.550.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	6Desa/Kelurahan 6Desa/Kelurahan	6 Desa/Kelurahan 6 Kelurahan	13.428.050,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6Desa/Kelurahan 6Desa/Kelurahan	13.550.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6.600.000,00	KECAMATAN WARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1 Unit	1.878.050,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	2.000.000,00	KECAMATAN WARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	36 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	4.950.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Pokmas / Ormas	4.950.000,00	KECAMATAN WARA
184	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial	100 persen	100 persen	243.786.000,00				100 persen	246.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kelurahan yang bebas konflik sosial	6Desa/Kelurahan	6 Desa/Kelurahan	243.786.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6Desa/Kelurahan	246.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	243.786.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	246.000.000,00	KECAMATAN WARA
						KECAMATAN WARA UTARA				5.247.405.451,00					5.295.061.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				5.247.405.451,00					5.295.061.000,00	
	7	01				KECAMATAN				5.247.405.451,00					5.295.061.000,00	
185	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	4.345.000.851,00				100 persen	4.384.461.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	5Dokumen	5 Dokumen	1.820.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5Dokumen	1.820.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	910.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		910.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	910.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		910.000,00	KECAMATAN WARA UTARA

	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	12Laporan	12 laporan	4.122.090.851,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Laporan	4.161.551.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		672 Orang/bulan	4.097.780.851,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		4.137.241.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	01	2.02	0003	Penatausahaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	23.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		23.400.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Laporan	910.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		910.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	12Laporan	12 laporan	10.800.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Laporan	10.800.000,00	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	10.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.800.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi kepegawaian yang ditatakelolakan	45Orang	2 Jenis	14.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	15Orang	14.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		15 Paket	9.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		9.000.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		2 Orang	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.000.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	3Jenis	3 Jenis	29.320.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	29.320.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		10 Paket	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		2.000.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		2.000.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		2.000.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		3 Paket	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		2.000.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	1.320.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		1.320.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		20.000.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	4Jenis	3 Jenis	20.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Jenis	20.000.000,00	

	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		4 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.000.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.000.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya											
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		4 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.000.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		4 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.000.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	117.180.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	117.180.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporan	19.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		19.000.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		10 Laporan	73.180.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		73.180.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang pemeliharaannya dibiayai	6Unit	6 Jenis	29.790.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6Unit	29.790.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	22.590.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		22.590.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	2.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		2.400.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 Unit	1.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		1.800.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		3.000.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
186	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 persen	100 persen	623.735.400,00				100 persen	629.400.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah layanan urusan yang diselenggarakan	2Kegiatan	7 Jenis	611.135.400,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2Kegiatan	616.800.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		6 Laporan	611.135.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		616.800.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis layanan yang diproses tepat waktu	2Kegiatan	10 Jenis	12.600.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2Kegiatan	12.600.000,00	

	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		6 Laporan	12.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		12.600.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
187	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif	100 persen	100 persen	23.585.800,00				100 persen	23.800.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	6Desa/Kelurahan	6 kelurahan	23.585.800,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6Desa/Kelurahan	23.800.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		6 Lembaga Kemasyarakatan	8.585.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		8.800.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		7 Pokmas / Ormas	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.000.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
188	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik sosia	100 persen	100 persen	255.083.400,00				100 persen	257.400.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kelurahan yang bebas konflik	6Desa/Kelurahan	6 kelurahan	255.083.400,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6Desa/Kelurahan	257.400.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	255.083.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		257.400.000,00	KECAMATAN WARA UTARA
						KECAMATAN WARA TIMUR				7.084.383.787,00					7.148.722.288,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				7.084.383.787,00					7.148.722.288,00	
	7	01				KECAMATAN				7.084.383.787,00					7.148.722.288,00	
189	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	6.040.761.687,00				100 persen	6.095.622.288,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100Dokumen	5 dokumen	11.100.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	100Dokumen	11.100.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 Dokumen	5.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.500.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	5.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.600.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	20Laporan	20 Laporan	5.453.601.687,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	20Laporan	5.508.462.288,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		73 Orang/bulan	5.388.601.687,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.443.462.288,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		4 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		30.000.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.000.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		17 Laporan	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		30.000.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	12Laporan	12 Laporan	6.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Laporan	6.000.000,00	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		6.000.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	73Orang	73 Orang	65.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	73Orang	65.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		45.000.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		2 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		20.000.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	4Jenis	4 Jenis	99.560.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Jenis	99.560.000,00	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		15.000.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3 Dokumen	3.960.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		3.960.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		50.000.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	30.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		30.600.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	36Jenis	12 Jenis	85.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Jenis	85.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		5 Unit	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		35.000.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		7 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		50.000.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	217.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	217.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		25.000.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	27.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		27.000.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	165.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		165.000.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	69Unit	69 Unit	103.500.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	69Unit	103.500.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		3 Unit	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		25.000.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel										
							Jumlah Mebel yang Dipelihara		35 Unit	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		15.000.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2 Unit	18.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		18.500.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		30.000.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		15 Unit	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		15.000.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
190	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata -Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 persen	100 persen	732.349.000,00				100 persen	739.000.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan Urusan yang diselenggarakan	7Jenis	7 Jenis	702.349.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7Jenis	709.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		7 Laporan	702.349.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		709.000.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis layanan yang di proses tepat waktu	24Jenis	24 Jenis	30.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	24Jenis	30.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha										
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		12 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		15.000.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan										
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		12 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		15.000.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
191	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif	100 persen	100 persen	4.459.500,00				100 persen	4.500.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	7Desa/Kelurahan	7 Desa/Kelurahan	4.459.500,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7Desa/Kelurahan	4.500.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	2.959.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		3.000.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		7 Unit	500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		500.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		7 Pokmas / Ormas	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		1.000.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR

192	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial	7 kelurahan	7 kelurahan	306.813.600,00				7 kelurahan	309.600.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indinesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7Desa/Kelurahan	7 Kelurahan	306.813.600,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7Desa/Kelurahan	309.600.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	306.813.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		309.600.000,00	KECAMATAN WARA TIMUR
						KECAMATAN WARA BARAT				4.598.621.535,00					4.778.800.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				4.598.621.535,00					4.778.800.000,00	
	7	01				KECAMATAN				4.598.621.535,00					4.778.800.000,00	
193	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	4.012.821.535,00				100 persen	4.193.000.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10Dokumen	10 Dokumen	4.500.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	10Dokumen	5.800.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		2.000.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2 Dokumen	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		1.800.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		2.000.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	81Laporan	81 Laporan	3.830.077.535,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	81Laporan	4.011.900.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		56 Orang/bulan	3.779.777.535,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		3.960.000.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
	7	01	01	2.02	0003	Penatausahaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	48.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		50.000.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Laporan	1.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		1.900.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	9600000Laporan	12 Laporan	10.200.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	9600000Laporan	9.600.000,00	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	10.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		9.600.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	28Orang	28 Orang	32.544.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	28Orang	33.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	11.544.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		12.000.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12 Dokumen	11.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		11.000.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										

							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		2 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	310Jenis	310 Jenis	39.600.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	310Jenis	42.800.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		1.800.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	1.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		2.000.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		6 Laporan	8.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		9.000.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6 Laporan	28.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		30.000.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset yang di tatakelolakan	15Unit	8 Unit	7.500.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	15Unit	7.500.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		8 Unit	7.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		7.500.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah yang dibiayai	3Jenis	4 Laporan	41.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	47.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	18.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		23.000.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		16.000.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	8.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		8.000.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	15Unit	15 Unit 15 Unit	47.400.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	15Unit	35.400.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 Unit	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		25.000.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		8 Unit	2.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		2.400.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		8.000.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
194	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata -Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 persen	100 persen	522.800.000,00				100 persen	522.800.000,00	

	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis layanan yang di proses tepat waktu	12Jenis	12 Jenis	11.400.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Jenis	11.400.000,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	11.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		11.400.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan Urusan yang diselenggarakan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25Jenis	25 Jenis 60 jenis	500.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	25Jenis	500.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		60 Laporan	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif		500.000.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12Unit	12 Unit 12 Dokumen	11.400.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Unit	11.400.000,00	
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum										
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		12 Dokumen	11.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		11.400.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
195	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif	100 persen	100 persen	22.800.000,00				100 persen	22.800.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	5Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan	22.800.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5Desa/Kelurahan	22.800.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		4 Lembaga Kemasyarakatan	11.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		11.400.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Pokmas / Ormas	11.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		11.400.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
196	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial	100 persen	100 persen	40.200.000,00				100 persen	40.200.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kelurahan yang bebas konflik sosial	5Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan	40.200.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5Desa/Kelurahan	40.200.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	40.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		40.200.000,00	KECAMATAN WARA BARAT
						KECAMATAN WARA SELATAN				4.463.797.967,00					4.483.797.967,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				4.395.597.967,00					4.415.597.967,00	
	7	01				KECAMATAN				4.395.597.967,00					4.415.597.967,00	
197	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	3.827.209.917,00				100 persen	3.847.209.917,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Urusan yang diselenggarakan	7Dokumen	7 dokumen	3.280.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7Dokumen	3.280.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN WARA SELATAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	2.280.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7 Laporan	2.280.000,00	KECAMATAN WARA SELATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	23Laporan	23 Laporan	3.603.177.917,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	23Laporan	3.603.177.917,00	

	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	54 Orang/bulan	3.543.584.917,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	50 Orang/bulan	3.543.584.917,00	KECAMATAN WARA SELATAN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	4 Dokumen	57.008.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Dokumen	57.008.000,00	KECAMATAN WARA SELATAN
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21 Laporan	14 Laporan	2.585.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	21 Laporan	2.585.000,00	KECAMATAN WARA SELATAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	12Laporan	12 Laporan	7.200.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Laporan	7.200.000,00	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	7.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	7.200.000,00	KECAMATAN WARA SELATAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	11Orang	11 Orang	7.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	11Orang	7.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	11 Paket	42 Paket	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	11 Paket	7.000.000,00	KECAMATAN WARA SELATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	3Jenis	3 Jenis	56.100.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	66.100.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	94 Paket	94 Paket	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	94 Paket	5.000.000,00	KECAMATAN WARA SELATAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	1.100.000,00	KECAMATAN WARA SELATAN
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	15 Laporan	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	15 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN WARA SELATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN WARA SELATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	3Unit	3 Unit	24.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Unit	24.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	24.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Unit	24.000.000,00	KECAMATAN WARA SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	56.452.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	56.452.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN WARA SELATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	36.452.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Laporan	36.452.000,00	KECAMATAN WARA SELATAN

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	72Laporan	72 Laporan	70.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	72Laporan	80.000.000,00		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	5 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	16 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN WARA SELATAN	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	10 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	16 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN WARA SELATAN	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	25.000.000,00	KECAMATAN WARA SELATAN	
198	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata -Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 persen	100 persen	402.940.600,00				100 persen	402.940.600,00		
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan Urusan yang diselenggarakan	1Jenis	1 Jenis	396.340.600,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Jenis	396.340.600,00		
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	396.340.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Laporan	396.340.600,00	KECAMATAN WARA SELATAN	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis layanan yang di proses tepat waktu	24Jenis	12 Jenis	6.600.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	24Jenis	6.600.000,00		
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha											
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	7 Dokumen	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN WARA SELATAN	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	7 Laporan	7 Laporan	3.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7 Laporan	3.600.000,00	KECAMATAN WARA SELATAN	
199	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif	100 persen	100 persen	3.716.250,00				100 persen	3.716.250,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	4Desa/Kelurahan	4 kelurahan	3.716.250,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Desa/Kelurahan	3.716.250,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	3.716.250,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	3.716.250,00	KECAMATAN WARA SELATAN	
200	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial	100 persen	100 persen	161.731.200,00				100 persen	161.731.200,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kelurahan yang bebas konflik sosial Jumlah Kelurahan yang bebas konflik sosial	4Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan 4 kelurahan	161.731.200,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Desa/Kelurahan	161.731.200,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	12 Laporan	161.731.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	8 Laporan	161.731.200,00	KECAMATAN WARA SELATAN	
	X					NON URUSAN				68.200.000,00					68.200.000,00		
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				68.200.000,00					68.200.000,00		
201	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	68.200.000,00				100 persen	68.200.000,00		
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	68.200.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	68.200.000,00		
	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	68.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Laporan	68.200.000,00	KECAMATAN WARA SELATAN	

						KECAMATAN BARA				5.837.849.197,00						5.938.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				5.837.849.197,00						5.938.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN				5.837.849.197,00						5.938.000.000,00	
202	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	5.184.605.992,00				100 persen	5.273.600.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	12Laporan	12 Laporan	11.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Laporan	11.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		7.000.000,00	KECAMATAN BARA
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		4.000.000,00	KECAMATAN BARA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	8Laporan	8 Laporan	4.566.500.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	8Laporan	4.640.000.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		70 Orang/bulan	4.532.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		4.600.000.000,00	KECAMATAN BARA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		4 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		35.000.000,00	KECAMATAN BARA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		20 Laporan	4.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.000.000,00	KECAMATAN BARA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	12Laporan	12 Laporan	6.500.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Laporan	7.000.000,00	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	6.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		7.000.000,00	KECAMATAN BARA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	295Orang	100 Orang	61.267.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	120Orang	63.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		75 Paket	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		26.000.000,00	KECAMATAN BARA
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		3 Orang	36.267.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		37.000.000,00	KECAMATAN BARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	2Jenis	2 Jenis	119.338.992,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2Jenis	121.600.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		36 Paket	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		21.000.000,00	KECAMATAN BARA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		18 Paket	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		31.000.000,00	KECAMATAN BARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		24 Dokumen	9.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		9.600.000,00	KECAMATAN BARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		53 Laporan	59.738.992,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		60.000.000,00	KECAMATAN BARA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	44Unit	13 Unit	90.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	20Unit	95.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		35.000.000,00	KECAMATAN BARA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		5 Unit	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		30.000.000,00	KECAMATAN BARA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 Unit	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		30.000.000,00	KECAMATAN BARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	240.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	244.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2100 Laporan	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		37.000.000,00	KECAMATAN BARA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 Laporan	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		32.000.000,00	KECAMATAN BARA
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.000.000,00	KECAMATAN BARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		35 Laporan	170.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		170.000.000,00	KECAMATAN BARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	47Unit	15 Unit	90.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	20Unit	92.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		25.000.000,00	KECAMATAN BARA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		21.000.000,00	KECAMATAN BARA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		46.000.000,00	KECAMATAN BARA
203	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 persen	100 persen	504.129.338,00				100 persen	504.300.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	500.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	-	500.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											

							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		500.000.000,00	KECAMATAN BARA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis layanan yang di proses tepat waktu Jumlah Jenis layanan yang di proses tepat waktu	3Jenis 6Jenis	2 Jenis 3 Jenis	4.129.338,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis 2Jenis	4.300.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha										
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		2 Dokumen	2.129.338,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		2.200.000,00	KECAMATAN BARA
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan										
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		3 Laporan	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		2.100.000,00	KECAMATAN BARA
204	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif	100 persen	100 persen	49.113.867,00				100 persen	55.100.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	5Desa/Kelurahan 5Desa/Kelurahan	5 Desa/Keluraha n	49.113.867,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5Desa/Kelurahan 5Desa/Kelurahan	55.100.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		5.100.000,00	KECAMATAN BARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		5 Unit	44.113.867,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		50.000.000,00	KECAMATAN BARA
205	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial	100 persen	100 persen	100.000.000,00				100 persen	105.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kelurahan yang bebas konflik sosial	5Desa/Kelurahan	5 Desa/Keluraha n	100.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5Desa/Kelurahan	105.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		7 Laporan	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		105.000.000,00	KECAMATAN BARA
						KECAMATAN MUNGKAJANG				4.281.635.320,00					4.320.520.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				4.281.635.320,00					4.320.520.000,00	
	7	01				KECAMATAN				4.281.635.320,00					4.320.520.000,00	
206	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	3.716.106.305,00				100 persen	3.749.855.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10Dokumen	7 Dokumen	1.700.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	10Dokumen	2.240.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		1.240.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Laporan	700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		1.000.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	14Laporan	14 Laporan	3.428.406.305,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	14Laporan	3.453.415.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		55 Orang/bulan	3.388.806.305,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		3.412.715.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2 Dokumen	38.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		39.000.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	1.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		1.700.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	12Laporan	12 Laporan	7.500.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Laporan	7.700.000,00	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	7.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		7.700.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	56Orang	55 Orang	16.650.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	56Orang	18.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		55 Paket	7.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		8.000.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		2.000.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		4 Orang	7.650.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		8.000.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	5Jenis	5 Jenis	60.500.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5Jenis	62.500.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		94 Paket	5.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		6.000.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		3.500.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		15 Laporan	52.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		53.000.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	2Jenis	2 Jenis	24.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2Jenis	26.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 Unit	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		13.000.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		13.000.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	8Jenis	8 Jenis	127.500.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	8Jenis	129.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	18.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		18.500.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporan	22.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		23.000.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5 Laporan	87.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		87.500.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	165Laporan	55 Laporan	49.850.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	55Laporan	51.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		13 Unit	27.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		28.000.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel										
							Jumlah Mebel yang Dipelihara		22 Unit	2.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		2.800.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		19 Unit	3.650.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		3.700.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	16.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		16.500.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
207	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata -Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 persen	100 persen	397.668.480,00				100 persen	401.280.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan Urusan yang diselenggarakan	4Kelurahan	4 Kelurahan	396.468.480,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Kelurahan	400.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		4 Laporan	396.468.480,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		400.000.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis layanan yang di proses tepat waktu	6Layanan	2 Layanan	1.200.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2Layanan	1.280.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha										
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		2 Dokumen	600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		640.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan										
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		4 Laporan	600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		640.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
208	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif	100 persen	100 persen	5.500.050,00				100 persen	5.550.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	4Kelurahan	4 Kelurahan	5.500.050,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Kelurahan	5.550.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		4 Lembaga Kemasyarakatan	3.500.050,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		3.550.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		18 Unit	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		1.000.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		1.000.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
209	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial	100 persen	100 persen	162.360.485,00				100 persen	163.835.000,00	

	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	4Laporan	4 Laporan	162.360.485,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Laporan	163.835.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		8 Laporan	162.360.485,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		163.835.000,00	KECAMATAN MUNGKAJANG
						KECAMATAN SENDANA				4.358.055.294,00					4.387.960.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				808.286.294,00		-			826.310.000,00	
	7	01				KECAMATAN				808.286.294,00					826.310.000,00	
210	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	240.443.294,00				100 persen	253.310.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10Dokumen	10 Dokumen	400.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	10Dokumen	500.000,00	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Laporan	500.000,00	KECAMATAN SENDANA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	17Laporan	17 Laporan	32.760.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	17Laporan	35.760.000,00	
	7	01	01	2.02	0003	Penatausahaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	32.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Dokumen	35.000.000,00	KECAMATAN SENDANA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	360.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Laporan	360.000,00	KECAMATAN SENDANA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	17 Laporan	400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	17 Laporan	400.000,00	KECAMATAN SENDANA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	12Laporan	12 Laporan	7.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Laporan	7.000.000,00	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN SENDANA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	1Orang	1 Orang	14.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Orang	17.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket	18 Paket	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	18 Paket	7.000.000,00	KECAMATAN SENDANA
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	2 Orang	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Orang	10.000.000,00	KECAMATAN SENDANA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	2Jenis	2 Jenis	37.000.000,00		-	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2Jenis	38.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	24 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN SENDANA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	7 Laporan	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7 Laporan	36.000.000,00	KECAMATAN SENDANA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	6Unit	6 Unit	11.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6Unit	14.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	3 Unit	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Unit	6.000.000,00	KECAMATAN SENDANA

	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	3 Unit	8.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Unit	8.000.000,00	KECAMATAN SENDANA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	4Jenis	4 Jenis	112.483.294,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Jenis	113.600.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3300 Laporan	1100 Laporan	18.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1100 Laporan	18.600.000,00	KECAMATAN SENDANA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Laporan	36 Laporan	14.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	36 Laporan	14.500.000,00	KECAMATAN SENDANA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	27 Laporan	9 Laporan	79.383.294,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	9 Laporan	80.500.000,00	KECAMATAN SENDANA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	20Unit	20 Unit	25.800.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	20Unit	27.450.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	14.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN SENDANA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Unit	1.100.000,00	KECAMATAN SENDANA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7 Unit	850.000,00	KECAMATAN SENDANA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	10.500.000,00	KECAMATAN SENDANA
211	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata -Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 persen	100 persen	401.156.800,00				100 persen	404.800.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan Urusan yang diselenggarakan	4Jenis	4 Jenis	2.400.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Jenis	2.400.000,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokumen	2.400.000,00	KECAMATAN SENDANA
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan Urusan yang diselenggarakan	4Jenis	4 Jenis	396.356.800,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Jenis	400.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	396.356.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Laporan	400.000.000,00	KECAMATAN SENDANA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis layanan yang di proses tepat waktu	12Jenis	12 Jenis	2.400.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Jenis	2.400.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha										
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokumen	2.400.000,00	KECAMATAN SENDANA
212	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif	100persen 100persen	100 persen 100 persen	4.955.000,00				100persen 100persen	5.000.000,00	

	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	4Desa/Kelurahan 4Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	4.955.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Desa/Kelurahan 4Desa/Kelurahan	5.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	3.050.000,00	KECAMATAN SENDANA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	955.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Unit	950.000,00	KECAMATAN SENDANA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Pokmas / Ormas	1.000.000,00	KECAMATAN SENDANA
213	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial	100 persen	100 persen	161.731.200,00				100 persen	163.200.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kelurahan yang bebas konflik sosial	4Desa/Kelurahan 4Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	161.731.200,00		-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Desa/Kelurahan 4Desa/Kelurahan	163.200.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	161.731.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Laporan	163.200.000,00	KECAMATAN SENDANA
	X					NON URUSAN				3.549.769.000,00					3.561.650.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				3.549.769.000,00					3.561.650.000,00	
214	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	3.549.769.000,00				100 persen	3.561.650.000,00	
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10Dokumen	10 Dokumen	500.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	10Dokumen	1.450.000,00	
	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7 Dokumen	1.450.000,00	KECAMATAN SENDANA
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	17Laporan	17 Laporan	3.549.269.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	17Laporan	3.560.200.000,00	
	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	3.549.269.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	60 Orang/bulan	3.560.200.000,00	KECAMATAN SENDANA
						KECAMATAN TELLUWANUA				6.246.850.753,00					6.303.583.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				6.246.850.753,00					6.303.583.000,00	
	7	01				KECAMATAN				6.246.850.753,00					6.303.583.000,00	
215	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	5.256.247.153,00				100 persen	5.303.983.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Urusan yang diselenggarakan	7Dokumen	7 Dokumen	9.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7Dokumen	9.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN TELLUWANUA
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN TELLUWANUA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	100Laporan	100 laporan	4.997.617.153,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	100Laporan	5.045.353.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	4.964.917.153,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	63 Orang/bulan	5.012.653.000,00	KECAMATAN TELLUWANUA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan/Verifikasi Keuangan SKPD											

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen	27.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	20 Dokumen	27.600.000,00	KECAMATAN TELLUWANUA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	17 Laporan	5.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	17 Laporan	5.100.000,00	KECAMATAN TELLUWANUA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	100Orang	100 Orang	13.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	100Orang	13.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16 Paket	16 Paket	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	16 Paket	5.000.000,00	KECAMATAN TELLUWANUA
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	8.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Orang	8.000.000,00	KECAMATAN TELLUWANUA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	4Jenis	4 Jenis	48.500.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Jenis	48.500.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Paket	2.600.000,00	KECAMATAN TELLUWANUA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	3.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30 Paket	3.500.000,00	KECAMATAN TELLUWANUA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Dokumen	2.400.000,00	KECAMATAN TELLUWANUA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN TELLUWANUA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset yang di tatakelolakan	12Unit	12 unit	26.250.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12Unit	26.250.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN TELLUWANUA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	16.250.000,00	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7 Unit	16.250.000,00	KECAMATAN TELLUWANUA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	129.580.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	129.580.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan	1500 Laporan	15.850.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1500 Laporan	15.850.000,00	KECAMATAN TELLUWANUA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	21.880.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	21.880.000,00	KECAMATAN TELLUWANUA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	91.850.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	24 Laporan	91.850.000,00	KECAMATAN TELLUWANUA

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Dipelihara/Direhabilitasi	20Unit	20 unit	32.300.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	20Unit	32.300.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	19.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Unit	19.800.000,00	KECAMATAN TELLUWANUA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	8 Unit	3.000.000,00	KECAMATAN TELLUWANUA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	9.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	8 Unit	9.500.000,00	KECAMATAN TELLUWANUA
216	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata -Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 persen	100 persen	693.700.000,00				100 persen	700.000.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan Urusan yang diselenggarakan	100Jenis	100 Jenis	693.700.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	100Jenis	700.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Laporan	7 Laporan	693.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	100 Laporan	700.000.000,00	KECAMATAN TELLUWANUA
217	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif	7 kelurahan	7 kelurahan	13.874.000,00				7 kelurahan	14.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	7Desa/Kelurahan	7 kelurahan	13.874.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7Desa/Kelurahan	14.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7.874.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	KECAMATAN TELLUWANUA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	20 Unit	1.000.000,00	KECAMATAN TELLUWANUA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7 Pokmas / Ormas	5.000.000,00	KECAMATAN TELLUWANUA
218	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial	100 persen	100 persen	283.029.600,00				100 persen	285.600.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kelurahan yang bebas konflik sosial	7Desa/Kelurahan	7 kelurahan	283.029.600,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7Desa/Kelurahan	285.600.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		7 Laporan	283.029.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyludupan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		285.600.000,00	KECAMATAN TELLUWANUA
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO				16.126.302.016,61					5.746.560.496,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				16.126.302.016,61					5.746.560.496,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				16.126.302.016,61					5.746.560.496,00	
219	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	2.866.751.422,00				100 persen	2.947.663.871,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	2Dokumen	2 Dokumen	14.000.000,00		Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2Dokumen	17.500.000,00	
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Dokumen	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6 Laporan	12.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	2Laporan	2 Laporan	2.552.326.310,00		Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2Laporan	2.583.203.531,00	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.540.326.310,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	28 Orang/bulan	2.565.953.531,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokumen	15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	18 Laporan	2.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	1Laporan	1 Laporan	2.500.000,00		Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1Laporan	4.000.000,00	
	8	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	4.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	29Orang	29 Orang	15.368.012,00		Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	29Orang	32.750.000,00	
	8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Paket	- Paket	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	26 Paket	8.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	1.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	2 Orang	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Orang	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	8.368.012,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Orang	12.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	4Jenis	4 Jenis	128.338.900,00		Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4Jenis	158.750.000,00	
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	1.250.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	10 Paket	1.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Dokumen	3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	124.588.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	30 Laporan	154.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	1unit	1 unit	10.000.000,00		-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1unit	4.600.000,00	

	8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		6 Unit	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		3.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		6 Unit	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		1.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	0 Unit	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3Jenis	3 Jenis	120.718.200,00		Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Jenis	128.260.340,00	
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan	8 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	8 Laporan	12.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	69.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Laporan	70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	41.718.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	45.760.340,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	12unit	12 unit	23.500.000,00		Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12unit	18.600.000,00	
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	19.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	5 Unit	2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	6 Unit	4.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan		1.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
220	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 persen	100 persen	653.861.798,61				100 persen	671.016.600,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Etnis yang berpartisipasi dalam Pemahaman di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	23Kelompok	23 Kelompok	653.861.798,61		Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	23Kelompok	671.016.600,00	
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan												
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	23 Orang	53.493.998,61	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	100 Orang	53.494.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan												
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	40 Orang	40 Orang	20.744.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	40 Orang	21.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan												
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Laporan	2 Laporan	20.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Laporan	22.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO

	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka										
							Jumlah Paskibraka	100 Orang	100 Orang	559.123.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	100 Orang	574.022.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
221	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Lembaga atau Organisasi yang Mendapatkan Pendidikan Politik	100 persen	100 persen	11.442.976.083,00				100 persen	936.929.037,00	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Partai Politik yang mendapatkan pembinaan	10Organisasi	10 Organisasi	11.442.976.083,00		Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	10Organisasi	936.929.037,00	
	8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah										
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	19.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	20.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah										
							Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	18.834.792,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Dokumen	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8500 Orang	10000 Orang	11.379.691.291,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	8500 Orang	866.429.037,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	24.950.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Laporan	30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
222	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Angka Pertumbuhan OrganisasiKemasyara katan yang Terdaftar	100 persen	100 persen	67.583.723,00				100 persen	69.356.858,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi masyarakat binaan yang aktif	114Organisasi Masyarakat	114 Organisasi Masyarakat	67.583.723,00		Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	114Organisasi Masyarakat	69.356.858,00	
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	65 Orang	50 Orang	31.291.862,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	65 Orang	34.856.858,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	36.291.861,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Laporan	34.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
223	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan masyarakat yang mendapat edukasi	100 persen	100 persen	149.378.050,00				100 persen	151.030.350,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	3Kabijakan	3 Kabijakan	149.378.050,00		Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3Kabijakan	151.030.350,00	
	8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	97.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Dokumen	98.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	05	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										

							Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	31.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Dokumen	31.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	23 Orang	23 Orang	20.078.050,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	23 Orang	21.430.350,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
224	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Wilayah Rawan Konflik yang Dibina	100 persen	100 persen	945.750.940,00				100 persen	970.563.780,00	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kelurahan Rawan Konflik yang dibina	7Desa/Kelurahan	7 Desa/Keluraha n	945.750.940,00		Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	7Desa/Kelura han	970.563.780,00	
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	140 Orang	140 Orang	21.900.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	140 Orang	21.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	180 Orang	175 Orang	65.010.940,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	180 Orang	73.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	21.840.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Laporan	21.840.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	837.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokumen	853.223.780,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO
	J U M L A H									**1.089.323.277.730,23**					**1.108.961.654.946,78**	

sumber : data penetapan dari sipd-ri.kemendagri.go.id

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program *(outcome*/hasil) dari kegiatan *(output*/keluaran*).* Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran karena hasil *(outcomes)* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Berbagai indiktor knerja pemerintah daerah, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan atau pencapaianan suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah Kota Palopo 2023-2024 selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

6.1 Indikator Makro Pembangunan

Untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan derah sebagai indikator utama *(key performance indicator).* Indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Makro Pembangunan Kota Palopo Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Makro Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun Awal (2023)	Perkiraan Capaian RKPD Tahun 2024*)	Target RKPD Tahun 2025*)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,34	5,98	6,05
2	Tingkat Kemiskinan	%	7,69	7,58	7,38
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,81	8,07	8
4	Indeks Gini	Indeks	0,367	0,337	0,334
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,77	78,80	79,45
6	PDRB perkapita (ADHB)	Juta Rp	54,47	58	62
7	Indeks Modal Manusia	Indeks	-	-	0,53
8	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	-	-	1,10

Sumber : BPS Kota Palopo 2024 dan RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026.
Keterangan :
*) Target 2024 merupakan target RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026

Target indikator Makro Kota Palopo tahun 2025 merupakan target tahun kedua periode RPD Kota Palopo tahun 2024-2026. Dari delapan indikator Makro pada tabel di atas, Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan capaian yang membaik bahkan nilainya melampaui asumsi capaian RKPD Tahun 2024 dan Target Kinerja Tahun 2025. Indikator pertumbuhan ekonomi mengagalami perlambatan disbanding tahun 2022 yang berada pada angka 5,83 persen.

Ekonomi Kota Palopo tahun 2023 terhadap tahun 2022 mengalami laju pertumbuhan sebesar 4,34 persen. Capaian ini lebih rendah disbanding capaian Tahun 2022 yang berada pada angka 5,83 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,68 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran LNPRT sebesar 10,43 persen. Capaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,98 persen perlu menjadi perhatian. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 pada angka 6,05 persen diharapkan mampu mendorong akselerasi pembangunan yang signifikan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan infrasturktur serta layanan publik.

Tingkat kemiskinan di Kota Palopo pada tahun 2023 secara umum mengalami penurunan dibandingkan dengan periode Maret 2022 secara persentase. Persentase penduduk miskin di Kota Palopo pada Maret 2023 tercatat sebesar 7,69 persen menurun sebesar 0,09 persen poin dibandingkan periode Maret 2022 (7,78 persen). Selanjutnya secara jumlah, penduduk miskin di Kota Palopo meningkat sebesar 0,07 ribu jiwa atau sekitar 70 jiwa dibandingkan dengan Maret 2022. Hal tersebut disebabkan oleh adanya lonjakan jumlah penduduk sebesar 3.581 jiwa di tahun 2023. Meningkatnya garis kemiskinan Kota Palopo dari 403.144 rupiah per kapita/bulan di tahun 2022 menjadi 442.276 rupiah per kapita/bulan di

tahun 2023 juga menjadi pemicu angka kemiskinan di Kota Palopo menurun, tapi belum dalam jumlah yang signifikant atau memenuhi target daerah. Perkiraan capaian kinerja Tingkat kemiskinan Kota Palopo diharapkan mengalami perbaikan menjadi 7,58 persen ditahun 2024 dan 7,38 persen ditahun 2025. Dalam upaya penurunan angka kemiskinan di tahun-tahun yang akan datang, maka perlu dilakukan penanganan berdasarkan skala prioritas. Upaya yang sapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo antara lain; Penciptaan lapangan kerja dengan mendorong pertumbuhan sektor padat karya yang dibarengi peningkatan kualitas tenaga kerja dan integrasi layanan dan sistem data kependudukan sebagai basis perencanaan penanganan kemiskinan; Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, berbasis keluarga ; rumah tangga dan individu dengan memperluas cakupan dan akses layanan dasar masyarakat, pengendalian penduduk dan pengendalian keterjangkauan harga serta keteraksesan barang bersubsidi; Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dengan mengembangkan kualitas SDM *(hard and soft skill*), Kesetaraan dan produktifitas keluarga; Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil dengan mengembangkan Ikllim dan Kesempatan Berusaha, Kelembagaan serta Kemitraan Usaha; Membentuk kebijakan sinergi dan program penanggulangan kemiskinan dengan memantapkan koordinasi dan sinkronisasi program OPD, dunia usaha dan masyarakat yang berbasis DTKS dan lokus prioritas; Menjadikan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai target sasaran penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo; Memastikan masyarakat miskin memiliki akses pada pangan dan kesehatan, bahkan terus berkembang pada layanan sesuai standar pelayanan minimal bidang pendidikan, perumahan, serta social; Strategi penanggulangan kemiskinan diarahkan pada beberapa aspek yakni meringankan beban pengeluaran penduduk miskin, memberdayakan masyarakat miskin, memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan mengembangkan keberdayaan mereka dalam upaya meningkatkan kesejahteraan; Penanganan sasaran penanganan kemiskinan diarahkan pada skala perorangan, skala rumah tangga, skala komunitas dan skala usaha dan ekonomi masyarakat miskin; dan Penanganan kemiskinan juga diarahkan dengan upaya pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana bagi keluarga miskin, pembinaan keluarga dan pengarusutamaan gender dengan sasaran masyarakat miskin.

Tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Palopo masih menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi. Rasio Gini Palopo hingga tahun 2023 adalah 0,367. Capaian tahun tersebut lebih baik dari capain nasional yang berada pada angka 0,388 dan Provinsi Sulawesi Selatan pada angka 0,377. Diharapkan pada tahun 2024 tingkat ketimpangan pendapatan dan distribusinya akan lebih membaik dengan nilai 0,337 dan pada tahun 2025 ditargetkan senilai 0,334. Untuk mendukung target tersebut, perlu dilakukan sinergi kebijakan dan program pemerintah daerah yang mampu menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan penduduk, dan di sisi lain mampu mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi.

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Palopo menunjukkan kinerja yang membaik dari tahun 2022 ke tahun 2023 dengan penurunan sebesar 0,39 point. Disamping itu tingkat pengangguran terbuka di tahun 2023 yang sebesar 7,81% menunjukkan nilai capaian berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Jumlah angkatan kerja pada 2023 naik sebesar 3,18 persen disbanding pada tahun 2022. Sejalan denngan bertambahnya jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan sebesar 2,1 persen. Jika dibandingkan dengan usia angkatan kerja Tahun 2022 dan tahun 2023 yang mengalami peningkatan sebesar 3,18 % dengan tingkat pengangguran terbuka yang hanya turun sebesar 0,39 %, hal ini menunjukkan bahwa lapangan kerja belum sepenuhnya dapat mengatasi peningkatan angkatan kerja. Upaya yang bisa dilakukan untuk menurunkan angka pengagguran pada tahun yang akan datang yaitu dengan mendorong peningkatan UMKM; medorong pembukaan lapangan kerja baru disektor industri pengolahan dan peningkatan kualitas tenaga kerja agar dapat terserap di pasar kerja yang tersedia.

Pembangunan kualitas manusia Kota Palopo ditunjukkan dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023 sebesar 80,77. Meningkat sebesar 0,53 poin dibanding tahun 2022 yang berada pada angka 80,24. Peningkatan IPM Kota Palopo tahun 2023 terjadi pada semua dimensi, baik dimensi kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,00 tahun, meningkat 0,19 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah penduduk umur 7 tahun meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 15,10 menjadi 15,12 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,04 tahun, dari 11,09 tahun menjadi 11,13 tahun pada tahun 2023. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 488 ribu rupiah (3,64 persen) dibandingkan tahun 2022. Capaian IPM Kota Palopo pada tahun 2024 diharapkan lebih baik dari tahun 2023 begitu pula target tahun 2025 diharapkan dapat dicapai. Untuk merealisasikan target tersebut, maka peningkatan Indeks Pendidikan diupayakan melalui perluasan akses dan kualitas pendidikan, mencegah putus sekolah, meningkatkan kualitas guru, menghadirkan pendidikan inklusi terutama bagi masyarakat rentan, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan kualitas pendidikan. Untuk Indeks Kesehatan dapat diupayakan melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang Inklusif, serta dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting sebagai isu kesehatan nasional. Peningkatan Indeks Ekonomi diarahkan pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, dan perluasan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas.

Perekonomian Kota Palopo tahun 2023 yang diukur berdasarkan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp. 10,5 triliun dan PDRB perkapita mencapai 54,47 juta. Ekonomi Kota Palopo tahun 2023 terhadap tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,34 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,68 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi

terjadi pada komponen pengeluaran LNPRT sebesar 10,43 persen. Kontribusi terbesar PDRB menurut lapangan usaha dicapai oleh Lapangan Usaha perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 23,70 persen dari total PDRB ADHB sedangkan menurut pengeluaran tahun 2023 dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 56,79 persen.

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target Indikator Kinerja Utama Kota Palopo dibuat untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penetapan IKU bertujuan memberikan gambaran keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Secara rinci, dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut ini;

Tabel 6.2
Capaian Indikator Kinerja Utama 2023, Perkiraan Capaian Target
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kota Palopo Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Tahun 2023	Perkiraan Capaian Tahun 2024*)	Target Tahun 2025*)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	44,19	60 - 70	71-80
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Poin	84,16	87,67	87-98
3	Indeks SAKIP	Poin	64,35	65-70	71-80
4	Indeks Pembangunan Gender	Poin	97,61	97,35	97,37
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,52	58	60
6	Indeks Resiko Bencana (IRB)	poin dan predikat	167,40	195	190
7	Luas Wilayah yang Tergenang/ Terdampak Banjir	Ha	9,95	9	7
8	Persentase Luas Kawasan Kumuh dari Total Luas Wilayah Kota	Persen	1,09	1	1
9	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta Rp	54,47	58	62
10	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,69	7,58	7,38
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,81	8,07	8
12	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,34	5,98	6,05
13	Gini Rasio	Angka	0,367	0,337	0,334
14	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	80,77	78,80	78,96

Sumber : BPS dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2024-2026.
Keterangan :
*) Target 2024 merupakan target RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026

Tabel diatas menunjukkan bahwa 8 indikator kinerja utama, yang merupakan indikator sasaran Pembangunan dan enam indikator diantaranya juga merupakan indikator kinerja makro Pembangunan yaitu PDRB per kapita, persentase penduduk miskin, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Indikator kinerja utama yang terdiri dari Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, Indeks SAKIP, indeks pembangunan gender, indeks kualitas lingkungan hidup, indeks resiko bencana, luas wilayah yang tergenang/terdampak banjir, dan persentase luas kawasan kumuh dari total luas wilayah kota.

Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 berada pada 44,19 Poin, mengalami penurunan dari tahun 2022 yang berada pada 55,09 poin. Capaian ini belum memenuhi target tahun 2023 yaitu 75 dan masih di bawah target akhir RPJMD yaitu 75, sehingga capaian kinerja indikator terhadap target akhir RPJMD adalah 58,92 persen. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat memperoleh angka 84,16 poin pada tahun 2023. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,23 poin dari tahun 2022. Untuk mencapai target tahun 2024 dan tahun 2025 masih perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi layanan.

Capaian Indeks SAKIP Kota Palopo tahun 2023 berada dalam kategori B dengan nilai 64,35. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 dengan nilai 62,40, peningkatan tersebut diperoleh dari semua komponen yang dinilai yaitu komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja

internal. Capaian nilai SAKIP pada tahun 2024 diharapkan lebih baik dari tahun 2023 begitu pula target tahun 2025 dapat dicapai melalui peningkatan terhadap empat kompenan penilaian kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Palopo tahun 2023 tercatat sebesar 97,61. Meningkat disbanding IPG tahun 2022 yang tercatat 97,58. Secara tren, perkembangan pembangunan manusia kelompok laki-laki tumbuh lebih cepat dibandingkan pada kelompok perempuan. Dalam kurun waktu 2019 hingga 2023, rata-rata pertumbuhan IPM laki-laki sebesar 2,46 persen, sementara perempuan tumbuh sebesar 1,63 persen.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Palopo termasuk dalam kategori sedang. Pada tahun 2023 nilai IKLH sebesar 69,52. Hasil capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2022, akan tetapi lebih rendah dibandingkan hasil capaian nasional dan provinsi. Walaupun demikan, hasil pengukuran yang berkaitan dengan komposit penyusun IKLH selama tahun 2018-2023 seperti indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan sebagai tolok ukur kualitas lingkungan mengalami perbaikan setiap tahunnya. Kondisi ini tidak lepas dari komitmen pemerintah Kota Palopo untuk melaksanakan proses pembangunan kota tanpa mengesampingkan daya dukung lingkungan disekitarnya, yang sejalan dengan indicator dalam pencapaian SDG's.

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Palopo tahun 2020 hingga 2023 mengalami tren penurunan nilai indeks. Akan tetapi IRB Kota Palopo termasuk dalam kelas risiko tinggi terhadap bahaya, kerentanan dan kapasitas. Hingga tahun 2023 nilai IRB Kota Palopo sebesar 167,40 atau mengalami penurunan sebesar 19,28 poin dari tahun 2022 namun masih dalam kategori indeks risiko tinggi. Untuk menurunkan IRB Kota Palopo menjadi wilayah yang tahan bencana, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain Mitigasi bencana seperti membangun infrastruktur tahan bencana, memperkuat system peringatan dini dan melatih masyarakat untuk bersiap terhadap terjadinya bencana. Selain itu upaya partisipasi masyarakat untuk menekan angka IRB seperti memahami risiko bencana, berpartisipasi dalam kegiatan mitigasi, dan memiliki kekuatan solidaritas dan jaringan sosial.

6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau *Key Performance Indicators* (*KPI*) memberikan arahan kepada Pemerintah Kota Palopo dalam menentukan dan mengukur kemajuan *(progress)* pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya. IKK adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah. Tujuan penetapan IKK adalah memberikan gambaran keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (*outcome*). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Oleh karena itu, Indikator Kinerja Kunci disusun dengan mengacu pada indikator yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 untuk indicator yang tertuang yang menggambarkan capaian kinerja tahun 2023. Serta untuk indikator yang terkait asumsi capaian 2024 dan target 2025 mengacu pada dokumen RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026 dan disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan Pemerintah Kota Palopo. Secara rinci target IKK Pemerintah Kota Palopo Tahun 2025, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.3 berikut :

Tabel 6.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kota Palopo Tahun 2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1	Pertumbuhan PDRB	(%/Tahun)	5,69	4,34
2	Laju inflasi	(%/Tahun)	2	2,08
3	PDRB per kapita (ADHB)	(Juta/Tahun)	44	54,47
4	Paritas Daya Beli	(Ribu/Tahun)	13.413	13.892
5	Indeks Gini	(Angka)	0,332	0,367
6	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	(%)	94,01	92,31
7	Persentase Penduduk Miskin	(%)	5,99	7,69
8	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Palopo	(Rp/Kapita/Bulan)	365.415	442.276
9	Jumlah Penduduk Miskin	(Jiwa)	13.957	14.850
10	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	(%)	5,99	1,26
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	(Angka)	1,1	1,10
	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	(Angka)	0,28	0,25
	Indeks Kesehatan	(Angka)	78,76	83,08
	Indeks Pendidikan	(Angka)	78,59	79,10
	Indeks Pengeluaran	(Angka)	78,85	80,18
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	(Angka)	79,25	80,77
12	Angka melek huruf	(%)	100	99,19
13	Angka rata/rata lama sekolah	(Tahun)	10,9	11,13
	Harapan Lama Sekolah	(Tahun)	15,21	15,12
14	Angka usia harapan hidup	(Tahun)	71,27	70,79
15	Persentase balita gizi buruk	(%/Tahun)	0	0

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
16	Prevalensi balita gizi kurang	(%/Tahun)	0	3,34
	Prevalensi Stunting	(%/Tahun)		25,5
17	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	(%)	100	100
18	Angka partisipasi Angkatan kerja	(%)	62,75	65,75
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Laki/Laki	(%)	81,96	53,32
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	(%)	44,93	38,86
19	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	(%)	60,95	61,94
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki/Laki	(%)	75,25	57,85
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	(%)	48,39	42,15
20	Tingkat pengangguran terbuka (%)	(%)	8,07	7,81
21	Rasio penduduk yang bekerja	(%)	91,91	92,19
22	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja	(%)	78,95	73,12
23	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	(%)	57,56	49,27
24	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	(%)	26,95	22,85
	Laki – Laki	(%)	18,75	14,50
	Perempuan	(%)	8,2	8,35
25	Keluarga Pra Sejahtera I dan Keluarga Sehatera I	(%)	39,76	32,65
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	(angka)	86	83,10
27	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	(%)	20	20,57
28	Opini BPK	(Opini)	WTP	WTP
29	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	(skor)	91,9	85,5
30	Penguatan cadangan pangan	(%)	98,1	98,00
31	Penanganan daerah rawan pangan	(%)	0	100
32	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	(%)	9	16,34
33	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	(%)	3	2,72
34	Produksi sektor pertanian	(Ton/Tahun)	48.699	21.147
	Padi	(Ton/Tahun)	41.720	16.410
	Jagung	(Ton/Tahun)	6.768	4,737
	Ubi Kayu	(Ton/Tahun)	185	0
	Ubi Jalar	(Ton/Tahun)	6	0
	Sagu	(Ton/Tahun)	20	0
	Daging (Ruminansia dan Unggas)	(Ton)	3.448	3.275,89
	Daging (Ruminansia)	(Ton)	260	685,37
	Daging Sapi	(Ton)	260	673,5
	Daging Kerbau	(Ton)	0	6,35
	Daging Kambing	(Ton)	1	5,52
	Daging Unggas	(Ton)	3.188	2.590.5
	Daging Ayam Kampung	(Ton)	162	578
	Daging Ayam Pedaging	(Ton)	3.027,00	177,31
	Daging Itik/Bebek/Entog	(Ton)	8,89	146,46
	Telur (Ayam Kampung/Ras/Itik/Entog)	(Ton)	1.872	155,68
	Telur Ayam Buras/Kampung	(Ton)	1.674	627,00
	Telur Ayam Ras Petelur	(Ton)	47	174,10
	Itik/Angsa/Entog	(Ton)	151	1,30
35	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	(%)	3	2,04
36	Produksi sektor perkebunan	(Ton/Tahun)	2.414,4	605,09
	Kelapa Dalam	(Ton/Tahun)	34,39	3
	Kopi	(Ton/Tahun)	71	15
	Kopi Robusta	(Ton/Tahun)	71	15
	Kopi Arabika	(Ton/Tahun)	0,01	0
	Cengkeh'	(Ton/Tahun)	138	82
	Kakao	(Ton/Tahun)	2.100	505,09
37	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	(%)	2	1,81
38	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	(%)	0,03	0,06
39	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	(%)	0,19	0,16
40	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	(%)	1,26	1,45
41	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB	(%)	8	8,17

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
42	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	(%)	24	23,70
43	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	(%)	3	2,40
44	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	(%)	n/a	0,37
45	Pertumbuhan Industri	(%)	5	2,57
46	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB	(%)	0	0
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
47	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	(Ribu/Kapita/Tahun)	132.147	59,18
48	Nilai tukar petani (sektor tanaman pangan)	(angka)	n/a	104,24
49	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	(%)	54	53,36
50	Produktivitas total daerah	(Ribu/Tenaga Kerja/Tahun)	116	72,82
51	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	(%)	100	n/a
52	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	(%)	72	0
53	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	(%)	3	n/a
54	Angka kriminalitas yang tertangani (per 10.000)	(angka)	25	30
55	Rasio ketergantungan	(%)	46	44,32
ASPEK PELAYANAN UMUM				
Layanan Urusan Wajib Dasar				
1	**Pendidikan**			
56	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	(%)	100	51,67
57	Angka Partisipasi Kasar			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	(%)	100	105,71
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	(%)	100	82,89
58	Angka pendidikan yang ditamatkan			
	Tidak/Belum Bersekolah	(%)	5,5	10,62
	Tamat SD/sederajat	(%)	7	15,22
	Tamat SMP/sederajat	(%)	20	35,23
	Tamat SMA	(%)	41	36,72
	Tamat SMK	(%)	7	4,21
	Tamat Perguruan Tinggi	(%)	19	18,23
	Diploma I/II	(%)	0,9	0,25
	Diploma III	(%)	3,9	1,66
	Diploma IV/S1-S3	(%)	14,4	16,50
59	Angka Partisipasi Murni			
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	(%)	100	98,34
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	(%)	100	79,06
60	Angka partisipasi sekolah	(%)		
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (Per 1000)	(%)	1.000	98,99
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (Per 1000)	(%)	1.000	96,69
61	Angka Putus Sekolah:			
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	(%)	0	0,005
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	(%)	0	0,009
62	Angka Kelulusan:	(%)		
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	(%)	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	(%)	100	100
63	Angka Melanjutkan (AM):			
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	(%)	100	97
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	(%)	100	100
64	Fasilitas Pendidikan:			
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	(%)	100	76
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	(%)	100	76
65	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (per 10,000)			
	SD/MI (per 10,000)	(%)	39	42,58

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
	SMP/ MTS (per 10,000)	(%)	30	25,80
66	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000)	(%)	728	737,46
	SD/MI (per 10,000)	(%)	688	645,45
	SMP/ MTS (per 10,000)	(%)	794	829,47
67	Rasio guru/murid per kelas rata/rata pendidikan dasar (per 10.000)	(%)	0,62	8,08
68	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	(%)	100	81,33
69	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	(%)	100	98,67
70	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	(%)	100	99,19
71	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D1-IV	(%)	100	92,67
72	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	(%)	100	50,54
73	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	(%)	100	100
74	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	(%)	100	100
75	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	(%)	100	100
2	**Kesehatan**			
76	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	(angka)	0,3	12,55
77	Angka kelangsungan hidup bayi (per 100)	(angka)	99	87,45
78	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	(angka)	4	12,55
79	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	(angka)	2	12,55
80	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	(angka)	10	114,11
81	Rasio posyandu per satuan balita (Per 1000 balita)	(%)	11	8,22
82	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 10.000)	(%)	4	6,3
83	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000)	(%)	4	3,67
84	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1.000)	(%)	6	1,18
85	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 10.000)	(%)	6	11,84
86	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	(%)	86,98	6,72
87	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	(%)	100	76,46
88	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	(%)	100	95,83
89	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	(%)	100	100
90	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	(%)	83	-81
91	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	(%)	98,52	106,96
92	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	(%)	12	4.01
93	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	(%)	100	93,43
94	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (Rasio per 100.000 penduduk)	(%)	195	279,25
95	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	(%)	94	57,22
96	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	(%)	42	15,41
97	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	(%)	100	100
98	Penderita diare yang ditangani (per 100.000)	(%)	10	60,10
99	Angka kejadian Malaria (per 1000)	(angka)	55	68
100	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	(%)	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
101	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (100 ribu))	(%)	32	0,08
102	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	(%)	3	0,50
103	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	(%)	100	100
104	Cakupan kunjungan bayi	(%)	100	123,09
105	Cakupan puskesmas	(%)	133,33	133,33
106	Cakupan pembantu puskesmas	(%)	75	62,0
107	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	(%)	100	80,05
108	Cakupan pelayanan nifas	(%)	100	76
109	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	(%)	78	60,14
110	Cakupan pelayanan anak balita	(%)	76	98,67
111	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	(%)	100	100
112	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	(%)	100	100
113	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	(%)	100	100
114	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	(%)	100	100
115	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	(%)	100	0
116	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	(%)	0,55	0,48
117	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	(%)	0,79	100
118	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	(%)	100	89
119	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	(%)	100	94
120	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	(%)	100	95
121	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	(%)	100	89
122	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	(%)	100	102
123	Persentase orang usia 15-49 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	(%)	100	62
124	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	(%)	100	97
125	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	(%)	100	35
126	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	(%)	100	109
127	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	(%)	100	86
128	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	(%)	100	98
129	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	(%)	100	102
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
3.a	**Pekerjaan Umum**			
130	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	(%)	72	63,56
131	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (per 10,000)	(%)	30	26,39
132	Persentase Jalan Kewenangan Kota yang Berkondisi Baik (> 40 KM/Jam)	(%)	74	64,79
133	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	(%)	1,38	58,81
134	Persentase rumah tinggal bersanitasi	(%)	99	89,70
135	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	(%)	47	36,76
136	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	(%)	11	22,80
137	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	(%)	12	24,74

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
138	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	(%)	8	77,20
139	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik	(%)	75	78,43
140	Rasio Jaringan Irigasi (per 100 Ha)	(%)	23	82,61
141	Persentase penduduk berakses air minum (%)	(%)	100	84,39
142	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	(%)	100	98
143	Persentase areal kawasan kumuh	(%)	1,53	0,16
144	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	(%)	5	8,27
145	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 10.000)	(%)	1,9	59,48
146	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (per 1000)	(%)	2	0
147	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	(%)	8	78,08
148	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	(%)	8	0
149	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	(%)	23	70,56
150	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	(%)	100	98
151	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	(%)	100	82,69
3.b	**Penataan Ruang**			
152	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	(%)	77,2	31,67
153	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	(Ha)	1.177,99	596,36
154	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	(%)	80,1	16,58
155	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	(%)	80,1	28,41
156	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	(%)	80,1	78,08
157	Ketaatan terhadap RTRW	(%)	56	97,42
158	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	(%)	80,1	5,53
159	Tingkat kemantapan Jalan kabupaten/kota	(%)	72	57,35
160	Rasio tenaga/operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	(%)	70	50
161	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	(%)	100	100
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**			
162	Rasio rumah layak huni	(%)	0,22	0,81
163	Rasio permukiman layak huni	(%)	96,67	92,53
164	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	(%)	98	92,83
165	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	(%)	98,7	95,61
166	Persentase pemukiman yang tertata	(%)	93,75	95,41
167	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	(%)	0	1,10
168	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	(%)	0	11,27
169	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	(%)	0	5,69
170	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	(%)	45	31,87
171	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	(%)	100	100
172	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	(%)	100	100
173	Persentase permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	(%)	30	20
174	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)(%)	(%)	1,2	0

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
175	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	(%)	45	80
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**			
176	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (Linmas)	(%)	100	100
177	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	(%)	100	99,46
178	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	(%)	15,15	100
179	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	(%)	100	100
180	Persentase Penegakan PERDA	(%)	100	100
181	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	(%)	100	99,46
182	Persentase Perda dan perkada yang ditegakkann	(%)	100	80,77
183	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	(%)	100	100
184	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	(%)	100	100
185	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	(%)	100	100
186	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	(%)	100	100
187	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	(%)	100	100
6	**Sosial**			
188	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	(%)	57	3,44
188	Persentase PMKS yang tertangani	(%)	58	0,69
189	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	(%)	63	1,2
190	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	(%)	4	0
191	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	(%)	100	0
192	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	(%)	100	0
193	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	(%)	100	100
194	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	(%)	100	100
195	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	(%)	44	100
196	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	(%)	44	n/a
197	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	(%)	100	100
Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
1	**Tenaga Kerja**			
198	Angka sengketa pengusaha/pekerja per tahun (Per 1000)	(angka)	6	4,16
199	Angka sengketa pengusaha/pekerja di Perusahaan ber TDP per tahun (Per 1000)	(angka)	1	11,86
200	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	(%)	14	25
201	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	(%)	56	36,98
202	Keselamatan dan perlindungan	(%)	28	34,18

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
203	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	(%)	57	41,79
204	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	(%)	1,9	4,17
205	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	(%)	2,5	0
206	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	(%)	49	27,97
207	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	(%)	15	100
208	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	(%)	7	40,76
209	Rasio lulusan S1/S2/S3	(%)	10,85	16,50
210	Persentase kegiatan yang dilaksanan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	(%)	75	100
211	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	(%)	5	2,15
212	Tingkat produktivitas tenaga kerja	(Ribu/Tenaga Kerja/Thn	115,75	72,82
213	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	(%)	28	41,79
214	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalan dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	(%)	56	36,98
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			
215	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	(%)	12	8,20
216	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	(%)	28	28
217	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	(%)	5	2,20
218	Rasio KDRT (per 10.000)	(%)	1	0,71
219	Partisipasi angkatan kerja perempuan	(%)	48,39	53,29
220	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	(%)	27	96,55
221	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	(%)	60	n/a
222	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	(%)	50	82,86
223	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	(%)	100	100
224	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	(%)	60	96,55
225	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	(%)	12	20,69
226	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	(%)	30	96,67
227	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	(%)	0	1,01
	APM Perempuan pada Tingkat SD	(%)	100	98,92
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SD	(%)	100	97,73
228	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	(%)	0	1,05
	APM Perempuan pada Tingkat SMP	(%)	80	80,74
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMP	(%)	82	77,22
229	Rasio APM perempuan/laki-laki di SLTA	(%)	0	1,16
	APM Perempuan pada Tingkat SLTA	(%)	65	86,21
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SLTA	(%)	78	74,49
230	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	(%)	44,85	1,36
	APM Perempuan yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	(%)	n/a	40,68
	APM Laki-Laki yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	(%)	n/a	29,93

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
231	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	(%)	n/a	0,99
232	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	(%)	46	1,01
233	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	(%)	40	N/A
234	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	(%)	100	96,55
235	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	(%)	3	0,003
3	**Pangan**			
236	Ketersediaan pangan utama (%)	(%)	12	11,34
237	Ketersediaan energi dan protein perkapita	(Kkal/kapita/hari)	2.499	2.537,56
	Ketersediaan energi perkapita	(Kkal/kapita/hari)	2.400	2.455
	Ketersediaan protein perkapita	(Kkal/kapita/hari)	99	82,56
238	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	(%)	91	90
	Ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	(Ton)	98,1	21.849,99
4	**Pertanahan**			
239	Persentase luas lahan bersertifikat	(%)	31	5,33
240	Penyelesaian kasus tanah Negara	(%)	31	66,67
241	Penyelesaian izin lokasi	(%)	100	100
242	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	(%)	100	0
240	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	(%)	100	22,22
241	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	(angka)	3	0
242	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diresdistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	(angka)	10	0
243	Tersedianya tanah untuk masyarakat	(angka)	2	0
244	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	(kasus)	3	2
5	**Lingkungan Hidup**			
245	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedia/Belum Tersedia	Tersedia	Belum tersedia
246	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tersedia/Belum Tersedia	Tersedia	Belum tersedia
247	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Ada/Tidak	0	Ada
	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Indeks	31,46	53,33
	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	Indeks	88,81	89,53
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	19,55	60,3
248	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	(%)	30	10,98
249	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	(%)	0	0
	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina	(orang)	1	0
	Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum	(Orang)	1	0
250	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	(kali)	Ada	Ada
251	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	(%)	100	100
252	Timbulan sampah yang ditangani	(%)	93	69,01
253	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	(%)	4,4	11,98
254	Persentase cakupan area pelayanan	(%)	87,9	81,43
255	Persentase jumlah sampah yang tertangani	(%)	90	69,01

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
256	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	(%)	80,3	100
257	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	(%)	100	100
258	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundangn/aundangan	(%)	100	100
259	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kab/kota	(%)	43,90	69,52
260	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	(%)	80,3	100
261	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadapat izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	(%)	0	100
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			
262	Rasio penduduk ber/KTP per satuan penduduk	(%)	0,9	0,96
263	Rasio bayi berakte kelahiran	(%)	0,98	0,94
264	Rasio pasangan berakte nikah	(%)	0,95	77,16
265	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	Ada	Ada
266	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah / belum	Sudah	Sudah
267	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	(%)	100	93,95
268	Cakupan penerbitan akta kelahiran	(%)	100	99,19
269	Perekaman KTP elektronik	(%)	0	98,54
270	Persentase anak usia 0/7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memilikan KIA	(%)	0	53,9
271	Kepemilikan akta kelahiran	(%)	0,98	56,973
272	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	(angka)	6	0
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			
273	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	(%)	100	0
274	Rata/rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	(%)	1	1
275	Rata/rata jumlah kelompok binaan PKK	(%)	2,5	100
276	Persentase LSM aktif	(%)	3	20
277	Persentase LPM Berprestasi	(%)	4,2	n/a
278	Persentase PKK aktif	(%)	100	100
279	Persentase Posyandu aktif	(%)	100	94,16
280	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	(%)	n/a	n/a
281	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	(%)	100	100
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			
282	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	(%)	2,26	-3,28
283	Total Fertility Rate (TFR)	(Angka)	2	2,24
284	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	(ada/tidak)	Tidak Ada	Ada
285	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	(%)	4	0
286	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	(%)	39	75,51
287	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	(%)	4	10
288	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	(angka)	0	0
289	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	(angka)	2	2
290	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	(angka)	1	0
291	Rata/rata jumlah anak per keluarga	(rata-rata)	2	1

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
292	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	(%)	84,04	27,47
293	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	(angka)	8	18,20
294	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (1000 PUS)	(%)	3	15,36
295	Cakupan PUS yang ingin ber/KB tidak terpenuhi (unmet need)	(%)	9	09,01
296	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	(%)	25	27.47
297	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	(%)	20,86	38.43
298	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber/KB	(%)	93,35	100
299	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber/KB	(%)	77,26	75,89
300	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber/KB	(%)	53,63	13,38
301	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	(%)	0,11	9
302	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	(%)	14	9
303	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	(%)	100	100
304	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang bern/aKB mandiri	(%)	36,83	0,58
305	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	(%)	100	100
306	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota	(%)	12	99
307	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes	(%)	69	97,81
308	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	(%)	100	100
309	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	(%)	3,96	100
310	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	(%)	100	5,50
311	Rata/rata usia kawin pertama wanita (Tahun)	(%)	25	24
312	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD	(%)	0,29	90
313	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mPCR)	(%)	84,04	100
314	Persentase kebutuhan ber/KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	(%)	9	9,01
9	**Perhubungan**			
315	Jumlah arus penumpang angkutan umum	(Orang)	1.642.882	1.982.192
316	Rasio ijin trayek (Per 100.000 Penduduk)	(%)	2	1,03
317	Jumlah uji kir angkutan umum	(Unit)	1.500	167
318	Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bis	(angka)	2	2
319	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	(%)	0	830,24
320	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	(%)	1	0,10
321	Persentase Pemasangan Rambu-rambu (%)	(%)	49	27
322	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (per 1000)	(%)	19	29,94
323	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	(Orang/Tahun)	1.642.256	1.982.192
324	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	(M3/Tahun)	620.825	n/a
325	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	(angka)	2.241.351	1.982.192

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
326	Rasio konektivitas kabupaten/kota	(%)		0,25
327	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	(%)		0,25
10	**Komunikasi dan Informatika**			
328	Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	(%)	4	4
329	Cakupan Layanan Telekomunikasi	(%)	0,98	0,98
330	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	(%)	80,9	90,25
331	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	(%)	0,12	0,12
332	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	(%)	0,9	0,55
333	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	(%)	95	100
334	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	(%)	90	n/a
335	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	(%)	90	n/a
11	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**			
336	Persentase koperasi aktif	(%)	73	25,17
337	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	(%)	100	100
338	Persentase BPR/LKM aktif	(%)	n/a	100
339	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	(%)	78	100
340	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	(%)	72	25,17
341	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	(%)	8	15,10
12	**Penanaman Modal**			
342	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	(angka)	72	55
343	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	(Juta)	190.000	149.633
344	Rasio daya serap tenaga kerja (per 100 Juta Nilai PMDN)	(%)	16	0,12
345	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	(milyar rupiah)	30	349,23
346	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(%)	5	20
13	**Kepemudaan dan Olah Raga**			
347	Persentase organisasi pemuda yang aktif	(%)	55,4	55,03
348	Persentase wirausaha muda (%)	(%)	1,39	4,40
349	Cakupan pembinaan olahraga (%)	(%)	71,43	9,09
350	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	(%)	37,35	54,69
351	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	(%)	70,6	33,33
352	Jumlah atlet berprestasi	(Orang)	10	30
353	Jumlah prestasi olahraga	(Cabang)	4	5
354	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	(%)	1,39	4,40
355	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	(%)	10	55
356	Peningkatan prestasi olahrgaa	(%)	5	1
14	**Statistik**			
357	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Ada	Ada
358	Buku kabupaten dalam angka	Ada/tidak	Ada	Ada
359	Buku PDRB	Ada/tidak	Ada	Ada
360	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Ada/tidak	100	100
361	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Ada/tidak	100	100
15	**Persandian**			
362	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	(%)	82	100
363	Tingkat keamanan informasi pemerintah	(%)	95	100
16	**Kebudayaan**			
364	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	(%)	17	8

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
365	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	(%)	100	100
366	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	(Unit)	1	3
367	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu terlestarikannya Cagar Budaya	(Unit)	52	53
17	**Perpustakaan**			
368	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	(%)	13	7,59
369	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	(%)	41	53,51
370	Rasio perpustakaan per satuan penduduk (per 1000)	(%)	1,45	1,16
371	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	(%)	1.400	1.074
372	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	(%)	500	16.500
373	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	(%)	69	100
374	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	(%)	52,5	7,59
375	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	(indeks)	9	27,01
18	**Kearsipan**			
376	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	(%)	27	20,41
377	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	(%)	10	20
378	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Rahun 2009 tentang Kearsipan	(%)	100	75
379	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	(%)	90	33
Layanan Urusan Pilihan				
1	**Pariwisata**			
380	Kunjungan wisata (%)	(%)	100	137,41
381	Lama kunjungan Wisata (Rata/rata Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun)	(%)	2,5	2,0
382	PAD sektor pariwisata	(%)	7	5,44
383	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	(%)	2	2
384	Tingkat hunian akomodasi	(%)	33	52,43
385	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	(%)	1,26	1,14
386	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	(Rp.)	7	10.549.353.297
2	**Pertanian**			
387	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	(%)	15,3	15,4
388	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	(%)	6	2,1
389	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	(%)	4	2,04
390	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	(%)	35	1,81
391	Produksi Bahan Pangan Utama	(Ton/Tahun)		21,147
392	Padi	(Ton/Tahun)	41.720	16.410
	Jagung	(Ton/Tahun)	6.768	4.737
	Ubi Kayu	(Ton/Tahun)	185	0
	Ubi Jalar	(Ton/Tahun)	6	0
	Sagu	(Ton/Tahun)	20	0
393	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar			
	Padi	(Ton/Ha)	6,81	6,3
	Jagung	(Ton/Ha)	7,58	6,3
	Ubi Kayu	(Ton/Ha)	31	0
	Ubi jalar	(Ton/Ha)	16	0
	Sagu	(Ton/Ha)	0,45	0,22
394	Cakupan bina kelompok petani	(%)	55	52,63
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	(%)	6,81	5,64

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	(%)	20	-98,25
3	**Energi dan Sumber Daya Mineral**			
395	Persentase rumah tangga pengguna listrik	(%)	100	100
396	Rasio ketersediaan daya listrik	(%)	100	100
4	**Perdagangan**			
397	Ekspor Bersih Perdagangan	(Nilai/Juta)	-850.195	0
398	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	(%)	15	n/a
399	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	(%)	75,55	94,73
400	Persentase kinerja realisasi pupuk	(%)	57	69,04
401	Persentase alat/alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	(%)	62	62,57
5	**Perindustrian**			
402	Cakupan bina kelompok pengrajin	(%)	2,7	2,3
403	Jumlah industri kecil dan menengah	(unit)	5	1.357
404	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator	(%)	95	95
405	Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Ada/tidak	n/a	Tidak ada
406	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	(%)	96,9	96,8
407	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (UKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	(%)	11,1	11,35
408	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedia/ belum tersedia	Tersedia	Tersedia
6	**Perikanan**			
409	Produksi perikanan	(%)	100	100
410	Produksi Perikanan Daerah	(Ton/Tahun)	170.914	193.154,56
411	Konsumsi ikan	(%)	100	91,79
412	Target Konsumsi Perikanan Daerah	(Kg/Tahun)	59,69	54,79
413	Cakupan bina kelompok nelayan	(%)	4,83	2,77
414	Produksi perikanan kelompok nelayan	(%)	6,87	5,72
415	Nilai tukar nelayan	Nilai		111,49
416	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	(ton)	171.027	193.154,56
Penunjang Urusan				
1	**Perencanaan Pembangunan**			
417	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada
418	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada
419	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada
420	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada
421	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	(%)	98	98
422	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	(%)	100	100
2	**Keuangan**			
423	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP
424	Persentase SiLPA terhadap APBD	(%)	1,2	1,30
425	Persentase belanja pendidikan (20%)	(%)	20	20,43
426	Persentase belanja kesehatan (10%)	(%)	10	24,83
	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	(%)	n/a	n/a
	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD	(%)	n/a	n/a

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD	(%)	n/a	n/a
427	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (%)	(%)	2,43	6,20
428	Penetapan APBD	Tepat Waktu / Tidak	Tepat Waktu	Tepat Waktu
429	Perbandingan antara belanja operasi, modal dan tidak terduga	(%)	n/a	n/a
430	Belanja Operasi Terhadap APBD (%)	(%)	75	71,74
431	Belanja Modal Terhadap APBD (%)	(%)	24	28,22
432	Belanja Tidak Terduga Terhadap APBD (%)	(%)	1	0,04
433	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kerja kesehatan	(%)	20	38,10
434	Rasio PAD (%)	(%)	20,41	20,57
435	Devialisasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	(%)	100	81,08
436	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	(%)	100	100
437	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Angka	1	1
438	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP
439	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	(%)	100	100
3	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**			
440	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	(Hari/Jam Pelajaran)	103/894	103/893
441	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	(%)	1,4	0,64
442	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	(%)	50	28,89
443	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	(orang)	33	44
444	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	(orang)	949	652
445	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (Orang)	(orang)	2.330	2.296
446	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	(%)	68	53,98
447	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	(%)	38	46,02
448	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	(%)	5	n/a
4	**Penelitian dan Pengembangan**			
449	Persentase implementasi rencana kelitbangan.(%)	(%)	100	100
450	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.(%)	(%)	100	100
451	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	(%)	59	55
452	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah(%)	(%)	100	100
5	**Pengawasan**			
453	Persentase tindak lanjut temuan	(%)	83	71,46
454	Persentase pelanggaran pegawai	(%)	0,3	0,24
455	Jumlah temuan BPK	(angka)	12	13
456	Maturitas Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	(level)	3 (Nilai 3,3)	3 (nilai 3,0)
457	Peningkatan Kapabilitass Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	(level)	3	3,057
6	**Sekretariat Dewan**			
458	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alatn/aalat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada / Tidak	Ada	Ada
459	Tersusun dan terintegrasinya Program/Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada / Tidak	Ada	Ada
460	Terintegrasi program/program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan	Ada / Tidak	Ada	Ada

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
	Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD			
7	**Sekretariat Daerah**			
461	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	(%)	40	79,78
462	Rasio belanja yang dilakukan melalui pengadaan	(%)	93	51,55

Adapun asumsi capaian indikator kinerja kunci (IKK) Kota Palopo Tahun 2024 dan target capaian indiaktor kinerja kunci tahun 2025 didasarkan pada indiaktor yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026, yang disajikan pada tabel berikut;

Tabel 6.4
Perkiraan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Kunci (Ikk) Kota Palopo
Tahun 2024 - 2025

Bidang Urusan		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
1	**Pendidikan**					
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	(%)	n/a	100	100	Dinas Pendidikan
2	Angka Partisipasi Kasar					
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	(%)	100,05	100	100	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	(%)	86,44	100	100	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	(%)	110,58	100	100	Dinas Pendidikan
3	Angka pendidikan yang ditamatkan					
	Tidak/Belum Bersekolah	(%)	7.19(t2021)	5,3	5,2	Dinas Pendidikan
	Tamat SD/sederajat	(%)	12,14(t2021)	13	14	Dinas Pendidikan
	Tamat SMP/sederajat	(%)	21,39(t2021)	21	22	Dinas Pendidikan
	Tamat SMA	(%)	36,72(t2021)	35	36	Dinas Pendidikan
	Tamat SMK	(%)	4,21(t2021)	4	5	Dinas Pendidikan
	Tamat Perguruan Tinggi	(%)	18,23(t2021)	19,2	19,3	Dinas Pendidikan
	Diploma I/II	(%)	0,25(t2021)	0,4	0,4	Dinas Pendidikan
	Diploma III	(%)	1,66(t2021)	1,8	1,9	Dinas Pendidikan
	Diploma IV/S1-S3	(%)	16,32(t2021)	17	17	Dinas Pendidikan
4	Angka Partisipasi Murni					
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	(%)	98,68	100	100	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	(%)	80,52	100	100	Dinas Pendidikan
5	Angka partisipasi sekolah					
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (Per 1000)	(%)	986	1000	1000	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (Per 1000)	(%)	984	1000	1000	Dinas Pendidikan
6	Angka Putus Sekolah:					
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	(%)	0,96	0	0	Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	(%)	1,94	0	0	Dinas Pendidikan
7	Angka Kelulusan:					
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	(%)	98,47	100	100	Dinas Pendidikan
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	(%)	98,68	100	100	Dinas Pendidikan
8	Angka Melanjutkan (AM):					
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	(%)	100	100	100	Dinas Pendidikan
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke MA/SMK/ MA	(%)	100	100	100	Dinas Pendidikan

Bidang Urusan		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
9	Fasilitas Pendidikan:					
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	(%)	100	100	100	Dinas Pendidikan
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	(%)	100	100	100	Dinas Pendidikan
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (per 10,000)					
	SD/MI (per 10,000)	(%)	30(t2021)	40	42	Dinas Pendidikan
	SMP/ MTS (per 10,000)	(%)	663(t2021)	35	39	Dinas Pendidikan
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000)					
	SD/MI (per 10,000)	(%)	688(t2021)	686	699	Dinas Pendidikan
	SMP/ MTS (per 10,000)	(%)	0.49(t2021)	789	825	Dinas Pendidikan
12	Rasio guru/murid per kelas rata/rata pendidikan dasar (per 10.000)	(%)	39(t2021)	0,60	0,60	Dinas Pendidikan
13	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	(%)	100	100	100	Dinas Pendidikan
14	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	(%)	97,57	100	100	Dinas Pendidikan
15	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	(%)	99,19	100	100	Dinas Pendidikan
16	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D1-IV	(%)	61,44	100	100	Dinas Pendidikan
17	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	(%)	n/a	100	100	Dinas Pendidikan
18	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	(%)	n/a	100	100	Dinas Pendidikan
19	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	(%)	n/a	100	100	Dinas Pendidikan
20	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan mengengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	(%)	98,74	100	100	Dinas Pendidikan
2	**Kesehatan**					
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	(angka)	5,22	0,5	0,4	Dinas Kesehatan
2	Angka kelangsungan hidup bayi (per 100)	(angka)	94,78	99	99	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	(angka)	5,22	5	5	Dinas Kesehatan
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	(angka)	4,27	3	3	Dinas Kesehatan
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	(angka)	30,47	30	20	Dinas Kesehatan
6	Rasio posyandu per satuan balita (Per 1000 balita)	(%)	8,41	10	10	Dinas Kesehatan
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 10.000)	(%)	3	4	4	Dinas Kesehatan
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000)	(%)	4	4	4	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
9	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1.000)	(%)	6	6	6	Dinas Kesehatan
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 10.000)	(%)	6	6	6	Dinas Kesehatan
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	(%)	86,23	86	86,42	Dinas Kesehatan
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	(%)	101,67	100	100	Dinas Kesehatan
13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	(%)	93,57	100	100	Dinas Kesehatan
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	(%)	0	100	100	Dinas Kesehatan
15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	(%)	81,08	81	82	Dinas Kesehatan
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	(%)	98,48	100	100	Dinas Kesehatan
17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	(%)	9,2	9.7	10,5	Dinas Kesehatan
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	(%)	119	100	100	Dinas Kesehatan
19	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (Rasio per 100.000 penduduk)	(%)	225	200	190	Dinas Kesehatan
20	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	(%)	91,41	92	93	Dinas Kesehatan
21	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	(%)	39,76	40	41	Dinas Kesehatan
22	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	(%)	100	100	100	Dinas Kesehatan
23	Penderita diare yang ditangani (per 100.000)	(%)	5	8	9	Dinas Kesehatan
24	Angka kejadian Malaria (per 1000)	(angka)	62	60	58	Dinas Kesehatan
25	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	(%)	100	100	100	Dinas Kesehatan
26	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (100 ribu)	(%)	43	36	34	Dinas Kesehatan
27	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	(%)	0	2.4	2,4	Dinas Kesehatan
28	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	(%)	0	100	100	Dinas Kesehatan
29	Cakupan kunjungan bayi	(%)	99,76	100	100	Dinas Kesehatan
30	Cakupan puskesmas	(%)	133,33	133,33	133,33	Dinas Kesehatan
31	Cakupan pembantu puskesmas	(%)	62,5	65	70	Dinas Kesehatan
32	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	(%)	100	100	100	Dinas Kesehatan
33	Cakupan pelayanan nifas	(%)	99,53	100	100	Dinas Kesehatan
34	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	(%)	76,42	76	77	Dinas Kesehatan
35	Cakupan pelayanan anak balita	(%)	73,92	74	75	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
36	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	(%)	100	100	100	Dinas Kesehatan
37	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	(%)	97,93	100	100	Dinas Kesehatan
38	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	(%)	100	100	100	Dinas Kesehatan
39	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	(%)	100	100	100	Dinas Kesehatan
40	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	(%)	Tidak ada Kasus	100	100	Dinas Kesehatan
41	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	(%)	0,51	0,53	0,54	Dinas Kesehatan
42	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	(%)	0,78	0,79	0,79	Dinas Kesehatan
43	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	(%)	96,27	100	100	Dinas Kesehatan
44	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	(%)	99,79	100	100	Dinas Kesehatan
45	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	(%)	96,86	100	0,54	Dinas Kesehatan
46	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	(%)	68,33	100	0,79	Dinas Kesehatan
47	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	(%)	97,93	100	100	Dinas Kesehatan
48	Persentase orang usia 15-49 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	(%)	50,66	100	100	Dinas Kesehatan
49	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	(%)	74,82	100	100	Dinas Kesehatan
50	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	(%)	41,88	100	100	Dinas Kesehatan
51	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	(%)	87,03	100	100	Dinas Kesehatan
52	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	(%)	100	100	100	Dinas Kesehatan
53	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	(%)	100	100	100	Dinas Kesehatan
54	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	(%)	95,17	100	100	Dinas Kesehatan
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
	Pekerjaan Umum					
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	(%)	71,27	68	69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (per 10,000)	(%)	26	28	28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
3	Persentase Jalan Kewenangan Kota yang Berkondisi Baik (> 40 KM/Jam)	(%)	76,27	64	68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	(%)	58,81	1.34	1,36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	(%)	89,7	97	32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	(%)	36,76	34	32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	(%)	7,96	48	49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	(%)	27,31	25.5	30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	(%)	68,95	78	80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik	(%)	78,24	85	86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Rasio Jaringan Irigasi (per 100 Ha)	(%)	82,61	87	88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Persentase penduduk berakses air minum	(%)	94,38	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	(%)	98	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Persentase areal kawasan kumuh	(%)	n/a	1.55	1,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	(%)	n/a	5	5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 10.000)	(%)	n/a	1,9	1,9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (per 1000)	(%)	1,71	2	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	(%)	n/a	75	80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	(%)	n/a	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	(%)	82,61	24	25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	(%)	98	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	(%)	n/a	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penataan Ruang:					
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	(%)	279	77	77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
2	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	(Ha)	1.174	647	730	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	(%)	n/a	16.6	16,6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	(%)	n/a	81	81	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	(%)	n/a	0,33	0,33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Ketaatan terhadap RTRW	(%)	n/a	66	67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	(%)	n/a	6	7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Tingkat kemantapan Jalan kabupaten/kota	(%)	n/a	64	68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Rasio tenaga/operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	(%)	n/a	60	65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	(%)	n/a	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**					
1	Rasio rumah layak huni	(%)	0,203	0,2	0,15	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Rasio permukiman layak huni	(%)	92,09%	95,89	96,34	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	(%)	92,47%	97,67	97,89	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	(%)	95,55	98,65	98,8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Persentase pemukiman yang tertata	(%)	95,32	94	95	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	(%)	1,1	1,05	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	(%)	10,40	9,75	9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	(%)	5,59	5	4,5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	(%)	28,05	41	43	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
10	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	(%)	n/a	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	(%)	n/a	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
12	Persentase permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	(%)	10,40	20	25	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Urusan		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
13	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	(%)	5,59	5	7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	(%)	28,05	30	35	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					
1	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (Linmas)	(%)	200	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	(%)	95	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	(%)	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	(%)	n/a	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran
5	Persentase Penegakan PERDA	(%)	n/a	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	(%)	n/a	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Persentase Perda dan perkada yang ditegakkann	(%)	n/a	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	(%)	n/a	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	(%)	n/a	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	(%)	n/a	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	(%)	n/a	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran
12	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	(%)	n/a	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran
6	**Sosial**					
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	(%)	48,90	55	56	Dinas Sosial
2	Persentase PMKS yang tertangani	(%)	48,70	55	57	Dinas Sosial
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	(%)	58,30	61	62	Dinas Sosial
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	(%)	12	2	3	Dinas Sosial
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	(%)	100	100	100	Dinas Sosial
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	(%)	100	100	100	Dinas Sosial
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	(%)	100	100	100	Dinas Sosial

Bidang Urusan		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	(%)	100	100	100	Dinas Sosial
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	(%)	14,20	42	42	Dinas Sosial
10	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	(%)	24,17	20	30	Dinas Sosial
11	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	(%)	100	100	100	Dinas Sosial
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
1	**Tenaga Kerja**					
1	Angka sengketa pengusaha/pekerja per tahun (Per 1000)	(angka)	8,9	5	4	Dinas Tenaga Kerja
	Angka sengketa pengusaha/pekerja di Perusahaan ber TDP per tahun (Per 1000)	(angka)	3,35	1	1	Dinas Tenaga Kerja
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	(%)	29,41	50	55	Dinas Tenaga Kerja
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	(%)	35	57	58	Dinas Tenaga Kerja
4	Keselamatan dan perlindungan	(%)	34,07	28	28	Dinas Tenaga Kerja
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	(%)	35,32	58	59	Dinas Tenaga Kerja
6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	(%)	1,38	1,5	1,6	Dinas Tenaga Kerja
7	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	(%)	n/a	0,5	0,5	Dinas Tenaga Kerja
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	(%)	47,76	30	30	Dinas Tenaga Kerja
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	(%)	n/a	10	12	Dinas Tenaga Kerja
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	(%)	n/a	5	5	Dinas Tenaga Kerja
11	Rasio lulusan S1/S2/S3	(%)	n/a	10,95	10,98	Dinas Tenaga Kerja
12	Persentase kegiatan yang dilaksanan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	(%)	n/a	75	75	Dinas Tenaga Kerja
13	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	(%)	n/a	5	5	Dinas Tenaga Kerja
14	Tingkat produktivitas tenaga kerja (Ribu/Tenaga Kerja/Thn)	(Ribu/Tenaga Kerja/Thn	n/a	125	135	Dinas Tenaga Kerja
15	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	(%)	n/a	28	28	Dinas Tenaga Kerja
16	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalan dan luar	(%)	n/a	57	58	Dinas Tenaga Kerja

Bidang Urusan		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
	negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota					
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	(%)	21,36	12	13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	(%)	28,00	28	28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	(%)	1,55	5.5	6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Rasio KDRT (per 10.000)	(%)	0,004	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	(%)	134	48,39	48,39	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	(%)	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	(%)	100	60	65	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	(%)	n/a	60	65	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	(%)	n/a	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	(%)	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	(%)	71	34	38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	(%)	100	32	34	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	(%)	94	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	APM Perempuan pada Tingkat SD	(%)	8.455	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SD	(%)	8.992	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	(%)	104	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Urusan		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
	APM Perempuan pada Tingkat SMP	(%)	4.135	81	82	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMP	(%)	3.977	82	83	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	(%)	93	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	APM Perempuan yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	(%)	5.280	65	66	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	APM Laki-Laki yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	(%)	5.710	78	79	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	(%)	n/a	44.85	44,9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	(%)	43,48	46	46	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	(%)	n/a	0.4	0,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	(%)	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	(%)	0,03	3	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	**Pangan**					
1	Ketersediaan pangan utama	(%)	7,46	8	8	
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	(Kkal/kapita/hari)	2.596	2.499	2.549	Dinas Ketahanan Pangan
	Ketersediaan energi perkapita	(Kkal/kapita/hari)	2.510	2.400	2.450	Dinas Ketahanan Pangan
	Ketersediaan protein perkapita (gram/kapita/hari)	(Kkal/kapita/hari)	95,05	99	99	Dinas Ketahanan Pangan
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	(%)	n/a	91	91	Dinas Ketahanan Pangan
	Ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	(Ton)	4,60	6	6	Dinas Ketahanan Pangan
4	**Pertanahan**					
1	Persentase luas lahan bersertifikat	(%)	1,95	2	2,95	Dinas Pertanahan
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	(%)	2	3	3	Dinas Pertanahan
3	Penyelesaian izin lokasi	(%)	100	100	100	Dinas Pertanahan
4	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	(%)	n/a	100	100	Dinas Pertanahan
5	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	(%)	n/a	100	100	Dinas Pertanahan
6	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	(angka)	n/a	2	2	Dinas Pertanahan
7	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diresdistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	(angka)	n/a	9	9	Dinas Pertanahan
8	Tersedianya tanah untuk masyarakat	(angka)	n/a	2	2	Dinas Pertanahan

Bidang Urusan		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
9	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	(kasus)	n/a	3	3	Dinas Pertanahan
5	**Lingkungan Hidup**					
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedia/ Belum Tersedia	Belum ada	Belum ada	ada	Dinas Lingkungan Hidup
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tersedia/ Belum Tersedia	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Dinas Lingkungan Hidup
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Dinas Lingkungan Hidup
4	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Indeks	18,45	30	40	Dinas Lingkungan Hidup
5	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	Indeks	88,22	88.32	88,42	Dinas Lingkungan Hidup
6	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	61,07	61,15	12,08	Dinas Lingkungan Hidup
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	(%)	10,98	11.55	12,08	Dinas Lingkungan Hidup
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	(%)	n/a	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina (Orang)	(orang)	0	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum (Orang)	(Orang)	0	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
9	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	(kali)	Ada	Ada	Ada	Dinas Lingkungan Hidup
10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	(%)	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
11	Timbulan sampah yang ditangani	(%)	74,5	74,5	100	Dinas Lingkungan Hidup
12	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	(%)	8,45	8,45	100	Dinas Lingkungan Hidup
13	Persentase cakupan area pelayanan	(%)	81,48	81,48	100	Dinas Lingkungan Hidup
14	Persentase jumlah sampah yang tertangani	(%)	80	80	100	Dinas Lingkungan Hidup
15	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	(%)	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
16	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	(%)	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
17	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundangn/aundangan	(%)	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kab/kota	(%)	59,96	59,96	80,50	Dinas Lingkungan Hidup
19	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	(%)	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
20	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadapat izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	(%)	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
1	Rasio penduduk ber/KTP per satuan penduduk	(%)	0,90	0,80	0,90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Rasio bayi berakte kelahiran	(%)	0,99	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Rasio pasangan berakte nikah	(%)	0,5	80	85	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	Ada	ada	Ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah / belum	Sudah	sudah	Sudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	(%)	90,01	95	98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	(%)	99	99	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Perekaman KTP elektronik	(%)	100	92	93	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Persentase anak usia 0/7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memilikan KIA	(%)	n/a	50	55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Kepemilikan akta kelahiran	(%)	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	(angka)	n/a	5	10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	(%)	100	100	100	Sekretariat Daerah
2	Ratan/arata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	(%)	1	1	1	Sekretariat Daerah
3	Rata/rata jumlah kelompok binaan PKK	(%)	n/a	5	5,1	Sekretariat Daerah
4	Persentase LSM aktif	(%)	n/a	4	5	Sekretariat Daerah
5	Persentase LPM Berprestasi	(%)	n/a	4	4	Sekretariat Daerah
6	Persentase PKK aktif	(%)	100	100	100	Sekretariat Daerah
7	Persentase Posyandu aktif	(%)	100	100	100	Sekretariat Daerah
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	(%)	n/a	100	100	Sekretariat Daerah
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	(%)	n/a	100	100	Sekretariat Daerah
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	(%)	2,67	2	2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Total Fertility Rate (TFR)	(Angka)	n/a	1,73	1,7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	(ada/tidak)	Tidak ada	Ada	Tidak Ada	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Urusan		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
4	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	(%)	n/a	0	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	(%)	56	58	60	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	(%)	n/a	5	10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	(angka)	n/a	1	1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	(angka)	n/a	3	4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	(angka)	n/a	1	2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Rata/rata jumlah anak per keluarga	(rata-rata)	2	2	2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	(%)	70,82	75	80	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	(angka)	n/a	8	8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (1000 PUS)	(%)	1	1	2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14	Cakupan PUS yang ingin ber/KB tidak *terpenuhi (unmet need)*	(%)	25,27	10	11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	(%)	33,36	34	45	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	(%)	0,88	20	30	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber/KB	(%)	80,99	94	95	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber/KB	(%)	63,03	60	70	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
19	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber/KB	(%)	7,83	50	55	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	(%)	11,11	11,11	11,11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Urusan		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
21	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	(%)	7,55	8	9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	(%)	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang bern/aKB mandiri	(%)	6,29	24	25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
24	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	(%)	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
25	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota (%)	(%)	12	10	11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
26	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes	(%)	100	60	70	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
27	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	(%)	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	(%)	n/a	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	(%)	32,61	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
30	Rata/rata usia kawin pertama wanita	Tahun	n/a	25	25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD	(%)	32,61	80	90	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
32	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mPCR)	(%)	n/a	84,04	84,04	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
33	Persentase kebutuhan ber/KB yang tidak terpenuhi *(unmet need)*	(%)	25,27	10	20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	**Perhubungan**					
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	(Orang)	2.301.320	2.324.333	2.347.576	Dinas Perhubungan
2	Rasio ijin trayek (Per 100.000 Penduduk)	(%)	3	1.64	1,65	Dinas Perhubungan
3	Jumlah uji kir angkutan umum	(Unit)	180	181	182	Dinas Perhubungan
4	Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bis	(angka)	2	2	2	Dinas Perhubungan
5	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	(%)	8,64	872.93	881,66	Dinas Perhubungan
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	(%)	0,23	0.24	0,25	Dinas Perhubungan
7	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	(%)	14	15	16	Dinas Perhubungan

Bidang Urusan		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (per 1000)	(%)	12	18	19	Dinas Perhubungan
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	(Orang/Tahun)	2.301.320	2.324.333	2.347.576	Dinas Perhubungan
10	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	(M3/Tahun)	n/a	620,825	620.825	Dinas Perhubungan
11	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	(angka)	1.150.660	1.162.167	1.173.789	Dinas Perhubungan
12	Rasio konektivitas kabupaten/kota	(%)	n/a	0.17	0.18	Dinas Perhubungan
13	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	(%)	0,25	0.25	0.26	Dinas Perhubungan
10	**Komunikasi dan Informatika**					
1	Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	(%)	3,33	3,55	3,65	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	(%)	0,86	0,88	0,9	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	(%)	n/a	85,5	90	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	(%)	`0,08	0,15	0.2	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	(%)	0,42	0,6	0,65	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	(%)	n/a	95	98	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	(%)	n/a	85	85	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	(%)	n/a	75	80	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**					
1	Persentase koperasi aktif	(%)	25,50	25	26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	(%)	n/a	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	Persentase BPR/LKM aktif	(%)	n/a	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	(%)	85,75	80	85	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	(%)	n/a	26.45	26,55	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	(%)	n/a	7.9	8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12	**Penanaman Modal**					
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	(angka)	110	130	140	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	(Juta)	120.700	133.078	139.731	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	Rasio daya serap tenaga kerja (per 100 Juta Nilai PMDN)	(%)	10	2	4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	(milyar rupiah)	5.748.000.000	6.336.000.000	6.653.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(%)	5	5	5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
13	**Kepemudaan dan Olahraga**					

Bidang Urusan		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	(%)	54,1	60	65	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Persentase wirausaha muda	(%)	1,38	1,5	1.8	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Cakupan pembinaan olahraga	(%)	67,86	71,43	71,43	Dinas Pemuda dan Olahraga
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	(%)	36,14	38	39	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	Cakupan pembinaan atlet muda	(%)	69,4	68	69	Dinas Pemuda dan Olahraga
6	Jumlah atlet berprestasi	(Orang)	71	22	24	Dinas Pemuda dan Olahraga
7	Jumlah prestasi olahraga	(Cabang)	18	6	7	Dinas Pemuda dan Olahraga
8	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	(%)	n/a	1,5	1,8	Dinas Pemuda dan Olahraga
9	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	(%)	n/a	10	10	Dinas Pemuda dan Olahraga
10	Peningkatan prestasi olahrgaa	(%)	69	5	5	Dinas Pemuda dan Olahraga
14	**Statistik**					
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Tidak	Ada	Ada	Dinas Persandian dan Statistik
2	Buku kabupaten dalam angka	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Dinas Persandian dan Statistik
3	Buku PDRB	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Dinas Persandian dan Statistik
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Ada/tidak	100	100	100	Dinas Persandian dan Statistik
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Ada/tidak	100	100	100	Dinas Persandian dan Statistik
15	**Persandian**					
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	(%)	80	100	100	Dinas Persandian dan Statistik
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	(%)	n/a	80	80	Dinas Persandian dan Statistik
16	**Kebudayaan**					
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	(%)	10	10	10	Dinas Kebudayaan
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	(%)	100	100	100	Dinas Kebudayaan
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Buah)	(Unit)	3	4	4	Dinas Kebudayaan
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	(Unit)	53	55	55	Dinas Kebudayaan
5	Terlestarikannya Cagar Budaya	(Unit)	n/a	2	3	Dinas Kebudayaan
17	**Perpustakaan**					
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	(%)	6,1	5	6	Dinas Perpustakaan
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	(%)	53,60	53,3	53,4	Dinas Perpustakaan
3	Rasio perpustakaan per satuan penduduk (per 1000)	(%)	1,38	1,38	1,38	Dinas Perpustakaan
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	(%)	791	841	891	Dinas Perpustakaan

Bidang Urusan		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	(%)	16.417	16.517	16.617	Dinas Perpustakaan
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	(%)	100	80	93	Dinas Perpustakaan
7	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	(%)	n/a	9,5	10	Dinas Perpustakaan
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	(indeks)	78,22	80	81	Dinas Perpustakaan
18	**Kearsipan**					
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	(%)	20,40	17	19	Dinas Kearsiapan
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	(%)	20	10	12	Dinas Kearsiapan
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Rahun 2009 tentang Kearsipan	(%)	n/a	100	100	Dinas Kearsiapan
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	(%)	n/a	75	75	Dinas Kearsiapan
Urusan Pemerintahan Pilihan						
1.	**Pariwisata**					
1	Kunjungan wisata	(%)	138,33	100	100	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	Lama kunjungan Wisata (Ratan/arata Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun)	(%)	2	2.5	2,5	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	PAD sektor pariwisata	(%)	5	5.09	5,1	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	(%)	153,6	3.7	3,7	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5	Tingkat hunian akomodasi	(%)	16	18	19	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	(%)	0,092	0.21	0,32	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	(Rp.)	8.942.731.819	7	7	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	**Pertanian**					
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	(%)	15,4	15.87	16,4	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	(%)	n/a	6	6	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	(%)	n/a	4	4	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	(%)	n/a	35	40	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
5	Produksi Bahan Pangan Utama (Ton/Tahun)					
	Padi	(Ton/Tahun)	20.280,89	20.477	20.676	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Bidang Urusan		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
	Jagung	(Ton/Tahun)	4.737	5.409	583	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Ubi Kayu	(Ton/Tahun)	n/a	70	75	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Ubi Jalar	(Ton/Tahun)	n/a	5	6	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Sagu	(Ton/Tahun)	15	17	18	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
6	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)					
	Padi	(Ton/Ha)	6,23	6.14	6.17	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Jagung	(Ton/Ha)	6,27	6.29	6.31	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Ubi Kayu	(Ton/Ha)	n/a	31	31.25	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Ubi jalar	(Ton/Ha)	n/a	4.5	4.75	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Sagu	(Ton/Ha)	62	0.09	0.09	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
7	Cakupan bina kelompok petani	(%)	62,74	53	54	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	(%)	n/a	6.81	6.91	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	(%)	n/a	-29	-28,5	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
8	Produksi daging dan telur daerah	(ton/tahun)	4.822,09	4.966,74	5.111,42	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Daging (ruminansia dan unggas)	(ton/tahun)	3.776,92	3.890,22	4.003,54	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Daging (ruminansia)	(ton/tahun)	732,59	754,57	776,55	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Dagung sapi	(ton)	724,89	746,64	768,39	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Daging Kerbau	(ton)	4,36	4,49	4,62	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Daging Kambing	(ton)	3,34	3.44	3,54	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
9	Daging Unggas	(ton)	3.044,33	3.135,65	3.226,99	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Daging ayam kampong	(ton)	121,83	125,48	129,14	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Bidang Urusan		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
	Daging ayam pedaging	(ton)	2.907,67	2.994,90	3.082,13	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Daging Itik/bebek/entong	(ton)	14,83	15,27	15,72	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
10	Produksi sector perkebunan	(ton/tahun)	1.045,17	1.076,52	129,14	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Telur ayam buras/kampung	(ton)	730,00	751,90	773,8	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Telur ayam ras petelur	(ton)	182,13	187,59	193,06	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
3	**Energi dan Sumber Daya Mineral**					
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	(%)	100	100	100	
2	Rasio ketersediaan daya listrik	(%)	100	100	100	
4	**Perdagangan**					
1	Ekspor Bersih Perdagangan	(Nilai/Juta)	0	0	0	Dinas Perdagangan
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	(%)	n/a	8	9	Dinas Perdagangan
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	(%)	80,35	80.45	89,96	Dinas Perdagangan
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	(%)	49,7	59	61	Dinas Perdagangan
5	Persentase alat/alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	(%)	59,5	65	68	Dinas Perdagangan
5	**Perindustrian**					
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	(%)	n/a	3	3,5	Dinas Perindustrian
2	Jumlah industri kecil dan menengah	(unit)	1.562	5	5	Dinas Perindustrian
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	(%)	n/a	80	80	Dinas Perindustrian
4	Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Ada/tidak	n/a	Tidak ada	Tidak ada	Dinas Perindustrian
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	(%)	n/a	100	100	Dinas Perindustrian
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (UKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	(%)	n/a	12	15	Dinas Perindustrian
7	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedia/ belum tersedia	n/a	Tersedia	Tersedia	Dinas Perindustrian
6	**Perikanan**					
1	Produksi perikanan	(%)	118,02	100	100	Dinas Perikanan

Bidang Urusan		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
	Produksi Perikanan Daerah	(Ton/Tahun)	193.005,27	180	100	Dinas Perikanan
2	Konsumsi ikan	(%)	92,24	100	100	Dinas Perikanan
	Target Konsumsi Perikanan Daerah	(Kg/Tahun)	53,98	60	70	Dinas Perikanan
3	Cakupan bina kelompok nelayan	(%)	0,246	5	10	Dinas Perikanan
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	(%)	5,7	7	8	Dinas Perikanan
5	Nilai tukar nelayan	Nilai	109,27	110	110,50	Dinas Perikanan
	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	(ton)	193.005	195.424,39	211.505,43	Dinas Perikanan
Penunjang Urusan						
1.	**Perencanaan Pembangunan**					
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	(%)	98	98	98	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	(%)	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	**Keuangan**					
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Persentase SiLPA terhadap APBD	(%)	4,18	1	0,8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Persentase belanja pendidikan (20%)	(%)	20,10	20	20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	Persentase belanja kesehatan (10%)	(%)	24,41	10	10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD	(%)				
	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD	(%)	n/a	n/a	n/a	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Belanja Operasi terhadap APBD	(%)	73,03	59,52	59,53	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	(%)	5,41	2	2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu / Tidak	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
8	Perbandingan antara belanja operasi, modal dan tidak terduga					
	Belanja Operasi Terhadap APBD (%)	(%)	73,03	59,52	59,53	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Bidang Urusan		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
	Belanja Modal Terhadap APBD (%)	(%)	26,92	40,01	40,01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Belanja Tidak Terduga Terhadap APBD (%)	(%)	0,05	0,47	0,46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
9	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kerja kesehatan	(%)	n/a	20	20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
10	Rasio PAD (%)	(%)	18,14	19,76	19,93	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
11	Devialisasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	(%)	n/a	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
12	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	(%)	n/a	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
13	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
14	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	(%)	n/a	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**					
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Hari/Jam Pelajaran)	(Hari/Jam Pelajaran)	103,893	103,894	103.894	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	(%)	1,16	1.2	1,3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	(%)	41,39	45	50	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	(orang)	40	33	33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	(orang)	647	949	949	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (Orang)	(orang)	2.428	2292	2307	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
7	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	(%)	n/a	63	62	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
8	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	(%)	n/a	37	38	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
9	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	(%)	n/a	4	5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
4	**Penelitian dan Pengembangan**					
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.(%)	(%)	100	100	100	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.(%)	(%)	100	100	100	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	(unit)	n/a	25	31	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah(%)	(%)	100	100	100	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bidang Urusan		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
5	**Pengawasan**					
1	Persentase tindak lanjut temuan	(%)	93,84	85	85	Inspektorat Daerah
2	Persentase pelanggaran pegawai	(%)	n/a	0,3	0,3	Inspektorat Daerah
3	Jumlah temuan BPK	(angka)	6	6	6	Inspektorat Daerah
4	Maturitas Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	(level)	3 (nilai 3,12)	3 (Nilai 3.3)	3 (Nilai 3,4)	Inspektorat Daerah
5	Peningkatan Kapabilitass Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level	(level)	3	3	4	Inspektorat Daerah
6	**Sekretariat DPRD**					
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat/aalat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD
2	Tersusun dan terintegrasinya Programn/aProgram Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD
3	Terintegrasi program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD
7	**Sekretariat Daerah**					
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	(%)	n/a	40	40	Sekretariat Daerah
2	Rasio belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	(%)	n/a	100	100	Sekretariat Daerah

6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan menjadi hak pelayanan minimal dari setiap warga negara. Pemenuhan SPM menjadi urusan pemerintahan wajib sehingga Pemerintah Kota Palopo perlu mengupayakan dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dan potensi yang ada termasuk pembelanjaan anggaran daerah dalam menjalankan kewajiban tersebut.

Standar Pelayanan Minimal merupakan seperangkat kriteria atau batasan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memastikan pelayanan publik yang lebih baik dan merata di berbagai daerah. Tujuan dari penggunaan SPM adalah untuk meningkatkan kualitas dan kesetaraan pelayanan publik bagi masyarakat, sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang setara dan memadai dari pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, ditetapkan Jenis Pelayanan Dasar yang wajib dilaksanakan untuk daerah, khususnya kabupaten / kota yang terdiri atas :

a. Bidang Pendidikan
b. Bidang Kesehatan
c. Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang
d. Bidang Perumahan Rakyat
e. Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
f. Bidang sosial

Pemerintah Kota Palopo telah menyusun rencana pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPD Tahun 2024-2026 yang dijabarkan melalui target tahunan pencapaian SPM. Rencana pencapaian SPM menjadi salah satu faktor dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA). Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara Wali Kota dengan pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan

SPM. Selanjutnya, nota kesepakatan tentang KUA dan PPA menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran tahunan berdasarkan tingkat prestasi kerja yang mengacu pada rencana pencapaian dan penerapan SPM. Selanjutnya, nota kesepakatan tentang KUA dan PPA menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran tahunan berdasarkan tingkat prestasi kerja yang mengacu pada rencana pencapaian dan penerapan SPM.

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah dibebankan pada APBN. Sedangkan pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah dibebankan pada APBD Kota Palopo. Capaian SPM Kota Palopo tahun 2023 dan perkiraan penerapan tahun 2024 serta penetapan target indikator SPM tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.5
Capaian dan Perkiraan Penerapan SPM Tahun 2023-2024,
serta Penetapan Target Indikator SPM Kota Palopo Tahun 2025
(sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021)

No	Bidang Urusan/Indikator	Target Nasional	Capaian 2023	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Kinerja Akhir
I	**SPM Bidang Pendidikan**		**77,94**	**100**	**100**	**100**
1.1	**Pendidikan Dasar**					
1	Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	90,77	100	100	100
	Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya				
1.2	**Pendidikan Kesetaraan**					
2	Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	91,37	100	100	100
	Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya				
1.3	**Pendidikan Anak Usia Dini**					
3	Jumlah Warga Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	51,61	100	100	100
II	**SPM Bidang Kesehatan**		**88,32**	**100**	**100**	**100**
2.1	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**					
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	90,63	100	100	100
2.2	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**					
2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	95,50	100	100	100
2.3	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**					
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	95,88	100	100	100
2.4	**Pelayanan kesehatan balita**					
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	89,62	100	100	100
2.5	**Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar**					
5	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	97,26	100	100	100
2.6	**Pelayanan kesehatan pada usia produktif**					
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	68,00	100	100	100
2.7	**Pelayanan kesehatan pada usia lanjut**					
7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	97,96	100	100	100
2.8	**Pelayanan kesehatan penderita hipertensi**					

No	Bidang Urusan/Indikator	Target Nasional	Capaian 2023	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Kinerja Akhir
8	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	47,38	100	100	100
2.9	**Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus**					
9	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	99,17	100	100	100
2.10	**Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat**					
10	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	87,32	100	100	100
2.11	**Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis**					
11	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	93,87	100	100	100
2.12	**Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)***					
12	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	99,49	100	100	100
III	**SPM Bidang Pekerjaan Umum**		**89,35**	**100**	**100**	**100**
3.1	**Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari**					
1	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	88,60	100	100	100
3.2	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik**					
2	Jumlah warga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%	90,03	100	100	100
IV	**SPM Bidang Perumahan**		**100**	**100**	**100**	**100**
4.1	**Penyediaan dan rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana**					
1	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100	100	100	100
4.2	**Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah**					
2	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100	100	100	100
V	**SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**94,81**	**100**	**100**	**100**
5.1	**Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum**					
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	94,81	100	100	100
5.2	**Pelayanan informasi rawan bencana**					
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100	100	100	100
5.3	**Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**					
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100	100	100	100
5.4	**Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**					
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100	100	100	100
5.5	**Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**					
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	97	100	100	100
VI	**SPM Bidang Sosial**		**100**	**100**	**100**	**100**
6.1	**Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti**					
1	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100	100	100	100
6.2	**Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti**					

No	Bidang Urusan/Indikator	Target Nasional	Capaian 2023	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Kinerja Akhir
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100	100	100	100
6.3	**Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti**					
3	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100	100	100	100
6.4	**Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti**					
4	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100	100	100	100
6.5	**Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota**					
5	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100	100	100	100

Sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/

6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs memberikan landasan kokoh dan merupakan instrumen utama untuk mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan indicator TPB/SDGs untuk menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Kota Palopo telah disusun hingga tahun 2023, sehingga target TPB/SDGs belum ditetapkan untuk tahun 2024 dan tahun 2025. Untuk target pencapaian indikator TPB/SDGs tahun 2024 didasarkan pada Sasaran Nasional yang termuat dalam Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs Tahun 2021-2024.

Tabel 6.6
Capaian Indikator TPB/SDGs Kota Palopo Tahun 2023 dan Sasaran Nasional Tahun 2024

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
TUJUAN I TANPA KEMISKINAN				
Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar amerika per hari	Tingkat kemiskinan ekstrim	Persen (%)	0,64	Menurun 0,4
Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase penduduk miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional	Persen (%)	7,69	6,0 – 7,0
Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi	Persen (%)		
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/ melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	Persen (%)		100
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang	Persen (%)	95,80	100

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	Kesehatan.			
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persen (%)	41,79	65
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Persen (%)		N/A
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 1.000 orang	Jiwa/1.000	0,02	0,2
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	Pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional	Dokumen	1 (Dokumen Kawasan Resiko Bencana)	60
TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN				
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment)*	Indeks	4,35	5
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan	Indeks	3,63	4
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	Prevalensi stunting (gagal tumbuh) dan *stunted* (pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita	Persen (%)	25,50	14
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada	Prevalensi *wasting* (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia	Persen (%)	2,90	7

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe			
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Indeks	85,5	95,2
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	Persen (%)		33
Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	Kg/Jiwa		41,79
Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Persen (%)	12,22	100
Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	PDRB Pertanian/ APBD Pertanian		PM
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA				
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	Angka kematian ibu (AKI)	Kasus	3	183
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan	Persen (%)		95

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
	terlatih; (b) di fasilitas kesehatan			
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB)	Persen (%)		16
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Jiwa/ 1.000		10
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi	Jiwa/ 1.000	0,77	0,18
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 1.000 penduduk	Jiwa/ 1.000	2,58	190
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	Kejadian Malaria per 1.000 orang.	Jiwa/ 1.000		N/A
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	Jumlah kasus malaria	Jiwa	68	N/A
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	Insiden Hepatitis B per 1.000 penduduk		125	1,09
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	Jiwa	2	514
Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Persen (%)		8,7
Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui	Prevalensi tekanan darah tinggi	Persen (%)		34,1

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan				
Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Persen (%)		21,8
Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Jiwa		11.500
Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi	Jiwa		N/A
Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir	Persen (%)		N/A
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	Persen (%)		63,41
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1.000 perempuan di kelompok umur yang sama	Jiwa/ 1.000		18
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	*Total Fertility Rate* (TFR)	Persen (%)	2,24	2,1
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	*Unmet Need* Pelayanan Kesehatan	Persen (%)		7,40
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen (%)	95,80	98

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Persen (%)		8,7
Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional	Persen (%)		90
Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan	Persen (%)	33,91	96
Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Jiwa/ 1.000	13,76	83
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS				
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Persen (%)		63
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	Persen (%)		98,94
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/	Persen (%)		N/A

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	sederajat, dan SMA/ sederajat			
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin	Persen (%)		PM
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	Persen (%)		95,65
Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin	Persen (%)		PM
Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)			32,28
Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 25-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Persen (%)		PM
Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ lakilaki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas	Persen (%)	APM SD/Sederajat (98.34%) APM SMP/ Sederajat (79.06%) APM SMA/Sederajat (80.13%) APK SD/Sederajat (105.71%) APK SMP/Sederajat (82.89%) APK SMA/ Sederajat (110.37%)	99,99
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Persen (%)		PM

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi				
Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Persen (%)		N/A
Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir pada tingkat SD/ Sederajat, SMP/ Sederajat dan SMA/ Sederajat	Persen (%)		PM
Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan	Persen (%)		81,8
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER				
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Persen (%)		Menurun
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Persen (%)		Menurun
Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b pemerintah daerah	Persen (%)	28	22,52
Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Persen (%)		PM
Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	Persen (%)		75,7
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK				
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum	Persen (%)		15

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
yang aman dan terjangkau bagi semua	yang dikelola secara aman			
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Persen (%)		90
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman	Persen (%)	0	PM
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	Kualitas air permukaan sebagai air baku	Indeks	53,33	55,50
Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	Persen (%)		PM
Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya	Persen (%)		PM
TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU				
Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	Rasio elektrifikasi	Persen (%)		100
Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	Konsumsi listrik per kapita	Mega Watt/ Jiwa		14.08
Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Persen (%)		PM
TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI				

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	Laju pertumbuhan PDRB per kapita harga konstan 2010	Persen (%)	12,20	
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	PDRB per kapita harga berlaku	Juta	58,86	
Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk fokus pada peningkatan nilai tambah tinggi dan sektor padat karya	Laju pertumbuhan PDRB harga konstan 2010 per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun	Persen (%)	0,71	
Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Persen (%)	7,81	
Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	Tingkat setengah pengangguran (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu)	Persen (%)	28,64	
Pada tahun 2020, mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja dan tidak dalam pelatihan dan tidak sekolah	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)	Persen (%)		
Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Persen (%)		
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	Jumlah wisatawan mancanegara	Jiwa	68	
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jiwa	178.561	
TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR				
Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional	Kondisi mantap jalan nasional	Persen (%)		

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua				
Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	Kondisi mantap jalan provinsi	Persen (%)		
Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	Kondisi mantap jalan kabupaten/ kota	Persen (%)		
Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	jiwa	1.982.192	
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) industri manufaktur	Persen (%)	9,16	
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 industri manufaktur	Persen (%)	5,81	
TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN				
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	Rasio Gini	Indeks	0,367	
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persen (%)	7,69	

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	Persen (%)		
Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persen (%)	41,79	
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN				
Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persen (%)		
Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	Persen (%)		
Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Persen (%)		
Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	Hektare/Jiwa		
Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Rupiah/ Jiwa		
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 1.000 orang	Jiwa / 1.000	0,02	
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif	Persen (%)		

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	terhadap PDRB			
Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	Persen (%)		80 penanganan dan 20 pengurangan
Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	Persentase sampah nasional yang terkelola	Persen (%)	77,28	99
Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10	ugram/m3/ Jiwa		
Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,53	
Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Persen (%)		
Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Persen (%)		
Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030	Pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	Dokumen	1 dokumen Kawasan Resiko Bencana	
Memberikan dukungan kepada negara - negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memfaatkan bahan lokal	Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal	Perda		
TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB				
Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global	Persentase Sisa Makanan	Persen (%)	35	Pengurangan 28%

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
perkapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian paska panen				
Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan - bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri (Pengurangan dan penghapusan Merkuri di tahun 2020 dan 2021 sebesar 10% dari baseline 10 ton, pengurangan dan penghapusan di tahun 2022 sampai 2024 sebesar 20% dari baseline 10 ton)	Ton		20% (10 ton)
Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan - bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/ diolah berdasarkan jenis penanganannya/ pengelolaannya	Ton/ Jiwa		PM
Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Ton	2.880,35	12,8 juta ton
Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Perusahaan		5000
Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Unit	N/A	PM
Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	Unit	N/A	5
TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM				
Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 1.000 orang		0,02	Maksimal 0,2
Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	Pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	Dokumen	1 Dokumen Kawasan Resiko Bencana	36,96

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN				
Mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi pada tahun 2025	Persentase penurunan sampah terbuang ke laut	Persen (%)	N/A	50
Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar	Jumlah nelayan yang terlindungi	Jiwa	2000	120.000
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN				
Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Persen (%)		50,1
Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	Persen (%)		0,12
Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	Km2		4,13
Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan	Indeks tutupan hijau pegunungan	Km2		98
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH				
Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kasus	16	533
Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun	Kematian disebabkan konflik per 1.000 penduduk	Jiwa/ 1.000	N/A	≤ 13
Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak	Angka korban perdagangan manusia per 1.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi	Jiwa/ 1.000	N/A	Menurun
Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Persen (%)		Litigasi: 9,169 orang Non-Litigasi: 1,221 kegiatan

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks		4,09
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	Pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini LHP	WTP	K/L: 95 Provinsi: 95 Kabupaten: 85 Kota: 95
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	Pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	Skor	64,35 B	K/L: 100 Provinsi: 100 Kab/Kota: 80
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Indeks	44,19 C	K/L: 85 Provinsi: 85 Kab/Kota: 70
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	Pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Tinggi/ Sedang/ Rendah		164 per 587
Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Persen (%)	28	22,52
Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II dan III)	Persen (%)	Eselon II 25,00% Eselon III 29,63%	N/A
Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur	Persen (%)		N/A
Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0 - 17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	Persen (%)		N/A
Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun	Persen (%)		100
Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Skor		60 BP
Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Kebijakan		10
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN				
Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya	Total pendapatan asli daerah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	Persen (%)	1,86	10,22 – 11,10
Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	Persen (%)	0,45	8,40 - 8,88

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya				
Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Persen (%)	20,91	61,61 -62,34
Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga	Persen (%)		30
Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik	Persen (%)	100	60
Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi	Persentase pengguna internet	Persen (%)		82,30
Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan risiko di antara para pihak (Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur)	Proyek		1

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Proyek		20
Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi	Rupiah		130,8 miliar rupiah
Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	YA/ TIDAK		5

BAB. VII

P E N U T U P

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang dijabarkan dari Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2025, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo 2025-2045, sebagai sebuah keselerasan rencana pembangunan nasional.

Selanjutnya RKPD Kota Palopo akan menjadi landasan, pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Eksekutif dan Legislatif, yang semuanya selanjutnya aka menjadi dasar penyusunan RAPBD. RKPD juga akan menjadi acuan/pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi serta penyelenggaraan urusan pemerintahan. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi rencana kerangka ekonomi daerah, program prioritas perangkat daerah, kerangka pagu indikatif dan prakiraan maju.

Kemudian untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi yang menempatkan RKPD sebagai salah satu instrumen referensinya. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Penekanan lain dalam RKPD 2025 yang sama pentingnya adalah pemenuhan dan optimalisasi pencapaian dan penganggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik cakupan maupun ketepatan sasaran, sehingga mampu bersinergi dengan upaya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, terutama dalam aspek meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin. Termasuk penanganan isu-isu sectoral atas dinamika persoalan pembangunan daerah, regional dan nasional dan bersifat strategis seperti isu penanganan stunting, inflasi, banjir/genangan, kumuh,sanitasi, dan sectoral lain yang terkait pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan namun berkontribusi bagi penanganan climate change yang terimplementasi dalam economic circular.

Pelaksanaan atau implementasi rencana kerja pemerintah daerah ini tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Palopo. Rasionalisasi pada target kinerja terhadap kemampuan keuangan daerah adalah pendekatan yang akan dipakai selanjutnya untuk memastikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Palopo membiayai pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2025.

Olehnya untuk melaksanakan dan mengimplementasikan substansi RKPD ini, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan RKPD 2025 Kota Palopo sebagai berikut :

1. Untuk menjaga konsistensi, keselerasan, dan sinergitas perencanaan pembangunan baik pusat, regional dan local, RKPD ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, termasuk sinergitas terhadap proses penganggaran dalam bentuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai dasar penyusunan RAPBD.
2. RKPD juga akan menjadi referensi dalam penyusunan RAPBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD dan juga sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
3. Konsistensi, keselerasan dan sinergitas sebagaimana butir 1, adalah memastikan adanya hubungan keterkaitan antara perencanaan pada tingkat perangkat daerah, tingkat Kota dengan perencanaan regional (RKPD Sulsel) maupun nasional (RKP 2025) yang dilakukan melalui serangkaian upaya asistensi dan verifikasi terhadap dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada kepala dan wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.
6. Sebagai bentuk transparansi ke public, dokumen RKPD ini akan dipublikasikan agar semua pihak bisa mengetahui dan memahaminya serta berperan dan bertanggung jawab dalam melaksanakannya sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan.

7. Perangkat Daerah dan masyarakat termasuk di dalamnya dunia usaha berkewajiban untuk mendukung dan berpartisipasi dalam implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di RKPD Tahun 2025 dengan sebaik baiknya

Sebagai rencana tindak lanjut dalam rangka memastikan adanya kesinambungan, keselarasan, dalam perencanaan pembangunan Bappeda Kota Palopo harus berupaya melakukan upaya penjaminan konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan dokumen Perencanaan Pemerintah Kota Palopo, melalui serangkian upaya verifikasi dokren perencanaan.

7.2. Kesimpulan

1. RKPD Kota Palopo Tahun 2025 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, usulan Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunan lainnya.
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran.(PPA)
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2025 yaitu : “Peningkatan Ekonomi Daerah Berdaya Saing dan Berkelanjutan” sehingga program kegiatan di masing-masing Perangkat daerah mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.
4. RKPD Kota Palopo Tahun 2025, pelaksanaannya harus bersinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional dengan tetap memperhitungkan potensi dan keuangan daerah. Termasuk pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.
5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Pj. WALI KOTA PALOPO,

ASRUL SANI